SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 227);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 229);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang meliputi :
   a. Laporan Realisasi Anggaran;
   b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   c. Neraca;
   d. Laporan Operasional;
   e. Laporan Perubahan Ekuitas;
   f. Laporan Arus Kas; dan
   g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a.	pendapatan-LRA	Rp. 1.195.824.688.264,57		
b.	belanja	Rp.(1.248.759.410.799,08)		
	surplus/(defisit)		Rp.	(52.934.722.534,51)
c.	pembiayaan			
	- penerimaan	Rp. 94.964.692.402,65		
	- pengeluaran	Rp. (3.025.000.000,00)		
	pembiayaan neto		Rp.	91.939.692.402,65
d.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		Rp.	39.004.969.868,14

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(64.382.172.709,43) dengan rincian sebagai berikut :

1.	anggaran pendapatan-LRA	Rp. 1.260.206.860.974,00
2.	realisasi	Rp. 1.195.824.688.264,57
	selisih lebih/(kurang)	Rp. (64.382.172.709,43)

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.103.387.142.577,92 dengan rincian sebagai berikut :

1.	anggaran belanja	Rp. 1.352.146.553.377,00
2.	realisasi	Rp. 1.248.759.410.799,08
	selisih lebih/(kurang)	Rp. 103.387.142.577,92

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(39.004.969.868,49) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran surplus/defisit	Rp.	(91.939.692.403,00)
2. realisasi	Rp.	(52.934.722.534,51)
selisih lebih/(kurang)	Rp.	(39.004.969.868,49)

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (0,35) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran penerimaan pembiayaan	Rp.	94.964.692.403,00
2. realisasi	Rp.	94.964.692.402,65
selisih lebih/(kurang)	Rp.	(0,35)

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp.	3.025.000.000,00
2. realisasi	Rp.	3.025.000.000,00
selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. (0,35) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pembiayan neto	Rp.	91.939.692.403,00
2. realisasi	Rp.	91.939.692.402,65
selisih lebih/(kurang)	Rp.	(0,35)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.	saldo anggaran lebih awal	Rp.	94.964.692.402,65
b.	penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp.	(94.964.692.402,65)
c.	sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran	Rp.	39.004.969.868,14
d.	koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp.	0,00
e.	saldo anggaran lebih akhir	Rp.	39.004.969.868,14

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a.	jumlah aset	Rp.	1.740.413.199.648,87
b.	jumlah kewajiban	Rp.	21.747.196.962,56
c.	jumlah ekuitas dana	Rp.	1.718.666.002.686,31

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a.	surplus/defisit kegiatan operasional		
	- pendapatan-LO	Rp.	1.068.516.395.883,09
	- beban operasi	Rp.	(1.088.348.841.472,01)
	surplus/defisit kegiatan operasional	Rp.	(19.832.445.588,92)
b.	surplus/defisit kegiatan non operasional	Rp.	(2.434.800,67)
c.	pos luar biasa	Rp.	(2.254.610.365,00)
d.	surplus/defisit-LO	Rp.	22.089.490.754,59

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.	saldo awal kas per 1 Januari tahun 2024	Rp.	94.943.343.658,65
b.	arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	77.232.261.906,37
c.	arus kas dari aktivitas investasi	Rp.	(133.191.984.440,88)
d.	arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	(0,00)
e.	arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	21.348.744,00
f.	saldo akhir kas di BUD/Kas Daerah	Rp.	39.004.969.868,14
g.	saldo akhir kas di bendahara pengeluaran	Rp.	0,00
h.	saldo akhir kas lainnya di bendahara pengeluaran	Rp.	28.796.371,00
i.	saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp.	0,00
j.	saldo akhir kas per 31 Desember Tahun 2024	Rp.	39.033.766.239,14

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a.	ekuitas awal per 1 Januari 2024	Rp.	2.059.931.292.564,83
b.	surplus/defisit-LO	Rp.	(22.089.490.754,59)
c.	koreksi ekuitas akibat perubahan kebijakan akuntansi	Rp.	0,00
d.	koreksi ekuitas lainnya	Rp.	(319.175.799.123,93)
e.	ekuitas akhir per 31 Desember 2024	Rp.	1.718.666.002.686,31

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas :
Lampiran I.1	:	Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran I.2	:	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Lampiran I.3	:	Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b. Lampiran II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
c. Lampiran III	:	Laporan Operasional
d. Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas
e. Lampiran V	:	Neraca
f. Lampiran VI	:	Laporan Arus Kas
g. Lampiran VII	:	Catatan atas Laporan Keuangan
h. Lampiran VIII	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
i. Lampiran IX	:	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
j. Lampiran X	:	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
k. Lampiran XI	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
l. Lampiran XII	:	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
m.Lampiran XIII	:	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
n. Lampiran XIV	:	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
o. Lampiran XV	:	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
p. Lampiran XVI	:	Daftar Dana Cadangan Daerah
q. Lampiran XVII	:	Daftar Kewajiban Jangka Pendek
r. Lampiran XVIII	:	Daftar Kewajiban Jangka Panjang
s. Lampiran XIX	:	Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran dan Dianggarkan Kembali Dalam

Tahun Anggaran Berikutnya

t. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Perusahaan Daerah;

u. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 : (2-98/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Lampiran I: Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang: Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

No. Rek.	URAIAN	Reff. CaLK	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
4	**PENDAPATAN - LRA**	**5.1.1**	**1.260.206.860.974,00**	**1.195.824.688.264,57**	**94,89**	**1.192.110.715.857,23**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA**	**5.1.1.1**	**98.379.074.374,00**	**100.411.235.107,57**	**102,07**	**85.084.763.844,23**
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.1	29.848.000.000,00	21.620.031.867,80	72,43	20.491.410.869,13
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.2	52.506.397.374,00	60.628.636.118,00	115,47	3.320.064.213,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.1.3	11.964.954.000,00	11.964.954.686,50	100,00	11.409.321.078,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.1.1.4	4.059.723.000,00	6.197.612.435,27	152,66	49.863.967.684,10
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER - LRA**	**5.1.1.2**	**1.148.501.149.600,00**	**1.083.304.010.242,00**	**94,32**	**1.094.557.567.445,00**
4.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Umum - LRA**	**5.1.1.2.1**	**670.847.210.000,00**	**670.385.965.970,00**	**99,93**	**614.827.177.235,00**
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.1.1	8.916.292.000,00	10.879.478.890,00	122,02	11.853.447.510,00
4.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	5.1.1.2.1.2	3.461.636.000,00	4.151.779.000,00	119,94	4.423.542.725,00
4.2.1.3	Dana Bagi Hasil Lainnya - LRA	5.1.1.2.1.3	7.520.542.000,00	7.520.542.000,00	100,00	8.513.744.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	5.1.1.2.1.4	650.948.740.000,00	647.834.166.080,00	99,52	590.036.443.000,00
4.2.2	**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Khusus - LRA**	**5.1.1.2.2**	**253.319.041.000,00**	**223.711.106.827,00**	**88,31**	**267.766.001.163,00**
4.2.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik - LRA		83.783.162.000,00	64.141.894.493,00	76,56	97.765.061.442,00
4.2.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LRA		169.535.879.000,00	159.569.212.334,00	94,12	170.000.939.721,00
4.2.3	**Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA**	**5.1.1.2.3**	**151.727.984.000,00**	**151.727.984.000,00**	**100,00**	**168.896.352.200,00**
4.2.3.2	Pendapatan Dana Insentif Fiskal - LRA		15.166.908.000,00	15.166.908.000,00	100,00	33.666.172.000,00
4.2.3.3	Pendapatan Transfer Dana Desa - LRA		136.561.076.000,00	136.561.076.000,00	100,00	135.230.180.200,00
4.2.4	**Transfer Pemerintah Provinsi - LRA**	**5.1.1.2.4**	**72.606.914.600,00**	**37.478.953.445,00**	**51,62**	**43.068.036.847,00**
4.2.4.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.4.1	70.821.914.600,00	37.478.953.445,00	52,92	42.102.238.300,00
4.2.4.2	Bantuan Keuangan Khusus - LRA	5.1.1.2.4.2	1.785.000.000,00	-	-	965.798.547,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA**	**5.1.1.3**	**13.326.637.000,00**	**12.109.442.915,00**	**90,87**	**12.468.384.568,00**
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	5.1.1.3.1	-	-	-	-
4.3.3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	5.1.1.3.2	13.326.637.000,00	12.109.442.915,00	90,87	12.468.384.568,00
5	**BELANJA**	**5.1.2**	**1.352.146.553.377,00**	**1.248.759.410.799,08**	**92,35**	**1.236.219.013.955,50**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**5.1.2.1**	**998.719.782.947,00**	**909.963.663.123,20**	**91,11**	**844.293.304.487,73**
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	566.654.562.335,00	526.617.182.736,00	92,93	455.914.059.535,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	385.664.651.612,00	338.089.506.105,20	87,66	356.743.301.652,73
5.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	46.400.569.000,00	45.256.974.282,00	97,54	30.153.343.300,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	-	-	-	1.482.600.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**5.1.2.2**	**144.429.549.430,00**	**130.216.588.940,88**	**90,16**	**187.745.257.267,77**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	-	-	-	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	20.008.291.934,00	17.448.098.019,00	87,20	33.247.679.146,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	30.766.834.341,00	22.220.323.063,00	72,22	42.398.764.060,35
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.1.2.2.4	85.768.317.735,00	82.813.149.768,88	96,55	104.191.838.531,42
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	7.884.105.420,00	7.733.870.580,00	98,09	7.906.975.530,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	2.000.000,00	1.147.510,00	57,38	-
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**5.1.2.3**	**4.000.000.000,00**	**3.581.937.735,00**	**89,55**	**4.700.424.800,00**
5.3.1	Belanja Tak Terduga		4.000.000.000,00	3.581.937.735,00	89,55	4.700.424.800,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**5.1.2.4**	**204.997.221.000,00**	**204.997.221.000,00**	**100,00**	**199.480.027.400,00**
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Pemerintahan Desa		2.170.000.000,00	2.170.000.000,00	100,00	1.961.800.000,00
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan		202.827.221.000,00	202.827.221.000,00	100,00	197.518.227.400,00
5.4.2.1	*Transfer Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa*		*66.266.145.000,00*	*66.266.145.000,00*	*100,00*	*62.288.047.200,00*
5.4.2.2	*Transfer Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa*		*136.561.076.000,00*	*136.561.076.000,00*	*100,00*	*135.230.180.200,00*
	SURPLUS / (DEFISIT)	**5.1.3**	**(91.939.692.403,00)**	**(52.934.722.534,51)**	**57,58**	**(44.108.298.098,27)**

Nomor Rek.	URAIAN	Reff. CaLK	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
6	**PEMBIAYAAN**	5.1.4				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	5.1.4.1	**94.964.692.403,00**	**94.964.692.402,65**	**100,00**	**142.072.990.500,92**
6.1.1	Penggunaan SiLPA Tahun Lalu	5.1.4.1.1	94.964.692.403,00	94.964.692.402,65	100,00	142.072.990.500,92
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	5.1.4.2	**3.025.000.000,00**	**3.025.000.000,00**	**100,00**	**3.000.000.000,00**
6.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.4.2.1	3.025.000.000,00	3.025.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO		**91.939.692.403,00**	**91.939.692.402,65**	**100,00**	**139.072.990.500,92**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.5	-	**39.004.969.868,14**	∞	**94.964.692.402,65**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN PAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.1 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGRAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2024

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
		4	Pendapatan	1.260.206.860.974,00	1.195.824.688.264,57	(64.382.172.709,43)	94,89
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	49.977.397.374,00	58.477.973.993,00	8.500.576.619,00	117,01
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	49.327.397.374,00	58.065.613.993,00	8.738.216.619,00	117,71
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	750.000.000,00	998.614.229,00	248.614.229,00	133,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	750.000.000,00	998.614.229,00	248.614.229,00	133,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	750.000.000,00	998.614.229,00	248.614.229,00	133,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	750.000.000,00	998.614.229,00	248.614.229,00	133,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		Uptd Rumah Sakit Umum Sidikalang	48.577.397.374,00	57.066.999.764,00	8.489.602.390,00	117,48
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	48.577.397.374,00	57.066.999.764,00	8.489.602.390,00	117,48
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	48.577.397.374,00	57.066.999.764,00	8.489.602.390,00	117,48
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1.02	Retribusi Daerah	48.577.397.374,00	57.066.999.764,00	8.489.602.390,00	117,48
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	650.000.000,00	412.360.000,00	(237.640.000,00)	63,44
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	650.000.000,00	412.360.000,00	(237.640.000,00)	63,44
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	650.000.000,00	412.360.000,00	(237.640.000,00)	63,44
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	650.000.000,00	412.360.000,00	(237.640.000,00)	63,44
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	650.000.000,00	412.360.000,00	(237.640.000,00)	63,44
2			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.514.000.000,00	2.141.662.125,00	(372.337.875,00)	85,19
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	140.000.000,00	30.695.375,00	(109.304.625,00)	21,93
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	140.000.000,00	30.695.375,00	(109.304.625,00)	21,93
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	140.000.000,00	30.695.375,00	(109.304.625,00)	21,93
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	140.000.000,00	30.695.375,00	(109.304.625,00)	21,93
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	140.000.000,00	30.695.375,00	(109.304.625,00)	21,93

1			2	3	4	5	6
2.19			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**1.000.000.000,00**	**689.007.000,00**	**(310.993.000,00)**	**68,90**
2.19	2.19.2.22.3.26.01.0000		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1.000.000.000,00	689.007.000,00	(310.993.000,00)	68,90
2.19	2.19.2.22.3.26.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.000.000.000,00	689.007.000,00	(310.993.000,00)	68,90
2.19	2.19.2.22.3.26.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.000.000.000,00	689.007.000,00	(310.993.000,00)	68,90
2.19	2.19.2.22.3.26.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	1.000.000.000,00	689.007.000,00	(310.993.000,00)	68,90
2.07			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**500.000.000,00**	**531.257.750,00**	**31.257.750,00**	**106,25**
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	500.000.000,00	531.257.750,00	31.257.750,00	106,25
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	500.000.000,00	531.257.750,00	31.257.750,00	106,25
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500.000.000,00	531.257.750,00	31.257.750,00	106,25
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	500.000.000,00	531.257.750,00	31.257.750,00	106,25
2.11			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**607.000.000,00**	**631.202.000,00**	**24.202.000,00**	**103,99**
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup	607.000.000,00	631.202.000,00	24.202.000,00	103,99
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	607.000.000,00	631.202.000,00	24.202.000,00	103,99
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	607.000.000,00	631.202.000,00	24.202.000,00	103,99
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	607.000.000,00	631.202.000,00	24.202.000,00	103,99
2.15			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**267.000.000,00**	**259.500.000,00**	**(7.500.000,00)**	**97,19**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	267.000.000,00	259.500.000,00	(7.500.000,00)	97,19
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	267.000.000,00	259.500.000,00	(7.500.000,00)	97,19
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	267.000.000,00	259.500.000,00	(7.500.000,00)	97,19
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	267.000.000,00	259.500.000,00	(7.500.000,00)	97,19
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**15.000.000,00**	**9.000.000,00**	**(6.000.000,00)**	**60,00**
4.01			**SEKRETARIAT DAERAH**	**15.000.000,00**	**9.000.000,00**	**(6.000.000,00)**	**60,00**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat Daerah	15.000.000,00	9.000.000,00	(6.000.000,00)	60,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	15.000.000,00	9.000.000,00	(6.000.000,00)	60,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.000.000,00	9.000.000,00	(6.000.000,00)	60,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	15.000.000,00	9.000.000,00	(6.000.000,00)	60,00
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**1.207.700.463.600,00**	**1.135.196.052.146,57**	**(72.504.411.453,43)**	**94,00**
5.02			**KEUANGAN**	**1.207.700.463.600,00**	**1.135.196.052.146,57**	**(72.504.411.453,43)**	**94,00**
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.177.852.463.600,00	1.113.440.919.652,77	(64.411.543.947,23)	94,53
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.177.852.463.600,00	1.113.440.919.652,77	(64.411.543.947,23)	94,53
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.024.677.000,00	18.027.466.495,77	2.002.789.495,77	112,50
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.964.954.000,00	11.964.954.686,50	686,50	100,00

1			2	3	4	5	6
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.059.723.000,00	6.062.511.809,27	2.002.788.809,27	149,33
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.148.501.149.600,00	1.083.304.010.242,00	(65.197.139.358,00)	94,32
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.075.894.235.000,00	1.045.825.056.797,00	(30.069.178.203,00)	97,21
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.606.914.600,00	37.478.953.445,00	(35.127.961.155,00)	51,62
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.326.637.000,00	12.109.442.915,00	(1.217.194.085,00)	90,87
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.326.637.000,00	12.109.442.915,00	(1.217.194.085,00)	90,87
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000		Badan Pendapatan Daerah	29.848.000.000,00	21.755.132.493,80	(8.092.867.506,20)	72,89
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	29.848.000.000,00	21.755.132.493,80	(8.092.867.506,20)	72,89
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	29.848.000.000,00	21.755.132.493,80	(8.092.867.506,20)	72,89
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.1.01	Pajak Daerah	29.848.000.000,00	21.620.031.867,80	(8.227.968.132,20)	72,43
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	135.100.626,00	135.100.626,00	0,00
		5	**Belanja**	**1.352.146.553.377,00**	**1.248.759.410.799,08**	**(103.387.142.577,92)**	**92,35**
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**823.622.915.730,00**	**754.214.887.238,08**	**(69.408.028.491,92)**	**91,57**
1.01			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**435.606.547.381,00**	**400.852.075.192,20**	**(34.754.472.188,80)**	**92,02**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan	435.606.547.381,00	400.852.075.192,20	(34.754.472.188,80)	92,02
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	435.606.547.381,00	400.852.075.192,20	(34.754.472.188,80)	92,02
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	400.376.507.000,00	372.650.823.813,20	(27.725.683.186,80)	93,08
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	342.025.748.221,00	317.053.191.723,00	(24.972.556.498,00)	92,70
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.086.788.779,00	53.550.451.790,20	(2.536.336.988,80)	95,48
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	2.263.970.000,00	2.047.180.300,00	(216.789.700,00)	90,42
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	35.230.040.381,00	28.201.251.379,00	(7.028.789.002,00)	80,05
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.195.730.465,00	4.416.532.099,00	(779.198.366,00)	85,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.365.804.496,00	16.116.248.700,00	(6.249.555.796,00)	72,06
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.668.505.420,00	7.668.470.580,00	(34.840,00)	100,00
1.02			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**244.559.239.292,00**	**216.955.358.696,00**	**(27.603.880.596,00)**	**88,71**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	165.169.432.959,00	150.328.913.131,00	(14.840.519.828,00)	91,01
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	165.169.432.959,00	150.328.913.131,00	(14.840.519.828,00)	91,01
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	157.898.641.072,00	143.217.137.326,00	(14.681.503.746,00)	90,70
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	86.956.405.208,00	82.031.556.371,00	(4.924.848.837,00)	94,34
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.792.235.864,00	61.185.580.955,00	(9.606.654.909,00)	86,43
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	7.270.791.887,00	7.111.775.805,00	(159.016.082,00)	97,81
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.648.080.600,00	4.515.773.000,00	(132.307.600,00)	97,15

1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.522.656.087,00	2.496.102.805,00	(26.553.282,00)	98,95
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.055.200,00	99.900.000,00	(155.200,00)	99,84
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		Uptd Rumah Sakit Umum Sidikalang	79.389.806.333,00	66.626.445.565,00	(12.763.360.768,00)	83,92
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	79.389.806.333,00	66.626.445.565,00	(12.763.360.768,00)	83,92
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	72.089.806.333,00	60.498.663.655,00	(11.591.142.678,00)	83,92
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	284.104.920,00	258.011.792,00	(26.093.128,00)	90,82
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.805.701.413,00	60.240.651.863,00	(11.565.049.550,00)	83,89
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	7.300.000.000,00	6.127.781.910,00	(1.172.218.090,00)	83,94
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.300.000.000,00	5.227.715.860,00	(1.072.284.140,00)	82,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.000.000.000,00	900.066.050,00	(99.933.950,00)	90,01
1.03			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**115.253.133.100,00**	**110.815.011.184,88**	**(4.438.121.915,12)**	**96,15**
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	115.253.133.100,00	110.815.011.184,88	(4.438.121.915,12)	96,15
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5	BELANJA DAERAH	115.253.133.100,00	110.815.011.184,88	(4.438.121.915,12)	96,15
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	37.633.051.799,00	35.946.739.116,00	(1.686.312.683,00)	95,52
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.279.232.550,00	6.976.805.273,00	(302.427.277,00)	95,85
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.353.819.249,00	28.969.933.843,00	(1.383.885.406,00)	95,44
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	77.620.081.301,00	74.868.272.068,88	(2.751.809.232,12)	96,45
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.480.000,00	44.000.000,00	(480.000,00)	98,92
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.575.601.301,00	74.824.272.068,88	(2.751.329.232,12)	96,45
1.04			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**5.662.864.450,00**	**5.601.614.800,00**	**(61.249.650,00)**	**98,92**
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5.662.864.450,00	5.601.614.800,00	(61.249.650,00)	98,92
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.662.864.450,00	5.601.614.800,00	(61.249.650,00)	98,92
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	461.764.450,00	450.227.100,00	(11.537.350,00)	97,50
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	13.260.000,00	13.260.000,00	0,00	100,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	448.504.450,00	436.967.100,00	(11.537.350,00)	97,43
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	5.201.100.000,00	5.151.387.700,00	(49.712.300,00)	99,04
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.201.100.000,00	5.151.387.700,00	(49.712.300,00)	99,04
1.05			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**16.258.446.527,00**	**15.168.912.276,00**	**(1.089.534.251,00)**	**93,30**
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		Satuan Polisi Pamong Praja	7.570.544.090,00	7.164.126.556,00	(406.417.534,00)	94,63
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.570.544.090,00	7.164.126.556,00	(406.417.534,00)	94,63
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.438.787.440,00	7.044.192.706,00	(394.594.734,00)	94,70
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.142.294.987,00	2.964.181.613,00	(178.113.374,00)	94,33

1			2	3	4	5	6
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.296.492.453,00	4.080.011.093,00	(216.481.360,00)	94,96
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	131.756.650,00	119.933.850,00	(11.822.800,00)	91,03
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.756.650,00	119.933.850,00	(11.822.800,00)	91,03
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.687.902.437,00	8.004.785.720,00	(683.116.717,00)	92,14
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	8.687.902.437,00	8.004.785.720,00	(683.116.717,00)	92,14
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.625.290.437,00	7.942.445.720,00	(682.844.717,00)	92,08
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.587.274.149,00	2.380.816.584,00	(206.457.565,00)	92,02
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.038.016.288,00	5.561.629.136,00	(476.387.152,00)	92,11
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	62.612.000,00	62.340.000,00	(272.000,00)	99,57
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.612.000,00	62.340.000,00	(272.000,00)	99,57
1.06			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**6.282.684.980,00**	**4.821.915.089,00**	**(1.460.769.891,00)**	**76,75**
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000		Dinas Sosial	6.282.684.980,00	4.821.915.089,00	(1.460.769.891,00)	76,75
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.282.684.980,00	4.821.915.089,00	(1.460.769.891,00)	76,75
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.282.684.980,00	4.821.915.089,00	(1.460.769.891,00)	76,75
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.280.982.544,00	2.114.891.479,00	(166.091.065,00)	92,72
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.761.702.436,00	2.517.322.810,00	(1.244.379.626,00)	66,92
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	240.000.000,00	189.700.800,00	(50.299.200,00)	79,04
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**89.173.333.158,00**	**77.539.627.279,00**	**(11.633.705.879,00)**	**86,95**
2.07			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**428.937.000,00**	**203.716.000,00**	**(225.221.000,00)**	**47,49**
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	428.937.000,00	203.716.000,00	(225.221.000,00)	47,49
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	428.937.000,00	203.716.000,00	(225.221.000,00)	47,49
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	428.937.000,00	203.716.000,00	(225.221.000,00)	47,49
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	428.937.000,00	203.716.000,00	(225.221.000,00)	47,49
2.08			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**3.916.691.623,00**	**3.680.462.720,00**	**(236.228.903,00)**	**93,97**
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.916.691.623,00	3.680.462.720,00	(236.228.903,00)	93,97
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.916.691.623,00	3.680.462.720,00	(236.228.903,00)	93,97
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.916.691.623,00	3.680.462.720,00	(236.228.903,00)	93,97
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.079.254.216,00	2.919.613.277,00	(159.640.939,00)	94,82
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	837.437.407,00	760.849.443,00	(76.587.964,00)	90,85
2.09			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**15.616.216.096,00**	**14.703.752.241,00**	**(912.463.855,00)**	**94,16**
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	15.616.216.096,00	14.703.752.241,00	(912.463.855,00)	94,16
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	5	BELANJA DAERAH	15.616.216.096,00	14.703.752.241,00	(912.463.855,00)	94,16

1			2	3	4	5	6
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	15.616.216.096,00	14.703.752.241,00	(912.463.855,00)	94,16
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	12.425.593.950,00	11.602.648.032,00	(822.945.918,00)	93,38
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.190.622.146,00	3.101.104.209,00	(89.517.937,00)	97,19
2.10			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**114.170.000,00**	**113.920.000,00**	**(250.000,00)**	**99,78**
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	114.170.000,00	113.920.000,00	(250.000,00)	99,78
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	5	BELANJA DAERAH	114.170.000,00	113.920.000,00	(250.000,00)	99,78
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	14.170.000,00	14.170.000,00	0,00	100,00
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.170.000,00	14.170.000,00	0,00	100,00
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.750.000,00	(250.000,00)	99,75
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.750.000,00	(250.000,00)	99,75
2.11			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**14.710.623.587,00**	**10.480.390.051,00**	**(4.230.233.536,00)**	**71,24**
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup	14.710.623.587,00	10.480.390.051,00	(4.230.233.536,00)	71,24
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	14.710.623.587,00	10.480.390.051,00	(4.230.233.536,00)	71,24
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	13.339.132.187,00	9.119.842.551,00	(4.219.289.636,00)	68,37
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.679.387.528,00	2.445.203.784,00	(234.183.744,00)	91,26
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.659.744.659,00	6.674.638.767,00	(3.985.105.892,00)	62,62
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.371.491.400,00	1.360.547.500,00	(10.943.900,00)	99,20
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.271.491.400,00	1.260.714.000,00	(10.777.400,00)	99,15
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.833.500,00	(166.500,00)	99,83
2.12			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**6.481.782.063,00**	**6.150.712.465,00**	**(331.069.598,00)**	**94,89**
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.481.782.063,00	6.150.712.465,00	(331.069.598,00)	94,89
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.481.782.063,00	6.150.712.465,00	(331.069.598,00)	94,89
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.412.382.063,00	6.082.212.465,00	(330.169.598,00)	94,85
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.102.300.242,00	3.879.898.617,00	(222.401.625,00)	94,58
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.310.081.821,00	2.202.313.848,00	(107.767.973,00)	95,33
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	69.400.000,00	68.500.000,00	(900.000,00)	98,70
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.400.000,00	68.500.000,00	(900.000,00)	98,70
2.13			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**6.861.543.761,00**	**6.469.658.513,00**	**(391.885.248,00)**	**94,29**
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.861.543.761,00	6.469.658.513,00	(391.885.248,00)	94,29
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.861.543.761,00	6.469.658.513,00	(391.885.248,00)	94,29
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.861.543.761,00	6.469.658.513,00	(391.885.248,00)	94,29
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.706.181.257,00	2.543.001.214,00	(163.180.043,00)	93,97
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.155.362.504,00	3.926.657.299,00	(228.705.205,00)	94,50

1			2	3	4	5	6
2.14			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**7.402.423.870,00**	**4.910.910.150,00**	**(2.491.513.720,00)**	**66,34**
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.402.423.870,00	4.910.910.150,00	(2.491.513.720,00)	66,34
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.402.423.870,00	4.910.910.150,00	(2.491.513.720,00)	66,34
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.402.423.870,00	4.910.910.150,00	(2.491.513.720,00)	66,34
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.402.423.870,00	4.910.910.150,00	(2.491.513.720,00)	66,34
2.15			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**4.399.944.974,00**	**4.217.932.053,00**	**(182.012.921,00)**	**95,86**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	4.399.944.974,00	4.217.932.053,00	(182.012.921,00)	95,86
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.399.944.974,00	4.217.932.053,00	(182.012.921,00)	95,86
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.394.378.974,00	4.212.366.053,00	(182.012.921,00)	95,86
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.943.445.046,00	2.773.952.024,00	(169.493.022,00)	94,24
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.450.933.928,00	1.438.414.029,00	(12.519.899,00)	99,14
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	5.566.000,00	5.566.000,00	0,00	100,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.566.000,00	5.566.000,00	0,00	100,00
2.16			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**8.781.001.365,00**	**8.380.082.675,00**	**(400.918.690,00)**	**95,43**
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	8.781.001.365,00	8.380.082.675,00	(400.918.690,00)	95,43
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.781.001.365,00	8.380.082.675,00	(400.918.690,00)	95,43
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.619.136.565,00	8.233.325.165,00	(385.811.400,00)	95,52
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.254.467.829,00	2.059.602.788,00	(194.865.041,00)	91,36
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.364.668.736,00	6.173.722.377,00	(190.946.359,00)	97,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	161.864.800,00	146.757.510,00	(15.107.290,00)	90,67
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	159.864.800,00	145.610.000,00	(14.254.800,00)	91,08
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.000.000,00	1.147.510,00	(852.490,00)	57,38
2.17			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**1.927.372.559,00**	**1.300.215.628,00**	**(627.156.931,00)**	**67,46**
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.927.372.559,00	1.300.215.628,00	(627.156.931,00)	67,46
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.927.372.559,00	1.300.215.628,00	(627.156.931,00)	67,46
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.927.372.559,00	1.300.215.628,00	(627.156.931,00)	67,46
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	14.900.000,00	13.700.000,00	(1.200.000,00)	91,95
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.912.472.559,00	1.286.515.628,00	(625.956.931,00)	67,27
2.18			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**5.041.241.839,00**	**4.793.294.261,00**	**(247.947.578,00)**	**95,08**

1			2	3	4	5	6
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	5.041.241.839,00	4.793.294.261,00	(247.947.578,00)	95,08
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.041.241.839,00	4.793.294.261,00	(247.947.578,00)	95,08
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.041.241.839,00	4.793.294.261,00	(247.947.578,00)	95,08
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.479.219.697,00	3.280.510.382,00	(198.709.315,00)	94,29
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.562.022.142,00	1.512.783.879,00	(49.238.263,00)	96,85
2.19			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**8.244.469.889,00**	**7.645.551.219,00**	**(598.918.670,00)**	**92,74**
2.19	2.19.2.22.3.26.01.0000		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	8.244.469.889,00	7.645.551.219,00	(598.918.670,00)	92,74
2.19	2.19.2.22.3.26.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.244.469.889,00	7.645.551.219,00	(598.918.670,00)	92,74
2.19	2.19.2.22.3.26.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.074.604.889,00	7.614.411.219,00	(460.193.670,00)	94,30
2.19	2.19.2.22.3.26.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.747.382.745,00	3.535.002.243,00	(212.380.502,00)	94,33
2.19	2.19.2.22.3.26.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.427.222.144,00	3.179.408.976,00	(247.813.168,00)	92,77
2.19	2.19.2.22.3.26.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	100,00
2.19	2.19.2.22.3.26.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	169.865.000,00	31.140.000,00	(138.725.000,00)	18,33
2.19	2.19.2.22.3.26.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.665.000,00	31.140.000,00	(37.525.000,00)	45,35
2.19	2.19.2.22.3.26.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	101.200.000,00	0,00	(101.200.000,00)	0,00
2.20			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**44.484.000,00**	**44.280.000,00**	**(204.000,00)**	**99,54**
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	44.484.000,00	44.280.000,00	(204.000,00)	99,54
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	44.484.000,00	44.280.000,00	(204.000,00)	99,54
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	44.484.000,00	44.280.000,00	(204.000,00)	99,54
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.484.000,00	44.280.000,00	(204.000,00)	99,54
2.21			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**49.450.520,00**	**40.398.473,00**	**(9.052.047,00)**	**81,69**
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	49.450.520,00	40.398.473,00	(9.052.047,00)	81,69
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	49.450.520,00	40.398.473,00	(9.052.047,00)	81,69
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	49.450.520,00	40.398.473,00	(9.052.047,00)	81,69
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.450.520,00	40.398.473,00	(9.052.047,00)	81,69
2.22			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**1.681.998.700,00**	**1.277.241.300,00**	**(404.757.400,00)**	**75,94**
2.22	2.19.2.22.3.26.01.0000		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1.681.998.700,00	1.277.241.300,00	(404.757.400,00)	75,94
2.22	2.19.2.22.3.26.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.681.998.700,00	1.277.241.300,00	(404.757.400,00)	75,94
2.22	2.19.2.22.3.26.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.504.511.700,00	1.234.291.300,00	(270.220.400,00)	82,04
2.22	2.19.2.22.3.26.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00
2.22	2.19.2.22.3.26.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.401.411.700,00	1.131.191.300,00	(270.220.400,00)	80,72
2.22	2.19.2.22.3.26.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00

1			2	3	4	5	6
2.22	2.19.2.22.3.26.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	177.487.000,00	42.950.000,00	(134.537.000,00)	24,20
2.22	2.19.2.22.3.26.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.000.000,00	42.950.000,00	(50.000,00)	99,88
2.22	2.19.2.22.3.26.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	134.487.000,00	0,00	(134.487.000,00)	0,00
2.23			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**3.370.981.312,00**	**3.029.693.088,00**	**(341.288.224,00)**	**89,88**
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.370.981.312,00	3.029.693.088,00	(341.288.224,00)	89,88
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.370.981.312,00	3.029.693.088,00	(341.288.224,00)	89,88
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.277.881.312,00	2.936.893.088,00	(340.988.224,00)	89,60
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.278.647.722,00	2.029.577.843,00	(249.069.879,00)	89,07
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.233.590,00	907.315.245,00	(91.918.345,00)	90,80
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	93.100.000,00	92.800.000,00	(300.000,00)	99,68
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.500.000,00	27.400.000,00	(100.000,00)	99,64
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	65.600.000,00	65.400.000,00	(200.000,00)	99,70
2.24			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**100.000.000,00**	**97.416.442,00**	**(2.583.558,00)**	**97,42**
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100.000.000,00	97.416.442,00	(2.583.558,00)	97,42
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	100.000.000,00	97.416.442,00	(2.583.558,00)	97,42
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	97.416.442,00	(2.583.558,00)	97,42
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	97.416.442,00	(2.583.558,00)	97,42
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27.836.696.967,00**	**21.003.482.343,00**	**(6.833.214.624,00)**	**75,45**
3.25			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**567.438.900,00**	**78.512.400,00**	**(488.926.500,00)**	**13,84**
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	567.438.900,00	78.512.400,00	(488.926.500,00)	13,84
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000	5	BELANJA DAERAH	567.438.900,00	78.512.400,00	(488.926.500,00)	13,84
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	567.438.900,00	78.512.400,00	(488.926.500,00)	13,84
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0,00
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	563.938.900,00	78.512.400,00	(485.426.500,00)	13,92
3.26			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**10.835.280.134,00**	**7.941.109.018,00**	**(2.894.171.116,00)**	**73,29**
3.26	2.19.2.22.3.26.01.0000		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	10.835.280.134,00	7.941.109.018,00	(2.894.171.116,00)	73,29
3.26	2.19.2.22.3.26.01.0000	5	BELANJA DAERAH	10.835.280.134,00	7.941.109.018,00	(2.894.171.116,00)	73,29
3.26	2.19.2.22.3.26.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.296.706.250,00	6.866.397.484,00	(430.308.766,00)	94,10
3.26	2.19.2.22.3.26.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.210.000,00	0,00	(1.210.000,00)	0,00
3.26	2.19.2.22.3.26.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.299.496.250,00	2.870.397.484,00	(429.098.766,00)	87,00
3.26	2.19.2.22.3.26.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	3.996.000.000,00	3.996.000.000,00	0,00	100,00
3.26	2.19.2.22.3.26.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.538.573.884,00	1.074.711.534,00	(2.463.862.350,00)	30,37
3.26	2.19.2.22.3.26.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	336.000.000,00	31.125.000,00	(304.875.000,00)	9,26
3.26	2.19.2.22.3.26.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.901.427.284,00	1.043.586.534,00	(1.857.840.750,00)	35,97

1			2	3	4	5	6
3.26	2.19.2.22.3.26.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	151.146.600,00	0,00	(151.146.600,00)	0,00
3.26	2.19.2.22.3.26.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	0,00
3.27			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**7.670.940.954,00**	**6.958.493.720,00**	**(712.447.234,00)**	**90,71**
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	7.670.940.954,00	6.958.493.720,00	(712.447.234,00)	90,71
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.670.940.954,00	6.958.493.720,00	(712.447.234,00)	90,71
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.930.526.320,00	4.220.903.720,00	(709.622.600,00)	85,61
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	11.930.000,00	11.930.000,00	0,00	100,00
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.918.596.320,00	4.208.973.720,00	(709.622.600,00)	85,57
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.740.414.634,00	2.737.590.000,00	(2.824.634,00)	99,90
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.740.414.634,00	2.737.590.000,00	(2.824.634,00)	99,90
3.30			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**590.288.108,00**	**496.033.277,00**	**(94.254.831,00)**	**84,03**
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	590.288.108,00	496.033.277,00	(94.254.831,00)	84,03
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5	BELANJA DAERAH	590.288.108,00	496.033.277,00	(94.254.831,00)	84,03
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	419.762.108,00	325.733.277,00	(94.028.831,00)	77,60
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	100,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	414.922.108,00	320.893.277,00	(94.028.831,00)	77,34
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	170.526.000,00	170.300.000,00	(226.000,00)	99,87
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	170.526.000,00	170.300.000,00	(226.000,00)	99,87
3.31			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**8.172.748.871,00**	**5.529.333.928,00**	**(2.643.414.943,00)**	**67,66**
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.172.748.871,00	5.529.333.928,00	(2.643.414.943,00)	67,66
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.172.748.871,00	5.529.333.928,00	(2.643.414.943,00)	67,66
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.026.213.397,00	4.483.598.454,00	(2.542.614.943,00)	63,81
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.276.551.947,00	3.089.854.119,00	(186.697.828,00)	94,30
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.749.661.450,00	1.393.744.335,00	(2.355.917.115,00)	37,17
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.146.535.474,00	1.045.735.474,00	(100.800.000,00)	91,21
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.600.000,00	0,00	(24.600.000,00)	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.121.935.474,00	1.045.735.474,00	(76.200.000,00)	93,21
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**87.818.699.098,00**	**79.685.880.791,00**	**(8.132.818.307,00)**	**90,74**
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	41.280.251.252,00	36.511.751.594,00	(4.768.499.658,00)	88,45
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat Daerah	41.280.251.252,00	36.511.751.594,00	(4.768.499.658,00)	88,45
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	41.280.251.252,00	36.511.751.594,00	(4.768.499.658,00)	88,45
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	41.082.070.382,00	36.379.232.144,00	(4.702.838.238,00)	88,55
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	13.683.302.799,00	12.195.360.024,00	(1.487.942.775,00)	89,13
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.398.767.583,00	24.183.872.120,00	(3.214.895.463,00)	88,27

1			2	3	4	5	6
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	198.180.870,00	132.519.450,00	(65.661.420,00)	66,87
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	198.180.870,00	132.519.450,00	(65.661.420,00)	66,87
4.02			SEKRETARIAT DPRD	46.538.447.846,00	43.174.129.197,00	(3.364.318.649,00)	92,77
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat DPRD	46.538.447.846,00	43.174.129.197,00	(3.364.318.649,00)	92,77
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	46.538.447.846,00	43.174.129.197,00	(3.364.318.649,00)	92,77
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	45.828.089.026,00	42.518.649.197,00	(3.309.439.829,00)	92,78
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	18.505.270.461,00	17.463.580.869,00	(1.041.689.592,00)	94,37
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.322.818.565,00	25.055.068.328,00	(2.267.750.237,00)	91,70
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	710.358.820,00	655.480.000,00	(54.878.820,00)	92,27
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	520.160.820,00	465.380.000,00	(54.780.820,00)	89,47
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	190.198.000,00	190.100.000,00	(98.000,00)	99,95
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**236.371.483.932,00**	**233.568.636.006,00**	**(2.802.847.926,00)**	**98,81**
5.01			**PERENCANAAN**	**5.980.369.770,00**	**5.490.556.526,00**	**(489.813.244,00)**	**91,81**
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	5.980.369.770,00	5.490.556.526,00	(489.813.244,00)	91,81
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.980.369.770,00	5.490.556.526,00	(489.813.244,00)	91,81
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.980.369.770,00	5.490.556.526,00	(489.813.244,00)	91,81
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.561.722.440,00	3.290.923.204,00	(270.799.236,00)	92,40
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.418.647.330,00	2.199.633.322,00	(219.014.008,00)	90,94
5.02			**KEUANGAN**	**224.955.359.349,00**	**223.764.503.461,00**	**(1.190.855.888,00)**	**99,47**
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan Keuangan dan Aset Daerah	219.142.436.712,00	218.170.281.431,00	(972.155.281,00)	99,56
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	219.142.436.712,00	218.170.281.431,00	(972.155.281,00)	99,56
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	9.748.295.312,00	9.210.821.696,00	(537.473.616,00)	94,49
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.176.113.677,00	3.947.614.394,00	(228.499.283,00)	94,53
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.572.181.635,00	5.263.207.302,00	(308.974.333,00)	94,46
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	396.920.400,00	380.301.000,00	(16.619.400,00)	95,81
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	396.920.400,00	380.301.000,00	(16.619.400,00)	95,81
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00	3.581.937.735,00	(418.062.265,00)	89,55
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	3.581.937.735,00	(418.062.265,00)	89,55
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4	BELANJA TRANSFER	204.997.221.000,00	204.997.221.000,00	0,00	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.170.000.000,00	2.170.000.000,00	0,00	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	202.827.221.000,00	202.827.221.000,00	0,00	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000		Badan Pendapatan Daerah	5.812.922.637,00	5.594.222.030,00	(218.700.607,00)	96,24
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	5.812.922.637,00	5.594.222.030,00	(218.700.607,00)	96,24
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.812.922.637,00	5.594.222.030,00	(218.700.607,00)	96,24
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.330.614.067,00	3.129.715.872,00	(200.898.195,00)	93,97

1			2	3	4	5	6
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.482.308.570,00	2.464.506.158,00	(17.802.412,00)	99,28
5.03			**KEPEGAWAIAN**	**4.199.133.664,00**	**3.349.656.827,00**	**(849.476.837,00)**	**79,77**
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.199.133.664,00	3.349.656.827,00	(849.476.837,00)	79,77
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.199.133.664,00	3.349.656.827,00	(849.476.837,00)	79,77
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.199.133.664,00	3.349.656.827,00	(849.476.837,00)	79,77
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.497.373.824,00	2.189.160.489,00	(308.213.335,00)	87,66
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.701.759.840,00	1.160.496.338,00	(541.263.502,00)	68,19
5.04			**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**349.787.000,00**	**290.303.182,00**	**(59.483.818,00)**	**82,99**
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	349.787.000,00	290.303.182,00	(59.483.818,00)	82,99
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	349.787.000,00	290.303.182,00	(59.483.818,00)	82,99
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	349.787.000,00	290.303.182,00	(59.483.818,00)	82,99
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.787.000,00	127.631.000,00	(22.156.000,00)	85,21
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	162.672.182,00	(37.327.818,00)	81,34
5.05			**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**886.834.149,00**	**673.616.010,00**	**(213.218.139,00)**	**75,96**
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	886.834.149,00	673.616.010,00	(213.218.139,00)	75,96
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	886.834.149,00	673.616.010,00	(213.218.139,00)	75,96
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	886.834.149,00	673.616.010,00	(213.218.139,00)	75,96
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	886.834.149,00	673.616.010,00	(213.218.139,00)	75,96
6			**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**9.108.060.239,00**	**8.470.302.202,00**	**(637.758.037,00)**	**93,00**
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	9.108.060.239,00	8.470.302.202,00	(637.758.037,00)	93,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		Inspektorat	9.106.560.239,00	8.468.802.202,00	(637.758.037,00)	93,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	9.106.560.239,00	8.468.802.202,00	(637.758.037,00)	93,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.784.047.239,00	8.159.302.202,00	(624.745.037,00)	92,89
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.219.747.499,00	4.975.058.902,00	(244.688.597,00)	95,31
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.564.299.740,00	3.184.243.300,00	(380.056.440,00)	89,34
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	322.513.000,00	309.500.000,00	(13.013.000,00)	95,97
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	322.513.000,00	309.500.000,00	(13.013.000,00)	95,97
6.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		Kecamatan Sidikalang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
6.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
6.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
6.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**	**36.259.626.007,00**	**33.365.550.292,00**	**(2.894.075.715,00)**	**92,02**
7.01			**KECAMATAN**	**36.259.626.007,00**	**33.365.550.292,00**	**(2.894.075.715,00)**	**92,02**

1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		Kecamatan Sidikalang	7.096.273.502,00	6.833.672.351,00	(262.601.151,00)	96,30
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.096.273.502,00	6.833.672.351,00	(262.601.151,00)	96,30
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.095.368.902,00	6.832.767.751,00	(262.601.151,00)	96,30
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.656.046.516,00	4.444.212.048,00	(211.834.468,00)	95,45
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.439.322.386,00	2.388.555.703,00	(50.766.683,00)	97,92
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	904.600,00	904.600,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	904.600,00	904.600,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		Kecamatan Sumbul	3.034.229.335,00	2.860.115.733,00	(174.113.602,00)	94,26
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	3.034.229.335,00	2.860.115.733,00	(174.113.602,00)	94,26
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.034.229.335,00	2.860.115.733,00	(174.113.602,00)	94,26
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.282.538.439,00	2.117.428.732,00	(165.109.707,00)	92,77
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	751.690.896,00	742.687.001,00	(9.003.895,00)	98,80
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		Kecamatan Silima Pungga pungga	3.017.501.447,00	2.820.154.412,00	(197.347.035,00)	93,46
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	3.017.501.447,00	2.820.154.412,00	(197.347.035,00)	93,46
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.952.688.747,00	2.755.384.412,00	(197.304.335,00)	93,32
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.260.339.707,00	2.074.555.312,00	(185.784.395,00)	91,78
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	692.349.040,00	680.829.100,00	(11.519.940,00)	98,34
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	64.812.700,00	64.770.000,00	(42.700,00)	99,93
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.212.700,00	6.170.000,00	(42.700,00)	99,31
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.600.000,00	58.600.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		Kecamatan Siempat Nempu	2.176.974.722,00	1.984.224.003,00	(192.750.719,00)	91,15
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	2.176.974.722,00	1.984.224.003,00	(192.750.719,00)	91,15
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.176.974.722,00	1.984.224.003,00	(192.750.719,00)	91,15
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.578.928.430,00	1.404.505.868,00	(174.422.562,00)	88,95
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	598.046.292,00	579.718.135,00	(18.328.157,00)	96,94
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		Kecamatan Tiga Lingga	2.008.400.323,00	1.781.976.461,00	(226.423.862,00)	88,73
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5	BELANJA DAERAH	2.008.400.323,00	1.781.976.461,00	(226.423.862,00)	88,73
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.964.535.154,00	1.753.740.461,00	(210.794.693,00)	89,27
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.514.209.427,00	1.327.064.606,00	(187.144.821,00)	87,64
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.325.727,00	426.675.855,00	(23.649.872,00)	94,75
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2	BELANJA MODAL	43.865.169,00	28.236.000,00	(15.629.169,00)	64,37
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.865.169,00	28.236.000,00	(15.629.169,00)	64,37
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000		Kecamatan Tanah Pinem	2.001.538.191,00	1.796.032.254,00	(205.505.937,00)	89,73
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5	BELANJA DAERAH	2.001.538.191,00	1.796.032.254,00	(205.505.937,00)	89,73
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.001.538.191,00	1.796.032.254,00	(205.505.937,00)	89,73
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.430.877.295,00	1.236.418.686,00	(194.458.609,00)	86,41

1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	570.660.896,00	559.613.568,00	(11.047.328,00)	98,06
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000		Kecamatan Pegagan Hilir	1.713.071.399,00	1.564.117.099,00	(148.954.300,00)	91,30
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5	BELANJA DAERAH	1.713.071.399,00	1.564.117.099,00	(148.954.300,00)	91,30
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.704.997.739,00	1.556.043.439,00	(148.954.300,00)	91,26
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.227.071.399,00	1.129.613.494,00	(97.457.905,00)	92,06
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	477.926.340,00	426.429.945,00	(51.496.395,00)	89,23
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.2	BELANJA MODAL	8.073.660,00	8.073.660,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.073.660,00	8.073.660,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000		Kecamatan Parbuluan	2.036.079.637,00	1.885.346.606,00	(150.733.031,00)	92,60
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5	BELANJA DAERAH	2.036.079.637,00	1.885.346.606,00	(150.733.031,00)	92,60
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.036.079.637,00	1.885.346.606,00	(150.733.031,00)	92,60
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.529.978.039,00	1.403.403.582,00	(126.574.457,00)	91,73
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	506.101.598,00	481.943.024,00	(24.158.574,00)	95,23
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000		Kecamatan Siempat Nempu Hilir	1.594.767.108,00	1.429.259.619,00	(165.507.489,00)	89,62
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5	BELANJA DAERAH	1.594.767.108,00	1.429.259.619,00	(165.507.489,00)	89,62
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.594.767.108,00	1.429.259.619,00	(165.507.489,00)	89,62
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.120.848.603,00	956.070.212,00	(164.778.391,00)	85,30
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	473.918.505,00	473.189.407,00	(729.098,00)	99,85
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000		Kecamatan Siempat Nempu Hulu	2.006.160.661,00	1.796.242.084,00	(209.918.577,00)	89,54
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5	BELANJA DAERAH	2.006.160.661,00	1.796.242.084,00	(209.918.577,00)	89,54
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.981.160.661,00	1.776.242.084,00	(204.918.577,00)	89,66
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.524.250.413,00	1.376.962.934,00	(147.287.479,00)	90,34
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	456.910.248,00	399.279.150,00	(57.631.098,00)	87,39
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	80,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	80,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000		Kecamatan Lae Parira	1.879.223.731,00	1.723.640.629,00	(155.583.102,00)	91,72
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5	BELANJA DAERAH	1.879.223.731,00	1.723.640.629,00	(155.583.102,00)	91,72
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.856.723.731,00	1.701.140.629,00	(155.583.102,00)	91,62
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.444.032.891,00	1.296.644.493,00	(147.388.398,00)	89,79
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	412.690.840,00	404.496.136,00	(8.194.704,00)	98,01
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.2	BELANJA MODAL	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000		Kecamatan Gunung Sitember	1.667.382.090,00	1.539.757.055,00	(127.625.035,00)	92,35
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5	BELANJA DAERAH	1.667.382.090,00	1.539.757.055,00	(127.625.035,00)	92,35
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.652.382.090,00	1.524.757.055,00	(127.625.035,00)	92,28
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.210.941.846,00	1.094.316.805,00	(116.625.041,00)	90,37

1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	441.440.244,00	430.440.250,00	(10.999.994,00)	97,51
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000		Kecamatan Berampu	1.623.673.224,00	1.482.874.250,00	(140.798.974,00)	91,33
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5	BELANJA DAERAH	1.623.673.224,00	1.482.874.250,00	(140.798.974,00)	91,33
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.623.673.224,00	1.482.874.250,00	(140.798.974,00)	91,33
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.243.437.713,00	1.125.543.819,00	(117.893.894,00)	90,52
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.235.511,00	357.330.431,00	(22.905.080,00)	93,98
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000		Kecamatan Silahisabungan	1.594.938.027,00	1.370.126.146,00	(224.811.881,00)	85,90
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5	BELANJA DAERAH	1.594.938.027,00	1.370.126.146,00	(224.811.881,00)	85,90
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.594.938.027,00	1.370.126.146,00	(224.811.881,00)	85,90
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.149.410.250,00	973.134.235,00	(176.276.015,00)	84,66
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	445.527.777,00	396.991.911,00	(48.535.866,00)	89,11
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000		Kecamatan Sitinjo	2.809.412.610,00	2.498.011.590,00	(311.401.020,00)	88,92
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	5	BELANJA DAERAH	2.809.412.610,00	2.498.011.590,00	(311.401.020,00)	88,92
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.749.198.810,00	2.437.798.090,00	(311.400.720,00)	88,67
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.028.674.840,00	1.801.098.829,00	(227.576.011,00)	88,78
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	720.523.970,00	636.699.261,00	(83.824.709,00)	88,37
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	5.2	BELANJA MODAL	60.213.800,00	60.213.500,00	(300,00)	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.213.800,00	60.213.500,00	(300,00)	100,00
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**41.955.738.246,00**	**40.911.044.648,00**	**(1.044.693.598,00)**	**97,51**
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	41.955.738.246,00	40.911.044.648,00	(1.044.693.598,00)	97,51
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	41.955.738.246,00	40.911.044.648,00	(1.044.693.598,00)	97,51
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	41.955.738.246,00	40.911.044.648,00	(1.044.693.598,00)	97,51
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	41.955.738.246,00	40.911.044.648,00	(1.044.693.598,00)	97,51
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.897.617.002,00	1.679.646.169,00	(217.970.833,00)	88,51
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.507.522.244,00	1.369.977.479,00	(137.544.765,00)	90,88
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	38.550.599.000,00	37.861.421.000,00	(689.178.000,00)	98,21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.2 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAHAN KABUPATEN DAIRI

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.260.206.860.974,00	1.195.824.688.264,57	94,89	1.192.110.715.857,23
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	98.379.074.374,00	100.411.235.107,57	102,07	85.084.763.844,23
4.1.01	Pajak Daerah	29.848.000.000,00	21.620.031.867,80	72,43	20.491.410.869,13
4.1.01.06	Pajak Hotel	445.000.000,00	437.636.086,00	98,35	449.122.052,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	325.000.000,00	336.726.359,00	103,61	335.972.875,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	325.000.000,00	336.726.359,00	103,61	335.972.875,00
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	120.000.000,00	100.909.727,00	84,09	113.149.177,00
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	120.000.000,00	100.909.727,00	84,09	113.149.177,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.253.000.000,00	2.932.602.099,80	90,15	2.820.237.546,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.513.000.000,00	2.389.249.959,80	95,08	2.456.095.106,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.513.000.000,00	2.389.249.959,80	95,08	2.456.095.106,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	740.000.000,00	543.352.140,00	73,43	364.142.440,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	740.000.000,00	543.352.140,00	73,43	364.142.440,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	10.000.000,00	7.580.000,00	75,80	9.887.500,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	10.000.000,00	7.580.000,00	75,80	9.887.500,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	10.000.000,00	7.580.000,00	75,80	9.887.500,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	600.000.000,00	741.912.054,00	123,65	553.015.247,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	600.000.000,00	741.912.054,00	123,65	553.015.247,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	600.000.000,00	741.912.054,00	123,65	553.015.247,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	7.000.000.000,00	7.075.097.847,00	101,07	6.664.270.924,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	7.000.000.000,00	7.075.097.847,00	101,07	6.664.270.924,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	7.000.000.000,00	7.075.097.847,00	101,07	6.664.270.924,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	40.000.000,00	43.670.776,00	109,18	39.151.405,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	40.000.000,00	43.670.776,00	109,18	39.151.405,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	40.000.000,00	43.670.776,00	109,18	39.151.405,00

1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.500.000.000,00	4.223.194.795,00	76,79	4.605.831.605,13
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.500.000.000,00	4.223.194.795,00	76,79	4.605.831.605,13
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.500.000.000,00	4.223.194.795,00	76,79	4.605.831.605,13
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	8.000.000.000,00	2.819.271.096,00	35,24	2.368.272.612,00
4.1.01.15.01	PBBP2	8.000.000.000,00	2.819.271.096,00	35,24	2.368.272.612,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	8.000.000.000,00	2.819.271.096,00	35,24	2.368.272.612,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.000.000.000,00	3.339.067.114,00	66,78	2.981.621.978,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	5.000.000.000,00	3.339.067.114,00	66,78	0,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	5.000.000.000,00	3.339.067.114,00	66,78	0,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	0,00	0,00	0,00	2.981.621.978,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	0,00	0,00	0,00	2.981.621.978,00
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**52.506.397.374,00**	**60.628.636.118,00**	**115,47**	**3.320.064.213,00**
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	50.185.397.374,00	58.950.915.993,00	117,47	1.921.381.113,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	49.327.397.374,00	58.065.613.993,00	117,71	955.689.113,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	750.000.000,00	998.614.229,00	133,15	955.689.113,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	48.577.397.374,00	57.066.999.764,00	117,48	0,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	600.000.000,00	630.302.000,00	105,05	381.889.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	600.000.000,00	630.302.000,00	105,05	381.889.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	258.000.000,00	255.000.000,00	98,84	251.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	258.000.000,00	255.000.000,00	98,84	251.000.000,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	14.860.000,00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	14.860.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	12.437.000,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	0,00	0,00	0,00	12.437.000,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	305.506.000,00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	305.506.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.821.000.000,00	1.146.462.375,00	62,96	1.149.254.300,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	685.000.000,00	439.360.000,00	64,14	420.520.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	15.000.000,00	9.000.000,00	60,00	4.400.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	20.000.000,00	18.000.000,00	90,00	6.400.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	650.000.000,00	412.360.000,00	63,44	409.720.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	80.000.000,00	68.723.000,00	85,90	67.102.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	80.000.000,00	68.723.000,00	85,90	67.102.000,00

1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	20.000.000,00	16.500.000,00	82,50	16.000.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	20.000.000,00	16.500.000,00	82,50	16.000.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	902.000.000,00	603.184.000,00	66,87	543.360.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	902.000.000,00	603.184.000,00	66,87	543.360.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	125.000.000,00	14.195.375,00	11,36	50.272.300,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	120.000.000,00	14.195.375,00	11,83	37.645.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	0,00	0,00	0,00	12.127.300,00
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	5.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	9.000.000,00	4.500.000,00	50,00	0,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	9.000.000,00	4.500.000,00	50,00	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	500.000.000,00	531.257.750,00	106,25	249.428.800,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	500.000.000,00	531.257.750,00	106,25	241.428.800,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	500.000.000,00	531.257.750,00	106,25	241.428.800,00
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**11.964.954.000,00**	**11.964.954.686,50**	**100,00**	**11.409.321.078,00**
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	11.964.954.000,00	11.964.954.686,50	100,00	11.409.321.078,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.964.954.000,00	11.964.954.686,50	100,00	11.409.321.078,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.964.954.000,00	11.964.954.686,50	100,00	11.409.321.078,00
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	**4.059.723.000,00**	**6.197.612.435,27**	**152,66**	**49.863.967.684,10**
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	75.000.000,00	49.604.500,00	66,14	1.427.671.848,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	1.255.639.648,00
4.1.04.01.02.0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	1.199.416.148,00
4.1.04.01.02.0057	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	56.223.500,00
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	75.000.000,00	30.184.000,00	40,25	153.596.000,00
4.1.04.01.03.0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	153.596.000,00

1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	75.000.000,00	30.184.000,00	40,25	0,00
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	18.436.200,00
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	18.436.200,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	0,00	19.420.500,00	0,00	0,00
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	0,00	19.420.500,00	0,00	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.000.000.000,00	1.429.794.490,00	142,98	2.391.384.170,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00	1.429.794.490,00	142,98	2.390.719.885,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00	1.429.794.490,00	142,98	2.390.719.885,00
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	0,00	0,00	664.285,00
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	0,00	0,00	664.285,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	29.561.000,00	29.561.430,00	100,00	62.101.246,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	29.561.000,00	29.561.430,00	100,00	62.101.246,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	29.561.000,00	29.561.430,00	100,00	62.101.246,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	50.000.000,00	42.219.200,00	84,44	352.571.966,21
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	50.000.000,00	42.219.200,00	84,44	352.571.966,21
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	50.000.000,00	42.219.200,00	84,44	352.571.966,21
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	875.694.000,00	1.896.574.441,18	216,58	182.064.114,48
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	875.694.000,00	1.896.574.441,18	216,58	182.064.114,48
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	875.694.000,00	1.896.574.441,18	216,58	182.064.114,48
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	179.550.000,00	135.100.626,00	75,24	111.212.685,00
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	158.349.000,00	72.642.620,00	45,88	49.169.675,00
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	158.349.000,00	72.642.620,00	45,88	49.169.675,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	21.201.000,00	62.458.006,00	294,60	62.043.010,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	21.201.000,00	62.458.006,00	294,60	62.043.010,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.849.918.000,00	2.614.757.748,09	141,34	3.148.587.703,03
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	999.451.494,00
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	999.451.494,00

1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	822.496.000,00	899.276.139,00	109,34	112.819.592,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	822.496.000,00	899.276.139,00	109,34	112.819.592,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	551.342.000,00	1.014.469.012,00	184,00	0,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	551.342.000,00	1.013.799.793,00	183,88	0,00
4.1.04.15.08.0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	0,00	52.113,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	0,00	156.336,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jaminan Hari Tua ASN-Jaminan Hari Tua PNS	0,00	460.770,00	0,00	0,00
4.1.04.15.09	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	136.788.000,00	146.481.246,00	107,09	0,00
4.1.04.15.09.0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	136.788.000,00	146.481.246,00	107,09	0,00
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	24.005.000,00	37.932.846,00	158,02	0,00
4.1.04.15.15.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	24.005.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15.0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	37.932.846,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	315.287.000,00	516.598.505,09	163,85	2.036.316.617,03
4.1.04.15.16.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	315.287.000,00	102.817.000,00	32,61	0,00
4.1.04.15.16.0067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0,00	402.710.505,09	0,00	2.036.316.617,03
4.1.04.15.16.0071	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Lembur	0,00	11.071.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5 = (4/3) * 100	6
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	42.188.373.951,38
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	42.188.373.951,38
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	42.188.373.951,38
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**98.379.074.374,00**	**100.411.235.107,57**	**102,07**	**85.084.763.844,23**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.148.501.149.600,00**	**1.083.304.010.242,00**	**94,32**	**1.094.557.567.445,00**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.075.894.235.000,00**	**1.045.825.056.797,00**	**97,21**	**1.051.489.530.598,00**
4.2.01.01	**Dana Perimbangan**	**924.166.251.000,00**	**894.097.072.797,00**	**96,75**	**882.593.178.398,00**
4.2.01.01.01	**Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)**	**19.898.470.000,00**	**22.551.799.890,00**	**113,33**	**24.790.734.235,00**
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.771.282.000,00	3.342.835.000,00	120,62	3.869.702.562,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	0,00	6.283.878.000,00	0,00	6.683.320.250,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	5.479.773.000,00	535.821.000,00	9,78	524.032.812,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	665.237.000,00	716.944.890,00	107,77	776.391.886,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	215.895.000,00	225.904.000,00	104,64	13.604.238,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	7.422.000,00	5.981.000,00	80,58	17.506.741,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	69.227.000,00	106.602.000,00	153,99	109.464.576,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	235.055.700,00	0,00	569.865.387,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.989.828.000,00	2.398.972.300,00	120,56	2.018.636.100,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	105.453.000,00	0,00	222.771.472,00
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	105.453.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.073.811.000,00	1.073.811.000,00	100,00	1.471.694.211,00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	7.520.542.000,00	7.520.542.000,00	100,00	8.513.744.000,00
4.2.01.01.02	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)**	**650.948.740.000,00**	**647.834.166.080,00**	**99,52**	**590.036.443.000,00**
4.2.01.01.02.0001	DAU	650.948.740.000,00	543.959.401.000,00	83,56	549.372.849.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0,00	1.600.000.000,00	0,00	1.600.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	29.617.010.080,00	0,00	39.063.594.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00	20.387.329.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00	28.732.548.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	23.537.878.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**	**83.783.162.000,00**	**64.141.894.493,00**	**76,56**	**97.765.061.442,00**
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	661.711.000,00	658.646.550,00	99,54	942.563.500,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.162.364.000,00	5.110.916.200,00	99,00	2.719.346.550,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.670.356.000,00	6.508.415.500,00	97,57	1.454.579.400,00
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	513.746.100,00

1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	734.595.520,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	792.352.000,00	782.450.000,00	98,75	12.237.111.843,00
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	3.681.212.300,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	2.667.744.000,00	2.666.931.120,00	99,97	4.753.054.801,00
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	2.938.076.000,00	2.056.653.199,00	70,00	1.652.196.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	16.640.586.000,00	0,00	0,00	45.936.138.171,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	38.156.865.000,00	32.245.606.426,00	84,51	0,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	6.469.448.000,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	5.725.262.850,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	4.968.000.000,00	4.886.967.000,00	98,37	3.586.460.300,00
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.221.903.000,00	1.211.364.000,00	99,14	1.534.500.000,00
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	1.424.315.910,00
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	1.669.342.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	3.903.205.000,00	3.853.798.000,00	98,73	2.731.188.197,00
4.2.01.01.03.0082	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	0,00	3.163.012.498,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0084	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	0,00	997.134.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**	**169.535.879.000,00**	**159.569.212.334,00**	**94,12**	**170.000.939.721,00**
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	57.667.090.000,00	57.619.432.236,00	99,92	59.161.466.134,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.170.000.000,00	2.170.000.000,00	100,00	2.970.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	70.605.800.000,00	70.237.517.000,00	99,48	67.198.987.922,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.849.250.000,00	2.849.250.000,00	100,00	2.627.500.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	449.761.000,00	457.078.000,00	101,63	325.647.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.278.350.000,00	2.054.569.417,00	90,18	2.361.402.060,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	150.620.000,00	130.950.000,00	86,94	118.395.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.746.990.000,00	4.093.311.716,00	71,23	25.142.705.150,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	4.925.348.455,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	897.732.000,00	837.119.250,00	93,25	339.970.000,00
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	1.838.000.000,00	1.757.123.000,00	95,60	1.495.487.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	612.951.000,00	610.357.000,00	99,58	479.850.000,00

1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	438.800.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	455.000.000,00	455.000.000,00	100,00	253.425.000,00
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.972.760.000,00	349.585.103,00	17,72	2.161.956.000,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	6.981.378.000,00	4.304.116.117,00	61,65	0,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	14.860.197.000,00	11.643.803.495,00	78,36	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**924.166.251.000,00**	**894.097.072.797,00**	**96,75**	**882.593.178.398,00**
4.2.01.02	**Dana Insentif Daerah (DID)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.666.172.000,00**
4.2.01.02.01	DID	0,00	0,00	0,00	33.666.172.000,00
4.2.01.02.01.0001	DID	0,00	0,00	0,00	33.666.172.000,00
4.2.01.05	**Dana Desa**	**136.561.076.000,00**	**136.561.076.000,00**	**100,00**	**135.230.180.200,00**
4.2.01.05.01	Dana Desa	136.561.076.000,00	136.561.076.000,00	100,00	135.230.180.200,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	136.561.076.000,00	136.561.076.000,00	100,00	135.230.180.200,00
4.2.01.06	**Insentif Fiskal**	**15.166.908.000,00**	**15.166.908.000,00**	**100,00**	**0,00**
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	15.166.908.000,00	15.166.908.000,00	100,00	0,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	15.166.908.000,00	15.166.908.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**151.727.984.000,00**	**151.727.984.000,00**	**100,00**	**168.896.352.200,00**
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**72.606.914.600,00**	**37.478.953.445,00**	**51,62**	**43.068.036.847,00**
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	70.821.914.600,00	37.478.953.445,00	52,92	42.102.238.300,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	70.821.914.600,00	37.478.953.445,00	52,92	42.102.238.300,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13.538.092.001,00	3.976.860.214,00	29,38	7.762.953.238,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.244.237.752,00	2.302.207.818,00	27,93	4.917.479.085,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21.454.480.116,00	7.938.905.705,00	37,00	10.585.922.309,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.520.788.404,00	1.260.394.202,00	50,00	1.793.317.225,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	25.064.316.327,00	22.000.585.506,00	87,78	17.042.566.443,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	1.785.000.000,00	0,00	0,00	965.798.547,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.785.000.000,00	0,00	0,00	965.798.547,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.785.000.000,00	0,00	0,00	965.798.547,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**72.606.914.600,00**	**37.478.953.445,00**	**51,62**	**43.068.036.847,00**
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	**1.148.501.149.600,00**	**1.083.304.010.242,00**	**94,32**	**1.094.557.567.445,00**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**13.326.637.000,00**	**12.109.442.915,00**	**90,87**	**12.468.384.568,00**
4.3.03	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**13.326.637.000,00**	**12.109.442.915,00**	**90,87**	**12.468.384.568,00**

1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	13.326.637.000,00	12.109.442.915,00	90,87	12.468.384.568,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.326.637.000,00	12.109.442.915,00	90,87	12.468.384.568,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD	13.326.637.000,00	12.109.442.915,00	90,87	12.468.384.568,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**13.326.637.000,00**	**12.109.442.915,00**	**90,87**	**12.468.384.568,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.260.206.860.974,00**	**1.195.824.688.264,57**	**94,89**	**1.192.110.715.857,23**
5	**BELANJA DAERAH**	**1.352.146.553.377,00**	**1.248.759.410.799,08**	**92,35**	**1.236.219.013.955,50**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**998.719.782.947,00**	**909.963.663.123,20**	**91,11**	**844.293.304.487,73**
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**566.654.562.335,00**	**526.617.182.736,00**	**92,93**	**455.914.059.535,00**
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	409.024.027.472,00	375.106.245.134,00	91,71	318.091.782.611,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	299.637.969.301,00	284.795.228.123,00	95,05	238.363.564.082,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	222.012.969.301,00	218.437.586.713,00	98,39	212.708.252.082,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	77.625.000.000,00	66.357.641.410,00	85,48	25.655.312.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	32.484.834.760,00	26.403.340.712,00	81,28	22.522.714.474,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	21.579.834.760,00	20.799.889.192,00	96,39	20.148.174.378,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	10.905.000.000,00	5.603.451.520,00	51,38	2.374.540.096,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.961.860.000,00	5.319.924.800,00	89,23	6.448.381.486,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.961.860.000,00	5.319.924.800,00	89,23	6.448.381.486,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	21.029.451.000,00	18.337.967.000,00	87,20	16.735.037.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	18.949.451.000,00	18.072.186.000,00	95,37	16.460.412.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.080.000.000,00	265.781.000,00	12,78	274.625.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.654.392.000,00	4.831.031.000,00	85,44	2.894.930.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.516.000.000,00	1.111.701.000,00	73,33	1.476.245.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.138.392.000,00	3.719.330.000,00	89,87	1.418.685.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	19.310.293.849,00	15.662.571.364,00	81,11	14.104.084.680,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	12.345.853.849,00	11.683.382.044,00	94,63	12.311.689.680,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.964.440.000,00	3.979.189.320,00	57,14	1.792.395.000,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	798.000.000,00	466.253.499,00	58,43	290.350.051,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	765.000.000,00	466.253.499,00	60,95	290.350.051,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	7.227.715,00	4.166.400,00	57,64	3.448.235,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.372.715,00	2.858.067,00	53,20	3.024.931,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.855.000,00	1.308.333,00	70,53	423.304,00

1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	21.180.395.287,00	16.937.924.103,00	79,97	14.772.753.167,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	17.876.395.287,00	14.277.248.748,00	79,87	13.511.281.838,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.304.000.000,00	2.660.675.355,00	80,53	1.261.471.329,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	801.650.890,00	579.548.398,00	72,29	496.608.623,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	616.650.890,00	441.161.008,00	71,54	441.215.927,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	185.000.000,00	138.387.390,00	74,80	55.392.696,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.157.952.670,00	1.768.289.735,00	81,94	1.459.910.813,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.638.952.670,00	1.353.464.418,00	82,58	1.293.740.087,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	519.000.000,00	414.825.317,00	79,93	166.170.726,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	54.692.143.975,00	52.399.695.504,00	95,81	50.329.075.589,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	25.670.701.146,00	24.643.488.707,00	96,00	23.877.535.944,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	25.670.701.146,00	24.643.488.707,00	96,00	23.828.495.364,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	0,00	0,00	0,00	49.040.580,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.621.030.471,00	1.384.744.787,00	85,42	1.237.515.877,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.621.030.471,00	1.384.744.787,00	85,42	1.233.210.364,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	0,00	0,00	0,00	4.305.513,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.423.940.271,00	2.264.602.004,00	93,43	2.028.816.268,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.423.940.271,00	2.264.602.004,00	93,43	2.028.816.268,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	24.976.472.087,00	24.106.860.006,00	96,52	23.185.207.500,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	24.976.472.087,00	24.106.860.006,00	96,52	23.185.207.500,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	86.233.892.438,00	83.499.329.300,00	96,83	72.221.102.441,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	260.291.226,00	260.291.226,00	100,00	285.219.200,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	13.826.035,00	13.826.035,00	100,00	24.486.250,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	43.652.327,00	43.652.327,00	100,00	46.050.700,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	241.767,00	241.767,00	100,00	3.067.556,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	10.073.614,00	10.073.614,00	100,00	39.900.000,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	738.732,00	738.732,00	100,00	425.000,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	63.488.067,00	63.488.067,00	100,00	40.264.410,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	34.250.287,00	34.250.287,00	100,00	50.384.904,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	94.020.397,00	94.020.397,00	100,00	80.640.380,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	104.778.300,00	104.778.300,00	100,00	95.272.366,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	30.240.000,00	30.240.000,00	100,00	8.824.650,00

1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.080.000,00	10.080.000,00	100,00	9.750.000,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	9.261.000,00	9.261.000,00	100,00	4.400.000,00
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	475.500,00	475.500,00	100,00	468.066,00
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	7.920.000,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	16.102.800,00	16.102.800,00	100,00	9.360.000,00
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1.890.000,00	1.890.000,00	100,00	1.320.000,00
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	2.551.500,00	2.551.500,00	100,00	1.850.000,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	630.000,00	630.000,00	100,00	328.000,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	20.160.000,00	20.160.000,00	100,00	11.650.000,00
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	787.500,00	787.500,00	100,00	1.901.650,00
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	77.707.527.300,00	76.406.464.850,00	98,33	66.109.195.200,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	77.707.527.300,00	76.406.464.850,00	98,33	66.109.195.200,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	452.349.033,00	436.744.000,00	96,55	379.696.900,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	452.349.033,00	436.744.000,00	96,55	379.696.900,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.610.624.000,00	3.594.250.000,00	99,55	1.948.000.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	3.610.624.000,00	3.594.250.000,00	99,55	1.948.000.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.644.572.579,00	1.450.519.424,00	54,85	1.775.908.775,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.644.572.579,00	1.450.519.424,00	54,85	1.775.908.775,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.453.750.000,00	1.246.281.500,00	85,73	1.627.810.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	762.450.000,00	720.960.000,00	94,56	642.480.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	691.300.000,00	525.321.500,00	75,99	985.330.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.585.018.056,00	14.788.405.960,00	94,89	14.455.444.674,00

1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	751.822.219,00	96,14	777.315.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	751.822.219,00	96,14	777.315.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	144.060.000,00	62.779.500,00	43,58	65.551.500,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	144.060.000,00	62.779.500,00	43,58	65.551.500,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	141.943.200,00	137.484.600,00	96,86	77.489.400,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	141.943.200,00	137.484.600,00	96,86	77.489.400,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000,00	67.011.000,00	99,97	66.559.500,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000,00	67.011.000,00	99,97	66.559.500,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.052.656.500,00	92,83	1.127.106.750,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.052.656.500,00	92,83	1.127.106.750,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	116.379.900,00	91.898.100,00	78,96	111.416.550,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	116.379.900,00	91.898.100,00	78,96	111.416.550,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	46.588.500,00	2.770.950,00	5,95	0,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	46.588.500,00	2.770.950,00	5,95	0,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000,00	2.646.000.000,00	100,00	2.627.100.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000,00	2.646.000.000,00	100,00	2.627.100.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	661.500.000,00	422.100.000,00	63,81	642.600.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	661.500.000,00	422.100.000,00	63,81	642.600.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	324.034.424,00	277.666.618,00	85,69	275.783.928,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	324.034.424,00	277.666.618,00	85,69	275.783.928,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	200.976,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	200.976,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.688.121.056,00	2.449.206.473,00	91,11	2.398.022.046,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	88.921.056,00	68.573.417,00	77,12	67.457.250,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	5.000.000,00	1.608.264,00	32,17	1.672.512,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	10.000.000,00	4.824.792,00	48,25	4.792.284,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.584.200.000,00	2.374.200.000,00	91,87	2.324.100.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.498.000.000,00	6.495.000.000,00	99,95	6.286.500.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.498.000.000,00	6.495.000.000,00	99,95	6.286.500.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	335.160.000,00	332.010.000,00	99,06	0,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	335.160.000,00	332.010.000,00	99,06	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	331.095.474,00	168.221.713,00	50,81	273.094.220,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.000.000,00	19.500.000,00	33,62	54.600.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.000.000,00	19.500.000,00	33,62	54.600.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	20.000.000,00	1.950.000,00	9,75	6.636.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	20.000.000,00	1.950.000,00	9,75	6.636.000,00

1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	105.000.000,00	35.100.000,00	33,43	98.280.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	105.000.000,00	35.100.000,00	33,43	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.000.000,00	1.158.720,00	11,59	5.648.760,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.000.000,00	1.158.720,00	11,59	5.648.760,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.000.000,00	352.679,00	7,05	610.200,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.000.000,00	352.679,00	7,05	610.200,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	10.000,00	480,00	4,80	1.760,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	10.000,00	480,00	4,80	1.760,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.320.000,00	1.809.600,00	24,72	5.469.120,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.320.000,00	1.809.600,00	24,72	5.469.120,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	3.000.000,00	37.440,00	1,25	112.320,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	3.000.000,00	37.440,00	1,25	112.320,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	6.000.000,00	112.320,00	1,87	336.960,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	6.000.000,00	112.320,00	1,87	336.960,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	86.611.274,00	86.611.274,00	100,00	81.217.500,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	4.629.177,00	4.629.177,00	100,00	16.998.500,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	14.615.495,00	14.615.495,00	100,00	17.686.000,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	80.947,00	80.947,00	100,00	1.005.500,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	3.372.807,00	3.372.807,00	100,00	7.600.000,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	247.339,00	247.339,00	100,00	75.000,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	21.256.817,00	21.256.817,00	100,00	6.240.735,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	11.467.542,00	11.467.542,00	100,00	8.824.363,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	30.941.150,00	30.941.150,00	100,00	22.787.402,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	30.154.200,00	21.589.200,00	71,60	20.181.600,00
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	5.760.000,00	5.760.000,00	100,00	6.100.000,00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.920.000,00	1.920.000,00	100,00	2.300.000,00
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.764.000,00	1.764.000,00	100,00	650.000,00
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	600.000,00

1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	90.000,00	90.000,00	100,00	30.000,00
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.432.000,00	2.432.000,00	100,00	1.000.000,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	3.064.200,00	2.064.200,00	67,37	1.562.600,00
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	360.000,00	360.000,00	100,00	180.000,00
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	486.000,00	486.000,00	100,00	237.000,00
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	120.000,00	120.000,00	100,00	272.000,00
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.840.000,00	1.275.000,00	33,20	4.000.000,00
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	150.000,00	150.000,00	100,00	250.000,00
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	10.168.000,00	5.168.000,00	50,83	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	401.693.333,00	78,63	510.880.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	108.360.000,00	97,73	110.880.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	108.360.000,00	97,73	110.880.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	293.333.333,00	73,33	400.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	293.333.333,00	73,33	400.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	277.504.920,00	253.591.792,00	91,38	32.680.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	277.504.920,00	253.591.792,00	91,38	32.680.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	277.504.920,00	253.591.792,00	91,38	32.680.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**385.664.651.612,00**	**338.089.506.105,20**	**87,66**	**356.743.301.652,73**
5.1.02.01	Belanja Barang	80.299.150.624,00	65.257.571.436,00	81,27	83.973.756.288,88
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	79.544.286.024,00	64.635.917.836,00	81,26	83.879.356.288,88
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	554.366.500,00	347.881.500,00	62,75	707.847.207,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	86.379.450,00	86.144.450,00	99,73	145.440.350,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.841.542.500,00	3.413.004.486,00	88,84	4.258.673.802,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	776.005.000,00	648.505.000,00	83,57	157.640.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	750.000,00	750.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00	66.990.500,00

1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	181.484.168,00	109.624.568,00	60,40	491.071.500,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	724.736.450,00	593.014.465,00	81,82	718.034.409,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	4.875.000,00	4.875.000,00	100,00	694.783.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	397.208.720,00	363.331.400,00	91,47	434.977.200,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.703.919.181,00	1.618.311.116,00	94,98	1.822.357.682,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.629.033.777,00	5.173.313.301,00	91,90	5.891.290.974,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	201.185.000,00	187.460.000,00	93,18	226.130.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	643.849.000,00	584.044.500,00	90,71	773.817.500,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	17.400.000,00	4.800.000,00	27,59	28.977.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.286.864.450,00	1.229.141.900,00	95,51	1.243.543.650,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	101.336.500,00	101.245.500,00	99,91	326.055.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	133.075.000,00	132.955.000,00	99,91	90.797.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	236.900.000,00	235.100.000,00	99,24	124.477.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.776.353.525,00	5.381.894.973,00	93,17	7.165.073.416,88
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.555.000.619,00	1.834.619.236,00	51,61	3.399.870.678,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.458.074.952,00	2.513.891.287,00	72,70	3.239.934.402,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	28.706.706.667,00	21.412.492.553,00	74,59	28.229.456.243,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	1.511.790.391,00	1.349.371.591,00	89,26	2.440.480.342,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	180.400.000,00	174.816.000,00	96,90	0,00
5.1.02.01.01.0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	6.214.200,00	5.869.500,00	94,45	327.082.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.833.985.000,00	1.774.213.500,00	96,74	2.380.774.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	64.000.000,00	63.400.000,00	99,06	2.450.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.638.787.395,00	10.720.141.110,00	84,82	8.564.309.058,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.755.250.979,00	3.123.831.000,00	83,19	6.416.897.640,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	41.180.000,00	41.030.000,00	99,64	62.465.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	172.019.000,00	162.821.000,00	94,65	744.962.615,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	55.700.000,00	33.260.000,00	59,71	2.523.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	351.599.000,00	326.069.000,00	92,74	1.394.032.720,00

1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	66.000.000,00	65.500.000,00	99,24	44.000.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	297.569.200,00	287.062.800,00	96,47	288.212.800,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	25.410.000,00	25.390.000,00	99,92	16.940.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	121.575.000,00	119.800.000,00	98,54	111.050.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	280.705.200,00	279.379.300,00	99,53	681.735.800,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	17.569.200,00	17.562.800,00	99,96	11.712.800,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	25.410.000,00	8.450.000,00	33,25	16.940.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	9.075.000,00	8.550.000,00	94,21	6.050.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	21.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00	94.500.000,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	14.000.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	657.651.000,00	526.690.000,00	80,09	94.400.000,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	125.550.000,00	125.350.000,00	99,84	0,00
5.1.02.01.02.0009	Belanja Pipa-Pipa Baja	517.335.000,00	401.340.000,00	77,58	94.400.000,00
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	14.766.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	97.213.600,00	94.963.600,00	97,69	0,00
5.1.02.01.04.0114	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	783.600,00	783.600,00	100,00	0,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	49.210.000,00	48.660.000,00	98,88	0,00
5.1.02.01.04.0138	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	45.520.000,00	45.520.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.04.0205	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	118.991.332.281,00	105.022.074.325,00	88,26	112.040.699.966,20
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	83.183.340.213,00	73.509.413.921,00	88,37	79.430.949.920,20
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.030.803.000,00	1.771.765.000,00	58,46	2.732.050.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.248.680.000,00	1.148.730.000,00	92,00	1.867.850.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	3.600.000,00	2.000.000,00	55,56	3.600.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.319.620.000,00	1.724.300.000,00	74,34	1.258.750.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	11.750.000,00	7.950.000,00	67,66	16.000.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	183.000.000,00	58.200.000,00	31,80	147.000.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	58.270.000,00	40.120.000,00	68,85	6.300.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	80.600.000,00	73.000.000,00	90,57	362.700.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	44.100.000,00	44.100.000,00	100,00	206.100.000,00

1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	14.212.286.505,00	11.806.473.236,00	83,07	11.464.577.103,20
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	541.050.000,00	444.131.000,00	82,09	560.100.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	131.750.000,00	130.550.000,00	99,09	69.050.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	442.800.000,00	442.800.000,00	100,00	442.800.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	222.000.000,00	216.000.000,00	97,30	242.000.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	13.800.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	63.625.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	913.100.000,00	764.685.000,00	83,75	1.188.009.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	30.800.000,00	22.800.000,00	74,03	1.104.693.144,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	101.400.000,00	101.400.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	35.069.904.889,00	34.404.533.814,00	98,10	34.133.490.427,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.375.612.000,00	2.191.112.000,00	92,23	2.402.946.797,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.050.849.000,00	2.741.904.016,00	89,87	2.922.463.320,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	190.400.000,00	170.600.000,00	89,60	695.850.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	0,00	0,00	0,00	108.000.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	27.600.000,00	22.822.000,00	82,69	39.842.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	157.600.000,00	132.600.000,00	84,14	137.600.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	498.000.000,00	498.000.000,00	100,00	698.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	286.650.000,00	262.540.000,00	91,59	1.501.809.900,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1.946.000.000,00	277.000.000,00	14,23	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	25.600.000,00	23.376.000,00	91,31	20.840.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	178.226.000,00	126.961.451,00	71,24	220.979.390,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	648.541.304,00	540.250.000,00	83,30	537.855.012,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00	29.979.800,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.339.659.840,00	757.252.429,00	56,53	689.265.627,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	724.937.856,00	506.757.121,00	69,90	471.012.873,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	7.649.554.817,00	7.252.596.121,00	94,81	7.306.778.266,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	864.285.000,00	789.200.005,00	91,31	1.887.244.500,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.948.079.000,00	2.798.577.729,00	94,93	2.486.765.219,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	174.107.000,00	30.252.715,00	17,38	14.156.019,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	308.382.002,00	188.761.084,00	61,21	200.218.523,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	827.442.000,00	814.095.000,00	98,39	920.848.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	298.000.000,00	162.918.200,00	54,67	142.000.000,00

1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	22.294.338.657,00	21.412.859.234,00	96,05	19.300.597.494,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.474.346.960,00	2.415.495.528,00	97,62	2.326.582.860,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	14.903.566.013,00	14.800.006.000,00	99,31	14.515.200.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.016.260.837,00	1.728.630.400,00	85,73	384.800.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.921.003.050,00	1.753.041.574,00	91,26	1.480.712.424,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	465.111.691,00	317.905.172,00	68,35	287.431.517,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	514.050.106,00	397.780.560,00	77,38	305.870.693,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.717.888.000,00	1.210.861.600,00	70,49	1.869.443.200,00
5.1.02.02.04.0002	Belanja Sewa Grader	0,00	0,00	0,00	35.100.000,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	34.800.000,00	34.800.000,00	100,00	42.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	191.100.000,00	139.400.000,00	72,95	166.300.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	51.100.000,00	40.600.000,00	79,45	112.400.000,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	7.600.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	53.850.000,00	53.850.000,00	100,00	16.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	318.070.000,00	190.908.000,00	60,02	281.239.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	152.643.000,00	131.049.600,00	85,85	150.324.200,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	208.000.000,00	111.300.000,00	53,51	331.000.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	689.725.000,00	499.720.000,00	72,45	712.824.000,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	11.000.000,00	9.234.000,00	83,95	9.056.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.104.042.108,00	569.672.339,00	51,60	937.986.798,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	14.400.000,00	3.500.000,00	24,31	900.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	446.475.000,00	236.503.649,00	52,97	218.590.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	136.217.108,00	93.998.690,00	69,01	237.131.798,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	97.200.000,00	800.000,00	0,82	0,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	11.000.000,00	0,00	0,00	49.350.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	398.750.000,00	234.870.000,00	58,90	432.015.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	13.750.000,00	91,67	16.250.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	15.000.000,00	13.750.000,00	91,67	16.250.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.254.905.500,00	4.691.126.956,00	89,27	7.005.827.486,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	49.200.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	824.000.000,00	788.700.806,00	95,72	1.141.116.180,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	101.370.810,00

1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	109.002.100,00	108.118.450,00	99,19	71.823.660,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	60.000.000,00	59.423.850,00	99,04	0,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	369.000.000,00	367.519.500,00	99,60	401.075.400,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	438.188.400,00	389.010.600,00	88,78	1.059.725.950,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	99.000.000,00	98.955.000,00	99,95	52.613.000,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	135.000.000,00	0,00	0,00	519.370.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	614.345.000,00	506.992.500,00	82,53	767.929.846,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	134.320.000,00	132.730.400,00	98,82	197.806.700,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	650.000.000,00	457.114.500,00	70,33	1.001.456.340,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.552.050.000,00	1.514.701.850,00	97,59	1.292.053.600,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	270.000.000,00	267.859.500,00	99,21	251.286.000,00
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	806.920.000,00	679.982.218,00	84,27	1.209.410.000,00
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	219.600.000,00	97.200.000,00	44,26	114.800.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	385.120.000,00	384.525.118,00	99,85	599.073.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	200.000.000,00	198.257.100,00	99,13	480.137.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	2.200.000,00	0,00	0,00	15.400.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.448.755.000,00	2.776.055.254,00	62,40	2.054.171.768,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	774.577.000,00	321.910.000,00	41,56	799.979.608,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	3.674.178.000,00	2.454.145.254,00	66,79	1.254.192.160,00

1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	157.142.803,00	157.142.803,00	100,00	166.063.300,00
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	2.132.288,00	2.132.288,00	100,00	9.874.625,00
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	3.118.250,00	3.118.250,00	100,00	3.118.250,00
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	37.286,00	37.286,00	100,00	1.021.250,00
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	1.553.579,00	1.553.579,00	100,00	9.187.500,00
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	113.929,00	113.929,00	100,00	1.062.500,00
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.600.000,00	4.600.000,00	100,00	3.079.240,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	125.896.098,00	125.896.098,00	100,00	126.483.406,00
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	19.691.373,00	19.691.373,00	100,00	12.236.529,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	9.000.000,00	1.210.000,00	13,44	0,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	9.000.000,00	1.210.000,00	13,44	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	11.772.579.200,00	10.450.318.889,00	88,77	12.208.500.871,87
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	289.647.000,00
5.1.02.03.01.0035	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	289.647.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.559.996.775,00	5.450.824.363,00	83,09	6.013.338.838,00
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	51.750.000,00	49.943.069,00	96,51	70.682.201,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	195.000.000,00	183.161.100,00	93,93	290.056.260,00
5.1.02.03.02.0006	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	103.000.000,00	25.860.050,00	25,11	3.137.500,00
5.1.02.03.02.0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	74.500.000,00	68.856.050,00	92,42	100.974.350,00
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	155.000.000,00	143.834.150,00	92,80	229.803.650,00
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	39.000.000,00	24.980.250,00	64,05	38.901.500,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	173.500.000,00	80.312.500,00	46,29	234.170.500,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	92.370.000,00	68.924.000,00	74,62	55.658.500,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.173.990.000,00	944.335.995,00	80,44	1.035.408.223,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.020.718.040,00	1.589.170.045,00	78,64	1.527.104.839,00

1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	783.200.000,00	782.379.950,00	99,90	754.189.076,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	228.980.000,00	198.015.795,00	86,48	220.804.580,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	65.000.000,00	50.224.320,00	77,27	62.809.840,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	353.555.000,00	314.386.059,00	88,92	439.900.000,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	20.240.000,00	10.000.000,00	49,41	0,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	31.225.000,00	31.225.000,00	100,00	35.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	160.585.000,00	125.330.930,00	78,05	115.044.480,00
5.1.02.03.02.0131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	500.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	423.133.735,00	360.655.066,00	85,23	233.761.875,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	196.580.000,00	191.193.800,00	97,26	186.178.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	20.000.000,00	19.958.464,00	99,79	19.458.464,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	133.170.000,00	123.077.770,00	92,42	136.215.000,00
5.1.02.03.02.0491	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	168.480.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.975.132.425,00	1.879.519.056,00	95,16	5.421.638.669,87
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.005.749.625,00	971.632.825,00	96,61	4.938.596.999,87
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	429.971.800,00	369.992.231,00	86,05	0,00
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	82.091.670,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	158.220.000,00	157.981.000,00	99,85	400.950.000,00

1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	130.756.000,00	130.460.000,00	99,77	0,00
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	50.435.000,00	49.853.000,00	98,85	0,00
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	200.000.000,00	199.600.000,00	99,80	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.237.450.000,00	3.119.975.470,00	96,37	483.876.364,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	191.600.000,00	191.300.000,00	99,84	199.391.000,00
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00	0,00	0,00	49.825.000,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.910.000.000,00	2.897.175.470,00	99,56	99.660.000,00
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	135.850.000,00	31.500.000,00	23,19	135.000.364,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	60.724.054.013,00	52.838.948.103,00	87,01	52.095.154.597,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.657.267.013,00	52.838.948.103,00	87,11	51.912.241.028,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.400.117.015,00	36.911.384.925,00	89,16	32.294.273.460,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.023.835.998,00	15.839.263.178,00	83,26	19.317.392.568,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	139.330.000,00	88.300.000,00	63,37	119.375.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	93.984.000,00	0,00	0,00	181.200.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	66.787.000,00	0,00	0,00	182.913.569,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasaâ€“Luar Negeri	66.787.000,00	0,00	0,00	182.913.569,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.819.852.520,00	4.502.154.735,00	93,41	4.198.697.050,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.636.145.520,00	3.494.495.520,00	96,10	2.562.500.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	440.450.000,00	415.800.000,00	94,40	545.500.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	17.000.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	2.897.695.520,00	2.897.695.520,00	100,00	0,00
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	279.000.000,00	162.000.000,00	58,06	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.183.707.000,00	1.007.659.215,00	85,13	1.636.197.050,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.084.057.000,00	910.509.215,00	83,99	1.372.897.050,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	99.650.000,00	97.150.000,00	97,49	263.300.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	49.216.290.284,00	49.155.549.251,20	99,88	51.675.409.567,00

1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	49.216.290.284,00	49.155.549.251,20	99,88	51.675.409.567,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	49.216.290.284,00	49.155.549.251,20	99,88	51.675.409.567,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	59.841.392.690,00	50.862.889.366,00	85,00	40.551.083.311,78
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	59.841.392.690,00	50.862.889.366,00	85,00	40.551.083.311,78
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	59.841.392.690,00	50.862.889.366,00	85,00	40.551.083.311,78
5.1.05	**Belanja Hibah**	**46.400.569.000,00**	**45.256.974.282,00**	**97,54**	**30.153.343.300,00**
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	36.615.353.000,00	35.926.175.000,00	98,12	19.680.000.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	36.615.353.000,00	35.926.175.000,00	98,12	19.680.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	36.615.353.000,00	35.926.175.000,00	98,12	19.680.000.000,00
5.1.05.03	Belanja Hibah kepada BUMN	3.996.000.000,00	3.996.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
5.1.05.03.01	Belanja Hibah Uang kepada BUMN	3.996.000.000,00	3.996.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
5.1.05.03.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada BUMN	3.996.000.000,00	3.996.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.943.970.000,00	4.489.553.282,00	90,81	6.649.580.800,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000,00	262.672.182,00	87,56	481.173.900,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000,00	262.672.182,00	87,56	481.173.900,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	150.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	150.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.393.970.000,00	4.126.881.100,00	93,92	5.918.406.900,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.393.970.000,00	4.126.881.100,00	93,92	5.918.406.900,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	845.246.000,00	845.246.000,00	100,00	823.762.500,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	845.246.000,00	845.246.000,00	100,00	823.762.500,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	845.246.000,00	845.246.000,00	100,00	823.762.500,00
5.1.06	**Belanja Bantuan Sosial**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.482.600.000,00**
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	1.482.600.000,00

1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	1.182.600.000,00
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	1.182.600.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**997.719.782.947,00**	**909.963.663.123,20**	**91,20**	**844.293.304.487,73**
5.2	**BELANJA MODAL**	**144.429.549.430,00**	**130.216.588.940,88**	**90,16**	**187.745.257.267,77**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**20.008.291.934,00**	**17.448.098.019,00**	**87,20**	**33.247.679.146,00**
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	79.000.000,00	67.678.000,00	85,67	914.286.200,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	6.000.000,00	5.950.000,00	99,17	863.286.200,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	6.000.000,00	5.950.000,00	99,17	863.286.200,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	73.000.000,00	61.728.000,00	84,56	51.000.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	61.000.000,00	49.728.000,00	81,52	11.000.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.376.903.000,00	2.363.664.000,00	99,44	3.316.210.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.376.903.000,00	2.363.664.000,00	99,44	3.316.210.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	986.300.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	761.020.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	34.390.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	180.000.000,00	173.064.000,00	96,15	170.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.196.903.000,00	2.190.600.000,00	99,71	1.364.500.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.418.919.100,00	1.361.456.260,00	56,28	2.866.019.994,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	600.899.000,00	310.148.500,00	51,61	1.103.302.504,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	4.576.000,00	4.576.000,00	100,00	5.133.700,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	77.304.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	596.323.000,00	305.572.500,00	51,24	1.020.864.804,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.818.020.100,00	1.051.307.760,00	57,83	1.762.717.490,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.628.549.170,00	935.491.050,00	57,44	1.191.138.790,00
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	1.144.000,00	1.144.000,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	2.545.260,00	2.545.260,00	100,00	9.487.100,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	1.948.000,00	1.948.000,00	100,00	61.180.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	183.833.670,00	110.179.450,00	59,93	484.911.600,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	109.945.800,00	105.435.800,00	95,90	704.969.950,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	109.945.800,00	105.435.800,00	95,90	621.754.500,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0,00	0,00	0,00	183.665.500,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	109.945.800,00	105.435.800,00	95,90	51.118.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	378.971.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	83.215.450,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	68.215.450,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.236.255.000,00	3.186.370.000,00	98,46	16.783.201.847,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	699.650.000,00	699.650.000,00	100,00	16.783.201.847,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	699.650.000,00	699.650.000,00	100,00	11.402.754.417,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	0,00	0,00	0,00	1.452.600.000,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	0,00	361.796.400,00
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	0,00	0,00	0,00	2.602.511.030,00
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	0,00	0,00	0,00	301.040.000,00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	0,00	0,00	0,00	662.500.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.536.605.000,00	2.486.720.000,00	98,03	0,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.536.605.000,00	2.486.720.000,00	98,03	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	170.775.000,00	170.750.000,00	99,99	55.979.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	170.775.000,00	170.750.000,00	99,99	54.120.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	170.775.000,00	170.750.000,00	99,99	54.120.000,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00	1.859.000,00
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	1.859.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.410.553.369,00	2.168.240.000,00	89,95	4.058.652.806,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.119.790.869,00	1.917.315.000,00	90,45	3.236.873.400,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.080.801.500,00	1.017.890.000,00	94,18	2.085.058.500,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.038.989.369,00	899.425.000,00	86,57	1.100.814.900,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	290.762.500,00	250.925.000,00	86,30	821.779.406,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	29.870.000,00	22.000.000,00	73,65	75.561.200,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	260.892.500,00	228.925.000,00	87,75	746.218.206,00

1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	70.039.000,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0,00	0,00	0,00	70.039.000,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	0,00	0,00	0,00	70.039.000,00
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	6.200.000,00	6.200.000,00	100,00	0,00
5.2.02.14.02	Belanja Modal Alat Bantu Produksi	6.200.000,00	6.200.000,00	100,00	0,00
5.2.02.14.02.0003	Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya	6.200.000,00	6.200.000,00	100,00	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	31.986.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	31.986.000,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	31.986.000,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	942.500,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	942.500,00
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	0,00	0,00	0,00	942.500,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	130.566.000,00	36.691.000,00	28,10	106.302.500,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	130.566.000,00	36.691.000,00	28,10	106.302.500,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	125.000.000,00	31.125.000,00	24,90	99.345.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	5.566.000,00	5.566.000,00	100,00	6.957.500,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	65.439.200,00	49.993.000,00	76,40	43.242.500,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	65.439.200,00	49.993.000,00	76,40	43.242.500,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	65.439.200,00	49.993.000,00	76,40	6.242.500,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.002.685.465,00	3.002.104.099,00	99,98	2.547.009.018,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.002.685.465,00	3.002.104.099,00	99,98	2.547.009.018,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.002.685.465,00	3.002.104.099,00	99,98	2.547.009.018,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.000.000.000,00	4.928.465.860,00	82,14	1.740.527.831,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.000.000.000,00	4.928.465.860,00	82,14	1.740.527.831,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.000.000.000,00	4.928.465.860,00	82,14	1.740.527.831,00
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**30.766.834.341,00**	**22.220.323.063,00**	**72,22**	**42.398.764.060,35**
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	28.535.715.041,00	20.673.144.013,00	72,45	40.707.926.960,35
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	28.535.715.041,00	20.673.144.013,00	72,45	40.707.926.960,35
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	23.933.808.670,00	17.675.153.674,00	73,85	38.937.427.285,11
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.849.216.087,00	1.833.452.805,00	99,15	0,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	134.487.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	259.588.194,10
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	2.112.677.284,00	886.881.034,00	41,98	1.069.205.959,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	50.000.000,00	0,00	0,00	250.185.522,14
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	285.000.000,00	107.356.500,00	37,67	146.520.000,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	170.526.000,00	170.300.000,00	99,87	0,00

1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.2.03.02.01.0004	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.231.119.300,00	647.113.000,00	52,56	1.688.337.100,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.231.119.300,00	647.113.000,00	52,56	1.688.337.100,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	603.750.000,00	149.099.000,00	24,70	0,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	627.369.300,00	498.014.000,00	79,38	1.688.337.100,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.000.000.000,00	900.066.050,00	90,01	0,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.000.000.000,00	900.066.050,00	90,01	0,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.000.000.000,00	900.066.050,00	90,01	0,00
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**85.768.317.735,00**	**82.813.149.768,88**	**96,55**	**104.191.838.531,42**
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	73.400.228.668,00	71.040.302.789,00	96,78	92.373.973.355,42
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	72.342.201.650,00	70.029.520.904,00	96,80	91.010.263.173,42
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	72.342.201.650,00	70.029.520.904,00	96,80	87.116.592.838,42
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.893.670.335,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.058.027.018,00	1.010.781.885,00	95,53	1.363.710.182,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.058.027.018,00	1.010.781.885,00	95,53	1.363.710.182,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	10.368.089.067,00	9.887.012.979,88	95,36	11.676.597.166,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	10.068.033.867,00	9.587.847.979,88	95,23	11.477.938.773,00
5.2.04.02.01.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	1.419.969.432,00	1.418.340.000,00	99,89	1.428.510.000,00
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	151.146.600,00	0,00	0,00	91.383.600,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	8.496.917.835,00	8.169.507.979,88	96,15	9.958.045.173,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	100.055.200,00	99.900.000,00	99,84	0,00
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	100.055.200,00	99.900.000,00	99,84	0,00
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	200.000.000,00	199.265.000,00	99,63	0,00
5.2.04.02.05.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	200.000.000,00	199.265.000,00	99,63	0,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	198.658.393,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	198.658.393,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	2.000.000.000,00	1.885.834.000,00	94,29	141.268.010,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	2.000.000.000,00	1.885.834.000,00	94,29	0,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	2.000.000.000,00	1.885.834.000,00	94,29	0,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	141.268.010,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	141.268.010,00

1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	**7.884.105.420,00**	**7.733.870.580,00**	**98,09**	**7.906.975.530,00**
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	65.600.000,00	65.400.000,00	99,70	0,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	65.600.000,00	65.400.000,00	99,70	0,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	65.600.000,00	65.400.000,00	99,70	0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	16.400.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	16.400.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	0,00	0,00	0,00	16.400.000,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	5.076.650,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	5.076.650,00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	5.076.650,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.668.505.420,00	7.668.470.580,00	100,00	7.885.498.880,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.668.505.420,00	7.668.470.580,00	100,00	7.885.498.880,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.668.505.420,00	7.668.470.580,00	100,00	7.885.498.880,00
5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**	**2.000.000,00**	**1.147.510,00**	**57,38**	**0,00**
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	2.000.000,00	1.147.510,00	57,38	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2.000.000,00	1.147.510,00	57,38	0,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	2.000.000,00	1.147.510,00	57,38	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**144.429.549.430,00**	**130.216.588.940,88**	**90,16**	**187.745.257.267,77**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**4.000.000.000,00**	**3.581.937.735,00**	**89,55**	**4.700.424.800,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	3.581.937.735,00	89,55	4.700.424.800,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	3.581.937.735,00	89,55	4.700.424.800,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	3.581.937.735,00	89,55	4.700.424.800,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	3.581.937.735,00	89,55	4.700.424.800,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**4.000.000.000,00**	**3.581.937.735,00**	**89,55**	**4.700.424.800,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**204.997.221.000,00**	**204.997.221.000,00**	**100,00**	**199.480.027.400,00**
5.4.01	**Belanja Bagi Hasil**	**2.170.000.000,00**	**2.170.000.000,00**	**100,00**	**1.961.800.000,00**
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.170.000.000,00	2.170.000.000,00	100,00	1.961.800.000,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.170.000.000,00	2.170.000.000,00	100,00	1.961.800.000,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.170.000.000,00	2.170.000.000,00	100,00	1.961.800.000,00
5.4.02	**Belanja Bantuan Keuangan**	**202.827.221.000,00**	**202.827.221.000,00**	**100,00**	**197.518.227.400,00**
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	135.230.180.200,00

1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.4.02.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	135.230.180.200,00
5.4.02.02.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	135.230.180.200,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	202.827.221.000,00	202.827.221.000,00	100,00	62.288.047.200,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	202.827.221.000,00	202.827.221.000,00	100,00	62.288.047.200,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	66.266.145.000,00	66.266.145.000,00	100,00	62.288.047.200,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	136.561.076.000,00	136.561.076.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**204.997.221.000,00**	**204.997.221.000,00**	**100,00**	**199.480.027.400,00**
	JUMLAH BELANJA	**1.352.146.553.377,00**	**1.248.759.410.799,08**	**92,35**	**1.236.219.013.955,50**
	SURPLUS/DEFISIT	**(91.939.692.403,00)**	**(52.934.722.534,51)**	**57,58**	**(44.108.298.098,27)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**91.939.692.403,00**	**91.939.692.402,65**	**100,00**	**139.072.990.500,92**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**94.964.692.403,00**	**94.964.692.402,65**	**100,00**	**142.072.990.500,92**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	94.964.692.403,00	94.964.692.402,65	100,00	142.072.990.500,92
6.1.01.05	Penghematan Belanja	76.423.192.167,00	94.964.692.402,65	124,26	142.072.990.500,92
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	76.423.192.167,00	94.964.692.402,65	124,26	142.072.990.500,92
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	35.465.388.904,00	43.244.441.234,00	121,93	142.072.990.500,92
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	3.544.405.096,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.05.01.0003	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.625.429.943,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.05.01.0004	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD	536.773.396,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.05.01.0005	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	22.177.915,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	9.740.510.874,00	33.178.750.932,65	340,63	0,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	12.002.590.458,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	2.196.642.878,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	9.289.272.703,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	18.541.500.236,00	18.541.500.236,00	100,00	0,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	18.541.500.236,00	18.541.500.236,00	100,00	0,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	18.541.500.236,00	18.541.500.236,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**94.964.692.403,00**	**94.964.692.402,65**	**100,00**	**142.072.990.500,92**

1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**3.025.000.000,00**	**3.025.000.000,00**	**100,00**	**3.000.000.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.025.000.000,00	3.025.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.025.000.000,00	3.025.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.025.000.000,00	3.025.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.025.000.000,00	3.025.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**3.025.000.000,00**	**3.025.000.000,00**	**100,00**	**3.000.000.000,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**91.939.692.403,00**	**91.939.692.402,65**	**100,00**	**139.072.990.500,92**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**39.004.969.868,14**	**0,00**	**94.964.692.402,65**

Bupati Dairi,

Vickner Sinaga

1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**3.025.000.000,00**	**3.025.000.000,00**	**100,00**	**3.000.000.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.025.000.000,00	3.025.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.025.000.000,00	3.025.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.025.000.000,00	3.025.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.025.000.000,00	3.025.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**3.025.000.000,00**	**3.025.000.000,00**	**100,00**	**3.000.000.000,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**91.939.692.403,00**	**91.939.692.402,65**	**100,00**	**139.072.990.500,92**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**39.004.969.868,14**	**0,00**	**94.964.692.402,65**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : Dinas Pendidikan

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**435.606.547.381,00**	**400.852.075.192,20**	**(34.754.472.188,80)**	**92,02**
1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	92.727.513.346,00	83.198.373.379,20	(9.529.139.966,80)	89,72
1.01.02.2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	52.211.698.905,00	45.806.812.600,80	(6.404.886.304,20)	87,73
1.01.02.2.01.0001		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.227.044.000,00	1.194.334.500,00	(32.709.500,00)	97,33
1.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	187.040.500,00	175.448.100,00	(11.592.400,00)	93,80
1.01.02.2.01.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	100,00
1.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.220.500,00	171.628.100,00	(11.592.400,00)	93,67
1.01.02.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	1.040.003.500,00	1.018.886.400,00	(21.117.100,00)	97,97
1.01.02.2.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.040.003.500,00	1.018.886.400,00	(21.117.100,00)	97,97
1.01.02.2.01.0003		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	935.591.100,00	918.306.600,00	(17.284.500,00)	98,15
1.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	72.789.600,00	65.894.600,00	(6.895.000,00)	90,53
1.01.02.2.01.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	100,00
1.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.949.600,00	61.054.600,00	(6.895.000,00)	89,85
1.01.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	862.801.500,00	852.412.000,00	(10.389.500,00)	98,80
1.01.02.2.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	862.801.500,00	852.412.000,00	(10.389.500,00)	98,80
1.01.02.2.01.0004		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	696.112.000,00	685.159.000,00	(10.953.000,00)	98,43
1.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	24.112.000,00	16.125.000,00	(7.987.000,00)	66,88
1.01.02.2.01.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	4.740.000,00	4.740.000,00	0,00	100,00
1.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.372.000,00	11.385.000,00	(7.987.000,00)	58,77
1.01.02.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	672.000.000,00	669.034.000,00	(2.966.000,00)	99,56
1.01.02.2.01.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	672.000.000,00	669.034.000,00	(2.966.000,00)	99,56

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.01.02.2.01.0006		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	875.313.500,00	609.849.200,00	(265.464.300,00)	69,67
1.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	38.865.200,00	35.356.200,00	(3.509.000,00)	90,97
1.01.02.2.01.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	100,00
1.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.345.200,00	29.836.200,00	(3.509.000,00)	89,48
1.01.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	836.448.300,00	574.493.000,00	(261.955.300,00)	68,68
1.01.02.2.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	836.448.300,00	574.493.000,00	(261.955.300,00)	68,68
1.01.02.2.01.0014		Pengadaan Mebel Sekolah	897.333.000,00	398.528.500,00	(498.804.500,00)	44,41
1.01.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	15.961.500,00	7.028.500,00	(8.933.000,00)	44,03
1.01.02.2.01.0014	5.1.01	Belanja Pegawai	9.870.000,00	5.640.000,00	(4.230.000,00)	57,14
1.01.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.091.500,00	1.388.500,00	(4.703.000,00)	22,79
1.01.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	881.371.500,00	391.500.000,00	(489.871.500,00)	44,42
1.01.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	881.371.500,00	391.500.000,00	(489.871.500,00)	44,42
1.01.02.2.01.0022		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	413.042.000,00	406.802.000,00	(6.240.000,00)	98,49
1.01.02.2.01.0022	5.1	BELANJA OPERASI	13.042.000,00	6.942.000,00	(6.100.000,00)	53,23
1.01.02.2.01.0022	5.1.01	Belanja Pegawai	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	100,00
1.01.02.2.01.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.812.000,00	2.712.000,00	(6.100.000,00)	30,78
1.01.02.2.01.0022	5.2	BELANJA MODAL	400.000.000,00	399.860.000,00	(140.000,00)	99,97
1.01.02.2.01.0022	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.000.000,00	399.860.000,00	(140.000,00)	99,97
1.01.02.2.01.0025		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	392.918.800,00	268.565.900,00	(124.352.900,00)	68,35
1.01.02.2.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	392.918.800,00	268.565.900,00	(124.352.900,00)	68,35
1.01.02.2.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.918.800,00	268.565.900,00	(124.352.900,00)	68,35
1.01.02.2.01.0027		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	426.293.000,00	238.738.400,00	(187.554.600,00)	56,00
1.01.02.2.01.0027	5.1	BELANJA OPERASI	403.333.000,00	215.938.400,00	(187.394.600,00)	53,54
1.01.02.2.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.333.000,00	215.938.400,00	(187.394.600,00)	53,54
1.01.02.2.01.0027	5.2	BELANJA MODAL	22.960.000,00	22.800.000,00	(160.000,00)	99,30
1.01.02.2.01.0027	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.960.000,00	22.800.000,00	(160.000,00)	99,30
1.01.02.2.01.0028		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	194.587.500,00	130.359.200,00	(64.228.300,00)	66,99
1.01.02.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	194.587.500,00	130.359.200,00	(64.228.300,00)	66,99
1.01.02.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.587.500,00	130.359.200,00	(64.228.300,00)	66,99
1.01.02.2.01.0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	35.325.921.169,00	35.275.513.250,80	(50.407.918,20)	99,86
1.01.02.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	28.848.205.884,00	28.797.810.736,80	(50.395.147,20)	99,83
1.01.02.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.848.205.884,00	28.797.810.736,80	(50.395.147,20)	99,83
1.01.02.2.01.0029	5.2	BELANJA MODAL	6.477.715.285,00	6.477.702.514,00	(12.771,00)	100,00
1.01.02.2.01.0029	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.911.865.705,00	1.911.852.934,00	(12.771,00)	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.01.02.2.01.0029	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.565.849.580,00	4.565.849.580,00	0,00	100,00
1.01.02.2.01.0030		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	293.945.400,00	253.311.750,00	(40.633.650,00)	86,18
1.01.02.2.01.0030	5.1	BELANJA OPERASI	293.945.400,00	253.311.750,00	(40.633.650,00)	86,18
1.01.02.2.01.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.945.400,00	253.311.750,00	(40.633.650,00)	86,18
1.01.02.2.01.0031		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.390.135.000,00	1.366.088.000,00	(24.047.000,00)	98,27
1.01.02.2.01.0031	5.1	BELANJA OPERASI	40.135.000,00	32.543.000,00	(7.592.000,00)	81,08
1.01.02.2.01.0031	5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00
1.01.02.2.01.0031	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.115.000,00	30.523.000,00	(7.592.000,00)	80,08
1.01.02.2.01.0031	5.2	BELANJA MODAL	1.350.000.000,00	1.333.545.000,00	(16.455.000,00)	98,78
1.01.02.2.01.0031	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.350.000.000,00	1.333.545.000,00	(16.455.000,00)	98,78
1.01.02.2.01.0035		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	202.092.626,00	0,00	(202.092.626,00)	0,00
1.01.02.2.01.0035	5.1	BELANJA OPERASI	190.612.626,00	0,00	(190.612.626,00)	0,00
1.01.02.2.01.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.612.626,00	0,00	(190.612.626,00)	0,00
1.01.02.2.01.0035	5.2	BELANJA MODAL	11.480.000,00	0,00	(11.480.000,00)	0,00
1.01.02.2.01.0035	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.480.000,00	0,00	(11.480.000,00)	0,00
1.01.02.2.01.0036		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	272.071.600,00	139.519.600,00	(132.552.000,00)	51,28
1.01.02.2.01.0036	5.1	BELANJA OPERASI	239.111.600,00	106.969.600,00	(132.142.000,00)	44,74
1.01.02.2.01.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.111.600,00	106.969.600,00	(132.142.000,00)	44,74
1.01.02.2.01.0036	5.2	BELANJA MODAL	32.960.000,00	32.550.000,00	(410.000,00)	98,76
1.01.02.2.01.0036	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.960.000,00	32.550.000,00	(410.000,00)	98,76
1.01.02.2.01.0037		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	271.934.000,00	118.864.400,00	(153.069.600,00)	43,71
1.01.02.2.01.0037	5.1	BELANJA OPERASI	255.934.000,00	102.864.400,00	(153.069.600,00)	40,19
1.01.02.2.01.0037	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.934.000,00	102.864.400,00	(153.069.600,00)	40,19
1.01.02.2.01.0037	5.2	BELANJA MODAL	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00
1.01.02.2.01.0037	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00
1.01.02.2.01.0038		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	264.728.000,00	198.174.000,00	(66.554.000,00)	74,86
1.01.02.2.01.0038	5.1	BELANJA OPERASI	264.728.000,00	198.174.000,00	(66.554.000,00)	74,86
1.01.02.2.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.728.000,00	198.174.000,00	(66.554.000,00)	74,86
1.01.02.2.01.0039		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	78.548.800,00	64.281.400,00	(14.267.400,00)	81,84
1.01.02.2.01.0039	5.1	BELANJA OPERASI	78.548.800,00	64.281.400,00	(14.267.400,00)	81,84
1.01.02.2.01.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.548.800,00	64.281.400,00	(14.267.400,00)	81,84
1.01.02.2.01.0041		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	46.326.500,00	0,00	(46.326.500,00)	0,00
1.01.02.2.01.0041	5.1	BELANJA OPERASI	28.826.500,00	0,00	(28.826.500,00)	0,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.01.02.2.01.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.826.500,00	0,00	(28.826.500,00)	0,00
1.01.02.2.01.0041	5.2	BELANJA MODAL	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	0,00
1.01.02.2.01.0041	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	0,00
1.01.02.2.01.0043		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	136.389.000,00	101.506.500,00	(34.882.500,00)	74,42
1.01.02.2.01.0043	5.1	BELANJA OPERASI	136.389.000,00	101.506.500,00	(34.882.500,00)	74,42
1.01.02.2.01.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.389.000,00	101.506.500,00	(34.882.500,00)	74,42
1.01.02.2.01.0047		Pembangunan Ruang Kelas Baru	899.506.200,00	879.926.900,00	(19.579.300,00)	97,82
1.01.02.2.01.0047	5.1	BELANJA OPERASI	85.660.200,00	80.296.200,00	(5.364.000,00)	93,74
1.01.02.2.01.0047	5.1.01	Belanja Pegawai	7.660.000,00	7.660.000,00	0,00	100,00
1.01.02.2.01.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.000.200,00	72.636.200,00	(5.364.000,00)	93,12
1.01.02.2.01.0047	5.2	BELANJA MODAL	813.846.000,00	799.630.700,00	(14.215.300,00)	98,25
1.01.02.2.01.0047	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	813.846.000,00	799.630.700,00	(14.215.300,00)	98,25
1.01.02.2.01.0048		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.301.474.060,00	116.073.000,00	(1.185.401.060,00)	8,92
1.01.02.2.01.0048	5.1	BELANJA OPERASI	84.613.500,00	14.511.000,00	(70.102.500,00)	17,15
1.01.02.2.01.0048	5.1.01	Belanja Pegawai	9.020.000,00	2.700.000,00	(6.320.000,00)	29,93
1.01.02.2.01.0048	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.593.500,00	11.811.000,00	(63.782.500,00)	15,62
1.01.02.2.01.0048	5.2	BELANJA MODAL	1.216.860.560,00	101.562.000,00	(1.115.298.560,00)	8,35
1.01.02.2.01.0048	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.216.860.560,00	101.562.000,00	(1.115.298.560,00)	8,35
1.01.02.2.01.0049		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	85.908.900,00	79.982.900,00	(5.926.000,00)	93,10
1.01.02.2.01.0049	5.1	BELANJA OPERASI	85.908.900,00	79.982.900,00	(5.926.000,00)	93,10
1.01.02.2.01.0049	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.908.900,00	79.982.900,00	(5.926.000,00)	93,10
1.01.02.2.01.0050		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	110.353.200,00	97.312.500,00	(13.040.700,00)	88,18
1.01.02.2.01.0050	5.1	BELANJA OPERASI	110.353.200,00	97.312.500,00	(13.040.700,00)	88,18
1.01.02.2.01.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.353.200,00	97.312.500,00	(13.040.700,00)	88,18
1.01.02.2.01.0051		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.474.129.550,00	2.265.615.100,00	(3.208.514.450,00)	41,39
1.01.02.2.01.0051	5.1	BELANJA OPERASI	287.624.200,00	106.243.200,00	(181.381.000,00)	36,94
1.01.02.2.01.0051	5.1.01	Belanja Pegawai	13.260.000,00	6.440.000,00	(6.820.000,00)	48,57
1.01.02.2.01.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.364.200,00	99.803.200,00	(174.561.000,00)	36,38
1.01.02.2.01.0051	5.2	BELANJA MODAL	5.186.505.350,00	2.159.371.900,00	(3.027.133.450,00)	41,63
1.01.02.2.01.0051	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.186.505.350,00	2.159.371.900,00	(3.027.133.450,00)	41,63
1.01.02.2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	36.434.854.157,00	33.994.729.247,40	(2.440.124.909,60)	93,30
1.01.02.2.02.0001		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	99.000.000,00	98.740.000,00	(260.000,00)	99,74
1.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	99.000.000,00	98.740.000,00	(260.000,00)	99,74

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.000.000,00	98.740.000,00	(260.000,00)	99,74
1.01.02.2.02.0003		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.294.751.600,00	1.283.241.600,00	(11.510.000,00)	99,11
1.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	54.276.600,00	54.249.600,00	(27.000,00)	99,95
1.01.02.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	7.640.000,00	7.640.000,00	0,00	100,00
1.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.636.600,00	46.609.600,00	(27.000,00)	99,94
1.01.02.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	1.240.475.000,00	1.228.992.000,00	(11.483.000,00)	99,07
1.01.02.2.02.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.240.475.000,00	1.228.992.000,00	(11.483.000,00)	99,07
1.01.02.2.02.0004		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	735.049.600,00	731.571.400,00	(3.478.200,00)	99,53
1.01.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	44.377.400,00	44.357.400,00	(20.000,00)	99,95
1.01.02.2.02.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	11.460.000,00	11.460.000,00	0,00	100,00
1.01.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.917.400,00	32.897.400,00	(20.000,00)	99,94
1.01.02.2.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	690.672.200,00	687.214.000,00	(3.458.200,00)	99,50
1.01.02.2.02.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	690.672.200,00	687.214.000,00	(3.458.200,00)	99,50
1.01.02.2.02.0005		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	454.031.100,00	450.389.100,00	(3.642.000,00)	99,20
1.01.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	31.527.100,00	31.475.100,00	(52.000,00)	99,84
1.01.02.2.02.0005	5.1.01	Belanja Pegawai	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	100,00
1.01.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.487.100,00	27.435.100,00	(52.000,00)	99,81
1.01.02.2.02.0005	5.2	BELANJA MODAL	422.504.000,00	418.914.000,00	(3.590.000,00)	99,15
1.01.02.2.02.0005	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	422.504.000,00	418.914.000,00	(3.590.000,00)	99,15
1.01.02.2.02.0006		Pembangunan Laboratorium	1.655.187.600,00	1.640.948.600,00	(14.239.000,00)	99,14
1.01.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	82.019.600,00	81.926.600,00	(93.000,00)	99,89
1.01.02.2.02.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	11.460.000,00	11.460.000,00	0,00	100,00
1.01.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.559.600,00	70.466.600,00	(93.000,00)	99,87
1.01.02.2.02.0006	5.2	BELANJA MODAL	1.573.168.000,00	1.559.022.000,00	(14.146.000,00)	99,10
1.01.02.2.02.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.573.168.000,00	1.559.022.000,00	(14.146.000,00)	99,10
1.01.02.2.02.0012		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	576.871.070,00	120.230.500,00	(456.640.570,00)	20,84
1.01.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	21.409.500,00	10.973.500,00	(10.436.000,00)	51,26
1.01.02.2.02.0012	5.1.01	Belanja Pegawai	4.040.000,00	2.020.000,00	(2.020.000,00)	50,00
1.01.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.369.500,00	8.953.500,00	(8.416.000,00)	51,55
1.01.02.2.02.0012	5.2	BELANJA MODAL	555.461.570,00	109.257.000,00	(446.204.570,00)	19,67
1.01.02.2.02.0012	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	555.461.570,00	109.257.000,00	(446.204.570,00)	19,67
1.01.02.2.02.0014		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.570.952.766,00	3.387.590.300,00	(1.183.362.466,00)	74,11
1.01.02.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	199.457.900,00	149.845.600,00	(49.612.300,00)	75,13
1.01.02.2.02.0014	5.1.01	Belanja Pegawai	28.870.000,00	24.830.000,00	(4.040.000,00)	86,01
1.01.02.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.587.900,00	125.015.600,00	(45.572.300,00)	73,29

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.01.02.2.02.0014	5.2	BELANJA MODAL	4.371.494.866,00	3.237.744.700,00	(1.133.750.166,00)	74,06
1.01.02.2.02.0014	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.371.494.866,00	3.237.744.700,00	(1.133.750.166,00)	74,06
1.01.02.2.02.0017		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	175.425.100,00	0,00	(175.425.100,00)	0,00
1.01.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	15.590.900,00	0,00	(15.590.900,00)	0,00
1.01.02.2.02.0017	5.1.01	Belanja Pegawai	4.040.000,00	0,00	(4.040.000,00)	0,00
1.01.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.550.900,00	0,00	(11.550.900,00)	0,00
1.01.02.2.02.0017	5.2	BELANJA MODAL	159.834.200,00	0,00	(159.834.200,00)	0,00
1.01.02.2.02.0017	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	159.834.200,00	0,00	(159.834.200,00)	0,00
1.01.02.2.02.0024		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	116.661.200,00	116.096.200,00	(565.000,00)	99,52
1.01.02.2.02.0024	5.1	BELANJA OPERASI	14.643.200,00	14.598.200,00	(45.000,00)	99,69
1.01.02.2.02.0024	5.1.01	Belanja Pegawai	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	100,00
1.01.02.2.02.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.603.200,00	10.558.200,00	(45.000,00)	99,58
1.01.02.2.02.0024	5.2	BELANJA MODAL	102.018.000,00	101.498.000,00	(520.000,00)	99,49
1.01.02.2.02.0024	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.018.000,00	101.498.000,00	(520.000,00)	99,49
1.01.02.2.02.0025		Pengadaan Mebel Sekolah	352.771.100,00	152.821.100,00	(199.950.000,00)	43,32
1.01.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	8.671.100,00	7.821.100,00	(850.000,00)	90,20
1.01.02.2.02.0025	5.1.01	Belanja Pegawai	6.410.000,00	6.410.000,00	0,00	100,00
1.01.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.261.100,00	1.411.100,00	(850.000,00)	62,41
1.01.02.2.02.0025	5.2	BELANJA MODAL	344.100.000,00	145.000.000,00	(199.100.000,00)	42,14
1.01.02.2.02.0025	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	344.100.000,00	145.000.000,00	(199.100.000,00)	42,14
1.01.02.2.02.0035		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	276.871.600,00	276.411.600,00	(460.000,00)	99,83
1.01.02.2.02.0035	5.1	BELANJA OPERASI	6.096.600,00	5.946.600,00	(150.000,00)	97,54
1.01.02.2.02.0035	5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00
1.01.02.2.02.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.076.600,00	3.926.600,00	(150.000,00)	96,32
1.01.02.2.02.0035	5.2	BELANJA MODAL	270.775.000,00	270.465.000,00	(310.000,00)	99,89
1.01.02.2.02.0035	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	270.775.000,00	270.465.000,00	(310.000,00)	99,89
1.01.02.2.02.0038		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	332.248.800,00	289.818.668,00	(42.430.132,00)	87,23
1.01.02.2.02.0038	5.1	BELANJA OPERASI	305.680.300,00	263.898.668,00	(41.781.632,00)	86,33
1.01.02.2.02.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.680.300,00	263.898.668,00	(41.781.632,00)	86,33
1.01.02.2.02.0038	5.2	BELANJA MODAL	26.568.500,00	25.920.000,00	(648.500,00)	97,56
1.01.02.2.02.0038	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.568.500,00	25.920.000,00	(648.500,00)	97,56
1.01.02.2.02.0042		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	24.561.560.000,00	24.550.610.679,40	(10.949.320,60)	99,96
1.01.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	20.368.084.400,00	20.357.738.514,40	(10.345.885,60)	99,95
1.01.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.368.084.400,00	20.357.738.514,40	(10.345.885,60)	99,95
1.01.02.2.02.0042	5.2	BELANJA MODAL	4.193.475.600,00	4.192.872.165,00	(603.435,00)	99,99

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.01.02.2.02.0042	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.090.819.760,00	1.090.251.165,00	(568.595,00)	99,95
1.01.02.2.02.0042	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.102.655.840,00	3.102.621.000,00	(34.840,00)	100,00
1.01.02.2.02.0049		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	115.385.900,00	0,00	(115.385.900,00)	0,00
1.01.02.2.02.0049	5.1	BELANJA OPERASI	72.885.900,00	0,00	(72.885.900,00)	0,00
1.01.02.2.02.0049	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.885.900,00	0,00	(72.885.900,00)	0,00
1.01.02.2.02.0049	5.2	BELANJA MODAL	42.500.000,00	0,00	(42.500.000,00)	0,00
1.01.02.2.02.0049	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.500.000,00	0,00	(42.500.000,00)	0,00
1.01.02.2.02.0050		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	175.275.000,00	0,00	(175.275.000,00)	0,00
1.01.02.2.02.0050	5.1	BELANJA OPERASI	159.275.000,00	0,00	(159.275.000,00)	0,00
1.01.02.2.02.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.275.000,00	0,00	(159.275.000,00)	0,00
1.01.02.2.02.0050	5.2	BELANJA MODAL	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	0,00
1.01.02.2.02.0050	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	0,00
1.01.02.2.02.0054		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	35.652.221,00	0,00	(35.652.221,00)	0,00
1.01.02.2.02.0054	5.1	BELANJA OPERASI	35.652.221,00	0,00	(35.652.221,00)	0,00
1.01.02.2.02.0054	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.652.221,00	0,00	(35.652.221,00)	0,00
1.01.02.2.02.0058		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	117.226.600,00	113.356.600,00	(3.870.000,00)	96,70
1.01.02.2.02.0058	5.1	BELANJA OPERASI	117.226.600,00	113.356.600,00	(3.870.000,00)	96,70
1.01.02.2.02.0058	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.226.600,00	113.356.600,00	(3.870.000,00)	96,70
1.01.02.2.02.0059		Pembangunan Ruang Kelas Baru	403.764.800,00	397.852.800,00	(5.912.000,00)	98,54
1.01.02.2.02.0059	5.1	BELANJA OPERASI	75.604.800,00	72.627.800,00	(2.977.000,00)	96,06
1.01.02.2.02.0059	5.1.01	Belanja Pegawai	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	100,00
1.01.02.2.02.0059	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.544.800,00	66.567.800,00	(2.977.000,00)	95,72
1.01.02.2.02.0059	5.2	BELANJA MODAL	328.160.000,00	325.225.000,00	(2.935.000,00)	99,11
1.01.02.2.02.0059	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	328.160.000,00	325.225.000,00	(2.935.000,00)	99,11
1.01.02.2.02.0064		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	386.168.100,00	385.050.100,00	(1.118.000,00)	99,71
1.01.02.2.02.0064	5.1	BELANJA OPERASI	21.242.100,00	21.200.100,00	(42.000,00)	99,80
1.01.02.2.02.0064	5.1.01	Belanja Pegawai	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	100,00
1.01.02.2.02.0064	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.202.100,00	17.160.100,00	(42.000,00)	99,76
1.01.02.2.02.0064	5.2	BELANJA MODAL	364.926.000,00	363.850.000,00	(1.076.000,00)	99,71
1.01.02.2.02.0064	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	364.926.000,00	363.850.000,00	(1.076.000,00)	99,71
1.01.02.2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3.721.802.784,00	3.097.105.531,00	(624.697.253,00)	83,22
1.01.02.2.03.0004		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	349.365.400,00	347.957.100,00	(1.408.300,00)	99,60
1.01.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	19.666.100,00	19.557.100,00	(109.000,00)	99,45
1.01.02.2.03.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	4.910.000,00	4.910.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.01.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.756.100,00	14.647.100,00	(109.000,00)	99,26
1.01.02.2.03.0004	5.2	BELANJA MODAL	329.699.300,00	328.400.000,00	(1.299.300,00)	99,61
1.01.02.2.03.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	329.699.300,00	328.400.000,00	(1.299.300,00)	99,61
1.01.02.2.03.0012		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	54.764.000,00	54.077.000,00	(687.000,00)	98,75
1.01.02.2.03.0012	5.1	BELANJA OPERASI	4.764.000,00	4.084.000,00	(680.000,00)	85,73
1.01.02.2.03.0012	5.1.01	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.020.000,00	(680.000,00)	74,81
1.01.02.2.03.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.064.000,00	2.064.000,00	0,00	100,00
1.01.02.2.03.0012	5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.993.000,00	(7.000,00)	99,99
1.01.02.2.03.0012	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.993.000,00	(7.000,00)	99,99
1.01.02.2.03.0016		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	230.481.900,00	0,00	(230.481.900,00)	0,00
1.01.02.2.03.0016	5.1	BELANJA OPERASI	230.481.900,00	0,00	(230.481.900,00)	0,00
1.01.02.2.03.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.481.900,00	0,00	(230.481.900,00)	0,00
1.01.02.2.03.0017		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	186.595.000,00	0,00	(186.595.000,00)	0,00
1.01.02.2.03.0017	5.1	BELANJA OPERASI	186.595.000,00	0,00	(186.595.000,00)	0,00
1.01.02.2.03.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.595.000,00	0,00	(186.595.000,00)	0,00
1.01.02.2.03.0018		Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.300.660.884,00	2.144.800.781,00	(155.860.103,00)	93,23
1.01.02.2.03.0018	5.1	BELANJA OPERASI	2.283.050.884,00	2.127.190.781,00	(155.860.103,00)	93,17
1.01.02.2.03.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.700.884,00	210.960.481,00	41.259.597,00	124,31
1.01.02.2.03.0018	5.1.05	Belanja Hibah	2.113.350.000,00	1.916.230.300,00	(197.119.700,00)	90,67
1.01.02.2.03.0018	5.2	BELANJA MODAL	17.610.000,00	17.610.000,00	0,00	100,00
1.01.02.2.03.0018	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.610.000,00	17.610.000,00	0,00	100,00
1.01.02.2.03.0024		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	162.936.000,00	137.986.000,00	(24.950.000,00)	84,69
1.01.02.2.03.0024	5.1	BELANJA OPERASI	162.936.000,00	137.986.000,00	(24.950.000,00)	84,69
1.01.02.2.03.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.936.000,00	137.986.000,00	(24.950.000,00)	84,69
1.01.02.2.03.0026		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	89.755.000,00	78.702.200,00	(11.052.800,00)	87,69
1.01.02.2.03.0026	5.1	BELANJA OPERASI	89.755.000,00	78.702.200,00	(11.052.800,00)	87,69
1.01.02.2.03.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.755.000,00	78.702.200,00	(11.052.800,00)	87,69
1.01.02.2.03.0028		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	257.581.600,00	255.832.450,00	(1.749.150,00)	99,32
1.01.02.2.03.0028	5.1	BELANJA OPERASI	8.655.450,00	8.635.450,00	(20.000,00)	99,77
1.01.02.2.03.0028	5.1.01	Belanja Pegawai	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00
1.01.02.2.03.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.355.450,00	5.335.450,00	(20.000,00)	99,63
1.01.02.2.03.0028	5.2	BELANJA MODAL	248.926.150,00	247.197.000,00	(1.729.150,00)	99,31
1.01.02.2.03.0028	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	248.926.150,00	247.197.000,00	(1.729.150,00)	99,31

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.01.02.2.03.0039		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	89.663.000,00	77.750.000,00	(11.913.000,00)	86,71
1.01.02.2.03.0039	5.1	BELANJA OPERASI	66.443.000,00	54.700.000,00	(11.743.000,00)	82,33
1.01.02.2.03.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.443.000,00	54.700.000,00	(11.743.000,00)	82,33
1.01.02.2.03.0039	5.2	BELANJA MODAL	23.220.000,00	23.050.000,00	(170.000,00)	99,27
1.01.02.2.03.0039	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.220.000,00	23.050.000,00	(170.000,00)	99,27
1.01.02.2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	359.157.500,00	299.726.000,00	(59.431.500,00)	83,45
1.01.02.2.04.0016		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	116.311.500,00	76.550.000,00	(39.761.500,00)	65,81
1.01.02.2.04.0016	5.1	BELANJA OPERASI	116.311.500,00	76.550.000,00	(39.761.500,00)	65,81
1.01.02.2.04.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.311.500,00	76.550.000,00	(39.761.500,00)	65,81
1.01.02.2.04.0017		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	150.620.000,00	130.950.000,00	(19.670.000,00)	86,94
1.01.02.2.04.0017	5.1	BELANJA OPERASI	150.620.000,00	130.950.000,00	(19.670.000,00)	86,94
1.01.02.2.04.0017	5.1.05	Belanja Hibah	150.620.000,00	130.950.000,00	(19.670.000,00)	86,94
1.01.02.2.04.0046		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	92.226.000,00	92.226.000,00	0,00	100,00
1.01.02.2.04.0046	5.1	BELANJA OPERASI	92.226.000,00	92.226.000,00	0,00	100,00
1.01.02.2.04.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.226.000,00	92.226.000,00	0,00	100,00
1.01.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	202.865.000,00	100.082.187,00	(102.782.813,00)	49,33
1.01.04.2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	202.865.000,00	100.082.187,00	(102.782.813,00)	49,33
1.01.04.2.01.0001		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	202.865.000,00	100.082.187,00	(102.782.813,00)	49,33
1.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	202.865.000,00	100.082.187,00	(102.782.813,00)	49,33
1.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.865.000,00	100.082.187,00	(102.782.813,00)	49,33
1.01.05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	20.107.000,00	16.361.000,00	(3.746.000,00)	81,37
1.01.05.2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20.107.000,00	16.361.000,00	(3.746.000,00)	81,37
1.01.05.2.02.0001		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	7.346.000,00	3.600.000,00	(3.746.000,00)	49,01
1.01.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.346.000,00	3.600.000,00	(3.746.000,00)	49,01
1.01.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.346.000,00	3.600.000,00	(3.746.000,00)	49,01
1.01.05.2.02.0002		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	12.761.000,00	12.761.000,00	0,00	100,00
1.01.05.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.761.000,00	12.761.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.01.05.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.761.000,00	12.761.000,00	0,00	100,00
1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	342.656.062.035,00	317.537.258.626,00	(25.118.803.409,00)	92,67
1.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.200,00	14.350.200,00	(650.000,00)	95,67
1.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.200,00	14.350.200,00	(650.000,00)	95,67
1.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.200,00	14.350.200,00	(650.000,00)	95,67
1.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.200,00	14.350.200,00	(650.000,00)	95,67
1.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	341.855.738.221,00	316.911.331.723,00	(24.944.406.498,00)	92,70
1.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	341.855.738.221,00	316.911.331.723,00	(24.944.406.498,00)	92,70
1.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	341.855.738.221,00	316.911.331.723,00	(24.944.406.498,00)	92,70
1.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	341.855.738.221,00	316.911.331.723,00	(24.944.406.498,00)	92,70
1.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	434.091.650,00	305.788.470,00	(128.303.180,00)	70,44
1.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.840.200,00	9.840.200,00	0,00	100,00
1.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.840.200,00	9.840.200,00	0,00	100,00
1.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.840.200,00	9.840.200,00	0,00	100,00
1.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114.208.600,00	89.265.800,00	(24.942.800,00)	78,16
1.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	94.208.600,00	69.585.800,00	(24.622.800,00)	73,86
1.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.208.600,00	69.585.800,00	(24.622.800,00)	73,86
1.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.680.000,00	(320.000,00)	98,40
1.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.680.000,00	(320.000,00)	98,40
1.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.062.600,00	14.062.520,00	(80,00)	100,00
1.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.062.600,00	14.062.520,00	(80,00)	100,00
1.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.062.600,00	14.062.520,00	(80,00)	100,00
1.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.231.750,00	45.968.950,00	(1.262.800,00)	97,33
1.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	47.231.750,00	45.968.950,00	(1.262.800,00)	97,33
1.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.231.750,00	45.968.950,00	(1.262.800,00)	97,33
1.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.640.000,00	20.240.000,00	(6.400.000,00)	75,98
1.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	26.640.000,00	20.240.000,00	(6.400.000,00)	75,98
1.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.640.000,00	20.240.000,00	(6.400.000,00)	75,98
1.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222.108.500,00	126.411.000,00	(95.697.500,00)	56,91
1.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	222.108.500,00	126.411.000,00	(95.697.500,00)	56,91
1.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.108.500,00	126.411.000,00	(95.697.500,00)	56,91
1.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291.437.864,00	279.545.496,00	(11.892.368,00)	95,92
1.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.739.000,00	18.728.343,00	(7.010.657,00)	72,76
1.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.739.000,00	18.728.343,00	(7.010.657,00)	72,76

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.739.000,00	18.728.343,00	(7.010.657,00)	72,76
1.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.698.864,00	260.817.153,00	(4.881.711,00)	98,16
1.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	265.698.864,00	260.817.153,00	(4.881.711,00)	98,16
1.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.698.864,00	260.817.153,00	(4.881.711,00)	98,16
1.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.794.100,00	26.242.737,00	(33.551.363,00)	43,89
1.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.794.100,00	26.242.737,00	(33.551.363,00)	43,89
1.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	59.794.100,00	26.242.737,00	(33.551.363,00)	43,89
1.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.794.100,00	26.242.737,00	(33.551.363,00)	43,89
		JUMLAH BELANJA	**435.606.547.381,00**	**400.852.075.192,20**	**(34.754.472.188,80)**	**92,02**
		SURPLUS DEFISIT	**(435.606.547.381,00)**	**(400.852.075.192,20)**	**34.754.472.188,80**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Dinas Kesehatan

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	4	**PENDAPATAN DAERAH**	**750.000.000,00**	**998.614.229,00**	**248.614.229,00**	**133,15**
	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	750.000.000,00	998.614.229,00	248.614.229,00	133,15
	4.1.02	Retribusi Daerah	750.000.000,00	998.614.229,00	248.614.229,00	133,15
		JUMLAH PENDAPATAN	**750.000.000,00**	**998.614.229,00**	**248.614.229,00**	**133,15**
	5	**BELANJA DAERAH**	**165.169.432.959,00**	**148.909.092.616,00**	**(16.260.340.343,00)**	**90,16**
1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	71.433.569.452,00	60.043.996.611,00	(11.389.572.841,00)	84,06
1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	14.365.686.213,00	11.777.812.677,00	(2.587.873.536,00)	81,99
1.02.02.2.01.0003		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	512.000.000,00	497.343.267,00	(14.656.733,00)	97,14
1.02.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	92.000.000,00	84.463.267,00	(7.536.733,00)	91,81
1.02.02.2.01.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	14.240.000,00	14.240.000,00	-	100,00
1.02.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.760.000,00	70.223.267,00	(7.536.733,00)	90,31
1.02.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	420.000.000,00	412.880.000,00	(7.120.000,00)	98,30
1.02.02.2.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	420.000.000,00	412.880.000,00	(7.120.000,00)	98,30
1.02.02.2.01.0004		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	750.000.000,00	731.619.339,00	(18.380.661,00)	97,55
1.02.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	332.419.339,00	(17.580.661,00)	94,98
1.02.02.2.01.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	18.140.000,00	18.140.000,00	-	100,00
1.02.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.860.000,00	314.279.339,00	(17.580.661,00)	94,70

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.02.02.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	400.000.000,00	399.200.000,00	(800.000,00)	99,80
1.02.02.2.01.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	399.200.000,00	(800.000,00)	99,80
1.02.02.2.01.0006		Pengembangan Puskesmas	3.238.602.000,00	3.204.577.300,00	(34.024.700,00)	98,95
1.02.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	34.602.000,00	26.777.300,00	(7.824.700,00)	77,39
1.02.02.2.01.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	6.630.000,00	6.630.000,00	-	100,00
1.02.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.972.000,00	20.147.300,00	(7.824.700,00)	72,03
1.02.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	3.204.000.000,00	3.177.800.000,00	(26.200.000,00)	99,18
1.02.02.2.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.204.000.000,00	3.177.800.000,00	(26.200.000,00)	99,18
1.02.02.2.01.0010		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.505.278.465,00	2.403.115.114,00	(102.163.351,00)	95,92
1.02.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	702.567.178,00	619.192.309,00	(83.374.869,00)	88,13
1.02.02.2.01.0010	5.1.01	Belanja Pegawai	23.050.000,00	23.050.000,00	-	100,00
1.02.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	679.517.178,00	596.142.309,00	(83.374.869,00)	87,73
1.02.02.2.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	1.802.711.287,00	1.783.922.805,00	(18.788.482,00)	98,96
1.02.02.2.01.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.702.656.087,00	1.684.022.805,00	(18.633.282,00)	98,91
1.02.02.2.01.0010	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.055.200,00	99.900.000,00	(155.200,00)	99,84
1.02.02.2.01.0014		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.270.760.917,00	1.230.462.181,00	(40.298.736,00)	96,83
1.02.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	83.505.917,00	69.592.181,00	(13.913.736,00)	83,34
1.02.02.2.01.0014	5.1.01	Belanja Pegawai	11.460.000,00	11.460.000,00	-	100,00
1.02.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.045.917,00	58.132.181,00	(13.913.736,00)	80,69
1.02.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	1.187.255.000,00	1.160.870.000,00	(26.385.000,00)	97,78
1.02.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.187.255.000,00	1.160.870.000,00	(26.385.000,00)	97,78
1.02.02.2.01.0020		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	207.226.000,00	186.191.000,00	(21.035.000,00)	89,85
1.02.02.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	207.226.000,00	186.191.000,00	(21.035.000,00)	89,85
1.02.02.2.01.0020	5.1.01	Belanja Pegawai	7.420.000,00	7.420.000,00	-	100,00
1.02.02.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.806.000,00	178.771.000,00	(21.035.000,00)	89,47
1.02.02.2.01.0023		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	5.775.953.831,00	3.444.504.476,00	(2.331.449.355,00)	59,64
1.02.02.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	5.775.953.831,00	3.444.504.476,00	(2.331.449.355,00)	59,64
1.02.02.2.01.0023	5.1.01	Belanja Pegawai	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00
1.02.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.748.953.831,00	3.417.504.476,00	(2.331.449.355,00)	59,45
1.02.02.2.01.0026		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	105.865.000,00	80.000.000,00	(25.865.000,00)	75,57

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.02.02.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	105.865.000,00	80.000.000,00	(25.865.000,00)	75,57
1.02.02.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.865.000,00	80.000.000,00	(25.865.000,00)	75,57
1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56.094.945.239,00	47.458.121.619,00	(8.636.823.620,00)	84,60
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.173.404.680,00	1.037.186.551,00	(136.218.129,00)	88,39
1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.173.404.680,00	1.037.186.551,00	(136.218.129,00)	88,39
1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.173.404.680,00	1.037.186.551,00	(136.218.129,00)	88,39
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	306.048.000,00	262.709.792,00	(43.338.208,00)	85,84
1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	306.048.000,00	262.709.792,00	(43.338.208,00)	85,84
1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.048.000,00	262.709.792,00	(43.338.208,00)	85,84
1.02.02.2.02.0003		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	218.822.600,00	152.353.400,00	(66.469.200,00)	69,62
1.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	218.822.600,00	152.353.400,00	(66.469.200,00)	69,62
1.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.822.600,00	152.353.400,00	(66.469.200,00)	69,62
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	123.228.000,00	86.180.844,00	(37.047.156,00)	69,94
1.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	123.228.000,00	86.180.844,00	(37.047.156,00)	69,94
1.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.228.000,00	86.180.844,00	(37.047.156,00)	69,94
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	384.621.000,00	346.814.000,00	(37.807.000,00)	90,17
1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	384.621.000,00	346.814.000,00	(37.807.000,00)	90,17
1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	384.621.000,00	346.814.000,00	(37.807.000,00)	90,17
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	103.007.000,00	85.237.000,00	(17.770.000,00)	82,75
1.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	103.007.000,00	85.237.000,00	(17.770.000,00)	82,75
1.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.007.000,00	85.237.000,00	(17.770.000,00)	82,75
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	142.694.200,00	90.924.000,00	(51.770.200,00)	63,72
1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	142.694.200,00	90.924.000,00	(51.770.200,00)	63,72
1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.694.200,00	90.924.000,00	(51.770.200,00)	63,72
1.02.02.2.02.0008		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	152.501.000,00	133.169.000,00	(19.332.000,00)	87,32
1.02.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	132.501.000,00	113.219.000,00	(19.282.000,00)	85,45
1.02.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.501.000,00	113.219.000,00	(19.282.000,00)	85,45
1.02.02.2.02.0008	5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.950.000,00	(50.000,00)	99,75
1.02.02.2.02.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.950.000,00	(50.000,00)	99,75
1.02.02.2.02.0009		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	448.493.800,00	127.649.000,00	(320.844.800,00)	28,46
1.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	421.493.800,00	100.739.000,00	(320.754.800,00)	23,90
1.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	421.493.800,00	100.739.000,00	(320.754.800,00)	23,90
1.02.02.2.02.0009	5.2	BELANJA MODAL	27.000.000,00	26.910.000,00	(90.000,00)	99,67

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.02.02.2.02.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.000.000,00	26.910.000,00	(90.000,00)	99,67
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	86.094.000,00	48.818.000,00	(37.276.000,00)	56,70
1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	86.094.000,00	48.818.000,00	(37.276.000,00)	56,70
1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.094.000,00	48.818.000,00	(37.276.000,00)	56,70
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	692.688.813,00	667.858.639,00	(24.830.174,00)	96,42
1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	692.688.813,00	667.858.639,00	(24.830.174,00)	96,42
1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	692.688.813,00	667.858.639,00	(24.830.174,00)	96,42
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	121.796.000,00	114.823.898,00	(6.972.102,00)	94,28
1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	101.796.000,00	94.873.898,00	(6.922.102,00)	93,20
1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.796.000,00	94.873.898,00	(6.922.102,00)	93,20
1.02.02.2.02.0012	5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.950.000,00	(50.000,00)	99,75
1.02.02.2.02.0012	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.950.000,00	(50.000,00)	99,75
1.02.02.2.02.0013		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	60.000.000,00	50.682.000,00	(9.318.000,00)	84,47
1.02.02.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	50.682.000,00	(9.318.000,00)	84,47
1.02.02.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	50.682.000,00	(9.318.000,00)	84,47
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.844.103.422,00	3.477.606.494,00	(2.366.496.928,00)	59,51
1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	5.826.603.422,00	3.460.166.494,00	(2.366.436.928,00)	59,39
1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.826.603.422,00	3.460.166.494,00	(2.366.436.928,00)	59,39
1.02.02.2.02.0015	5.2	BELANJA MODAL	17.500.000,00	17.440.000,00	(60.000,00)	99,66
1.02.02.2.02.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.500.000,00	17.440.000,00	(60.000,00)	99,66
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	66.807.000,00	23.353.000,00	(43.454.000,00)	34,96
1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	66.807.000,00	23.353.000,00	(43.454.000,00)	34,96
1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.807.000,00	23.353.000,00	(43.454.000,00)	34,96
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.254.147.000,00	1.087.952.719,00	(166.194.281,00)	86,75
1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	1.254.147.000,00	1.087.952.719,00	(166.194.281,00)	0,00
1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.254.147.000,00	1.087.952.719,00	(166.194.281,00)	86,75
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	444.707.500,00	306.146.500,00	(138.561.000,00)	68,84
1.02.02.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	444.707.500,00	306.146.500,00	(138.561.000,00)	68,84
1.02.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.707.500,00	306.146.500,00	(138.561.000,00)	68,84
1.02.02.2.02.0019		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	60.000.000,00	58.140.889,00	(1.859.111,00)	96,90
1.02.02.2.02.0019	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	58.140.889,00	(1.859.111,00)	96,90
1.02.02.2.02.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	58.140.889,00	(1.859.111,00)	96,90

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	748.862.800,00	548.144.000,00	(200.718.800,00)	73,20
1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	748.862.800,00	548.144.000,00	(200.718.800,00)	73,20
1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	748.862.800,00	548.144.000,00	(200.718.800,00)	73,20
1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	50.030.000,00	42.798.000,00	(7.232.000,00)	85,54
1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	50.030.000,00	42.798.000,00	(7.232.000,00)	85,54
1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.030.000,00	42.798.000,00	(7.232.000,00)	85,54
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	104.520.000,00	87.320.000,00	(17.200.000,00)	83,54
1.02.02.2.02.0022	5.1	BELANJA OPERASI	104.520.000,00	87.320.000,00	(17.200.000,00)	83,54
1.02.02.2.02.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.520.000,00	87.320.000,00	(17.200.000,00)	83,54
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.010.458.000,00	2.742.434.004,00	(1.268.023.996,00)	68,38
1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	4.010.458.000,00	2.742.434.004,00	(1.268.023.996,00)	68,38
1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.010.458.000,00	2.742.434.004,00	(1.268.023.996,00)	68,38
1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	31.045.677.644,00	29.273.643.788,00	(1.772.033.856,00)	94,29
1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	31.045.677.644,00	29.273.643.788,00	(1.772.033.856,00)	94,29
1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.045.677.644,00	29.273.643.788,00	(1.772.033.856,00)	94,29
1.02.02.2.02.0028		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	9.000.000,00	550.000,00	(8.450.000,00)	6,11
1.02.02.2.02.0028	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	550.000,00	(8.450.000,00)	6,11
1.02.02.2.02.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	550.000,00	(8.450.000,00)	6,11
1.02.02.2.02.0029		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	120.000.000,00	80.987.691,00	(39.012.309,00)	67,49
1.02.02.2.02.0029	5.1	BELANJA OPERASI	98.836.000,00	65.597.691,00	(33.238.309,00)	66,37
1.02.02.2.02.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.836.000,00	65.597.691,00	(33.238.309,00)	66,37
1.02.02.2.02.0029	5.2	BELANJA MODAL	21.164.000,00	15.390.000,00	(5.774.000,00)	72,72
1.02.02.2.02.0029	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.164.000,00	15.390.000,00	(5.774.000,00)	72,72
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	5.080.292.330,00	3.594.938.491,00	(1.485.353.839,00)	70,76
1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	5.080.292.330,00	3.594.938.491,00	(1.485.353.839,00)	70,76
1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	2.644.572.579,00	1.450.519.424,00	(1.194.053.155,00)	54,85
1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.435.719.751,00	2.144.419.067,00	(291.300.684,00)	88,04
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	210.555.000,00	51.255.000,00	(159.300.000,00)	24,34
1.02.02.2.02.0034	5.1	BELANJA OPERASI	210.555.000,00	51.255.000,00	(159.300.000,00)	24,34
1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.555.000,00	51.255.000,00	(9.300.000,00)	84,64
1.02.02.2.02.0034	5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	-
1.02.02.2.02.0035		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	38.439.000,00	32.609.753,00	(5.829.247,00)	84,84

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.02.02.2.02.0035	5.1	BELANJA OPERASI	38.439.000,00	32.609.753,00	(5.829.247,00)	84,84
1.02.02.2.02.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.439.000,00	32.609.753,00	(5.829.247,00)	84,84
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	63.888.800,00	37.070.000,00	(26.818.800,00)	58,02
1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	63.888.800,00	37.070.000,00	(26.818.800,00)	58,02
1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.888.800,00	37.070.000,00	(26.818.800,00)	58,02
1.02.02.2.02.0038		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	257.638.150,00	248.004.166,00	(9.633.984,00)	96,26
1.02.02.2.02.0038	5.1	BELANJA OPERASI	231.475.150,00	221.941.166,00	(9.533.984,00)	95,88
1.02.02.2.02.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.475.150,00	221.941.166,00	(9.533.984,00)	95,88
1.02.02.2.02.0038	5.2	BELANJA MODAL	26.163.000,00	26.063.000,00	(100.000,00)	99,62
1.02.02.2.02.0038	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.163.000,00	26.063.000,00	(100.000,00)	99,62
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	286.980.000,00	277.900.000,00	(9.080.000,00)	96,84
1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	286.980.000,00	277.900.000,00	(9.080.000,00)	96,84
1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.980.000,00	277.900.000,00	(9.080.000,00)	96,84
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.880.000,00	0,00	(2.880.000,00)	0,00
1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	2.880.000,00	0,00	(2.880.000,00)	0,00
1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	0,00	(2.880.000,00)	-
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	32.600.500,00	0,00	(32.600.500,00)	0,00
1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	32.600.500,00	0,00	(32.600.500,00)	0,00
1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.600.500,00	0,00	(32.600.500,00)	-
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	492.118.000,00	476.335.000,00	(15.783.000,00)	96,79
1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	492.118.000,00	476.335.000,00	(15.783.000,00)	96,79
1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	492.118.000,00	476.335.000,00	(15.783.000,00)	96,79
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.857.841.000,00	1.806.526.000,00	(51.315.000,00)	97,24
1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	1.857.841.000,00	1.806.526.000,00	(51.315.000,00)	97,24
1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.857.841.000,00	1.806.526.000,00	(51.315.000,00)	97,24
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	293.254.302,00	190.853.591,00	(102.400.711,00)	65,08
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	293.254.302,00	190.853.591,00	(102.400.711,00)	65,08
1.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	281.719.702,00	179.353.591,00	(102.366.111,00)	63,66
1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.719.702,00	179.353.591,00	(102.366.111,00)	63,66
1.02.02.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	11.534.600,00	11.500.000,00	(34.600,00)	99,70
1.02.02.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.534.600,00	11.500.000,00	(34.600,00)	99,70

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.02.02.2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	679.683.698,00	617.208.724,00	(62.474.974,00)	90,81
1.02.02.2.04.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	60.000.000,00	59.248.209,00	(751.791,00)	98,75
1.02.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.248.209,00	(751.791,00)	98,75
1.02.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.248.209,00	(751.791,00)	98,75
1.02.02.2.04.0003		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	619.683.698,00	557.960.515,00	(61.723.183,00)	90,04
1.02.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	559.683.698,00	518.060.515,00	(41.623.183,00)	92,56
1.02.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	559.683.698,00	518.060.515,00	(41.623.183,00)	92,56
1.02.02.2.04.0003	5.2	BELANJA MODAL	60.000.000,00	39.900.000,00	(20.100.000,00)	66,50
1.02.02.2.04.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	39.900.000,00	(20.100.000,00)	66,50
1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.312.170.973,00	1.359.942.290,00	(952.228.683,00)	120,22
1.02.03.2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	204.525.000,00	149.171.084,00	(55.353.916,00)	72,94
1.02.03.2.01.0001		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	91.390.000,00	69.999.800,00	(21.390.200,00)	76,59
1.02.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	70.226.000,00	69.999.800,00	(226.200,00)	99,68
1.02.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.226.000,00	69.999.800,00	(226.200,00)	99,68
1.02.03.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	21.164.000,00	0,00	(21.164.000,00)	0,00
1.02.03.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.164.000,00	0,00	(21.164.000,00)	-
1.02.03.2.01.0002		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	113.135.000,00	79.171.284,00	(33.963.716,00)	69,98
1.02.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	81.135.000,00	79.171.284,00	(1.963.716,00)	97,58
1.02.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.135.000,00	79.171.284,00	(1.963.716,00)	97,58
1.02.03.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	32.000.000,00	0,00	(32.000.000,00)	0,00
1.02.03.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.000.000,00	0,00	(32.000.000,00)	-
1.02.03.2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	148.903.000,00	116.701.000,00	(32.202.000,00)	78,37
1.02.03.2.02.0003		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	148.903.000,00	116.701.000,00	(32.202.000,00)	78,37
1.02.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	148.903.000,00	116.701.000,00	(32.202.000,00)	78,37
1.02.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.903.000,00	116.701.000,00	(32.202.000,00)	78,37
1.02.03.2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.958.742.973,00	1.094.070.206,00	(864.672.767,00)	55,86

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.02.03.2.03.0001		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.958.742.973,00	1.094.070.206,00	(864.672.767,00)	55,86
1.02.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.958.442.973,00	1.094.070.206,00	(864.372.767,00)	55,86
1.02.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.958.442.973,00	1.094.070.206,00	(864.372.767,00)	55,86
1.02.03.2.03.0001	5.2	BELANJA MODAL	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00
1.02.03.2.03.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000,00	0,00	(300.000,00)	-
1.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	212.834.000,00	189.020.999,00	(23.813.001,00)	88,81
1.02.04.2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	82.732.000,00	75.305.999,00	(7.426.001,00)	91,02
1.02.04.2.01.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	82.732.000,00	75.305.999,00	(7.426.001,00)	91,02
1.02.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	82.732.000,00	75.305.999,00	(7.426.001,00)	91,02
1.02.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.732.000,00	75.305.999,00	(7.426.001,00)	91,02
1.02.04.2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	73.812.000,00	60.849.000,00	(12.963.000,00)	82,44
1.02.04.2.03.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	73.812.000,00	60.849.000,00	(12.963.000,00)	82,44
1.02.04.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	73.812.000,00	60.849.000,00	(12.963.000,00)	82,44
1.02.04.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.812.000,00	60.849.000,00	(12.963.000,00)	82,44
1.02.04.2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	56.290.000,00	52.866.000,00	(3.424.000,00)	93,92
1.02.04.2.04.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	56.290.000,00	52.866.000,00	(3.424.000,00)	93,92
1.02.04.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	56.290.000,00	52.866.000,00	(3.424.000,00)	93,92
1.02.04.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.290.000,00	52.866.000,00	(3.424.000,00)	93,92
1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	757.514.000,00	691.252.634,00	(66.261.366,00)	91,25

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.02.05.2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	125.900.000,00	104.400.025,00	(21.499.975,00)	82,92
1.02.05.2.01.0001		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	125.900.000,00	104.400.025,00	(21.499.975,00)	82,92
1.02.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	125.900.000,00	104.400.025,00	(21.499.975,00)	82,92
1.02.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.900.000,00	104.400.025,00	(21.499.975,00)	82,92
1.02.05.2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	90.585.359,00	(9.414.641,00)	90,59
1.02.05.2.02.0001		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100.000.000,00	90.585.359,00	(9.414.641,00)	90,59
1.02.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	90.585.359,00	(9.414.641,00)	90,59
1.02.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	90.585.359,00	(9.414.641,00)	90,59
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	531.614.000,00	496.267.250,00	(35.346.750,00)	93,35
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	531.614.000,00	496.267.250,00	(35.346.750,00)	93,35
1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	531.614.000,00	496.267.250,00	(35.346.750,00)	93,35
1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	531.614.000,00	496.267.250,00	(35.346.750,00)	93,35
1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	90.453.344.534,00	86.624.880.082,00	(3.828.464.452,00)	95,77
1.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.000.000,00	58.055.265,00	(31.944.735,00)	64,51
1.02.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.000.000,00	48.413.265,00	(31.586.735,00)	60,52
1.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	48.413.265,00	(31.586.735,00)	60,52
1.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	48.413.265,00	(31.586.735,00)	60,52
1.02.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	9.642.000,00	(358.000,00)	96,42
1.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.642.000,00	(358.000,00)	96,42
1.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.642.000,00	(358.000,00)	96,42
1.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84.203.892.629,00	80.473.096.947,00	(3.730.795.682,00)	95,57
1.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	84.203.892.629,00	80.473.096.947,00	(3.730.795.682,00)	95,57
1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	84.203.892.629,00	80.473.096.947,00	(3.730.795.682,00)	95,57
1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	84.203.892.629,00	80.473.096.947,00	(3.730.795.682,00)	95,57
1.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000,00	190.780.000,00	(9.220.000,00)	95,39
1.02.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000,00	190.780.000,00	(9.220.000,00)	95,39
1.02.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	190.780.000,00	(9.220.000,00)	95,39

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.02.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	190.780.000,00	(9.220.000,00)	95,39
1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	302.030.000,00	277.625.937,00	(24.404.063,00)	91,92
1.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00
1.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00
1.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00
1.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.213.000,00	11.213.000,00	-	100,00
1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.213.000,00	11.213.000,00	-	100,00
1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.213.000,00	11.213.000,00	-	100,00
1.02.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
1.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
1.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
1.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.817.000,00	216.412.937,00	(24.404.063,00)	89,87
1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	240.817.000,00	216.412.937,00	(24.404.063,00)	89,87
1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.817.000,00	216.412.937,00	(24.404.063,00)	89,87
1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.657.421.905,00	5.625.321.933,00	(32.099.972,00)	99,43
1.02.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
1.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
1.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
1.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00	16.363.484,00	(3.636.516,00)	81,82
1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	16.363.484,00	(3.636.516,00)	81,82
1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	16.363.484,00	(3.636.516,00)	81,82
1.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.632.421.905,00	5.603.958.449,00	(28.463.456,00)	99,49
1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.632.421.905,00	5.603.958.449,00	(28.463.456,00)	99,49
1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.632.421.905,00	5.603.958.449,00	(28.463.456,00)	99,49
		JUMLAH BELANJA	**165.169.432.959,00**	**148.909.092.616,00**	**(16.260.340.343,00)**	**90,16**
		SURPLUS DEFISIT	**(164.419.432.959,00)**	**(147.910.478.387,00)**	**16.508.954.572,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Uptd Rumah Sakit Umum Sidikalang

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	4	**PENDAPATAN DAERAH**	**48.577.397.374,00**	**57.066.999.764,00**	**8.489.602.390,00**	**117,48**
	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	48.577.397.374,00	57.066.999.764,00	8.489.602.390,00	117,48
	4.1.02	Retribusi Daerah	48.577.397.374,00	57.066.999.764,00	8.489.602.390,00	117,48
		JUMLAH PENDAPATAN	**48.577.397.374,00**	**57.066.999.764,00**	**8.489.602.390,00**	**117,48**
	5	**BELANJA DAERAH**	**79.389.806.333,00**	**68.046.266.080,00**	**(11.343.540.253,00)**	**85,71**
1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	71.476.072.649,00	60.704.983.601,00	(10.771.089.048,00)	84,93
1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.057.175.039,00	3.460.720.533,00	(596.454.506,00)	85,30
1.02.02.2.01.0010		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.644.041.304,00	3.147.724.016,00	(496.317.288,00)	86,38
1.02.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	3.644.041.304,00	3.147.724.016,00	(496.317.288,00)	86,38
1.02.02.2.01.0010	5.1.01	Belanja Pegawai	6.600.000,00	4.420.000,00	(2.180.000,00)	66,97
1.02.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.637.441.304,00	3.143.304.016,00	(494.137.288,00)	86,42
1.02.02.2.01.0020		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	413.133.735,00	312.996.517,00	(100.137.218,00)	75,76
1.02.02.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	413.133.735,00	312.996.517,00	(100.137.218,00)	75,76
1.02.02.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	413.133.735,00	312.996.517,00	(100.137.218,00)	75,76
1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	67.118.897.610,00	56.945.013.068,00	(10.173.884.542,00)	84,84

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.02.02.2.02.0032		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	67.118.897.610,00	56.945.013.068,00	(10.173.884.542,00)	84,84
1.02.02.2.02.0032	5.1	BELANJA OPERASI	60.118.897.610,00	51.116.481.158,00	(9.002.416.452,00)	85,03
1.02.02.2.02.0032	5.1.01	Belanja Pegawai	277.504.920,00	253.591.792,00	(23.913.128,00)	91,38
1.02.02.2.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.841.392.690,00	50.862.889.366,00	(8.978.503.324,00)	85,00
1.02.02.2.02.0032	5.2	BELANJA MODAL	7.000.000.000,00	5.828.531.910,00	(1.171.468.090,00)	83,26
1.02.02.2.02.0032	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000.000,00	4.928.465.860,00	(1.071.534.140,00)	82,14
1.02.02.2.02.0032	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.000.000.000,00	900.066.050,00	(99.933.950,00)	90,01
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	300.000.000,00	299.250.000,00	(750.000,00)	99,75
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	300.000.000,00	299.250.000,00	(750.000,00)	99,75
1.02.02.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	300.000.000,00	299.250.000,00	(750.000,00)	99,75
1.02.02.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000.000,00	299.250.000,00	(750.000,00)	99,75
1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	7.713.733.684,00	7.246.396.040,00	(467.337.644,00)	93,94
1.02.03.2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	7.305.355.684,00	6.846.024.554,00	(459.331.130,00)	93,71
1.02.03.2.02.0002		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	7.305.355.684,00	6.846.024.554,00	(459.331.130,00)	93,71
1.02.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.305.355.684,00	6.846.024.554,00	(459.331.130,00)	93,71
1.02.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.305.355.684,00	6.846.024.554,00	(459.331.130,00)	93,71
1.02.03.2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	408.378.000,00	400.371.486,00	(8.006.514,00)	98,04
1.02.03.2.03.0001		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	408.378.000,00	400.371.486,00	(8.006.514,00)	98,04
1.02.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	408.378.000,00	400.371.486,00	(8.006.514,00)	98,04
1.02.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	408.378.000,00	400.371.486,00	(8.006.514,00)	98,04
1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	200.000.000,00	94.886.439,00	(105.113.561,00)	47,44
1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.000.000,00	94.886.439,00	(105.113.561,00)	47,44
1.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	94.886.439,00	(105.113.561,00)	47,44
1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	94.886.439,00	(105.113.561,00)	47,44
1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	94.886.439,00	(105.113.561,00)	47,44
		JUMLAH BELANJA	**79.389.806.333,00**	**68.046.266.080,00**	**(11.343.540.253,00)**	**85,71**

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
		SURPLUS DEFISIT	(30.812.408.959,00)	(10.979.266.316,00)	19.833.142.643,00	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	4	**PENDAPATAN DAERAH**	**650.000.000,00**	**412.360.000,00**	**(237.640.000,00)**	**63,44**
	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	650.000.000,00	412.360.000,00	(237.640.000,00)	63,44
	4.1.02	Retribusi Daerah	650.000.000,00	412.360.000,00	(237.640.000,00)	63,44
		JUMLAH PENDAPATAN	**650.000.000,00**	**412.360.000,00**	**(237.640.000,00)**	**63,44**
	5	**BELANJA DAERAH**	**115.253.133.100,00**	**110.815.011.184,88**	**(4.438.121.915,12)**	**96,15**
1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	9.393.756.835,00	9.047.136.190,88	(346.620.644,12)	96,31
1.03.02.2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.393.756.835,00	9.047.136.190,88	(346.620.644,12)	96,31
1.03.02.2.02.0014		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	8.875.117.835,00	8.536.045.944,88	(339.071.890,12)	96,18
1.03.02.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	3.258.000.000,00	3.241.645.470,00	(16.354.530,00)	99,50
1.03.02.2.02.0014	5.1.01	Belanja Pegawai	13.260.000,00	13.260.000,00	0,00	100,00
1.03.02.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.244.740.000,00	3.228.385.470,00	(16.354.530,00)	99,50
1.03.02.2.02.0014	5.2	BELANJA MODAL	5.617.117.835,00	5.294.400.474,88	(322.717.360,12)	94,25
1.03.02.2.02.0014	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.617.117.835,00	5.294.400.474,88	(322.717.360,12)	94,25
1.03.02.2.02.0021		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	316.229.000,00	314.813.000,00	(1.416.000,00)	99,55
1.03.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	316.229.000,00	314.813.000,00	(1.416.000,00)	99,55
1.03.02.2.02.0021	5.1.01	Belanja Pegawai	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	100,00
1.03.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.599.000,00	311.183.000,00	(1.416.000,00)	99,55

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.03.02.2.02.0035		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	202.410.000,00	196.277.246,00	(6.132.754,00)	96,97
1.03.02.2.02.0035	5.1	BELANJA OPERASI	202.410.000,00	196.277.246,00	(6.132.754,00)	96,97
1.03.02.2.02.0035	5.1.01	Belanja Pegawai	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	100,00
1.03.02.2.02.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.180.000,00	192.047.246,00	(6.132.754,00)	96,91
1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	14.772.918.000,00	14.532.718.600,00	(240.199.400,00)	98,37
1.03.03.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	14.772.918.000,00	14.532.718.600,00	(240.199.400,00)	98,37
1.03.03.2.01.0026		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	12.652.058.000,00	12.526.720.000,00	(125.338.000,00)	99,01
1.03.03.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	12.652.058.000,00	12.526.720.000,00	(125.338.000,00)	99,01
1.03.03.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.652.058.000,00	12.526.720.000,00	(125.338.000,00)	99,01
1.03.03.2.01.0028		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.120.860.000,00	2.005.998.600,00	(114.861.400,00)	94,58
1.03.03.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	120.860.000,00	120.164.600,00	(695.400,00)	99,42
1.03.03.2.01.0028	5.1.01	Belanja Pegawai	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	100,00
1.03.03.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.200.000,00	110.504.600,00	(695.400,00)	99,37
1.03.03.2.01.0028	5.2	BELANJA MODAL	2.000.000.000,00	1.885.834.000,00	(114.166.000,00)	94,29
1.03.03.2.01.0028	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.000.000.000,00	1.885.834.000,00	(114.166.000,00)	94,29
1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.012.752.000,00	3.965.946.000,00	(46.806.000,00)	98,83
1.03.05.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.012.752.000,00	3.965.946.000,00	(46.806.000,00)	98,83
1.03.05.2.01.0022		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	4.012.752.000,00	3.965.946.000,00	(46.806.000,00)	98,83
1.03.05.2.01.0022	5.1	BELANJA OPERASI	4.012.752.000,00	3.965.946.000,00	(46.806.000,00)	98,83
1.03.05.2.01.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.012.752.000,00	3.965.946.000,00	(46.806.000,00)	98,83
1.03.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.210.916.800,00	3.157.805.605,00	(53.111.195,00)	98,35
1.03.06.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.210.916.800,00	3.157.805.605,00	(53.111.195,00)	98,35
1.03.06.2.01.0012		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1.608.851.800,00	1.558.448.100,00	(50.403.700,00)	96,87
1.03.06.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	209.051.800,00	160.828.100,00	(48.223.700,00)	76,93
1.03.06.2.01.0012	5.1.01	Belanja Pegawai	6.440.000,00	6.440.000,00	0,00	100,00
1.03.06.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.611.800,00	154.388.100,00	(48.223.700,00)	76,20
1.03.06.2.01.0012	5.2	BELANJA MODAL	1.399.800.000,00	1.397.620.000,00	(2.180.000,00)	99,84
1.03.06.2.01.0012	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.399.800.000,00	1.397.620.000,00	(2.180.000,00)	99,84

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.03.06.2.01.0021		Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	1.602.065.000,00	1.599.357.505,00	(2.707.495,00)	99,83
1.03.06.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	122.065.000,00	121.870.000,00	(195.000,00)	99,84
1.03.06.2.01.0021	5.1.01	Belanja Pegawai	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	100,00
1.03.06.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.405.000,00	112.210.000,00	(195.000,00)	99,83
1.03.06.2.01.0021	5.2	BELANJA MODAL	1.480.000.000,00	1.477.487.505,00	(2.512.495,00)	99,83
1.03.06.2.01.0021	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.480.000.000,00	1.477.487.505,00	(2.512.495,00)	99,83
1.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.851.314.411,00	1.516.185.911,00	(335.128.500,00)	81,90
1.03.08.2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.851.314.411,00	1.516.185.911,00	(335.128.500,00)	81,90
1.03.08.2.01.0021		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.623.515.911,00	1.422.907.411,00	(200.608.500,00)	87,64
1.03.08.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	1.423.515.911,00	1.223.642.411,00	(199.873.500,00)	85,96
1.03.08.2.01.0021	5.1.01	Belanja Pegawai	6.440.000,00	6.440.000,00	0,00	100,00
1.03.08.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.417.075.911,00	1.217.202.411,00	(199.873.500,00)	85,90
1.03.08.2.01.0021	5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.265.000,00	(735.000,00)	99,63
1.03.08.2.01.0021	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	199.265.000,00	(735.000,00)	99,63
1.03.08.2.01.0023		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	227.798.500,00	93.278.500,00	(134.520.000,00)	40,95
1.03.08.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	227.798.500,00	93.278.500,00	(134.520.000,00)	40,95
1.03.08.2.01.0023	5.1.01	Belanja Pegawai	14.520.000,00	0,00	(14.520.000,00)	0,00
1.03.08.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.278.500,00	93.278.500,00	(120.000.000,00)	43,74
1.03.09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	991.981.850,00	900.418.700,00	(91.563.150,00)	90,77
1.03.09.2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	991.981.850,00	900.418.700,00	(91.563.150,00)	90,77
1.03.09.2.01.0008		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	991.981.850,00	900.418.700,00	(91.563.150,00)	90,77
1.03.09.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	991.981.850,00	900.418.700,00	(91.563.150,00)	90,77
1.03.09.2.01.0008	5.1.01	Belanja Pegawai	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	100,00
1.03.09.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	982.321.850,00	890.758.700,00	(91.563.150,00)	90,68

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	69.283.485.444,00	66.707.873.151,00	(2.575.612.293,00)	96,28
1.03.10.2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	69.283.485.444,00	66.707.873.151,00	(2.575.612.293,00)	96,28
1.03.10.2.01.0032		Pembangunan Jalan	5.011.429.616,00	4.925.141.873,00	(86.287.743,00)	98,28
1.03.10.2.01.0032	5.1	BELANJA OPERASI	226.048.400,00	225.937.000,00	(111.400,00)	99,95
1.03.10.2.01.0032	5.1.01	Belanja Pegawai	11.460.000,00	11.460.000,00	0,00	100,00
1.03.10.2.01.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.588.400,00	214.477.000,00	(111.400,00)	99,95
1.03.10.2.01.0032	5.2	BELANJA MODAL	4.785.381.216,00	4.699.204.873,00	(86.176.343,00)	98,20
1.03.10.2.01.0032	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.785.381.216,00	4.699.204.873,00	(86.176.343,00)	98,20
1.03.10.2.01.0033		Rekonstruksi Jalan	50.984.293.800,00	48.692.415.971,00	(2.291.877.829,00)	95,50
1.03.10.2.01.0033	5.1	BELANJA OPERASI	1.544.000.000,00	1.307.310.762,00	(236.689.238,00)	84,67
1.03.10.2.01.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.544.000.000,00	1.307.310.762,00	(236.689.238,00)	84,67
1.03.10.2.01.0033	5.2	BELANJA MODAL	49.440.293.800,00	47.385.105.209,00	(2.055.188.591,00)	95,84
1.03.10.2.01.0033	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.440.293.800,00	47.385.105.209,00	(2.055.188.591,00)	95,84
1.03.10.2.01.0034		Pemeliharaan Berkala Jalan	12.049.004.228,00	11.899.189.640,00	(149.814.588,00)	98,76
1.03.10.2.01.0034	5.1	BELANJA OPERASI	332.753.578,00	303.347.300,00	(29.406.278,00)	91,16
1.03.10.2.01.0034	5.1.01	Belanja Pegawai	13.260.000,00	13.260.000,00	0,00	100,00
1.03.10.2.01.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.493.578,00	290.087.300,00	(29.406.278,00)	90,80
1.03.10.2.01.0034	5.2	BELANJA MODAL	11.716.250.650,00	11.595.842.340,00	(120.408.310,00)	98,97
1.03.10.2.01.0034	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.716.250.650,00	11.595.842.340,00	(120.408.310,00)	98,97
1.03.10.2.01.0040		Pembangunan Jembatan	1.047.157.800,00	999.825.667,00	(47.332.133,00)	95,48
1.03.10.2.01.0040	5.1	BELANJA OPERASI	110.400.000,00	110.313.000,00	(87.000,00)	99,92
1.03.10.2.01.0040	5.1.01	Belanja Pegawai	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	100,00
1.03.10.2.01.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.320.000,00	100.233.000,00	(87.000,00)	99,91
1.03.10.2.01.0040	5.2	BELANJA MODAL	936.757.800,00	889.512.667,00	(47.245.133,00)	94,96
1.03.10.2.01.0040	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	936.757.800,00	889.512.667,00	(47.245.133,00)	94,96
1.03.10.2.01.0046		Pemeliharaan Rutin Jalan	191.600.000,00	191.300.000,00	(300.000,00)	99,84
1.03.10.2.01.0046	5.1	BELANJA OPERASI	191.600.000,00	191.300.000,00	(300.000,00)	99,84
1.03.10.2.01.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.600.000,00	191.300.000,00	(300.000,00)	99,84
1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	50.900.000,00	37.257.650,00	(13.642.350,00)	73,20
1.03.11.2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	50.900.000,00	37.257.650,00	(13.642.350,00)	73,20
1.03.11.2.01.0016		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	50.900.000,00	37.257.650,00	(13.642.350,00)	73,20
1.03.11.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	50.900.000,00	37.257.650,00	(13.642.350,00)	73,20
1.03.11.2.01.0016	5.1.01	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00
1.03.11.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.870.000,00	34.227.650,00	(13.642.350,00)	71,50

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	285.822.150,00	281.960.694,00	(3.861.456,00)	98,65
1.03.12.2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	107.054.750,00	104.059.892,00	(2.994.858,00)	97,20
1.03.12.2.02.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	107.054.750,00	104.059.892,00	(2.994.858,00)	97,20
1.03.12.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	107.054.750,00	104.059.892,00	(2.994.858,00)	97,20
1.03.12.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	100,00
1.03.12.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.844.750,00	102.849.892,00	(2.994.858,00)	97,17
1.03.12.2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	99.510.400,00	99.510.400,00	0,00	100,00
1.03.12.2.03.0004		Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	99.510.400,00	99.510.400,00	0,00	100,00
1.03.12.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	99.510.400,00	99.510.400,00	0,00	100,00
1.03.12.2.03.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	100,00
1.03.12.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.450.400,00	93.450.400,00	0,00	100,00
1.03.12.2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	79.257.000,00	78.390.402,00	(866.598,00)	98,91
1.03.12.2.04.0004		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	79.257.000,00	78.390.402,00	(866.598,00)	98,91
1.03.12.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	79.257.000,00	78.390.402,00	(866.598,00)	98,91
1.03.12.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.257.000,00	78.390.402,00	(866.598,00)	98,91
1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.399.285.610,00	10.667.708.683,00	(731.576.927,00)	93,58
1.03.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	48.151.225,00	(1.848.775,00)	96,30
1.03.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000,00	24.045.500,00	(954.500,00)	96,18
1.03.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.045.500,00	(954.500,00)	96,18
1.03.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.045.500,00	(954.500,00)	96,18
1.03.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,00	24.105.725,00	(894.275,00)	96,42
1.03.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.105.725,00	(894.275,00)	96,42
1.03.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.105.725,00	(894.275,00)	96,42
1.03.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.142.142.550,00	6.854.235.273,00	(287.907.277,00)	95,97
1.03.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.142.142.550,00	6.854.235.273,00	(287.907.277,00)	95,97
1.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.142.142.550,00	6.854.235.273,00	(287.907.277,00)	95,97
1.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.142.142.550,00	6.854.235.273,00	(287.907.277,00)	95,97
1.03.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.000.000,00	11.000.000,00	(1.000.000,00)	91,67
1.03.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000,00	11.000.000,00	(1.000.000,00)	91,67
1.03.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.000.000,00	(1.000.000,00)	91,67

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.03.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.000.000,00	(1.000.000,00)	91,67
1.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	687.371.560,00	662.909.773,00	(24.461.787,00)	96,44
1.03.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
1.03.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
1.03.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
1.03.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.391.800,00	122.721.600,00	(2.670.200,00)	97,87
1.03.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	80.911.800,00	78.721.600,00	(2.190.200,00)	97,29
1.03.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.911.800,00	78.721.600,00	(2.190.200,00)	97,29
1.03.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	44.480.000,00	44.000.000,00	(480.000,00)	98,92
1.03.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.480.000,00	44.000.000,00	(480.000,00)	98,92
1.03.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	52.779.404,00	52.776.500,00	(2.904,00)	99,99
1.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	52.779.404,00	52.776.500,00	(2.904,00)	99,99
1.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.779.404,00	52.776.500,00	(2.904,00)	99,99
1.03.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0,00
1.03.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0,00
1.03.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0,00
1.03.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	471.700.356,00	457.411.673,00	(14.288.683,00)	96,97
1.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	471.700.356,00	457.411.673,00	(14.288.683,00)	96,97
1.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	471.700.356,00	457.411.673,00	(14.288.683,00)	96,97
1.03.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.980.000,00	46.800.000,00	(180.000,00)	99,62
1.03.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.980.000,00	46.800.000,00	(180.000,00)	99,62
1.03.01.2.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	46.980.000,00	46.800.000,00	(180.000,00)	99,62
1.03.01.2.07.0010	5.1.01	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00
1.03.01.2.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.950.000,00	43.770.000,00	(180.000,00)	99,59
1.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.205.928.700,00	2.141.445.119,00	(64.483.581,00)	97,08
1.03.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.775.000,00	20.220.500,00	(1.554.500,00)	92,86
1.03.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.775.000,00	20.220.500,00	(1.554.500,00)	92,86
1.03.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.775.000,00	20.220.500,00	(1.554.500,00)	92,86
1.03.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000,00	58.065.737,00	(41.934.263,00)	58,07
1.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	58.065.737,00	(41.934.263,00)	58,07
1.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	58.065.737,00	(41.934.263,00)	58,07
1.03.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.084.153.700,00	2.063.158.882,00	(20.994.818,00)	98,99
1.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.084.153.700,00	2.063.158.882,00	(20.994.818,00)	98,99
1.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.084.153.700,00	2.063.158.882,00	(20.994.818,00)	98,99

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.254.862.800,00	903.167.293,00	(351.695.507,00)	71,97
1.03.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.181.372.800,00	837.355.523,00	(344.017.277,00)	70,88
1.03.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.181.372.800,00	837.355.523,00	(344.017.277,00)	70,88
1.03.01.2.09.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	11.460.000,00	11.460.000,00	0,00	100,00
1.03.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.169.912.800,00	825.895.523,00	(344.017.277,00)	70,59
1.03.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73.490.000,00	65.811.770,00	(7.678.230,00)	89,55
1.03.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	73.490.000,00	65.811.770,00	(7.678.230,00)	89,55
1.03.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.490.000,00	65.811.770,00	(7.678.230,00)	89,55
		JUMLAH BELANJA	**115.253.133.100,00**	**110.815.011.184,88**	**(4.438.121.915,12)**	**96,15**
		SURPLUS DEFISIT	**(114.603.133.100,00)**	**(110.402.651.184,88)**	**4.200.481.915,12**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**114.170.000,00**	**113.920.000,00**	**(250.000,00)**	**99,78**
2.10.04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	114.170.000,00	113.920.000,00	(250.000,00)	99,78
2.10.04.2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	114.170.000,00	113.920.000,00	(250.000,00)	99,78
2.10.04.2.01.0001		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	114.170.000,00	113.920.000,00	(250.000,00)	99,78
2.10.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.170.000,00	14.170.000,00	0,00	100,00
2.10.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.170.000,00	14.170.000,00	0,00	100,00
2.10.04.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.750.000,00	(250.000,00)	99,75
2.10.04.2.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.750.000,00	(250.000,00)	99,75
		JUMLAH BELANJA	**114.170.000,00**	**113.920.000,00**	**(250.000,00)**	**99,78**
		SURPLUS DEFISIT	**(114.170.000,00)**	**(113.920.000,00)**	**250.000,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**5.662.864.450,00**	**5.601.614.800,00**	**(61.249.650,00)**	**98,92**
1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	91.110.000,00	85.835.800,00	(5.274.200,00)	94,21
1.04.02.2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	91.110.000,00	85.835.800,00	(5.274.200,00)	94,21
1.04.02.2.06.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	91.110.000,00	85.835.800,00	(5.274.200,00)	94,21
1.04.02.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	91.110.000,00	85.835.800,00	(5.274.200,00)	94,21
1.04.02.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.110.000,00	85.835.800,00	(5.274.200,00)	94,21
1.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7.241.000,00	7.241.000,00	0,00	100,00
1.04.03.2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
1.04.03.2.01.0004		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
1.04.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
1.04.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
1.04.03.2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	6.541.000,00	6.541.000,00	0,00	100,00
1.04.03.2.03.0012		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	6.541.000,00	6.541.000,00	0,00	100,00
1.04.03.2.03.0012	5.1	BELANJA OPERASI	6.541.000,00	6.541.000,00	0,00	100,00
1.04.03.2.03.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.541.000,00	6.541.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.04.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	5.564.513.450,00	5.508.538.000,00	(55.975.450,00)	98,99
1.04.05.2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	5.564.513.450,00	5.508.538.000,00	(55.975.450,00)	98,99
1.04.05.2.01.0001		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	101.653.850,00	95.643.850,00	(6.010.000,00)	94,09
1.04.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	101.653.850,00	95.643.850,00	(6.010.000,00)	94,09
1.04.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.653.850,00	95.643.850,00	(6.010.000,00)	94,09
1.04.05.2.01.0002		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.462.859.600,00	5.412.894.150,00	(49.965.450,00)	99,09
1.04.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	261.759.600,00	261.506.450,00	(253.150,00)	99,90
1.04.05.2.01.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	13.260.000,00	13.260.000,00	0,00	100,00
1.04.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.499.600,00	248.246.450,00	(253.150,00)	99,90
1.04.05.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	5.201.100.000,00	5.151.387.700,00	(49.712.300,00)	99,04
1.04.05.2.01.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.201.100.000,00	5.151.387.700,00	(49.712.300,00)	99,04
		JUMLAH BELANJA	**5.662.864.450,00**	**5.601.614.800,00**	**(61.249.650,00)**	**98,92**
		SURPLUS DEFISIT	**(5.662.864.450,00)**	**(5.601.614.800,00)**	**61.249.650,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**8.687.902.437,00**	**8.004.785.720,00**	**(683.116.717,00)**	**92,14**
1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.650.743.500,00	1.316.290.981,00	(334.452.519,00)	79,74
1.05.03.2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	280.840.500,00	279.066.481,00	(1.774.019,00)	99,37
1.05.03.2.01.0003		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	280.840.500,00	279.066.481,00	(1.774.019,00)	99,37
1.05.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	280.840.500,00	279.066.481,00	(1.774.019,00)	99,37
1.05.03.2.01.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	100,00
1.05.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.150.500,00	277.376.481,00	(1.774.019,00)	99,36
1.05.03.2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	155.433.000,00	155.148.500,00	(284.500,00)	99,82
1.05.03.2.02.0016		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	155.433.000,00	155.148.500,00	(284.500,00)	99,82
1.05.03.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	155.433.000,00	155.148.500,00	(284.500,00)	99,82
1.05.03.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.433.000,00	155.148.500,00	(284.500,00)	99,82
1.05.03.2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.138.980.000,00	808.386.000,00	(330.594.000,00)	70,97
1.05.03.2.03.0002		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.002.290.000,00	678.046.000,00	(324.244.000,00)	67,65
1.05.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.002.290.000,00	678.046.000,00	(324.244.000,00)	67,65
1.05.03.2.03.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00	100,00
1.05.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	675.756.000,00	(324.244.000,00)	67,58
1.05.03.2.03.0009		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	136.690.000,00	130.340.000,00	(6.350.000,00)	95,35
1.05.03.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	136.690.000,00	130.340.000,00	(6.350.000,00)	95,35
1.05.03.2.03.0009	5.1.01	Belanja Pegawai	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.05.03.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.590.000,00	127.240.000,00	(6.350.000,00)	95,25
1.05.03.2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	75.490.000,00	73.690.000,00	(1.800.000,00)	97,62
1.05.03.2.04.0010		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	75.490.000,00	73.690.000,00	(1.800.000,00)	97,62
1.05.03.2.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	75.490.000,00	73.690.000,00	(1.800.000,00)	97,62
1.05.03.2.04.0010	5.1.01	Belanja Pegawai	1.890.000,00	1.690.000,00	(200.000,00)	89,42
1.05.03.2.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.600.000,00	72.000.000,00	(1.600.000,00)	97,83
1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.202.149.500,00	1.146.203.204,00	(55.946.296,00)	95,35
1.05.04.2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.202.149.500,00	1.146.203.204,00	(55.946.296,00)	95,35
1.05.04.2.01.0002		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	870.422.500,00	855.038.004,00	(15.384.496,00)	98,23
1.05.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	870.422.500,00	855.038.004,00	(15.384.496,00)	98,23
1.05.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	870.422.500,00	855.038.004,00	(15.384.496,00)	98,23
1.05.04.2.01.0017		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	331.727.000,00	291.165.200,00	(40.561.800,00)	87,77
1.05.04.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	281.727.000,00	241.437.200,00	(40.289.800,00)	85,70
1.05.04.2.01.0017	5.1.01	Belanja Pegawai	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00
1.05.04.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.837.000,00	239.547.200,00	(40.289.800,00)	85,60
1.05.04.2.01.0017	5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.728.000,00	(272.000,00)	99,46
1.05.04.2.01.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.728.000,00	(272.000,00)	99,46
1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.835.009.437,00	5.542.291.535,00	(292.717.902,00)	94,98
1.05.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	143.706.000,00	142.007.097,00	(1.698.903,00)	98,82
1.05.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.846.000,00	27.385.097,00	(460.903,00)	98,34
1.05.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	27.846.000,00	27.385.097,00	(460.903,00)	98,34
1.05.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.846.000,00	27.385.097,00	(460.903,00)	98,34
1.05.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	115.860.000,00	114.622.000,00	(1.238.000,00)	98,93
1.05.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	115.860.000,00	114.622.000,00	(1.238.000,00)	98,93
1.05.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.860.000,00	114.622.000,00	(1.238.000,00)	98,93
1.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.556.914.149,00	2.350.656.584,00	(206.257.565,00)	91,93
1.05.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.556.914.149,00	2.350.656.584,00	(206.257.565,00)	91,93

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.556.914.149,00	2.350.656.584,00	(206.257.565,00)	91,93
1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.556.914.149,00	2.350.656.584,00	(206.257.565,00)	91,93
1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	457.986.308,00	456.821.969,00	(1.164.339,00)	99,75
1.05.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.983.000,00	14.983.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.983.000,00	14.983.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.983.000,00	14.983.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.361.000,00	55.361.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	42.749.000,00	42.749.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.749.000,00	42.749.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	12.612.000,00	12.612.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.612.000,00	12.612.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.667.500,00	18.657.500,00	(10.000,00)	99,95
1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	18.667.500,00	18.657.500,00	(10.000,00)	99,95
1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.667.500,00	18.657.500,00	(10.000,00)	99,95
1.05.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355.974.808,00	354.820.469,00	(1.154.339,00)	99,68
1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	355.974.808,00	354.820.469,00	(1.154.339,00)	99,68
1.05.01.2.06.0009	5.1.01	Belanja Pegawai	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.474.808,00	335.320.469,00	(1.154.339,00)	99,66
1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.354.811.920,00	2.305.763.586,00	(49.048.334,00)	97,92
1.05.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.000.000,00	19.695.516,00	(12.304.484,00)	61,55
1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	32.000.000,00	19.695.516,00	(12.304.484,00)	61,55
1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	19.695.516,00	(12.304.484,00)	61,55
1.05.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.322.811.920,00	2.286.068.070,00	(36.743.850,00)	98,42
1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.322.811.920,00	2.286.068.070,00	(36.743.850,00)	98,42
1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.322.811.920,00	2.286.068.070,00	(36.743.850,00)	98,42
1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	321.591.060,00	287.042.299,00	(34.548.761,00)	89,26
1.05.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.503.000,00	76.272.476,00	(1.230.524,00)	98,41
1.05.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	77.503.000,00	76.272.476,00	(1.230.524,00)	98,41
1.05.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.503.000,00	76.272.476,00	(1.230.524,00)	98,41

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.05.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	244.088.060,00	210.769.823,00	(33.318.237,00)	86,35
1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	244.088.060,00	210.769.823,00	(33.318.237,00)	86,35
1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.088.060,00	210.769.823,00	(33.318.237,00)	86,35
		JUMLAH BELANJA	**8.687.902.437,00**	**8.004.785.720,00**	**(683.116.717,00)**	**92,14**
		SURPLUS DEFISIT	**(8.687.902.437,00)**	**(8.004.785.720,00)**	**683.116.717,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : Dinas Sosial

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**6.282.684.980,00**	**4.821.915.089,00**	**(1.460.769.891,00)**	**76,75**
1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	340.874.500,00	287.465.800,00	(53.408.700,00)	84,33
1.06.02.2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	340.874.500,00	287.465.800,00	(53.408.700,00)	84,33
1.06.02.2.03.0002		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.874.500,00	97.765.000,00	(3.109.500,00)	96,92
1.06.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	100.874.500,00	97.765.000,00	(3.109.500,00)	96,92
1.06.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.874.500,00	97.765.000,00	(3.109.500,00)	96,92
1.06.02.2.03.0004		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	240.000.000,00	189.700.800,00	(50.299.200,00)	79,04
1.06.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	240.000.000,00	189.700.800,00	(50.299.200,00)	79,04
1.06.02.2.03.0004	5.1.05	Belanja Hibah	240.000.000,00	189.700.800,00	(50.299.200,00)	79,04
1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	439.970.356,00	318.386.770,00	(121.583.586,00)	72,37
1.06.04.2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	439.970.356,00	318.386.770,00	(121.583.586,00)	72,37
1.06.04.2.01.0005		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	89.460.000,00	76.850.000,00	(12.610.000,00)	85,90
1.06.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	89.460.000,00	76.850.000,00	(12.610.000,00)	85,90
1.06.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.460.000,00	76.850.000,00	(12.610.000,00)	85,90
1.06.04.2.01.0010		Pemberian Layanan Kedaruratan	350.510.356,00	241.536.770,00	(108.973.586,00)	68,91
1.06.04.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	350.510.356,00	241.536.770,00	(108.973.586,00)	68,91

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.06.04.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.510.356,00	241.536.770,00	(108.973.586,00)	68,91
1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.524.579.900,00	1.448.020.700,00	(1.076.559.200,00)	57,36
1.06.05.2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.524.579.900,00	1.448.020.700,00	(1.076.559.200,00)	57,36
1.06.05.2.02.0002		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	201.010.900,00	192.352.400,00	(8.658.500,00)	95,69
1.06.05.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	201.010.900,00	192.352.400,00	(8.658.500,00)	95,69
1.06.05.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.010.900,00	192.352.400,00	(8.658.500,00)	95,69
1.06.05.2.02.0003		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.323.569.000,00	1.255.668.300,00	(1.067.900.700,00)	54,04
1.06.05.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.323.569.000,00	1.255.668.300,00	(1.067.900.700,00)	54,04
1.06.05.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.323.569.000,00	1.255.668.300,00	(1.067.900.700,00)	54,04
1.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	143.160.000,00	135.550.000,00	(7.610.000,00)	94,68
1.06.06.2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	143.160.000,00	135.550.000,00	(7.610.000,00)	94,68
1.06.06.2.02.0002		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	143.160.000,00	135.550.000,00	(7.610.000,00)	94,68
1.06.06.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	143.160.000,00	135.550.000,00	(7.610.000,00)	94,68
1.06.06.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.160.000,00	135.550.000,00	(7.610.000,00)	94,68
1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.834.100.224,00	2.632.491.819,00	(201.608.405,00)	92,89
1.06.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.960.000,00	5.960.000,00	0,00	100,00
1.06.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.960.000,00	5.960.000,00	0,00	100,00
1.06.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.960.000,00	5.960.000,00	0,00	100,00
1.06.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.960.000,00	5.960.000,00	0,00	100,00
1.06.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.280.982.544,00	2.114.891.479,00	(166.091.065,00)	92,72
1.06.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.280.982.544,00	2.114.891.479,00	(166.091.065,00)	92,72
1.06.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.280.982.544,00	2.114.891.479,00	(166.091.065,00)	92,72
1.06.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.280.982.544,00	2.114.891.479,00	(166.091.065,00)	92,72
1.06.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	269.140.000,00	248.068.500,00	(21.071.500,00)	92,17
1.06.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.123.600,00	8.123.600,00	0,00	100,00
1.06.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.123.600,00	8.123.600,00	0,00	100,00
1.06.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.123.600,00	8.123.600,00	0,00	100,00
1.06.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.599.400,00	50.571.400,00	(28.000,00)	99,94
1.06.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	50.599.400,00	50.571.400,00	(28.000,00)	99,94
1.06.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.599.400,00	50.571.400,00	(28.000,00)	99,94
1.06.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.158.000,00	8.690.000,00	(468.000,00)	94,89
1.06.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.158.000,00	8.690.000,00	(468.000,00)	94,89
1.06.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.158.000,00	8.690.000,00	(468.000,00)	94,89

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.06.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00
1.06.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00
1.06.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00
1.06.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.059.000,00	164.483.500,00	(20.575.500,00)	88,88
1.06.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	185.059.000,00	164.483.500,00	(20.575.500,00)	88,88
1.06.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.059.000,00	164.483.500,00	(20.575.500,00)	88,88
1.06.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.537.680,00	196.427.739,00	(11.109.941,00)	94,65
1.06.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	13.044.427,00	(10.955.573,00)	54,35
1.06.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	13.044.427,00	(10.955.573,00)	54,35
1.06.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	13.044.427,00	(10.955.573,00)	54,35
1.06.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.030.000,00	8.030.000,00	0,00	100,00
1.06.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.030.000,00	8.030.000,00	0,00	100,00
1.06.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.030.000,00	8.030.000,00	0,00	100,00
1.06.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175.507.680,00	175.353.312,00	(154.368,00)	99,91
1.06.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	175.507.680,00	175.353.312,00	(154.368,00)	99,91
1.06.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.507.680,00	175.353.312,00	(154.368,00)	99,91
1.06.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.480.000,00	67.144.101,00	(3.335.899,00)	95,27
1.06.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.480.000,00	67.144.101,00	(3.335.899,00)	95,27
1.06.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	70.480.000,00	67.144.101,00	(3.335.899,00)	95,27
1.06.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.480.000,00	67.144.101,00	(3.335.899,00)	95,27
		JUMLAH BELANJA	**6.282.684.980,00**	**4.821.915.089,00**	**(1.460.769.891,00)**	**76,75**
		SURPLUS DEFISIT	**(6.282.684.980,00)**	**(4.821.915.089,00)**	**1.460.769.891,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**7.570.544.090,00**	**7.164.126.556,00**	**(406.417.534,00)**	**94,63**
1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.175.487.900,00	1.018.797.100,00	(156.690.800,00)	86,67
1.05.02.2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	830.000.000,00	748.118.000,00	(81.882.000,00)	90,13
1.05.02.2.01.0004		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	360.000.000,00	339.866.000,00	(20.134.000,00)	94,41
1.05.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	360.000.000,00	339.866.000,00	(20.134.000,00)	94,41
1.05.02.2.01.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	16.920.000,00	16.920.000,00	0,00	100,00
1.05.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.080.000,00	322.946.000,00	(20.134.000,00)	94,13
1.05.02.2.01.0015		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	470.000.000,00	408.252.000,00	(61.748.000,00)	86,86
1.05.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	470.000.000,00	408.252.000,00	(61.748.000,00)	86,86
1.05.02.2.01.0015	5.1.01	Belanja Pegawai	16.920.000,00	16.920.000,00	0,00	100,00
1.05.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	453.080.000,00	391.332.000,00	(61.748.000,00)	86,37
1.05.02.2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	345.487.900,00	270.679.100,00	(74.808.800,00)	78,35
1.05.02.2.02.0011		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	345.487.900,00	270.679.100,00	(74.808.800,00)	78,35
1.05.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	345.487.900,00	270.679.100,00	(74.808.800,00)	78,35

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.05.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	345.487.900,00	270.679.100,00	(74.808.800,00)	78,35
1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.395.056.190,00	6.145.329.456,00	(249.726.734,00)	96,10
1.05.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.108.454.987,00	2.930.341.613,00	(178.113.374,00)	94,27
1.05.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.108.454.987,00	2.930.341.613,00	(178.113.374,00)	94,27
1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.108.454.987,00	2.930.341.613,00	(178.113.374,00)	94,27
1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.108.454.987,00	2.930.341.613,00	(178.113.374,00)	94,27
1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	403.250.770,00	393.129.132,00	(10.121.638,00)	97,49
1.05.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.015.400,00	4.015.400,00	0,00	100,00
1.05.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.015.400,00	4.015.400,00	0,00	100,00
1.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.015.400,00	4.015.400,00	0,00	100,00
1.05.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.156.120,00	107.156.120,00	0,00	100,00
1.05.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	107.156.120,00	107.156.120,00	0,00	100,00
1.05.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.156.120,00	107.156.120,00	0,00	100,00
1.05.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.599.250,00	13.599.250,00	0,00	100,00
1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.599.250,00	13.599.250,00	0,00	100,00
1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.599.250,00	13.599.250,00	0,00	100,00
1.05.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.880.000,00	4.620.000,00	(3.260.000,00)	58,63
1.05.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.880.000,00	4.620.000,00	(3.260.000,00)	58,63
1.05.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.880.000,00	4.620.000,00	(3.260.000,00)	58,63
1.05.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270.600.000,00	263.738.362,00	(6.861.638,00)	97,46
1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	270.600.000,00	263.738.362,00	(6.861.638,00)	97,46
1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.600.000,00	263.738.362,00	(6.861.638,00)	97,46
1.05.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	131.756.650,00	119.933.850,00	(11.822.800,00)	91,03
1.05.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	131.756.650,00	119.933.850,00	(11.822.800,00)	91,03

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.05.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	131.756.650,00	119.933.850,00	(11.822.800,00)	91,03
1.05.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.756.650,00	119.933.850,00	(11.822.800,00)	91,03
1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.481.047.240,00	2.453.830.336,00	(27.216.904,00)	98,90
1.05.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.032.000,00	11.324.560,00	(12.707.440,00)	47,12
1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.032.000,00	11.324.560,00	(12.707.440,00)	47,12
1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.032.000,00	11.324.560,00	(12.707.440,00)	47,12
1.05.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.457.015.240,00	2.442.505.776,00	(14.509.464,00)	99,41
1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.457.015.240,00	2.442.505.776,00	(14.509.464,00)	99,41
1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.457.015.240,00	2.442.505.776,00	(14.509.464,00)	99,41
1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.546.543,00	228.094.525,00	(22.452.018,00)	91,04
1.05.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	222.936.543,00	200.484.525,00	(22.452.018,00)	89,93
1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	222.936.543,00	200.484.525,00	(22.452.018,00)	89,93
1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.936.543,00	200.484.525,00	(22.452.018,00)	89,93
1.05.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.510.000,00	20.510.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	20.510.000,00	20.510.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.510.000,00	20.510.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	100,00
		JUMLAH BELANJA	**7.570.544.090,00**	**7.164.126.556,00**	**(406.417.534,00)**	**94,63**
		SURPLUS DEFISIT	**(7.570.544.090,00)**	**(7.164.126.556,00)**	**406.417.534,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**3.916.691.623,00**	**3.680.462.720,00**	**(236.228.903,00)**	**93,97**
2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	161.913.000,00	142.573.145,00	(19.339.855,00)	88,06
2.08.02.2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000,00	31.895.000,00	(3.105.000,00)	91,13
2.08.02.2.01.0003		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	35.000.000,00	31.895.000,00	(3.105.000,00)	91,13
2.08.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	31.895.000,00	(3.105.000,00)	91,13
2.08.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	31.895.000,00	(3.105.000,00)	91,13
2.08.02.2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	91.913.000,00	80.266.145,00	(11.646.855,00)	87,33
2.08.02.2.02.0001		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	91.913.000,00	80.266.145,00	(11.646.855,00)	87,33
2.08.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	91.913.000,00	80.266.145,00	(11.646.855,00)	87,33
2.08.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.913.000,00	80.266.145,00	(11.646.855,00)	87,33
2.08.02.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000,00	30.412.000,00	(4.588.000,00)	86,89
2.08.02.2.03.0002		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	16.779.000,00	(3.221.000,00)	83,90

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.08.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	16.779.000,00	(3.221.000,00)	83,90
2.08.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	16.779.000,00	(3.221.000,00)	83,90
2.08.02.2.03.0003		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000,00	13.633.000,00	(1.367.000,00)	90,89
2.08.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	13.633.000,00	(1.367.000,00)	90,89
2.08.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	13.633.000,00	(1.367.000,00)	90,89
2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	20.760.000,00	16.854.000,00	(3.906.000,00)	81,18
2.08.03.2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	8.134.000,00	(1.866.000,00)	81,34
2.08.03.2.01.0002		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	8.134.000,00	(1.866.000,00)	81,34
2.08.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	8.134.000,00	(1.866.000,00)	81,34
2.08.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.134.000,00	(1.866.000,00)	81,34
2.08.03.2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan	10.760.000,00	8.720.000,00	(2.040.000,00)	81,04
2.08.03.2.02.0001		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.760.000,00	8.720.000,00	(2.040.000,00)	81,04
2.08.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.760.000,00	8.720.000,00	(2.040.000,00)	81,04
2.08.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.760.000,00	8.720.000,00	(2.040.000,00)	81,04
2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	52.188.350,00	47.118.350,00	(5.070.000,00)	90,29
2.08.06.2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	24.487.000,00	21.847.000,00	(2.640.000,00)	89,22
2.08.06.2.01.0001		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	24.487.000,00	21.847.000,00	(2.640.000,00)	89,22
2.08.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.487.000,00	21.847.000,00	(2.640.000,00)	89,22
2.08.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.487.000,00	21.847.000,00	(2.640.000,00)	89,22
2.08.06.2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	27.701.350,00	25.271.350,00	(2.430.000,00)	91,23
2.08.06.2.02.0001		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8.192.550,00	7.912.550,00	(280.000,00)	96,58
2.08.06.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.192.550,00	7.912.550,00	(280.000,00)	96,58
2.08.06.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.192.550,00	7.912.550,00	(280.000,00)	96,58
2.08.06.2.02.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.508.800,00	17.358.800,00	(2.150.000,00)	88,98

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.08.06.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.508.800,00	17.358.800,00	(2.150.000,00)	88,98
2.08.06.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.508.800,00	17.358.800,00	(2.150.000,00)	88,98
2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	124.495.600,00	110.933.600,00	(13.562.000,00)	89,11
2.08.07.2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	55.580.400,00	51.878.400,00	(3.702.000,00)	93,34
2.08.07.2.01.0003		Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	55.580.400,00	51.878.400,00	(3.702.000,00)	93,34
2.08.07.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	55.580.400,00	51.878.400,00	(3.702.000,00)	93,34
2.08.07.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.580.400,00	51.878.400,00	(3.702.000,00)	93,34
2.08.07.2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68.915.200,00	59.055.200,00	(9.860.000,00)	85,69
2.08.07.2.02.0005		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68.915.200,00	59.055.200,00	(9.860.000,00)	85,69
2.08.07.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	68.915.200,00	59.055.200,00	(9.860.000,00)	85,69
2.08.07.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.915.200,00	59.055.200,00	(9.860.000,00)	85,69
2.08.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.557.334.673,00	3.362.983.625,00	(194.351.048,00)	94,54
2.08.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	3.460.000,00	(2.540.000,00)	57,67
2.08.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000,00	3.460.000,00	(2.540.000,00)	57,67
2.08.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	3.460.000,00	(2.540.000,00)	57,67
2.08.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	3.460.000,00	(2.540.000,00)	57,67
2.08.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.083.173.216,00	2.922.333.277,00	(160.839.939,00)	94,78
2.08.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.075.174.216,00	2.915.533.277,00	(159.640.939,00)	94,81
2.08.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.075.174.216,00	2.915.533.277,00	(159.640.939,00)	94,81
2.08.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.075.174.216,00	2.915.533.277,00	(159.640.939,00)	94,81
2.08.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.999.000,00	6.800.000,00	(1.199.000,00)	85,01
2.08.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.999.000,00	6.800.000,00	(1.199.000,00)	85,01
2.08.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.999.000,00	6.800.000,00	(1.199.000,00)	85,01
2.08.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.379.000,00	187.609.037,00	(15.769.963,00)	92,25
2.08.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.407.000,00	59.405.684,00	(1.316,00)	100,00
2.08.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	59.407.000,00	59.405.684,00	(1.316,00)	100,00
2.08.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.407.000,00	59.405.684,00	(1.316,00)	100,00
2.08.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
2.08.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.08.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
2.08.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.972.000,00	118.203.353,00	(15.768.647,00)	88,23
2.08.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	133.972.000,00	118.203.353,00	(15.768.647,00)	88,23
2.08.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.972.000,00	118.203.353,00	(15.768.647,00)	88,23
2.08.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.951.570,00	177.477.469,00	(9.474.101,00)	94,93
2.08.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	17.418.930,00	(6.581.070,00)	72,58
2.08.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	17.418.930,00	(6.581.070,00)	72,58
2.08.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	17.418.930,00	(6.581.070,00)	72,58
2.08.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162.951.570,00	160.058.539,00	(2.893.031,00)	98,22
2.08.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	162.951.570,00	160.058.539,00	(2.893.031,00)	98,22
2.08.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	100,00
2.08.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.871.570,00	155.978.539,00	(2.893.031,00)	98,18
2.08.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.830.887,00	72.103.842,00	(5.727.045,00)	92,64
2.08.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.091.475,00	66.940.000,00	(2.151.475,00)	96,89
2.08.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	69.091.475,00	66.940.000,00	(2.151.475,00)	96,89
2.08.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.091.475,00	66.940.000,00	(2.151.475,00)	96,89
2.08.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.739.412,00	5.163.842,00	(3.575.570,00)	59,09
2.08.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.739.412,00	5.163.842,00	(3.575.570,00)	59,09
2.08.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.739.412,00	5.163.842,00	(3.575.570,00)	59,09
		JUMLAH BELANJA	**3.916.691.623,00**	**3.680.462.720,00**	**(236.228.903,00)**	**93,97**
		SURPLUS DEFISIT	**(3.916.691.623,00)**	**(3.680.462.720,00)**	**236.228.903,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**7.402.423.870,00**	**4.910.910.150,00**	**(2.491.513.720,00)**	**66,34**
2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	378.795.000,00	286.130.000,00	(92.665.000,00)	75,54
2.14.02.2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	378.795.000,00	286.130.000,00	(92.665.000,00)	75,54
2.14.02.2.02.0012		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	125.400.000,00	124.200.000,00	(1.200.000,00)	99,04
2.14.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	125.400.000,00	124.200.000,00	(1.200.000,00)	99,04
2.14.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.400.000,00	124.200.000,00	(1.200.000,00)	99,04
2.14.02.2.02.0013		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	253.395.000,00	161.930.000,00	(91.465.000,00)	63,90
2.14.02.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	253.395.000,00	161.930.000,00	(91.465.000,00)	63,90
2.14.02.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.395.000,00	161.930.000,00	(91.465.000,00)	63,90
2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.652.409.700,00	3.225.570.150,00	(1.426.839.550,00)	69,33
2.14.03.2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.660.379.000,00	1.460.906.200,00	(199.472.800,00)	87,99
2.14.03.2.01.0008		Pengendalian Program KKBPK	147.184.000,00	139.788.000,00	(7.396.000,00)	94,97
2.14.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	147.184.000,00	139.788.000,00	(7.396.000,00)	94,97
2.14.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.184.000,00	139.788.000,00	(7.396.000,00)	94,97

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.14.03.2.01.0010		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	785.530.000,00	704.252.200,00	(81.277.800,00)	89,65
2.14.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	785.530.000,00	704.252.200,00	(81.277.800,00)	89,65
2.14.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	785.530.000,00	704.252.200,00	(81.277.800,00)	89,65
2.14.03.2.01.0011		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	327.600.000,00	271.266.000,00	(56.334.000,00)	82,80
2.14.03.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	327.600.000,00	271.266.000,00	(56.334.000,00)	82,80
2.14.03.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.600.000,00	271.266.000,00	(56.334.000,00)	82,80
2.14.03.2.01.0012		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
2.14.03.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
2.14.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
2.14.03.2.01.0014		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	250.065.000,00	195.600.000,00	(54.465.000,00)	78,22
2.14.03.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	250.065.000,00	195.600.000,00	(54.465.000,00)	78,22
2.14.03.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.065.000,00	195.600.000,00	(54.465.000,00)	78,22
2.14.03.2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	507.000.000,00	507.000.000,00	0,00	100,00
2.14.03.2.02.0004		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	507.000.000,00	507.000.000,00	0,00	100,00
2.14.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	507.000.000,00	507.000.000,00	0,00	100,00
2.14.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	507.000.000,00	507.000.000,00	0,00	100,00
2.14.03.2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.161.395.700,00	949.911.950,00	(1.211.483.750,00)	43,95
2.14.03.2.03.0001		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	17.196.000,00	15.891.950,00	(1.304.050,00)	92,42
2.14.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.196.000,00	15.891.950,00	(1.304.050,00)	92,42
2.14.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.196.000,00	15.891.950,00	(1.304.050,00)	92,42
2.14.03.2.03.0003		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.126.904.700,00	919.090.000,00	(1.207.814.700,00)	43,21
2.14.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.126.904.700,00	919.090.000,00	(1.207.814.700,00)	43,21

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.14.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.126.904.700,00	919.090.000,00	(1.207.814.700,00)	43,21
2.14.03.2.03.0008		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	17.295.000,00	14.930.000,00	(2.365.000,00)	86,33
2.14.03.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	17.295.000,00	14.930.000,00	(2.365.000,00)	86,33
2.14.03.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.295.000,00	14.930.000,00	(2.365.000,00)	86,33
2.14.03.2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	323.635.000,00	307.752.000,00	(15.883.000,00)	95,09
2.14.03.2.04.0002		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000,00	3.740.000,00	(10.000,00)	99,73
2.14.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.750.000,00	3.740.000,00	(10.000,00)	99,73
2.14.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.740.000,00	(10.000,00)	99,73
2.14.03.2.04.0006		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	319.885.000,00	304.012.000,00	(15.873.000,00)	95,04
2.14.03.2.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	319.885.000,00	304.012.000,00	(15.873.000,00)	95,04
2.14.03.2.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.885.000,00	304.012.000,00	(15.873.000,00)	95,04
2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.371.219.170,00	1.399.210.000,00	(972.009.170,00)	59,01
2.14.04.2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	128.833.170,00	93.960.000,00	(34.873.170,00)	72,93
2.14.04.2.01.0018		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	128.833.170,00	93.960.000,00	(34.873.170,00)	72,93
2.14.04.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	128.833.170,00	93.960.000,00	(34.873.170,00)	72,93
2.14.04.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.833.170,00	93.960.000,00	(34.873.170,00)	72,93
2.14.04.2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.242.386.000,00	1.305.250.000,00	(937.136.000,00)	58,21
2.14.04.2.02.0005		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	958.576.000,00	596.300.000,00	(362.276.000,00)	62,21
2.14.04.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	958.576.000,00	596.300.000,00	(362.276.000,00)	62,21
2.14.04.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	958.576.000,00	596.300.000,00	(362.276.000,00)	62,21

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.14.04.2.02.0006		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.283.810.000,00	708.950.000,00	(574.860.000,00)	55,22
2.14.04.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.283.810.000,00	708.950.000,00	(574.860.000,00)	55,22
2.14.04.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.283.810.000,00	708.950.000,00	(574.860.000,00)	55,22
		JUMLAH BELANJA	**7.402.423.870,00**	**4.910.910.150,00**	**(2.491.513.720,00)**	**66,34**
		SURPLUS DEFISIT	**(7.402.423.870,00)**	**(4.910.910.150,00)**	**2.491.513.720,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	4	**PENDAPATAN DAERAH**	**607.000.000,00**	**631.202.000,00**	**24.202.000,00**	**103,99**
	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	607.000.000,00	631.202.000,00	24.202.000,00	103,99
	4.1.02	Retribusi Daerah	607.000.000,00	631.202.000,00	24.202.000,00	103,99
		JUMLAH PENDAPATAN	**607.000.000,00**	**631.202.000,00**	**24.202.000,00**	**103,99**
	5	**BELANJA DAERAH**	**14.710.623.587,00**	**10.480.390.051,00**	**(4.230.233.536,00)**	**71,24**
2.11.02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	250.000.000,00	245.125.000,00	(4.875.000,00)	98,05
2.11.02.2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	250.000.000,00	245.125.000,00	(4.875.000,00)	98,05
2.11.02.2.02.0002		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	250.000.000,00	245.125.000,00	(4.875.000,00)	98,05
2.11.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	245.125.000,00	(4.875.000,00)	98,05
2.11.02.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	10.360.000,00	10.360.000,00	0,00	100,00
2.11.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.640.000,00	234.765.000,00	(4.875.000,00)	97,97
2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4.611.656.415,00	901.467.665,00	(3.710.188.750,00)	19,55
2.11.03.2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	3.750.846.000,00	180.283.250,00	(3.570.562.750,00)	4,81
2.11.03.2.02.0001		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	3.750.846.000,00	180.283.250,00	(3.570.562.750,00)	4,81
2.11.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.750.846.000,00	180.283.250,00	(3.570.562.750,00)	4,81
2.11.03.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.940.000,00	7.940.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.11.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.742.906.000,00	172.343.250,00	(3.570.562.750,00)	4,60
2.11.03.2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	860.810.415,00	721.184.415,00	(139.626.000,00)	83,78
2.11.03.2.03.0013		Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	860.810.415,00	721.184.415,00	(139.626.000,00)	83,78
2.11.03.2.03.0013	5.1	BELANJA OPERASI	860.810.415,00	721.184.415,00	(139.626.000,00)	83,78
2.11.03.2.03.0013	5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.03.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	860.810.415,00	721.184.415,00	(139.626.000,00)	83,78
2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	200.751.498,00	196.004.220,00	(4.747.278,00)	97,64
2.11.04.2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	200.751.498,00	196.004.220,00	(4.747.278,00)	97,64
2.11.04.2.01.0004		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	200.751.498,00	196.004.220,00	(4.747.278,00)	97,64
2.11.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	200.751.498,00	196.004.220,00	(4.747.278,00)	97,64
2.11.04.2.01.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00
2.11.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.071.498,00	195.324.220,00	(4.747.278,00)	97,63
2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	186.427.000,00	169.704.000,00	(16.723.000,00)	91,03
2.11.08.2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	186.427.000,00	169.704.000,00	(16.723.000,00)	91,03
2.11.08.2.01.0005		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	186.427.000,00	169.704.000,00	(16.723.000,00)	91,03
2.11.08.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	186.427.000,00	169.704.000,00	(16.723.000,00)	91,03
2.11.08.2.01.0005	5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00
2.11.08.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.747.000,00	169.024.000,00	(16.723.000,00)	91,00
2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.679.340.968,00	2.489.080.068,00	(190.260.900,00)	92,90
2.11.11.2.01		Pengelolaan Sampah	2.679.340.968,00	2.489.080.068,00	(190.260.900,00)	92,90
2.11.11.2.01.0020		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	2.679.340.968,00	2.489.080.068,00	(190.260.900,00)	92,90
2.11.11.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	1.357.437.968,00	1.177.882.568,00	(179.555.400,00)	86,77
2.11.11.2.01.0020	5.1.01	Belanja Pegawai	9.490.000,00	9.490.000,00	0,00	100,00
2.11.11.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.347.947.968,00	1.168.392.568,00	(179.555.400,00)	86,68
2.11.11.2.01.0020	5.2	BELANJA MODAL	1.321.903.000,00	1.311.197.500,00	(10.705.500,00)	99,19
2.11.11.2.01.0020	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.221.903.000,00	1.211.364.000,00	(10.539.000,00)	99,14
2.11.11.2.01.0020	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.833.500,00	(166.500,00)	99,83

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.782.447.706,00	6.479.009.098,00	(303.438.608,00)	95,53
2.11.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.646.837.528,00	2.412.653.784,00	(234.183.744,00)	91,15
2.11.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.646.837.528,00	2.412.653.784,00	(234.183.744,00)	91,15
2.11.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.646.837.528,00	2.412.653.784,00	(234.183.744,00)	91,15
2.11.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.646.837.528,00	2.412.653.784,00	(234.183.744,00)	91,15
2.11.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	338.605.674,00	330.898.293,00	(7.707.381,00)	97,72
2.11.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	100,00
2.11.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	100,00
2.11.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	100,00
2.11.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.539.274,00	28.539.274,00	0,00	100,00
2.11.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.539.274,00	28.539.274,00	0,00	100,00
2.11.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.539.274,00	28.539.274,00	0,00	100,00
2.11.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.976.400,00	16.842.400,00	(7.134.000,00)	70,25
2.11.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	23.976.400,00	16.842.400,00	(7.134.000,00)	70,25
2.11.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.976.400,00	16.842.400,00	(7.134.000,00)	70,25
2.11.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00
2.11.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00
2.11.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00
2.11.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	263.540.000,00	262.966.619,00	(573.381,00)	99,78
2.11.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	263.540.000,00	262.966.619,00	(573.381,00)	99,78
2.11.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.540.000,00	262.966.619,00	(573.381,00)	99,78
2.11.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.088.400,00	56.850.000,00	(238.400,00)	99,58
2.11.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.588.400,00	49.350.000,00	(238.400,00)	99,52
2.11.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	49.588.400,00	49.350.000,00	(238.400,00)	99,52
2.11.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.588.400,00	49.350.000,00	(238.400,00)	99,52
2.11.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
2.11.01.2.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
2.11.01.2.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
2.11.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.764.612.750,00	2.740.580.632,00	(24.032.118,00)	99,13
2.11.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	3.015.350,00	(484.650,00)	86,15
2.11.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.015.350,00	(484.650,00)	86,15
2.11.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.015.350,00	(484.650,00)	86,15

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**6.861.543.761,00**	**6.469.658.513,00**	**(391.885.248,00)**	**94,29**
2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.257.594.604,00	3.157.215.722,00	(100.378.882,00)	96,92
2.13.04.2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.257.594.604,00	3.157.215.722,00	(100.378.882,00)	96,92
2.13.04.2.01.0003		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	43.735.400,00	42.825.400,00	(910.000,00)	97,92
2.13.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	43.735.400,00	42.825.400,00	(910.000,00)	97,92
2.13.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.735.400,00	42.825.400,00	(910.000,00)	97,92
2.13.04.2.01.0004		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.066.981.704,00	2.973.626.822,00	(93.354.882,00)	96,96
2.13.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.066.981.704,00	2.973.626.822,00	(93.354.882,00)	96,96
2.13.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.066.981.704,00	2.973.626.822,00	(93.354.882,00)	96,96
2.13.04.2.01.0005		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	43.899.500,00	41.649.500,00	(2.250.000,00)	94,87
2.13.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	43.899.500,00	41.649.500,00	(2.250.000,00)	94,87
2.13.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.899.500,00	41.649.500,00	(2.250.000,00)	94,87
2.13.04.2.01.0008		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	62.978.000,00	59.596.000,00	(3.382.000,00)	94,63
2.13.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	62.978.000,00	59.596.000,00	(3.382.000,00)	94,63
2.13.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.978.000,00	59.596.000,00	(3.382.000,00)	94,63
2.13.04.2.01.0011		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	40.000.000,00	39.518.000,00	(482.000,00)	98,80
2.13.04.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.518.000,00	(482.000,00)	98,80
2.13.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.518.000,00	(482.000,00)	98,80

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	439.142.000,00	327.414.502,00	(111.727.498,00)	74,56
2.13.05.2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	439.142.000,00	327.414.502,00	(111.727.498,00)	74,56
2.13.05.2.01.0003		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	239.142.000,00	129.094.713,00	(110.047.287,00)	53,98
2.13.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	239.142.000,00	129.094.713,00	(110.047.287,00)	53,98
2.13.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.142.000,00	129.094.713,00	(110.047.287,00)	53,98
2.13.05.2.01.0009		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	200.000.000,00	198.319.789,00	(1.680.211,00)	99,16
2.13.05.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	198.319.789,00	(1.680.211,00)	99,16
2.13.05.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	198.319.789,00	(1.680.211,00)	99,16
2.13.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.164.807.157,00	2.985.028.289,00	(179.778.868,00)	94,32
2.13.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
2.13.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
2.13.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
2.13.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
2.13.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.706.181.257,00	2.543.001.214,00	(163.180.043,00)	93,97
2.13.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.706.181.257,00	2.543.001.214,00	(163.180.043,00)	93,97
2.13.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.706.181.257,00	2.543.001.214,00	(163.180.043,00)	93,97
2.13.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.706.181.257,00	2.543.001.214,00	(163.180.043,00)	93,97
2.13.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	274.006.000,00	273.672.310,00	(333.690,00)	99,88
2.13.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
2.13.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
2.13.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
2.13.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	49.999.500,00	(500,00)	100,00
2.13.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.999.500,00	(500,00)	100,00
2.13.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.999.500,00	(500,00)	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.13.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
2.13.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
2.13.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
2.13.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
2.13.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
2.13.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
2.13.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.006.000,00	198.672.810,00	(333.190,00)	99,83
2.13.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	199.006.000,00	198.672.810,00	(333.190,00)	99,83
2.13.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.006.000,00	198.672.810,00	(333.190,00)	99,83
2.13.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.881.900,00	115.255.148,00	(15.626.752,00)	88,06
2.13.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.189.600,00	6.334.628,00	(14.854.972,00)	29,89
2.13.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.189.600,00	6.334.628,00	(14.854.972,00)	29,89
2.13.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.189.600,00	6.334.628,00	(14.854.972,00)	29,89
2.13.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.692.300,00	108.920.520,00	(771.780,00)	99,30
2.13.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	109.692.300,00	108.920.520,00	(771.780,00)	99,30
2.13.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.692.300,00	108.920.520,00	(771.780,00)	99,30
2.13.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.738.000,00	50.099.617,00	(638.383,00)	98,74
2.13.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.738.000,00	50.099.617,00	(638.383,00)	98,74
2.13.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	50.738.000,00	50.099.617,00	(638.383,00)	98,74
2.13.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.738.000,00	50.099.617,00	(638.383,00)	98,74
		JUMLAH BELANJA	**6.861.543.761,00**	**6.469.658.513,00**	**-391.885.248,00**	**94,29**
		SURPLUS DEFISIT	**(6.861.543.761,00)**	**(6.469.658.513,00)**	**391.885.248,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN MAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : Dinas Perhubungan

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	4	**PENDAPATAN DAERAH**	**267.000.000,00**	**259.500.000,00**	**(7.500.000,00)**	**97,19**
	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	267.000.000,00	259.500.000,00	(7.500.000,00)	97,19
	4.1.02	Retribusi Daerah	267.000.000,00	259.500.000,00	(7.500.000,00)	97,19
		JUMLAH PENDAPATAN	**267.000.000,00**	**259.500.000,00**	**(7.500.000,00)**	**97,19**
	5	**BELANJA DAERAH**	**4.399.944.974,00**	**4.217.932.053,00**	**(182.012.921,00)**	**95,86**
2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	332.664.126,00	327.092.900,00	(5.571.226,00)	98,33
2.15.02.2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	127.910.000,00	127.319.000,00	(591.000,00)	99,54
2.15.02.2.02.0002		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	127.910.000,00	127.319.000,00	(591.000,00)	99,54
2.15.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	127.910.000,00	127.319.000,00	(591.000,00)	99,54
2.15.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.910.000,00	127.319.000,00	(591.000,00)	99,54
2.15.02.2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	69.755.000,00	65.225.000,00	(4.530.000,00)	93,51
2.15.02.2.05.0004		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	69.755.000,00	65.225.000,00	(4.530.000,00)	93,51
2.15.02.2.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	69.755.000,00	65.225.000,00	(4.530.000,00)	93,51
2.15.02.2.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.755.000,00	65.225.000,00	(4.530.000,00)	93,51
2.15.02.2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	54.334.026,00	54.333.800,00	(226,00)	100,00
2.15.02.2.06.0015		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	54.334.026,00	54.333.800,00	(226,00)	100,00
2.15.02.2.06.0015	5.1	BELANJA OPERASI	48.768.026,00	48.767.800,00	(226,00)	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.15.02.2.06.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.768.026,00	48.767.800,00	(226,00)	100,00
2.15.02.2.06.0015	5.2	BELANJA MODAL	5.566.000,00	5.566.000,00	0,00	100,00
2.15.02.2.06.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.566.000,00	5.566.000,00	0,00	100,00
2.15.02.2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	29.990.000,00	(10.000,00)	99,97
2.15.02.2.07.0006		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	30.000.000,00	29.990.000,00	(10.000,00)	99,97
2.15.02.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.990.000,00	(10.000,00)	99,97
2.15.02.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.990.000,00	(10.000,00)	99,97
2.15.02.2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	50.665.100,00	50.225.100,00	(440.000,00)	99,13
2.15.02.2.08.0007		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	50.665.100,00	50.225.100,00	(440.000,00)	99,13
2.15.02.2.08.0007	5.1	BELANJA OPERASI	50.665.100,00	50.225.100,00	(440.000,00)	99,13
2.15.02.2.08.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.665.100,00	50.225.100,00	(440.000,00)	99,13
2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.067.280.848,00	3.890.839.153,00	(176.441.695,00)	95,66
2.15.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.860.000,00	(140.000,00)	97,20
2.15.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.860.000,00	(140.000,00)	97,20
2.15.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.860.000,00	(140.000,00)	97,20
2.15.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.860.000,00	(140.000,00)	97,20
2.15.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.943.445.046,00	2.773.952.024,00	(169.493.022,00)	94,24
2.15.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.943.445.046,00	2.773.952.024,00	(169.493.022,00)	94,24
2.15.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.943.445.046,00	2.773.952.024,00	(169.493.022,00)	94,24
2.15.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.943.445.046,00	2.773.952.024,00	(169.493.022,00)	94,24
2.15.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	374.754.226,00	374.482.301,00	(271.925,00)	99,93
2.15.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.058.000,00	5.058.000,00	0,00	100,00
2.15.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.058.000,00	5.058.000,00	0,00	100,00
2.15.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.058.000,00	5.058.000,00	0,00	100,00
2.15.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.206.310,00	53.195.900,00	(10.410,00)	99,98
2.15.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	53.206.310,00	53.195.900,00	(10.410,00)	99,98
2.15.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.206.310,00	53.195.900,00	(10.410,00)	99,98
2.15.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.923.916,00	21.921.116,00	(2.800,00)	99,99
2.15.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	21.923.916,00	21.921.116,00	(2.800,00)	99,99
2.15.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.923.916,00	21.921.116,00	(2.800,00)	99,99
2.15.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
2.15.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.15.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
2.15.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285.566.000,00	285.307.285,00	(258.715,00)	99,91
2.15.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	285.566.000,00	285.307.285,00	(258.715,00)	99,91
2.15.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.566.000,00	285.307.285,00	(258.715,00)	99,91
2.15.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.389.776,00	497.574.528,00	(2.815.248,00)	99,44
2.15.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,00	17.972.132,00	(27.868,00)	99,85
2.15.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	17.972.132,00	(27.868,00)	99,85
2.15.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	17.972.132,00	(27.868,00)	99,85
2.15.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	482.389.776,00	479.602.396,00	(2.787.380,00)	99,42
2.15.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	482.389.776,00	479.602.396,00	(2.787.380,00)	99,42
2.15.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	482.389.776,00	479.602.396,00	(2.787.380,00)	99,42
2.15.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.691.800,00	239.970.300,00	(3.721.500,00)	98,47
2.15.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.535.000,00	12.100.000,00	(3.435.000,00)	77,89
2.15.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.535.000,00	12.100.000,00	(3.435.000,00)	77,89
2.15.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.535.000,00	12.100.000,00	(3.435.000,00)	77,89
2.15.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	226.086.800,00	225.944.300,00	(142.500,00)	99,94
2.15.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	226.086.800,00	225.944.300,00	(142.500,00)	99,94
2.15.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.086.800,00	225.944.300,00	(142.500,00)	99,94
2.15.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.070.000,00	1.926.000,00	(144.000,00)	93,04
2.15.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.070.000,00	1.926.000,00	(144.000,00)	93,04
2.15.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.070.000,00	1.926.000,00	(144.000,00)	93,04
		JUMLAH BELANJA	**4.399.944.974,00**	**4.217.932.053,00**	**(182.012.921,00)**	**95,86**
		SURPLUS DEFISIT	**(4.132.944.974,00)**	**(3.958.432.053,00)**	**174.512.921,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**8.781.001.365,00**	**8.380.082.675,00**	**(400.918.690,00)**	**95,43**
2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.702.340.050,00	1.692.083.173,00	(10.256.877,00)	99,40
2.16.02.2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.702.340.050,00	1.692.083.173,00	(10.256.877,00)	99,40
2.16.02.2.01.0004		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	316.180.900,00	307.310.900,00	(8.870.000,00)	97,19
2.16.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	316.180.900,00	307.310.900,00	(8.870.000,00)	97,19
2.16.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.180.900,00	307.310.900,00	(8.870.000,00)	97,19
2.16.02.2.01.0005		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	62.014.900,00	60.703.018,00	(1.311.882,00)	97,88
2.16.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	62.014.900,00	60.703.018,00	(1.311.882,00)	97,88
2.16.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.014.900,00	60.703.018,00	(1.311.882,00)	97,88
2.16.02.2.01.0006		Pelayanan Informasi Publik	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100,00
2.16.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100,00
2.16.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100,00
2.16.02.2.01.0007		Layanan Hubungan Media	640.144.250,00	640.069.255,00	(74.995,00)	99,99
2.16.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	640.144.250,00	640.069.255,00	(74.995,00)	99,99
2.16.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	640.144.250,00	640.069.255,00	(74.995,00)	99,99
2.16.02.2.01.0010		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	444.000.000,00	444.000.000,00	0,00	100,00
2.16.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	444.000.000,00	444.000.000,00	0,00	100,00
2.16.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.000.000,00	444.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.682.619.416,00	3.605.216.625,00	(77.402.791,00)	97,90
2.16.03.2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.572.380.000,00	2.567.595.000,00	(4.785.000,00)	99,81
2.16.03.2.01.0003		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.572.380.000,00	2.567.595.000,00	(4.785.000,00)	99,81
2.16.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.520.780.000,00	2.520.095.000,00	(685.000,00)	99,97
2.16.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.520.780.000,00	2.520.095.000,00	(685.000,00)	99,97
2.16.03.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	51.600.000,00	47.500.000,00	(4.100.000,00)	92,05
2.16.03.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.600.000,00	47.500.000,00	(4.100.000,00)	92,05
2.16.03.2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.110.239.416,00	1.037.621.625,00	(72.617.791,00)	93,46
2.16.03.2.02.0003		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	183.477.500,00	168.763.625,00	(14.713.875,00)	91,98
2.16.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	175.477.500,00	163.176.115,00	(12.301.385,00)	92,99
2.16.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.477.500,00	163.176.115,00	(12.301.385,00)	92,99
2.16.03.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	8.000.000,00	5.587.510,00	(2.412.490,00)	69,84
2.16.03.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	4.440.000,00	(1.560.000,00)	74,00
2.16.03.2.02.0003	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.000.000,00	1.147.510,00	(852.490,00)	57,38
2.16.03.2.02.0007		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	500.010.116,00	463.574.000,00	(36.436.116,00)	92,71
2.16.03.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	500.010.116,00	463.574.000,00	(36.436.116,00)	92,71
2.16.03.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.010.116,00	463.574.000,00	(36.436.116,00)	92,71
2.16.03.2.02.0010		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	426.751.800,00	405.284.000,00	(21.467.800,00)	94,97
2.16.03.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	324.487.000,00	311.614.000,00	(12.873.000,00)	96,03
2.16.03.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.487.000,00	311.614.000,00	(12.873.000,00)	96,03
2.16.03.2.02.0010	5.2	BELANJA MODAL	102.264.800,00	93.670.000,00	(8.594.800,00)	91,60
2.16.03.2.02.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.264.800,00	93.670.000,00	(8.594.800,00)	91,60
2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.396.041.899,00	3.082.782.877,00	(313.259.022,00)	90,78
2.16.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.001.000,00	9.989.000,00	(12.000,00)	99,88
2.16.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.001.000,00	9.989.000,00	(12.000,00)	99,88
2.16.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.001.000,00	9.989.000,00	(12.000,00)	99,88
2.16.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.001.000,00	9.989.000,00	(12.000,00)	99,88
2.16.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.254.467.829,00	2.059.602.788,00	(194.865.041,00)	91,36

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.16.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.254.467.829,00	2.059.602.788,00	(194.865.041,00)	91,36
2.16.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.254.467.829,00	2.059.602.788,00	(194.865.041,00)	91,36
2.16.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.254.467.829,00	2.059.602.788,00	(194.865.041,00)	91,36
2.16.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	422.693.290,00	410.478.141,00	(12.215.149,00)	97,11
2.16.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.608.600,00	17.608.600,00	0,00	100,00
2.16.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.608.600,00	17.608.600,00	0,00	100,00
2.16.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.608.600,00	17.608.600,00	0,00	100,00
2.16.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.532.540,00	98.031.070,00	(2.501.470,00)	97,51
2.16.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	100.532.540,00	98.031.070,00	(2.501.470,00)	97,51
2.16.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.532.540,00	98.031.070,00	(2.501.470,00)	97,51
2.16.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.203.150,00	23.802.650,00	(400.500,00)	98,35
2.16.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	24.203.150,00	23.802.650,00	(400.500,00)	98,35
2.16.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.203.150,00	23.802.650,00	(400.500,00)	98,35
2.16.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.640.000,00	25.600.000,00	(5.040.000,00)	83,55
2.16.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	30.640.000,00	25.600.000,00	(5.040.000,00)	83,55
2.16.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.640.000,00	25.600.000,00	(5.040.000,00)	83,55
2.16.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.709.000,00	245.435.821,00	(4.273.179,00)	98,29
2.16.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	249.709.000,00	245.435.821,00	(4.273.179,00)	98,29
2.16.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.709.000,00	245.435.821,00	(4.273.179,00)	98,29
2.16.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	542.927.680,00	459.572.383,00	(83.355.297,00)	84,65
2.16.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000,00	76.471.981,00	(53.528.019,00)	58,82
2.16.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000,00	76.471.981,00	(53.528.019,00)	58,82
2.16.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	76.471.981,00	(53.528.019,00)	58,82
2.16.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.035.400,00	17.975.400,00	(60.000,00)	99,67
2.16.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	18.035.400,00	17.975.400,00	(60.000,00)	99,67
2.16.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.035.400,00	17.975.400,00	(60.000,00)	99,67
2.16.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	394.892.280,00	365.125.002,00	(29.767.278,00)	92,46
2.16.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	394.892.280,00	365.125.002,00	(29.767.278,00)	92,46
2.16.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	394.892.280,00	365.125.002,00	(29.767.278,00)	92,46
2.16.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.952.100,00	143.140.565,00	(22.811.535,00)	86,25
2.16.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	156.773.000,00	141.113.000,00	(15.660.000,00)	90,01

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.16.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	156.773.000,00	141.113.000,00	(15.660.000,00)	90,01
2.16.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.773.000,00	141.113.000,00	(15.660.000,00)	90,01
2.16.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.179.100,00	2.027.565,00	(7.151.535,00)	22,09
2.16.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.179.100,00	2.027.565,00	(7.151.535,00)	22,09
2.16.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.179.100,00	2.027.565,00	(7.151.535,00)	22,09
		JUMLAH BELANJA	**8.781.001.365,00**	**8.380.082.675,00**	**(400.918.690,00)**	**95,43**
		SURPLUS DEFISIT	**(8.781.001.365,00)**	**(8.380.082.675,00)**	**400.918.690,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**44.484.000,00**	**44.280.000,00**	**(204.000,00)**	**99,54**
2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	44.484.000,00	44.280.000,00	(204.000,00)	99,54
2.20.02.2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	44.484.000,00	44.280.000,00	(204.000,00)	99,54
2.20.02.2.01.0003		Membangun Metadata Statistik Sektoral	44.484.000,00	44.280.000,00	(204.000,00)	99,54
2.20.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	44.484.000,00	44.280.000,00	(204.000,00)	99,54
2.20.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.484.000,00	44.280.000,00	(204.000,00)	99,54
		JUMLAH BELANJA	**44.484.000,00**	**44.280.000,00**	**(204.000,00)**	**99,54**
		SURPLUS DEFISIT	**(44.484.000,00)**	**(44.280.000,00)**	**204.000,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**49.450.520,00**	**40.398.473,00**	**(9.052.047,00)**	**81,69**
2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	49.450.520,00	40.398.473,00	(9.052.047,00)	81,69
2.21.02.2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49.450.520,00	40.398.473,00	(9.052.047,00)	81,69
2.21.02.2.01.0001		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.895.000,00	20.751.531,00	(143.469,00)	99,31
2.21.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.895.000,00	20.751.531,00	(143.469,00)	99,31
2.21.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.895.000,00	20.751.531,00	(143.469,00)	99,31
2.21.02.2.01.0003		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	28.555.520,00	19.646.942,00	(8.908.578,00)	68,80
2.21.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	28.555.520,00	19.646.942,00	(8.908.578,00)	68,80
2.21.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.555.520,00	19.646.942,00	(8.908.578,00)	68,80
		JUMLAH BELANJA	**49.450.520,00**	**40.398.473,00**	**(9.052.047,00)**	**81,69**
		SURPLUS DEFISIT	**(49.450.520,00)**	**(40.398.473,00)**	**9.052.047,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	4	**PENDAPATAN DAERAH**	**500.000.000,00**	**531.257.750,00**	**31.257.750,00**	**106,25**
	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500.000.000,00	531.257.750,00	31.257.750,00	106,25
	4.1.02	Retribusi Daerah	500.000.000,00	531.257.750,00	31.257.750,00	106,25
		JUMLAH PENDAPATAN	**500.000.000,00**	**531.257.750,00**	**31.257.750,00**	**106,25**
	5	**BELANJA DAERAH**	**5.041.241.839,00**	**4.793.294.261,00**	**(247.947.578,00)**	**95,08**
2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	615.545.000,00	603.791.800,00	(11.753.200,00)	98,09
2.18.05.2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	615.545.000,00	603.791.800,00	(11.753.200,00)	98,09
2.18.05.2.01.0004		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	91.942.000,00	89.662.000,00	(2.280.000,00)	97,52
2.18.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	91.942.000,00	89.662.000,00	(2.280.000,00)	97,52
2.18.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.942.000,00	89.662.000,00	(2.280.000,00)	97,52
2.18.05.2.01.0005		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	337.124.000,00	333.919.800,00	(3.204.200,00)	99,05
2.18.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	337.124.000,00	333.919.800,00	(3.204.200,00)	99,05
2.18.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.124.000,00	333.919.800,00	(3.204.200,00)	99,05
2.18.05.2.01.0006		Pengawasan Penanaman Modal	186.479.000,00	180.210.000,00	(6.269.000,00)	96,64
2.18.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	186.479.000,00	180.210.000,00	(6.269.000,00)	96,64
2.18.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.479.000,00	180.210.000,00	(6.269.000,00)	96,64

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.425.696.839,00	4.189.502.461,00	(236.194.378,00)	94,66
2.18.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.479.219.697,00	3.280.510.382,00	(198.709.315,00)	94,29
2.18.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.479.219.697,00	3.280.510.382,00	(198.709.315,00)	94,29
2.18.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.479.219.697,00	3.280.510.382,00	(198.709.315,00)	94,29
2.18.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.479.219.697,00	3.280.510.382,00	(198.709.315,00)	94,29
2.18.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	581.714.400,00	572.884.158,00	(8.830.242,00)	98,48
2.18.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.015.400,00	5.015.400,00	0,00	100,00
2.18.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.015.400,00	5.015.400,00	0,00	100,00
2.18.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.015.400,00	5.015.400,00	0,00	100,00
2.18.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.829.000,00	123.829.000,00	0,00	100,00
2.18.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	123.829.000,00	123.829.000,00	0,00	100,00
2.18.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.829.000,00	123.829.000,00	0,00	100,00
2.18.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.481.000,00	45.481.000,00	0,00	100,00
2.18.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	45.481.000,00	45.481.000,00	0,00	100,00
2.18.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.481.000,00	45.481.000,00	0,00	100,00
2.18.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.840.000,00	5.700.000,00	(4.140.000,00)	57,93
2.18.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.840.000,00	5.700.000,00	(4.140.000,00)	57,93
2.18.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.840.000,00	5.700.000,00	(4.140.000,00)	57,93
2.18.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	397.549.000,00	392.858.758,00	(4.690.242,00)	98,82
2.18.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	397.549.000,00	392.858.758,00	(4.690.242,00)	98,82
2.18.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	397.549.000,00	392.858.758,00	(4.690.242,00)	98,82
2.18.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296.682.492,00	275.244.905,00	(21.437.587,00)	92,77
2.18.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	3.015.000,00	(985.000,00)	75,38
2.18.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.015.000,00	(985.000,00)	75,38
2.18.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.015.000,00	(985.000,00)	75,38
2.18.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.922.892,00	36.692.285,00	(19.230.607,00)	65,61
2.18.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	55.922.892,00	36.692.285,00	(19.230.607,00)	65,61
2.18.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.922.892,00	36.692.285,00	(19.230.607,00)	65,61
2.18.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.375.000,00	16.700.000,00	(675.000,00)	96,12
2.18.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	17.375.000,00	16.700.000,00	(675.000,00)	96,12
2.18.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.375.000,00	16.700.000,00	(675.000,00)	96,12
2.18.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	219.384.600,00	218.837.620,00	(546.980,00)	99,75
2.18.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	219.384.600,00	218.837.620,00	(546.980,00)	99,75

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.18.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.384.600,00	218.837.620,00	(546.980,00)	99,75
2.18.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.080.250,00	60.863.016,00	(7.217.234,00)	89,40
2.18.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.080.250,00	60.863.016,00	(7.217.234,00)	89,40
2.18.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	68.080.250,00	60.863.016,00	(7.217.234,00)	89,40
2.18.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.080.250,00	60.863.016,00	(7.217.234,00)	89,40
		JUMLAH BELANJA	**5.041.241.839,00**	**4.793.294.261,00**	**(247.947.578,00)**	**95,08**
		SURPLUS DEFISIT	**(4.541.241.839,00)**	**(4.262.036.511,00)**	**279.205.328,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**428.937.000,00**	**203.716.000,00**	**(225.221.000,00)**	**47,49**
2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	184.937.000,00	183.888.000,00	(1.049.000,00)	99,43
2.07.03.2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	184.937.000,00	183.888.000,00	(1.049.000,00)	99,43
2.07.03.2.01.0001		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	184.937.000,00	183.888.000,00	(1.049.000,00)	99,43
2.07.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	184.937.000,00	183.888.000,00	(1.049.000,00)	99,43
2.07.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.937.000,00	183.888.000,00	(1.049.000,00)	99,43
2.07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	244.000.000,00	19.828.000,00	(224.172.000,00)	8,13
2.07.05.2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	19.828.000,00	(172.000,00)	99,14
2.07.05.2.01.0003		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	20.000.000,00	19.828.000,00	(172.000,00)	99,14
2.07.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.828.000,00	(172.000,00)	99,14
2.07.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.828.000,00	(172.000,00)	99,14
2.07.05.2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	224.000.000,00	0,00	(224.000.000,00)	0,00
2.07.05.2.02.0005		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	224.000.000,00	0,00	(224.000.000,00)	0,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.07.05.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	224.000.000,00	0,00	(224.000.000,00)	0,00
2.07.05.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.000.000,00	0,00	(224.000.000,00)	0,00
		JUMLAH BELANJA	**428.937.000,00**	**203.716.000,00**	**(225.221.000,00)**	**47,49**
		SURPLUS DEFISIT	**(428.937.000,00)**	**(203.716.000,00)**	**225.221.000,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**3.370.981.312,00**	**3.029.693.088,00**	**(341.288.224,00)**	**89,88**
2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	272.222.250,00	269.033.147,00	(3.189.103,00)	98,83
2.23.02.2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	107.956.000,00	106.194.000,00	(1.762.000,00)	98,37
2.23.02.2.01.0001		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	19.994.000,00	19.809.000,00	(185.000,00)	99,07
2.23.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.494.000,00	12.359.000,00	(135.000,00)	98,92
2.23.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.494.000,00	12.359.000,00	(135.000,00)	98,92
2.23.02.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	7.500.000,00	7.450.000,00	(50.000,00)	99,33
2.23.02.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.450.000,00	(50.000,00)	99,33
2.23.02.2.01.0008		Pengembangan Bahan Pustaka	73.962.000,00	72.425.000,00	(1.537.000,00)	97,92
2.23.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	8.362.000,00	7.025.000,00	(1.337.000,00)	84,01
2.23.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.362.000,00	7.025.000,00	(1.337.000,00)	84,01
2.23.02.2.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	65.600.000,00	65.400.000,00	(200.000,00)	99,70
2.23.02.2.01.0008	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	65.600.000,00	65.400.000,00	(200.000,00)	99,70
2.23.02.2.01.0010		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.000.000,00	13.960.000,00	(40.000,00)	99,71
2.23.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	14.000.000,00	13.960.000,00	(40.000,00)	99,71
2.23.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	13.960.000,00	(40.000,00)	99,71
2.23.02.2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	164.266.250,00	162.839.147,00	(1.427.103,00)	99,13
2.23.02.2.02.0001		Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	21.020.000,00	20.960.000,00	(60.000,00)	99,71

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.23.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.020.000,00	20.960.000,00	(60.000,00)	99,71
2.23.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.020.000,00	20.960.000,00	(60.000,00)	99,71
2.23.02.2.02.0004		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	143.246.250,00	141.879.147,00	(1.367.103,00)	99,05
2.23.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	143.246.250,00	141.879.147,00	(1.367.103,00)	99,05
2.23.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.246.250,00	141.879.147,00	(1.367.103,00)	99,05
2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.098.759.062,00	2.760.659.941,00	(338.099.121,00)	89,09
2.23.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.270.487.722,00	2.021.417.843,00	(249.069.879,00)	89,03
2.23.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.270.487.722,00	2.021.417.843,00	(249.069.879,00)	89,03
2.23.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.270.487.722,00	2.021.417.843,00	(249.069.879,00)	89,03
2.23.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.270.487.722,00	2.021.417.843,00	(249.069.879,00)	89,03
2.23.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.213.400,00	231.877.383,00	(1.336.017,00)	99,43
2.23.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.990.400,00	8.720.400,00	(1.270.000,00)	87,29
2.23.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.990.400,00	8.720.400,00	(1.270.000,00)	87,29
2.23.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.990.400,00	8.720.400,00	(1.270.000,00)	87,29
2.23.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.031.500,00	69.031.500,00	0,00	100,00
2.23.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	69.031.500,00	69.031.500,00	0,00	100,00
2.23.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.031.500,00	69.031.500,00	0,00	100,00
2.23.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.134.000,00	25.133.750,00	(250,00)	100,00
2.23.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	25.134.000,00	25.133.750,00	(250,00)	100,00
2.23.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.134.000,00	25.133.750,00	(250,00)	100,00
2.23.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
2.23.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
2.23.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
2.23.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.057.500,00	119.991.733,00	(65.767,00)	99,95
2.23.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	120.057.500,00	119.991.733,00	(65.767,00)	99,95
2.23.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.057.500,00	119.991.733,00	(65.767,00)	99,95
2.23.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.160.000,00	28.110.000,00	(50.000,00)	99,82
2.23.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.160.000,00	28.110.000,00	(50.000,00)	99,82
2.23.01.2.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	100,00
2.23.01.2.07.0011	5.1.01	Belanja Pegawai	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	100,00
2.23.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.950.000,00	(50.000,00)	99,75

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.23.01.2.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.950.000,00	(50.000,00)	99,75
2.23.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	470.153.820,00	383.447.098,00	(86.706.722,00)	81,56
2.23.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.200.000,00	13.197.136,00	(84.002.864,00)	13,58
2.23.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	97.200.000,00	13.197.136,00	(84.002.864,00)	13,58
2.23.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.200.000,00	13.197.136,00	(84.002.864,00)	13,58
2.23.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	372.953.820,00	370.249.962,00	(2.703.858,00)	99,28
2.23.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	372.953.820,00	370.249.962,00	(2.703.858,00)	99,28
2.23.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.953.820,00	370.249.962,00	(2.703.858,00)	99,28
2.23.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.744.120,00	95.807.617,00	(936.503,00)	99,03
2.23.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.724.120,00	85.787.617,00	(936.503,00)	98,92
2.23.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	86.724.120,00	85.787.617,00	(936.503,00)	98,92
2.23.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.724.120,00	85.787.617,00	(936.503,00)	98,92
2.23.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.020.000,00	10.020.000,00	0,00	100,00
2.23.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	10.020.000,00	10.020.000,00	0,00	100,00
2.23.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.020.000,00	10.020.000,00	0,00	100,00
		JUMLAH BELANJA	**3.370.981.312,00**	**3.029.693.088,00**	**(341.288.224,00)**	**89,88**
		SURPLUS DEFISIT	**(3.370.981.312,00)**	**(3.029.693.088,00)**	**341.288.224,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**100.000.000,00**	**97.416.442,00**	**(2.583.558,00)**	**97,42**
2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	100.000.000,00	97.416.442,00	(2.583.558,00)	97,42
2.24.02.2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	17.886.000,00	(2.114.000,00)	89,43
2.24.02.2.02.0002		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	20.000.000,00	17.886.000,00	(2.114.000,00)	89,43
2.24.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	17.886.000,00	(2.114.000,00)	89,43
2.24.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	17.886.000,00	(2.114.000,00)	89,43
2.24.02.2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	80.000.000,00	79.530.442,00	(469.558,00)	99,41
2.24.02.2.03.0002		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000,00	79.530.442,00	(469.558,00)	99,41
2.24.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	79.530.442,00	(469.558,00)	99,41
2.24.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	79.530.442,00	(469.558,00)	99,41
		JUMLAH BELANJA	**100.000.000,00**	**97.416.442,00**	**(2.583.558,00)**	**97,42**
		SURPLUS DEFISIT	**(100.000.000,00)**	**(97.416.442,00)**	**2.583.558,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.000.000.000,00**	**689.007.000,00**	**(310.993.000,00)**	**68,90**
	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.000.000.000,00	689.007.000,00	(310.993.000,00)	68,90
	4.1.02	Retribusi Daerah	1.000.000.000,00	689.007.000,00	(310.993.000,00)	68,90
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.000.000.000,00**	**689.007.000,00**	**(310.993.000,00)**	**68,90**
	5	**BELANJA DAERAH**	**8.244.469.889,00**	**7.645.551.219,00**	**(598.918.670,00)**	**92,74**
2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	725.000.000,00	721.097.000,00	(3.903.000,00)	99,46
2.19.02.2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	100.000.000,00	96.097.000,00	(3.903.000,00)	96,10
2.19.02.2.01.0002		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	100.000.000,00	96.097.000,00	(3.903.000,00)	96,10
2.19.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	96.097.000,00	(3.903.000,00)	96,10
2.19.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	96.097.000,00	(3.903.000,00)	96,10
2.19.02.2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	625.000.000,00	625.000.000,00	0,00	100,00
2.19.02.2.02.0002		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	625.000.000,00	625.000.000,00	0,00	100,00
2.19.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	625.000.000,00	625.000.000,00	0,00	100,00
2.19.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
2.19.02.2.02.0002	5.1.05	Belanja Hibah	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.382.820.999,00	1.154.809.950,00	(228.011.049,00)	83,51
2.19.03.2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	455.778.499,00	291.490.450,00	(164.288.049,00)	63,95
2.19.03.2.01.0002		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	199.999.949,00	193.213.000,00	(6.786.949,00)	96,61
2.19.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	199.999.949,00	193.213.000,00	(6.786.949,00)	96,61
2.19.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.949,00	193.213.000,00	(6.786.949,00)	96,61
2.19.03.2.01.0003		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	255.778.550,00	98.277.450,00	(157.501.100,00)	38,42
2.19.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	117.078.550,00	98.277.450,00	(18.801.100,00)	83,94
2.19.03.2.01.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	2.050.000,00	0,00	(2.050.000,00)	0,00
2.19.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.028.550,00	98.277.450,00	(16.751.100,00)	85,44
2.19.03.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	138.700.000,00	0,00	(138.700.000,00)	0,00
2.19.03.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.500.000,00	0,00	(37.500.000,00)	0,00
2.19.03.2.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	101.200.000,00	0,00	(101.200.000,00)	0,00
2.19.03.2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	539.542.500,00	493.319.500,00	(46.223.000,00)	91,43
2.19.03.2.02.0001		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	390.000.000,00	355.140.000,00	(34.860.000,00)	91,06
2.19.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	390.000.000,00	355.140.000,00	(34.860.000,00)	91,06
2.19.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.000.000,00	355.140.000,00	(34.860.000,00)	91,06
2.19.03.2.02.0002		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	50.000.000,00	47.021.000,00	(2.979.000,00)	94,04
2.19.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	47.021.000,00	(2.979.000,00)	94,04
2.19.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	47.021.000,00	(2.979.000,00)	94,04
2.19.03.2.02.0003		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	99.542.500,00	91.158.500,00	(8.384.000,00)	91,58
2.19.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	99.542.500,00	91.158.500,00	(8.384.000,00)	91,58
2.19.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.542.500,00	91.158.500,00	(8.384.000,00)	91,58
2.19.03.2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	387.500.000,00	370.000.000,00	(17.500.000,00)	95,48
2.19.03.2.04.0002		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00
2.19.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00
2.19.03.2.04.0002	5.1.05	Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00
2.19.03.2.04.0004		Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	87.500.000,00	70.000.000,00	(17.500.000,00)	80,00
2.19.03.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	87.500.000,00	70.000.000,00	(17.500.000,00)	80,00
2.19.03.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.500.000,00	70.000.000,00	(17.500.000,00)	80,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.19.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.136.648.890,00	5.769.644.269,00	(367.004.621,00)	94,02
2.19.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00
2.19.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00
2.19.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00
2.19.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00
2.19.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00
2.19.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00
2.19.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00
2.19.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.745.332.745,00	3.535.002.243,00	(210.330.502,00)	94,38
2.19.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.745.332.745,00	3.535.002.243,00	(210.330.502,00)	94,38
2.19.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.745.332.745,00	3.535.002.243,00	(210.330.502,00)	94,38
2.19.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.745.332.745,00	3.535.002.243,00	(210.330.502,00)	94,38
2.19.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	704.245.750,00	631.277.366,00	(72.968.384,00)	89,64
2.19.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
2.19.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
2.19.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
2.19.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.127.800,00	90.122.800,00	(5.000,00)	99,99
2.19.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	90.127.800,00	90.122.800,00	(5.000,00)	99,99
2.19.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.127.800,00	90.122.800,00	(5.000,00)	99,99
2.19.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.001.950,00	29.001.849,00	(101,00)	100,00
2.19.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	29.001.950,00	29.001.849,00	(101,00)	100,00
2.19.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.001.950,00	29.001.849,00	(101,00)	100,00
2.19.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.200.000,00	9.910.000,00	(15.290.000,00)	39,33
2.19.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	25.200.000,00	9.910.000,00	(15.290.000,00)	39,33
2.19.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	9.910.000,00	(15.290.000,00)	39,33
2.19.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	544.916.000,00	487.242.717,00	(57.673.283,00)	89,42
2.19.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	544.916.000,00	487.242.717,00	(57.673.283,00)	89,42
2.19.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	544.916.000,00	487.242.717,00	(57.673.283,00)	89,42
2.19.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.165.000,00	31.140.000,00	(25.000,00)	99,92
2.19.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.165.000,00	31.140.000,00	(25.000,00)	99,92
2.19.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	31.165.000,00	31.140.000,00	(25.000,00)	99,92
2.19.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.165.000,00	31.140.000,00	(25.000,00)	99,92
2.19.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.474.370.370,00	1.425.308.147,00	(49.062.223,00)	96,67

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.19.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169.032.000,00	141.203.709,00	(27.828.291,00)	83,54
2.19.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	169.032.000,00	141.203.709,00	(27.828.291,00)	83,54
2.19.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.032.000,00	141.203.709,00	(27.828.291,00)	83,54
2.19.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.305.338.370,00	1.284.104.438,00	(21.233.932,00)	98,37
2.19.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.305.338.370,00	1.284.104.438,00	(21.233.932,00)	98,37
2.19.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.305.338.370,00	1.284.104.438,00	(21.233.932,00)	98,37
2.19.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.535.025,00	123.916.513,00	(34.618.512,00)	78,16
2.19.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.940.000,00	40.216.000,00	(31.724.000,00)	55,90
2.19.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	71.940.000,00	40.216.000,00	(31.724.000,00)	55,90
2.19.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.940.000,00	40.216.000,00	(31.724.000,00)	55,90
2.19.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.205.200,00	2.310.688,00	(2.894.512,00)	44,39
2.19.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.205.200,00	2.310.688,00	(2.894.512,00)	44,39
2.19.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.205.200,00	2.310.688,00	(2.894.512,00)	44,39
2.19.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.520.000,00	8.520.000,00	0,00	100,00
2.19.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.520.000,00	8.520.000,00	0,00	100,00
2.19.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.520.000,00	8.520.000,00	0,00	100,00
2.19.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	72.869.825,00	72.869.825,00	0,00	100,00
2.19.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	72.869.825,00	72.869.825,00	0,00	100,00
2.19.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.869.825,00	72.869.825,00	0,00	100,00
		JUMLAH BELANJA	**8.244.469.889,00**	**7.645.551.219,00**	**(598.918.670,00)**	**92,74**
		SURPLUS DEFISIT	**(7.244.469.889,00)**	**(6.956.544.219,00)**	**287.925.670,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**1.681.998.700,00**	**1.277.241.300,00**	**(404.757.400,00)**	**75,94**
2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.201.999.400,00	966.188.300,00	(235.811.100,00)	80,38
2.22.02.2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.001.997.400,00	766.676.300,00	(235.321.100,00)	76,51
2.22.02.2.01.0001		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.001.997.400,00	766.676.300,00	(235.321.100,00)	76,51
2.22.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.001.997.400,00	766.676.300,00	(235.321.100,00)	76,51
2.22.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.001.997.400,00	766.676.300,00	(235.321.100,00)	76,51
2.22.02.2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.002.000,00	99.512.000,00	(490.000,00)	99,51
2.22.02.2.02.0003		Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	100.002.000,00	99.512.000,00	(490.000,00)	99,51
2.22.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	100.002.000,00	99.512.000,00	(490.000,00)	99,51
2.22.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.002.000,00	99.512.000,00	(490.000,00)	99,51
2.22.02.2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
2.22.02.2.03.0001		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
2.22.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.22.02.2.03.0001	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	479.999.300,00	311.053.000,00	(168.946.300,00)	64,80
2.22.05.2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100.000.000,00	70.640.000,00	(29.360.000,00)	70,64
2.22.05.2.01.0001		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	100.000.000,00	70.640.000,00	(29.360.000,00)	70,64
2.22.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	70.640.000,00	(29.360.000,00)	70,64
2.22.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	70.640.000,00	(29.360.000,00)	70,64
2.22.05.2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	379.999.300,00	240.413.000,00	(139.586.300,00)	63,27
2.22.05.2.02.0001		Pelindungan Cagar Budaya	80.000.000,00	77.652.000,00	(2.348.000,00)	97,07
2.22.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	37.000.000,00	34.702.000,00	(2.298.000,00)	93,79
2.22.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	34.702.000,00	(2.298.000,00)	93,79
2.22.05.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	43.000.000,00	42.950.000,00	(50.000,00)	99,88
2.22.05.2.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.000.000,00	42.950.000,00	(50.000,00)	99,88
2.22.05.2.02.0002		Pengembangan Cagar Budaya	299.999.300,00	162.761.000,00	(137.238.300,00)	54,25
2.22.05.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	165.512.300,00	162.761.000,00	(2.751.300,00)	98,34
2.22.05.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00
2.22.05.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.412.300,00	159.661.000,00	(2.751.300,00)	98,31
2.22.05.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	134.487.000,00	0,00	(134.487.000,00)	0,00
2.22.05.2.02.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	134.487.000,00	0,00	(134.487.000,00)	0,00
		JUMLAH BELANJA	**1.681.998.700,00**	**1.277.241.300,00**	**(404.757.400,00)**	**75,94**
		SURPLUS DEFISIT	**(1.681.998.700,00)**	**(1.277.241.300,00)**	**404.757.400,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**10.835.280.134,00**	**7.941.109.018,00**	**(2.894.171.116,00)**	**73,29**
3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.685.403.134,00	2.213.518.984,00	(2.471.884.150,00)	47,24
3.26.02.2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	614.345.000,00	506.992.500,00	(107.352.500,00)	82,53
3.26.02.2.01.0009		Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	614.345.000,00	506.992.500,00	(107.352.500,00)	82,53
3.26.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	614.345.000,00	506.992.500,00	(107.352.500,00)	82,53
3.26.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	614.345.000,00	506.992.500,00	(107.352.500,00)	82,53
3.26.02.2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4.071.058.134,00	1.706.526.484,00	(2.364.531.650,00)	41,92
3.26.02.2.03.0003		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	400.000.000,00	386.274.600,00	(13.725.400,00)	96,57
3.26.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	389.000.000,00	386.274.600,00	(2.725.400,00)	99,30
3.26.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	389.000.000,00	386.274.600,00	(2.725.400,00)	99,30
3.26.02.2.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	0,00
3.26.02.2.03.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	0,00
3.26.02.2.03.0004		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.501.058.134,00	1.155.320.384,00	(2.345.737.750,00)	33,00
3.26.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	173.484.250,00	80.608.850,00	(92.875.400,00)	46,46
3.26.02.2.03.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	1.210.000,00	0,00	(1.210.000,00)	0,00
3.26.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.274.250,00	80.608.850,00	(91.665.400,00)	46,79
3.26.02.2.03.0004	5.2	BELANJA MODAL	3.327.573.884,00	1.074.711.534,00	(2.252.862.350,00)	32,30
3.26.02.2.03.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.000.000,00	31.125.000,00	(93.875.000,00)	24,90

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
3.26.02.2.03.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.901.427.284,00	1.043.586.534,00	(1.857.840.750,00)	35,97
3.26.02.2.03.0004	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	151.146.600,00	0,00	(151.146.600,00)	0,00
3.26.02.2.03.0004	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	0,00
3.26.02.2.03.0006		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	170.000.000,00	164.931.500,00	(5.068.500,00)	97,02
3.26.02.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	170.000.000,00	164.931.500,00	(5.068.500,00)	97,02
3.26.02.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	164.931.500,00	(5.068.500,00)	97,02
3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.496.000.000,00	4.269.007.334,00	(226.992.666,00)	94,95
3.26.03.2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4.496.000.000,00	4.269.007.334,00	(226.992.666,00)	94,95
3.26.03.2.01.0006		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	4.246.000.000,00	4.232.328.334,00	(13.671.666,00)	99,68
3.26.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.246.000.000,00	4.232.328.334,00	(13.671.666,00)	99,68
3.26.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	236.328.334,00	(13.671.666,00)	94,53
3.26.03.2.01.0006	5.1.05	Belanja Hibah	3.996.000.000,00	3.996.000.000,00	0,00	100,00
3.26.03.2.01.0007		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	250.000.000,00	36.679.000,00	(213.321.000,00)	14,67
3.26.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	36.679.000,00	(13.321.000,00)	73,36
3.26.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	36.679.000,00	(13.321.000,00)	73,36
3.26.03.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
3.26.03.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.653.877.000,00	1.458.582.700,00	(195.294.300,00)	88,19
3.26.05.2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.553.877.000,00	1.368.130.700,00	(185.746.300,00)	88,05
3.26.05.2.01.0005		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	350.000.000,00	313.066.950,00	(36.933.050,00)	89,45
3.26.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	313.066.950,00	(36.933.050,00)	89,45
3.26.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	313.066.950,00	(36.933.050,00)	89,45
3.26.05.2.01.0008		Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	857.210.000,00	792.598.500,00	(64.611.500,00)	92,46
3.26.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	857.210.000,00	792.598.500,00	(64.611.500,00)	92,46
3.26.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	857.210.000,00	792.598.500,00	(64.611.500,00)	92,46
3.26.05.2.01.0009		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	346.667.000,00	262.465.250,00	(84.201.750,00)	75,71

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
3.26.05.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	346.667.000,00	262.465.250,00	(84.201.750,00)	75,71
3.26.05.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.667.000,00	262.465.250,00	(84.201.750,00)	75,71
3.26.05.2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100.000.000,00	90.452.000,00	(9.548.000,00)	90,45
3.26.05.2.02.0001		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	100.000.000,00	90.452.000,00	(9.548.000,00)	90,45
3.26.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	90.452.000,00	(9.548.000,00)	90,45
3.26.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	90.452.000,00	(9.548.000,00)	90,45
		JUMLAH BELANJA	**10.835.280.134,00**	**7.941.109.018,00**	**(2.894.171.116,00)**	**73,29**
		SURPLUS DEFISIT	**(10.835.280.134,00)**	**(7.941.109.018,00)**	**2.894.171.116,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	4	**PENDAPATAN DAERAH**	**140.000.000,00**	**30.695.375,00**	**(109.304.625,00)**	**21,93**
	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	140.000.000,00	30.695.375,00	(109.304.625,00)	21,93
	4.1.02	Retribusi Daerah	140.000.000,00	30.695.375,00	(109.304.625,00)	21,93
		JUMLAH PENDAPATAN	**140.000.000,00**	**30.695.375,00**	**(109.304.625,00)**	**21,93**
	5	**BELANJA DAERAH**	**15.616.216.096,00**	**14.703.752.241,00**	**(912.463.855,00)**	**94,16**
2.09.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.616.216.096,00	14.703.752.241,00	(912.463.855,00)	94,16
2.09.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.425.593.950,00	11.602.648.032,00	(822.945.918,00)	93,38
2.09.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.425.593.950,00	11.602.648.032,00	(822.945.918,00)	93,38
2.09.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.425.593.950,00	11.602.648.032,00	(822.945.918,00)	93,38
2.09.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	12.425.593.950,00	11.602.648.032,00	(822.945.918,00)	93,38
2.09.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	492.914.000,00	492.277.630,00	(636.370,00)	99,87
2.09.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.953.600,00	16.951.200,00	(2.400,00)	99,99
2.09.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.953.600,00	16.951.200,00	(2.400,00)	99,99
2.09.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.953.600,00	16.951.200,00	(2.400,00)	99,99
2.09.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.383.400,00	40.383.400,00	0,00	100,00
2.09.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	40.383.400,00	40.383.400,00	0,00	100,00
2.09.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.383.400,00	40.383.400,00	0,00	100,00
2.09.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.325.000,00	41.325.000,00	0,00	100,00
2.09.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	41.325.000,00	41.325.000,00	0,00	100,00
2.09.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.325.000,00	41.325.000,00	0,00	100,00
2.09.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.900.000,00	18.840.000,00	(60.000,00)	99,68

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.09.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	18.900.000,00	18.840.000,00	(60.000,00)	99,68
2.09.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	18.840.000,00	(60.000,00)	99,68
2.09.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375.352.000,00	374.778.030,00	(573.970,00)	99,85
2.09.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	375.352.000,00	374.778.030,00	(573.970,00)	99,85
2.09.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.352.000,00	374.778.030,00	(573.970,00)	99,85
2.09.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.404.843.058,00	2.348.624.751,00	(56.218.307,00)	97,66
2.09.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.440.000,00	67.272.758,00	(47.167.242,00)	58,78
2.09.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	114.440.000,00	67.272.758,00	(47.167.242,00)	58,78
2.09.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.440.000,00	67.272.758,00	(47.167.242,00)	58,78
2.09.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.290.403.058,00	2.281.351.993,00	(9.051.065,00)	99,60
2.09.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.290.403.058,00	2.281.351.993,00	(9.051.065,00)	99,60
2.09.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.290.403.058,00	2.281.351.993,00	(9.051.065,00)	99,60
2.09.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292.865.088,00	260.201.828,00	(32.663.260,00)	88,85
2.09.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	241.320.430,00	236.549.840,00	(4.770.590,00)	98,02
2.09.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	241.320.430,00	236.549.840,00	(4.770.590,00)	98,02
2.09.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.320.430,00	236.549.840,00	(4.770.590,00)	98,02
2.09.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.024.658,00	6.251.988,00	(27.772.670,00)	18,37
2.09.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.024.658,00	6.251.988,00	(27.772.670,00)	18,37
2.09.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.024.658,00	6.251.988,00	(27.772.670,00)	18,37
2.09.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.520.000,00	17.400.000,00	(120.000,00)	99,32
2.09.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	17.520.000,00	17.400.000,00	(120.000,00)	99,32
2.09.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.520.000,00	17.400.000,00	(120.000,00)	99,32
		JUMLAH BELANJA	**15.616.216.096,00**	**14.703.752.241,00**	**(912.463.855,00)**	**94,16**
		SURPLUS DEFISIT	**(15.476.216.096,00)**	**(14.673.056.866,00)**	**803.159.230,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN MAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**7.670.940.954,00**	**6.958.493.720,00**	**(712.447.234,00)**	**90,71**
3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	670.712.000,00	645.582.400,00	(25.129.600,00)	96,25
3.27.02.2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	670.712.000,00	645.582.400,00	(25.129.600,00)	96,25
3.27.02.2.01.0001		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	455.000.000,00	437.235.000,00	(17.765.000,00)	96,10
3.27.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	455.000.000,00	437.235.000,00	(17.765.000,00)	96,10
3.27.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	455.000.000,00	437.235.000,00	(17.765.000,00)	96,10
3.27.02.2.01.0002		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	215.712.000,00	208.347.400,00	(7.364.600,00)	96,59
3.27.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	215.712.000,00	208.347.400,00	(7.364.600,00)	96,59
3.27.02.2.01.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00
3.27.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.512.000,00	202.147.400,00	(7.364.600,00)	96,48
3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	6.632.076.954,00	5.948.776.320,00	(683.300.634,00)	89,70
3.27.03.2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	865.171.000,00	196.165.000,00	(669.006.000,00)	22,67
3.27.03.2.01.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	865.171.000,00	196.165.000,00	(669.006.000,00)	22,67
3.27.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	865.171.000,00	196.165.000,00	(669.006.000,00)	22,67
3.27.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	865.171.000,00	196.165.000,00	(669.006.000,00)	22,67
3.27.03.2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	5.766.905.954,00	5.752.611.320,00	(14.294.634,00)	99,75
3.27.03.2.02.0003		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	4.165.964.022,00	4.158.643.820,00	(7.320.202,00)	99,82
3.27.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.845.518.820,00	2.839.393.820,00	(6.125.000,00)	99,78

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
3.27.03.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	100,00
3.27.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.839.788.820,00	2.833.663.820,00	(6.125.000,00)	99,78
3.27.03.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	1.320.445.202,00	1.319.250.000,00	(1.195.202,00)	99,91
3.27.03.2.02.0003	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.320.445.202,00	1.319.250.000,00	(1.195.202,00)	99,91
3.27.03.2.02.0010		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.600.941.932,00	1.593.967.500,00	(6.974.432,00)	99,56
3.27.03.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	180.972.500,00	175.627.500,00	(5.345.000,00)	97,05
3.27.03.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.972.500,00	175.627.500,00	(5.345.000,00)	97,05
3.27.03.2.02.0010	5.2	BELANJA MODAL	1.419.969.432,00	1.418.340.000,00	(1.629.432,00)	99,89
3.27.03.2.02.0010	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.419.969.432,00	1.418.340.000,00	(1.629.432,00)	99,89
3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	54.592.000,00	54.465.000,00	(127.000,00)	99,77
3.27.04.2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	54.592.000,00	54.465.000,00	(127.000,00)	99,77
3.27.04.2.01.0006		Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	54.592.000,00	54.465.000,00	(127.000,00)	99,77
3.27.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	54.592.000,00	54.465.000,00	(127.000,00)	99,77
3.27.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.592.000,00	54.465.000,00	(127.000,00)	99,77
3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	313.560.000,00	309.670.000,00	(3.890.000,00)	98,76
3.27.07.2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	313.560.000,00	309.670.000,00	(3.890.000,00)	98,76
3.27.07.2.01.0001		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	313.560.000,00	309.670.000,00	(3.890.000,00)	98,76
3.27.07.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	313.560.000,00	309.670.000,00	(3.890.000,00)	98,76
3.27.07.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	313.560.000,00	309.670.000,00	(3.890.000,00)	98,76
		JUMLAH BELANJA	**7.670.940.954,00**	**6.958.493.720,00**	**(712.447.234,00)**	**90,71**
		SURPLUS DEFISIT	**(7.670.940.954,00)**	**(6.958.493.720,00)**	**712.447.234,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**567.438.900,00**	**78.512.400,00**	**(488.926.500,00)**	**13,84**
3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	567.438.900,00	78.512.400,00	(488.926.500,00)	13,84
3.25.04.2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	480.240.000,00	0,00	(480.240.000,00)	0,00
3.25.04.2.02.0001		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	480.240.000,00	0,00	(480.240.000,00)	0,00
3.25.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	480.240.000,00	0,00	(480.240.000,00)	0,00
3.25.04.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0,00
3.25.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	476.740.000,00	0,00	(476.740.000,00)	0,00
3.25.04.2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	87.198.900,00	78.512.400,00	(8.686.500,00)	90,04
3.25.04.2.04.0003		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	87.198.900,00	78.512.400,00	(8.686.500,00)	90,04
3.25.04.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	87.198.900,00	78.512.400,00	(8.686.500,00)	90,04
3.25.04.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.198.900,00	78.512.400,00	(8.686.500,00)	90,04
		JUMLAH BELANJA	**567.438.900,00**	**78.512.400,00**	**(488.926.500,00)**	**13,84**
		SURPLUS DEFISIT	**(567.438.900,00)**	**(78.512.400,00)**	**488.926.500,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**8.172.748.871,00**	**5.529.333.928,00**	**(2.643.414.943,00)**	**67,66**
3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	4.715.437.324,00	2.283.932.209,00	(2.431.505.115,00)	48,44
3.31.02.2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	4.715.437.324,00	2.283.932.209,00	(2.431.505.115,00)	48,44
3.31.02.2.01.0003		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	61.900.000,00	56.814.000,00	(5.086.000,00)	91,78
3.31.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	61.900.000,00	56.814.000,00	(5.086.000,00)	91,78
3.31.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.900.000,00	56.814.000,00	(5.086.000,00)	91,78
3.31.02.2.01.0005		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4.653.537.324,00	2.227.118.209,00	(2.426.419.115,00)	47,86
3.31.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.507.001.850,00	1.181.382.735,00	(2.325.619.115,00)	33,69
3.31.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.507.001.850,00	1.181.382.735,00	(2.325.619.115,00)	33,69
3.31.02.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	1.146.535.474,00	1.045.735.474,00	(100.800.000,00)	91,21
3.31.02.2.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.600.000,00	0,00	(24.600.000,00)	0,00
3.31.02.2.01.0005	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.121.935.474,00	1.045.735.474,00	(76.200.000,00)	93,21
3.31.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.457.311.547,00	3.245.401.719,00	(211.909.828,00)	93,87
3.31.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.276.551.947,00	3.089.854.119,00	(186.697.828,00)	94,30
3.31.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.276.551.947,00	3.089.854.119,00	(186.697.828,00)	94,30
3.31.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.276.551.947,00	3.089.854.119,00	(186.697.828,00)	94,30

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
3.31.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.276.551.947,00	3.089.854.119,00	(186.697.828,00)	94,30
3.31.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.759.600,00	155.547.600,00	(25.212.000,00)	86,05
3.31.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.329.600,00	10.329.600,00	0,00	100,00
3.31.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.329.600,00	10.329.600,00	0,00	100,00
3.31.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.329.600,00	10.329.600,00	0,00	100,00
3.31.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.430.000,00	145.218.000,00	(25.212.000,00)	85,21
3.31.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	170.430.000,00	145.218.000,00	(25.212.000,00)	85,21
3.31.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.430.000,00	145.218.000,00	(25.212.000,00)	85,21
		JUMLAH BELANJA	**8.172.748.871,00**	**5.529.333.928,00**	**(2.643.414.943,00)**	**67,66**
		SURPLUS DEFISIT	**(8.172.748.871,00)**	**(5.529.333.928,00)**	**2.643.414.943,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Organisasi : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**590.288.108,00**	**496.033.277,00**	**(94.254.831,00)**	**84,03**
3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	292.060.000,00	288.985.656,00	(3.074.344,00)	98,95
3.30.04.2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	292.060.000,00	288.985.656,00	(3.074.344,00)	98,95
3.30.04.2.02.0002		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	243.970.000,00	243.445.656,00	(524.344,00)	99,79
3.30.04.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	73.444.000,00	73.145.656,00	(298.344,00)	99,59
3.30.04.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	100,00
3.30.04.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.604.000,00	68.305.656,00	(298.344,00)	99,57
3.30.04.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	170.526.000,00	170.300.000,00	(226.000,00)	99,87
3.30.04.2.02.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	170.526.000,00	170.300.000,00	(226.000,00)	99,87
3.30.04.2.02.0003		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	48.090.000,00	45.540.000,00	(2.550.000,00)	94,70
3.30.04.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	48.090.000,00	45.540.000,00	(2.550.000,00)	94,70
3.30.04.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.090.000,00	45.540.000,00	(2.550.000,00)	94,70
3.30.05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	160.372.108,00	73.335.690,00	(87.036.418,00)	45,73
3.30.05.2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	160.372.108,00	73.335.690,00	(87.036.418,00)	45,73

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
3.30.05.2.01.0002		Pameran Dagang Nasional	150.072.108,00	63.035.690,00	(87.036.418,00)	42,00
3.30.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	150.072.108,00	63.035.690,00	(87.036.418,00)	42,00
3.30.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.072.108,00	63.035.690,00	(87.036.418,00)	42,00
3.30.05.2.01.0003		Pameran Dagang Lokal	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	100,00
3.30.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	100,00
3.30.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	100,00
3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	30.000.000,00	27.335.331,00	(2.664.669,00)	91,12
3.30.06.2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	30.000.000,00	27.335.331,00	(2.664.669,00)	91,12
3.30.06.2.01.0001		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	22.468.400,00	20.244.731,00	(2.223.669,00)	90,10
3.30.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.468.400,00	20.244.731,00	(2.223.669,00)	90,10
3.30.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.468.400,00	20.244.731,00	(2.223.669,00)	90,10
3.30.06.2.01.0002		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	7.531.600,00	7.090.600,00	(441.000,00)	94,14
3.30.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.531.600,00	7.090.600,00	(441.000,00)	94,14
3.30.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.531.600,00	7.090.600,00	(441.000,00)	94,14
3.30.07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	107.856.000,00	106.376.600,00	(1.479.400,00)	98,63
3.30.07.2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	107.856.000,00	106.376.600,00	(1.479.400,00)	98,63
3.30.07.2.01.0006		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	107.856.000,00	106.376.600,00	(1.479.400,00)	98,63
3.30.07.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	107.856.000,00	106.376.600,00	(1.479.400,00)	98,63
3.30.07.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.856.000,00	106.376.600,00	(1.479.400,00)	98,63
		JUMLAH BELANJA	**590.288.108,00**	**496.033.277,00**	**(94.254.831,00)**	**84,03**
		SURPLUS DEFISIT	**(590.288.108,00)**	**(496.033.277,00)**	**94.254.831,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**1.927.372.559,00**	**1.300.215.628,00**	**(627.156.931,00)**	**67,46**
2.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	56.754.250,00	48.985.948,00	(7.768.302,00)	86,31
2.17.03.2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	56.754.250,00	48.985.948,00	(7.768.302,00)	86,31
2.17.03.2.01.0004		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	56.754.250,00	48.985.948,00	(7.768.302,00)	86,31
2.17.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	56.754.250,00	48.985.948,00	(7.768.302,00)	86,31
2.17.03.2.01.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	8.460.000,00	7.260.000,00	(1.200.000,00)	85,82
2.17.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.294.250,00	41.725.948,00	(6.568.302,00)	86,40
2.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	206.705.750,00	177.360.750,00	(29.345.000,00)	85,80
2.17.05.2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	206.705.750,00	177.360.750,00	(29.345.000,00)	85,80
2.17.05.2.01.0001		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	206.705.750,00	177.360.750,00	(29.345.000,00)	85,80
2.17.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	206.705.750,00	177.360.750,00	(29.345.000,00)	85,80
2.17.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.705.750,00	177.360.750,00	(29.345.000,00)	85,80
2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	595.463.250,00	493.870.681,00	(101.592.569,00)	82,94

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.17.07.2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	595.463.250,00	493.870.681,00	(101.592.569,00)	82,94
2.17.07.2.01.0002		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	126.319.250,00	124.298.850,00	(2.020.400,00)	98,40
2.17.07.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	126.319.250,00	124.298.850,00	(2.020.400,00)	98,40
2.17.07.2.01.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	6.440.000,00	6.440.000,00	0,00	100,00
2.17.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.879.250,00	117.858.850,00	(2.020.400,00)	98,31
2.17.07.2.01.0004		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	155.005.000,00	135.416.932,00	(19.588.068,00)	87,36
2.17.07.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	155.005.000,00	135.416.932,00	(19.588.068,00)	87,36
2.17.07.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.005.000,00	135.416.932,00	(19.588.068,00)	87,36
2.17.07.2.01.0015		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	314.139.000,00	234.154.899,00	(79.984.101,00)	74,54
2.17.07.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	314.139.000,00	234.154.899,00	(79.984.101,00)	74,54
2.17.07.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.139.000,00	234.154.899,00	(79.984.101,00)	74,54
2.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	437.500.000,00	0,00	(437.500.000,00)	0,00
2.17.08.2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	437.500.000,00	0,00	(437.500.000,00)	0,00
2.17.08.2.01.0005		Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	437.500.000,00	0,00	(437.500.000,00)	0,00
2.17.08.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	437.500.000,00	0,00	(437.500.000,00)	0,00
2.17.08.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	437.500.000,00	0,00	(437.500.000,00)	0,00
2.17.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	630.949.309,00	579.998.249,00	(50.951.060,00)	91,92
2.17.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.683.120,00	84.073.120,00	(2.610.000,00)	96,99
2.17.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	76.873.120,00	76.243.120,00	(630.000,00)	99,18
2.17.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	76.873.120,00	76.243.120,00	(630.000,00)	99,18
2.17.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.873.120,00	76.243.120,00	(630.000,00)	99,18
2.17.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.810.000,00	7.830.000,00	(1.980.000,00)	79,82
2.17.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.810.000,00	7.830.000,00	(1.980.000,00)	79,82
2.17.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.810.000,00	7.830.000,00	(1.980.000,00)	79,82
2.17.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	417.904.991,00	401.325.549,00	(16.579.442,00)	96,03
2.17.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.114.425,00	55.773.014,00	(11.341.411,00)	83,10
2.17.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	67.114.425,00	55.773.014,00	(11.341.411,00)	83,10

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.17.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.114.425,00	55.773.014,00	(11.341.411,00)	83,10
2.17.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	350.790.566,00	345.552.535,00	(5.238.031,00)	98,51
2.17.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	350.790.566,00	345.552.535,00	(5.238.031,00)	98,51
2.17.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.790.566,00	345.552.535,00	(5.238.031,00)	98,51
2.17.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.361.198,00	94.599.580,00	(31.761.618,00)	74,86
2.17.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126.361.198,00	94.599.580,00	(31.761.618,00)	74,86
2.17.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	126.361.198,00	94.599.580,00	(31.761.618,00)	74,86
2.17.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.361.198,00	94.599.580,00	(31.761.618,00)	74,86
		JUMLAH BELANJA	**1.927.372.559,00**	**1.300.215.628,00**	**(627.156.931,00)**	**67,46**
		SURPLUS DEFISIT	**(1.927.372.559,00)**	**(1.300.215.628,00)**	**627.156.931,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Sekretariat Daerah

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	4	**PENDAPATAN DAERAH**	**15.000.000,00**	**9.000.000,00**	**(6.000.000,00)**	**60,00**
	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.000.000,00	9.000.000,00	(6.000.000,00)	60,00
	4.1.02	Retribusi Daerah	15.000.000,00	9.000.000,00	(6.000.000,00)	60,00
		JUMLAH PENDAPATAN	**15.000.000,00**	**9.000.000,00**	**(6.000.000,00)**	**60,00**
	5	**BELANJA DAERAH**	**41.280.251.252,00**	**36.511.751.594,00**	**(4.768.499.658,00)**	**88,45**
4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.380.115.350,00	3.020.159.507,00	(359.955.843,00)	89,35
4.01.02.2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	1.461.659.000,00	1.303.401.458,00	(158.257.542,00)	89,17
4.01.02.2.01.0001		Penataan Administrasi Pemerintahan	522.594.600,00	482.849.500,00	(39.745.100,00)	92,39
4.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	522.594.600,00	482.849.500,00	(39.745.100,00)	92,39
4.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	522.594.600,00	482.849.500,00	(39.745.100,00)	92,39
4.01.02.2.01.0002		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	532.016.800,00	460.353.858,00	(71.662.942,00)	86,53
4.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	532.016.800,00	460.353.858,00	(71.662.942,00)	86,53
4.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	532.016.800,00	460.353.858,00	(71.662.942,00)	86,53
4.01.02.2.01.0003		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	407.047.600,00	360.198.100,00	(46.849.500,00)	88,49
4.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	407.047.600,00	360.198.100,00	(46.849.500,00)	88,49
4.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	407.047.600,00	360.198.100,00	(46.849.500,00)	88,49
4.01.02.2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1.308.690.350,00	1.153.799.249,00	(154.891.101,00)	88,16
4.01.02.2.02.0001		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	958.737.000,00	840.724.899,00	(118.012.101,00)	87,69
4.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	958.737.000,00	840.724.899,00	(118.012.101,00)	87,69

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	958.737.000,00	840.724.899,00	(118.012.101,00)	87,69
4.01.02.2.02.0002		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	41.174.000,00	13.565.000,00	(27.609.000,00)	32,95
4.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	41.174.000,00	13.565.000,00	(27.609.000,00)	32,95
4.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.174.000,00	13.565.000,00	(27.609.000,00)	32,95
4.01.02.2.02.0003		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	308.779.350,00	299.509.350,00	(9.270.000,00)	97,00
4.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	308.779.350,00	299.509.350,00	(9.270.000,00)	97,00
4.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.779.350,00	299.509.350,00	(9.270.000,00)	97,00
4.01.02.2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	609.766.000,00	562.958.800,00	(46.807.200,00)	92,32
4.01.02.2.03.0001		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	187.000.000,00	165.444.194,00	(21.555.806,00)	88,47
4.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	187.000.000,00	165.444.194,00	(21.555.806,00)	88,47
4.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.000.000,00	165.444.194,00	(21.555.806,00)	88,47
4.01.02.2.03.0002		Fasilitasi Bantuan Hukum	285.516.000,00	260.577.650,00	(24.938.350,00)	91,27
4.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	285.516.000,00	260.577.650,00	(24.938.350,00)	91,27
4.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.516.000,00	260.577.650,00	(24.938.350,00)	91,27
4.01.02.2.03.0003		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	137.250.000,00	136.936.956,00	(313.044,00)	99,77
4.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	137.250.000,00	136.936.956,00	(313.044,00)	99,77
4.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.250.000,00	136.936.956,00	(313.044,00)	99,77
4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.447.230.000,00	1.765.015.932,00	(682.214.068,00)	72,12
4.01.03.2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	592.750.000,00	539.890.105,00	(52.859.895,00)	91,08
4.01.03.2.01.0001		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	297.750.000,00	256.999.105,00	(40.750.895,00)	86,31
4.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	297.750.000,00	256.999.105,00	(40.750.895,00)	86,31
4.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.750.000,00	256.999.105,00	(40.750.895,00)	86,31
4.01.03.2.01.0002		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	140.000.000,00	134.709.000,00	(5.291.000,00)	96,22
4.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	140.000.000,00	134.709.000,00	(5.291.000,00)	96,22
4.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	134.709.000,00	(5.291.000,00)	96,22
4.01.03.2.01.0003		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	155.000.000,00	148.182.000,00	(6.818.000,00)	95,60
4.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	155.000.000,00	148.182.000,00	(6.818.000,00)	95,60
4.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.000.000,00	148.182.000,00	(6.818.000,00)	95,60
4.01.03.2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	325.000.000,00	291.884.000,00	(33.116.000,00)	89,81
4.01.03.2.02.0001		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	136.930.000,00	125.343.000,00	(11.587.000,00)	91,54
4.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	136.930.000,00	125.343.000,00	(11.587.000,00)	91,54

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.930.000,00	125.343.000,00	(11.587.000,00)	91,54
4.01.03.2.02.0002		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	97.353.000,00	85.072.000,00	(12.281.000,00)	87,39
4.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	97.353.000,00	85.072.000,00	(12.281.000,00)	87,39
4.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.353.000,00	85.072.000,00	(12.281.000,00)	87,39
4.01.03.2.02.0003		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	90.717.000,00	81.469.000,00	(9.248.000,00)	89,81
4.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	90.717.000,00	81.469.000,00	(9.248.000,00)	89,81
4.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.717.000,00	81.469.000,00	(9.248.000,00)	89,81
4.01.03.2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.529.480.000,00	933.241.827,00	(596.238.173,00)	61,02
4.01.03.2.03.0001		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.077.160.000,00	713.563.144,00	(363.596.856,00)	66,24
4.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.077.160.000,00	713.563.144,00	(363.596.856,00)	66,24
4.01.03.2.03.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	602.340.000,00	447.881.500,00	(154.458.500,00)	74,36
4.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	474.820.000,00	265.681.644,00	(209.138.356,00)	55,95
4.01.03.2.03.0002		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	105.000.000,00	27.819.000,00	(77.181.000,00)	26,49
4.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	105.000.000,00	27.819.000,00	(77.181.000,00)	26,49
4.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	27.819.000,00	(77.181.000,00)	26,49
4.01.03.2.03.0003		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	347.320.000,00	191.859.683,00	(155.460.317,00)	55,24
4.01.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	347.320.000,00	191.859.683,00	(155.460.317,00)	55,24
4.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.320.000,00	191.859.683,00	(155.460.317,00)	55,24
4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.452.905.902,00	31.726.576.155,00	(3.726.329.747,00)	89,49
4.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	228.292.700,00	227.342.700,00	(950.000,00)	99,58
4.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.592.000,00	25.221.000,00	(371.000,00)	98,55
4.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.592.000,00	25.221.000,00	(371.000,00)	98,55
4.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.592.000,00	25.221.000,00	(371.000,00)	98,55
4.01.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.827.000,00	9.827.000,00	0,00	100,00
4.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.827.000,00	9.827.000,00	0,00	100,00
4.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.827.000,00	9.827.000,00	0,00	100,00
4.01.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.010.500,00	10.010.500,00	0,00	100,00
4.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.010.500,00	10.010.500,00	0,00	100,00
4.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.010.500,00	10.010.500,00	0,00	100,00
4.01.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	13.493.200,00	13.493.200,00	0,00	100,00
4.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.493.200,00	13.493.200,00	0,00	100,00
4.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.493.200,00	13.493.200,00	0,00	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.965.000,00	15.965.000,00	0,00	100,00
4.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.965.000,00	15.965.000,00	0,00	100,00
4.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.965.000,00	15.965.000,00	0,00	100,00
4.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	153.405.000,00	152.826.000,00	(579.000,00)	99,62
4.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	153.405.000,00	152.826.000,00	(579.000,00)	99,62
4.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.405.000,00	152.826.000,00	(579.000,00)	99,62
4.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.599.041.299,00	11.523.974.452,00	(1.075.066.847,00)	91,47
4.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.448.392.799,00	11.375.883.952,00	(1.072.508.847,00)	91,38
4.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.448.392.799,00	11.375.883.952,00	(1.072.508.847,00)	91,38
4.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	12.448.392.799,00	11.375.883.952,00	(1.072.508.847,00)	91,38
4.01.01.2.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	78.358.000,00	76.977.000,00	(1.381.000,00)	98,24
4.01.01.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	78.358.000,00	76.977.000,00	(1.381.000,00)	98,24
4.01.01.2.02.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	18.240.000,00	18.240.000,00	0,00	100,00
4.01.01.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.118.000,00	58.737.000,00	(1.381.000,00)	97,70
4.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	72.290.500,00	71.113.500,00	(1.177.000,00)	98,37
4.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	72.290.500,00	71.113.500,00	(1.177.000,00)	98,37
4.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.290.500,00	71.113.500,00	(1.177.000,00)	98,37
4.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	102.393.000,00	97.678.661,00	(4.714.339,00)	95,40
4.01.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	14.854.000,00	14.053.000,00	(801.000,00)	94,61
4.01.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.854.000,00	14.053.000,00	(801.000,00)	94,61
4.01.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.854.000,00	14.053.000,00	(801.000,00)	94,61
4.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	87.539.000,00	83.625.661,00	(3.913.339,00)	95,53
4.01.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	87.539.000,00	83.625.661,00	(3.913.339,00)	95,53
4.01.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.539.000,00	83.625.661,00	(3.913.339,00)	95,53
4.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	409.784.000,00	92.538.000,00	(317.246.000,00)	22,58
4.01.01.2.05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.284.000,00	7.538.000,00	(7.746.000,00)	49,32
4.01.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.284.000,00	7.538.000,00	(7.746.000,00)	49,32
4.01.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.284.000,00	7.538.000,00	(7.746.000,00)	49,32
4.01.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	346.500.000,00	49.000.000,00	(297.500.000,00)	14,14
4.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	346.500.000,00	49.000.000,00	(297.500.000,00)	14,14
4.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.500.000,00	49.000.000,00	(297.500.000,00)	14,14
4.01.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48.000.000,00	36.000.000,00	(12.000.000,00)	75,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	48.000.000,00	36.000.000,00	(12.000.000,00)	75,00
4.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	36.000.000,00	(12.000.000,00)	75,00
4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.457.066.850,00	5.666.667.939,00	(790.398.911,00)	87,76
4.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	130.006.000,00	127.846.000,00	(2.160.000,00)	98,34
4.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	130.006.000,00	127.846.000,00	(2.160.000,00)	98,34
4.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.006.000,00	127.846.000,00	(2.160.000,00)	98,34
4.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	239.998.050,00	239.985.350,00	(12.700,00)	99,99
4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	239.998.050,00	239.985.350,00	(12.700,00)	99,99
4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.998.050,00	239.985.350,00	(12.700,00)	99,99
4.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	240.901.800,00	202.858.800,00	(38.043.000,00)	84,21
4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	240.901.800,00	202.858.800,00	(38.043.000,00)	84,21
4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.901.800,00	202.858.800,00	(38.043.000,00)	84,21
4.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	110.000.000,00	84.855.000,00	(25.145.000,00)	77,14
4.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	110.000.000,00	84.855.000,00	(25.145.000,00)	77,14
4.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	84.855.000,00	(25.145.000,00)	77,14
4.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.962.460.000,00	1.517.372.600,00	(445.087.400,00)	77,32
4.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.962.460.000,00	1.517.372.600,00	(445.087.400,00)	77,32
4.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.962.460.000,00	1.517.372.600,00	(445.087.400,00)	77,32
4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.773.701.000,00	3.493.750.189,00	(279.950.811,00)	92,58
4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	3.773.701.000,00	3.493.750.189,00	(279.950.811,00)	92,58
4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.773.701.000,00	3.493.750.189,00	(279.950.811,00)	92,58
4.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	247.390.870,00	181.179.450,00	(66.211.420,00)	73,24
4.01.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	247.390.870,00	181.179.450,00	(66.211.420,00)	73,24
4.01.01.2.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	49.210.000,00	48.660.000,00	(550.000,00)	98,88
4.01.01.2.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.210.000,00	48.660.000,00	(550.000,00)	98,88
4.01.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	198.180.870,00	132.519.450,00	(65.661.420,00)	66,87
4.01.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	198.180.870,00	132.519.450,00	(65.661.420,00)	66,87
4.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.753.419.400,00	8.487.206.782,00	(266.212.618,00)	96,96
4.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	53.105.000,00	52.215.000,00	(890.000,00)	98,32
4.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	53.105.000,00	52.215.000,00	(890.000,00)	98,32
4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.105.000,00	52.215.000,00	(890.000,00)	98,32
4.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.120.350.000,00	6.905.519.371,00	(214.830.629,00)	96,98

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.120.350.000,00	6.905.519.371,00	(214.830.629,00)	96,98
4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.120.350.000,00	6.905.519.371,00	(214.830.629,00)	96,98
4.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.579.964.400,00	1.529.472.411,00	(50.491.989,00)	96,80
4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.579.964.400,00	1.529.472.411,00	(50.491.989,00)	96,80
4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.579.964.400,00	1.529.472.411,00	(50.491.989,00)	96,80
4.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.738.286.183,00	2.193.969.554,00	(544.316.629,00)	80,12
4.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	449.544.300,00	351.398.297,00	(98.146.003,00)	78,17
4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	449.544.300,00	351.398.297,00	(98.146.003,00)	78,17
4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.544.300,00	351.398.297,00	(98.146.003,00)	78,17
4.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.579.973.883,00	1.156.393.257,00	(423.580.626,00)	73,19
4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.579.973.883,00	1.156.393.257,00	(423.580.626,00)	73,19
4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.579.973.883,00	1.156.393.257,00	(423.580.626,00)	73,19
4.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	442.818.000,00	441.155.000,00	(1.663.000,00)	99,62
4.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	442.818.000,00	441.155.000,00	(1.663.000,00)	99,62
4.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.818.000,00	441.155.000,00	(1.663.000,00)	99,62
4.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	265.950.000,00	245.023.000,00	(20.927.000,00)	92,13
4.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	265.950.000,00	245.023.000,00	(20.927.000,00)	92,13
4.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.950.000,00	245.023.000,00	(20.927.000,00)	92,13
4.01.01.2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.192.507.600,00	682.984.940,00	(509.522.660,00)	57,27
4.01.01.2.11.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	214.330.000,00	60.021.239,00	(154.308.761,00)	28,00
4.01.01.2.11.0001	5.1	BELANJA OPERASI	214.330.000,00	60.021.239,00	(154.308.761,00)	28,00
4.01.01.2.11.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	214.330.000,00	60.021.239,00	(154.308.761,00)	28,00
4.01.01.2.11.0002		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	215.177.600,00	197.103.400,00	(18.074.200,00)	91,60
4.01.01.2.11.0002	5.1	BELANJA OPERASI	215.177.600,00	197.103.400,00	(18.074.200,00)	91,60
4.01.01.2.11.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.177.600,00	197.103.400,00	(18.074.200,00)	91,60
4.01.01.2.11.0003		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	88.000.000,00	54.918.200,00	(33.081.800,00)	62,41

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.01.01.2.11.0003	5.1	BELANJA OPERASI	88.000.000,00	54.918.200,00	(33.081.800,00)	62,41
4.01.01.2.11.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.000.000,00	54.918.200,00	(33.081.800,00)	62,41
4.01.01.2.11.0004		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	675.000.000,00	370.942.101,00	(304.057.899,00)	54,95
4.01.01.2.11.0004	5.1	BELANJA OPERASI	675.000.000,00	370.942.101,00	(304.057.899,00)	54,95
4.01.01.2.11.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	400.000.000,00	293.333.333,00	(106.666.667,00)	73,33
4.01.01.2.11.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	77.608.768,00	(197.391.232,00)	28,22
4.01.01.2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	985.724.000,00	964.634.300,00	(21.089.700,00)	97,86
4.01.01.2.12.0001		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	600.000.000,00	587.863.000,00	(12.137.000,00)	97,98
4.01.01.2.12.0001	5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	587.863.000,00	(12.137.000,00)	97,98
4.01.01.2.12.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	587.863.000,00	(12.137.000,00)	97,98
4.01.01.2.12.0002		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	140.000.000,00	131.078.000,00	(8.922.000,00)	93,63
4.01.01.2.12.0002	5.1	BELANJA OPERASI	140.000.000,00	131.078.000,00	(8.922.000,00)	93,63
4.01.01.2.12.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	131.078.000,00	(8.922.000,00)	93,63
4.01.01.2.12.0003		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	245.724.000,00	245.693.300,00	(30.700,00)	99,99
4.01.01.2.12.0003	5.1	BELANJA OPERASI	245.724.000,00	245.693.300,00	(30.700,00)	99,99
4.01.01.2.12.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.724.000,00	245.693.300,00	(30.700,00)	99,99
4.01.01.2.13		Penataan Organisasi	628.000.000,00	531.783.794,00	(96.216.206,00)	84,68
4.01.01.2.13.0001		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	240.000.000,00	210.569.012,00	(29.430.988,00)	87,74
4.01.01.2.13.0001	5.1	BELANJA OPERASI	240.000.000,00	210.569.012,00	(29.430.988,00)	87,74
4.01.01.2.13.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	210.569.012,00	(29.430.988,00)	87,74
4.01.01.2.13.0002		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	105.000.000,00	100.663.656,00	(4.336.344,00)	95,87
4.01.01.2.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	105.000.000,00	100.663.656,00	(4.336.344,00)	95,87
4.01.01.2.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	100.663.656,00	(4.336.344,00)	95,87
4.01.01.2.13.0003		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	168.000.000,00	119.495.977,00	(48.504.023,00)	71,13
4.01.01.2.13.0003	5.1	BELANJA OPERASI	168.000.000,00	119.495.977,00	(48.504.023,00)	71,13
4.01.01.2.13.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.000.000,00	119.495.977,00	(48.504.023,00)	71,13
4.01.01.2.13.0004		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	35.000.000,00	32.262.000,00	(2.738.000,00)	92,18
4.01.01.2.13.0004	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	32.262.000,00	(2.738.000,00)	92,18
4.01.01.2.13.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	32.262.000,00	(2.738.000,00)	92,18
4.01.01.2.13.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	80.000.000,00	68.793.149,00	(11.206.851,00)	85,99
4.01.01.2.13.0005	5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	68.793.149,00	(11.206.851,00)	85,99
4.01.01.2.13.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	68.793.149,00	(11.206.851,00)	85,99

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.01.01.2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.111.000.000,00	1.076.615.583,00	(34.384.417,00)	96,91
4.01.01.2.14.0001		Fasilitasi Keprotokolan	154.887.000,00	142.016.248,00	(12.870.752,00)	91,69
4.01.01.2.14.0001	5.1	BELANJA OPERASI	154.887.000,00	142.016.248,00	(12.870.752,00)	91,69
4.01.01.2.14.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.887.000,00	142.016.248,00	(12.870.752,00)	91,69
4.01.01.2.14.0002		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	367.729.000,00	363.264.735,00	(4.464.265,00)	98,79
4.01.01.2.14.0002	5.1	BELANJA OPERASI	367.729.000,00	363.264.735,00	(4.464.265,00)	98,79
4.01.01.2.14.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	367.729.000,00	363.264.735,00	(4.464.265,00)	98,79
4.01.01.2.14.0003		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	588.384.000,00	571.334.600,00	(17.049.400,00)	97,10
4.01.01.2.14.0003	5.1	BELANJA OPERASI	588.384.000,00	571.334.600,00	(17.049.400,00)	97,10
4.01.01.2.14.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	588.384.000,00	571.334.600,00	(17.049.400,00)	97,10
		JUMLAH BELANJA	**41.280.251.252,00**	**36.511.751.594,00**	**(4.768.499.658,00)**	**88,45**
		SURPLUS DEFISIT	**(41.265.251.252,00)**	**(36.502.751.594,00)**	**4.762.499.658,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : Inspektorat

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**9.106.560.239,00**	**8.468.802.202,00**	**(637.758.037,00)**	**93,00**
6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.377.160.000,00	1.360.119.000,00	(17.041.000,00)	98,76
6.01.02.2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.275.910.000,00	1.259.546.000,00	(16.364.000,00)	98,72
6.01.02.2.01.0002		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	340.580.000,00	338.330.000,00	(2.250.000,00)	99,34
6.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	340.580.000,00	338.330.000,00	(2.250.000,00)	99,34
6.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.580.000,00	338.330.000,00	(2.250.000,00)	99,34
6.01.02.2.01.0003		Reviu Laporan Kinerja	34.980.000,00	34.380.000,00	(600.000,00)	98,28
6.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	34.980.000,00	34.380.000,00	(600.000,00)	98,28
6.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.980.000,00	34.380.000,00	(600.000,00)	98,28
6.01.02.2.01.0004		Reviu Laporan Keuangan	91.710.000,00	91.710.000,00	0,00	100,00
6.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	91.710.000,00	91.710.000,00	0,00	100,00
6.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.710.000,00	91.710.000,00	0,00	100,00
6.01.02.2.01.0005		Pengawasan Desa	598.270.000,00	596.320.000,00	(1.950.000,00)	99,67
6.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	598.270.000,00	596.320.000,00	(1.950.000,00)	99,67
6.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	598.270.000,00	596.320.000,00	(1.950.000,00)	99,67
6.01.02.2.01.0007		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Ti	210.370.000,00	198.806.000,00	(11.564.000,00)	94,50
6.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	210.370.000,00	198.806.000,00	(11.564.000,00)	94,50
6.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.370.000,00	198.806.000,00	(11.564.000,00)	94,50
6.01.02.2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	101.250.000,00	100.573.000,00	(677.000,00)	99,33
6.01.02.2.02.0001		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	49.820.000,00	49.350.000,00	(470.000,00)	99,06

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	49.820.000,00	49.350.000,00	(470.000,00)	99,06
6.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.820.000,00	49.350.000,00	(470.000,00)	99,06
6.01.02.2.02.0002		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	51.430.000,00	51.223.000,00	(207.000,00)	99,60
6.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	51.430.000,00	51.223.000,00	(207.000,00)	99,60
6.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.430.000,00	51.223.000,00	(207.000,00)	99,60
6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	244.210.000,00	241.520.000,00	(2.690.000,00)	98,90
6.01.03.2.02		Pendampingan dan Asistensi	244.210.000,00	241.520.000,00	(2.690.000,00)	98,90
6.01.03.2.02.0001		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	45.000.000,00	44.350.000,00	(650.000,00)	98,56
6.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	44.350.000,00	(650.000,00)	98,56
6.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	44.350.000,00	(650.000,00)	98,56
6.01.03.2.02.0003		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan P	199.210.000,00	197.170.000,00	(2.040.000,00)	98,98
6.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	199.210.000,00	197.170.000,00	(2.040.000,00)	98,98
6.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.210.000,00	197.170.000,00	(2.040.000,00)	98,98
6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATE	7.485.190.239,00	6.867.163.202,00	(618.027.037,00)	91,74
6.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.219.747.499,00	4.975.058.902,00	(244.688.597,00)	95,31
6.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.219.747.499,00	4.975.058.902,00	(244.688.597,00)	95,31
6.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.219.747.499,00	4.975.058.902,00	(244.688.597,00)	95,31
6.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.219.747.499,00	4.975.058.902,00	(244.688.597,00)	95,31
6.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	519.000.000,00	256.633.000,00	(262.367.000,00)	49,45
6.01.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000,00	57.546.000,00	(17.454.000,00)	76,73
6.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	57.546.000,00	(17.454.000,00)	76,73
6.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	57.546.000,00	(17.454.000,00)	76,73
6.01.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	444.000.000,00	199.087.000,00	(244.913.000,00)	44,84
6.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	444.000.000,00	199.087.000,00	(244.913.000,00)	44,84
6.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.000.000,00	199.087.000,00	(244.913.000,00)	44,84
6.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	881.076.515,00	864.894.800,00	(16.181.715,00)	98,16
6.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.997.400,00	9.775.400,00	(222.000,00)	97,78
6.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.997.400,00	9.775.400,00	(222.000,00)	97,78
6.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.997.400,00	9.775.400,00	(222.000,00)	97,78
6.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	207.179.115,00	206.123.400,00	(1.055.715,00)	99,49
6.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	207.179.115,00	206.123.400,00	(1.055.715,00)	99,49
6.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.179.115,00	206.123.400,00	(1.055.715,00)	99,49
6.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	102.896.000,00	102.310.000,00	(586.000,00)	99,43
6.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	102.896.000,00	102.310.000,00	(586.000,00)	99,43

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.896.000,00	102.310.000,00	(586.000,00)	99,43
6.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000,00	1.215.000,00	(585.000,00)	67,50
6.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.215.000,00	(585.000,00)	67,50
6.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.215.000,00	(585.000,00)	67,50
6.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	559.204.000,00	545.471.000,00	(13.733.000,00)	97,54
6.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	559.204.000,00	545.471.000,00	(13.733.000,00)	97,54
6.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	559.204.000,00	545.471.000,00	(13.733.000,00)	97,54
6.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	346.013.000,00	309.500.000,00	(36.513.000,00)	89,45
6.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
6.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
6.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
6.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	306.013.000,00	269.500.000,00	(36.513.000,00)	88,07
6.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	23.500.000,00	0,00	(23.500.000,00)	0,00
6.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	0,00	(23.500.000,00)	0,00
6.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	282.513.000,00	269.500.000,00	(13.013.000,00)	95,39
6.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	282.513.000,00	269.500.000,00	(13.013.000,00)	95,39
6.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.466.600,00	126.229.766,00	(8.236.834,00)	93,87
6.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.900.000,00	474.000,00	(4.426.000,00)	9,67
6.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.900.000,00	474.000,00	(4.426.000,00)	9,67
6.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	474.000,00	(4.426.000,00)	9,67
6.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00	17.011.946,00	(2.988.054,00)	85,06
6.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	17.011.946,00	(2.988.054,00)	85,06
6.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	17.011.946,00	(2.988.054,00)	85,06
6.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.566.600,00	108.743.820,00	(822.780,00)	99,25
6.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	109.566.600,00	108.743.820,00	(822.780,00)	99,25
6.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.566.600,00	108.743.820,00	(822.780,00)	99,25
6.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D	384.886.625,00	334.846.734,00	(50.039.891,00)	87,00
6.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizina	271.811.625,00	230.551.734,00	(41.259.891,00)	84,82
6.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	271.811.625,00	230.551.734,00	(41.259.891,00)	84,82
6.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.811.625,00	230.551.734,00	(41.259.891,00)	84,82
6.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.605.000,00	7.095.000,00	(8.510.000,00)	45,47
6.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.605.000,00	7.095.000,00	(8.510.000,00)	45,47
6.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.605.000,00	7.095.000,00	(8.510.000,00)	45,47

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	97.470.000,00	97.200.000,00	(270.000,00)	99,72
6.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	97.470.000,00	97.200.000,00	(270.000,00)	99,72
6.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.470.000,00	97.200.000,00	(270.000,00)	99,72
		JUMLAH BELANJA	**9.106.560.239,00**	**8.468.802.202,00**	**(637.758.037,00)**	**93,00**
		SURPLUS DEFISIT	**(9.106.560.239,00)**	**(8.468.802.202,00)**	**637.758.037,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PERENCANAAN
Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**5.980.369.770,00**	**5.490.556.526,00**	**(489.813.244,00)**	**91,81**
5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	998.155.500,00	841.124.972,00	(157.030.528,00)	84,27
5.01.02.2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	913.595.500,00	760.805.972,00	(152.789.528,00)	83,28
5.01.02.2.01.0005		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	69.730.000,00	67.110.000,00	(2.620.000,00)	96,24
5.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	69.730.000,00	67.110.000,00	(2.620.000,00)	96,24
5.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.730.000,00	67.110.000,00	(2.620.000,00)	96,24
5.01.02.2.01.0007		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	843.865.500,00	693.695.972,00	(150.169.528,00)	82,20
5.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	843.865.500,00	693.695.972,00	(150.169.528,00)	82,20
5.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	843.865.500,00	693.695.972,00	(150.169.528,00)	82,20
5.01.02.2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	84.560.000,00	80.319.000,00	(4.241.000,00)	94,98
5.01.02.2.03.0003		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	84.560.000,00	80.319.000,00	(4.241.000,00)	94,98
5.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	84.560.000,00	80.319.000,00	(4.241.000,00)	94,98
5.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.560.000,00	80.319.000,00	(4.241.000,00)	94,98
5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	602.555.900,00	579.738.356,00	(22.817.544,00)	96,21

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.01.03.2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	355.436.900,00	352.162.900,00	(3.274.000,00)	99,08
5.01.03.2.01.0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	202.263.900,00	199.643.900,00	(2.620.000,00)	98,70
5.01.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	202.263.900,00	199.643.900,00	(2.620.000,00)	98,70
5.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.263.900,00	199.643.900,00	(2.620.000,00)	98,70
5.01.03.2.01.0008		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	153.173.000,00	152.519.000,00	(654.000,00)	99,57
5.01.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	153.173.000,00	152.519.000,00	(654.000,00)	99,57
5.01.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.173.000,00	152.519.000,00	(654.000,00)	99,57
5.01.03.2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	166.196.400,00	150.568.127,00	(15.628.273,00)	90,60
5.01.03.2.02.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	83.179.200,00	74.463.101,00	(8.716.099,00)	89,52
5.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	83.179.200,00	74.463.101,00	(8.716.099,00)	89,52
5.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.179.200,00	74.463.101,00	(8.716.099,00)	89,52
5.01.03.2.02.0005		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	83.017.200,00	76.105.026,00	(6.912.174,00)	91,67
5.01.03.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	83.017.200,00	76.105.026,00	(6.912.174,00)	91,67
5.01.03.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.017.200,00	76.105.026,00	(6.912.174,00)	91,67
5.01.03.2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	80.922.600,00	77.007.329,00	(3.915.271,00)	95,16
5.01.03.2.03.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	80.922.600,00	77.007.329,00	(3.915.271,00)	95,16
5.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	80.922.600,00	77.007.329,00	(3.915.271,00)	95,16
5.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.922.600,00	77.007.329,00	(3.915.271,00)	95,16
5.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.379.658.370,00	4.069.693.198,00	(309.965.172,00)	92,92
5.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.032.500,00	24.232.500,00	(800.000,00)	96,80
5.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.012.500,00	14.512.500,00	(500.000,00)	96,67
5.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.012.500,00	14.512.500,00	(500.000,00)	96,67
5.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.012.500,00	14.512.500,00	(500.000,00)	96,67
5.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.020.000,00	9.720.000,00	(300.000,00)	97,01
5.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.020.000,00	9.720.000,00	(300.000,00)	97,01

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.020.000,00	9.720.000,00	(300.000,00)	97,01
5.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.553.562.440,00	3.282.763.204,00	(270.799.236,00)	92,38
5.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.553.562.440,00	3.282.763.204,00	(270.799.236,00)	92,38
5.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.553.562.440,00	3.282.763.204,00	(270.799.236,00)	92,38
5.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.553.562.440,00	3.282.763.204,00	(270.799.236,00)	92,38
5.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.000.000,00	48.375.000,00	(625.000,00)	98,72
5.01.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49.000.000,00	48.375.000,00	(625.000,00)	98,72
5.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	49.000.000,00	48.375.000,00	(625.000,00)	98,72
5.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.000.000,00	48.375.000,00	(625.000,00)	98,72
5.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	393.009.000,00	378.860.675,00	(14.148.325,00)	96,40
5.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.986.000,00	2.900.000,00	(86.000,00)	97,12
5.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.986.000,00	2.900.000,00	(86.000,00)	97,12
5.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.986.000,00	2.900.000,00	(86.000,00)	97,12
5.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.651.400,00	22.386.800,00	(264.600,00)	98,83
5.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.651.400,00	22.386.800,00	(264.600,00)	98,83
5.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.651.400,00	22.386.800,00	(264.600,00)	98,83
5.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.971.600,00	21.959.600,00	(6.012.000,00)	78,51
5.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	27.971.600,00	21.959.600,00	(6.012.000,00)	78,51
5.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.971.600,00	21.959.600,00	(6.012.000,00)	78,51
5.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000,00	3.420.000,00	(1.980.000,00)	63,33
5.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	3.420.000,00	(1.980.000,00)	63,33
5.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	3.420.000,00	(1.980.000,00)	63,33
5.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	334.000.000,00	328.194.275,00	(5.805.725,00)	98,26
5.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	334.000.000,00	328.194.275,00	(5.805.725,00)	98,26
5.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.000.000,00	328.194.275,00	(5.805.725,00)	98,26
5.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.467.680,00	206.800.676,00	(9.667.004,00)	95,53
5.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.800.000,00	23.193.860,00	(9.606.140,00)	70,71
5.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	32.800.000,00	23.193.860,00	(9.606.140,00)	70,71
5.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.800.000,00	23.193.860,00	(9.606.140,00)	70,71
5.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	183.667.680,00	183.606.816,00	(60.864,00)	99,97
5.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	183.667.680,00	183.606.816,00	(60.864,00)	99,97
5.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	100,00
5.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.507.680,00	175.446.816,00	(60.864,00)	99,97

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.586.750,00	128.661.143,00	(13.925.607,00)	90,23
5.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.054.750,00	86.585.693,00	(13.469.057,00)	86,54
5.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	100.054.750,00	86.585.693,00	(13.469.057,00)	86,54
5.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.054.750,00	86.585.693,00	(13.469.057,00)	86,54
5.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	272.000,00	121.650,00	(150.350,00)	44,72
5.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	272.000,00	121.650,00	(150.350,00)	44,72
5.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.000,00	121.650,00	(150.350,00)	44,72
5.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.620.000,00	15.620.000,00	0,00	100,00
5.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.620.000,00	15.620.000,00	0,00	100,00
5.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.620.000,00	15.620.000,00	0,00	100,00
5.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.790.000,00	8.679.800,00	(110.200,00)	98,75
5.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	8.790.000,00	8.679.800,00	(110.200,00)	98,75
5.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.790.000,00	8.679.800,00	(110.200,00)	98,75
5.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.850.000,00	17.654.000,00	(196.000,00)	98,90
5.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	17.850.000,00	17.654.000,00	(196.000,00)	98,90
5.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.850.000,00	17.654.000,00	(196.000,00)	98,90
		JUMLAH BELANJA	**5.980.369.770,00**	**5.490.556.526,00**	**(489.813.244,00)**	**91,81**
		SURPLUS DEFISIT	**(5.980.369.770,00)**	**(5.490.556.526,00)**	**489.813.244,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**886.834.149,00**	**673.616.010,00**	**(213.218.139,00)**	**75,96**
5.05.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	886.834.149,00	673.616.010,00	(213.218.139,00)	75,96
5.05.02.2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	517.245.299,00	344.674.655,00	(172.570.644,00)	66,64
5.05.02.2.01.0003		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	517.245.299,00	344.674.655,00	(172.570.644,00)	66,64
5.05.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	517.245.299,00	344.674.655,00	(172.570.644,00)	66,64
5.05.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	517.245.299,00	344.674.655,00	(172.570.644,00)	66,64
5.05.02.2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	149.999.800,00	126.299.800,00	(23.700.000,00)	84,20
5.05.02.2.02.0006		Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	149.999.800,00	126.299.800,00	(23.700.000,00)	84,20
5.05.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	149.999.800,00	126.299.800,00	(23.700.000,00)	84,20
5.05.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.999.800,00	126.299.800,00	(23.700.000,00)	84,20
5.05.02.2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	150.015.000,00	136.988.000,00	(13.027.000,00)	91,32
5.05.02.2.03.0004		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	150.015.000,00	136.988.000,00	(13.027.000,00)	91,32
5.05.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	150.015.000,00	136.988.000,00	(13.027.000,00)	91,32
5.05.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.015.000,00	136.988.000,00	(13.027.000,00)	91,32
5.05.02.2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	69.574.050,00	65.653.555,00	(3.920.495,00)	94,37

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.05.02.2.04.0003		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	69.574.050,00	65.653.555,00	(3.920.495,00)	94,37
5.05.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	69.574.050,00	65.653.555,00	(3.920.495,00)	94,37
5.05.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.574.050,00	65.653.555,00	(3.920.495,00)	94,37
		JUMLAH BELANJA	**886.834.149,00**	**673.616.010,00**	**(213.218.139,00)**	**75,96**
		SURPLUS DEFISIT	**(886.834.149,00)**	**(673.616.010,00)**	**213.218.139,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : Badan Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.177.852.463.600,00**	**1.113.440.919.652,77**	**(64.411.543.947,23)**	**94,53**
	4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.024.677.000,00	18.027.466.495,77	2.002.789.495,77	112,50
	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.964.954.000,00	11.964.954.686,50	686,50	100,00
	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.059.723.000,00	6.062.511.809,27	2.002.788.809,27	149,33
	4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.148.501.149.600,00	1.083.304.010.242,00	(65.197.139.358,00)	94,32
	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.075.894.235.000,00	1.045.825.056.797,00	(30.069.178.203,00)	97,21
	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.606.914.600,00	37.478.953.445,00	(35.127.961.155,00)	51,62
	4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.326.637.000,00	12.109.442.915,00	(1.217.194.085,00)	90,87
	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	13.326.637.000,00	12.109.442.915,00	(1.217.194.085,00)	90,87
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.177.852.463.600,00**	**1.113.440.919.652,77**	**(64.411.543.947,23)**	**94,53**
	5	**BELANJA DAERAH**	**219.142.436.712,00**	**218.170.281.431,00**	**(972.155.281,00)**	**99,56**
5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	211.745.390.160,00	211.206.910.732,00	(538.479.428,00)	99,75
5.02.02.2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.296.427.360,00	1.248.061.160,00	(48.366.200,00)	96,27
5.02.02.2.01.0001		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	96.566.000,00	79.625.200,00	(16.940.800,00)	82,46
5.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	96.566.000,00	79.625.200,00	(16.940.800,00)	82,46
5.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.566.000,00	79.625.200,00	(16.940.800,00)	82,46
5.02.02.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	121.255.400,00	111.477.300,00	(9.778.100,00)	91,94
5.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	121.255.400,00	111.477.300,00	(9.778.100,00)	91,94
5.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.255.400,00	111.477.300,00	(9.778.100,00)	91,94

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.02.02.2.01.0003		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	28.853.300,00	28.559.500,00	(293.800,00)	98,98
5.02.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	28.853.300,00	28.559.500,00	(293.800,00)	98,98
5.02.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.853.300,00	28.559.500,00	(293.800,00)	98,98
5.02.02.2.01.0004		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	18.444.100,00	18.151.000,00	(293.100,00)	98,41
5.02.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	18.444.100,00	18.151.000,00	(293.100,00)	98,41
5.02.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.444.100,00	18.151.000,00	(293.100,00)	98,41
5.02.02.2.01.0005		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	53.531.660,00	53.009.000,00	(522.660,00)	99,02
5.02.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	53.531.660,00	53.009.000,00	(522.660,00)	99,02
5.02.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.531.660,00	53.009.000,00	(522.660,00)	99,02
5.02.02.2.01.0006		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	60.242.100,00	59.764.100,00	(478.000,00)	99,21
5.02.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	60.242.100,00	59.764.100,00	(478.000,00)	99,21
5.02.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.242.100,00	59.764.100,00	(478.000,00)	99,21
5.02.02.2.01.0007		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	482.872.000,00	468.567.826,00	(14.304.174,00)	97,04
5.02.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	482.872.000,00	468.567.826,00	(14.304.174,00)	97,04
5.02.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	482.872.000,00	468.567.826,00	(14.304.174,00)	97,04
5.02.02.2.01.0008		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	410.051.000,00	406.126.434,00	(3.924.566,00)	99,04
5.02.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	410.051.000,00	406.126.434,00	(3.924.566,00)	99,04
5.02.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	410.051.000,00	406.126.434,00	(3.924.566,00)	99,04
5.02.02.2.01.0009		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	24.611.800,00	22.780.800,00	(1.831.000,00)	92,56
5.02.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	24.611.800,00	22.780.800,00	(1.831.000,00)	92,56
5.02.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.611.800,00	22.780.800,00	(1.831.000,00)	92,56
5.02.02.2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	544.732.000,00	539.807.225,00	(4.924.775,00)	99,10
5.02.02.2.02.0001		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	181.997.400,00	181.367.978,00	(629.422,00)	99,65
5.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	181.997.400,00	181.367.978,00	(629.422,00)	99,65
5.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.997.400,00	181.367.978,00	(629.422,00)	99,65
5.02.02.2.02.0005		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	129.760.000,00	129.370.089,00	(389.911,00)	99,70
5.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	129.760.000,00	129.370.089,00	(389.911,00)	99,70
5.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.760.000,00	129.370.089,00	(389.911,00)	99,70

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.02.02.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	127.992.600,00	126.826.958,00	(1.165.642,00)	99,09
5.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	127.992.600,00	126.826.958,00	(1.165.642,00)	99,09
5.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.992.600,00	126.826.958,00	(1.165.642,00)	99,09
5.02.02.2.02.0011		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	104.982.000,00	102.242.200,00	(2.739.800,00)	97,39
5.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	104.982.000,00	102.242.200,00	(2.739.800,00)	97,39
5.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.982.000,00	102.242.200,00	(2.739.800,00)	97,39
5.02.02.2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	566.097.000,00	541.165.492,00	(24.931.508,00)	95,60
5.02.02.2.03.0003		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	202.721.000,00	200.321.991,00	(2.399.009,00)	98,82
5.02.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	202.721.000,00	200.321.991,00	(2.399.009,00)	98,82
5.02.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.721.000,00	200.321.991,00	(2.399.009,00)	98,82
5.02.02.2.03.0004		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	149.480.000,00	133.434.253,00	(16.045.747,00)	89,27
5.02.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	149.480.000,00	133.434.253,00	(16.045.747,00)	89,27
5.02.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.480.000,00	133.434.253,00	(16.045.747,00)	89,27
5.02.02.2.03.0005		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	201.230.000,00	200.353.248,00	(876.752,00)	99,56
5.02.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	201.230.000,00	200.353.248,00	(876.752,00)	99,56
5.02.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.230.000,00	200.353.248,00	(876.752,00)	99,56
5.02.02.2.03.0007		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	12.666.000,00	7.056.000,00	(5.610.000,00)	55,71
5.02.02.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	12.666.000,00	7.056.000,00	(5.610.000,00)	55,71
5.02.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.666.000,00	7.056.000,00	(5.610.000,00)	55,71
5.02.02.2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	209.174.894.000,00	208.731.243.735,00	(443.650.265,00)	99,79
5.02.02.2.04.0008		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	202.922.814.500,00	202.905.105.500,00	(17.709.000,00)	99,99
5.02.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	95.593.500,00	77.884.500,00	(17.709.000,00)	81,47
5.02.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.593.500,00	77.884.500,00	(17.709.000,00)	81,47
5.02.02.2.04.0008	5.4	BELANJA TRANSFER	202.827.221.000,00	202.827.221.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.02.02.2.04.0008	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	202.827.221.000,00	202.827.221.000,00	0,00	100,00
5.02.02.2.04.0009		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4.082.079.500,00	3.656.138.235,00	(425.941.265,00)	89,57
5.02.02.2.04.0009	5.1	BELANJA OPERASI	82.079.500,00	74.200.500,00	(7.879.000,00)	90,40
5.02.02.2.04.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.079.500,00	74.200.500,00	(7.879.000,00)	90,40
5.02.02.2.04.0009	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00	3.581.937.735,00	(418.062.265,00)	89,55
5.02.02.2.04.0009	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	3.581.937.735,00	(418.062.265,00)	89,55
5.02.02.2.04.0010		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.170.000.000,00	2.170.000.000,00	0,00	100,00
5.02.02.2.04.0010	5.4	BELANJA TRANSFER	2.170.000.000,00	2.170.000.000,00	0,00	100,00
5.02.02.2.04.0010	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.170.000.000,00	2.170.000.000,00	0,00	100,00
5.02.02.2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	163.239.800,00	146.633.120,00	(16.606.680,00)	89,83
5.02.02.2.05.0002		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	163.239.800,00	146.633.120,00	(16.606.680,00)	89,83
5.02.02.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	163.239.800,00	146.633.120,00	(16.606.680,00)	89,83
5.02.02.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.239.800,00	146.633.120,00	(16.606.680,00)	89,83
5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.067.152.000,00	1.009.079.538,00	(58.072.462,00)	94,56
5.02.03.2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.067.152.000,00	1.009.079.538,00	(58.072.462,00)	94,56
5.02.03.2.01.0001		Penyusunan Standar Harga	143.652.000,00	138.499.541,00	(5.152.459,00)	96,41
5.02.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	143.652.000,00	138.499.541,00	(5.152.459,00)	96,41
5.02.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.652.000,00	138.499.541,00	(5.152.459,00)	96,41
5.02.03.2.01.0003		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	28.000.000,00	27.072.000,00	(928.000,00)	96,69
5.02.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	28.000.000,00	27.072.000,00	(928.000,00)	96,69
5.02.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	27.072.000,00	(928.000,00)	96,69
5.02.03.2.01.0007		Pengamanan Barang Milik Daerah	320.000.000,00	289.212.199,00	(30.787.801,00)	90,38
5.02.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	320.000.000,00	289.212.199,00	(30.787.801,00)	90,38
5.02.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.000.000,00	289.212.199,00	(30.787.801,00)	90,38
5.02.03.2.01.0008		Penilaian Barang Milik Daerah	120.000.000,00	116.057.342,00	(3.942.658,00)	96,71
5.02.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	116.057.342,00	(3.942.658,00)	96,71
5.02.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	116.057.342,00	(3.942.658,00)	96,71
5.02.03.2.01.0009		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	42.200.000,00	35.746.000,00	(6.454.000,00)	84,71
5.02.03.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	42.200.000,00	35.746.000,00	(6.454.000,00)	84,71
5.02.03.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.200.000,00	35.746.000,00	(6.454.000,00)	84,71
5.02.03.2.01.0010		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	63.800.000,00	59.778.000,00	(4.022.000,00)	93,70

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.02.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	63.800.000,00	59.778.000,00	(4.022.000,00)	93,70
5.02.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.800.000,00	59.778.000,00	(4.022.000,00)	93,70
5.02.03.2.01.0012		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	349.500.000,00	342.714.456,00	(6.785.544,00)	98,06
5.02.03.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	349.500.000,00	342.714.456,00	(6.785.544,00)	98,06
5.02.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.500.000,00	342.714.456,00	(6.785.544,00)	98,06
5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.329.894.552,00	5.954.291.161,00	(375.603.391,00)	94,07
5.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.895.000,00	18.895.000,00	0,00	100,00
5.02.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.409.000,00	9.409.000,00	0,00	100,00
5.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.409.000,00	9.409.000,00	0,00	100,00
5.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.409.000,00	9.409.000,00	0,00	100,00
5.02.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.486.000,00	9.486.000,00	0,00	100,00
5.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.486.000,00	9.486.000,00	0,00	100,00
5.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.486.000,00	9.486.000,00	0,00	100,00
5.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.990.266.177,00	3.761.766.894,00	(228.499.283,00)	94,27
5.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.970.433.677,00	3.741.934.394,00	(228.499.283,00)	94,24
5.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.970.433.677,00	3.741.934.394,00	(228.499.283,00)	94,24
5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.970.433.677,00	3.741.934.394,00	(228.499.283,00)	94,24
5.02.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.832.500,00	19.832.500,00	0,00	100,00
5.02.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	19.832.500,00	19.832.500,00	0,00	100,00
5.02.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.832.500,00	19.832.500,00	0,00	100,00
5.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	203.078.500,00	180.958.500,00	(22.120.000,00)	89,11
5.02.01.2.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	151.953.500,00	132.228.500,00	(19.725.000,00)	87,02
5.02.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	151.953.500,00	132.228.500,00	(19.725.000,00)	87,02
5.02.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.953.500,00	132.228.500,00	(19.725.000,00)	87,02
5.02.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	51.125.000,00	48.730.000,00	(2.395.000,00)	95,32
5.02.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	51.125.000,00	48.730.000,00	(2.395.000,00)	95,32
5.02.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.125.000,00	48.730.000,00	(2.395.000,00)	95,32
5.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	859.975.600,00	853.440.254,00	(6.535.346,00)	99,24
5.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.028.000,00	15.028.000,00	0,00	100,00
5.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.452.000,00	10.452.000,00	0,00	100,00
5.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.452.000,00	10.452.000,00	0,00	100,00
5.02.01.2.06.0001	5.2	BELANJA MODAL	4.576.000,00	4.576.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.02.01.2.06.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.576.000,00	4.576.000,00	0,00	100,00
5.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	143.257.400,00	143.257.400,00	0,00	100,00
5.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	143.257.400,00	143.257.400,00	0,00	100,00
5.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.257.400,00	143.257.400,00	0,00	100,00
5.02.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.593.200,00	37.593.200,00	0,00	100,00
5.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	25.763.200,00	25.763.200,00	0,00	100,00
5.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.763.200,00	25.763.200,00	0,00	100,00
5.02.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	11.830.000,00	11.830.000,00	0,00	100,00
5.02.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.830.000,00	11.830.000,00	0,00	100,00
5.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	139.888.000,00	137.153.000,00	(2.735.000,00)	98,04
5.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	139.888.000,00	137.153.000,00	(2.735.000,00)	98,04
5.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.888.000,00	137.153.000,00	(2.735.000,00)	98,04
5.02.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000,00	1.350.000,00	(450.000,00)	75,00
5.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.350.000,00	(450.000,00)	75,00
5.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.350.000,00	(450.000,00)	75,00
5.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	522.409.000,00	519.058.654,00	(3.350.346,00)	99,36
5.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	522.409.000,00	519.058.654,00	(3.350.346,00)	99,36
5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	522.409.000,00	519.058.654,00	(3.350.346,00)	99,36
5.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	430.559.400,00	413.940.000,00	(16.619.400,00)	96,14
5.02.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	430.559.400,00	413.940.000,00	(16.619.400,00)	96,14
5.02.01.2.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	50.045.000,00	50.045.000,00	0,00	100,00
5.02.01.2.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.045.000,00	50.045.000,00	0,00	100,00
5.02.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	380.514.400,00	363.895.000,00	(16.619.400,00)	95,63
5.02.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	380.514.400,00	363.895.000,00	(16.619.400,00)	95,63
5.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	461.714.600,00	452.280.480,00	(9.434.120,00)	97,96
5.02.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.450.000,00	3.243.000,00	(2.207.000,00)	59,50
5.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.450.000,00	3.243.000,00	(2.207.000,00)	59,50
5.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	3.243.000,00	(2.207.000,00)	59,50
5.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.200.000,00	24.526.200,00	(6.673.800,00)	78,61
5.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	31.200.000,00	24.526.200,00	(6.673.800,00)	78,61
5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	24.526.200,00	(6.673.800,00)	78,61
5.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	425.064.600,00	424.511.280,00	(553.320,00)	99,87

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	425.064.600,00	424.511.280,00	(553.320,00)	99,87
5.02.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	205.680.000,00	205.680.000,00	0,00	100,00
5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.384.600,00	218.831.280,00	(553.320,00)	99,75
5.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365.405.275,00	273.010.033,00	(92.395.242,00)	74,71
5.02.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	278.167.275,00	221.292.333,00	(56.874.942,00)	79,55
5.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	278.167.275,00	221.292.333,00	(56.874.942,00)	79,55
5.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.167.275,00	221.292.333,00	(56.874.942,00)	79,55
5.02.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.256.000,00	27.587.700,00	(28.668.300,00)	49,04
5.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	56.256.000,00	27.587.700,00	(28.668.300,00)	49,04
5.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.256.000,00	27.587.700,00	(28.668.300,00)	49,04
5.02.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.982.000,00	24.130.000,00	(6.852.000,00)	77,88
5.02.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	30.982.000,00	24.130.000,00	(6.852.000,00)	77,88
5.02.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.982.000,00	24.130.000,00	(6.852.000,00)	77,88
		JUMLAH BELANJA	**219.142.436.712,00**	**218.170.281.431,00**	**(972.155.281,00)**	**99,56**
		SURPLUS DEFISIT	**958.710.026.888,00**	**895.270.638.221,77**	**(63.439.388.666,23)**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : Badan Pendapatan Daerah

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	4	**PENDAPATAN DAERAH**	**29.848.000.000,00**	**21.755.132.493,80**	**(8.092.867.506,20)**	**72,89**
	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	29.848.000.000,00	21.755.132.493,80	(8.092.867.506,20)	72,89
	4.1.01	Pajak Daerah	29.848.000.000,00	21.620.031.867,80	(8.227.968.132,20)	72,43
	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	135.100.626,00	135.100.626,00	∞
		JUMLAH PENDAPATAN	**29.848.000.000,00**	**21.755.132.493,80**	**(8.092.867.506,20)**	**72,89**
	5	**BELANJA DAERAH**	**5.812.922.637,00**	**5.594.222.030,00**	**(218.700.607,00)**	**96,24**
5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.339.996.330,00	1.337.303.764,00	(2.692.566,00)	99,80
5.02.04.2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.339.996.330,00	1.337.303.764,00	(2.692.566,00)	99,80
5.02.04.2.01.0001		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	70.000.000,00	69.943.000,00	(57.000,00)	99,92
5.02.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	69.943.000,00	(57.000,00)	99,92
5.02.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	69.943.000,00	(57.000,00)	99,92
5.02.04.2.01.0002		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	306.680.000,00	304.305.891,00	(2.374.109,00)	99,23
5.02.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	306.680.000,00	304.305.891,00	(2.374.109,00)	99,23
5.02.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.680.000,00	304.305.891,00	(2.374.109,00)	99,23
5.02.04.2.01.0005		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	187.701.800,00	187.518.400,00	(183.400,00)	99,90
5.02.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	187.701.800,00	187.518.400,00	(183.400,00)	99,90
5.02.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.701.800,00	187.518.400,00	(183.400,00)	99,90
5.02.04.2.01.0008		Penetapan Wajib Pajak Daerah	204.160.000,00	204.160.000,00	0,00	100,00
5.02.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	204.160.000,00	204.160.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.02.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.160.000,00	204.160.000,00	0,00	100,00
5.02.04.2.01.0011		Penagihan Pajak Daerah	315.700.280,00	315.644.223,00	(56.057,00)	99,98
5.02.04.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	315.700.280,00	315.644.223,00	(56.057,00)	99,98
5.02.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.700.280,00	315.644.223,00	(56.057,00)	99,98
5.02.04.2.01.0012		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	44.191.850,00	44.191.850,00	0,00	100,00
5.02.04.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	44.191.850,00	44.191.850,00	0,00	100,00
5.02.04.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.191.850,00	44.191.850,00	0,00	100,00
5.02.04.2.01.0013		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	83.242.400,00	83.222.400,00	(20.000,00)	99,98
5.02.04.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	83.242.400,00	83.222.400,00	(20.000,00)	99,98
5.02.04.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.242.400,00	83.222.400,00	(20.000,00)	99,98
5.02.04.2.01.0014		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	128.320.000,00	128.318.000,00	(2.000,00)	100,00
5.02.04.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	128.320.000,00	128.318.000,00	(2.000,00)	100,00
5.02.04.2.01.0014	5.1.01	Belanja Pegawai	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00
5.02.04.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.220.000,00	125.218.000,00	(2.000,00)	100,00
5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.472.926.307,00	4.256.918.266,00	(216.008.041,00)	95,17
5.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.144.500,00	5.142.500,00	(2.000,00)	99,96
5.02.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.144.500,00	5.142.500,00	(2.000,00)	99,96
5.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.144.500,00	5.142.500,00	(2.000,00)	99,96
5.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.144.500,00	5.142.500,00	(2.000,00)	99,96
5.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.324.814.067,00	3.123.915.872,00	(200.898.195,00)	93,96
5.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.324.814.067,00	3.123.915.872,00	(200.898.195,00)	93,96
5.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.324.814.067,00	3.123.915.872,00	(200.898.195,00)	93,96
5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.324.814.067,00	3.123.915.872,00	(200.898.195,00)	93,96
5.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	247.273.900,00	247.175.754,00	(98.146,00)	99,96
5.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.887.000,00	1.887.000,00	0,00	100,00
5.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.887.000,00	1.887.000,00	0,00	100,00
5.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.887.000,00	1.887.000,00	0,00	100,00
5.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.915.200,00	22.915.200,00	0,00	100,00
5.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.915.200,00	22.915.200,00	0,00	100,00
5.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.915.200,00	22.915.200,00	0,00	100,00
5.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.254.700,00	2.254.700,00	0,00	100,00
5.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.254.700,00	2.254.700,00	0,00	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.254.700,00	2.254.700,00	0,00	100,00
5.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.217.000,00	220.118.854,00	(98.146,00)	99,96
5.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	220.217.000,00	220.118.854,00	(98.146,00)	99,96
5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.217.000,00	220.118.854,00	(98.146,00)	99,96
5.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	672.700.763,00	657.785.763,00	(14.915.000,00)	97,78
5.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.985.000,00	15.301.660,00	(3.683.340,00)	80,60
5.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.985.000,00	15.301.660,00	(3.683.340,00)	80,60
5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.985.000,00	15.301.660,00	(3.683.340,00)	80,60
5.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	653.715.763,00	642.484.103,00	(11.231.660,00)	98,28
5.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	653.715.763,00	642.484.103,00	(11.231.660,00)	98,28
5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	653.715.763,00	642.484.103,00	(11.231.660,00)	98,28
5.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.993.077,00	222.898.377,00	(94.700,00)	99,96
5.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.543.077,00	112.470.577,00	(72.500,00)	99,94
5.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	112.543.077,00	112.470.577,00	(72.500,00)	99,94
5.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.543.077,00	112.470.577,00	(72.500,00)	99,94
5.02.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110.450.000,00	110.427.800,00	(22.200,00)	99,98
5.02.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	110.450.000,00	110.427.800,00	(22.200,00)	99,98
5.02.01.2.09.0010	5.1.01	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00
5.02.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.750.000,00	107.727.800,00	(22.200,00)	99,98
		JUMLAH BELANJA	**5.812.922.637,00**	**5.594.222.030,00**	**(218.700.607,00)**	**96,24**
		SURPLUS DEFISIT	**24.035.077.363,00**	**16.160.910.463,80**	**(7.874.166.899,20)**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEPEGAWAIAN
Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**4.199.133.664,00**	**3.349.656.827,00**	**(849.476.837,00)**	**79,77**
5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	885.452.000,00	505.114.640,00	(380.337.360,00)	57,05
5.03.02.2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	352.000.000,00	304.081.180,00	(47.918.820,00)	86,39
5.03.02.2.01.0003		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	352.000.000,00	304.081.180,00	(47.918.820,00)	86,39
5.03.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	352.000.000,00	304.081.180,00	(47.918.820,00)	86,39
5.03.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.000.000,00	304.081.180,00	(47.918.820,00)	86,39
5.03.02.2.02		Mutasi dan Promosi ASN	483.452.000,00	160.538.460,00	(322.913.540,00)	33,21
5.03.02.2.02.0001		Pengelolaan Mutasi ASN	483.452.000,00	160.538.460,00	(322.913.540,00)	33,21
5.03.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	483.452.000,00	160.538.460,00	(322.913.540,00)	33,21
5.03.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	483.452.000,00	160.538.460,00	(322.913.540,00)	33,21
5.03.02.2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	50.000.000,00	40.495.000,00	(9.505.000,00)	80,99
5.03.02.2.04.0008		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	50.000.000,00	40.495.000,00	(9.505.000,00)	80,99
5.03.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	40.495.000,00	(9.505.000,00)	80,99
5.03.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	40.495.000,00	(9.505.000,00)	80,99
5.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.313.681.664,00	2.844.542.187,00	(469.139.477,00)	85,84
5.03.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.497.373.824,00	2.189.160.489,00	(308.213.335,00)	87,66
5.03.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.497.373.824,00	2.189.160.489,00	(308.213.335,00)	87,66

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.497.373.824,00	2.189.160.489,00	(308.213.335,00)	87,66
5.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.497.373.824,00	2.189.160.489,00	(308.213.335,00)	87,66
5.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	657.657.000,00	506.541.988,00	(151.115.012,00)	77,02
5.03.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	7.507.800,00	(2.492.200,00)	75,08
5.03.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	7.507.800,00	(2.492.200,00)	75,08
5.03.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	7.507.800,00	(2.492.200,00)	75,08
5.03.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.140.600,00	121.684.750,00	(28.455.850,00)	81,05
5.03.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	150.140.600,00	121.684.750,00	(28.455.850,00)	81,05
5.03.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.140.600,00	121.684.750,00	(28.455.850,00)	81,05
5.03.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.962.400,00	22.756.350,00	(7.206.050,00)	75,95
5.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	29.962.400,00	22.756.350,00	(7.206.050,00)	75,95
5.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.962.400,00	22.756.350,00	(7.206.050,00)	75,95
5.03.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	467.554.000,00	354.593.088,00	(112.960.912,00)	75,84
5.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	467.554.000,00	354.593.088,00	(112.960.912,00)	75,84
5.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	467.554.000,00	354.593.088,00	(112.960.912,00)	75,84
5.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.753.840,00	96.158.635,00	(6.595.205,00)	93,58
5.03.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000,00	8.977.800,00	(6.022.200,00)	59,85
5.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	8.977.800,00	(6.022.200,00)	59,85
5.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	8.977.800,00	(6.022.200,00)	59,85
5.03.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.753.840,00	87.180.835,00	(573.005,00)	99,35
5.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	87.753.840,00	87.180.835,00	(573.005,00)	99,35
5.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.753.840,00	87.180.835,00	(573.005,00)	99,35
5.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.897.000,00	52.681.075,00	(3.215.925,00)	94,25
5.03.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.997.000,00	43.017.075,00	(2.979.925,00)	93,52
5.03.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	45.997.000,00	43.017.075,00	(2.979.925,00)	93,52
5.03.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.997.000,00	43.017.075,00	(2.979.925,00)	93,52
5.03.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.900.000,00	9.664.000,00	(236.000,00)	97,62
5.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.900.000,00	9.664.000,00	(236.000,00)	97,62
5.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	9.664.000,00	(236.000,00)	97,62

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
		JUMLAH BELANJA	4.199.133.664,00	3.349.656.827,00	(849.476.837,00)	79,77
		SURPLUS DEFISIT	(4.199.133.664,00)	(3.349.656.827,00)	849.476.837,00	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN MAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**349.787.000,00**	**290.303.182,00**	**(59.483.818,00)**	**82,99**
5.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	349.787.000,00	290.303.182,00	(59.483.818,00)	82,99
5.04.02.2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	134.787.000,00	113.162.000,00	(21.625.000,00)	83,96
5.04.02.2.01.0003		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	134.787.000,00	113.162.000,00	(21.625.000,00)	83,96
5.04.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	134.787.000,00	113.162.000,00	(21.625.000,00)	83,96
5.04.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.787.000,00	113.162.000,00	(21.625.000,00)	83,96
5.04.02.2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	215.000.000,00	177.141.182,00	(37.858.818,00)	82,39
5.04.02.2.02.0005		Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	200.000.000,00	162.672.182,00	(37.327.818,00)	81,34
5.04.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	162.672.182,00	(37.327.818,00)	81,34
5.04.02.2.02.0005	5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	162.672.182,00	(37.327.818,00)	81,34
5.04.02.2.02.0007		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	15.000.000,00	14.469.000,00	(531.000,00)	96,46
5.04.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.469.000,00	(531.000,00)	96,46
5.04.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.469.000,00	(531.000,00)	96,46
		JUMLAH BELANJA	**349.787.000,00**	**290.303.182,00**	**(59.483.818,00)**	**82,99**

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
		SURPLUS DEFISIT	(349.787.000,00)	(290.303.182,00)	59.483.818,00	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : Sekretariat DPRD

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**46.538.447.846,00**	**43.174.129.197,00**	**(3.364.318.649,00)**	**92,77**
4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	18.396.169.000,00	16.781.578.669,00	(1.614.590.331,00)	91,22
4.02.02.2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.682.000,00	0,00	(1.682.000,00)	0,00
4.02.02.2.01.0002		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.682.000,00	0,00	(1.682.000,00)	0,00
4.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.682.000,00	0,00	(1.682.000,00)	0,00
4.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.682.000,00	0,00	(1.682.000,00)	0,00
4.02.02.2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	17.412.037.000,00	16.122.088.669,00	(1.289.948.331,00)	92,59
4.02.02.2.04.0001		Orientasi DPRD	14.552.940.000,00	14.261.454.069,00	(291.485.931,00)	98,00
4.02.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.552.940.000,00	14.261.454.069,00	(291.485.931,00)	98,00
4.02.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.552.940.000,00	14.261.454.069,00	(291.485.931,00)	98,00
4.02.02.2.04.0002		Pendalaman Tugas DPRD	2.826.312.000,00	1.842.079.600,00	(984.232.400,00)	65,18
4.02.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.826.312.000,00	1.842.079.600,00	(984.232.400,00)	65,18
4.02.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.826.312.000,00	1.842.079.600,00	(984.232.400,00)	65,18
4.02.02.2.04.0008		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	32.785.000,00	18.555.000,00	(14.230.000,00)	56,60
4.02.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	32.785.000,00	18.555.000,00	(14.230.000,00)	56,60
4.02.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.785.000,00	18.555.000,00	(14.230.000,00)	56,60
4.02.02.2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	982.450.000,00	659.490.000,00	(322.960.000,00)	67,13
4.02.02.2.05.0001		Kunjungan Kerja dalam Daerah	90.000.000,00	13.030.000,00	(76.970.000,00)	14,48
4.02.02.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	13.030.000,00	(76.970.000,00)	14,48
4.02.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	13.030.000,00	(76.970.000,00)	14,48

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.02.02.2.05.0003		Pelaksanaan Reses	892.450.000,00	646.460.000,00	(245.990.000,00)	72,44
4.02.02.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	892.450.000,00	646.460.000,00	(245.990.000,00)	72,44
4.02.02.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	892.450.000,00	646.460.000,00	(245.990.000,00)	72,44
4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.142.278.846,00	26.392.550.528,00	(1.749.728.318,00)	93,78
4.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.741.000,00	19.653.500,00	(87.500,00)	99,56
4.02.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.444.000,00	6.444.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.444.000,00	6.444.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.444.000,00	6.444.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.297.000,00	13.209.500,00	(87.500,00)	99,34
4.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.297.000,00	13.209.500,00	(87.500,00)	99,34
4.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.297.000,00	13.209.500,00	(87.500,00)	99,34
4.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.791.472.405,00	2.548.914.909,00	(242.557.496,00)	91,31
4.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.791.472.405,00	2.548.914.909,00	(242.557.496,00)	91,31
4.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.791.472.405,00	2.548.914.909,00	(242.557.496,00)	91,31
4.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.791.472.405,00	2.548.914.909,00	(242.557.496,00)	91,31
4.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.100.831.500,00	934.160.080,00	(166.671.420,00)	84,86
4.02.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	748.376.500,00	729.252.500,00	(19.124.000,00)	97,44
4.02.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	748.376.500,00	729.252.500,00	(19.124.000,00)	97,44
4.02.01.2.05.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	736.676.500,00	717.552.500,00	(19.124.000,00)	97,40
4.02.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	352.455.000,00	204.907.580,00	(147.547.420,00)	58,14
4.02.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	352.455.000,00	204.907.580,00	(147.547.420,00)	58,14
4.02.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.455.000,00	204.907.580,00	(147.547.420,00)	58,14
4.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.110.093.814,00	4.062.830.585,00	(47.263.229,00)	98,85
4.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	85.646.300,00	73.976.300,00	(11.670.000,00)	86,37
4.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	85.646.300,00	73.976.300,00	(11.670.000,00)	86,37
4.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.646.300,00	73.976.300,00	(11.670.000,00)	86,37
4.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	164.202.514,00	160.008.200,00	(4.194.314,00)	97,45
4.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	164.202.514,00	160.008.200,00	(4.194.314,00)	97,45
4.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.202.514,00	160.008.200,00	(4.194.314,00)	97,45
4.02.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.838.645.000,00	3.807.246.085,00	(31.398.915,00)	99,18
4.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	3.838.645.000,00	3.807.246.085,00	(31.398.915,00)	99,18
4.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.838.645.000,00	3.807.246.085,00	(31.398.915,00)	99,18
4.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	585.048.320,00	529.900.000,00	(55.148.320,00)	90,57
4.02.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	289.966.620,00	285.880.000,00	(4.086.620,00)	98,59
4.02.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	289.966.620,00	285.880.000,00	(4.086.620,00)	98,59
4.02.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	289.966.620,00	285.880.000,00	(4.086.620,00)	98,59
4.02.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	295.081.700,00	244.020.000,00	(51.061.700,00)	82,70
4.02.01.2.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	64.887.500,00	64.520.000,00	(367.500,00)	99,43
4.02.01.2.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.887.500,00	64.520.000,00	(367.500,00)	99,43
4.02.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	230.194.200,00	179.500.000,00	(50.694.200,00)	77,98
4.02.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	230.194.200,00	179.500.000,00	(50.694.200,00)	77,98
4.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.660.838.212,00	1.568.516.109,00	(92.322.103,00)	94,44
4.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.730.000,00	68.792.664,00	(40.937.336,00)	62,69
4.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	109.730.000,00	68.792.664,00	(40.937.336,00)	62,69
4.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.730.000,00	68.792.664,00	(40.937.336,00)	62,69
4.02.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	176.919.600,00	140.371.200,00	(36.548.400,00)	79,34
4.02.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	176.919.600,00	140.371.200,00	(36.548.400,00)	79,34
4.02.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.919.600,00	140.371.200,00	(36.548.400,00)	79,34
4.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.374.188.612,00	1.359.352.245,00	(14.836.367,00)	98,92
4.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.374.188.612,00	1.359.352.245,00	(14.836.367,00)	98,92
4.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.374.188.612,00	1.359.352.245,00	(14.836.367,00)	98,92
4.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	888.355.539,00	681.309.385,00	(207.046.154,00)	76,69
4.02.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	690.355.539,00	483.489.385,00	(206.866.154,00)	70,03
4.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	690.355.539,00	483.489.385,00	(206.866.154,00)	70,03
4.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	690.355.539,00	483.489.385,00	(206.866.154,00)	70,03
4.02.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.000.000,00	197.820.000,00	(180.000,00)	99,91
4.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	7.802.000,00	7.720.000,00	(82.000,00)	98,95
4.02.01.2.09.0009	5.1.01	Belanja Pegawai	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.602.000,00	1.520.000,00	(82.000,00)	94,88
4.02.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	190.198.000,00	190.100.000,00	(98.000,00)	99,95
4.02.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	190.198.000,00	190.100.000,00	(98.000,00)	99,95
4.02.01.2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	15.905.898.056,00	15.004.765.960,00	(901.132.096,00)	94,33
4.02.01.2.15.0001		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	15.695.898.056,00	14.896.765.960,00	(799.132.096,00)	94,91
4.02.01.2.15.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.695.898.056,00	14.896.765.960,00	(799.132.096,00)	94,91
4.02.01.2.15.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	15.695.898.056,00	14.896.765.960,00	(799.132.096,00)	94,91
4.02.01.2.15.0003		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	210.000.000,00	108.000.000,00	(102.000.000,00)	51,43
4.02.01.2.15.0003	5.1	BELANJA OPERASI	210.000.000,00	108.000.000,00	(102.000.000,00)	51,43
4.02.01.2.15.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	108.000.000,00	(102.000.000,00)	51,43
4.02.01.2.16		Layanan Administrasi DPRD	1.080.000.000,00	1.042.500.000,00	(37.500.000,00)	96,53
4.02.01.2.16.0004		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.080.000.000,00	1.042.500.000,00	(37.500.000,00)	96,53
4.02.01.2.16.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.080.000.000,00	1.042.500.000,00	(37.500.000,00)	96,53
4.02.01.2.16.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000.000,00	1.042.500.000,00	(37.500.000,00)	96,53
		JUMLAH BELANJA	**46.538.447.846,00**	**43.174.129.197,00**	**(3.364.318.649,00)**	**92,77**
		SURPLUS DEFISIT	**(46.538.447.846,00)**	**(43.174.129.197,00)**	**3.364.318.649,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Sidikalang

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**7.096.273.502,00**	**6.833.672.351,00**	**(262.601.151,00)**	**96,30**
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.094.684.050,00	1.081.297.800,00	(13.386.250,00)	98,78
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.860.000,00	12.860.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.081.824.050,00	1.068.437.800,00	(13.386.250,00)	98,76
7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.275.400,00	2.275.400,00	0,00	100,00
7.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.275.400,00	2.275.400,00	0,00	100,00
7.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.275.400,00	2.275.400,00	0,00	100,00
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.079.548.650,00	1.066.162.400,00	(13.386.250,00)	98,76
7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.078.644.050,00	1.065.257.800,00	(13.386.250,00)	98,76
7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.078.644.050,00	1.065.257.800,00	(13.386.250,00)	98,76
7.01.03.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	904.600,00	904.600,00	0,00	100,00
7.01.03.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	904.600,00	904.600,00	0,00	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	113.302.800,00	113.300.040,00	(2.760,00)	100,00
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	113.302.800,00	113.300.040,00	(2.760,00)	100,00
7.01.05.2.01.0003		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	52.906.800,00	52.906.540,00	(260,00)	100,00
7.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	52.906.800,00	52.906.540,00	(260,00)	100,00
7.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.906.800,00	52.906.540,00	(260,00)	100,00
7.01.05.2.01.0004		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60.396.000,00	60.393.500,00	(2.500,00)	100,00
7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	60.396.000,00	60.393.500,00	(2.500,00)	100,00
7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.396.000,00	60.393.500,00	(2.500,00)	100,00
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.492.400,00	5.492.400,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.492.400,00	5.492.400,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0001		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.452.400,00	3.452.400,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.452.400,00	3.452.400,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.452.400,00	3.452.400,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0002		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.882.794.252,00	5.633.582.111,00	(249.212.141,00)	95,76
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.656.046.516,00	4.444.212.048,00	(211.834.468,00)	95,45
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.656.046.516,00	4.444.212.048,00	(211.834.468,00)	95,45
7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.656.046.516,00	4.444.212.048,00	(211.834.468,00)	95,45
7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.656.046.516,00	4.444.212.048,00	(211.834.468,00)	95,45
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	344.824.680,00	314.579.500,00	(30.245.180,00)	91,23
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.731.900,00	12.154.100,00	(577.800,00)	95,46
7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.731.900,00	12.154.100,00	(577.800,00)	95,46
7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.731.900,00	12.154.100,00	(577.800,00)	95,46
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.194.780,00	107.233.800,00	(960.980,00)	99,11
7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	108.194.780,00	107.233.800,00	(960.980,00)	99,11
7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.194.780,00	107.233.800,00	(960.980,00)	99,11
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	62.948.000,00	62.879.600,00	(68.400,00)	99,89
7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	62.948.000,00	62.879.600,00	(68.400,00)	99,89

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.948.000,00	62.879.600,00	(68.400,00)	99,89
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.950.000,00	132.312.000,00	(28.638.000,00)	82,21
7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	160.950.000,00	132.312.000,00	(28.638.000,00)	82,21
7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.950.000,00	132.312.000,00	(28.638.000,00)	82,21
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	799.795.056,00	793.365.963,00	(6.429.093,00)	99,20
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.500.000,00	21.070.907,00	(6.429.093,00)	76,62
7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.500.000,00	21.070.907,00	(6.429.093,00)	76,62
7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	21.070.907,00	(6.429.093,00)	76,62
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	772.295.056,00	772.295.056,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	772.295.056,00	772.295.056,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	772.295.056,00	772.295.056,00	0,00	100,00
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.128.000,00	81.424.600,00	(703.400,00)	99,14
7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.470.000,00	33.467.000,00	(3.000,00)	99,99
7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.470.000,00	33.467.000,00	(3.000,00)	99,99
7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.470.000,00	33.467.000,00	(3.000,00)	99,99
7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.108.000,00	28.107.800,00	(200,00)	100,00
7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	28.108.000,00	28.107.800,00	(200,00)	100,00
7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.108.000,00	28.107.800,00	(200,00)	100,00
7.01.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.550.000,00	19.849.800,00	(700.200,00)	96,59
7.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	20.550.000,00	19.849.800,00	(700.200,00)	96,59
7.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.550.000,00	19.849.800,00	(700.200,00)	96,59
		JUMLAH BELANJA	**7.096.273.502,00**	**6.833.672.351,00**	**(262.601.151,00)**	**96,30**
		SURPLUS DEFISIT	**(7.096.273.502,00)**	**(6.833.672.351,00)**	**262.601.151,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : Kecamatan Sidikalang

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
6.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
6.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
6.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
6.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
		JUMLAH BELANJA	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
		SURPLUS DEFISIT	**(1.500.000,00)**	**(1.500.000,00)**	**-**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Sumbul

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**3.034.229.335,00**	**2.860.115.733,00**	**(174.113.602,00)**	**94,26**
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	249.963.400,00	241.605.400,00	(8.358.000,00)	96,66
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	49.963.400,00	46.103.400,00	(3.860.000,00)	92,27
7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.764.800,00	9.764.800,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.764.800,00	9.764.800,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.764.800,00	9.764.800,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.198.600,00	36.338.600,00	(3.860.000,00)	90,40
7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	40.198.600,00	36.338.600,00	(3.860.000,00)	90,40
7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.198.600,00	36.338.600,00	(3.860.000,00)	90,40
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.000.000,00	195.502.000,00	(4.498.000,00)	97,75
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000,00	195.502.000,00	(4.498.000,00)	97,75
7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	195.502.000,00	(4.498.000,00)	97,75
7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	195.502.000,00	(4.498.000,00)	97,75
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	75.846.800,00	75.846.800,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	75.846.800,00	75.846.800,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0003		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	49.981.800,00	49.981.800,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	49.981.800,00	49.981.800,00	0,00	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.981.800,00	49.981.800,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0004		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25.865.000,00	25.865.000,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	25.865.000,00	25.865.000,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.865.000,00	25.865.000,00	0,00	100,00
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.407.350,00	9.347.350,00	(60.000,00)	99,36
7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.407.350,00	9.347.350,00	(60.000,00)	99,36
7.01.06.2.01.0001		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.837.350,00	4.837.350,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.837.350,00	4.837.350,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.837.350,00	4.837.350,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0002		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.570.000,00	4.510.000,00	(60.000,00)	98,69
7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.570.000,00	4.510.000,00	(60.000,00)	98,69
7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.570.000,00	4.510.000,00	(60.000,00)	98,69
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.699.011.785,00	2.533.316.183,00	(165.695.602,00)	93,86
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.282.538.439,00	2.117.428.732,00	(165.109.707,00)	92,77
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.282.538.439,00	2.117.428.732,00	(165.109.707,00)	92,77
7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.282.538.439,00	2.117.428.732,00	(165.109.707,00)	92,77
7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.282.538.439,00	2.117.428.732,00	(165.109.707,00)	92,77
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.522.566,00	149.492.279,00	(30.287,00)	99,98
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.428.800,00	2.428.800,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.428.800,00	2.428.800,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.428.800,00	2.428.800,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.648.716,00	37.648.429,00	(287,00)	100,00
7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	37.648.716,00	37.648.429,00	(287,00)	100,00
7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.648.716,00	37.648.429,00	(287,00)	100,00
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.935.050,00	3.935.050,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.935.050,00	3.935.050,00	0,00	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.935.050,00	3.935.050,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.510.000,00	105.480.000,00	(30.000,00)	99,97
7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	105.510.000,00	105.480.000,00	(30.000,00)	99,97
7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.510.000,00	105.480.000,00	(30.000,00)	99,97
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.835.780,00	216.416.585,00	(419.195,00)	99,81
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.982.500,00	13.710.845,00	(271.655,00)	98,06
7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.982.500,00	13.710.845,00	(271.655,00)	98,06
7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.982.500,00	13.710.845,00	(271.655,00)	98,06
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202.853.280,00	202.705.740,00	(147.540,00)	99,93
7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	202.853.280,00	202.705.740,00	(147.540,00)	99,93
7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.853.280,00	202.705.740,00	(147.540,00)	99,93
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.735.000,00	46.598.587,00	(136.413,00)	99,71
7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.005.000,00	44.868.587,00	(136.413,00)	99,70
7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	45.005.000,00	44.868.587,00	(136.413,00)	99,70
7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.005.000,00	44.868.587,00	(136.413,00)	99,70
7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	100,00
		JUMLAH BELANJA	**3.034.229.335,00**	**2.860.115.733,00**	**(174.113.602,00)**	**94,26**
		SURPLUS DEFISIT	**(3.034.229.335,00)**	**(2.860.115.733,00)**	**174.113.602,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Silima Pungga pungga

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**3.017.501.447,00**	**2.820.154.412,00**	**(197.347.035,00)**	**93,46**
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	235.068.500,00	233.888.500,00	(1.180.000,00)	99,50
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	34.590.500,00	34.530.500,00	(60.000,00)	99,83
7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.090.500,00	27.030.500,00	(60.000,00)	99,78
7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	27.090.500,00	27.030.500,00	(60.000,00)	99,78
7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.090.500,00	27.030.500,00	(60.000,00)	99,78
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.478.000,00	199.358.000,00	(1.120.000,00)	99,44
7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.288.800,00	6.288.800,00	0,00	100,00
7.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.288.800,00	6.288.800,00	0,00	100,00
7.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.288.800,00	6.288.800,00	0,00	100,00
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	68.111.000,00	66.991.000,00	(1.120.000,00)	98,36
7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.511.000,00	8.391.000,00	(1.120.000,00)	88,22
7.01.03.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.461.000,00	6.341.000,00	(1.120.000,00)	84,99

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01.03.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	58.600.000,00	58.600.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.02.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.600.000,00	58.600.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	126.078.200,00	126.078.200,00	0,00	100,00
7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	126.078.200,00	126.078.200,00	0,00	100,00
7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.078.200,00	126.078.200,00	0,00	100,00
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	76.992.300,00	76.992.300,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	76.992.300,00	76.992.300,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0003		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	34.090.300,00	34.090.300,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	34.090.300,00	34.090.300,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.090.300,00	34.090.300,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0004		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	42.902.000,00	42.902.000,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	42.902.000,00	42.902.000,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.902.000,00	42.902.000,00	0,00	100,00
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	24.228.000,00	24.148.000,00	(80.000,00)	99,67
7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24.228.000,00	24.148.000,00	(80.000,00)	99,67
7.01.06.2.01.0001		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.775.000,00	7.735.000,00	(40.000,00)	99,49
7.01.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.775.000,00	7.735.000,00	(40.000,00)	99,49
7.01.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.775.000,00	7.735.000,00	(40.000,00)	99,49
7.01.06.2.01.0002		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16.453.000,00	16.413.000,00	(40.000,00)	99,76
7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.453.000,00	16.413.000,00	(40.000,00)	99,76
7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.453.000,00	16.413.000,00	(40.000,00)	99,76
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.681.212.647,00	2.485.125.612,00	(196.087.035,00)	92,69
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.389.000,00	4.389.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.219.000,00	2.219.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.219.000,00	2.219.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.219.000,00	2.219.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.258.289.707,00	2.072.505.312,00	(185.784.395,00)	91,77
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.258.289.707,00	2.072.505.312,00	(185.784.395,00)	91,77
7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.258.289.707,00	2.072.505.312,00	(185.784.395,00)	91,77
7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.258.289.707,00	2.072.505.312,00	(185.784.395,00)	91,77
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.312.943,00	161.207.250,00	(105.693,00)	99,93
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.665.000,00	12.651.900,00	(13.100,00)	99,90
7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.665.000,00	12.651.900,00	(13.100,00)	99,90
7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.665.000,00	12.651.900,00	(13.100,00)	99,90
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.001.400,00	43.001.200,00	(200,00)	100,00
7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	43.001.400,00	43.001.200,00	(200,00)	100,00
7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.001.400,00	43.001.200,00	(200,00)	100,00
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.196.543,00	24.196.150,00	(393,00)	100,00
7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	24.196.543,00	24.196.150,00	(393,00)	100,00
7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.196.543,00	24.196.150,00	(393,00)	100,00
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.450.000,00	81.358.000,00	(92.000,00)	99,89
7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	81.450.000,00	81.358.000,00	(92.000,00)	99,89
7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.450.000,00	81.358.000,00	(92.000,00)	99,89
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.212.700,00	6.170.000,00	(42.700,00)	99,31
7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	2.925.000,00	2.920.000,00	(5.000,00)	99,83
7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	2.925.000,00	2.920.000,00	(5.000,00)	99,83
7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.925.000,00	2.920.000,00	(5.000,00)	99,83
7.01.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.287.700,00	3.250.000,00	(37.700,00)	98,85
7.01.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	3.287.700,00	3.250.000,00	(37.700,00)	98,85
7.01.01.2.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.287.700,00	3.250.000,00	(37.700,00)	98,85
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.606.600,00	189.761.800,00	(8.844.800,00)	95,55
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.040.000,00	11.761.800,00	(1.278.200,00)	90,20
7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.040.000,00	11.761.800,00	(1.278.200,00)	90,20
7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.040.000,00	11.761.800,00	(1.278.200,00)	90,20

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.566.600,00	174.000.000,00	(7.566.600,00)	95,83
7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	181.566.600,00	174.000.000,00	(7.566.600,00)	95,83
7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.566.600,00	174.000.000,00	(7.566.600,00)	95,83
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.401.697,00	51.092.250,00	(1.309.447,00)	97,50
7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.871.697,00	47.562.250,00	(1.309.447,00)	97,32
7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	48.871.697,00	47.562.250,00	(1.309.447,00)	97,32
7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.871.697,00	47.562.250,00	(1.309.447,00)	97,32
7.01.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	100,00
		JUMLAH BELANJA	**3.017.501.447,00**	**2.820.154.412,00**	**(197.347.035,00)**	**93,46**
		SURPLUS DEFISIT	**(3.017.501.447,00)**	**(2.820.154.412,00)**	**197.347.035,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Siempat Nempu

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**2.176.974.722,00**	**1.984.224.003,00**	**(192.750.719,00)**	**91,15**
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	28.980.000,00	28.980.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	28.980.000,00	28.980.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.980.000,00	14.980.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.980.000,00	14.980.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.980.000,00	14.980.000,00	0,00	100,00
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	188.918.768,00	188.853.768,00	(65.000,00)	99,97
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	188.918.768,00	188.853.768,00	(65.000,00)	99,97
7.01.05.2.01.0003		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	88.603.768,00	88.603.768,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	88.603.768,00	88.603.768,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.603.768,00	88.603.768,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0004		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100.315.000,00	100.250.000,00	(65.000,00)	99,94
7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	100.315.000,00	100.250.000,00	(65.000,00)	99,94
7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.315.000,00	100.250.000,00	(65.000,00)	99,94

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.080.000,00	11.560.000,00	(520.000,00)	95,70
7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.080.000,00	11.560.000,00	(520.000,00)	95,70
7.01.06.2.01.0001		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.780.000,00	4.700.000,00	(80.000,00)	98,33
7.01.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.780.000,00	4.700.000,00	(80.000,00)	98,33
7.01.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.780.000,00	4.700.000,00	(80.000,00)	98,33
7.01.06.2.01.0002		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.300.000,00	6.860.000,00	(440.000,00)	93,97
7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.300.000,00	6.860.000,00	(440.000,00)	93,97
7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	6.860.000,00	(440.000,00)	93,97
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.946.995.954,00	1.754.830.235,00	(192.165.719,00)	90,13
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.930.000,00	8.850.000,00	(80.000,00)	99,10
7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.650.000,00	1.630.000,00	(20.000,00)	98,79
7.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.650.000,00	1.630.000,00	(20.000,00)	98,79
7.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.630.000,00	(20.000,00)	98,79
7.01.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.650.000,00	1.630.000,00	(20.000,00)	98,79
7.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.650.000,00	1.630.000,00	(20.000,00)	98,79
7.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.630.000,00	(20.000,00)	98,79
7.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.300.000,00	3.260.000,00	(40.000,00)	98,79
7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.300.000,00	3.260.000,00	(40.000,00)	98,79
7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.260.000,00	(40.000,00)	98,79
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.578.928.430,00	1.404.505.868,00	(174.422.562,00)	88,95
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.578.928.430,00	1.404.505.868,00	(174.422.562,00)	88,95
7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.578.928.430,00	1.404.505.868,00	(174.422.562,00)	88,95
7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.578.928.430,00	1.404.505.868,00	(174.422.562,00)	88,95
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.625.983,00	138.565.850,00	(10.060.133,00)	93,23
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.537.700,00	8.537.700,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.537.700,00	8.537.700,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.537.700,00	8.537.700,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.879.200,00	48.878.400,00	(800,00)	100,00
7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	48.879.200,00	48.878.400,00	(800,00)	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.879.200,00	48.878.400,00	(800,00)	100,00
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.389.083,00	20.358.750,00	(30.333,00)	99,85
7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	20.389.083,00	20.358.750,00	(30.333,00)	99,85
7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.389.083,00	20.358.750,00	(30.333,00)	99,85
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.820.000,00	60.791.000,00	(10.029.000,00)	85,84
7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	70.820.000,00	60.791.000,00	(10.029.000,00)	85,84
7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.820.000,00	60.791.000,00	(10.029.000,00)	85,84
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.239.960,00	71.735.732,00	(5.504.228,00)	92,87
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.500.000,00	6.043.217,00	(5.456.783,00)	52,55
7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.500.000,00	6.043.217,00	(5.456.783,00)	52,55
7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	6.043.217,00	(5.456.783,00)	52,55
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.739.960,00	65.692.515,00	(47.445,00)	99,93
7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	65.739.960,00	65.692.515,00	(47.445,00)	99,93
7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.739.960,00	65.692.515,00	(47.445,00)	99,93
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.271.581,00	131.172.785,00	(2.098.796,00)	98,43
7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.271.581,00	41.172.785,00	(2.098.796,00)	95,15
7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	43.271.581,00	41.172.785,00	(2.098.796,00)	95,15
7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.271.581,00	41.172.785,00	(2.098.796,00)	95,15
7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00
		JUMLAH BELANJA	**2.176.974.722,00**	**1.984.224.003,00**	**(192.750.719,00)**	**91,15**
		SURPLUS DEFISIT	**(2.176.974.722,00)**	**(1.984.224.003,00)**	**192.750.719,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Tigalingga

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**2.008.400.323,00**	**1.781.976.461,00**	**(226.423.862,00)**	**88,73**
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	68.571.200,00	53.082.000,00	(15.489.200,00)	77,41
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	68.571.200,00	53.082.000,00	(15.489.200,00)	77,41
7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	47.171.200,00	31.682.000,00	(15.489.200,00)	67,16
7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	31.732.000,00	31.682.000,00	(50.000,00)	99,84
7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.732.000,00	31.682.000,00	(50.000,00)	99,84
7.01.03.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	15.439.200,00	0,00	(15.439.200,00)	0,00
7.01.03.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.439.200,00	0,00	(15.439.200,00)	0,00
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	74.041.800,00	65.806.000,00	(8.235.800,00)	88,88
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	74.041.800,00	65.806.000,00	(8.235.800,00)	88,88
7.01.05.2.01.0003		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	43.750.000,00	43.750.000,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	43.750.000,00	43.750.000,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.750.000,00	43.750.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01.05.2.01.0004		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30.291.800,00	22.056.000,00	(8.235.800,00)	72,81
7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	30.291.800,00	22.056.000,00	(8.235.800,00)	72,81
7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.291.800,00	22.056.000,00	(8.235.800,00)	72,81
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	37.801.200,00	37.801.200,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	37.801.200,00	37.801.200,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0001		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16.078.000,00	16.078.000,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.078.000,00	16.078.000,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.078.000,00	16.078.000,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0002		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21.723.200,00	21.723.200,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.723.200,00	21.723.200,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.723.200,00	21.723.200,00	0,00	100,00
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.827.986.123,00	1.625.287.261,00	(202.698.862,00)	88,91
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.207.000,00	9.207.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.527.000,00	3.527.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.527.000,00	3.527.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.527.000,00	3.527.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.680.000,00	5.680.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.680.000,00	5.680.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.680.000,00	5.680.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.514.209.427,00	1.327.064.606,00	(187.144.821,00)	87,64
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.514.209.427,00	1.327.064.606,00	(187.144.821,00)	87,64
7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.514.209.427,00	1.327.064.606,00	(187.144.821,00)	87,64
7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.514.209.427,00	1.327.064.606,00	(187.144.821,00)	87,64
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.925.360,00	113.932.000,00	(6.993.360,00)	94,22
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.027.000,00	4.964.000,00	(63.000,00)	98,75
7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.027.000,00	4.964.000,00	(63.000,00)	98,75
7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.027.000,00	4.964.000,00	(63.000,00)	98,75
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.794.160,00	37.778.800,00	(15.360,00)	99,96
7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	37.794.160,00	37.778.800,00	(15.360,00)	99,96

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.794.160,00	37.778.800,00	(15.360,00)	99,96
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.874.200,00	14.874.200,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	14.874.200,00	14.874.200,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.874.200,00	14.874.200,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.230.000,00	56.315.000,00	(6.915.000,00)	89,06
7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	63.230.000,00	56.315.000,00	(6.915.000,00)	89,06
7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.230.000,00	56.315.000,00	(6.915.000,00)	89,06
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.425.969,00	28.236.000,00	(189.969,00)	99,33
7.01.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.989.969,00	20.800.000,00	(189.969,00)	99,09
7.01.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	20.989.969,00	20.800.000,00	(189.969,00)	99,09
7.01.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.989.969,00	20.800.000,00	(189.969,00)	99,09
7.01.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.436.000,00	7.436.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	7.436.000,00	7.436.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.436.000,00	7.436.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.193.840,00	89.458.670,00	(7.735.170,00)	92,04
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.440.000,00	5.858.670,00	(1.581.330,00)	78,75
7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.440.000,00	5.858.670,00	(1.581.330,00)	78,75
7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.440.000,00	5.858.670,00	(1.581.330,00)	78,75
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.753.840,00	81.600.000,00	(6.153.840,00)	92,99
7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	87.753.840,00	81.600.000,00	(6.153.840,00)	92,99
7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.753.840,00	81.600.000,00	(6.153.840,00)	92,99
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.024.527,00	57.388.985,00	(635.542,00)	98,90
7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.004.527,00	37.468.985,00	(535.542,00)	98,59
7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.004.527,00	37.468.985,00	(535.542,00)	98,59
7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.004.527,00	37.468.985,00	(535.542,00)	98,59
7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.100.000,00	17.000.000,00	(100.000,00)	99,42

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	17.100.000,00	17.000.000,00	(100.000,00)	99,42
7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	17.000.000,00	(100.000,00)	99,42
7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	100,00
		JUMLAH BELANJA	**2.008.400.323,00**	**1.781.976.461,00**	**(226.423.862,00)**	**88,73**
		SURPLUS DEFISIT	**(2.008.400.323,00)**	**(1.781.976.461,00)**	**226.423.862,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Tanah Pinem

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**2.001.538.191,00**	**1.796.032.254,00**	**(205.505.937,00)**	**89,73**
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40.560.000,00	40.500.000,00	(60.000,00)	99,85
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	40.560.000,00	40.500.000,00	(60.000,00)	99,85
7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18.970.000,00	18.970.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.970.000,00	18.970.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.970.000,00	18.970.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.590.000,00	21.530.000,00	(60.000,00)	99,72
7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	21.590.000,00	21.530.000,00	(60.000,00)	99,72
7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.590.000,00	21.530.000,00	(60.000,00)	99,72
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	91.551.000,00	91.551.000,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	91.551.000,00	91.551.000,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0003		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	15.116.000,00	15.116.000,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.116.000,00	15.116.000,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.116.000,00	15.116.000,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0004		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	76.435.000,00	76.435.000,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	76.435.000,00	76.435.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.435.000,00	76.435.000,00	0,00	100,00
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.165.000,00	28.165.000,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.165.000,00	28.165.000,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0001		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	15.605.000,00	15.605.000,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.605.000,00	15.605.000,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.605.000,00	15.605.000,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0002		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.560.000,00	12.560.000,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.560.000,00	12.560.000,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.560.000,00	12.560.000,00	0,00	100,00
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.841.262.191,00	1.635.816.254,00	(205.445.937,00)	88,84
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.352.000,00	6.352.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.176.000,00	3.176.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.176.000,00	3.176.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.176.000,00	3.176.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.176.000,00	3.176.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.176.000,00	3.176.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.176.000,00	3.176.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.430.877.295,00	1.236.418.686,00	(194.458.609,00)	86,41
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.430.877.295,00	1.236.418.686,00	(194.458.609,00)	86,41
7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.430.877.295,00	1.236.418.686,00	(194.458.609,00)	86,41
7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.430.877.295,00	1.236.418.686,00	(194.458.609,00)	86,41
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.596.205,00	219.125.031,00	(9.471.174,00)	95,86
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.597.800,00	5.597.800,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.597.800,00	5.597.800,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.597.800,00	5.597.800,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.278.705,00	31.278.105,00	(600,00)	100,00
7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	31.278.705,00	31.278.105,00	(600,00)	100,00
7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.278.705,00	31.278.105,00	(600,00)	100,00
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.113.700,00	20.113.700,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	20.113.700,00	20.113.700,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.113.700,00	20.113.700,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.606.000,00	162.135.426,00	(9.470.574,00)	94,48

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	171.606.000,00	162.135.426,00	(9.470.574,00)	94,48
7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.606.000,00	162.135.426,00	(9.470.574,00)	94,48
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.153.840,00	103.231.616,00	(922.224,00)	99,11
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.400.000,00	14.696.568,00	(703.432,00)	95,43
7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.400.000,00	14.696.568,00	(703.432,00)	95,43
7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	14.696.568,00	(703.432,00)	95,43
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.753.840,00	87.535.048,00	(218.792,00)	99,75
7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	87.753.840,00	87.535.048,00	(218.792,00)	99,75
7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.753.840,00	87.535.048,00	(218.792,00)	99,75
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.282.851,00	70.688.921,00	(593.930,00)	99,17
7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.562.851,00	64.968.921,00	(593.930,00)	99,09
7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	65.562.851,00	64.968.921,00	(593.930,00)	99,09
7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.562.851,00	64.968.921,00	(593.930,00)	99,09
7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	100,00
		JUMLAH BELANJA	**2.001.538.191,00**	**1.796.032.254,00**	**(205.505.937,00)**	**89,73**
		SURPLUS DEFISIT	**(2.001.538.191,00)**	**(1.796.032.254,00)**	**205.505.937,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Pegagan Hilir

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**1.713.071.399,00**	**1.564.117.099,00**	**(148.954.300,00)**	**91,30**
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	45.685.390,00	39.065.200,00	(6.620.190,00)	85,51
7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.280.000,00	7.160.000,00	(6.120.000,00)	53,92
7.01.02.2.01.0002		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.280.000,00	7.160.000,00	(6.120.000,00)	53,92
7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.280.000,00	7.160.000,00	(6.120.000,00)	53,92
7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.280.000,00	7.160.000,00	(6.120.000,00)	53,92
7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	32.405.390,00	31.905.200,00	(500.190,00)	98,46
7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	32.405.390,00	31.905.200,00	(500.190,00)	98,46
7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	32.405.390,00	31.905.200,00	(500.190,00)	98,46
7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.405.390,00	31.905.200,00	(500.190,00)	98,46
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	106.606.210,00	104.106.210,00	(2.500.000,00)	97,65
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	106.606.210,00	104.106.210,00	(2.500.000,00)	97,65
7.01.05.2.01.0003		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	54.676.210,00	54.676.210,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	53.626.210,00	53.626.210,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.626.210,00	53.626.210,00	0,00	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01.05.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0004		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	51.930.000,00	49.430.000,00	(2.500.000,00)	95,19
7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	51.930.000,00	49.430.000,00	(2.500.000,00)	95,19
7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.930.000,00	49.430.000,00	(2.500.000,00)	95,19
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27.708.400,00	27.149.900,00	(558.500,00)	97,98
7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.708.400,00	27.149.900,00	(558.500,00)	97,98
7.01.06.2.01.0001		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.904.400,00	5.904.400,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.904.400,00	5.904.400,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.904.400,00	5.904.400,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0002		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21.804.000,00	21.245.500,00	(558.500,00)	97,44
7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.804.000,00	21.245.500,00	(558.500,00)	97,44
7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.804.000,00	21.245.500,00	(558.500,00)	97,44
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.533.071.399,00	1.393.795.789,00	(139.275.610,00)	90,92
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.370.000,00	2.369.800,00	(200,00)	99,99
7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.370.000,00	2.369.800,00	(200,00)	99,99
7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.370.000,00	2.369.800,00	(200,00)	99,99
7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.370.000,00	2.369.800,00	(200,00)	99,99
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.227.071.399,00	1.129.613.494,00	(97.457.905,00)	92,06
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.227.071.399,00	1.129.613.494,00	(97.457.905,00)	92,06
7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.227.071.399,00	1.129.613.494,00	(97.457.905,00)	92,06
7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.227.071.399,00	1.129.613.494,00	(97.457.905,00)	92,06
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.841.712,00	91.275.860,00	(18.565.852,00)	83,10
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.701.800,00	5.701.800,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.701.800,00	5.701.800,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.701.800,00	5.701.800,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.591.860,00	20.591.860,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.568.200,00	13.568.200,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.568.200,00	13.568.200,00	0,00	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	7.023.660,00	7.023.660,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.023.660,00	7.023.660,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.138.052,00	8.129.200,00	(8.852,00)	99,89
7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.138.052,00	8.129.200,00	(8.852,00)	99,89
7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.138.052,00	8.129.200,00	(8.852,00)	99,89
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.410.000,00	56.853.000,00	(18.557.000,00)	75,39
7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	75.410.000,00	56.853.000,00	(18.557.000,00)	75,39
7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.410.000,00	56.853.000,00	(18.557.000,00)	75,39
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.516.288,00	71.419.150,00	(23.097.138,00)	75,56
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.200.000,00	3.169.150,00	(4.030.850,00)	44,02
7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	3.169.150,00	(4.030.850,00)	44,02
7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	3.169.150,00	(4.030.850,00)	44,02
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.066.288,00	68.000.000,00	(19.066.288,00)	78,10
7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	87.066.288,00	68.000.000,00	(19.066.288,00)	78,10
7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.066.288,00	68.000.000,00	(19.066.288,00)	78,10
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.272.000,00	99.117.485,00	(154.515,00)	99,84
7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.742.000,00	60.607.485,00	(134.515,00)	99,78
7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	60.742.000,00	60.607.485,00	(134.515,00)	99,78
7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.742.000,00	60.607.485,00	(134.515,00)	99,78
7.01.01.2.09.0005		Pemeliharaan Mebel	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.405.000,00	23.405.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	23.405.000,00	23.405.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.405.000,00	23.405.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.475.000,00	12.455.000,00	(20.000,00)	99,84

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	12.475.000,00	12.455.000,00	(20.000,00)	99,84
7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.475.000,00	12.455.000,00	(20.000,00)	99,84
		JUMLAH BELANJA	**1.713.071.399,00**	**1.564.117.099,00**	**(148.954.300,00)**	**91,30**
		SURPLUS DEFISIT	**(1.713.071.399,00)**	**(1.564.117.099,00)**	**148.954.300,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Parbuluan

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**2.036.079.637,00**	**1.885.346.606,00**	**(150.733.031,00)**	**92,60**
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	71.840.000,00	71.840.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	71.840.000,00	71.840.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19.840.000,00	19.840.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.840.000,00	19.840.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.840.000,00	19.840.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	160.635.000,00	158.580.000,00	(2.055.000,00)	98,72
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	160.635.000,00	158.580.000,00	(2.055.000,00)	98,72
7.01.05.2.01.0003		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	88.190.000,00	88.190.000,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	88.190.000,00	88.190.000,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.190.000,00	88.190.000,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0004		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	72.445.000,00	70.390.000,00	(2.055.000,00)	97,16

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	72.445.000,00	70.390.000,00	(2.055.000,00)	97,16
7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.445.000,00	70.390.000,00	(2.055.000,00)	97,16
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.120.000,00	11.120.000,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.120.000,00	11.120.000,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0001		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11.120.000,00	11.120.000,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.120.000,00	11.120.000,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.120.000,00	11.120.000,00	0,00	100,00
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.792.484.637,00	1.643.806.606,00	(148.678.031,00)	91,71
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.529.978.039,00	1.403.403.582,00	(126.574.457,00)	91,73
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.529.978.039,00	1.403.403.582,00	(126.574.457,00)	91,73
7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.529.978.039,00	1.403.403.582,00	(126.574.457,00)	91,73
7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.529.978.039,00	1.403.403.582,00	(126.574.457,00)	91,73
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	127.725.350,00	110.077.533,00	(17.647.817,00)	86,18
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.070.700,00	11.070.700,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.070.700,00	11.070.700,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.070.700,00	11.070.700,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.810.100,00	27.810.100,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.810.100,00	27.810.100,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.810.100,00	27.810.100,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.648.550,00	12.648.550,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.648.550,00	12.648.550,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.648.550,00	12.648.550,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.196.000,00	58.548.183,00	(17.647.817,00)	76,84
7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	76.196.000,00	58.548.183,00	(17.647.817,00)	76,84
7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.196.000,00	58.548.183,00	(17.647.817,00)	76,84
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.510.000,00	22.510.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.510.000,00	22.510.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	22.510.000,00	22.510.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.510.000,00	22.510.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.661.808,00	64.398.116,00	(4.263.692,00)	93,79

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.960.000,00	5.428.116,00	(3.531.884,00)	60,58
7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.960.000,00	5.428.116,00	(3.531.884,00)	60,58
7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.960.000,00	5.428.116,00	(3.531.884,00)	60,58
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.531.808,00	57.800.000,00	(731.808,00)	98,75
7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	58.531.808,00	57.800.000,00	(731.808,00)	98,75
7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.531.808,00	57.800.000,00	(731.808,00)	98,75
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.609.440,00	43.417.375,00	(192.065,00)	99,56
7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.609.440,00	43.417.375,00	(192.065,00)	99,56
7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	43.609.440,00	43.417.375,00	(192.065,00)	99,56
7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.609.440,00	43.417.375,00	(192.065,00)	99,56
		JUMLAH BELANJA	**2.036.079.637,00**	**1.885.346.606,00**	**(150.733.031,00)**	**92,60**
		SURPLUS DEFISIT	**(2.036.079.637,00)**	**(1.885.346.606,00)**	**150.733.031,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Siempat Nempu Hilir

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**1.594.767.108,00**	**1.429.259.619,00**	**(165.507.489,00)**	**89,62**
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	45.790.000,00	45.760.000,00	(30.000,00)	99,93
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	45.790.000,00	45.760.000,00	(30.000,00)	99,93
7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.285.000,00	16.285.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.285.000,00	16.285.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.285.000,00	16.285.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	29.505.000,00	29.475.000,00	(30.000,00)	99,90
7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	29.505.000,00	29.475.000,00	(30.000,00)	99,90
7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.505.000,00	29.475.000,00	(30.000,00)	99,90
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	53.684.720,00	53.684.720,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	53.684.720,00	53.684.720,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0003		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	32.009.720,00	32.009.720,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	32.009.720,00	32.009.720,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.009.720,00	32.009.720,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0004		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	21.675.000,00	21.675.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	21.675.000,00	21.675.000,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.675.000,00	21.675.000,00	0,00	100,00
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	81.195.100,00	81.095.100,00	(100.000,00)	99,88
7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	81.195.100,00	81.095.100,00	(100.000,00)	99,88
7.01.06.2.01.0001		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	47.793.100,00	47.743.100,00	(50.000,00)	99,90
7.01.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	47.793.100,00	47.743.100,00	(50.000,00)	99,90
7.01.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.793.100,00	47.743.100,00	(50.000,00)	99,90
7.01.06.2.01.0002		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	33.402.000,00	33.352.000,00	(50.000,00)	99,85
7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.402.000,00	33.352.000,00	(50.000,00)	99,85
7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.402.000,00	33.352.000,00	(50.000,00)	99,85
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.414.097.288,00	1.248.719.799,00	(165.377.489,00)	88,31
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.120.848.603,00	956.070.212,00	(164.778.391,00)	85,30
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.120.848.603,00	956.070.212,00	(164.778.391,00)	85,30
7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.120.848.603,00	956.070.212,00	(164.778.391,00)	85,30
7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.120.848.603,00	956.070.212,00	(164.778.391,00)	85,30
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.161.800,00	101.041.050,00	(120.750,00)	99,88
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.205.900,00	6.205.150,00	(750,00)	99,99
7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.205.900,00	6.205.150,00	(750,00)	99,99
7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.205.900,00	6.205.150,00	(750,00)	99,99
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.411.500,00	25.411.500,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.411.500,00	25.411.500,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.411.500,00	25.411.500,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.029.400,00	18.029.400,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	18.029.400,00	18.029.400,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.029.400,00	18.029.400,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.515.000,00	51.395.000,00	(120.000,00)	99,77
7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	51.515.000,00	51.395.000,00	(120.000,00)	99,77
7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.515.000,00	51.395.000,00	(120.000,00)	99,77
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.706.580,00	52.706.580,00	0,00	100,00
7.01.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.706.580,00	52.706.580,00	0,00	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01.01.2.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	52.706.580,00	52.706.580,00	0,00	100,00
7.01.01.2.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.706.580,00	52.706.580,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.500.490,00	77.022.142,00	(478.348,00)	99,38
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.782.200,00	1.782.200,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.782.200,00	1.782.200,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.782.200,00	1.782.200,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.218.290,00	70.739.942,00	(478.348,00)	99,33
7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	71.218.290,00	70.739.942,00	(478.348,00)	99,33
7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.218.290,00	70.739.942,00	(478.348,00)	99,33
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.879.815,00	61.879.815,00	0,00	100,00
7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.879.815,00	61.879.815,00	0,00	100,00
7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	61.879.815,00	61.879.815,00	0,00	100,00
7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.879.815,00	61.879.815,00	0,00	100,00
		JUMLAH BELANJA	**1.594.767.108,00**	**1.429.259.619,00**	**(165.507.489,00)**	**89,62**
		SURPLUS DEFISIT	**(1.594.767.108,00)**	**(1.429.259.619,00)**	**165.507.489,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan KECAMATAN
Organisasi Kecamatan Siempat Nempu Hulu

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**2.006.160.661,00**	**1.796.242.084,00**	**(209.918.577,00)**	**89,54**
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.468.000,00	3.980.000,00	(488.000,00)	89,08
7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.468.000,00	3.980.000,00	(488.000,00)	89,08
7.01.02.2.01.0002		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.468.000,00	3.980.000,00	(488.000,00)	89,08
7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.468.000,00	3.980.000,00	(488.000,00)	89,08
7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.468.000,00	3.980.000,00	(488.000,00)	89,08
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	24.125.600,00	23.800.000,00	(325.600,00)	98,65
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	8.375.600,00	8.050.000,00	(325.600,00)	96,11
7.01.03.2.03.0001		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	8.375.600,00	8.050.000,00	(325.600,00)	96,11
7.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.375.600,00	8.050.000,00	(325.600,00)	96,11
7.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.375.600,00	8.050.000,00	(325.600,00)	96,11
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	53.900.000,00	53.888.000,00	(12.000,00)	99,98

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	53.900.000,00	53.888.000,00	(12.000,00)	99,98
7.01.05.2.01.0001		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	53.900.000,00	53.888.000,00	(12.000,00)	99,98
7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	53.900.000,00	53.888.000,00	(12.000,00)	99,98
7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.900.000,00	53.888.000,00	(12.000,00)	99,98
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.450.000,00	3.500.000,00	(2.950.000,00)	54,26
7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.450.000,00	3.500.000,00	(2.950.000,00)	54,26
7.01.06.2.01.0016		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.450.000,00	3.500.000,00	(2.950.000,00)	54,26
7.01.06.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	6.450.000,00	3.500.000,00	(2.950.000,00)	54,26
7.01.06.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	3.500.000,00	(2.950.000,00)	54,26
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.917.217.061,00	1.711.074.084,00	(206.142.977,00)	89,25
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.524.250.413,00	1.376.962.934,00	(147.287.479,00)	90,34
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.524.250.413,00	1.376.962.934,00	(147.287.479,00)	90,34
7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.524.250.413,00	1.376.962.934,00	(147.287.479,00)	90,34
7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.524.250.413,00	1.376.962.934,00	(147.287.479,00)	90,34
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	261.059.800,00	226.111.150,00	(34.948.650,00)	86,61
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.805.800,00	7.141.000,00	(2.664.800,00)	72,82
7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.805.800,00	7.141.000,00	(2.664.800,00)	72,82
7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.805.800,00	7.141.000,00	(2.664.800,00)	72,82
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.750.000,00	75.266.150,00	(2.483.850,00)	96,81
7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	77.750.000,00	75.266.150,00	(2.483.850,00)	96,81
7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.750.000,00	75.266.150,00	(2.483.850,00)	96,81
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.160.000,00	13.600.000,00	(560.000,00)	96,05
7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	14.160.000,00	13.600.000,00	(560.000,00)	96,05
7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.160.000,00	13.600.000,00	(560.000,00)	96,05
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.344.000,00	130.104.000,00	(29.240.000,00)	81,65
7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	159.344.000,00	130.104.000,00	(29.240.000,00)	81,65

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.344.000,00	130.104.000,00	(29.240.000,00)	81,65
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	80,00
7.01.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	80,00
7.01.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	80,00
7.01.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	80,00
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.906.848,00	88.000.000,00	(18.906.848,00)	82,31
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	1.400.000,00	(4.600.000,00)	23,33
7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	1.400.000,00	(4.600.000,00)	23,33
7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	1.400.000,00	(4.600.000,00)	23,33
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.090.000,00	3.200.000,00	(6.890.000,00)	31,71
7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.090.000,00	3.200.000,00	(6.890.000,00)	31,71
7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.090.000,00	3.200.000,00	(6.890.000,00)	31,71
7.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.650.000,00	1.800.000,00	(1.850.000,00)	49,32
7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.650.000,00	1.800.000,00	(1.850.000,00)	49,32
7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	1.800.000,00	(1.850.000,00)	49,32
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.166.848,00	81.600.000,00	(5.566.848,00)	93,61
7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	87.166.848,00	81.600.000,00	(5.566.848,00)	93,61
7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.166.848,00	81.600.000,00	(5.566.848,00)	93,61
		JUMLAH BELANJA	**2.006.160.661,00**	**1.796.242.084,00**	**(209.918.577,00)**	**89,54**
		SURPLUS DEFISIT	**(2.006.160.661,00)**	**(1.796.242.084,00)**	**209.918.577,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Lae Parira

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**1.879.223.731,00**	**1.723.640.629,00**	**(155.583.102,00)**	**91,72**
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40.481.000,00	39.187.000,00	(1.294.000,00)	96,80
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	40.481.000,00	39.187.000,00	(1.294.000,00)	96,80
7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.489.000,00	16.110.000,00	(379.000,00)	97,70
7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.489.000,00	16.110.000,00	(379.000,00)	97,70
7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.489.000,00	16.110.000,00	(379.000,00)	97,70
7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.992.000,00	23.077.000,00	(915.000,00)	96,19
7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	23.992.000,00	23.077.000,00	(915.000,00)	96,19
7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.992.000,00	23.077.000,00	(915.000,00)	96,19
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	73.765.000,00	73.765.000,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	73.765.000,00	73.765.000,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0003		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	29.570.000,00	29.570.000,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	29.570.000,00	29.570.000,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.570.000,00	29.570.000,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0004		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	44.195.000,00	44.195.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	44.195.000,00	44.195.000,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.195.000,00	44.195.000,00	0,00	100,00
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.764.977.731,00	1.610.688.629,00	(154.289.102,00)	91,26
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.447.022.891,00	1.299.634.493,00	(147.388.398,00)	89,81
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.444.032.891,00	1.296.644.493,00	(147.388.398,00)	89,79
7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.444.032.891,00	1.296.644.493,00	(147.388.398,00)	89,79
7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.444.032.891,00	1.296.644.493,00	(147.388.398,00)	89,79
7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	143.037.000,00	143.026.900,00	(10.100,00)	99,99
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.442.500,00	2.442.400,00	(100,00)	100,00
7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.442.500,00	2.442.400,00	(100,00)	100,00
7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.442.500,00	2.442.400,00	(100,00)	100,00
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.923.500,00	26.923.500,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	26.923.500,00	26.923.500,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.923.500,00	26.923.500,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.290.000,00	20.290.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	20.290.000,00	20.290.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.290.000,00	20.290.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.381.000,00	93.371.000,00	(10.000,00)	99,99
7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	93.381.000,00	93.371.000,00	(10.000,00)	99,99
7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.381.000,00	93.371.000,00	(10.000,00)	99,99
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.153.840,00	90.578.588,00	(5.575.252,00)	94,20

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.400.000,00	3.583.532,00	(4.816.468,00)	42,66
7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.400.000,00	3.583.532,00	(4.816.468,00)	42,66
7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	3.583.532,00	(4.816.468,00)	42,66
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.753.840,00	86.995.056,00	(758.784,00)	99,14
7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	87.753.840,00	86.995.056,00	(758.784,00)	99,14
7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.753.840,00	86.995.056,00	(758.784,00)	99,14
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.264.000,00	49.948.648,00	(1.315.352,00)	97,43
7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.642.500,00	33.327.148,00	(1.315.352,00)	96,20
7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.642.500,00	33.327.148,00	(1.315.352,00)	96,20
7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.642.500,00	33.327.148,00	(1.315.352,00)	96,20
7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.621.500,00	16.621.500,00	0,00	100,00
7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	16.621.500,00	16.621.500,00	0,00	100,00
7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.621.500,00	16.621.500,00	0,00	100,00
		JUMLAH BELANJA	**1.879.223.731,00**	**1.723.640.629,00**	**(155.583.102,00)**	**91,72**
		SURPLUS DEFISIT	**(1.879.223.731,00)**	**(1.723.640.629,00)**	**155.583.102,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Gunung Sitember

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**1.667.382.090,00**	**1.539.757.055,00**	**(127.625.035,00)**	**92,35**
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.000.000,00	16.990.000,00	(10.000,00)	99,94
7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	17.000.000,00	16.990.000,00	(10.000,00)	99,94
7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17.000.000,00	16.990.000,00	(10.000,00)	99,94
7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	16.990.000,00	(10.000,00)	99,94
7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	16.990.000,00	(10.000,00)	99,94
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	82.790.000,00	82.547.600,00	(242.400,00)	99,71
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	82.790.000,00	82.547.600,00	(242.400,00)	99,71
7.01.05.2.01.0003		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	25.000.000,00	24.960.000,00	(40.000,00)	99,84
7.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.960.000,00	(40.000,00)	99,84

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.960.000,00	(40.000,00)	99,84
7.01.05.2.01.0004		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	57.790.000,00	57.587.600,00	(202.400,00)	99,65
7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	57.790.000,00	57.587.600,00	(202.400,00)	99,65
7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.790.000,00	57.587.600,00	(202.400,00)	99,65
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.000.000,00	19.986.600,00	(13.400,00)	99,93
7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.000.000,00	19.986.600,00	(13.400,00)	99,93
7.01.06.2.01.0002		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20.000.000,00	19.986.600,00	(13.400,00)	99,93
7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.986.600,00	(13.400,00)	99,93
7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.986.600,00	(13.400,00)	99,93
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.527.592.090,00	1.400.232.855,00	(127.359.235,00)	91,66
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.210.941.846,00	1.094.316.805,00	(116.625.041,00)	90,37
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.210.941.846,00	1.094.316.805,00	(116.625.041,00)	90,37
7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.210.941.846,00	1.094.316.805,00	(116.625.041,00)	90,37
7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.210.941.846,00	1.094.316.805,00	(116.625.041,00)	90,37
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	184.604.534,00	180.400.300,00	(4.204.234,00)	97,72
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000,00	55.800.000,00	(4.200.000,00)	93,00
7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	40.800.000,00	(4.200.000,00)	90,67
7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	40.800.000,00	(4.200.000,00)	90,67
7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.620.534,00	23.616.300,00	(4.234,00)	99,98
7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	23.620.534,00	23.616.300,00	(4.234,00)	99,98
7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.620.534,00	23.616.300,00	(4.234,00)	99,98
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.984.000,00	91.984.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	91.984.000,00	91.984.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.984.000,00	91.984.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.083.960,00	66.560.000,00	(6.523.960,00)	91,07
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.344.000,00	5.360.000,00	(1.984.000,00)	72,98
7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.344.000,00	5.360.000,00	(1.984.000,00)	72,98
7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.344.000,00	5.360.000,00	(1.984.000,00)	72,98
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.739.960,00	61.200.000,00	(4.539.960,00)	93,09
7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	65.739.960,00	61.200.000,00	(4.539.960,00)	93,09
7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.739.960,00	61.200.000,00	(4.539.960,00)	93,09
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.961.750,00	48.955.750,00	(6.000,00)	99,99
7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.961.750,00	48.955.750,00	(6.000,00)	99,99
7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	48.961.750,00	48.955.750,00	(6.000,00)	99,99
7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.961.750,00	48.955.750,00	(6.000,00)	99,99
		JUMLAH BELANJA	**1.667.382.090,00**	**1.539.757.055,00**	**(127.625.035,00)**	**92,35**
		SURPLUS DEFISIT	**(1.667.382.090,00)**	**(1.539.757.055,00)**	**127.625.035,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Berampu

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**1.623.673.224,00**	**1.482.874.250,00**	**(140.798.974,00)**	**91,33**
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30.582.950,00	30.392.950,00	(190.000,00)	99,38
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.582.950,00	30.392.950,00	(190.000,00)	99,38
7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.014.500,00	8.854.500,00	(160.000,00)	98,23
7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.014.500,00	8.854.500,00	(160.000,00)	98,23
7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.014.500,00	8.854.500,00	(160.000,00)	98,23
7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.568.450,00	21.538.450,00	(30.000,00)	99,86
7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	21.568.450,00	21.538.450,00	(30.000,00)	99,86
7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.568.450,00	21.538.450,00	(30.000,00)	99,86
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	86.313.000,00	81.045.000,00	(5.268.000,00)	93,90
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	86.313.000,00	81.045.000,00	(5.268.000,00)	93,90
7.01.05.2.01.0003		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0004		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	47.913.000,00	42.645.000,00	(5.268.000,00)	89,01

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	47.913.000,00	42.645.000,00	(5.268.000,00)	89,01
7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.913.000,00	42.645.000,00	(5.268.000,00)	89,01
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.353.000,00	15.353.000,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.353.000,00	15.353.000,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0002		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.353.000,00	15.353.000,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.353.000,00	15.353.000,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.353.000,00	15.353.000,00	0,00	100,00
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.491.424.274,00	1.356.083.300,00	(135.340.974,00)	90,93
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.020.000,00	5.970.000,00	(50.000,00)	99,17
7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.670.000,00	3.620.000,00	(50.000,00)	98,64
7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.670.000,00	3.620.000,00	(50.000,00)	98,64
7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.670.000,00	3.620.000,00	(50.000,00)	98,64
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.243.437.713,00	1.125.543.819,00	(117.893.894,00)	90,52
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.243.437.713,00	1.125.543.819,00	(117.893.894,00)	90,52
7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.243.437.713,00	1.125.543.819,00	(117.893.894,00)	90,52
7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.243.437.713,00	1.125.543.819,00	(117.893.894,00)	90,52
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.216.300,00	102.171.671,00	(10.044.629,00)	91,05
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.812.500,00	4.812.500,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.812.500,00	4.812.500,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.812.500,00	4.812.500,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.444.800,00	29.444.400,00	(400,00)	100,00
7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	29.444.800,00	29.444.400,00	(400,00)	100,00
7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.444.800,00	29.444.400,00	(400,00)	100,00
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.464.000,00	17.419.000,00	(45.000,00)	99,74
7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	17.464.000,00	17.419.000,00	(45.000,00)	99,74
7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.464.000,00	17.419.000,00	(45.000,00)	99,74
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.495.000,00	50.495.771,00	(9.999.229,00)	83,47
7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	60.495.000,00	50.495.771,00	(9.999.229,00)	83,47
7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.495.000,00	50.495.771,00	(9.999.229,00)	83,47

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.595.880,00	75.465.074,00	(7.130.806,00)	91,37
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.400.000,00	12.090.692,00	(3.309.308,00)	78,51
7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.400.000,00	12.090.692,00	(3.309.308,00)	78,51
7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	12.090.692,00	(3.309.308,00)	78,51
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.695.880,00	61.874.382,00	(3.821.498,00)	94,18
7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	65.695.880,00	61.874.382,00	(3.821.498,00)	94,18
7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.695.880,00	61.874.382,00	(3.821.498,00)	94,18
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.154.381,00	46.932.736,00	(221.645,00)	99,53
7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.533.581,00	34.396.736,00	(136.845,00)	99,60
7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.533.581,00	34.396.736,00	(136.845,00)	99,60
7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.533.581,00	34.396.736,00	(136.845,00)	99,60
7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.430.800,00	10.346.000,00	(84.800,00)	99,19
7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	10.430.800,00	10.346.000,00	(84.800,00)	99,19
7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.430.800,00	10.346.000,00	(84.800,00)	99,19
7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	100,00
		JUMLAH BELANJA	**1.623.673.224,00**	**1.482.874.250,00**	**(140.798.974,00)**	**91,33**
		SURPLUS DEFISIT	**(1.623.673.224,00)**	**(1.482.874.250,00)**	**140.798.974,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Silahisabungan

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**1.594.938.027,00**	**1.370.126.146,00**	**(224.811.881,00)**	**85,90**
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	73.612.000,00	70.432.000,00	(3.180.000,00)	95,68
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	73.612.000,00	70.432.000,00	(3.180.000,00)	95,68
7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	68.512.000,00	65.332.000,00	(3.180.000,00)	95,36
7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	68.512.000,00	65.332.000,00	(3.180.000,00)	95,36
7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.512.000,00	65.332.000,00	(3.180.000,00)	95,36
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	92.813.000,00	85.013.000,00	(7.800.000,00)	91,60
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	92.813.000,00	85.013.000,00	(7.800.000,00)	91,60
7.01.05.2.01.0003		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	57.463.000,00	57.463.000,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	57.463.000,00	57.463.000,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.463.000,00	57.463.000,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0004		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	35.350.000,00	27.550.000,00	(7.800.000,00)	77,93

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	35.350.000,00	27.550.000,00	(7.800.000,00)	77,93
7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.350.000,00	27.550.000,00	(7.800.000,00)	77,93
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	23.575.000,00	23.575.000,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.575.000,00	23.575.000,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0001		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0002		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.275.000,00	15.275.000,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.275.000,00	15.275.000,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.275.000,00	15.275.000,00	0,00	100,00
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.404.938.027,00	1.191.106.146,00	(213.831.881,00)	84,78
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.149.410.250,00	973.134.235,00	(176.276.015,00)	84,66
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.149.410.250,00	973.134.235,00	(176.276.015,00)	84,66
7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.149.410.250,00	973.134.235,00	(176.276.015,00)	84,66
7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.149.410.250,00	973.134.235,00	(176.276.015,00)	84,66
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.508.500,00	99.198.500,00	(30.310.000,00)	76,60
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.022.000,00	10.022.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.022.000,00	10.022.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.022.000,00	10.022.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.440.850,00	14.440.850,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.440.850,00	14.440.850,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.440.850,00	14.440.850,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.970.650,00	16.970.650,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.970.650,00	16.970.650,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.970.650,00	16.970.650,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.075.000,00	57.765.000,00	(30.310.000,00)	65,59
7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	88.075.000,00	57.765.000,00	(30.310.000,00)	65,59
7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.075.000,00	57.765.000,00	(30.310.000,00)	65,59
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.285.696,00	84.567.830,00	(6.717.866,00)	92,64
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000,00	1.967.830,00	(1.032.170,00)	65,59
7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	1.967.830,00	(1.032.170,00)	65,59
7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.967.830,00	(1.032.170,00)	65,59
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.285.696,00	81.600.000,00	(5.685.696,00)	93,49
7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	87.285.696,00	81.600.000,00	(5.685.696,00)	93,49
7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.285.696,00	81.600.000,00	(5.685.696,00)	93,49
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.733.581,00	34.205.581,00	(528.000,00)	98,48
7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.733.581,00	34.205.581,00	(528.000,00)	98,48
7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.733.581,00	34.205.581,00	(528.000,00)	98,48
7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.733.581,00	34.205.581,00	(528.000,00)	98,48
		JUMLAH BELANJA	**1.594.938.027,00**	**1.370.126.146,00**	**(224.811.881,00)**	**85,90**
		SURPLUS DEFISIT	**(1.594.938.027,00)**	**(1.370.126.146,00)**	**224.811.881,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan KECAMATAN
Organisasi Kecamatan Sitinjo

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**2.809.412.610,00**	**2.498.011.590,00**	**(311.401.020,00)**	**88,92**
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUB	19.900.000,00	16.340.000,00	(3.560.000,00)	82,11
7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh U	19.900.000,00	16.340.000,00	(3.560.000,00)	82,11
7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di V	19.900.000,00	16.340.000,00	(3.560.000,00)	82,11
7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	19.900.000,00	16.340.000,00	(3.560.000,00)	82,11
7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.900.000,00	16.340.000,00	(3.560.000,00)	82,11
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	244.066.850,00	202.643.950,00	(41.422.900,00)	83,03
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	16.406.000,00	16.406.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perenc	16.406.000,00	16.406.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.406.000,00	16.406.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.406.000,00	16.406.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	227.660.850,00	186.237.950,00	(41.422.900,00)	81,80
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	227.660.850,00	186.237.950,00	(41.422.900,00)	81,80
7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	227.660.850,00	186.237.950,00	(41.422.900,00)	81,80
7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.660.850,00	186.237.950,00	(41.422.900,00)	81,80
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	94.865.800,00	87.753.800,00	(7.112.000,00)	92,50
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepa	94.865.800,00	87.753.800,00	(7.112.000,00)	92,50
7.01.05.2.01.0003		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	27.057.800,00	27.057.800,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	27.057.800,00	27.057.800,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.057.800,00	27.057.800,00	0,00	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01.05.2.01.0004		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras	67.808.000,00	60.696.000,00	(7.112.000,00)	89,51
7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	67.808.000,00	60.696.000,00	(7.112.000,00)	89,51
7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.808.000,00	60.696.000,00	(7.112.000,00)	89,51
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATE	2.450.579.960,00	2.191.273.840,00	(259.306.120,00)	89,42
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	1.000.000,00	(4.000.000,00)	20,00
7.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realis	5.000.000,00	1.000.000,00	(4.000.000,00)	20,00
7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	1.000.000,00	(4.000.000,00)	20,00
7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	1.000.000,00	(4.000.000,00)	20,00
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.028.674.840,00	1.801.098.829,00	(227.576.011,00)	88,78
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.028.674.840,00	1.801.098.829,00	(227.576.011,00)	88,78
7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.028.674.840,00	1.801.098.829,00	(227.576.011,00)	88,78
7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.028.674.840,00	1.801.098.829,00	(227.576.011,00)	88,78
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.484.400,00	143.227.400,00	(22.257.000,00)	86,55
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.854.000,00	2.854.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.854.000,00	2.854.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.854.000,00	2.854.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.704.700,00	29.704.700,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	29.704.700,00	29.704.700,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.704.700,00	29.704.700,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.498.700,00	11.498.700,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.498.700,00	11.498.700,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.498.700,00	11.498.700,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.307.000,00	96.050.000,00	(22.257.000,00)	81,19
7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	118.307.000,00	96.050.000,00	(22.257.000,00)	81,19
7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.307.000,00	96.050.000,00	(22.257.000,00)	81,19
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.213.800,00	60.213.500,00	(300,00)	100,00
7.01.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainn	60.213.800,00	60.213.500,00	(300,00)	100,00
7.01.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	60.213.800,00	60.213.500,00	(300,00)	100,00
7.01.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.213.800,00	60.213.500,00	(300,00)	100,00
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.676.920,00	123.854.111,00	(4.822.809,00)	96,25
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.800.000,00	7.356.583,00	(4.443.417,00)	62,34
7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.800.000,00	7.356.583,00	(4.443.417,00)	62,34
7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	7.356.583,00	(4.443.417,00)	62,34
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	115.876.920,00	115.497.528,00	(379.392,00)	99,67
7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	115.876.920,00	115.497.528,00	(379.392,00)	99,67
7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.876.920,00	115.497.528,00	(379.392,00)	99,67
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D	62.530.000,00	61.880.000,00	(650.000,00)	98,96
7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizina	62.530.000,00	61.880.000,00	(650.000,00)	98,96
7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	62.530.000,00	61.880.000,00	(650.000,00)	98,96
7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.530.000,00	61.880.000,00	(650.000,00)	98,96
		JUMLAH BELANJA	**2.809.412.610,00**	**2.498.011.590,00**	**(311.401.020,00)**	**88,92**
		SURPLUS DEFISIT	**(2.809.412.610,00)**	**(2.498.011.590,00)**	**311.401.020,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5	**BELANJA DAERAH**	**41.955.738.246,00**	**40.911.044.648,00**	**(1.044.693.598,00)**	**97,51**
8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	560.000.000,00	546.811.880,00	(13.188.120,00)	97,64
8.01.02.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	560.000.000,00	546.811.880,00	(13.188.120,00)	97,64
8.01.02.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60.000.000,00	50.522.000,00	(9.478.000,00)	84,20
8.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	50.522.000,00	(9.478.000,00)	84,20
8.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	50.522.000,00	(9.478.000,00)	84,20
8.01.02.2.01.0008		Pembentukan Paskibraka	500.000.000,00	496.289.880,00	(3.710.120,00)	99,26
8.01.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000,00	496.289.880,00	(3.710.120,00)	99,26
8.01.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	496.289.880,00	(3.710.120,00)	99,26
8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	30.590.599.000,00	30.580.202.500,00	(10.396.500,00)	99,97

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
8.01.03.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	30.590.599.000,00	30.580.202.500,00	(10.396.500,00)	99,97
8.01.03.2.01.0002		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	30.460.599.000,00	30.460.599.000,00	0,00	100,00
8.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.460.599.000,00	30.460.599.000,00	0,00	100,00
8.01.03.2.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	30.460.599.000,00	30.460.599.000,00	0,00	100,00
8.01.03.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	130.000.000,00	119.603.500,00	(10.396.500,00)	92,00
8.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000,00	119.603.500,00	(10.396.500,00)	92,00
8.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	119.603.500,00	(10.396.500,00)	92,00
8.01.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
8.01.04.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
8.01.04.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
8.01.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
8.01.04.2.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	990.000.000,00	990.000.000,00	0,00	100,00
8.01.05.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	990.000.000,00	990.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
8.01.05.2.01.0002		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	990.000.000,00	990.000.000,00	0,00	100,00
8.01.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	990.000.000,00	990.000.000,00	0,00	100,00
8.01.05.2.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	990.000.000,00	990.000.000,00	0,00	100,00
8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	7.410.000.000,00	6.661.410.000,00	(748.590.000,00)	89,90
8.01.06.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	7.410.000.000,00	6.661.410.000,00	(748.590.000,00)	89,90
8.01.06.2.01.0002		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	7.000.000.000,00	6.310.822.000,00	(689.178.000,00)	90,15
8.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000.000,00	6.310.822.000,00	(689.178.000,00)	90,15
8.01.06.2.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	7.000.000.000,00	6.310.822.000,00	(689.178.000,00)	90,15
8.01.06.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	260.000.000,00	230.364.000,00	(29.636.000,00)	88,60
8.01.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	260.000.000,00	230.364.000,00	(29.636.000,00)	88,60
8.01.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000,00	230.364.000,00	(29.636.000,00)	88,60
8.01.06.2.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150.000.000,00	120.224.000,00	(29.776.000,00)	80,15
8.01.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	120.224.000,00	(29.776.000,00)	80,15
8.01.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	120.224.000,00	(29.776.000,00)	80,15
8.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.305.139.246,00	2.032.620.268,00	(272.518.978,00)	88,18

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
8.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.912.645.002,00	1.691.803.519,00	(220.841.483,00)	88,45
8.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.897.617.002,00	1.679.646.169,00	(217.970.833,00)	88,51
8.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.897.617.002,00	1.679.646.169,00	(217.970.833,00)	88,51
8.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.897.617.002,00	1.679.646.169,00	(217.970.833,00)	88,51
8.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.028.000,00	12.157.350,00	(2.870.650,00)	80,90
8.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	15.028.000,00	12.157.350,00	(2.870.650,00)	80,90
8.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.028.000,00	12.157.350,00	(2.870.650,00)	80,90
8.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	270.072.784,00	224.231.523,00	(45.841.261,00)	83,03
8.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.089.634,00	65.088.800,00	(834,00)	100,00
8.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	65.089.634,00	65.088.800,00	(834,00)	100,00
8.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.089.634,00	65.088.800,00	(834,00)	100,00
8.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.523.150,00	7.757.200,00	(7.765.950,00)	49,97
8.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.523.150,00	7.757.200,00	(7.765.950,00)	49,97
8.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.523.150,00	7.757.200,00	(7.765.950,00)	49,97
8.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.460.000,00	151.385.523,00	(38.074.477,00)	79,90
8.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	189.460.000,00	151.385.523,00	(38.074.477,00)	79,90
8.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.460.000,00	151.385.523,00	(38.074.477,00)	79,90
8.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.971.960,00	77.404.726,00	(5.567.234,00)	93,29
8.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
8.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
8.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
8.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.232.000,00	10.281.014,00	(4.950.986,00)	67,50
8.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.232.000,00	10.281.014,00	(4.950.986,00)	67,50
8.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.232.000,00	10.281.014,00	(4.950.986,00)	67,50
8.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.739.960,00	65.123.712,00	(616.248,00)	99,06
8.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	65.739.960,00	65.123.712,00	(616.248,00)	99,06
8.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.739.960,00	65.123.712,00	(616.248,00)	99,06
8.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.449.500,00	39.180.500,00	(269.000,00)	99,32

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
8.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.449.500,00	39.180.500,00	(269.000,00)	99,32
8.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	39.449.500,00	39.180.500,00	(269.000,00)	99,32
8.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.449.500,00	39.180.500,00	(269.000,00)	99,32
		JUMLAH BELANJA	**41.955.738.246,00**	**40.911.044.648,00**	**(1.044.693.598,00)**	**97,51**
		SURPLUS DEFISIT	**(41.955.738.246,00)**	**(40.911.044.648,00)**	**1.044.693.598,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran I.4 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAHAN KABUPATEN DAIRI

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	690.806.533.511,00	632.572.144.525,20	132.816.382.219,00	121.642.742.712,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	399.376.507.000,00	372.650.823.813,20	35.230.040.381,00	28.201.251.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Dinas Pendidikan	400.376.507.000,00	372.650.823.813,20	35.230.040.381,00	28.201.251.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	341.636.062.035,00	317.517.578.626,00	20.000.000,00	19.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.200,00	14.350.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.200,00	14.350.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	341.855.738.221,00	316.911.331.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	341.855.738.221,00	316.911.331.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	414.091.650,00	286.108.470,00	20.000.000,00	19.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.840.200,00	9.840.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.208.600,00	69.585.800,00	20.000.000,00	19.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.062.600,00	14.062.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.231.750,00	45.968.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.640.000,00	20.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222.108.500,00	126.411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291.437.864,00	279.545.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.739.000,00	18.728.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.698.864,00	260.817.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.794.100,00	26.242.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.794.100,00	26.242.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	57.517.472.965,00	55.016.802.000,20	35.210.040.381,00	28.181.571.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	32.373.246.910,00	30.957.465.086,80	19.838.451.995,00	14.849.347.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	187.040.500,00	175.448.100,00	1.040.003.500,00	1.018.886.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	72.789.600,00	65.894.600,00	862.801.500,00	852.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	24.112.000,00	16.125.000,00	672.000.000,00	669.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	38.865.200,00	35.356.200,00	836.448.300,00	574.493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pengadaan Mebel Sekolah	15.961.500,00	7.028.500,00	881.371.500,00	391.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	13.042.000,00	6.942.000,00	400.000.000,00	399.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	392.918.800,00	268.565.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	403.333.000,00	215.938.400,00	22.960.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	194.587.500,00	130.359.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	28.848.205.884,00	28.797.810.736,80	6.477.715.285,00	6.477.702.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	293.945.400,00	253.311.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	40.135.000,00	32.543.000,00	1.350.000.000,00	1.333.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	190.612.626,00	0,00	11.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	239.111.600,00	106.969.600,00	32.960.000,00	32.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	255.934.000,00	102.864.400,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	264.728.000,00	198.174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	78.548.800,00	64.281.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	28.826.500,00	0,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	136.389.000,00	101.506.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pembangunan Ruang Kelas Baru	85.660.200,00	80.296.200,00	813.846.000,00	799.630.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	84.613.500,00	14.511.000,00	1.216.860.560,00	101.562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	85.908.900,00	79.982.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	110.353.200,00	97.312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	287.624.200,00	106.243.200,00	5.186.505.350,00	2.159.371.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	21.732.721.221,00	21.328.755.382,40	14.702.132.936,00	12.665.973.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	99.000.000,00	98.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	54.276.600,00	54.249.600,00	1.240.475.000,00	1.228.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	44.377.400,00	44.357.400,00	690.672.200,00	687.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	31.527.100,00	31.475.100,00	422.504.000,00	418.914.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pembangunan Laboratorium	82.019.600,00	81.926.600,00	1.573.168.000,00	1.559.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	21.409.500,00	10.973.500,00	555.461.570,00	109.257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	199.457.900,00	149.845.600,00	4.371.494.866,00	3.237.744.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	15.590.900,00	0,00	159.834.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	14.643.200,00	14.598.200,00	102.018.000,00	101.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pengadaan Mebel Sekolah	8.671.100,00	7.821.100,00	344.100.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	6.096.600,00	5.946.600,00	270.775.000,00	270.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	305.680.300,00	263.898.668,00	26.568.500,00	25.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	20.368.084.400,00	20.357.738.514,40	4.193.475.600,00	4.192.872.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	72.885.900,00	0,00	42.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	159.275.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	35.652.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	117.226.600,00	113.356.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pembangunan Ruang Kelas Baru	75.604.800,00	72.627.800,00	328.160.000,00	325.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	21.242.100,00	21.200.100,00	364.926.000,00	363.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3.052.347.334,00	2.430.855.531,00	669.455.450,00	666.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	19.666.100,00	19.557.100,00	329.699.300,00	328.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	4.764.000,00	4.084.000,00	50.000.000,00	49.993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	230.481.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	186.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.283.050.884,00	2.127.190.781,00	17.610.000,00	17.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	162.936.000,00	137.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	89.755.000,00	78.702.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	8.655.450,00	8.635.450,00	248.926.150,00	247.197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	66.443.000,00	54.700.000,00	23.220.000,00	23.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	359.157.500,00	299.726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	116.311.500,00	76.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	150.620.000,00	130.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	92.226.000,00	92.226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	202.865.000,00	100.082.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	202.865.000,00	100.082.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	202.865.000,00	100.082.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	20.107.000,00	16.361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20.107.000,00	16.361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	7.346.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	12.761.000,00	12.761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	229.988.447.405,00	203.715.800.981,00	14.570.791.887,00	13.239.557.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Dinas Kesehatan	157.898.641.072,00	143.217.137.326,00	7.270.791.887,00	7.111.775.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	90.453.344.534,00	86.624.880.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.000.000,00	58.055.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.000.000,00	48.413.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	9.642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84.203.892.629,00	80.473.096.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	84.203.892.629,00	80.473.096.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000,00	190.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000,00	190.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	302.030.000,00	277.625.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.213.000,00	11.213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.817.000,00	216.412.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.657.421.905,00	5.625.321.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00	16.363.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.632.421.905,00	5.603.958.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	64.216.241.565,00	52.932.220.806,00	7.217.327.887,00	7.111.775.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.351.719.926,00	4.843.139.872,00	7.013.966.287,00	6.934.672.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	92.000.000,00	84.463.267,00	420.000.000,00	412.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	350.000.000,00	332.419.339,00	400.000.000,00	399.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengembangan Puskesmas	34.602.000,00	26.777.300,00	3.204.000.000,00	3.177.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	702.567.178,00	619.192.309,00	1.802.711.287,00	1.783.922.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	83.505.917,00	69.592.181,00	1.187.255.000,00	1.160.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	207.226.000,00	186.191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	5.775.953.831,00	3.444.504.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	105.865.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.963.118.239,00	47.332.418.619,00	131.827.000,00	125.703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.173.404.680,00	1.037.186.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	306.048.000,00	262.709.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	218.822.600,00	152.353.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	123.228.000,00	86.180.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	384.621.000,00	346.814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	103.007.000,00	85.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	142.694.200,00	90.924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	132.501.000,00	113.219.000,00	20.000.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	421.493.800,00	100.739.000,00	27.000.000,00	26.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	86.094.000,00	48.818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	692.688.813,00	667.858.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	101.796.000,00	94.873.898,00	20.000.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	60.000.000,00	50.682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.826.603.422,00	3.460.166.494,00	17.500.000,00	17.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	66.807.000,00	23.353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.254.147.000,00	1.087.952.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	444.707.500,00	306.146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	60.000.000,00	58.140.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	748.862.800,00	548.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	50.030.000,00	42.798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	104.520.000,00	87.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.010.458.000,00	2.742.434.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	31.045.677.644,00	29.273.643.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	9.000.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	98.836.000,00	65.597.691,00	21.164.000,00	15.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	5.080.292.330,00	3.594.938.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	210.555.000,00	51.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	38.439.000,00	32.609.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	63.888.800,00	37.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	231.475.150,00	221.941.166,00	26.163.000,00	26.063.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	286.980.000,00	277.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	32.600.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	492.118.000,00	476.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.857.841.000,00	1.806.526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	281.719.702,00	179.353.591,00	11.534.600,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	281.719.702,00	179.353.591,00	11.534.600,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	619.683.698,00	577.308.724,00	60.000.000,00	39.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	60.000.000,00	59.248.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	559.683.698,00	518.060.515,00	60.000.000,00	39.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.258.706.973,00	2.779.762.805,00	53.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	151.361.000,00	149.171.084,00	53.164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	70.226.000,00	69.999.800,00	21.164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	81.135.000,00	79.171.284,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	148.903.000,00	1.536.521.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	0,00	1.419.820.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	148.903.000,00	116.701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.958.442.973,00	1.094.070.206,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.958.442.973,00	1.094.070.206,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	212.834.000,00	189.020.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	82.732.000,00	75.305.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	82.732.000,00	75.305.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	73.812.000,00	60.849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	73.812.000,00	60.849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	56.290.000,00	52.866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	56.290.000,00	52.866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	757.514.000,00	691.252.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	125.900.000,00	104.400.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	125.900.000,00	104.400.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	90.585.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100.000.000,00	90.585.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	531.614.000,00	496.267.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	531.614.000,00	496.267.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Uptd Rumah Sakit Umum Sidikalang	72.089.806.333,00	60.498.663.655,00	7.300.000.000,00	6.127.781.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	200.000.000,00	94.886.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.000.000,00	94.886.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	94.886.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	64.176.072.649,00	54.577.201.691,00	7.300.000.000,00	6.127.781.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.057.175.039,00	3.460.720.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.644.041.304,00	3.147.724.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	413.133.735,00	312.996.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.118.897.610,00	51.116.481.158,00	7.000.000.000,00	5.828.531.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	60.118.897.610,00	51.116.481.158,00	7.000.000.000,00	5.828.531.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	300.000.000,00	299.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	300.000.000,00	299.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	7.713.733.684,00	5.826.575.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	7.305.355.684,00	5.426.204.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	7.305.355.684,00	5.426.204.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	408.378.000,00	400.371.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	408.378.000,00	400.371.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	37.633.051.799,00	35.946.739.116,00	77.620.081.301,00	74.868.272.068,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	37.633.051.799,00	35.946.739.116,00	77.620.081.301,00	74.868.272.068,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.354.805.610,00	10.623.708.683,00	44.480.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	48.151.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000,00	24.045.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,00	24.105.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.142.142.550,00	6.854.235.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.142.142.550,00	6.854.235.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	642.891.560,00	618.909.773,00	44.480.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.911.800,00	78.721.600,00	44.480.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	52.779.404,00	52.776.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	471.700.356,00	457.411.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.980.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.980.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.205.928.700,00	2.141.445.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.775.000,00	20.220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000,00	58.065.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.084.153.700,00	2.063.158.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.254.862.800,00	903.167.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.181.372.800,00	837.355.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73.490.000,00	65.811.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.776.639.000,00	3.752.735.716,00	5.617.117.835,00	5.294.400.474,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.776.639.000,00	3.752.735.716,00	5.617.117.835,00	5.294.400.474,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	3.258.000.000,00	3.241.645.470,00	5.617.117.835,00	5.294.400.474,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	316.229.000,00	314.813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	202.410.000,00	196.277.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	12.772.918.000,00	12.646.884.600,00	2.000.000.000,00	1.885.834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	12.772.918.000,00	12.646.884.600,00	2.000.000.000,00	1.885.834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	12.652.058.000,00	12.526.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	120.860.000,00	120.164.600,00	2.000.000.000,00	1.885.834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.012.752.000,00	3.965.946.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.012.752.000,00	3.965.946.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	4.012.752.000,00	3.965.946.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	331.116.800,00	282.698.100,00	2.879.800.000,00	2.875.107.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	331.116.800,00	282.698.100,00	2.879.800.000,00	2.875.107.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	209.051.800,00	160.828.100,00	1.399.800.000,00	1.397.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	122.065.000,00	121.870.000,00	1.480.000.000,00	1.477.487.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.651.314.411,00	1.316.920.911,00	200.000.000,00	199.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.651.314.411,00	1.316.920.911,00	200.000.000,00	199.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.423.515.911,00	1.223.642.411,00	200.000.000,00	199.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	227.798.500,00	93.278.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	991.981.850,00	900.418.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	991.981.850,00	900.418.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	991.981.850,00	900.418.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2.404.801.978,00	2.138.208.062,00	66.878.683.466,00	64.569.665.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	2.404.801.978,00	2.138.208.062,00	66.878.683.466,00	64.569.665.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Pembangunan Jalan	226.048.400,00	225.937.000,00	4.785.381.216,00	4.699.204.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Rekonstruksi Jalan	1.544.000.000,00	1.307.310.762,00	49.440.293.800,00	47.385.105.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Pemeliharaan Berkala Jalan	332.753.578,00	303.347.300,00	11.716.250.650,00	11.595.842.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Pembangunan Jembatan	110.400.000,00	110.313.000,00	936.757.800,00	889.512.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Pemeliharaan Rutin Jalan	191.600.000,00	191.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	50.900.000,00	37.257.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	50.900.000,00	37.257.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	50.900.000,00	37.257.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	285.822.150,00	281.960.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	107.054.750,00	104.059.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	107.054.750,00	104.059.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	99.510.400,00	99.510.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	99.510.400,00	99.510.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	79.257.000,00	78.390.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	79.257.000,00	78.390.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	461.764.450,00	450.227.100,00	5.201.100.000,00	5.151.387.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	461.764.450,00	450.227.100,00	5.201.100.000,00	5.151.387.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	91.110.000,00	85.835.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	91.110.000,00	85.835.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	91.110.000,00	85.835.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7.241.000,00	7.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	6.541.000,00	6.541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	6.541.000,00	6.541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	363.413.450,00	357.150.300,00	5.201.100.000,00	5.151.387.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	363.413.450,00	357.150.300,00	5.201.100.000,00	5.151.387.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	101.653.850,00	95.643.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	261.759.600,00	261.506.450,00	5.201.100.000,00	5.151.387.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	16.064.077.877,00	14.986.638.426,00	194.368.650,00	182.273.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Satuan Polisi Pamong Praja	7.438.787.440,00	7.044.192.706,00	131.756.650,00	119.933.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.263.299.540,00	6.025.395.606,00	131.756.650,00	119.933.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.108.454.987,00	2.930.341.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.108.454.987,00	2.930.341.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	403.250.770,00	393.129.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.015.400,00	4.015.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.156.120,00	107.156.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.599.250,00	13.599.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.880.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270.600.000,00	263.738.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	131.756.650,00	119.933.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	131.756.650,00	119.933.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.481.047.240,00	2.453.830.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.032.000,00	11.324.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.457.015.240,00	2.442.505.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.546.543,00	228.094.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	222.936.543,00	200.484.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.510.000,00	20.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.175.487.900,00	1.018.797.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	830.000.000,00	748.118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	360.000.000,00	339.866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	470.000.000,00	408.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	345.487.900,00	270.679.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	345.487.900,00	270.679.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.625.290.437,00	7.942.445.720,00	62.612.000,00	62.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.822.397.437,00	5.529.679.535,00	12.612.000,00	12.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	143.706.000,00	142.007.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.846.000,00	27.385.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	115.860.000,00	114.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.556.914.149,00	2.350.656.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.556.914.149,00	2.350.656.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	445.374.308,00	444.209.969,00	12.612.000,00	12.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.983.000,00	14.983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.749.000,00	42.749.000,00	12.612.000,00	12.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.667.500,00	18.657.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355.974.808,00	354.820.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.354.811.920,00	2.305.763.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.000.000,00	19.695.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.322.811.920,00	2.286.068.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	321.591.060,00	287.042.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.503.000,00	76.272.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	244.088.060,00	210.769.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.650.743.500,00	1.316.290.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	280.840.500,00	279.066.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	280.840.500,00	279.066.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	155.433.000,00	155.148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	155.433.000,00	155.148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.138.980.000,00	808.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.002.290.000,00	678.046.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	136.690.000,00	130.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	75.490.000,00	73.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	75.490.000,00	73.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.152.149.500,00	1.096.475.204,00	50.000.000,00	49.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.152.149.500,00	1.096.475.204,00	50.000.000,00	49.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	870.422.500,00	855.038.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	281.727.000,00	241.437.200,00	50.000.000,00	49.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6.282.684.980,00	4.821.915.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	Dinas Sosial	6.282.684.980,00	4.821.915.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.834.100.224,00	2.632.491.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.960.000,00	5.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.960.000,00	5.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.280.982.544,00	2.114.891.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.280.982.544,00	2.114.891.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	269.140.000,00	248.068.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.123.600,00	8.123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.599.400,00	50.571.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.158.000,00	8.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.059.000,00	164.483.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.537.680,00	196.427.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	13.044.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.030.000,00	8.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175.507.680,00	175.353.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.480.000,00	67.144.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.480.000,00	67.144.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	340.874.500,00	287.465.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	340.874.500,00	287.465.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.874.500,00	97.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	240.000.000,00	189.700.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	439.970.356,00	318.386.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	439.970.356,00	318.386.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	89.460.000,00	76.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	Pemberian Layanan Kedaruratan	350.510.356,00	241.536.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.524.579.900,00	1.448.020.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.524.579.900,00	1.448.020.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	201.010.900,00	192.352.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.323.569.000,00	1.255.668.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	143.160.000,00	135.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	143.160.000,00	135.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	143.160.000,00	135.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	87.024.558.958,00	75.691.616.269,00	2.148.774.200,00	1.848.011.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	428.937.000,00	203.716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	428.937.000,00	203.716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	184.937.000,00	183.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	184.937.000,00	183.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	184.937.000,00	183.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	244.000.000,00	19.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	19.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	20.000.000,00	19.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	224.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	224.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.916.691.623,00	3.680.462.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.916.691.623,00	3.680.462.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.557.334.673,00	3.362.983.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	3.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000,00	3.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.083.173.216,00	2.922.333.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.075.174.216,00	2.915.533.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.999.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.379.000,00	187.609.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.407.000,00	59.405.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.972.000,00	118.203.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.951.570,00	177.477.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	17.418.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162.951.570,00	160.058.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.830.887,00	72.103.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.091.475,00	66.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.739.412,00	5.163.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	161.913.000,00	142.573.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000,00	31.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	35.000.000,00	31.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	91.913.000,00	80.266.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	91.913.000,00	80.266.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000,00	30.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	16.779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000,00	13.633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	20.760.000,00	16.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	8.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	8.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	10.760.000,00	8.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.760.000,00	8.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	52.188.350,00	47.118.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	24.487.000,00	21.847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	24.487.000,00	21.847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	27.701.350,00	25.271.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8.192.550,00	7.912.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.508.800,00	17.358.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	124.495.600,00	110.933.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	55.580.400,00	51.878.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	55.580.400,00	51.878.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68.915.200,00	59.055.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68.915.200,00	59.055.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	15.616.216.096,00	14.703.752.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	15.616.216.096,00	14.703.752.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.616.216.096,00	14.703.752.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.425.593.950,00	11.602.648.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.425.593.950,00	11.602.648.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Administrasi Umum Perangkat Daerah	492.914.000,00	492.277.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.953.600,00	16.951.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.383.400,00	40.383.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.325.000,00	41.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.900.000,00	18.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375.352.000,00	374.778.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.404.843.058,00	2.348.624.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.440.000,00	67.272.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.290.403.058,00	2.281.351.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292.865.088,00	260.201.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	241.320.430,00	236.549.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.024.658,00	6.251.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.520.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	14.170.000,00	14.170.000,00	100.000.000,00	99.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	14.170.000,00	14.170.000,00	100.000.000,00	99.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	14.170.000,00	14.170.000,00	100.000.000,00	99.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.170.000,00	14.170.000,00	100.000.000,00	99.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.170.000,00	14.170.000,00	100.000.000,00	99.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	13.339.132.187,00	9.119.842.551,00	1.371.491.400,00	1.360.547.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Dinas Lingkungan Hidup	13.339.132.187,00	9.119.842.551,00	1.371.491.400,00	1.360.547.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.732.859.306,00	6.429.659.098,00	49.588.400,00	49.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.646.837.528,00	2.412.653.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.646.837.528,00	2.412.653.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	338.605.674,00	330.898.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.539.274,00	28.539.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.976.400,00	16.842.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	263.540.000,00	262.966.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	49.588.400,00	49.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	49.588.400,00	49.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.764.612.750,00	2.740.580.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	3.015.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.000.000,00	81.936.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.663.112.750,00	2.655.628.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	975.303.354,00	938.026.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	869.863.354,00	838.252.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.940.000,00	9.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.000.000,00	89.833.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	250.000.000,00	245.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	250.000.000,00	245.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	250.000.000,00	245.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4.611.656.415,00	901.467.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	3.750.846.000,00	180.283.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	3.750.846.000,00	180.283.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	860.810.415,00	721.184.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	860.810.415,00	721.184.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	200.751.498,00	196.004.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	200.751.498,00	196.004.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	200.751.498,00	196.004.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	186.427.000,00	169.704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	186.427.000,00	169.704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	186.427.000,00	169.704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.357.437.968,00	1.177.882.568,00	1.321.903.000,00	1.311.197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Pengelolaan Sampah	1.357.437.968,00	1.177.882.568,00	1.321.903.000,00	1.311.197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	1.357.437.968,00	1.177.882.568,00	1.321.903.000,00	1.311.197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.412.382.063,00	6.082.212.465,00	69.400.000,00	68.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.412.382.063,00	6.082.212.465,00	69.400.000,00	68.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.973.071.063,00	5.690.040.965,00	69.400.000,00	68.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.094.140.242,00	3.871.738.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.094.140.242,00	3.871.738.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	505.073.401,00	495.716.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.414.600,00	9.335.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	169.105.401,00	168.252.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59.999.800,00	59.977.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	266.553.600,00	258.151.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.360.000,00	41.460.000,00	69.400.000,00	68.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.360.000,00	41.460.000,00	69.400.000,00	68.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.089.440.720,00	1.047.802.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	282.920.000,00	274.169.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.890.000,00	32.245.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	741.630.720,00	741.387.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.056.700,00	233.323.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	139.288.700,00	133.623.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.768.000,00	99.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	378.451.000,00	335.121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Penataan Pendaftaran Penduduk	378.451.000,00	335.121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	378.451.000,00	335.121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	19.880.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Pelayanan Pencatatan Sipil	19.880.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	19.880.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	40.980.000,00	37.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	40.980.000,00	37.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	40.980.000,00	37.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.861.543.761,00	6.469.658.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.861.543.761,00	6.469.658.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.164.807.157,00	2.985.028.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.706.181.257,00	2.543.001.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.706.181.257,00	2.543.001.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	274.006.000,00	273.672.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	49.999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.006.000,00	198.672.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.881.900,00	115.255.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.189.600,00	6.334.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.692.300,00	108.920.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.738.000,00	50.099.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.738.000,00	50.099.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.257.594.604,00	3.157.215.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.257.594.604,00	3.157.215.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	43.735.400,00	42.825.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.066.981.704,00	2.973.626.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	43.899.500,00	41.649.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	62.978.000,00	59.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	40.000.000,00	39.518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	439.142.000,00	327.414.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	439.142.000,00	327.414.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	239.142.000,00	129.094.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	200.000.000,00	198.319.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.402.423.870,00	4.910.910.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.402.423.870,00	4.910.910.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	378.795.000,00	286.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	378.795.000,00	286.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	125.400.000,00	124.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	253.395.000,00	161.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.652.409.700,00	3.225.570.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.660.379.000,00	1.460.906.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Pengendalian Program KKBPK	147.184.000,00	139.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	785.530.000,00	704.252.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	327.600.000,00	271.266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	250.065.000,00	195.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	507.000.000,00	507.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	507.000.000,00	507.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.161.395.700,00	949.911.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	17.196.000,00	15.891.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.126.904.700,00	919.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	17.295.000,00	14.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	323.635.000,00	307.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	319.885.000,00	304.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.371.219.170,00	1.399.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	128.833.170,00	93.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	128.833.170,00	93.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.242.386.000,00	1.305.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	958.576.000,00	596.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.283.810.000,00	708.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	4.394.378.974,00	4.212.366.053,00	5.566.000,00	5.566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Dinas Perhubungan	4.394.378.974,00	4.212.366.053,00	5.566.000,00	5.566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.067.280.848,00	3.890.839.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.943.445.046,00	2.773.952.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.943.445.046,00	2.773.952.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Administrasi Umum Perangkat Daerah	374.754.226,00	374.482.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.058.000,00	5.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.206.310,00	53.195.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.923.916,00	21.921.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285.566.000,00	285.307.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.389.776,00	497.574.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,00	17.972.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	482.389.776,00	479.602.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.691.800,00	239.970.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.535.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	226.086.800,00	225.944.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.070.000,00	1.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	327.098.126,00	321.526.900,00	5.566.000,00	5.566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	127.910.000,00	127.319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	127.910.000,00	127.319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	69.755.000,00	65.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	69.755.000,00	65.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	48.768.026,00	48.767.800,00	5.566.000,00	5.566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	48.768.026,00	48.767.800,00	5.566.000,00	5.566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	29.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	30.000.000,00	29.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	50.665.100,00	50.225.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	50.665.100,00	50.225.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.619.136.565,00	8.233.325.165,00	161.864.800,00	146.757.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.619.136.565,00	8.233.325.165,00	161.864.800,00	146.757.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.396.041.899,00	3.082.782.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.001.000,00	9.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.001.000,00	9.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.254.467.829,00	2.059.602.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.254.467.829,00	2.059.602.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	422.693.290,00	410.478.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.608.600,00	17.608.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.532.540,00	98.031.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.203.150,00	23.802.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.640.000,00	25.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.709.000,00	245.435.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	542.927.680,00	459.572.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000,00	76.471.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.035.400,00	17.975.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	394.892.280,00	365.125.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.952.100,00	143.140.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	156.773.000,00	141.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.179.100,00	2.027.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.702.340.050,00	1.692.083.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.702.340.050,00	1.692.083.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	316.180.900,00	307.310.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	62.014.900,00	60.703.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Pelayanan Informasi Publik	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Layanan Hubungan Media	640.144.250,00	640.069.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	444.000.000,00	444.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.520.754.616,00	3.458.459.115,00	161.864.800,00	146.757.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.520.780.000,00	2.520.095.000,00	51.600.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.520.780.000,00	2.520.095.000,00	51.600.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	999.974.616,00	938.364.115,00	110.264.800,00	99.257.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	175.477.500,00	163.176.115,00	8.000.000,00	5.587.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	500.010.116,00	463.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	324.487.000,00	311.614.000,00	102.264.800,00	93.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.927.372.559,00	1.300.215.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.927.372.559,00	1.300.215.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	630.949.309,00	579.998.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.683.120,00	84.073.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	76.873.120,00	76.243.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.810.000,00	7.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	417.904.991,00	401.325.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.114.425,00	55.773.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	350.790.566,00	345.552.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.361.198,00	94.599.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126.361.198,00	94.599.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	56.754.250,00	48.985.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	56.754.250,00	48.985.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	56.754.250,00	48.985.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	206.705.750,00	177.360.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	206.705.750,00	177.360.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	206.705.750,00	177.360.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	595.463.250,00	493.870.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	595.463.250,00	493.870.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	126.319.250,00	124.298.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	155.005.000,00	135.416.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	314.139.000,00	234.154.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	437.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	437.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	437.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.041.241.839,00	4.793.294.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	5.041.241.839,00	4.793.294.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.425.696.839,00	4.189.502.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.479.219.697,00	3.280.510.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.479.219.697,00	3.280.510.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	Administrasi Umum Perangkat Daerah	581.714.400,00	572.884.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.015.400,00	5.015.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.829.000,00	123.829.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.481.000,00	45.481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.840.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	397.549.000,00	392.858.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296.682.492,00	275.244.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	3.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.922.892,00	36.692.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.375.000,00	16.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	219.384.600,00	218.837.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.080.250,00	60.863.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.080.250,00	60.863.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	615.545.000,00	603.791.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	615.545.000,00	603.791.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	91.942.000,00	89.662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	337.124.000,00	333.919.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	Pengawasan Penanaman Modal	186.479.000,00	180.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8.074.604.889,00	7.614.411.219,00	169.865.000,00	31.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	8.074.604.889,00	7.614.411.219,00	169.865.000,00	31.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.105.483.890,00	5.738.504.269,00	31.165.000,00	31.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.745.332.745,00	3.535.002.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.745.332.745,00	3.535.002.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Administrasi Umum Perangkat Daerah	704.245.750,00	631.277.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.127.800,00	90.122.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.001.950,00	29.001.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.200.000,00	9.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	544.916.000,00	487.242.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	31.165.000,00	31.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	31.165.000,00	31.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.474.370.370,00	1.425.308.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169.032.000,00	141.203.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.305.338.370,00	1.284.104.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.535.025,00	123.916.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.940.000,00	40.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.205.200,00	2.310.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.520.000,00	8.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	72.869.825,00	72.869.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	725.000.000,00	721.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	100.000.000,00	96.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	100.000.000,00	96.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	625.000.000,00	625.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	625.000.000,00	625.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.244.120.999,00	1.154.809.950,00	138.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	317.078.499,00	291.490.450,00	138.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	199.999.949,00	193.213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	117.078.550,00	98.277.450,00	138.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	539.542.500,00	493.319.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	390.000.000,00	355.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	50.000.000,00	47.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	99.542.500,00	91.158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	387.500.000,00	370.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	87.500.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	44.484.000,00	44.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	Dinas Komunikasi dan Informatika	44.484.000,00	44.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	44.484.000,00	44.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.20	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	44.484.000,00	44.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	Membangun Metadata Statistik Sektoral	44.484.000,00	44.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	49.450.520,00	40.398.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	Dinas Komunikasi dan Informatika	49.450.520,00	40.398.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	49.450.520,00	40.398.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49.450.520,00	40.398.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.895.000,00	20.751.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	28.555.520,00	19.646.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.504.511.700,00	1.234.291.300,00	177.487.000,00	42.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1.504.511.700,00	1.234.291.300,00	177.487.000,00	42.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.201.999.400,00	966.188.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.001.997.400,00	766.676.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.001.997.400,00	766.676.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.002.000,00	99.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	100.002.000,00	99.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	302.512.300,00	268.103.000,00	177.487.000,00	42.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100.000.000,00	70.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	100.000.000,00	70.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	202.512.300,00	197.463.000,00	177.487.000,00	42.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	Pelindungan Cagar Budaya	37.000.000,00	34.702.000,00	43.000.000,00	42.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	Pengembangan Cagar Budaya	165.512.300,00	162.761.000,00	134.487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.277.881.312,00	2.936.893.088,00	93.100.000,00	92.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.277.881.312,00	2.936.893.088,00	93.100.000,00	92.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.078.759.062,00	2.740.709.941,00	20.000.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.270.487.722,00	2.021.417.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.270.487.722,00	2.021.417.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.213.400,00	231.877.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.990.400,00	8.720.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.031.500,00	69.031.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.134.000,00	25.133.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.057.500,00	119.991.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.160.000,00	8.160.000,00	20.000.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.160.000,00	8.160.000,00	20.000.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	470.153.820,00	383.447.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.200.000,00	13.197.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	372.953.820,00	370.249.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.744.120,00	95.807.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.724.120,00	85.787.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.020.000,00	10.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	199.122.250,00	196.183.147,00	73.100.000,00	72.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.856.000,00	33.344.000,00	73.100.000,00	72.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	12.494.000,00	12.359.000,00	7.500.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	Pengembangan Bahan Pustaka	8.362.000,00	7.025.000,00	65.600.000,00	65.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.000.000,00	13.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	164.266.250,00	162.839.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	21.020.000,00	20.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	143.246.250,00	141.879.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	100.000.000,00	97.416.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100.000.000,00	97.416.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	100.000.000,00	97.416.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	17.886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	20.000.000,00	17.886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	80.000.000,00	79.530.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000,00	79.530.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	20.240.646.975,00	15.975.145.335,00	7.596.049.992,00	5.028.337.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	567.438.900,00	78.512.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	567.438.900,00	78.512.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	567.438.900,00	78.512.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	480.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	480.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	87.198.900,00	78.512.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	87.198.900,00	78.512.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	7.296.706.250,00	6.866.397.484,00	3.538.573.884,00	1.074.711.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	7.296.706.250,00	6.866.397.484,00	3.538.573.884,00	1.074.711.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.346.829.250,00	1.138.807.450,00	3.338.573.884,00	1.074.711.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	614.345.000,00	506.992.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	614.345.000,00	506.992.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	732.484.250,00	631.814.950,00	3.338.573.884,00	1.074.711.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	389.000.000,00	386.274.600,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	173.484.250,00	80.608.850,00	3.327.573.884,00	1.074.711.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	170.000.000,00	164.931.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.296.000.000,00	4.269.007.334,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4.296.000.000,00	4.269.007.334,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	4.246.000.000,00	4.232.328.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	50.000.000,00	36.679.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.653.877.000,00	1.458.582.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.553.877.000,00	1.368.130.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	350.000.000,00	313.066.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	857.210.000,00	792.598.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	346.667.000,00	262.465.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100.000.000,00	90.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	100.000.000,00	90.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	4.930.526.320,00	4.220.903.720,00	2.740.414.634,00	2.737.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	4.930.526.320,00	4.220.903.720,00	2.740.414.634,00	2.737.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	670.712.000,00	645.582.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	670.712.000,00	645.582.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	455.000.000,00	437.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	215.712.000,00	208.347.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.891.662.320,00	3.211.186.320,00	2.740.414.634,00	2.737.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	Pengembangan Prasarana Pertanian	865.171.000,00	196.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	865.171.000,00	196.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.026.491.320,00	3.015.021.320,00	2.740.414.634,00	2.737.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.845.518.820,00	2.839.393.820,00	1.320.445.202,00	1.319.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	180.972.500,00	175.627.500,00	1.419.969.432,00	1.418.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	54.592.000,00	54.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	54.592.000,00	54.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	54.592.000,00	54.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	313.560.000,00	309.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	313.560.000,00	309.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	313.560.000,00	309.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	419.762.108,00	325.733.277,00	170.526.000,00	170.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	419.762.108,00	325.733.277,00	170.526.000,00	170.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	121.534.000,00	118.685.656,00	170.526.000,00	170.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	121.534.000,00	118.685.656,00	170.526.000,00	170.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	73.444.000,00	73.145.656,00	170.526.000,00	170.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	48.090.000,00	45.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	160.372.108,00	73.335.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	160.372.108,00	73.335.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	Pameran Dagang Nasional	150.072.108,00	63.035.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	Pameran Dagang Lokal	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	30.000.000,00	27.335.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	30.000.000,00	27.335.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	22.468.400,00	20.244.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	7.531.600,00	7.090.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	107.856.000,00	106.376.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	107.856.000,00	106.376.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	107.856.000,00	106.376.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	7.026.213.397,00	4.483.598.454,00	1.146.535.474,00	1.045.735.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.026.213.397,00	4.483.598.454,00	1.146.535.474,00	1.045.735.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.31	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.457.311.547,00	3.245.401.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.276.551.947,00	3.089.854.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.276.551.947,00	3.089.854.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.759.600,00	155.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.329.600,00	10.329.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.430.000,00	145.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.568.901.850,00	1.238.196.735,00	1.146.535.474,00	1.045.735.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.568.901.850,00	1.238.196.735,00	1.146.535.474,00	1.045.735.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	61.900.000,00	56.814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.507.001.850,00	1.181.382.735,00	1.146.535.474,00	1.045.735.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	86.910.159.408,00	78.897.881.341,00	908.539.690,00	787.999.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	41.082.070.382,00	36.379.232.144,00	198.180.870,00	132.519.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Sekretariat Daerah	41.082.070.382,00	36.379.232.144,00	198.180.870,00	132.519.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.254.725.032,00	31.594.056.705,00	198.180.870,00	132.519.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	228.292.700,00	227.342.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.592.000,00	25.221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.827.000,00	9.827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.010.500,00	10.010.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	13.493.200,00	13.493.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.965.000,00	15.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	153.405.000,00	152.826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.599.041.299,00	11.523.974.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.448.392.799,00	11.375.883.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	78.358.000,00	76.977.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	72.290.500,00	71.113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	102.393.000,00	97.678.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	14.854.000,00	14.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	87.539.000,00	83.625.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	409.784.000,00	92.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.284.000,00	7.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	346.500.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.457.066.850,00	5.666.667.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	130.006.000,00	127.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	239.998.050,00	239.985.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	240.901.800,00	202.858.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	110.000.000,00	84.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.962.460.000,00	1.517.372.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.773.701.000,00	3.493.750.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.210.000,00	48.660.000,00	198.180.870,00	132.519.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.210.000,00	48.660.000,00	198.180.870,00	132.519.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.753.419.400,00	8.487.206.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	53.105.000,00	52.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.120.350.000,00	6.905.519.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.579.964.400,00	1.529.472.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.738.286.183,00	2.193.969.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	449.544.300,00	351.398.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.579.973.883,00	1.156.393.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	442.818.000,00	441.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	265.950.000,00	245.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.192.507.600,00	682.984.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	214.330.000,00	60.021.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	215.177.600,00	197.103.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	88.000.000,00	54.918.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	675.000.000,00	370.942.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	985.724.000,00	964.634.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	600.000.000,00	587.863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	140.000.000,00	131.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	245.724.000,00	245.693.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Penataan Organisasi	628.000.000,00	531.783.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	240.000.000,00	210.569.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	105.000.000,00	100.663.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	168.000.000,00	119.495.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	35.000.000,00	32.262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	80.000.000,00	68.793.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.111.000.000,00	1.076.615.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Fasilitasi Keprotokolan	154.887.000,00	142.016.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	367.729.000,00	363.264.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	588.384.000,00	571.334.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.380.115.350,00	3.020.159.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1.461.659.000,00	1.303.401.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	522.594.600,00	482.849.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	532.016.800,00	460.353.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	407.047.600,00	360.198.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1.308.690.350,00	1.153.799.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	958.737.000,00	840.724.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	41.174.000,00	13.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	308.779.350,00	299.509.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	609.766.000,00	562.958.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	187.000.000,00	165.444.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Fasilitasi Bantuan Hukum	285.516.000,00	260.577.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	137.250.000,00	136.936.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.447.230.000,00	1.765.015.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	592.750.000,00	539.890.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	297.750.000,00	256.999.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	140.000.000,00	134.709.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	155.000.000,00	148.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	325.000.000,00	291.884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	136.930.000,00	125.343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	97.353.000,00	85.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	90.717.000,00	81.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.529.480.000,00	933.241.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.077.160.000,00	713.563.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	105.000.000,00	27.819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	347.320.000,00	191.859.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	SEKRETARIAT DPRD	45.828.089.026,00	42.518.649.197,00	710.358.820,00	655.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Sekretariat DPRD	45.828.089.026,00	42.518.649.197,00	710.358.820,00	655.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.431.920.026,00	25.737.070.528,00	710.358.820,00	655.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.741.000,00	19.653.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.444.000,00	6.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.297.000,00	13.209.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.791.472.405,00	2.548.914.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.791.472.405,00	2.548.914.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.100.831.500,00	934.160.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	748.376.500,00	729.252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	352.455.000,00	204.907.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.110.093.814,00	4.062.830.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	85.646.300,00	73.976.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	164.202.514,00	160.008.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.838.645.000,00	3.807.246.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.887.500,00	64.520.000,00	520.160.820,00	465.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	289.966.620,00	285.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	64.887.500,00	64.520.000,00	230.194.200,00	179.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.660.838.212,00	1.568.516.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.730.000,00	68.792.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	176.919.600,00	140.371.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.374.188.612,00	1.359.352.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	698.157.539,00	491.209.385,00	190.198.000,00	190.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	690.355.539,00	483.489.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.802.000,00	7.720.000,00	190.198.000,00	190.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	15.905.898.056,00	15.004.765.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	15.695.898.056,00	14.896.765.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	210.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Layanan Administrasi DPRD	1.080.000.000,00	1.042.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.080.000.000,00	1.042.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	18.396.169.000,00	16.781.578.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Peningkatan Kapasitas DPRD	17.412.037.000,00	16.122.088.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Orientasi DPRD	14.552.940.000,00	14.261.454.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Pendalaman Tugas DPRD	2.826.312.000,00	1.842.079.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	32.785.000,00	18.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	982.450.000,00	659.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Kunjungan Kerja dalam Daerah	90.000.000,00	13.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Pelaksanaan Reses	892.450.000,00	646.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	26.977.342.532,00	24.609.176.271,00	396.920.400,00	380.301.000,00	4.000.000.000,00	3.581.937.735,00	204.997.221.000,00	204.997.221.000,00
5.01	PERENCANAAN	5.980.369.770,00	5.490.556.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	5.980.369.770,00	5.490.556.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.379.658.370,00	4.069.693.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.032.500,00	24.232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.012.500,00	14.512.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.020.000,00	9.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.553.562.440,00	3.282.763.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.553.562.440,00	3.282.763.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.000.000,00	48.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49.000.000,00	48.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	393.009.000,00	378.860.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.986.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.651.400,00	22.386.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.971.600,00	21.959.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000,00	3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	334.000.000,00	328.194.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.467.680,00	206.800.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.800.000,00	23.193.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	183.667.680,00	183.606.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.586.750,00	128.661.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.054.750,00	86.585.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	272.000,00	121.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.620.000,00	15.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.790.000,00	8.679.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.850.000,00	17.654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	998.155.500,00	841.124.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	913.595.500,00	760.805.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	69.730.000,00	67.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	843.865.500,00	693.695.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	84.560.000,00	80.319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	84.560.000,00	80.319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	602.555.900,00	579.738.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	355.436.900,00	352.162.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	202.263.900,00	199.643.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	153.173.000,00	152.519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	166.196.400,00	150.568.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	83.179.200,00	74.463.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	83.017.200,00	76.105.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	80.922.600,00	77.007.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	80.922.600,00	77.007.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	KEUANGAN	15.561.217.949,00	14.805.043.726,00	396.920.400,00	380.301.000,00	4.000.000.000,00	3.581.937.735,00	204.997.221.000,00	204.997.221.000,00
5.02	Badan Keuangan dan Aset Daerah	9.748.295.312,00	9.210.821.696,00	396.920.400,00	380.301.000,00	4.000.000.000,00	3.581.937.735,00	204.997.221.000,00	204.997.221.000,00
5.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.932.974.152,00	5.573.990.161,00	396.920.400,00	380.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.895.000,00	18.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.409.000,00	9.409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.486.000,00	9.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.990.266.177,00	3.761.766.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.970.433.677,00	3.741.934.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.832.500,00	19.832.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	203.078.500,00	180.958.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	151.953.500,00	132.228.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	51.125.000,00	48.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	843.569.600,00	837.034.254,00	16.406.000,00	16.406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.452.000,00	10.452.000,00	4.576.000,00	4.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	143.257.400,00	143.257.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.763.200,00	25.763.200,00	11.830.000,00	11.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	139.888.000,00	137.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	522.409.000,00	519.058.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.045.000,00	50.045.000,00	380.514.400,00	363.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.045.000,00	50.045.000,00	380.514.400,00	363.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	461.714.600,00	452.280.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.450.000,00	3.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.200.000,00	24.526.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	425.064.600,00	424.511.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365.405.275,00	273.010.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	278.167.275,00	221.292.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.256.000,00	27.587.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.982.000,00	24.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.748.169.160,00	2.627.751.997,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	3.581.937.735,00	204.997.221.000,00	204.997.221.000,00
5.02	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.296.427.360,00	1.248.061.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	96.566.000,00	79.625.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	121.255.400,00	111.477.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	28.853.300,00	28.559.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	18.444.100,00	18.151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	53.531.660,00	53.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	60.242.100,00	59.764.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	482.872.000,00	468.567.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	410.051.000,00	406.126.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	24.611.800,00	22.780.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	544.732.000,00	539.807.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	181.997.400,00	181.367.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	129.760.000,00	129.370.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	127.992.600,00	126.826.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	104.982.000,00	102.242.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	566.097.000,00	541.165.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	202.721.000,00	200.321.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	149.480.000,00	133.434.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	201.230.000,00	200.353.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	12.666.000,00	7.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	177.673.000,00	152.085.000,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	3.581.937.735,00	204.997.221.000,00	204.997.221.000,00
5.02	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	95.593.500,00	77.884.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.827.221.000,00	202.827.221.000,00
5.02	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	82.079.500,00	74.200.500,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	3.581.937.735,00	0	0,00
5.02	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.000.000,00	2.170.000.000,00
5.02	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	163.239.800,00	146.633.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	163.239.800,00	146.633.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.067.152.000,00	1.009.079.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.067.152.000,00	1.009.079.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Penyusunan Standar Harga	143.652.000,00	138.499.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	28.000.000,00	27.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Pengamanan Barang Milik Daerah	320.000.000,00	289.212.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Penilaian Barang Milik Daerah	120.000.000,00	116.057.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	42.200.000,00	35.746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	63.800.000,00	59.778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	349.500.000,00	342.714.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Badan Pendapatan Daerah	5.812.922.637,00	5.594.222.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.472.926.307,00	4.256.918.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.144.500,00	5.142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.144.500,00	5.142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.324.814.067,00	3.123.915.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.324.814.067,00	3.123.915.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	247.273.900,00	247.175.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.887.000,00	1.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.915.200,00	22.915.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.254.700,00	2.254.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.217.000,00	220.118.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	672.700.763,00	657.785.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.985.000,00	15.301.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	653.715.763,00	642.484.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.993.077,00	222.898.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.543.077,00	112.470.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110.450.000,00	110.427.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.339.996.330,00	1.337.303.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.339.996.330,00	1.337.303.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	70.000.000,00	69.943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	306.680.000,00	304.305.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	187.701.800,00	187.518.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Penetapan Wajib Pajak Daerah	204.160.000,00	204.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Penagihan Pajak Daerah	315.700.280,00	315.644.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	44.191.850,00	44.191.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	83.242.400,00	83.222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	128.320.000,00	128.318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	KEPEGAWAIAN	4.199.133.664,00	3.349.656.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.199.133.664,00	3.349.656.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.313.681.664,00	2.844.542.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.497.373.824,00	2.189.160.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.497.373.824,00	2.189.160.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	657.657.000,00	506.541.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	7.507.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.140.600,00	121.684.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.962.400,00	22.756.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	467.554.000,00	354.593.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.753.840,00	96.158.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000,00	8.977.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.753.840,00	87.180.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.897.000,00	52.681.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.997.000,00	43.017.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.900.000,00	9.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	885.452.000,00	505.114.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	352.000.000,00	304.081.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	352.000.000,00	304.081.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Mutasi dan Promosi ASN	483.452.000,00	160.538.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Pengelolaan Mutasi ASN	483.452.000,00	160.538.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	50.000.000,00	40.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	50.000.000,00	40.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	349.787.000,00	290.303.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	349.787.000,00	290.303.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	349.787.000,00	290.303.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	Pengembangan Kompetensi Teknis	134.787.000,00	113.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	134.787.000,00	113.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	215.000.000,00	177.141.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	200.000.000,00	162.672.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.04	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	15.000.000,00	14.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	886.834.149,00	673.616.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	886.834.149,00	673.616.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	886.834.149,00	673.616.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	517.245.299,00	344.674.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	517.245.299,00	344.674.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	149.999.800,00	126.299.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	149.999.800,00	126.299.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	150.015.000,00	136.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	150.015.000,00	136.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	69.574.050,00	65.653.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	69.574.050,00	65.653.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	8.785.547.239,00	8.160.802.202,00	322.513.000,00	309.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	8.785.547.239,00	8.160.802.202,00	322.513.000,00	309.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Inspektorat	8.784.047.239,00	8.159.302.202,00	322.513.000,00	309.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.162.677.239,00	6.557.663.202,00	322.513.000,00	309.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.219.747.499,00	4.975.058.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.219.747.499,00	4.975.058.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	519.000.000,00	256.633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000,00	57.546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	444.000.000,00	199.087.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	881.076.515,00	864.894.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.997.400,00	9.775.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	207.179.115,00	206.123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	102.896.000,00	102.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	559.204.000,00	545.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.500.000,00	0,00	322.513.000,00	309.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.500.000,00	0,00	282.513.000,00	269.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.466.600,00	126.229.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.900.000,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00	17.011.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.566.600,00	108.743.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	384.886.625,00	334.846.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	271.811.625,00	230.551.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.605.000,00	7.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	97.470.000,00	97.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.377.160.000,00	1.360.119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.275.910.000,00	1.259.546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	340.580.000,00	338.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Reviu Laporan Kinerja	34.980.000,00	34.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Reviu Laporan Keuangan	91.710.000,00	91.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Pengawasan Desa	598.270.000,00	596.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	210.370.000,00	198.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	101.250.000,00	100.573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	49.820.000,00	49.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	51.430.000,00	51.223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	244.210.000,00	241.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01	Pendampingan dan Asistensi	244.210.000,00	241.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	45.000.000,00	44.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	199.210.000,00	197.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Kecamatan Sidikalang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	36.019.256.078,00	33.145.852.532,00	240.369.929,00	219.697.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	KECAMATAN	36.019.256.078,00	33.145.852.532,00	240.369.929,00	219.697.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kecamatan Sidikalang	7.095.368.902,00	6.832.767.751,00	904.600,00	904.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.882.794.252,00	5.633.582.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.656.046.516,00	4.444.212.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.656.046.516,00	4.444.212.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	344.824.680,00	314.579.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.731.900,00	12.154.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.194.780,00	107.233.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	62.948.000,00	62.879.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.950.000,00	132.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	799.795.056,00	793.365.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.500.000,00	21.070.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	772.295.056,00	772.295.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.128.000,00	81.424.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.470.000,00	33.467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.108.000,00	28.107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.550.000,00	19.849.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.093.779.450,00	1.080.393.200,00	904.600,00	904.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.860.000,00	12.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.080.919.450,00	1.067.533.200,00	904.600,00	904.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.275.400,00	2.275.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.078.644.050,00	1.065.257.800,00	904.600,00	904.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	113.302.800,00	113.300.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	113.302.800,00	113.300.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	52.906.800,00	52.906.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60.396.000,00	60.393.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.492.400,00	5.492.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.492.400,00	5.492.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.452.400,00	3.452.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kecamatan Sumbul	3.034.229.335,00	2.860.115.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.699.011.785,00	2.533.316.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.282.538.439,00	2.117.428.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.282.538.439,00	2.117.428.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.522.566,00	149.492.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.428.800,00	2.428.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.648.716,00	37.648.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.935.050,00	3.935.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.510.000,00	105.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.835.780,00	216.416.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.982.500,00	13.710.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202.853.280,00	202.705.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.735.000,00	46.598.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.005.000,00	44.868.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	249.963.400,00	241.605.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	49.963.400,00	46.103.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.764.800,00	9.764.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.198.600,00	36.338.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.000.000,00	195.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000,00	195.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	75.846.800,00	75.846.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	75.846.800,00	75.846.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	49.981.800,00	49.981.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25.865.000,00	25.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.407.350,00	9.347.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.407.350,00	9.347.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.837.350,00	4.837.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.570.000,00	4.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kecamatan Silima Pungga pungga	2.952.688.747,00	2.755.384.412,00	64.812.700,00	64.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.674.999.947,00	2.478.955.612,00	6.212.700,00	6.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.389.000,00	4.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.219.000,00	2.219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.258.289.707,00	2.072.505.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.258.289.707,00	2.072.505.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.312.943,00	161.207.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.665.000,00	12.651.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.001.400,00	43.001.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.196.543,00	24.196.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.450.000,00	81.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	6.212.700,00	6.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	2.925.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	3.287.700,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.606.600,00	189.761.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.040.000,00	11.761.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.566.600,00	174.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.401.697,00	51.092.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.871.697,00	47.562.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	176.468.500,00	175.288.500,00	58.600.000,00	58.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	34.590.500,00	34.530.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.090.500,00	27.030.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	141.878.000,00	140.758.000,00	58.600.000,00	58.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.288.800,00	6.288.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9.511.000,00	8.391.000,00	58.600.000,00	58.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	126.078.200,00	126.078.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	76.992.300,00	76.992.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	76.992.300,00	76.992.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	34.090.300,00	34.090.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	42.902.000,00	42.902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	24.228.000,00	24.148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24.228.000,00	24.148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.775.000,00	7.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16.453.000,00	16.413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kecamatan Siempat Nempu	2.176.974.722,00	1.984.224.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.946.995.954,00	1.754.830.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.930.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.650.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.650.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.300.000,00	3.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.578.928.430,00	1.404.505.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.578.928.430,00	1.404.505.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.625.983,00	138.565.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.537.700,00	8.537.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.879.200,00	48.878.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.389.083,00	20.358.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.820.000,00	60.791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.239.960,00	71.735.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.500.000,00	6.043.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.739.960,00	65.692.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.271.581,00	131.172.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.271.581,00	41.172.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	28.980.000,00	28.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	28.980.000,00	28.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.980.000,00	14.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	188.918.768,00	188.853.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	188.918.768,00	188.853.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	88.603.768,00	88.603.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100.315.000,00	100.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.080.000,00	11.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.080.000,00	11.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.780.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.300.000,00	6.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kecamatan Tiga Lingga	1.964.535.154,00	1.753.740.461,00	43.865.169,00	28.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.799.560.154,00	1.597.051.261,00	28.425.969,00	28.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.207.000,00	9.207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.527.000,00	3.527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.680.000,00	5.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.514.209.427,00	1.327.064.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.514.209.427,00	1.327.064.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.925.360,00	113.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.027.000,00	4.964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.794.160,00	37.778.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.874.200,00	14.874.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.230.000,00	56.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	28.425.969,00	28.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	20.989.969,00	20.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	7.436.000,00	7.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.193.840,00	89.458.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.440.000,00	5.858.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.753.840,00	81.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.024.527,00	57.388.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.004.527,00	37.468.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.100.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	53.132.000,00	53.082.000,00	15.439.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	53.132.000,00	53.082.000,00	15.439.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	31.732.000,00	31.682.000,00	15.439.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	74.041.800,00	65.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	74.041.800,00	65.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	43.750.000,00	43.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30.291.800,00	22.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	37.801.200,00	37.801.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	37.801.200,00	37.801.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16.078.000,00	16.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21.723.200,00	21.723.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kecamatan Tanah Pinem	2.001.538.191,00	1.796.032.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.841.262.191,00	1.635.816.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.352.000,00	6.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.176.000,00	3.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.176.000,00	3.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.430.877.295,00	1.236.418.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.430.877.295,00	1.236.418.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.596.205,00	219.125.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.597.800,00	5.597.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.278.705,00	31.278.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.113.700,00	20.113.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.606.000,00	162.135.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.153.840,00	103.231.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.400.000,00	14.696.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.753.840,00	87.535.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.282.851,00	70.688.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.562.851,00	64.968.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40.560.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	40.560.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18.970.000,00	18.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.590.000,00	21.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	91.551.000,00	91.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	91.551.000,00	91.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	15.116.000,00	15.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	76.435.000,00	76.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.165.000,00	28.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.165.000,00	28.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	15.605.000,00	15.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.560.000,00	12.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kecamatan Pegagan Hilir	1.704.997.739,00	1.556.043.439,00	8.073.660,00	8.073.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.526.047.739,00	1.386.772.129,00	7.023.660,00	7.023.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.370.000,00	2.369.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.370.000,00	2.369.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.227.071.399,00	1.129.613.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.227.071.399,00	1.129.613.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	102.818.052,00	84.252.200,00	7.023.660,00	7.023.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.701.800,00	5.701.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.568.200,00	13.568.200,00	7.023.660,00	7.023.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.138.052,00	8.129.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.410.000,00	56.853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.516.288,00	71.419.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.200.000,00	3.169.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.066.288,00	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.272.000,00	99.117.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.742.000,00	60.607.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pemeliharaan Mebel	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.405.000,00	23.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.475.000,00	12.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	45.685.390,00	39.065.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.280.000,00	7.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.280.000,00	7.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	32.405.390,00	31.905.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	32.405.390,00	31.905.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	105.556.210,00	103.056.210,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	105.556.210,00	103.056.210,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	53.626.210,00	53.626.210,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	51.930.000,00	49.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27.708.400,00	27.149.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.708.400,00	27.149.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.904.400,00	5.904.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21.804.000,00	21.245.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kecamatan Parbuluan	2.036.079.637,00	1.885.346.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.792.484.637,00	1.643.806.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.529.978.039,00	1.403.403.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.529.978.039,00	1.403.403.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	127.725.350,00	110.077.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.070.700,00	11.070.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.810.100,00	27.810.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.648.550,00	12.648.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.196.000,00	58.548.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.510.000,00	22.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.510.000,00	22.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.661.808,00	64.398.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.960.000,00	5.428.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.531.808,00	57.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.609.440,00	43.417.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.609.440,00	43.417.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	71.840.000,00	71.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	71.840.000,00	71.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19.840.000,00	19.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	160.635.000,00	158.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	160.635.000,00	158.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	88.190.000,00	88.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	72.445.000,00	70.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.120.000,00	11.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.120.000,00	11.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11.120.000,00	11.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	1.594.767.108,00	1.429.259.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.414.097.288,00	1.248.719.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.120.848.603,00	956.070.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.120.848.603,00	956.070.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.161.800,00	101.041.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.205.900,00	6.205.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.411.500,00	25.411.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.029.400,00	18.029.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.515.000,00	51.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.706.580,00	52.706.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.706.580,00	52.706.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.500.490,00	77.022.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.782.200,00	1.782.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.218.290,00	70.739.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.879.815,00	61.879.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.879.815,00	61.879.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	45.790.000,00	45.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	45.790.000,00	45.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.285.000,00	16.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	29.505.000,00	29.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	53.684.720,00	53.684.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	53.684.720,00	53.684.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	32.009.720,00	32.009.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	21.675.000,00	21.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	81.195.100,00	81.095.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	81.195.100,00	81.095.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	47.793.100,00	47.743.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	33.402.000,00	33.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	1.981.160.661,00	1.776.242.084,00	25.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.892.217.061,00	1.691.074.084,00	25.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.524.250.413,00	1.376.962.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.524.250.413,00	1.376.962.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	261.059.800,00	226.111.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.805.800,00	7.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.750.000,00	75.266.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.160.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.344.000,00	130.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	25.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	25.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.906.848,00	88.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.090.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.650.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.166.848,00	81.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.468.000,00	3.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.468.000,00	3.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.468.000,00	3.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	24.125.600,00	23.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	8.375.600,00	8.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	8.375.600,00	8.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	53.900.000,00	53.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	53.900.000,00	53.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	53.900.000,00	53.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.450.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.450.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.450.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kecamatan Lae Parira	1.856.723.731,00	1.701.140.629,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.742.477.731,00	1.588.188.629,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.447.022.891,00	1.299.634.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.444.032.891,00	1.296.644.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	143.037.000,00	143.026.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.442.500,00	2.442.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.923.500,00	26.923.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.290.000,00	20.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.381.000,00	93.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.153.840,00	90.578.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.400.000,00	3.583.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.753.840,00	86.995.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.264.000,00	49.948.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.642.500,00	33.327.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.621.500,00	16.621.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40.481.000,00	39.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	40.481.000,00	39.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.489.000,00	16.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.992.000,00	23.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	73.765.000,00	73.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	73.765.000,00	73.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	29.570.000,00	29.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	44.195.000,00	44.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kecamatan Gunung Sitember	1.652.382.090,00	1.524.757.055,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.512.592.090,00	1.385.232.855,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.210.941.846,00	1.094.316.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.210.941.846,00	1.094.316.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	169.604.534,00	165.400.300,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000,00	40.800.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.620.534,00	23.616.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.984.000,00	91.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.083.960,00	66.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.344.000,00	5.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.739.960,00	61.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.961.750,00	48.955.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.961.750,00	48.955.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.000.000,00	16.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	17.000.000,00	16.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17.000.000,00	16.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	82.790.000,00	82.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	82.790.000,00	82.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	25.000.000,00	24.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	57.790.000,00	57.587.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.000.000,00	19.986.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.000.000,00	19.986.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20.000.000,00	19.986.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kecamatan Berampu	1.623.673.224,00	1.482.874.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.491.424.274,00	1.356.083.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.020.000,00	5.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.670.000,00	3.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.243.437.713,00	1.125.543.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.243.437.713,00	1.125.543.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.216.300,00	102.171.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.812.500,00	4.812.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.444.800,00	29.444.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.464.000,00	17.419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.495.000,00	50.495.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.595.880,00	75.465.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.400.000,00	12.090.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.695.880,00	61.874.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.154.381,00	46.932.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.533.581,00	34.396.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.430.800,00	10.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30.582.950,00	30.392.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.582.950,00	30.392.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.014.500,00	8.854.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.568.450,00	21.538.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	86.313.000,00	81.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	86.313.000,00	81.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	47.913.000,00	42.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.353.000,00	15.353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.353.000,00	15.353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.353.000,00	15.353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kecamatan Silahisabungan	1.594.938.027,00	1.370.126.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.404.938.027,00	1.191.106.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.149.410.250,00	973.134.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.149.410.250,00	973.134.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.508.500,00	99.198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.022.000,00	10.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.440.850,00	14.440.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.970.650,00	16.970.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.075.000,00	57.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.285.696,00	84.567.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000,00	1.967.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.285.696,00	81.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.733.581,00	34.205.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.733.581,00	34.205.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	73.612.000,00	70.432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	73.612.000,00	70.432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	68.512.000,00	65.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	92.813.000,00	85.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	92.813.000,00	85.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	57.463.000,00	57.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	35.350.000,00	27.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	23.575.000,00	23.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.575.000,00	23.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.275.000,00	15.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kecamatan Sitinjo	2.749.198.810,00	2.437.798.090,00	60.213.800,00	60.213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.390.366.160,00	2.131.060.340,00	60.213.800,00	60.213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.028.674.840,00	1.801.098.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.028.674.840,00	1.801.098.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.484.400,00	143.227.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.854.000,00	2.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.704.700,00	29.704.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.498.700,00	11.498.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.307.000,00	96.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	60.213.800,00	60.213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	60.213.800,00	60.213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.676.920,00	123.854.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.800.000,00	7.356.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	115.876.920,00	115.497.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.530.000,00	61.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.530.000,00	61.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.900.000,00	16.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	19.900.000,00	16.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.900.000,00	16.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	244.066.850,00	202.643.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	16.406.000,00	16.406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.406.000,00	16.406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	227.660.850,00	186.237.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	227.660.850,00	186.237.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	94.865.800,00	87.753.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	94.865.800,00	87.753.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	27.057.800,00	27.057.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	67.808.000,00	60.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	41.955.738.246,00	40.911.044.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	41.955.738.246,00	40.911.044.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	41.955.738.246,00	40.911.044.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.305.139.246,00	2.032.620.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.912.645.002,00	1.691.803.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.897.617.002,00	1.679.646.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.028.000,00	12.157.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	270.072.784,00	224.231.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.089.634,00	65.088.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.523.150,00	7.757.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.460.000,00	151.385.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.971.960,00	77.404.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.232.000,00	10.281.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.739.960,00	65.123.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.449.500,00	39.180.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.449.500,00	39.180.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	560.000.000,00	546.811.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	560.000.000,00	546.811.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60.000.000,00	50.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	Pembentukan Paskibraka	500.000.000,00	496.289.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	30.590.599.000,00	30.580.202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	30.590.599.000,00	30.580.202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	30.460.599.000,00	30.460.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	130.000.000,00	119.603.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	990.000.000,00	990.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	990.000.000,00	990.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	990.000.000,00	990.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	7.410.000.000,00	6.661.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	7.410.000.000,00	6.661.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	7.000.000.000,00	6.310.822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	260.000.000,00	230.364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150.000.000,00	120.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	998.719.782.947,00	909.963.663.123,20	144.429.549.430,00	130.216.588.940,88	4.000.000.000,00	3.581.937.735,00	204.997.221.000,00	204.997.221.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran II : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Reff. CaLK	2024	2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	94.964.692.402,65	142.072.990.500,92
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	94.964.692.402,65	142.072.990.500,92
Sub Total		-	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3	39.004.969.868,14	94.964.692.402,65
Sub Total		**39.004.969.868,14**	**94.964.692.402,65**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
Lain-lain		-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**5.2.4**	**39.004.969.868,14**	**94.964.692.402,65**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran III: Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang: Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

No. Rek.	URAIAN	Reff. CaLK	2024	2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	Kegiatan Operasional					
7	**PENDAPATAN - LO**	**5.4.1**				
7.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO**	**5.4.1.1**	**96.661.250.999,09**	**86.477.051.962,62**	**10.184.199.036,47**	**11,78**
7.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	21.129.814.221,32	21.475.321.915,05	(345.507.693,73)	(1,61)
7.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	59.861.387.724,00	3.353.119.213,00	56.508.268.511,00	1.685,24
7.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	9.533.287.318,50	9.332.478.127,00	200.809.191,50	2,15
7.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.4	6.136.761.735,27	52.316.132.707,57	(46.179.370.972,30)	(88,27)
7.2	**PENDAPATAN TRANSFER - LO**	**5.4.1.2**	**957.861.933.229,00**	**967.477.130.349,00**	**(9.615.197.120,00)**	**(0,99)**
7.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Umum - LO**	**5.4.1.2.1**	**667.911.126.970,00**	**617.480.811.235,00**	**50.430.315.735,00**	**8,17**
7.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak - LO		8.915.987.890,00	13.816.938.510,00	(4.900.950.620,00)	(35,47)
7.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO		3.640.431.000,00	5.113.685.725,00	(1.473.254.725,00)	(28,81)
7.2.1.3	Dana Bagi Hasil Lainnya - LO		7.520.542.000,00	8.513.744.000,00	(993.202.000,00)	(11,67)
7.2.1.4	Pendapatan Dana Alokasi Umum - LO		647.834.166.080,00	590.036.443.000,00	57.797.723.080,00	9,80
7.2.2	**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Khusus - LO**	**5.4.1.2.2**	**223.711.106.827,00**	**267.766.001.163,00**	**(44.054.894.336,00)**	**(16,45)**
7.2.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik - LO		64.141.894.493,00	97.765.061.442,00	(33.623.166.949,00)	(34,39)
7.2.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LO		159.569.212.334,00	170.000.939.721,00	(10.431.727.387,00)	(6,14)
7.2.3	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO**	**5.4.1.2.3**	**15.166.908.000,00**	**33.666.172.000,00**	**(18.499.264.000,00)**	**(54,95)**
7.2.3.1	Pendapatan Dana Insentif Fiskal - LO		15.166.908.000,00	33.666.172.000,00	(18.499.264.000,00)	(54,95)
7.2.3.2	Pendapatan Transfer Dana Desa - LO		-	-	-	-
7.2.4	**Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO**	**5.4.1.2.4**	**51.072.791.432,00**	**48.564.145.951,00**	**2.508.645.481,00**	**5,17**
7.2.4.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO		51.072.791.432,00	47.598.347.404,00	3.474.444.028,00	7,30
7.2.4.2	Bantuan Keuangan Khusus - LO		-	965.798.547,00	(965.798.547,00)	(100,00)
7.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO**	**5.4.1.3**	**13.993.211.655,00**	**15.148.049.494,00**	**(1.154.837.839,00)**	**(7,62)**
7.3.1	Pendapatan Hibah - LO		1.871.039.145,00	2.679.664.926,00	(808.625.781,00)	(30,18)
7.3.2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO		12.122.172.510,00	12.468.384.568,00	(346.212.058,00)	(2,78)
	Jumlah Pendapatan - LO		**1.068.516.395.883,09**	**1.069.102.231.805,62**	**(585.835.922,53)**	**(0,05)**
8	**BEBAN**	**5.4.2**				
8.1	**BEBAN OPERASI**	**5.4.2**	**1.088.348.841.472,01**	**1.039.090.168.165,75**	**49.258.673.306,26**	**4,74**
8.1.1	Beban Pegawai	5.4.2.1	538.571.788.255,00	455.652.038.035,00	82.919.750.220,00	18,20
8.1.2	Beban Persediaan	5.4.2.2	144.730.037.886,10	167.639.355.365,80	(22.909.317.479,70)	(13,67)
8.1.3	Beban Jasa	5.4.2.3	104.819.842.798,46	109.861.252.704,20	(5.041.409.905,74)	(4,59)
8.1.4	Beban Pemeliharaan	5.4.2.4	5.778.491.863,00	7.231.287.086,00	(1.452.795.223,00)	(20,09)
8.1.5	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5	52.205.766.902,00	51.450.062.765,00	755.704.137,00	1,47
8.1.8	Beban Hibah	5.4.2.6	56.386.949.582,00	32.388.249.875,00	23.998.699.707,00	74,10
8.1.9	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.7	-	1.482.600.000,00	(1.482.600.000,00)	(100,00)
8.1.10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.8	116.424.956.427,43	146.991.460.658,55	(30.566.504.231,12)	(20,79)
8.1.11	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.9	994.862.758,02	895.966.488,20	98.896.269,82	11,04
8.1.12	Beban Transfer	5.4.2.10	68.436.145.000,00	64.249.847.200,00	4.186.297.800,00	6,52
8.1.13	Beban Lain-lain	5.4.2.11	-	1.248.047.988,00	(1.248.047.988,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN OPERASI		**1.088.348.841.472,01**	**1.039.090.168.165,75**	**49.258.673.306,26**	**4,74**
	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	**5.4.4**	**(19.832.445.588,92)**	**30.012.063.639,87**	**(49.844.509.228,79)**	**(166,08)**
	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	**5.4.5**				
7.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	5.4.5.1	9.032.733,33	1.255.639.648,00	(1.246.606.914,67)	(99,28)
7.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		-	-	-	
8.4.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	5.4.5.2	-	64.903.571,61	(64.903.571,61)	(100,00)
8.4.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.5.3	11.467.534,00	-	11.467.534,00	∞
	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL		**(2.434.800,67)**	**1.190.736.076,39**	**(1.193.170.877,06)**	**(100,20)**

No. Rek.	URAIAN	Reff. CaLK	2024	2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	POS LUAR BIASA					
7.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO		-	-	-	-
8.4.1	Beban Luar Biasa		2.254.610.365,00	1.343.356.000,00	911.254.365,00	67,83
	JUMLAH POS LUAR BIASA		**(2.254.610.365,00)**	**(1.343.356.000,00)**	**(911.254.365,00)**	**67,83**
	SURPLUS/DEFISIT-LO	**5.4.6**	**(22.089.490.754,59)**	**29.859.443.716,26**	**(51.948.934.470,85)**	**(173,98)**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran IV : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang: Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Reff. CaLK	2024	2023
Ekuitas Awal per 1 Januari	5.6.1	2.059.931.292.564,83	2.038.844.439.824,68
Surplus/Defisit -LO	5.6.2	(22.089.490.754,59)	29.859.443.716,26
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	5.6.3		
Koreksi Ekuitas Akibat Perubahan Kebijakan Akuntansi		-	-
Koreksi Nilai Persediaan		-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Koreksi ekuitas lainnya		(319.175.799.123,93)	(8.772.590.976,11)
Ekuitas Akhir per 31 Desember	5.6.4	1.718.666.002.686,31	2.059.931.292.564,83

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran V : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

Uraian	Reff. CaLK	2024	2023
ASET	**5.3.1**	**1.740.413.199.648,87**	**2.072.920.169.765,47**
ASET LANCAR	**5.3.1.1**	**131.881.720.529,34**	**162.759.600.756,94**
Kas	**5.3.1.1.1**	**39.154.424.478,14**	**95.062.523.521,33**
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	18.812.421.527,05	72.842.475.547,36
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.2	0,00	21.348.744,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	169.573.019,00	97.831.118,68
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.4	60.123.400,00	191.464.443,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.5	18.663.486.932,00	18.541.500.236,00
Kas Dana BOS	5.3.1.1.1.6	13.699.474,80	140.622.533,00
Kas pada FKTP	5.3.1.1.1.7	1.435.120.125,29	3.227.280.899,29
Piutang	**5.3.1.1.2**	**55.577.200.436,67**	**43.871.357.642,23**
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.1	9.819.612.013,00	10.255.277.871,00
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.2.2	7.429.915.959,00	187.687.333,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.3	101.747.061,00	8.009.477.020,00
Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat	5.3.1.1.2.4	-	52.012.000,00
Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi	5.3.1.1.2.5	42.115.752.587,00	28.521.914.600,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.1.2.6	-	11.125.000,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.2.7	(3.889.827.183,33)	(3.166.136.181,77)
Beban dibayar dimuka	**5.3.1.1.3**	**407.178.271,00**	**-**
Persediaan	**5.3.1.1.4**	**36.742.917.343,53**	**23.825.719.593,38**
INVESTASI JANGKA PANJANG	**5.3.1.2**	**107.548.239.141,00**	**106.939.023.659,00**
Investasi Non Permanen	5.3.1.2.1	-	-
Dana Bergulir	5.3.1.2.1.1	1.006.403.120,00	1.006.403.120,00
Penyisihan Dana Bergulir	5.3.1.2.1.2	(1.006.403.120,00)	(1.006.403.120,00)
Investasi Permanen	5.3.1.2.2	**107.548.239.141,00**	**106.939.023.659,00**
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		107.548.239.141,00	106.939.023.659,00
ASET TETAP	**5.3.1.3**	**1.489.899.104.283,65**	**1.790.189.737.993,13**
Tanah	5.3.1.3.1	393.611.869.272,62	393.166.988.572,62
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	510.968.369.420,35	502.302.935.061,05
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	819.823.038.901,61	798.362.408.301,19
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.3.1.3.4	1.918.651.356.899,95	1.837.671.650.168,26
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	120.655.139.802,97	112.527.483.141,97
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	12.223.803.341,73	4.588.300.394,26
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.3.1.3.7	(2.286.034.473.355,58)	(1.858.430.027.646,22)
ASET LAINNYA	**5.3.1.4**	**11.084.135.694,88**	**13.031.807.356,40**
Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	5.3.1.4.1	1.062.304.599,16	856.706.980,20
Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.2	187.456.160,00	344.367.755,65
Aset Lain-lain	5.3.1.4.3	9.655.579.935,72	9.229.110.620,55
Aset Lainnya-TDF	5.3.1.4.4	178.795.000,00	2.601.622.000,00
JUMLAH ASET		**1.740.413.199.648,87**	**2.072.920.169.765,47**
KEWAJIBAN	**5.3.2**	**21.747.196.962,56**	**12.988.877.200,64**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**5.3.2.1**	**21.747.196.962,56**	**12.988.877.200,64**
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	140.776.648,00	97.831.118,68
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	193.159.799,56	138.608.011,08
Utang Belanja	5.3.2.1.3	21.413.260.515,00	12.752.438.070,88
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**5.3.2.2**	**-**	**-**
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	5.3.2.2.1	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		**21.747.196.962,56**	**12.988.877.200,64**

Uraian	Reff. CaLK	2024	2023
EKUITAS	**5.3.3**	**1.718.666.002.686,31**	**2.059.931.292.564,83**
EKUITAS		1.718.666.002.686,31	2.059.931.292.564,83
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		**1.740.413.199.648,87**	**2.072.920.169.765,47**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran VI : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Reff. CaLK	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	**5.5.1**		
Arus Kas Masuk	**5.5.1.1**		
Penerimaan Pajak Daerah		21.620.031.867,80	20.491.410.869,13
Penerimaan Retribusi Daerah		60.628.636.118,00	3.320.064.213,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		11.964.954.686,50	11.409.321.078,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		6.148.007.935,27	48.436.295.836,10
Penerimaan Bagian Daerah dari Bagi Hasil Pajak		10.879.478.890,00	11.853.447.510,00
Penerimaan Bagian Daerah dari Bagi Hasil Bukan Pajak		4.151.779.000,00	4.423.542.725,00
Penerimaan Bagian Daerah dari Bagi Hasil Lainnya		7.520.542.000,00	8.513.744.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		647.834.166.080,00	590.036.443.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik		64.141.894.493,00	97.765.061.442,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik		159.569.212.334,00	170.000.939.721,00
Penerimaan Insentif Fiskal		15.166.908.000,00	33.666.172.000,00
Penerimaan Dana Desa		136.561.076.000,00	135.230.180.200,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi		37.478.953.445,00	42.102.238.300,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		-	965.798.547,00
Penerimaan Dana Kapitasi JKN		12.109.442.915,00	12.468.384.568,00
Jumlah		**1.195.775.083.764,57**	**1.190.683.044.009,23**
Arus Kas Keluar	**5.5.1.2**		
Pembayaran Pegawai		526.617.182.736,00	455.914.059.535,00
Pembayaran Barang dan Jasa		338.089.506.105,20	356.743.301.652,73
Pembayaran Belanja Hibah		45.256.974.282,00	30.153.343.300,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		-	1.482.600.000,00
Pembayaran Tak Terduga		3.581.937.735,00	4.700.424.800,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		2.170.000.000,00	1.961.800.000,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa		202.827.221.000,00	197.518.227.400,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
Jumlah		**1.118.542.821.858,20**	**1.048.473.756.687,73**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		***77.232.261.906,37***	***142.209.287.321,50***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	**5.5.2**		
Arus Kas Masuk	**5.5.2.1**		
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Penjualan atas Tanah		-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		-	-
Penjualan atas Aset Lainnya		49.604.500,00	1.427.671.848,00
Penjualan atas Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir		-	-
Jumlah		**49.604.500,00**	**1.427.671.848,00**
Arus Kas Keluar	**5.5.2.2**		
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Perolehan Tanah		-	-
Perolehan Peralatan dan Mesin		17.448.098.019,00	33.247.679.146,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		22.220.323.063,00	42.398.764.060,35
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		82.813.149.768,88	104.191.838.531,42
Perolehan Aset Tetap Lainnya		7.733.870.580,00	7.906.975.530,00
Perolehan Aset Lainnya		1.147.510,00	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		3.025.000.000,00	3.000.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah		**133.241.588.940,88**	**190.745.257.267,77**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		***(133.191.984.440,88)***	***(189.317.585.419,77)***

URAIAN	Reff. CaLK	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	**5.5.3**		
Arus Kas Masuk	**5.5.3.1**		
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
Penerimaan Piutang		-	-
Jumlah		**-**	**-**
Arus Kas Keluar	**5.5.3.2**		
Pembayaran Pokok Hutang Pinjaman dan Obligasi		-	-
Pemberian Pinjaman		-	-
Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga		-	-
Jumlah		**-**	**-**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		**-**	**-**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	**5.5.4**		
Arus Kas Masuk	**5.5.4.1**		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga		58.050.440.009,57	56.557.608.740,00
Sisa Kas TA. 2023 dari Bendahara Pengeluaran		21.348.744,00	8.700,00
Jumlah		**58.071.788.753,57**	**56.557.617.440,00**
Arus Kas Keluar	**5.5.4.2**		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga		58.070.558.418,57	56.557.608.740,00
Sisa Kas TA. 2024 pada Bendahara Pengeluaran		-	21.348.744,00
Jumlah		**58.070.558.418,57**	**56.578.957.484,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		***1.230.335,00***	***(21.340.044,00)***
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih	**5.5.5**	**(55.958.492.199,51)**	**(47.129.638.142,27)**
Saldo Awal Kas di BUD		**94.943.343.658,65**	**142.072.981.800,92**
Saldo Akhir Kas di BUD	**5.5.6**	**38.984.851.459,14**	**94.943.343.658,65**
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		**-**	**21.348.744,00**
Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		**169.573.019,00**	**97.831.118,68**
Saldo Akhir Kas	**5.5.7**	**39.154.424.478,14**	**95.062.523.521,33**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran VII : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Bab I

Pendahuluan

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya segala upaya yang mendasarinya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin komplek, tata kelola daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif.

Sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan keuangan, diperlukan beberapa langkah antisipatif penyesuaian perangkat pengelolaan, penataan kelembagaan dan pembenahan sistem dan prosedur, namun juga mencakup lingkungan sistem pengelolaan termasuk peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia di dalamnya.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud

Untuk memenuhi ketentuan yang diamanahkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Dairi menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 berbasis akrual.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan gambaran keuangan yang lebih utuh kepada masyarakat, disamping untuk memenuhi azas:

a) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Dairi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik.

b) Manajerial
Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, utang dan ekuitas dana.

c) Transparansi
Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintahan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain :

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 131);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 218);

n. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 227);

o. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 229);

p. Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 30);

q. Peraturan Bupati Dairi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 39);

r. Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 25);

s. Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 3);

t. Peraturan Bupati Dairi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 22);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan
- 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
  - 5.1.1 Pendapatan-LRA
  - 5.1.2 Belanja
  - 5.1.3 Transfer
  - 5.1.4 Surplus / Defisit-LRA
  - 5.1.5 Pembiayaan
  - 5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
  - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
  - 5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
  - 5.2.3 Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
  - 5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.3.1 Aset
- 5.3.2 Kewajiban
- 5.3.3 Ekuitas

5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.4.1 Pendapatan-LO
- 5.4.2 Beban
- 5.4.3 Surplus / Defisit-LO

5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas
- 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
- 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
- 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
- 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- 5.5.5 Saldo Akhir Kas

5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.6.1 Ekuitas Awal
- 5.6.2 Surplus / Defisit-LO tahun berjalan
- 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar
- 5.6.4 Ekuitas Akhir

5.7 Kejadian Setelah Tanggal Neraca

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi Nonkeuangan
- 6.1 Gambaran Umum Wilayah
- 6.2 Kependudukan
- 6.3 Mata Pencaharian
- 6.4 Aparatur
- 6.5 Sarana dan Prasarana

Bab VII Penutup

Bab II
Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi Kabupaten Dairi tetap mengacu dan mendukung kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan kondisi dan potensi Kabupaten Dairi. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD dan RPJMD).

Gambaran secara menyeluruh dari kondisi perekonomian suatu daerah dapat diperoleh dengan mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi yang dikenal dengan konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator makro ekonomi. Dalam konsep penghitungan PDRB, yaitu dengan menghitung nilai bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam wilayah yang diukur dalam kurun satu tahun tertentu.

Tabel 2.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010

(Miliar Rupiah)

Tahun	ADH Berlaku	ADH Konstan
2020	9.317,91	6.508,05
2021	9.710,80	6.641,67
2022	10.716,94	6.921,48
2023	11.651,15	7.270,26
2024	12.693,88	7.631,31

Sumber data dari BPS " Kabupaten Dairi dalam Angka 2024"

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku sejak tahun 2018 hingga tahun 2024 cenderung meningkat setiap tahun, yaitu dari Rp 9.166,42 milyar pada tahun 2019 menjadi Rp 12.693,88 milyar pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi pada tahun 2024 sebesar 4,97 persen, lebih rendah bila dibandingkan pencapaian tahun 2023 yang tumbuh sebesar 5,04 persen. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami pertumbuhan paling besar, yaitu sebesar 6,24 persen diikuti sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 6,19 persen. PDRB per kapita rata-rata penduduk Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku sejak tahun 2019 hingga 2024 cenderung meningkat setiap tahun, yaitu dari Rp32,27 juta pada tahun 2019 menjadi Rp38,39 juta pada tahun 2024.

Dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah, beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

1) Langkah-langkah dalam upaya intensifikasi dan diversifikasi sektor pertanian yang didukung dengan pertumbuhan industri hulu dan hilir oleh investor bidang agribisnis;
2) Langkah-langkah penguatan di sektor perdagangan dan komunikasi, dan sektor jasa-jasa melalui pengembangan jaringan transportasi, perizinan terpadu dan penyediaan fasilitas pendukung;
3) Langkah konkret untuk mendukung gairah pertumbuhan dan pengembangan dunia usaha, terutama bagi sektor olahan bahan baku dari produk pertanian.

2.1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Berikut ini disajikan data terkait Tingkat Pengangguran Terbuka yang terjadi di Kabupaten Dairi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut ke belakang dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Pada data tersebut menggambarkan bahwa tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan dan penurunan selama 4 (empat) tahun terakhir ini.

Tabel 2.2. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Dairi Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024

Kegiatan Utama	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja	168.261	168.291	197.395	199.085
1. Bekerja	165.755	166.805	194.960	196.244
2. Pengangguran Terbuka	2.506	1.486	2.435	2.841
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,49	0,88	1,23	1,43

Sumber data dari BPS "Kabupaten Dairi dalam Angka 2025"

2.1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Berikut ini disajikan data terkait tingkat partisipasi angkatan kerja yang terjadi di Kabupaten Dairi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut ke belakang dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Pada data tersebut menggambarkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami kenaikan dan penurunan selama 4 (empat) tahun terakhir ini.

Tabel 2.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Dairi Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024

Kegiatan Utama	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk usia kerja	196.263	197.957	232.738	237.560
Angkatan Kerja	168.261	168.291	197.395	199.085
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	85,73	85,01	84,81	83,80

Sumber data dari BPS "Kabupaten Dairi dalam Angka 2025"

2.1.3 Rasio Gini

Rasio Gini merupakan salah satu alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ketimpangan ekonomi atau distribusi pendapatan yang diukur dengan *Gini ratio* menghasilkan nilai koefisien yang berkisar antara 0 (0%) hingga 1 (100%). Nilai 0 merepresentasikan kesetaraan sempurna, sedangkan 1 merepresentasi ketidaksempurnaan kesetaraan. Artinya, jika suatu daerah memiliki *Gini ratio* sebesar 0, maka distribusi pendapatan penduduk di negara tersebut merata. Sebaliknya, apabila suatu negara memiliki *Gini ratio* sebesar 1, maka artinya distribusi pendapatan atau kekayaan penduduk negara tersebut tidaklah merata. Dengan kata lain, terjadi ketimpangan pendapatan atau kekayaan yang begitu nyata. Berikut di bawah ini disajikan data terkait Rasio Gini untuk Kabupaten Dairi selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 2.4. Rasio Gini Kabupaten Dairi Tahun 2021 sampai dengan 2023

Uraian	2021	2022	2023
Gini Rasio	0.2268	0.2210	0.2410

Sumber data dari BPS " Kabupaten Dairi dalam Angka 2024"

2.1.4 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indek Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). terdiri dari 4 kriteria, yakni IPM >80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi. serta IPM 60-79 kategori sedang. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar : Umur Panjang dan Hidup Sehat; Pengetahuan; dan Standar Hidup Layak. Secara umum 2021-2023 IPM Kabupaten Dairi terus mengalami peningkatan. Berikut disajikan tabel tentang Indek Pembangunan Manusia (IPM) untuk Pemerintah Kabupaten Dairi selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.5 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Uraian	2021	2022	2023	2024
Indek Pembangunan Manusia (IPM)	71,84%	72,56%	75,18%	75,88%

Sumber data dari BPS "Kabupaten Dairi dalam Angka 2025"

2.1.5 Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Kemiskinan di Kabupaten Dairi selama 4 (empat) tahun terakhir yaitu tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terjadi peningkatan sesuai data yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.6 Data Kemiskinan Kabupaten Dairi tahun 2021 s.d tahun 2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	408.893	436.713	463.360	502.924
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	23,72	22,53	21,42	20,40
Persentase Penduduk Miskin (%)	8,31	7,88	7,47	7,10

Sumber data dari BPS "Kabupaten Dairi dalam Angka 2025"

2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah dilihat dari unsur-unsur potensi geografis, penduduk, ekonomi wilayah, sektor andalan, sektor pendukung, sektor investasi, keuangan dan pembiayaan serta sektor transportasi didekati dengan kebijakan perwilayahan. Kebijakan perwilayahan didasarkan atas efektivitas pembangunan di seluruh daerah ini dan untuk menyelaraskan pembangunan berbagai sektor andalan yang akan dikembangkan di masing-masing wilayah kecamatan agar pengembangannya tidak tumpang tindih satu dengan yang lain, sehingga potensi yang dimiliki masing-masing kecamatan dapat dikembangkan secara optimal dan terintegrasi. Pengembangan potensi secara spasial dilakukan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi, dimana kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Dairi secara kewilayahan diarahkan menjadi 4 (empat) pusat pelayanan yaitu:

a. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP), mencakup kawasan perkotaan Sumbul, Parongil dan Tigalingga;
b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) mencakup kawasan perkotaan Sidikalang;
c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), mencakup kawasan perkotaan Bunturaja, Sumbul, Parongil dan Tigalingga;
d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) mencakup Kecamatan Tanah Pinem, Parbuluan, Silahisabungan, Berampu, Lae Parira, Siempat Nempu Hulu, Pegagan Hilir, Siempat Nempu Hilir, dan Gunung Sitember.

Selain pusat-pusat pelayanan tersebut, di daerah ini dikembangkan pola pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan untuk kawasan lindung dan budi daya serta pengembangan kawasan strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh yang sangat penting dan strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah.

Kawasan strategis Kabupaten Dairi ditetapkan berdasarkan kepentingan ada 3 (tiga) yaitu:

1. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi mencakup:
   a. pengembangan Ekowisata;
   b. pengembangan Kawasan Agropolitan Parsiul, meliputi: Kecamatan Parbuluan, Sitinjo, dan Sumbul;
   c. pengembangan Kawasan Perkotaan Siultinggil, meliputi Sidikalang, Sitinjo, Sumbul, Tigalingga dan Parongil
2. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan social budaya, mencakup:
   a. Batu Aceh, Batu Hija, dan Batu Tettal di Kecamatan Sidikalang;
   b. Danau Sicike-cike di Kecamatan Sitinjo dan Parbuluan;
   c. Bale Selendang Bulan, Batu Pangulubalang, Mejan Pertulan Marga Manik, Pertaki Lumban Matanari, Mejan Palalahan di Kecamatan Sumbul;
   d. Tugu Silahisabungan, Aek Sipaulak Hosa, Aek Nauli Basa, Aek Lae Sabungan, Rumah Adat, Tenunan Ulos dan Batu Sigadap di Kecamatan Silahisabungan;
   e. Batu Pangulubalang dan mejan Marga Cibro di Kecamatan Silima Pungga-Pungga;
   f. Bantuan kerbo di Kecamatan Lae Parira;
   g. Batu Pangulubalang Sanggapati di Kecamatan Siempat Nempu; dan
   h. Batu Cumbang, batu Perabun/Pertulanen dan Juma Mejan di Kecamatan Pegagan Hilir
3. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, mencakup:
   a. kawasan Danau Toba
   b. taman Nasional Leuser
   c. kawasan hutan;

d. daerah aliran sungai
e. cekungan air tanah

Kabupaten Dairi merencanakan kawasan peruntukan pertanian yaitu meliputi pertanian tanaman pangan dan pertanian hotikultura. Pertanian tanaman pangan dikembangkan pada lahan basah yang tersebar di seluruh kecamatan yang terdiri dari lahan sawah fungsional dan lahan sawah potensial. Lahan sawah fungsional tersebar di Kecamatan Sumbul, Pegagan Hilir, Berampu, Lae Parira, Siempat Nempu, Silima Pungga-pungga dan Silahisabungan. Sedangkan lahan sawah potensial tersebar di Kecamatan Silima Pungga-pungga, Siempat Nempu Hilir dan Parbuluan. Lahan pertanian hortikultura dikembangkan pada lahan tersebar di Kecamatan Sumbul, Parbuluan, Sitinjo, Silahisabungan, Sidikalang, Berampu, Siempat Nempu Hulu, dan Pegagan Hilir.

Selain itu Kabupaten Dairi juga merencanakan kawasan peruntukan peternakan yang terdiri dari pengembangan sentra peternakan ternak besar meliputi kerbau, sapi/lembu dan kuda di seluruh kecamatan utamanya Kecamatan Tigalingga, Siempat Nempu Hulu dan Parbuluan. Pengembangan sentra peternakan ternak kecil meliputi babi, kambing, domba yang tersebar di seluruh kecamatan, utamanya di Kecamatan Lae Parira, Silima Pungga, Siempat Nempu, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, Tigalingga, dan Tanah Pinem. Pengembangan sentra peternakan jenis unggas meliputi ayam, itik, puyuh tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan peruntukan perikanan juga dikembangkan di Kecamatan Silahisabungan, Sumbul, Parbuluan, Sitinjo, Silima Pungga-pungga, Pegagan Hilir dan Lae Parira. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri dari pertambangan mineral radioaktif dikembangkan di Kecamatan Silahisabungan dan Kecamatan Parbuluan. Pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan, dan air tanah dikembangakan di wilayah esuai dengan potensi dan daya dukungnya. Dan pertambangan panas bumi dikembangkan di kecamatan Parbuluan dan Silahisabungan.

Sedangkan kawasan peruntukan pariwisata alam dikembangkan di Kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Parbuluan, Sumbul, Silahisabungan, Silima Pungga-pungga, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir Tigalingga, pegagan Hilir dan Tanah Pinem. Pariwisata budaya dikembangkan di kecamatan Sidikalang, Sitinjo,Sumbul, Silahisabungan, Silima Pungga-pungga, Siempat Nempu, Lae Parira, Tigalingga dan Pegagan Hilir.

Tabel. 2.7 Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2019-2024

No	Keterangan	Jumlah Penduduk
1	Belum/Tidak Bekerja	109.096
2	Pelajar/Mahasiswa	59.685
3	Petani/Pekebun	104.394
4	Perdagangan	1.025
5	Industri	22
6	Jasa Kemasyarakatan	-
7	Konstruksi	31
8	Pemerintah	5.459
9	Karyawan Swasta	5.442
10	Wiraswasta	23.515
11	Lainnya	24.666
Jumlah		**333.335**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel dan berbasis kinerja.

Pendekatan berbasis kinerja berarti bahwa penetapan anggaran suatu SKPD harus disertai dengan sasaran dan indikator kinerja (masukan, keluaran dan hasil) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, masuk akal dan memperhatikan dimensi waktu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan kondisi keuangan daerah. Sedangkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa penetapan mekanisme pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemegang kepentingan sehingga pengelolaan dana bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan

kemajuan daerah secara berkelanjutan, dengan menetapkan langkah utama atas 3 (tiga) pilar utama yaitu : sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor pertanian.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penyiapan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan perencanaan penerimaan pendapatan yang tepat, terukur, rasional dan memiliki kepastian hukum. Untuk menjaga kesinambungan kemampuan fiskal daerah, penetapan pendapatan daerah dilakukan dengan mengacu pada potensi pendapatan daerah. Identifikasi jenis dan objek pendapatan dilakukan dengan tepat, kemudian menentukan pengeluaran atau pembiayaan. Dengan demikian pemberian anggaran sesuai dengan fungsi yang diemban dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga optimalisasi terhadap tupoksi dapat dilakukan seiring dengan berkembangnya potensi dan kreativitas dari masing-masing SKPD.

Perencanaan pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah melalui diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya serta dukungan dari mayarakat yang dilakukan secara terencana dengan tetap memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian. Hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam penyediaan anggaran. Dengan demikian, setiap tahun diharapkan penyediaan anggaran daerah atau pembiayaan mandiri *(self financing)* akan semakin meningkat sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan akan semakin berkurang.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan pembangunan daerah pada tahun 2024, ditetapkan kebijakan belanja daerah, diantaranya adalah:

1. Perencanaan belanja daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD terkait disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah.
2. Dalam rangka meningkatkan kapasitas serta peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dialokasikan dana penunjang yang tetap berorientasi pada *out-comes* sesuai anggaran kinerja pembanguan.
3. Mendukung program-program yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan *(pro poor)* di Kabupaten Dairi.
4. Mengakomodir usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat dalam forum musyawarah rencana pembangunan.
5. Disamping infrastruktur penunjang penyelenggaraan pemerintahan, pengalokasian dana juga ditujukan untuk peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, penerangan jalan umum serta sasaran dan prasarana sanitasi pemukiman penduduk, dan lainnya dengan tetap memperhatika kententuan dan peraturan yang berlaku, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional.
6. Terkait *Mandatory spending* yang merupakan belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang dimana *mandatory spending* bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.
7. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).

   Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan

b. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

c. Anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah sebesar 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil / transfer kepada daerah atau desa. Apabila persentase tersebut belum tercapai, Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya UU HKPD, sehingga batas akhir pengalokasian tersebut sampai dengan tahun 2027.

   Belanja infrastruktur pelayanan publik adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

d. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Tabel. 2.8 Anggaran dan Realisasi Mandatory Spending Tahun 2024

Mandatory Spending	Total APBD	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi terhadap Anggaran	Persentase Anggaran terhadap APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 4/3)	(6=3/2)
Pendidikan	1.352.146.553.377,00	448.903.997.282,00	412.804.560.799,20	91,96	33,20
Kesehatan	1.352.146.553.377,00	251.961.663.162,00	221.866.268.846,00	88,06	18,63
Infrastruktur	1.352.146.553.377,00	150.926.741.161,00	136.744.611.329,88	90,60	11,16

8. Dalam APBD Kabupaten Dairi TA 2024 dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi berupaya secara konsisten untuk memenuhi *Mandatory spending pengalokasian dana* dalam penyusunan APBD TA. 2024 sekaligus menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan dana pendidikan minimal sebesar 20% dari total anggaran belanja, maka Pemerintah Kabupaten Dairi secara konsisten berupaya memenuhi amanah tersebut
9. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
10. Untuk memenuhi amanat dimaksud, Pemerintah Kabupaten Dairi telah mengalokasikan anggaran dengan rincian dan realisasi sebagai berikut:

Tabel. 2.9 Anggaran dan Realisasi berdasarkan Fungsi Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
Pelayanan Umum	**935.942.962.245,00**	**886.072.901.632,00**	**(49.870.060.613,00)**	**94,67**
Pendidikan	342.656.062.035,00	317.537.258.626,00	(25.118.803.409,00)	92,67
Kesehatan	90.653.344.534,00	86.719.766.521,00	(3.933.578.013,00)	95,66
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.399.285.610,00	10.667.708.683,00	(731.576.927,00)	93,58
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	12.230.065.627,00	11.687.620.991,00	(542.444.636,00)	95,56

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
Sosial	2.834.100.224,00	2.632.491.819,00	(201.608.405,00)	92,89
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.557.334.673,00	3.362.983.625,00	(194.351.048,00)	94,54
Pangan	15.616.216.096,00	14.703.752.241,00	(912.463.855,00)	94,16
Lingkungan Hidup	6.782.447.706,00	6.479.009.098,00	(303.438.608,00)	95,53
Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.481.782.063,00	6.150.712.465,00	(331.069.598,00)	94,89
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.861.543.761,00	6.469.658.513,00	(391.885.248,00)	94,29
Perhubungan	4.067.280.848,00	3.890.839.153,00	(176.441.695,00)	95,66
Komunikasi dan Informatika	3.396.041.899,00	3.082.782.877,00	(313.259.022,00)	90,78
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	630.949.309,00	579.998.249,00	(50.951.060,00)	91,92
Penanaman Modal	4.425.696.839,00	4.189.502.461,00	(236.194.378,00)	94,66
Kepemudaan dan Olahraga	6.136.648.890,00	5.769.644.269,00	(367.004.621,00)	94,02
Statistik	44.484.000,00	44.280.000,00	(204.000,00)	99,54
Perpustakaan	3.098.759.062,00	2.760.659.941,00	(338.099.121,00)	89,09
Kearsipan	100.000.000,00	97.416.442,00	(2.583.558,00)	97,42
Perindustrian	3.457.311.547,00	3.245.401.719,00	(211.909.828,00)	93,87
Sekretariat Daerah	41.280.251.252,00	36.511.751.594,00	(4.768.499.658,00)	88,45
Sekretariat DPRD	46.538.447.846,00	43.174.129.197,00	(3.364.318.649,00)	92,77
Perencanaan	5.980.369.770,00	5.490.556.526,00	(489.813.244,00)	91,81
Keuangan	224.955.359.349,00	223.764.503.461,00	(1.190.855.888,00)	99,47
Kepegawaian	4.199.133.664,00	3.349.656.827,00	(849.476.837,00)	79,77
Pendidikan dan Pelatihan	349.787.000,00	290.303.182,00	(59.483.818,00)	82,99
Penelitian dan Pengembangan	886.834.149,00	673.616.010,00	(213.218.139,00)	75,96
Inspektorat	9.108.060.239,00	8.470.302.202,00	(637.758.037,00)	93,00
Kecamatan	36.259.626.007,00	33.365.550.292,00	(2.894.075.715,00)	92,02
Kesatuan Bangsa dan Politik	41.955.738.246,00	40.911.044.648,00	(1.044.693.598,00)	97,51
Ketertiban dan Keamanan	**4.171.540.900,00**	**3.616.841.285,00**	**(554.699.615,00)**	**86,70**
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	4.028.380.900,00	3.481.291.285,00	(547.089.615,00)	86,42
Sosial	143.160.000,00	135.550.000,00	(7.610.000,00)	94,68
Ekonomi	**106.434.439.988,00**	**98.376.165.163,88**	**(8.058.274.824,12)**	**92,43**
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	84.782.355.340,00	81.366.677.207,88	(3.415.678.132,12)	95,97
Tenaga Kerja	428.937.000,00	203.716.000,00	(225.221.000,00)	47,49
Perhubungan	332.664.126,00	327.092.900,00	(5.571.226,00)	98,33
Komunikasi dan Informatika	5.384.959.466,00	5.297.299.798,00	(87.659.668,00)	98,37
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	1.296.423.250,00	720.217.379,00	(576.205.871,00)	55,55
Penanaman Modal	615.545.000,00	603.791.800,00	(11.753.200,00)	98,09
Persandian	49.450.520,00	40.398.473,00	(9.052.047,00)	81,69
Kelautan dan Perikanan	567.438.900,00	78.512.400,00	(488.926.500,00)	13,84
Pertanian	7.670.940.954,00	6.958.493.720,00	(712.447.234,00)	90,71
Perdagangan	590.288.108,00	496.033.277,00	(94.254.831,00)	84,03
Perindustrian	4.715.437.324,00	2.283.932.209,00	(2.431.505.115,00)	48,44
Perlindungan Lingkungan Hidup	**12.340.920.031,00**	**8.363.207.647,00**	**(3.977.712.384,00)**	**67,77**
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.298.574.150,00	4.247.906.694,00	(50.667.456,00)	98,82
Pertanahan	114.170.000,00	113.920.000,00	(250.000,00)	99,78
Lingkungan Hidup	7.928.175.881,00	4.001.380.953,00	(3.926.794.928,00)	50,47
Perumahan dan Fasilitasi Umum	**20.435.782.450,00**	**20.134.333.400,00**	**(301.449.050,00)**	**98,52**
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.772.918.000,00	14.532.718.600,00	(240.199.400,00)	98,37
Perumahan Rakyat dan	5.662.864.450,00	5.601.614.800,00	(61.249.650,00)	98,92

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
Kawasan Pemukiman				
Kesehatan	**161.308.318.628,00**	**135.146.502.325,00**	**(26.161.816.303,00)**	**83,78**
Kesehatan	153.905.894.758,00	130.235.592.175,00	(23.670.302.583,00)	84,62
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.402.423.870,00	4.910.910.150,00	(2.491.513.720,00)	66,34
Pariwisata	**10.835.280.134,00**	**7.941.109.018,00**	**(2.894.171.116,00)**	**73,29**
Pariwisata	10.835.280.134,00	7.941.109.018,00	(2.894.171.116,00)	73,29
Pendidikan	**97.012.527.295,00**	**86.736.997.963,20**	**(10.275.529.331,80)**	**89,41**
Pendidikan	92.950.485.346,00	83.314.816.566,20	(9.635.668.779,80)	89,63
Kepemudaan dan Olahraga	2.107.820.999,00	1.875.906.950,00	(231.914.049,00)	89,00
Kebudayaan	1.681.998.700,00	1.277.241.300,00	(404.757.400,00)	75,94
Perpustakaan	272.222.250,00	269.033.147,00	(3.189.103,00)	98,83
Perlindungan Sosial	**3.664.781.706,00**	**2.371.352.365,00**	**(1.293.429.341,00)**	**64,71**
Sosial	3.305.424.756,00	2.053.873.270,00	(1.251.551.486,00)	62,14
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	359.356.950,00	317.479.095,00	(41.877.855,00)	88,35
Jumlah	**1.352.146.553.377,00**	**1.248.759.410.799,08**	**(103.387.142.577,92)**	**92,35**

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah peningkatan saldo kas daerah dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit, maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti : SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah.

2.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Pada tahun anggaran 2024, penerimaan pembiayaan dianggarkan berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

2.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Pada tahun anggaran 2024, pengeluaran pembiayaan dianggarkan pada Perumda Air Minum Lae Nciho.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Dairi mengemban amanat untuk mencapai visi dan misinya diantaranya direpresentasikan dalam bentuk indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2024 dengan visi "Mewujudkan Dairi Unggul yang Mensejahterakan Masyarakat dalam Harmoni Keberagaman".

Pencapaian kinerja APBD dicerminkan dengan persentase realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun output dari belanja daerah. Gambaran kinerja anggaran dan realisasi masing-masing pos diukur berdasarkan nilai anggaran yang direncanakan.

2.3.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan pada TA 2024 mencapai Rp1.195.824.688.264,57 atau 94,89% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.260.206.860.974,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada TA 2023 sebesar Rp1.192.110.715.857,23, realisasi pendapatan TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp3.713.972.407,34 atau 0,31%.

2.3.2 Belanja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah meliputi : belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Realisasi belanja pada TA 2024 mencapai Rp1.248.759.410.799,08 atau 92,35% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.352.146.553.377,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja pada TA 2023 sebesar Rp1.236.219.013.955,50, realisasi belanja TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp12.540.396.843,58 atau 1,01%.

2.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan pada TA 2024 sebesar Rp94.964.692.402,65 yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan daerah pada TA 2024 sebesar Rp3.025.000.000,00 sehingga diperoleh pembiayaan neto sebesar Rp91.939.692.402,65 (Rp94.964.692.402,65 – Rp3.025.000.000,00).

Dari perbandingan pendapatan, belanja dan pembiayaan neto diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun berjalan sebesar Rp39.004.968.868,14 sebagai salah satu sumber pendanaan pada tahun berikutnya. Perhitungan SILPA tahun berjalan untuk TA 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan	Rp	1.195.824.688.264,57	
Belanja	Rp	(1.248.759.410.799,08)	
Pembiayaan Neto	Rp	91.939.692.402,65	+
SiLPA tahun berjalan	**Rp**	**39.004.969.868,14**	

Bab III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pada TA 2024, Pemerintah Kabupaten Dairi menganggarkan pendapatan sebesar Rp1.260.206.860.974,00 dan terealisasi sebesar Rp1.195.824.688.264,57 atau sebesar 94,89%. Dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 yang sebesar Rp1.192.110.715.857,23, realisasi pendapatan TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp3.713.972.407,34 atau sebesar 0,31%.

Sementara dari sisi belanja untuk TA 2024, Pemerintah Kabupaten Dairi menganggarkan belanja sebesar Rp1.352.146.553.377,00 dan terealisasi sebesar Rp1.248.759.410.799,08 atau sebesar 92,35%. Dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 yang sebesar Rp1.236.219.013.955,50, realisasi belanja TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp12.540.396.843,58 atau sebesar 1,01%.

Berikut ini disajikan anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja TA 2024 dan TA 2023.

Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA.2024	Realisasi TA.2024	%	Realisasi TA.2023
1	Pendapatan Daerah	1.260.206.860.974,00	1.195.824.688.264,57	94,89	1.192.110.715.857,23
2	Belanja Daerah	1.352.146.553.377,00	1.248.759.410.799,08	92,35	1.236.219.013.955,50

Anggaran dan realisasi pendapatan setiap SKPD untuk TA 2024 dan TA 2023 diuraikan pada tabel dibawah ini

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan per SKPD TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi TA.2024	%	Realisasi TA.2023
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	49.327.397.374,00	58.065.613.993,00	117,71	43.144.063.064,38
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	650.000.000,00	412.360.000,00	63,44	409.720.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	607.000.000,00	631.202.000,00	103,99	383.239.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	267.000.000,00	259.500.000,00	97,19	325.860.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	305.506.000,00
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	500.000.000,00	531.257.750,00	106,25	241.428.800,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.000.000.000,00	689.007.000,00	68,90	616.012.000,00
16	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	140.000.000,00	30.695.375,00	21,93	65.772.300,00
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	12.437.000,00
18	Sekretariat Daerah	15.000.000,00	9.000.000,00	60,00	4.400.000,00
19	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.177.852.463.600,00	1.113.440.919.652,77	94,53	1.125.999.654.138,72
22	Badan Pendapatan Daerah	29.848.000.000,00	21.755.132.493,80	72,89	20.602.623.554,13
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Sidikalang	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Sumbul	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi TA.2024	%	Realisasi TA.2023
27	Kecamatan Silima Pungga Pungga	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siempat Nempu	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Tigalingga	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Tanah Pinem	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Pegagan Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Parbuluan	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Lae Parira	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Gunung Sitember	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Berampu	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Silahisabungan	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Sitinjo	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**1.260.206.860.974,00**	**1.195.824.688.264,57**	**94,89**	**1.192.110.715.857,23**

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja setiap SKPD untuk TA 2024 dan TA 2023 dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja per SKPD TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi TA.2024	%	Realisasi TA.2023
1	Dinas Pendidikan	435.606.547.381,00	400.852.075.192,20	92,02	371.750.278.101,58
2	Dinas Kesehatan	244.559.239.292,00	216.955.358.696,00	88,71	200.981.072.341,98
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	121.030.167.550,00	116.530.545.984,88	96,28	135.656.586.263,42
4	Satuan Polisi Pamong Praja	7.570.544.090,00	7.164.126.556,00	94,63	8.380.018.435,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.687.902.437,00	8.004.785.720,00	92,14	11.939.217.010,00
6	Dinas Sosial	6.282.684.980,00	4.821.915.089,00	76,75	7.008.669.733,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	11.319.115.493,00	8.591.372.870,00	75,90	10.338.368.856,96
8	Dinas Lingkungan Hidup	14.710.623.587,00	10.480.390.051,00	71,24	10.655.126.638,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.481.782.063,00	6.150.712.465,00	94,89	6.815.955.093,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.861.543.761,00	6.469.658.513,00	94,29	7.525.973.184,00
11	Dinas Perhubungan	4.399.944.974,00	4.217.932.053,00	95,86	4.816.594.235,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.874.935.885,00	8.464.761.148,00	95,38	9.742.948.412,00
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	5.470.178.839,00	4.997.010.261,00	91,35	5.950.010.535,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.470.981.312,00	3.127.109.530,00	90,09	5.731.327.356,00
15	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	20.761.748.723,00	16.863.901.537,00	81,23	19.125.356.098,00
16	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	23.854.595.950,00	21.740.758.361,00	91,14	32.262.572.286,00
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.690.409.538,00	7.325.582.833,00	68,52	12.480.808.812,68
18	Sekretariat Daerah	41.280.251.252,00	36.511.751.594,00	88,45	40.396.951.235,00
19	Sekretariat DPRD	46.538.447.846,00	43.174.129.197,00	92,77	8.528.622.707,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	6.867.203.919,00	6.164.172.536,00	89,76	6.391.338.031,00
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	219.142.436.712,00	218.170.281.431,00	99,56	213.687.058.791,00
22	Badan Pendapatan Daerah	5.812.922.637,00	5.594.222.030,00	96,24	6.086.043.411,88
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	4.548.920.664,00	3.639.960.009,00	80,02	4.262.523.922,00
24	Inspektorat	9.106.560.239,00	8.468.802.202,00	93,00	36.097.340.021,00
25	Kecamatan Sidikalang	7.097.773.502,00	6.835.172.351,00	96,30	6.729.039.202,00
26	Kecamatan Sumbul	3.034.229.335,00	2.860.115.733,00	94,26	3.123.414.669,00
27	Kecamatan Silima Pungga Pungga	3.017.501.447,00	2.820.154.412,00	93,46	3.000.045.049,00
28	Kecamatan Siempat Nempu	2.176.974.722,00	1.984.224.003,00	91,15	1.777.010.681,00
29	Kecamatan Tigalingga	2.008.400.323,00	1.781.976.461,00	88,73	2.074.360.353,00
30	Kecamatan Tanah Pinem	2.001.538.191,00	1.796.032.254,00	89,73	2.082.808.978,00

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi TA.2024	%	Realisasi TA.2023
31	Kecamatan Pegagan Hilir	1.713.071.399,00	1.564.117.099,00	91,30	1.729.670.202,00
32	Kecamatan Parbuluan	2.036.079.637,00	1.885.346.606,00	92,60	1.881.733.696,00
33	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	1.594.767.108,00	1.429.259.619,00	89,62	1.658.975.472,00
34	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	2.006.160.661,00	1.796.242.084,00	89,54	1.895.514.785,00
35	Kecamatan Lae Parira	1.879.223.731,00	1.723.640.629,00	91,72	1.824.045.988,00
36	Kecamatan Gunung Sitember	1.667.382.090,00	1.539.757.055,00	92,35	1.449.407.410,00
37	Kecamatan Berampu	1.623.673.224,00	1.482.874.250,00	91,33	1.407.255.497,00
38	Kecamatan Silahisabungan	1.594.938.027,00	1.370.126.146,00	85,90	1.537.182.002,00
39	Kecamatan Sitinjo	2.809.412.610,00	2.498.011.590,00	88,92	2.520.032.900,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	41.955.738.246,00	40.911.044.648,00	97,51	24.917.755.561,00
	Jumlah	1.352.146.553.377,00	1.248.759.410.799,08	92,35	1.236.219.013.955,50

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Dairi telah berupaya secara optimal untuk mencapai target kinerja keuangan APBD yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Tetapi dalam pencapaian target tersebut masih ditemui kendala dan hambatan antara lain sebagai berikut:

1) Kinerja Pendapatan

(1) Pemutakhiran data obyek PAD belum efektif dan kurang optimal dilaksanakan SKPD pengelola;
(2) Kurangnya kesadaran wajib pajak/wajib retribusi untuk menyetor pajak/retribusi daerah;
(3) Belum tergalinya seluruh potensi PAD yang ada di Kabupaten Dairi;
(4) Terbatasnya kualitas SDM dalam mengelola pendapatan secara optimal;

2) Kinerja Belanja

Berdasarkan berbagai kemajuan yang telah dicapai, masalah dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

(1) Dukungan infrastruktur masih belum memadai, baik mencakup infrastruktur sumber daya air, transportasi, energi, kelistrikan maupun perumahan dan permukiman;
(2) Rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas;
(3) Kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat yang masih relatif rendah;
(4) Belum optimalnya target dan kinerja yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga masih kurang jelasnya pencapaian kinerja yang harus dipenuhi;
(5) Masih kurangnya pemahaman dalam pengalokasian dana ke rekening belanja sehingga pada saat pelaksanaan masih diperlukan perbaikan dan perubahan yang memerlukan waktu yang lama dan berpengaruh terhadap waktu pengerjaan dan kualitas kerja yang dicapai.

3) Pembiayaan

Pembiayaan adalah meliputi semua transaksi keuangan yang meliputi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Disamping kendala/hambatan seperti yang disebutkan diatas, dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan adalah masih terlambatnya pengesahan APBD maupun perubahan APBD yang berakibat pada ketepatan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan.

Bab IV

Kebijakan Akuntansi

3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah ada dua entitas penyelenggara, yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi, yang memiliki pengertian sebagai berikut:

1) Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Dairi.

2) Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Dairi, yang terdiri dari:
   (1) Dinas sebanyak 15 unit, yaitu: Pendidikan, Kesehatan (termasuk RSU Daerah Sidikalang), Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Lingkungan Hidup, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Perpustakaan dan Kearsipan, Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
   (2) Badan sebanyak 6 unit, yaitu: Kesatuan Bangsa dan Politik, Penanggulangan Bencana Daerah, Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah, Keuangan dan Aset Daerah, Pendapatan Daerah, Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
   (3) Sekretariat sebanyak 2 unit, yaitu: Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
   (4) Kecamatan sebanyak 15 unit, yaitu: Sidikalang, Sumbul, Silima Punggapungga, Siempat Nempu, Tigalingga, Tanah Pinem, Pegagan Hilir, Parbuluan, Siempat Nempu Hilir, Siempat Nempu Hulu, Lae Parira, Gunung Sitember, Berampu, Silahisabungan, dan Sitinjo termasuk Kelurahan sebanyak 8 unit, yaitu Kelurahan: Sidikalang, Batang Beruh, Sidiangkat, Huta Gambir, Parongil, Pegagan Julu I, Panji Dabutar dan Bintang Hulu;
   (5) Selain butir 1 s.d. 4, masih ada 2 SKPD lainnya yaitu : Inspektorat dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebagai entitas pelaporan maka laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Dairi, terdiri atas:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh entitas, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup dalam LRA terdiri atas pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Unsur yang dicakup dalam LPSAL terdiri atas SAL awal, penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan SAL akhir.

3) Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas pada suatu saat (tanggal) tertentu. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas. Neraca Pemerintah Kabupaten Dairi disusun berdasarkan konsolidasi neraca seluruh SKPD.

4) **Laporan Operasional (LO)**
LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh entitas untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup dalam LO terdiri atas pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO.

5) **Laporan Arus Kas**
Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas entitas selama periode tertentu.

6) **Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**
LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Unsur yang dicakup dalam LPE terdiri atas ekuitas awal, surplus/defisit-LO tahun berjalan, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan ekuitas akhir.

7) **Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO. LAK dan LPE. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Dairi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi, maka Pemerintah Kabupaten Dairi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023.

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Kabupaten Dairi adalah:
a. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas.
b. Basis akrual untuk Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.
Pemerintah Kabupaten Dairi tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa pembiayaan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa pembiayaan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi, bukan terpaku pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

4.3.1 Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Dairi dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan–LRA menggunakan basis Kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat diterima direkening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui setelah diterima penetapan surat keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.

4.3.2 Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.3.3 Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk atau keluar diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau keluar di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan dana transfer diukur dan dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.

4.3.4 Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Dairi terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari: penerimaan pinjaman, penjualan obligasi, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Dairi, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat timbulnya kewajiban.
Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto. Akuntansi pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan Netto. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA atau SIKPA.

4.3.5 Pengeluaran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di Bank, sedangkan setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya. Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila ada terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan

kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa utang PFK.

Kas dan setara Kas yang diakui terdiri dari :

1) **Kas di Kas Daerah**
   Kas di Kas Daerah merupakan kas yang pengolahannya menjadi tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) berasal dari saldo kas di Rekening Giro Daerah dan seluruh Deposito yang ditanamkan pada Bank persepsi.

2) **Kas di Bendahara Pengeluaran**
   Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir periode akuntansi, tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas.

3) **Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran**
   Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah serta menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.

4) **Kas Bendahara Penerimaan**
   Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari dana penerimaan yang belum disetor ke kas daerah. Meskipun dalam ketentuannya bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetor dalam rekening bendahara penerimaan.

5) **Kas di Badan Layanan Umum Daerah**
   Kas di Badan Layanan Umum Daerah mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya berada di RSUD Sidikalang Kabupaten Dairi.

6) **Kas di Bendahara Dana BOS**
   Kas di Bendahara Dana BOS mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya berada di seluruh SD dan SMP Negeri di Kabupaten Dairi.

7) **Kas Dana Kapitasi pada FKTP**
   Kas Dana Kapitasi pada FKTP mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya berada di Puskesmas Kabupaten Dairi.

8) **Kas Dana PAUD**
   Kas Dana PAUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya berada di TK/PAUD Negeri di Kabupaten Dairi.

4.3.6 Pengukur Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

1) **Piutang Pajak/Piutang Retribusi**
   Piutang pajak/piutang retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

2) **Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**
   Pemerintah Daerah sering kali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran

merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukaan untuk tujuan penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran.

Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebagai nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar Tagihan penjualan angsuran pada saat penyusunan neraca dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

3) **Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)**
Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Bagian Lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi aset lain-lain yang berupa aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan Neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam satu tahun diakui sebagai bagian lancar TP/TGR.
Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR pada saat penyusunan Neraca perlu dihitung beberapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.

4) **Piutang Lainnya**
Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi dan piutang pajak. Piutang lainnya di catat sebagai nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

5) **Piutang Tak Tertagih**
Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan Akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.
Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Aset berupa piutang di Neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net relizable value*), oleh karena itu nilai piutang tak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam empat jenis, yaitu: Lancar (0-12 bulan), Kurang Lancar (13-36 bulan), Diragukan (37-60 bulan) dan Macet (lebih dari 60 bulan).

b) Penyajian nilai piutang tak tertagih akan dicantumkan dalam Laporan Keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan pada catatan atas Laporan Keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c) Besarnya persentase penyisian piutang tak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:
   a. Piutang Lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
   b. Piutang Kurang Lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen);
   c. Piutang Diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen);
   d. Piutang Macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen).

d) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di Neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).

e) Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.

f) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:

a. pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
b. penghapusbukuan (*write down*)
   Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan Akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
   Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:
   (1) Penghapusbukuan harus memberikan manfaat yang lebih besar dari pada kerugian penghapusbukuan.
   (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada Neraca, apabila perlu sebelum difinalisasi terlebih dahulu diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
   (3) Penghapusbukuan berdasarkan Keputusan Bupati yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
c. Penghapustagihan (*write off*)
   Penghapus tagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi Pemerintah Daerah secara hukum dan ekonomi.

   Kriteria penghapustagihan sebagai berikut:
   (1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara.
   (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik.
   (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
   (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.
   (5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin di terapkan.

d. Penerimaan tunai atas Piutang yang telah Dihapusbukukan
   Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/ pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.
e. Restrukturisasi
   Restruktutrisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

4.3.7 Pengukuran Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat berdasarkan metode perpetual dimana fungsi akuntansi selalu mencatat nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Pengukuran pemakaian Persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit biaya perolehannya.Untuk penerimaan dan pengeluaran fisik barang yang mempunyai kadaluarsa, diterapkan praktek bisnis yang sehat guna meminimalisirkan adanya barang yang rusak/usang, sedangkan pengeluarannya menggunakan metode penilaian FIFO.

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi sebesar jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit biaya perolehannya. Dalam hal terjadi selisih antara catatan persediaan dan hasil stock opname yang disebabkan karena persediaan usang, kadaluarsa atau rusak maka selisih persediaan dapat diberlakukan sebagai beban, sedangkan jika dikarenakan persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diberlakukan sebagai kerugian daerah.
Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
   Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
   Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan
   Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

4.3.8 Pengukuran Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1) Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan:
   a. Dicatat sebesar nilai perolehan
      Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya: saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
      Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembeliaan obligasi jangka panjang dan investai yang dimaksud tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
      Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
      Apabila jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

   b. Dicatat sebesar nilai wajar
      Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.
      Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
      Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

   c. Dicatat sebesar nilai nominal
      Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

   d. Dicatat sebesar nilai tercatat atau nilai wajar lainnya
      Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau tidak wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
      Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal diproyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lainnya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu:
   a. Metode Biaya
      Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang dari 20%.

   b. Metode Ekuitas
      Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investasi atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerimaan investasi yang terjadi sesuai perolehan awal investasi. Metode

ini digunakan kepada kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat non permanen-dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir di neraca dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari dana bergulir.

4.3.9 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan
Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

2) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

3) Kapitalisasi Aset
Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pembangunan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan
Kepemilikan atas sebidang Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Apabila perolehan tanah belum didukung dengan bukti secara hukum maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran
Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

Pengungkapan
Dalam catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan dasar penilaian yang digunakan dan rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis tanah yang menunjukkan penambahan, pelepasan, dan mutasi lainnya.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Pengakuan

Peralatan dan Mesin yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Peralatan dan Mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengukuran

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak.
Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan:
- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Peralatan dan Mesin.
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.
- Rekonsiliasi nilai tercatat Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - ✓ Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
  - ✓ Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Peralatan dan Mesin;
  - ✓ Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Pengakuan

Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.
Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengukuran

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan yang menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai siap pakai yang meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak.

Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan:
- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Gedung dan Bangunan.
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan.
- Rekonsiliasi nilai tercatat Gedung dan Bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - ✓ Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);

- ✓ Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Gedung dan Bangunan;
- ✓ Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

4) Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jalan, Jaringan dan Irigasi mencakup Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Pengakuan

Jalan, Jaringan dan Irigasi yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Jalan, Jaringan dan Irigasi yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Jalan, Jaringan dan Irigasi tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan, pengembangan dan pengurangan.

Pengukuran

Biaya perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Jaringan dan Irigasi sampai siap pakai.

Biaya perolehan untuk Jalan, Jaringan dan Irigasi yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak.

Biaya perolehan untuk Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan:

a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Jalan, Jaringan dan Irigasi;
b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Jaringan dan Irigasi;
c) Rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Jaringan dan Irigasi pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
   (1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
   (2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Jalan, Jaringan dan Irigasi;
   (3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

5) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Pengakuan

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Aset Tetap Lainnya ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan dan pengurangan.

Pengukuran

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan:

a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Aset Tetap Lainnya;
b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.
c) Rekonsiliasi nilai tercatat Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
   (1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
   (2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Aset Tetap Lainnya;

(3) Pengurangan (penjualan, penghapusan dan penilaian).

6) **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya dikerjakan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dilakukan dengan lembaga sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:

- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang dengan aset tersebut akan diperoleh;
- Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
- Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Pengukuran

Konstruksi dalam Pengerjaan dicatat senilai biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan melalui kontrak konstruksi meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan :

- Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- Uang muka kerja yang diberikan;
- Retensi;
- Kebijakan akuntansi untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan.

7) **Akumulasi Penyusutan** merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan ini bukan untuk alokasi biaya sebagaimana penyusutan di sektor komersial, tetapi untuk menyesuaikan nilai sehingga dapat disajikan secara wajar.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran di mulai pada tahun berkenaan.

8) **Aset bersejarah** merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut. Lazimnya, suatu aset tetap dikategorikan sebagai aset bersejarah jika mempunyai bukti tertulis sebagai barang/bangunan bersejarah.

9) **Belanja pemeliharaan** dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. Kapitalisasi biaya pada Pemerintah Kabupaten Dairi telah ditetapkan berdasarkan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengukuran:

a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;

b) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;

c) Biaya aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh;

Pengungkapan:

a) Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada;

b) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termaksud bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;

c) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai;

d) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan;

e) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

   1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; Biaya yang diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan

   2) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan dengan konstruksi yang bersangkutan.

f) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
   - ✓ Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
   - ✓ Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
   - ✓ Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

g) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal;

h) Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
   1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
   2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
   3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
   4) Uang muka kerja yang diberikan;

5) Retensi.

i) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan;

j) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya.

10) Dana Cadangan

Dana Cadangan sebagai dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

11) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset Pemerintah Kabupaten Dairi selain daripada aset lancar, investasi, dan aset tetap.
Pengakuan:

a) **Aset Tak Berwujud**
Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang/jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

b) **Tagihan Penjualan Angsuran**
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun.

c) **Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)**
Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas kerugian yang diderita oleh negara atau daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara atau daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam melaksanakan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

d) **Kemitraan dengan Pihak Ketiga**
Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk-bentuk kemitraan antara lain Bangun Kelola Serah/Build Operate Transfer (BKS/BOT) dan Bangun Serah Kelola /Build Transfer Operate (BSK/BTO).

Bangun Kelola Serah/Build Operate Transfer (BKS/BOT) adalah pemanfaatan aset tetap pemerintah daerah berupa tanah oleh pihak lain (swasta) dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah serta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhir jangka waktu, serta membayar kontribusi ke kas daerah yang besarannya ditetapkan oleh tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

Bangun Serah Kelola /Build Transfer Operate (BSK/BTO) adalah pemanfaatan aset tetap pemerintah daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara pihak lain itu membangun bangunan siap pakai dan atau menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas di atas tanah dan atau bangunan tersebut dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada daerah untuk kemudian oleh Pemerintah Daerah tanah dan bangunan siap pakai dan atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut diserahkan kembali ke pihak lain untuk di dayagunakan selama kurun waktu tertentu.

e) **Aset Lain-lain**
Aset lain-lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke aset tetap. Aset lain-lain berupa : aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP/TGR dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengukuran:

a) Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

b) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dan kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke Kas Negara/Daerah.

Pengungkapan:

a) Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (aset lancar).
b) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke Kas Negara/Daerah.
c) Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Negara/Daerah.
d) Setiap akhir periode akuntansi, TP-TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, diklasifikasi menjadi akun Bagian Lancar TP-TGR (aset lancar).
e) BKS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut.
f) Penyerahan dan pembayaran aset BKS harus diatur dalam kontrak kerjasama tersendiri.
g) Aset yang berada dalam BKS disajikan terpisah dari aset tetap.
h) BKS dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.

4.3.10 Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

1) Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
2) Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
3) Akun kewajiban diklasifikasikan menjadi:
   (a) Kewajiban jangka pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam satu periode akuntansi yang terdiri atas: utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang dalam negeri, utang kepada pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga dan utang jangka pendek lainnya.
   (b) Kewajiban jangaka panjang, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi yang terdiri atas: utang jangka panjang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.

4.3.11 Pengukuran Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daaerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas pada tanggal laporan berasal dari ekuitas awal ditambah/dikurang oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap dan lain-lain.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kesalahan tidak berulang

a. kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. Kesalahan jenis ini dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
b. kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan. Akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan maka perlakuannya adalah sebagai berikut:
   1) koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain-LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan Kas maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
   2) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

2. Kesalahan berulang
   Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alami (normal) dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Dairi yang menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada dibawahnya.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan Keuangan Konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Dairi sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi SKPD, PPKD dan BLUD.

Prosedur konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD, PPKD dan BLUD.

Bab V
Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Dairi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 merupakan hasil konsolidasi dari seluruh Laporan Keuangan SKPD, PPKD dan BLUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

5.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

	Tahun 2024 Rp	Tahun 2023 Rp
5.1.1 Pendapatan - LRA	**1.195.824.688.264,57**	**1.192.110.715.857,23**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi: (1) Pendapatan Asli Daerah; (2) Pendapatan Transfer; dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Dairi TA 2024 sebesar Rp1.195.824.688.264,57 mencapai 94,89% dari anggaran pendapatan yang berjumlah Rp1.260.206.860.974,00. Nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp3.713.972.407,34 atau 0,31% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.192.110.715.857,23.

Realisasi Pendapatan menurut kelompoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Realisasi PAD TA 2024 adalah sebesar Rp100.411.235.107,57 atau 102,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp98.379.074.374,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp15.326.471.263,34 atau 18,01% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp85.084.763.844,23.
b. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 adalah sebesar Rp1.083.304.010.242,00 atau 94,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.148.501.149.600,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp11.253.557.203,00 atau 1,03% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.094.557.567.445,00.
c. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2024 adalah sebesar Rp12.109.442.915,00 atau 90,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.326.637.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp358.941.653,00 atau 2,88% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp12.468.384.568,00.

Tabel berikut menyajikan nilai anggaran dan realisasi Pendapatan untuk masing-masing kelompok.

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan TA 2023

No.	Jenis Pendapatan Daerah	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	98.379.074.374,00	100.411.235.107,57	102,07	85.084.763.844,23	15.326.471.263,34	18,01
2.	Pendapatan Transfer	1.148.501.149.600,00	1.083.304.010.242,00	94,32	1.094.557.567.445,00	(11.253.557.203,00)	(1,03)
3.	Lain-Lain Pendapatan	13.326.637.000,00	12.109.442.915,00	90,87	12.468.384.568,00	(358.941.653,00)	(2,88)

No.	Jenis Pendapatan Daerah	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
	yang Sah						
Total Pendapatan Daerah		1.260.206.860.974,00	1.195.824.688.264,57	94,89	1.192.110.715.857,23	3.713.972.407,34	0,31

Realisasi Pendapatan TA 2024 sebesar Rp1.195.824.688.264,57 merupakan seluruh Pendapatan yang diterima Bendahara Umum Daerah Kabupaten Dairi dan telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah selama TA 2024, dengan rincian sebagai berikut.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah 100.411.235.107,57 85.084.763.844,23

Realisasi PAD TA 2024 adalah sebesar Rp100.411.235.107,57 atau 102,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp98.379.074.374,00. Nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp15.326.471.263,34 atau 18,01% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp85.084.763.844,23.
Rincian anggaran dan realisasi PAD untuk masing-masing jenis pendapatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2024 dan TA 2023

No.	Jenis Pendapatan Asli Daerah	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah	29.848.000.000,00	21.620.031.867,80	72,43	20.491.410.869,13	1.128.620.998,67	5,51
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	52.506.397.374,00	60.628.636.118,00	115,47	3.320.064.213,00	57.308.571.905,00	1.726,13
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11.964.954.000,00	11.964.954.686,50	100,00	11.409.321.078,00	555.633.608,50	4,87
4.	Lain-Lain PAD yang Sah	4.059.723.000,00	6.197.612.435,27	152,66	49.863.967.684,10	(43.666.355.248,83)	(87,57)
Total Pendapatan Asli Daerah		98.379.074.374,00	100.411.235.107,57	102,07	85.084.763.844,23	15.326.471.263,34	18,01

PAD merupakan Pendapatan yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Rinciannya diuraikan sebagai berikut.

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 21.620.031.867,80 20.491.410.869,13

Pajak Daerah adalah kontribusi Wajib Pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 2 menyatakan bahwa jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas: (1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; (3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir dan jasa kesenian dan hiburan); (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Air Tanah; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Sarang Burung Walet; (8) Opsen PKB; (9) Opsen BBNKB.
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk TA 2024 dan TA 2023 masing-masing sebesar Rp21.620.031.867,80 dan Rp20.491.410.869,13 terdiri dari:

Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 dan TA 2023

No.	Jenis Pendapatan Pajak Daerah	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1	PBJT atas Jasa Perhotelan (Hotel)	325.000.000,00	336.726.359,00	103,61	335.972.875,00	753.484,00	0,22
2	PBJT atas Jasa Perhotelan (Losmen)	120.000.000,00	100.909.727,00	84,09	113.149.177,00	(12.239.450,00)	(10,82)
3	PBJT atas Makanan dan Minuman (Restoran)	2.513.000.000,00	2.389.249.959,80	95,08	2.456.095.106,00	(66.845.146,20)	(2,72)

No.	Jenis Pendapatan Pajak Daerah	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
4	PBJT atas Makanan dan Minuman (Rumah Makan)	740.000.000,00	543.352.140,00	73,43	364.142.440,00	179.209.700,00	49,21
5	PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan	10.000.000,00	7.580.000,00	75,80	9.887.500,00	(2.307.500,00)	(23,34)
6	Pajak Reklame	600.000.000,00	741.912.054,00	123,65	553.015.247,00	188.896.807,00	34,16
7	PBJT atas Tenaga Listrik	7.000.000.000,00	7.075.097.847,00	101,07	6.664.270.924,00	410.826.923,00	6,16
8	Pajak Air Tanah	40.000.000,00	43.670.776,00	109,18	39.151.405,00	4.519.371,00	11,54
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.500.000.000,00	4.223.194.795,00	76,79	4.605.831.605,13	(382.636.810,13)	(8,31)
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	8.000.000.000,00	2.819.271.096,00	35,24	2.368.272.612,00	450.998.484,00	19,04
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5.000.000.000,00	3.339.067.114,00	66,78	2.981.621.978,00	357.445.136,00	11,99
Total Pendapatan Pajak Daerah		**29.848.000.000,00**	**21.620.031.867,80**	**72,43**	**20.491.410.869,13**	**1.128.620.998,67**	**5,51**

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 adalah sebesar Rp21.620.031.867,80 atau 72,43% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp29.848.000.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.128.620.998,67 atau 5,51% apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2023 yang mencapai Rp20.491.410.869,13. Meningkatnya kontribusi realisasi Pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD tersebut terutama disebabkan tercapai anggaran pada empat jenis Pendapatan Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel sebesar 103,61%, Pajak Reklame sebesar 123,65%, Pajak Penerangan Jalan sebesar 101,07% dan Pajak Air Tanah sebesar 109,18%.

a) Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan (Hotel dan Losmen)

Realisasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Jasa Hotel dan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Jasa Losmen TA 2024 masing-masing sebesar Rp336.726.359,00 dan Rp100.909.727,00 atau 103.61% dan 84,09% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp325.000.000,00 dan Rp120.000.000,00. Dengan kata lain, nilai realisasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Jasa Hotel mengalami peningkatan sebesar Rp753.484,00 atau 0,22% dan nilai realisasi Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Jasa losmen mengalami penurunan sebesar Rp12.239.450,00 atau 10,82% dari nilai realisasi TA 2023. Dengan demikian, Pendapatan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Jasa Hotel dan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Jasa Losmen memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah secara keseluruhan masing-masing sebesar 1,56% dan 0,47%. Meningkatnya peneriman Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Jasa Hotel disebabkan karena meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, pelaksanaan penagihan serta monitoring dan evaluasi terhadap wajib pajak.

b) Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman (Restoran/Belanja Makan Minum SKPD dan Rumah Makan)

Realisasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman (Restoran/Belanja Makan Minum SKPD) dan Rumah Makan TA 2024 masing-masing sebesar Rp2.389.249.959,80 dan Rp543.352.140,00 atau 95,08% dan 73,43% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.513.000.000,00 dan Rp740.000.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan dan peningkatan sebesar Rp66.845.146,20 dan Rp179.209.700,00 atau 2,72% dan 49,21% dari nilai realisasi TA 2023. Dengan demikian, Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman (Restoran/Belanja Makan Minum SKPD) dan Rumah Makan memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah secara keseluruhan masing-masing sebesar 11,05% dan 2,51%.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman (Restoran/Belanja Makan Minum SKPD) adalah pajak yang dikenakan terhadap realisasi belanja makanan dan minuman pada kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi kecuali belanja makanan dan minuman harian Bupati dan Wakil Bupati dan belanja makanan dan minuman pasien rumah sakit. Sedangkan

Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman (Rumah Makan) adalah pajak yang dipungut terhadap pengusaha yang menyediakan/menjual makanan dan minuman sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Uraian realisasi Pajak Restoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman (Restoran/Belanja Makan Minum SKPD) dan Rumah Makan TA tahun 2024 sebesar Rp2.932.602.099,80 (Rp2.389.249.959,80 + Rp543.352.140,00), dapat diuraikan sebagai berikut:

- Berdasarkan realisasi belanja makanan dan minuman seluruh SKPD pada TA 2024 diketahui bahwa total pajak belanja makanan dan minuman yang dikenakan pajak dan telah disetor ke kas daerah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.072.924.534,80.
- Setoran pajak restoran yang berasal dari Dana Desa, Dana BOS dan kegiatan lainnya selama TA 2024 yang disetor sampai keadaan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.288.219.298,20.
- Setoran pajak restoran yang berasal dari kegiatan tahun sebelumnya yang disetor sampai keadaan 31 Desember 2024 sebesar Rp.28.106.126,80.
- Setoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman yang berasal dari rumah makan yang disetor sampai keadaan 31 Desember 2024 sebesar Rp.543.352.140,00.

c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan

Realisasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan TA 2024 bersumber dari Diskotik yang terealisasi sebesar Rp7.580.000,00 atau 75,80% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00. Dengan demikian, Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan (Diskotik) memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 0,04%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023, realisasi pajak hiburan pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.307.500,00 atau 23,34%. Menurunnya realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan antara lain disebabkan oleh menurunnya jumlah pengunjung di tempat hiburan.

d) Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik

Realisasi Pendapatan Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik TA 2024 mencapai Rp7.075.097.847,00 atau 101,07% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp7.000.000.000,00. Realisasi Pajak Penerangan Jalan memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 32,72%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp6.664.270.924,00, realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp410.826.923,00 atau 6,16%. Meningkatnya realisasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik antara lain dipengaruhi oleh tingginya penggunaan jasa listrik oleh pelanggan dan meningkatnya kesadaran wajib pajak.

e) Pajak Reklame

Realisasi pajak reklame TA 2024 mencapai Rp741.912.054,00 atau 123,65% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp600.000.000,00. Realisasi pajak reklame memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 3,43%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA.2023 sebesar Rp553.015.247,00 realisasi pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp188.896.807,00 atau 34,16%. Meningkatnya penerimaan Pajak Reklame dipengaruhi oleh bertambahnya objek Pajak Reklame.

f) Pajak Air Tanah

Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah TA 2024 mencapai Rp43.670.776,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp40.000.000,00 atau sebesar 109,18%. Realisasi Pajak Air Tanah memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 0,20%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp39.151.405,00, realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp4.519.371,00 atau 11,54%. Meningkatnya realiasi penerimaan Pajak Air Tanah disebabkan karena meningkatnya volume penggunaan air tanah.

g) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Realisasi Pendapatan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan TA 2024 mencapai Rp4.223.194.795,00 terdiri dari realisasi dari Wajib Pajak Pemegang Izin Usaha Pertambahangan (IUP) sebesar Rp3.170.605.100,00 dan realisasi dari Wajib Pungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp1.052.589.695 atau 76,79% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp5.500.000.000,00.

Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 19,53%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp4.605.831.605,13, realisasi Pendapatan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp382.636.810,13 atau 8,31%.

Menurunnya realisasi penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan terhadap target yang telah ditetapkan, disebabkan antara lain karena berkurangnya jumlah wajib pajak Pemegang Izin Usaha Pertambahangan (IUP) karena telah berakhir izin usahanya.

h) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Realisasi PBB P2 TA 2024 mencapai Rp2.819.271.096,00 atau 35,24% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp8.000.000.000,00. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 13,04%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.368.272.612,00, realisasi pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp450.998.484,00 atau 19,04%.

Meningkatnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disebabkan karena bertambahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan bertambahnya jumlah Nomor Objek Pajak (NOP) baru.

i) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2024 mencapai Rp3.339.067.114,00 atau 66,78% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00. Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 15,44%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.981.621.978,00, realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp357.445.136,00 atau 11,99%.

Meningkatnya penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disebabkan karena meningkatnya pengajuan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 60.628.636.118,00 3.320.064.213,00

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 59 menyatakan bahwa jenis retribusi meliputi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.
Tabel berikut menyajikan nilai anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah untuk masing-masing kelompok.

Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan TA 2023

No	Jenis Pendapatan Retribusi Daerah	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		(Rp)	%
1.	Retribusi Jasa Umum	50.185.397.374,00	58.950.915.993,00	117,47	1.921.381.113,00	57.029.534.880,00	2.968,15
2.	Retribusi Jasa Usaha	1.821.000.000,00	1.146.462.375,00	62,96	1.149.254.300,00	(2.791.925,00)	(0,24)
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	500.000.000,00	531.257.750,00	106,25	249.428.800,00	281.828.950,00	112,99
Total Pendapatan Retribusi Daerah		52.506.397.374,00	60.628.636.118,00	115,47	3.320.064.213,00	57.308.571.905,00	1.726,13

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 adalah sebesar Rp60.628.636.118,00 atau 115,47% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp52.506.397.374,00. Nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp57.308.571.905,00 atau 1.726,13% apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2023 yang mencapai Rp3.320.064.213,00.

Berdasarkan Tabel 5.4 dapat diketahui bahwa dari tiga kelompok Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Retribusi Jasa Umum memberikan kontribusi paling tinggi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Daerah yaitu mencapai 97,23%. Sedangkan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu masing-masing sebesar 1,89% dan 0,88% dari total realisasi Pendapatan Retribusi Daerah.

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 61 dinyatakan bahwa Retribusi Jasa Umum meliputi : (1) Pelayanan Kesehatan; (2) Pelayanan Kebersihan; (3) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2024 mencapai Rp58.950.915.993,00 atau 117,47% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp50.185.397.374,00. Pendapatan Retribusi Jasa Umum memberikan kontribusi sebesar 97,23% terhadap Pendapatan Retribusi Daerah secara keseluruhan.
Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum menurut jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2024 dan TA 2023

No.	Jenis Retribusi Jasa Umum	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	49.327.397.374,00	58.065.613.993,00	117,71	955.689.113,00	57.109.924.880,00	5.975,78
2.	Retribusi Pelayanan Kebersihan	600.000.000,00	630.302.000,00	105,05	381.889.000,00	248.413.000,00	65,05
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	258.000.000,00	255.000.000,00	98,84	251.000.000,00	4.000.000,00	1,59
4.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0.00	0.00	0.00	14.860.000,00	(14.860.000,00)	(100,00)
5.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0.00	0.00	0.00	305.506.000,00	(305.506.000,00)	(100,00)
6.	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	0.00	0.00	0.00	12.437.000,00	(12.437.000,00)	(100,00)
Total Retribusi Jasa Umum		**50.185.397.374,00**	**58.950.915.993,00**	**117,47**	**1.921.381.113,00**	**57.029.534.880,00**	**2.968,15**

(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2024 mencapai Rp58.065.613.993,00 atau 117,71% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp49.327.397.374,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp955.689.113,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp57.109.924.880,00 atau 5.975,78%. Peningkatan ini disebabkan adanya penambahan atas reklasifikasi retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Sidikalang dari sebelumnya di penerimaan Lain-lain PAD yang Sah.
Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.6 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2024 dan TA 2023

No.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Dinas Kesehatan (Puskesmas)	750.000.000,00	998.614.229,00	133,15	955.689.113,00	42.925.116,00	4,49
2.	RSUD Sidikalang	48.577.397.374,00	57.066.999.764,00	117,48	0,00	57.066.999.764,00	∞
Jumlah Retribusi Pelayanan Kesehatan		**49.327.397.374,00**	**58.065.613.993,00**	**117,71**	**955.689.113,00**	**57.109.924.880,00**	**5.975,78**

Pendapatan BLUD RSUD Sidikalang

Realisasi Pendapatan dari BLUD RSUD Sidikalang TA 2024 mencapai Rp57.066.999.764,00 atau 117,48% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp48.577.397.374,00 yang merupakan pendapatan dari pelayanan kesehatan, pendapatan pelayanan parkir dan lain-lain pendapatan BLUD dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD RSU Sidikalang TA 2024

No.	Pendapatan BLUD RSU Sidikalang	APBD TA 2024			Realisasi TA. 2023 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	Capaian (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)			
1	Rawat Jalan	500.000.000,00	424.104.401,00	84,82	352.125.000,00	71.979.401,00	20,44
2	Rawat Inap	600.000.000,00	450.532.000,00	75,09	472.671.500,00	(22.139.500,00)	(4,68)
3	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik	570.000.000,00	1.676.280.335,00	294,08	1.930.340.530,00	(254.060.195,00)	(13,16)
4	Tindakan Medik/Operasi	450.000.000,00	1.073.892.250,00	238,64	1.144.743.500,00	(70.851.250,00)	(6,19)
5	Bersalin	90.000.000,00	69.600.000,00	77,33	69.600.000,00	0,00	0,00
6	Pengobatan Gigi	20.000.000,00	16.027.000,00	80,14	12.550.000,00	3.477.000,00	27,71
7	Pelayanan Kesehatan Lainnya	150.000.000,00	140.158.000,00	93,44	187.382.000,00	(47.224.000,00)	(25,20)
8	Oksigen	50.000.000,00	48.240.000,00	96,48	53.560.000,00	(5.320.000,00)	(9,93)
9	Ambulance	150.000.000,00	123.239.500,00	82,16	121.010.000,00	2.229.500,00	1,84
10	Perawatan Jenazah	20.000.000,00	28.855.000,00	144,28	26.689.000,00	2.166.000,00	8,12
11	Visite Dokter	200.000.000,00	186.650.000,00	93,33	164.100.000,00	22.550.000,00	13,74
12	Pengelolaan Pelayanan JKN, Jampersal Tahun 2024	34.700.000.000,00	41.335.027.370,00	119,12	0,00	41.335.027.370,00	∞
13	Pengelolaan Pelayanan JKN, Jampersal Tahun 2023	7.108.460.995,00	6.161.389.105,00	86,68	29.033.417.175,00	(22.872.028.070,00)	(78,78)
14	Pengelolaan Pelayanan JKN, Jampersal Tahun 2022	0,00	0,00	0,00	3.021.226.300,00	(3.021.226.300,00)	(100,00)
15	Pengelolaan Obat Penyakit Kronis Pasien JKN (BPJS) 2024	1.000.000.000,00	1.727.412.195,00	172,74	0,00	1.727.412.195,00	∞
16	Pengelolaan Obat Penyakit Kronis Pasien JKN (BPJS) 2023	294.269.279,00	294.275.079,00	100,00	1.394.767.109,00	(1.100.492.030,00)	(78,90)
17	Pengelolaan Obat Penyakit Kronis Pasien JKN (BPJS) 2022	0,00	0,00	0,00	266.875.112,00	(266.875.112,00)	(100,00)
18	Pelayanan Ambulance Pasien JKN (BPJS) Tahun 2024	1.200.000.000,00	1.406.173.500,00	117,18	0,00	1.406.173.500,00	∞
19	Pelayanan Ambulance Pasien JKN (BPJS) Tahun 2023	262.667.100,00	137.086.200,00	52,19	1.271.969.700,00	(1.134.883.500,00)	(89,22)
20	Pelayanan Ambulance Pasien JKN (BPJS) Tahun 2022	0,00	0,00	0,00	229.224.200,00	(229.224.200,00)	(100,00)
21	Hasil kerjasama (Penelitian, Perguruan tinggi, In health, TCM)	900.000.000,00	504.762.741,00	56,08	1.133.076.309,00	(628.313.568,00)	(55,45)
22	Lain-lain Pendapatan BLUD	312.000.000,00	1.263.295.088,00	404,90	1.303.046.516,38	(39.751.428,38)	(3,05)
Jumlah Pendapatan BLUD RSU Sidikalang		**48.577.397.374,00**	**57.066.999.764,00**	**117,48**	**42.188.373.951,38**	**14.878.625.812,62**	**35,27**

Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum secara keseluruhan sebesar 98,50%.

(2) Retribusi Pelayanan Kebersihan

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kebersihan TA 2024 mencapai Rp630.302.000,00 atau 105,05% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp600.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp381.889.000,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kebersihan pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp248.413.000,00 atau 65,05%. Nilai

realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kebersihan memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum secara keseluruhan sebesar 1,07%.

(3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2024 mencapai Rp255.000.000,00 atau 98.84% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp258.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp251.000.000,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp4.000.000,00 atau 1,59%. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum secara keseluruhan sebesar 0,43%. Meningkatnya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum disebabkan adanya penambahan ruas jalan sebagai objek retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

(4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Realisasi Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TA 2024 mencapai Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp14.860.000,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp14.860.000,00 atau 100,00%.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak lagi dilakukan pemungutan.

(5) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Realisasi Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2024 mencapai Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp305.506.000.00. nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp305.506.000,00 atau 100,00%.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak lagi dilakukan pemungutan.

(6) Retribusi Pelayanan Tera Ulang

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera Ulang TA 2024 mencapai Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp0,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp12.437.000,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera Ulang pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp12.437.000,00 atau 100,00%.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera Ulang tidak lagi dilakukan pemungutan.

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi : (1) pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau (2) pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 74 dinyatakan bahwa Retribusi Jasa Usaha meliputi: (1) Retribusi Tempat Khusus Parkir diluar badan jalan; (2) Retribusi Rumah Potong Hewan Ternak; (3) Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga; (4) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; (5) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2024 mencapai Rp1.146.462.375,00 atau 62,96% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.821.000.000,00. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha memberikan kontribusi sebesar 1,89% terhadap Pendapatan Retribusi Daerah secara keseluruhan. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha pada TA 2023 sebesar Rp1.149.254.300,00, maka realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.791.925,00 atau 0,24%.

Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha menurut jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2024 dan TA 2023

No	Jenis Retribusi Jasa Usaha	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	685.000.000,00	439.360.000,00	64,14	420.520.000,00	18.840.000,00	4,48
2.	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	(52.000.000,00)	(100,00)
3.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	80.000.000,00	68.723.000,00	85,90	67.102.000,00	1.621.000,00	2,42
4.	Retribusi Rumah Potong Hewan	20.000.000,00	16.500.000,00	82,50	16.000.000,00	500.000,00	3,13
5.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	902.000.000,00	603.184.000,00	66,87	543.360.000,00	59.824.000,00	11,01
6.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	125.000.000,00	14.195.375,00	11,36	50.272.300,00	(36.076.925,00)	(71,76)
7.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	9.000.000,00	4.500.000,00	50,00	0,00	4.500.000,00	∞
Total Retribusi Jasa Usaha		1.821.000.000,00	1.146.462.375,00	62,96	1.149.254.300,00	(2.791.925,00)	(0,24)

(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2024 mencapai Rp439.360.000,00 atau 64,14% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp685.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp420.520.000,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp18.840.000,00 atau 4,48%. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha secara keseluruhan sebesar 38,32%.

Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2024 dan TA 2023

No	SKPD	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Sekretariat Daerah	15.000.000,00	9.000.000,00	60,00	4.400.000,00	4.600.000,00	104,55
2.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	20.000.000,00	18.000.000,00	90,00	6.400.000,00	11.600.000,00	181,25
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	650.000.000,00	412.360.000,00	63,44	409.720.000,00	2.640.000,00	0,64
Total Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		685.000.000,00	439.360.000,00	64,14	420.520.000,00	18.840.000,00	4,48

(2) Retribusi Terminal

Realisasi Pendapatan Retribusi Terminal TA 2024 mencapai Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp0,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp52.000.000,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Terminal pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp52.000.000,00 atau 100,00%.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Terminal tidak lagi dilakukan pemungutan.

(3) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir TA 2024 mencapai Rp68.723.000,00 atau 85,90% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp67.102.000,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp1.621.000,00 atau 2,42%. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha secara keseluruhan sebesar 5,99%. Meningkatnya pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir karena meningkatnya pengunjung tempat rekreasi Taman Wisata Iman Sitinjo.

(4) Retribusi Rumah Potong Hewan

Realisasi Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan TA 2024 mencapai Rp16.500.000,00 atau 82,50% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp16.000.000,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan pada

TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp500.000,00 atau 3,13%. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan memberikan kontribusi terhadap realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha secara keseluruhan sebesar 1,44%.

(5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga TA 2024 sebesar Rp603.184.000,00 atau 66,87% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp902.000.000,00. Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga terdiri dari penerimaan atas Retribusi memasuki Taman Wisata Iman dan Retribusi Taman Rekreasi dan Olah Raga (tamrek) masing-masing sebesar Rp602.284.000,00 dan Rp900.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp543.360.000,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp59.824.000,00 atau 11,01%. Meningkatnya pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga karena meningkatnya pengunjung tempat rekreasi Taman Wisata Iman Sitinjo.

Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga memberikan kontribusi terhadap pendapatan retribusi jasa usaha secara keseluruhan sebesar 52,61%.

(6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2024 mencapai Rp14.195.375,00 atau 11,36% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp125.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp50.272.300,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp36.076.925,00 atau 71,76%. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha secara keseluruhan sebesar 1,24%.

(7) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah TA 2024 mencapai Rp4.500.000,00 atau 50,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp9.000.000,00.. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha secara keseluruhan sebesar 0,39%.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 90 dinyatakan bahwa Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: (1) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; (2) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 mencapai Rp531.257.750,00 atau 106,25% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu memberikan kontribusi sebesar 0,88% terhadap Pendapatan Retribusi Daerah. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp249.428.800,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp281.828.950,00 atau 112,99%.

Rincian pendapatan retribusi perizinan tertentu pada tabel berikut.

Tabel 5.10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 dan TA 2023

No.	Jenis Retribusi Perizinan Tertentu	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	500.000.000,00	531.257.750,00	106,25	241.428.800,00	289.828.950,00	120,05
2.	Retribusi Izin Trayek	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	(100,00)
Total Retribusi Perizinan Tertentu		**500.000.000,00**	**531.257.750,00**	**106,25**	**249.428.800,00**	**281.828.950,00**	**112,99**

(1) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Realisasi Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada TA 2024 mencapai Rp531.257.750,00 atau 106,25% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp241.428.800,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp289.828.950,00 atau 120,05%. Nilai realisasi Pendapatan Persetujuan Bangunan Gedung memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu secara keseluruhan sebesar 100,00%.

(2) Retribusi Izin Trayek

Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Trayek pada TA 2024 mencapai Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp0,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp8.000.000,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Izin Trayek pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp8.000.000,00.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Trayek tidak lagi dilakukan pemungutan.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan — 11.964.954.686,50 — 11.409.321.078,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan salah satu komponen dari PAD. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 mencapai Rp11.964.954.686,50 atau 100,00% dari yang dianggarkan yang telah ditetapkan sebesar Rp11.964.954.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp555.633.608,50 atau 4,87% apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp11.409.321.078,00. Dengan demikian, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi terhadap PAD secara keseluruhan sebesar 11,92%.

Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 dan TA 2023

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	11.964.954.000,00	11.964.954.686,50	100,00	11.409.321.078,00	555.633.608,50	4,87
Total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	**11.964.954.000,00**	**11.964.954.686,50**	**100,00**	**11.409.321.078,00**	**555.633.608,50**	**4,87**

Nilai realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Dairi pada PT Bank Sumut dan Perusahaan Milik Daerah/BUMD.

Tabel 5.12 Anggaran dan Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal TA 2024 dan TA 2023

No.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	PT Bank Sumut	11.964.954.000,00	11.964.954.686,50	100,00	11.409.321.078,00	555.633.608,50	4,87
2.	PD Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Perumda Air Minum Lae Nciho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		**11.964.954.000,00**	**11.964.954.686,50**	**100,00**	**11.409.321.078,00**	**555.633.608,50**	**4,87**

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah — 6.197.612.435,27 — 49.863.967.684,10

Lain-Lain PAD yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 mencapai Rp6.197.612.435,27 atau 152,66% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp4.059.723.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp43.666.355.248,83 atau 87,57% apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp49.863.967.684,10.

Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah untuk masing-masing jenis disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.13 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 dan TA 2023

No.	Jenis Lain-Lain PAD yang Sah	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Penjualan Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	75.000.000,00	49.604.500,00	66,14	1.427.671.848,00	(1.378.067.348,00)	(96,53)
2.	Penerimaan Jasa Giro	1.000.000.000,00	1.429.794.490,00	142,98	2.391.384.170,00	(961.589.680,00)	(40,21)
3.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	29.561.000,00	29.561.430,00	100,00	62.101.246,00	(32.539.816,00)	(52,40)
4.	Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	50.000.000,00	42.219.200,00	84,44	352.571.966,21	(310.352.766,21)	(88,03)
5.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	875.694.000,00	1.896.574.441,18	216,58	182.064.114,48	1.714.510.326,70	941,71
6.	Pendapatan Denda Pajak	179.550.000,00	135.100.626,00	75,24	111.212.685,00	23.887.941,00	21,48
7.	Pendapatan dari Pengembalian	1.849.918.000,00	2.614.757.748,09	141,34	1.112.271.086,00	1.502.486.662,09	135,08
8.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.036.316.617,03	(2.036.316.617,03)	(100,00)
9.	Pendapatan BLUD RSUD Sidikalang	0,00	0,00	0,00	42.188.373.951,38	(42.188.373.951,38)	(100,00)
Total Lain-Lain PAD yang Sah		**4.059.723.000,00**	**6.197.612.435,27**	**152,66**	**49.863.967.684,10**	**(43.666.355.248,83)**	**(87,57)**

a) Penjualan Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain

Penjualan aset lainnya-aset lain-lain merupakan penerimaan yang diperoleh dari penjualan peralatan kantor tidak terpakai dan hasil rongsokan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Dairi yang direhabilitasi. Pada TA 2024, terealisasi sebesar Rp49.604.500,00 atau 66,14% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp75.000.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.378.067.348,00 atau 96,53% apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp1.427.671.848,00.

b) Penerimaan Jasa Giro

Penerimaan Jasa Giro merupakan imbalan yang diberikan atas dana yang disimpan di PT Bank Sumut sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan. Penerimaan jasa giro pada Pemerintah Kabupaten Dairi terdiri dari penerimaan jasa giro atas rekening kas daerah dan rekening kas SKPD. Realisasi Penerimaan Jasa Giro TA 2024 mencapai Rp1.429.794.490,00 atau 142,98% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp961.589.680,00 atau 40,21% apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp2.391.384.170,00.

c) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah

Realisasi Pendapatan dari Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah TA 2024 mencapai Rp29.561.430,00 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp29.561.000,00. Nilai realisasi tersebut merupakan penerimaan remunerasi atas dana *Treasury Deposit Facility* (*TDF*) pada Bank Indonesia. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp32.539.816,00 atau 52,40% apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp62.101.24,00.

d) Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Realisasi Pendapatan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah TA 2024 mencapai Rp42.219.200,00 atau 84,44% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00. Nilai realisasi tersebut merupakan penerimaan angsuran atas tuntutan ganti kerugian PNS Non Bendahara dan Non PNS. Nilai tersebut

mengalami penurunan sebesar Rp310.352.766,21 atau 88,03% apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp352.571.966,21.

e) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi Pendapatan dari Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2024 mencapai Rp1.896.574.441,18 atau 216,58% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp875.694.000,00. Nilai realisasi tersebut merupakan penerimaan atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tahun sebelumnya. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.714.510.326,70 atau 941,71% apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp182.064.114,48.

f) Pendapatan Denda Pajak

Realisasi Pendapatan dari Denda Pajak TA 2024 mencapai Rp135.100.626,00 atau sebesar 75,24%b dari anggaran sebesar Rp179.550.000,00. Realisasi tersebut merupakan penerimaan denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp72.642.620,00 dan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp62.458.006,00 yang melewati batas jatuh tempo. Apabila dibandingkan dengan penerimaan TA 2023, realisasi penerimaan TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp23.887.941,00 atau sebesar 21,48%.

g) Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2024 mencapai Rp2.614.757.748,09 atau 141,34% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.849.918.000,00. Nilai realisasi tersebut merupakan penerimaan atas kelebihan pembayaran belanja yang diterima di tahun 2024. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.502.486.662,09 atau 135,08% apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp1.112.271.086,00.

h) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

Realisasi Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya TA 2024 mencapai Rp0,00. Nilai realisasi tersebut merupakan penerimaan lainnya yang diterima di Kas Daerah.

i) Pendapatan BLUD RSUD Sidikalang

Realisasi Pendapatan dari BLUD RSUD Sidikalang TA 2024 mencapai 0,00 atau 0,00%. Hal ini disebabkan dilakukan reklasifikasi ke Retribusi Pelayanan Kesehatan.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer 1.083.304.010.242,00 1.094.557.567.445,00

Pendapatan Transfer merupakan perimbangan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah dan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah, yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang bersumber dari pendapatan APBN dan APBD Provinsi. Pendapatan Transfer dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang ditetapkan berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 adalah sebesar Rp1.083.304.010.242,00 atau 94,32% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.148.501.149.600,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp11.253.557.203.00 atau 1,03% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.094.557.567.445.00. Pendapatan Transfer terdiri dari empat jenis yaitu : Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Umum, Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Khusus, Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi memberikan kontribusi terhadap nilai realisasi Pendapatan Transfer secara keseluruhan masing-masing sebesar 61,88%, 20,65%, 14,01% dan 3,46%.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer untuk masing-masing jenis pendapatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 dan TA 2023

No.	Jenis Pendapatan Transfer	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Tranfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Umum	670.847.210.000,00	670.385.965.970,00	99,93	614.827.177.235,00	55.558.788.735,00	9,04
2.	Tranfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Khusus	253.319.041.000,00	223.711.106.827,00	88,31	267.766.001.163,00	(44.054.894.336,00)	(16,45)
3.	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	151.727.984.000,00	151.727.984.000,00	100,00	168.896.352.200,00	(17.168.368.200,00)	(10,17)
4.	Transfer Pemerintah Provinsi	72.606.914.600,00	37.478.953.445,00	51,62	43.068.036.847,00	(5.589.083.402,00)	(12,98)
Total Pendapatan Transfer		**1.148.501.149.600,00**	**1.083.304.010.242,00**	**94,32**	**1.094.557.567.445,00**	**(11.253.557.203,00)**	**(1,03)**

Penjelasan lebih rinci untuk masing-masing jenis Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut.

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Umum — 670.385.965.970,00 — 614.827.177.235,00

Transfer Pemerintah Pusat–Dana Tranfer Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Rincian anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat–Dana Transfer Umum disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.15 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat–Dana Transfer Umum TA 2024 dan TA 2023

No.	Jenis Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Umum	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	8.916.292.000,00	10.879.478.890,00	122,02	11.853.447.510,00	(973.968.620,00)	(8,22)
2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.461.636.000,00	4.151.779.000,00	119,94	4.423.542.725,00	(271.763.725,00)	(6,14)
3.	Dana Bagi Hasil Lainnya	7.520.542.000,00	7.520.542.000,00	100,00	8.513.744.000,00	(993.202.000,00)	(11,67)
4.	Dana Alokasi Umum	650.948.740.000,00	647.834.166.080,00	99,52	590.036.443.000,00	57.797.723.080,00	9,80
Total Transfer Pemerintah Pusat- Dana Transfer Umum		**670.847.210.000,00**	**670.385.965.970,00**	**99,93**	**614.827.177.235,00**	**55.558.788.735,00**	**9,04**

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat–Dana Transfer Umum TA 2024 mencapai Rp670.385.965.970,00 atau 99,93% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp670.847.210.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp55.558.788.735,00 atau 9,04% apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2023 yang mencapai Rp614.827.177.235,00. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Transfer Umum memberikan kontribusi sebesar 61,88% dari nilai realisasi Pendapatan Transfer secara keseluruhan.
Berdasarkan tabel 5.15 dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Umum memberikan kontribusi paling tinggi terhadap realisasi Transfer Pemerintah Pusat–Dana Transfer Umum yaitu mencapai 96,64%.

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak — 10.879.478.890,00 — 11.853.447.510,00

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, Biaya Pungut PBB, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Cukai Hasil Tembakau.

Rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.16 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan TA 2023

No.	Jenis Dana Bagi Hasil Pajak	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Dana Bagi Hasil dari	2.771.282.000,00	3.342.835.000,00	120,62	3.859.324.512,00	(516.489.512,00)	(13,38)

No.	Jenis Dana Bagi Hasil Pajak	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
	Pajak Bumi dan Bangunan						
2.	Dana Bagi Hasil dari Biaya Pungut PBB	0,00	0,00	0,00	10.378.050,00	(10.378.050,00)	(100,00)
3.	Dana Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN	361.004.000,00	535.821.000,00	148,43	524.032.812,00	(6.147.499.250,00)	(91,98)
4.	Dana Bagi Hasil dari PPh Pasal 21	5.118.769.000,00	6.283.878.000,00	122,76	6.683.320.250,00	5.759.845.188,00	1.099,14
5.	Dana Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	665.237.000,00	716.944.890,00	107,77	776.391.886,00	(59.446.996,00)	(7,66)
Total Bagi Hasil Pajak		**8.916.292.000,00**	**10.879.478.890,00**	**122,02**	**11.853.447.510,00**	**(973.968.620,00)**	**(8,22)**

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 adalah sebesar Rp10.879.478.890,00 atau 122,02% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp8.916.292.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp973.968.620,00 atau 8,22% apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2023 sebesar Rp11.853.447.510,00.

(1) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Realisasi Dana Bagi Hasil PBB dari Pemerintah Pusat pada TA 2024 yang diterima di kas daerah adalah sebesar Rp3.342.835.000,00. Rincian penerimaan tersebut adalah sebagai berikut:

(a) DBH PBB Sektor Perkebunan sebesar Rp1.239.226.000,00;
(b) DBH PBB Sektor Perhutanan sebesar Rp167.304.000,00;
(c) DBH PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp792.328.000,00;
(d) DBH PBB Sektor Pertambangan Pengusahaan Panas Bumi sebesar Rp197.642.000,00;
(e) DBH PBB Sektor Pertambangan Non Migas Lainnya sebesar Rp856.815.000,00;
(f) DBH PBB Sektor Lainnya sebesar Rp89.520.000,00.

Penerimaan DBH PBB dilakukan berdasarkan :

1) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tanggal 28 November 2023 tentang Rincian APBN TA 2024;
2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir TA.2024;
3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024 tanggal 29 Desember 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

Realisasi Dana Bagi Hasil PBB TA 2024 sebesar Rp3.342.835.000,00, diuraikan sebagai berikut :

1) Penerimaan TA 2024 sebesar Rp2.771.282.000,00;
2) Penarikan Dana TDF atas penerimaan DBH non tunai TA 2023 sebesar Rp571.553.000,00.

Realisasi Dana Bagi Hasil PBB TA 2024 mencapai Rp3.242.835.000,00 atau 120,62% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.771.282.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp3.859.324.512,00, nilai realisasi Dana Bagi Hasil PBB TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp973.968.620,00 atau 8,22%.

(2) Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (BP PBB)

Realisasi Biaya Pungut PBB dari Pemerintah Pusat pada TA 2024 yang diterima di kas daerah adalah sebesar Rp0,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp10.378.050,00, nilai realisasi Biaya Pungut PBB TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp10.378.050,00 atau 100,00%.

(3) Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN

Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25dan Pasal 29 WPOPDN pada TA 2023 sesuai dengan :

a. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tanggal 28 November 2023 tentang Rincian APBN TA 2024;
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir TA.2024;
c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024 tanggal 29 Desember 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN TA 2024 mencapai Rp535.821.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp524.032.812,00, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp11.788.188,00 atau 2,25%.

Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN TA 2024 sebesar Rp535.821.000,00, diuraikan sebagai berikut :

1) Penerimaan TA 2024 sebesar Rp361.004.000,00;
2) Penarikan Dana TDF atas penerimaan DBH non tunai TA 2023 sebesar Rp174.817.000,00.

(4) Bagi Hasil dari PPh Pasal 21

Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 pada TA 2024 yang diterima di kas daerah sebesar Rp6.283.878.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp6.683.320.250,00, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp399.442.250,00 atau 5,98%.

Penerimaan Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 dilakukan berdasarkan :

a. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tanggal 28 November 2023 tentang Rincian APBN TA 2024;
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir TA.2024;
c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024 tanggal 29 Desember 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 TA 2024 sebesar Rp6.283.878.000,00, diuraikan sebagai berikut :

1) Penerimaan TA 2024 sebesar Rp5.118.769.000,00;
2) Penarikan Dana TDF atas penerimaan DBH non tunai TA 2023 sebesar Rp1.165.109.000,00.

(5) Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau

Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 2024 yang diterima di Kas Daerah mencapai sebesar Rp716.944.890,00 atau sebesar 107,77% dari anggaran sebesar Rp665.237.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp776.391.886,00, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp59.446.996,00 atau 7,66%.

Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 2024 dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tanggal 28 November 2023 tentang Rincian APBN TA 2024;

Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 2024 sebesar Rp716.944.890,00, diuraikan sebagai berikut :

1) Penerimaan TA 2024 sebesar Rp664.932.890,00;
2) Penarikan Dana DBH TA 2023 sebesar Rp52.012.000,00.

5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 4.151.779.000,00 4.423.542.725,00

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi dan pertambangan umum.

Rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.17 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya AlamTA 2024 dan TA 2023

No.	Jenis Bagi Hasil Sumber Daya Alam	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Bagi Hasil dari SDA Kehutanan	105.453.000,00	105.453.000,00	100,00	222.771.472,00	(117.318.472,00)	(52,66)
2.	Bagi Hasil dari SDA Perikanan	1.073.811.000,00	1.073.811.000,00	100,00	1.471.694.211,00	(397.883.211,00)	(27,04)
3.	Bagi Hasil dari SDA Minyak Bumi	215.895.000,00	225.904.000,00	104,64	13.604.238,00	212.299.762,00	1.560,54
4.	Bagi Hasil dari SDA Gas Bumi	7.422.000,00	5.981.000,00	80,58	17.506.741,00	(11.525.741,00)	(65,84)
5.	Bagi Hasil dari SDA Panas Bumi	69.227.000,00	106.602.000,00	153,99	109.464.576,00	(2.862.576,00)	(2,62)
6.	Bagi Hasil dari SDA Pertambangan Umum	1.989.828.000,00	2.634.028.000,00	132,37	2.588.501.487,00	45.526.513,00	1,76

No.	Jenis Bagi Hasil Sumber Daya Alam	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
Total Bagi Hasil Sumber Daya Alam		3.461.636.000,00	4.151.779.000,00	119,94	4.423.542.725,00	(271.763.725,00)	(6,14)

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2024 mencapai Rp4.151.779.000,00 atau 119,94% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.461.636.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp4.423.542.725,00, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp271.763.725,00 atau 6,14%.

(1) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan pada TA 2024 yang diterima di kas daerah sebesar Rp105.453.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp105.453.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp117.318.472,00 atau 52,66%.

Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan yang berasal dari Pemerintah Pusat berdasarkan:

1) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tanggal 28 November 2023 tentang Rincian APBN TA 2024;
2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024 tanggal 29 Desember 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

(2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan TA 2024 mencapai Rp1.073.811.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.073.811.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp397.883.211,00 atau 27,04%.

Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan yang berasal dari Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tanggal 28 November 2023 tentang Rincian APBN TA 2024.

(3) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi TA 2024 mencapai Rp225.904.000,00 atau 104,64% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp215.895.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp212.299.762,00 atau 1.560,54%.

Dana Bagi Sumber Daya Alam Minyak Bumi berasal dari Pemerintah Pusat diterima berdasarkan :

a. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tanggal 28 November 2023 tentang Rincian APBN TA 2024;
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024 tanggal 29 Desember 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

Realisasi Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi TA 2024 sebesar Rp225.904.000,00, diuraikan sebagai berikut:

1) Penerimaan TA 2024 sebesar Rp217.336.000,00;
2) Penarikan Dana TDF atas penerimaan DBH non tunai TA 2023 sebesar Rp8.568.000,00.

(4) Dana Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Gas Bumi

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi TA 2024 mencapai Rp5.981.000,00 atau 80,58% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp7.422.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp11.525.741,00 atau 65,84%.

Realisasi Dana Bagi Sumber Daya Alam Gas Bumi berasal dari Pemerintah Pusat diterima berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tanggal 28 November 2023 tentang Rincian APBN TA 2024.

(5) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi TA 2024 mencapai Rp106.602.000,00 atau 153,99% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp69.227.000,00, yang terdiri dari :

(a) Iuran Tetap sebesar Rp37.953.000,00;
(b) Iuran Produksi sebesar Rp68.649.000,00.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.862.576,00 atau 2,62%.

Realisasi Dana Bagi Sumber Daya Alam Panas Bumi berasal dari Pemerintah Pusat diterima berdasarkan :

a. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tanggal 28 November 2023 tentang Rincian APBN TA 2024;
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir TA.2024;
c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024 tanggal 29 Desember 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

Realisasi Dana Bagi Hasil SDA Panas Bumi TA 2024 sebesar Rp106.602.000,00, diuraikan sebagai berikut:

1) Penerimaan TA 2024 sebesar Rp69.227.000,00;
2) Penarikan Dana TDF atas penerimaan DBH non tunai TA 2023 sebesar Rp37.375.000,00.

(6) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum TA 2024 yang diterima di kas daerah sebesar Rp2.634.028.000,00 yang terdiri dari :

a. Iuran Tetap (*Land-rent*) sebesar Rp576.042.000,00;
b. Royalti sebesar Rp2.057.986.000,00.

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum berasal dari Pemerintah Pusat diterima berdasarkan :

a. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tanggal 28 November 2023 tentang Rincian APBN TA 2024;
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir TA.2024;
c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024 tanggal 29 Desember 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum TA 2024 mencapai Rp2.634.028.000,00 atau 132,37% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.989.828.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp45.526.513,00 atau 1,76%.

Realisasi Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum TA 2024 sebesar Rp2.634.028.000,00, diuraikan sebagai berikut :

1) Penerimaan TA 2024 sebesar Rp1.989.828.000,00;
2) Penarikan Dana TDF atas penerimaan DBH non tunai TA 2023 sebesar Rp644.200.000,00.

5.1.1.2.1.3 Dana Bagi Hasil Lainnya **7.520.542.000,00** **8.513.744.000,00**

Dana Bagi Hasil Lainnya merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu. Salah satu DBH Lainnya adalah Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang merupakan DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah dan/atau produk turunannya.

Pada TA 2024, Pemerintah Kabupaten Dairi belum mengalokasikan penerimaan dari DBH Perkebunan Sawit namun terealisasi sebesar Rp7.520.542.000,00. Realisasi DBH Perkebunan Sawit yang berasal dari Pemerintah Pusat diterima berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tanggal 28 November 2023 tentang Rincian APBN TA 2024 dimana Pemerintah Kabupaten Dairi menerima alokasi DBH Perkebunan Sawit sebesar Rp7.520.542.000,00.

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Umum **647.834.166.080,00** **590.036.443.000,00**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi DAU berasal dari Pemerintah Pusat diterima berdasarkan :

a. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tanggal 28 November 2023 tentang Rincian APBN TA 2024;
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian DAU TA.2024 dalam rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas bagi Guru ASN di Daerah.

Realisasi DAU dipengaruhi beberapa variable, diantaranya jumlah penduduk, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), produk domestik regional bruto per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PAD, Dana Bagi Hasil dan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Realisasi DAU TA 2024 mencapai Rp647.834.166.080,00 atau 99,52% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp650.948.740.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp590.036.443.000,00, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp57.797.723.080,00 atau 9,80%. Rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.18 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2024 dan TA 2023

No.	Jenis Dana Alokasi Umum	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	531.582.373.000,00	543.959.401.000,00	102,33	403.982.487.000,00	139.976.914.000,00	25,73
2.	Penggajian Formasi PPPK	45.108.612.000,00	29.617.010.080,00	65,66	39.063.594.000,00	(9.446.583.920,00)	(24,18)
3.	Pendanaan Kelurahan	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	100,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00
4.	Bidang Pendidikan	20.387.329.000,00	20.387.329.000,00	100,00	66.469.426.000,00	(46.082.097.000,00)	(69,33)
5.	Bidang Kesehatan	28.732.548.000,00	28.732.548.000,00	100,00	39.385.958.000,00	(10.653.410.000,00)	(27,05)
6.	Bidang Pekerjaan Umum	23.537.878.000,00	23.537.878.000,00	100,00	39.534.978.000,00	(15.997.100.000,00)	(40,46)
Total DAU		650.948.740.000,00	647.834.166.080,00	99,52	590.036.443.000,00	57.797.723.080,00	9,80

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Khusus — 223.711.106.827,00 — 267.766.001.163,00

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Khusus (DAK) TA 2024 merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK diterima berdasarkan :

1) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tanggal 28 November 2023 tentang Rincian APBN TA 2024;
2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Perubahan Rincian DAK Non Fisik Dana Tunjangan Guru ASN Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisataan TA 2024.

Realisasi DAK TA 2024 mencapai Rp223.711.106.827,00 atau 88,31% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp253.319.041.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp267.766.001.163,00, nilai realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Khusus pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp44.054.894.336,00 atau 16,45%.

Rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Khusus TA 2024 untuk masing-masing bidang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.19 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Khusus TA 2024 dan TA 2023

No.	Jenis Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Khusus	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
I.	**Dana Alokasi Khusus Fisik**	**83.783.162.000,00**	**64.141.894.493,00**	**76,56**	**97.765.061.442,00**	**(33.623.166.949,00)**	**(34,39)**
1.	Bidang Pendidikan	12.494.431.000,00	12.277.978.250,00	98,27	6.364.831.070,00	5.913.147.180,00	92,90
2.	Bidang Kesehatan	4.695.557.000,00	4.636.248.000,00	98,74	18.061.957.950,00	(13.425.709.950,00)	(74,33)
3.	Bidang Jalan	38.156.865.000,00	32.245.606.426,00	84,51	45.936.138.171,00	(13.690.531.745,00)	(29,80)
4.	Bidang Air Minum	12.652.050.000,00	3.163.012.498,00	25,00	6.469.448.000,00	(3.306.435.502,00)	(51,11)
5.	Bidang Sanitasi	3.988.536.000,00	997.134.000,00	25,00	5.725.262.850,00	(4.728.128.850,00)	(82,58)
6.	Bidang Irigasi	4.968.000.000,00	4.886.967.000,00	98,37	3.586.460.300,00	1.300.506.700,00	36,26
7.	Bidang Pertanian	2.667.744.000,00	2.666.931.120,00	99,97	4.753.054.801,00	(2.086.123.681,00)	(43,89)
8.	Bidang Industri Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	3.681.212.300,00	(3.681.212.300,00)	(100,00)

No.	Jenis Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Khusus	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
9.	Bidang Pariwisata	2.938.076.000,00	2.056.653.199,00	70,00	1.652.196.000,00	404.457.199,00	24,48
10.	Bidang Lingkungan Hidup	1.221.903.000,00	1.211.364.000,00	99,14	1.534.500.000,00	(323.136.000,00)	(21,06)
II.	**Dana Alokasi Khusus Non Fisik**	**169.535.879.000,00**	**159.569.212.334,00**	**94,12**	**170.000.939.721,00**	**(10.431.727.387,00)**	**(6,14)**
1.	Bantuan Operasional Sekolah	59.837.090.000,00	59.789.432.236,00	99,92	62.131.466.134,00	(2.342.033.898,00)	(3,77)
2.	Bantuan Operasional PAUD	2.278.350.000,00	2.054.569.417,00	90,18	2.361.402.060,00	(306.832.643,00)	(12,99)
3.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	150.620.000,00	130.950.000,00	86,94	118.395.000,00	12.555.000,00	10,60
4.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	70.605.800.000,00	70.237.517.000,00	99,48	67.198.987.922,00	3.038.529.078,00	4,52
5.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.849.250.000,00	2.849.250.000,00	100,00	2.627.500.000,00	221.750.000,00	8,44
6.	Tunjangan Khusus Guru	449.761.000,00	457.078.000,00	101,63	325.647.000,00	131.431.000,00	40,36
7.	Bantuan Operasional Kesehatan	21.841.575.000,00	15.947.919.612,00	73,02	25.142.705.150,00	(9.194.785.538,00)	(36,57)
8.	Bantuan Operasional KB	5.746.990.000,00	4.093.311.716,00	71,23	4.925.348.455,00	(832.036.739,00)	(16,89)
9.	Dana Pelayanan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	438.800.000,00	(438.800.000,00)	(100,00)
10.	Dana Pelayanan Kepariwisataan	1.838.000.000,00	1.757.123.000,00	95,60	1.495.487.000,00	261.636.000,00	17,50
11.	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	612.951.000,00	610.357.000,00	99,58	479.850.000,00	130.507.000,00	27,20
12.	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	455.000.000,00	455.000.000,00	100,00	253.425.000,00	201.575.000,00	79,54
13.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK	897.732.000,00	837.119.250,00	93,25	339.970.000,00	497.149.250,00	146,23
14.	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.972.760.000,00	349.585.103,00	17,72	2.161.956.000,00	(1.812.370.897,00)	(83,83)
Total Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Khusus		**253.319.041.000,00**	**223.711.106.827,00**	**88,31**	**267.766.001.163,00**	**(44.054.894.336,00)**	**(16,45)**

5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 151.727.984.000,00 168.896.352.200,00

Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya TA 2024 berupa Dana Insentif Fiskal dan Dana Desa masing-masing terealisasi sebesar Rp15.166.908.000,00 dan Rp136.561.076.000,00. Total nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp17.168.368.200,00 atau 10,17% apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2023 yang mencapai Rp168.896.352.200,00.

Realisasi Dana Desa dan Dana Insentif Fiskal diterima berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tanggal 28 November 2023 tentang Rincian APBN TA 2024.

Tabel 5.20 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2024 dan TA 2023

No.	Jenis Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Dana Insentif Fiskal	15.166.908.000,00	15.166.908.000,00	100,00	33.666.172.000,00	(18.499.264.000,00)	(54,95)
2.	Pendapatan Transfer Dana Desa	136.561.076.000,00	136.561.076.000,00	100,00	135.230.180.200,00	1.330.895.800,00	0,98
Total Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		**151.727.984.000,00**	**151.727.984.000,00**	**100,00**	**168.896.352.200,00**	**(17.168.368.200,00)**	**(10,17)**

5.1.1.2.4 Transfer Pemerintah Provinsi 37.478.953.445,00 43.068.036.847,00

Transfer Pemerintah Provinsi TA 2024 berasal dari Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Bantuan Keuangan Khusus, diuraikan sebagai berikut :

5.1.1.2.4.1	**Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pendapatan**	**37.478.953.445,00**	**42.102.238.300,00**

Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pendapatan TA 2024 berasal dari Bagi Hasil Pendapatan Pajak yang terdiri dari: (1) Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor; (2) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (3) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (4) Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan (5) Bagi Hasil dari Pajak Rokok.

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan Pajak TA 2024 mencapai Rp37.478.953.445,00 atau 52,92% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp70.821.914.600,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp4.623.284.855,00 atau 10,98%.

Realisasi Bagi Hasil Pendapatan diterima berdasarkan :

a. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/175/KPTS/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang dialokasikan pada APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2024;

b. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/164/KPTS/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Perhitungan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan tahun 2022.

Rincian anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.21 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan TA 2024 dan TA 2023

No.	Jenis Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
A.	**DBH Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**	**13.538.092.001,00**	**3.976.860.214,00**	**29,38**	**7.762.953.238,00**	**(3.786.093.024,00)**	**(48,77)**
1.	DBH dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA. 2024	5.119.503.137,00	0,00	0,00	750.000.000,00	(750.000.000,00)	(100,00)
2.	Kurang Bayar DBH dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA. 2023	8.418.588.864,00	3.976.860.214,00	47,24	7.012.953.238,00	(3.036.093.024,00)	(43,29)
B.	**DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**	**8.244.237.752,00**	**2.302.207.818,00**	**27,93**	**4.917.479.085,00**	**(2.615.271.267,00)**	**(53,18)**
1.	DBH BBN-KB TA. 2024	3.413.002.091,00	0,00	0,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	(100,00)
2.	Kurang Bayar DBH BBN-KB TA. 2023	4.831.235.661,00	2.302.207.818,00	47,65	4.417.479.085,00	(2.115.271.267,00)	(47,88)
C.	**DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)**	**21.454.480.116,00**	**7.938.905.705,00**	**37,00**	**10.585.922.309,00**	**(2.647.016.604,00)**	**(25,01)**
1.	DBH PBB-KB TA 2024	9.535.324.496,00	0,00	0,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	(100,00)
2.	Kurang Bayar DBH PBB-KB TA 2023	11.919.155.620,00	7.938.905.705,00	66,61	10.085.922.309,00	(2.147.016.604,00)	(21,29)
D.	**DBH dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PAP)**	**2.520.788.404,00**	**1.260.394.202,00**	**50,00**	**1.793.317.225,00**	**(532.923.023,00)**	**(29,72)**
1.	DBH PAP TA 2024	1.260.394.202,00	0,00	0,00	283.866.361,00	(283.866.361,00)	(100,00)
2.	Kurang Bayar DBH PAP TA 2023	1.260.394.202,00	1.260.394.202,00	100,00	1.509.450.864,00	(249.056.662,00)	(16,50)
E.	**DBH dari Pajak Rokok**	**25.064.316.327,00**	**22.000.585.506,00**	**87,78**	**17.042.566.443,00**	**4.958.019.063,00**	**29,09**
1.	DBH Pajak Rokok TA 2024	22.971.776.074,00	19.908.045.253,00	86,66	17.042.566.443,00	2.865.478.810,00	16,81
2.	Kurang Bayar DBH Pajak Rokok TA 2023	2.092.540.253,00	2.092.540.253,00	100,00	0,00	2.092.540.253,00	#DIV/0!
Jumlah DBH Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi		**70.821.914.600,00**	**37.478.953.445,00**	**52,92**	**42.102.238.300,00**	**(4.623.284.855,00)**	**(10,98)**

a) Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dianggarkan dalam APBD sebesar Rp13.538.092.001,00 dan terealisasi sebesar Rp3.976.860.214,00 atau 29,38%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.22 Rincian Alokasi, Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor TA 2024

No.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara		Dana Bagi Hasil	Nilai Alokasi (Rp)	APBD TA 2024		
	Nomor	Tanggal			Anggaran	Realisasi	%
1.	188.44/175/KPTS/2024	18 Maret 2024	DBH PKB TA 2024	5.119.503.137,00	5.119.503.137,00	0,00	0,00
2.	188.44/164/KPTS/2024	8 Maret 2024	Kekurangan DBH PKB TA 2023	8.418.588.864,00	8.418.588.864,00	3.976.860.214,00	47,24
Jumlah				**13.538.092.001,00**	**13.538.092.001,00**	**3.976.860.214,00**	**29,38**

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp7.762.953.238,00, nilai realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor pada TA 2024 sebesar Rp3.976.860.214,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.786.093.024,00 atau 48,77%.

b) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pendapatan Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dianggarkan dalam APBD sebesar Rp8.244.237.752,00 dan terealisasi sebesar Rp2.302.207.818,00 atau 27,93%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.23 Rincian Alokasi, Anggaran dan Realisasi DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2024

No.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara		Dana Bagi Hasil	Nilai Alokasi (Rp)	APBD TA 2024		
	Nomor	Tanggal			Anggaran	Realisasi	%
1.	188.44/175/KPTS/2024	18 Maret 2024	DBH BBNKB TA 2024	3.413.002.091,00	3.413.002.091,00	0,00	0,00
2.	188.44/164/KPTS/2024	8 Maret 2024	Kekurangan DBH BBNKB TA 2023	4.831.235.661,00	4.831.235.661,00	2.302.207.818,00	47,65
Jumlah				**8.244.237.752,00**	**8.244.237.752,00**	**2.302.207.818,00**	**27,93**

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp4.917.479.085,00, nilai realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada TA 2024 sebesar Rp2.302.207.818,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.615.271.267,00 atau 53,18%.

c) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pendapatan Dana Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dianggarkan dalam APBD sebesar Rp21.454.480.116,00 dan terealisasi sebesar Rp7.938.905.705,00 atau 37,00%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.24 Rincian Alokasi, Anggaran dan Realisasi DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TA 2024

No.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara		Dana Bagi Hasil	Nilai Alokasi (Rp)	APBD 2024		
	Nomor	Tanggal			Anggaran	Realisasi	%
1.	188.44/175/KPTS/2024	18 Maret 2024	DBH PBBKB TA 2024	9.535.324.496,00	9.535.324.496,00	0,00	0,00
2.	188.44/164/KPTS/2024	8 Maret 2024	Kekurangan DBH PBBKB TA 2023	11.919.155.620,00	11.919.155.620,00	7.938.905.705,00	66,61
Jumlah				**21.454.480.116,00**	**21.454.480.116,00**	**7.938.905.705,00**	**37,00**

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp10.585.922.309,00, nilai realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada TA 2024 sebesar Rp7.938.905.705,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.647.016.604,00 atau 25,01%.

d) Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PAP) yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dianggarkan dalam APBD sebesar Rp2.520.788.404,00 dan terealisasi sebesar Rp1.260.394.202,00 atau 50,00%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.25 Rincian Alokasi, Anggaran dan Realisasi
Dana Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan TA 2024

No.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara		Dana Bagi Hasil	Nilai Alokasi (Rp)	APBD 2024		
	Nomor	Tanggal			Anggaran	Realisasi	%
1.	188.44/175/KPTS/2024	18 Maret 2024	DBH PAP TA 2024	1.260.394.202,00	1.260.394.202,00	0,00	0,00
2.	188.44/164/KPTS/2024	8 Maret 2024	Kekurangan DBH PAP TA 2023	1.260.394.202,00	1.260.394.202,00	1.260.394.202,00	100,00
Jumlah				**2.520.788.404,00**	**2.520.788.404,00**	**1.260.394.202,00**	**50,00**

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.793.317.225,00, nilai realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PAP) pada TA 2024 sebesar Rp1.260.394.202,00 mengalami penurunan sebesar Rp532.923.023,00 atau 29,72%.

e) Bagi Hasil dari Pajak Rokok

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dianggarkan dalam APBD sebesar Rp25.064.316.327,00 dan terealisasi sebesar Rp22.000.585.506,00 atau 87,78%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.26 Rincian Alokasi, Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TA 2024

No.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara		Dana Bagi Hasil	Nilai Alokasi (Rp)	APBD 2024		
	Nomor	Tanggal			Anggaran	Realisasi	%
1.	188.44/175/KPTS/2024	18 Maret 2024	DBH Pajak Rokok TA 2024	22.971.776.074,00	22.971.776.074,00	19.908.045.253,00	86,66
2.	188.44/164/KPTS/2024	8 Maret 2024	Kekurangan DBH Pajak Rokok TA 2023	2.092.540.253,00	2.092.540.253,00	2.092.540.253,00	100,00
Jumlah				**25.064.316.327,00**	**25.064.316.327,00**	**22.000.585.506,00**	**87,78**

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp17.042.566.443,00, nilai realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok pada TA 2024 sebesar Rp22.000.585.506,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.958.019.063,00 atau 29,09%

5.1.1.2.4.2 Bantuan Keuangan Khusus **0,00** **965.798.547,00**

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada TA 2024 tidak ada realisasi.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah **12.109.442.915,00** **12.468.384.568,00**

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan di luar PAD dan Pendapatan Transfer.
Realisasi Lain lain Pendapatan yang Sah TA 2024 mencapai Rp12.109.442.915,00 atau 90,87% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp13.326.637.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp358.941.653,00 atau 2,88%.

Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah menurut jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.27 Anggaran dan Realisasi Lain – lain Pendapatan yang Sah TA 2024 dan TA 2023

No.	Jenis Lain-lain Pendapatan yang Sah	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.326.637.000,00	12.109.442.915,00	90,87	12.468.384.568,00	(358.941.653,00)	(2,88)
Total Lain-lain Pendapatan yang Sah		**13.326.637.000,00**	**12.109.442.915,00**	**90,87**	**12.468.384.568,00**	**(358.941.653,00)**	**(2,88)**

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah **0,00** **0,00**

Pendapatan Hibah merupakan pos untuk menganggarkan penerimaan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat. Untuk TA 2024, Pemerintah Kabupaten Dairi tidak ada menerima hibah dari Pemerintah Pusat.

5.1.1.3.2 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP **12.109.442.915,00** **12.468.384.568,00**

Realisasi Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP TA 2024 mencapai Rp12.109.442.915,00 atau 90,87% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp13.326.637.000,00. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP merupakan pendapatan yang berasal dari seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Dairi atas pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp358.941.653,00 atau 2,88%.

5.1.2 Belanja 1.248.759.410.799,08 1.236.219.013.955,50

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa klasifikasi belanja daerah terdiri atas : (1) belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial); (2) belanja modal; (3) belanja tak terduga; (4) belanja transfer.

Realisasi Belanja Kabupaten Dairi TA 2024 adalah sebesar Rp1.248.759.410.799,08 atau 92,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.352.146.553.377,00. Nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp12.540.396.843,58 atau 1,01% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

Tabel 5.28 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024 dan TA 2023

No.	Jenis Belanja	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Belanja Operasi	998.719.782.947,00	909.963.663.123,20	91,11	844.293.304.487,73	65.670.358.635,47	7,78
2.	Belanja Modal	144.429.549.430,00	130.216.588.940,88	90,16	187.745.257.267,77	(57.528.668.326,89)	(30,64)
3.	Belanja Tak Terduga	4.000.000.000,00	3.581.937.735,00	89,55	4.700.424.800,00	(1.118.487.065,00)	(23,80)
4.	Belanja Transfer	204.997.221.000,00	204.997.221.000,00	100,00	199.480.027.400,00	5.517.193.600,00	2,77
Total Belanja		**1.352.146.553.377,00**	**1.248.759.410.799,08**	**92,35**	**1.236.219.013.955,50**	**12.540.396.843,58**	**1,01**

5.1.2.1 Belanja Operasi 909.963.663.123,20 844.293.304.487,73

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

Realisasi Belanja Operasi TA 2024 adalah sebesar Rp909.963.663.123,20 atau 91,11% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp998.719.782.947,00. Dengan nilai realisasi tersebut, Belanja Operasi memberikan kontribusi terhadap total Belanja sebesar 72,87%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp65.670.358.635,47 atau 7,78%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi menurut jenisnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.29 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan TA 2023

No.	Jenis Belanja	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Belanja Pegawai	566.654.562.335,00	526.617.182.736,00	92,93	455.914.059.535,00	70.703.123.201,00	15,51
2.	Belanja Barang dan Jasa	385.664.651.612,00	338.089.506.105,20	87,66	356.743.301.652,73	(18.653.795.547,53)	(5,23)
3.	Belanja Hibah	46.400.569.000,00	45.256.974.282,00	97,54	30.153.343.300,00	15.103.630.982,00	50,09
4.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	1.482.600.000,00	(1.482.600.000,00)	(100,00)
Total Belanja Operasi		**998.719.782.947,00**	**909.963.663.123,20**	**91,11**	**844.293.304.487,73**	**65.670.358.635,47**	**7,78**

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai 526.617.182.736,00 455.914.059.535,00

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 adalah sebesar Rp526.617.182.736,00 atau 92,93% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp566.654.562.335,00.

Tabel 5.30 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023

No.	Jenis Belanja	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1	Gaji dan Tunjangan ASN	409.024.027.472,00	375.106.245.134,00	91,71	318.091.782.611,00	57.014.462.523,00	17,92
2	Tambahan Penghasilan ASN	54.692.143.975,00	52.399.695.504,00	95,81	50.329.075.589,00	2.070.619.915,00	4,11
3	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	260.291.226,00	260.291.226,00	100,00	285.219.200,00	(24.927.974,00)	(8,74)
4	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	104.778.300,00	104.778.300,00	100,00	95.272.366,00	9.505.934,00	9,98
5	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	77.707.527.300,00	76.406.464.850,00	98,33	66.109.195.200,00	10.297.269.650,00	15,58
6	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	452.349.033,00	436.744.000,00	96,55	379.696.900,00	57.047.100,00	15,02
7	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.610.624.000,00	3.594.250.000,00	99,55	1.948.000.000,00	1.646.250.000,00	84,51
8	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.644.572.579,00	1.450.519.424,00	54,85	1.775.908.775,00	(325.389.351,00)	(18,32)
9	Belanja Honorarium	1.453.750.000,00	1.246.281.500,00	85,73	1.627.810.000,00	(381.528.500,00)	(23,44)
10	Gaji dan Tunjangan DPRD	15.585.018.056,00	14.788.405.960,00	94,89	14.455.444.674,00	332.961.286,00	2,30
11	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	331.095.474,00	168.221.713,00	-	273.094.220,00	(104.872.507,00)	(38,40)
12	Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	401.693.333,00	78,63	510.880.000,00	(109.186.667,00)	(21,37)
13	Belanja Pegawai BLUD	277.504.920,00	253.591.792,00	91,38	32.680.000,00	220.911.792,00	675,98
Total Belanja Pegawai		**566.654.562.335,00**	**526.617.182.736,00**	**92,93**	**455.914.059.535,00**	**70.703.123.201,00**	**15,51**

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 338.089.506.105,20 356.743.301.652,73

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 adalah sebesar Rp338.089.506.105,20 atau 87,66% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp385.664.651.612,00. Dengan nilai realisasi tersebut, belanja barang dan jasa memberikan kontribusi terhadap total belanja operasi sebesar 37,15%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp18.653.795.547,53 atau 5,23%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.31 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan TA 2023

No.	Jenis Belanja Barang dan Jasa	APBD TA 2024			Realisasi TA.2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	79.616.103.024,00	64.635.917.836,00	81,18	83.879.356.288,88	(19.243.438.452,88)	(22,94)
2	Belanja Bahan Tak Pakai Habis	657.651.000,00	526.690.000,00	80,09	94.400.000,00	432.290.000,00	457,93
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	97.213.600,00	94.963.600,00	97,69	0,00	94.963.600,00	∞
4	Belanja Jasa Kantor	83.203.412.213,00	73.509.413.921,00	88,35	79.430.949.920,20	(5.921.535.999,20)	(7,45)
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	22.294.338.657,00	21.412.859.234,00	96,05	19.300.597.494,00	2.112.261.740,00	10,94
7	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.717.888.000,00	1.210.861.600,00	70,49	1.869.443.200,00	(658.581.600,00)	(35,23)

No.	Jenis Belanja Barang dan Jasa	APBD TA 2024			Realisasi TA.2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
8	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.104.042.108,00	569.672.339.00	51.60	937.986.798,00	(368.314.459,00)	(39,27)
10	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	13.750.000,00	91,67	16.250.000,00	(2.500.000,00)	(15,38)
11	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.254.905.500,00	4.691.126.956,00	89,27	7.005.827.486,00	(2.314.700.530,00)	(33,04)
12	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	806.920.000.00	679.982.218.00	84.27	1.209.410.000.00	(529.427.782,00)	(43,78)
13	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0.00	0.00	0.00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
14	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.495.755.000,00	2.776.055.254,00	61,75	2.054.171.768,00	721.883.486,00	35,14
15	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	157.142.803,00	157.142.803,00	100,00	166.063.300,00	(8.920.497,00)	(5,37)
16	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	9.000.000,00	1.210.000,00	13,44	0,00	1.210.000,00	∞
17	Belanja Pemeliharaan Tanah	0.00	0.00	0.00	289.647.000.00	(289.647.000,00)	(100,00)
18	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.559.996.775,00	5.450.824.363.00	83.09	6.013.338.838,00	(562.514.475,00)	(9,35)
19	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.975.132.425,00	1.879.519.056,00	95,16	5.421.638.669,87	(3.542.119.613,87)	(65,33)
20	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.237.450.000,00	3.119.975.470.00	96,37	483.876.364.00	2.636.099.106,00	544,79
22	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.518.378.013,00	52.838.948.103,00	87,31	51.912.241.028,00	926.707.075,00	1,79
23	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	66.787.000,00	0,00	0,00	182.913.569,00	(182.913.569,00)	(100,00)
24	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.636.145.520,00	3.494.495.520,00	96,10	2.562.500.000,00	931.995.520,00	36,37
25	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.183.707.000.00	1.007.659.215.00	85.13	1.636.197.050.00	(628.537.835,00)	(38,41)
26	Belanja Barang dan Jasa BOS	49.216.290.284,00	49.155.549.251,20	99,88	51.675.409.567,00	(2.519.860.315,80)	(4,88)
27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	59.841.392.690,00	50.862.889.366,00	85,00	40.551.083.311,78	10.311.806.054,22	25,43
	Jumlah	**385.664.651.612,00**	**338.089.506.105,20**	**87,66**	**356.743.301.652,73**	**(18.653.795.547,53)**	**(5,23)**

5.1.2.1.3 Belanja Hibah **45.256.974.282,00** **30.153.343.300,00**

Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah atau pihak lainnya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Realisasi Belanja Hibah TA 2024 adalah sebesar Rp45.256.974.282,00 atau 97,54% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp46.400.569.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp15.103.630.982,00 atau 50,09%.
Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan TA 2023

No.	Jenis Belanja Hibah	Anggaran TA 2024			Realisasi TA.2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
I.	**Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat**	**36.615.353.000,00**	**35.926.175.000,00**	**98,12**	**19.680.000.000,00**	**16.246.175.000,00**	**82,55**
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi	21.815.353.000,00	21.815.353.000,00	100,00	14.400.000.000,00	7.415.353.000,00	51,50
	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi	7.800.000.000,00	7.800.000.000,00	100,00	5.200.000.000,00	2.600.000.000,00	50,00
	KODIM 02/06 Dairi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00	1.000.000.000,00	∞
	POLRES Dairi	6.000.000.000,00	5.310.822.000,00	88,51	80.000.000,00	5.230.822.000,00	6.538,53
II.	**Belanja Hibah Uang kepada BUMN**	**3.996.000.000,00**	**3.996.000.000,00**	**100,00**	**3.000.000.000,00**	**996.000.000,00**	**33,20**
	Penyelenggaraan Event Aquabike Injourney Indonesia Aviation and Tourism	3.996.000.000,00	3.996.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00	996.000.000,00	33,20
III.	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**	**300.000.000,00**	**262.672.182,00**	**87,56**	**481.173.900,00**	**(218.501.718,00)**	**(45,41)**
	Palang Merah Indonesia (PMI)	0.00	0.00	0.00	250.000.000,00	(250.000.000,00)	(100,00)
	Lembaga Kebudayaan Pakpak	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00	100.000.000,00	∞
	KORPRI	200.000.000,00	162.672.182,00	81,34	231.173.900,00	(68.501.718,00)	(29,63)
IV.	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000.000,00**	**(250.000.000,00)**	**(100,00)**
	Palang Merah Indonesia (PMI)	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kelompok Kerja Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah	0.00	0.00	0.00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
	Lembaga Kebudayaan Pakpak	0.00	0.00	0.00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
	Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(100,00)
	Aliansi Perempuan Perubahan Dairi	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(100,00)
V.	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	**4.393.970.000,00**	**4.126.881.100,00**	**93,92**	**5.918.406.900,00**	**(1.791.525.800,00)**	**(30,27)**
	Bantuan Operasional Penyelenggaran PAUD Masyarakat/Swasta kepada KB dan TK se-Kabupaten Dairi	2.113.350.000,00	1.916.230.300,00	90,67	2.164.011.900,00	(247.781.600,00)	(11,45)
	Pengelolaan BOP Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	150.620.000,00	130.950.000,00	86,94	118.395.000,00	12.555.000,00	10,60
	LVRI	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	Karang Taruna Kabupaten	200.000.000,00	149.700.800,00	74,85	250.000.000,00	(100.299.200,00)	(40,12)
	KONI	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	600.000.000,00	(300.000.000,00)	(50,00)

No.	Jenis Belanja Hibah	Anggaran TA 2024			Realisasi TA.2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
	Pencab NPC	0,00	0.00	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
	Kwarcab PRAMUKA	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	300.000.000,00	0,00	0,00
	Gerakan Pemuda ANSOR	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
	KNPI	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	600.000.000,00	(300.000.000,00)	(50,00)
	GAMKI	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
	MUI	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	PHBI	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	LPTQ	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	300.000.000,00	(100.000.000,00)	(33,33)
	BMAG	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	FKUB	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	40.000.000,00	10.000.000,00	25,00
	GEREJA	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	786.000.000,00	(486.000.000,00)	(61,83)
	MESJID	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	200.000.000,00	(100.000.000,00)	(50,00)
	Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Dairi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	Lembaga Pembinaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Kabupaten Dairi	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	100.000.000,00	20.000.000,00	20,00
VI.	**Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100,00**	**0,00**	**100.000.000,00**	∞
	Pemuda Pancasila	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00	100.000.000,00	∞
VII.	**Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik**	**845.246.000,00**	**845.246.000,00**	**100,00**	**823.762.500,00**	**21.483.500,00**	**2,61**
	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	845.246.000,00	845.246.000,00	100,00	823.762.500,00	21.483.500,00	2,61
	Total Belanja Hibah	**46.400.569.000,00**	**45.256.974.282,00**	**97,54**	**30.153.343.300,00**	**15.103.630.982,00**	**50,09**

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.33 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2024 dan TA 2023

No.	Jenis Belanja Bantuan Hibah kepada Partai Politik	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1	Partai Golkar	214.744.000,00	214.744.000,00	100,00	203.665.000,00	11.079.000,00	5,44
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	156.469.500,00	156.469.500,00	100,00	143.407.000,00	13.062.500,00	9,11
3	Partai Demokrat	112.690.000,00	112.690.000,00	100,00	112.689.500,00	500,00	0,00
4	Partai Amanat Nasional	26.441.250,00	26.441.250,00	100,00	35.255.000,00	(8.813.750,00)	(25,00)
5	Partai Nasional Demokrat	105.316.125,00	105.316.125,00	100,00	111.952.500,00	(6.636.375,00)	(5,93)
6	Partai Keadilan Sejahtera	17.729.250,00	17.729.250,00	100,00	14.432.000,00	3.297.250,00	22,85
7	Partai Gerakan Indonesia Raya	71.361.125,00	71.361.125,00	100,00	60.181.000,00	11.180.125,00	18,58
8	Partai Hati Nurani Rakyat	85.740.875,00	85.740.875,00	100,00	100.782.000,00	(15.041.125,00)	(14,92)
9	Partai Kebangkitan Bangsa	16.112.250,00	16.112.250,00	100,00	0.00	16.112.250,00	∞
10	Partai Persatuan Indonesia	38.641.625,00	38.641.625,00	100,00	41.398.500,00	(2.756.875,00)	(6,66)
	Total Belanja Bantuan Hibah kepada Partai Politik	**845.246.000,00**	**845.246.000,00**	**100,00**	**823.762.500,00**	**21.483.500,00**	**2,61**

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial **0,00** **1.482.600.000,00**

Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Belanja bantuan sosial dimaksud untuk meningkatkan status sosial masyarakat

maupun melalui kelompok dan organisasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta kelompok sosial lainnya.

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pada TA 2024, Pemerintah Kabupaten Dairi tidak menganggarkan Belanja Bantuan Sosial. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.482.600.000,00 atau 100,00%.
Rincian anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.34 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan TA 2023

No	Rincian Belanja Bantuan Sosial	APBD TA 2024			Realisasi TA.2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	(300.000.000,00)	(100,00)
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0.00	0.00	0.00	1.182.600.000,00	(1.182.600.000,00)	(100,00)
Total Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.482.600.000,00**	**(1.482.600.000,00)**	**(100,00)**

5.1.2.2 Belanja Modal 130.216.588.940,88 187.745.257.267,77

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Realisasi Belanja Modal TA 2024 adalah sebesar Rp130.216.588.940,88 atau 90,16% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp144.429.549.430,00.
Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal untuk masing-masing jenis disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.35 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023

No.	Jenis Belanja Modal	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		(Rp)	%
1.	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	20.008.291.934,00	17.448.098.019,00	87,20	33.247.679.146,00	(15.799.581.127,00)	(47,52)
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	30.766.834.341,00	22.220.323.063,00	72,22	42.398.764.060,35	(20.178.440.997,35)	(47,59)
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	85.768.317.735,00	82.813.149.768,88	96,55	104.191.838.531,42	(21.378.688.762,54)	(20,52)
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.884.105.420,00	7.733.870.580,00	98,09	7.906.975.530,00	(173.104.950,00)	(2,19)
6.	Belanja Aset Lainnya	2.000.000,00	1.147.510,00	57,38	0,00	1.147.510,00	∞
Total Belanja Modal		**144.429.549.430,00**	**130.216.588.940,88**	**90,16**	**187.745.257.267,77**	**(57.528.668.326,89)**	**(30,64)**

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah 0,00 0,00

Pada TA 2024, tidak ada anggaran dan realisasi Belanja Modal-Tanah.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.448.098.019,00 33.247.679.146,00

Realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp17.448.098.019,00 atau 87,20% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp20.008.291.934,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp15.799.581.127,35 atau 47,52%.
Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.36 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023

No.	Jenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1	Alat Besar	79.000.000,00	67.678.000,00	85,67	914.286.200,00	(846.608.200,00)	(92,60)
2	Alat Angkutan	2.376.903.000,00	2.363.664.000,00	99,44	3.316.210.000,00	(952.546.000,00)	(28,72)
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	(7.200.000,00)	(100,00)
4	Alat Pertanian / Peternakan	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	(1.110.000,00)	(100,00)
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.418.919.100,00	1.361.456.260,00	56,28	2.866.019.994,00	(1.504.563.734,00)	(52,50)
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	109.945.800,00	105.435.800,00	95,90	704.969.950,00	(599.534.150,00)	(85,04)
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.236.255.000,00	3.186.370.000,00	98,46	16.783.201.847,00	(13.596.831.847,00)	(81,01)
8	Alat Laboratorium	170.775.000,00	170.750.000,00	99,99	55.979.000,00	114.771.000,00	205,03
9	Komputer	2.410.553.369,00	2.168.240.000,00	89,95	4.058.652.806,00	(1.890.412.806,00)	(46,58)
10	Alat Eksplorasi	6.200.000,00	6.200.000,00	100,00	70.039.000,00	(63.839.000,00)	(91,15)
11	Alat Keselamatan Kerja	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	31.986.000,00	(30.936.000,00)	(96,72)
12	Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	942.500,00	(942.500,00)	(100,00)
13	Rambu-Rambu	130.566.000,00	36.691.000,00	28,10	106.302.500,00	(69.611.500,00)	(65,48)
14	Peralatan Olah Raga	65.439.200,00	49.993.000,00	76,40	43.242.500,00	6.750.500,00	15,61
15	Peralatan dan Mesin BOS	3.002.685.465,00	3.002.104.099,00	99,98	2.547.009.018,00	455.095.081,00	17,87
16	Peralatan dan Mesin BLUD	6.000.000.000,00	4.928.465.860,00	82,14	1.740.527.831,00	3.187.938.029,00	183,16
Total Belanja Modal Peralatan dan Mesin		20.008.291.934,00	17.448.098.019,00	87,20	33.247.679.146,00	(15.799.581.127,00)	(47,52)

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 22.220.323.063,00 42.398.764.060,00

Realisasi Belanja Modal-Gedung dan Bangunan TA 2024 adalah sebesar Rp22.220.323.063,00 atau 72,22% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp30.766.834.341,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp20.178.440.997,35 atau 47,59%.

Tabel 5.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023

No.	Jenis Belanja Modal Gedung dan Bangunan	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1	Bangunan Gedung	28.535.715.041,00	20.673.144.013,00	72,45	40.707.926.960,35	(20.034.782.947,35)	(49,22)
2	Bangunan Monumen	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(100,00)
3	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.231.119.300,00	647.113.000,00	52,56	1.688.337.100,00	(1.041.224.100,00)	(61,67)
4	Gedung dan Bangunan BLUD	1.000.000.000,00	900.066.050,00	90,01	0,00	900.066.050,00	∞
Total Belanja Modal Gedung dan Bangunan		**30.766.834.341,00**	**22.220.323.063,00**	**72,22**	**42.398.764.060,35**	**(20.178.440.997,35)**	**(47,59)**

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 82.813.149.768,88 104.191.838.531,42

Realisasi Belanja Modal-Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024 adalah sebesar Rp82.813.149.768,88 atau 96,55% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp85.768.317.735,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp21.378.688.762,54 atau 20,52%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal- Jalan, Jaringan dan Irigasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.38 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024 dan TA 2023

No.	Jenis Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Jalan dan Jembatan	73.400.228.668,00	71.040.302.789,00	96,78	92.373.973.355,42	(21.333.670.566,42)	(23,09)
2.	Bangunan Air / Irigasi	10.368.089.067,00	9.887.012.979,88	95,36	11.676.597.166,00	(1.789.584.186,12)	(15,33)

No.	Jenis Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
3.	Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.	Jaringan	2.000.000.000,00	1.885.834.000,00	94,29	141.268.010,00	1.744.565.990,00	1.234,93
Total Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		**85.768.317.735,00**	**82.813.149.768,88**	**96,55**	**104.191.838.531,42**	**(21.378.688.762,54)**	**(20,52)**

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap lainnya 7.733.870.580,00 7.906.975.530,00

Realisasi Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya TA 2024 adalah sebesar Rp7.733.870.580,00 atau 98,09% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp7.884.105.420,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp173.104.950,00 atau 2,19%.
Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.39 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan TA 2023

No.	Jenis Aset Tetap Lainnya	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1	Buku Perpustakaan	65.600.000,00	65.400.000,00	99,70	0,00	65.400.000,00	∞
2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	16.400.000,00	(16.400.000,00)	(100,00)
3	Hewan Ternak dan Tumbuhan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	5.076.650,00	(5.076.650,00)	(100,00)
5	Aset Tetap Lainnya BOS	7.668.505.420,00	7.668.470.580,00	99,99	7.885.498.880,00	(217.028.300,00)	(2,75)
Total Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		**7.884.105.420,00**	**7.733.870.580,00**	**98,09**	**7.906.975.530,00**	**(173.104.950,00)**	**(2,19)**

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset lainnya 1.147.510,00 0,00

Realisasi Belanja Modal - Aset Lainnya TA 2024 adalah sebesar Rp1.147.510,00 atau 57,38% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp1.147.510,00 atau ∞ %.
Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal-Aset Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.40 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 dan TA 2023

No.	Jenis Aset Tetap Lainnya	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1	Aset Tidak Berwujud	2.000.000,00	1.147.510,00	57,38	0,00	1.147.510,00	∞
Total Belanja Modal Aset Lainnya		**2.000.000,00**	**1.147.510,00**	**57,38**	**0,00**	**1.147.510,00**	∞

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga 3.581.937.735,00 4.700.424.800,00

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2024 adalah sebesar Rp3.581.937.735,00 atau 89,55% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp4.000.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.118.487.065.00 atau 23.80%.

Rincian realisasi Belanja Tak Terduga disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.41 Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2024

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran Sebelumnya dari Penerimaan Dana Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2022	44.024.965,00
2	Perbaikan Badan Jalan Dusun IV Batu Dongkol Desa Sinampang Kecamatan Siempat Nempu	149.800.000,00

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
3	Pemasangan Bronjong Penahan Tanah di Dusun IV Buluh Ujung Desa Pegagan Julu IV Kecamatan Sumbul	198.460.000,00
4	Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana di Desa Pegagan Julu V Kecamatan Sumbul	231.372.000,00
5	Penanggulangan Bencana di Desa Sukadame Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi Tahun 2024 dan Bantuan Stimulan Seng	238.206.000,00
6	Penanganan Jalur Alternatif Lae Hole-Huta Login-Siarung Arung-Tinombak Simbolon-Sigalingging dan Simpang Siarung Arung-Tinombak Simbolon-Sigalingging Kecamatan Parbuluan Kabupataen Dairi Tahun 2024	107.160.000,00
7	Penanggulangan Atas Kejadian Bencana Alam Tanah Longsor di Dusun Pertumbungen Desa Sarintonu Kecamatan Tigalingga	897.495.370,00
8	Penanganan Pasca Bencana Alam di Kecamatan Tanah Pinem Tahun 2024	76.598.000,00
9	Penambahan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024	27.712.000,00
10	Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran Sebelumnya dari Setoran Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi dan Setoran Langsung Pedagang TA. 2024	763.000.000,00
11	Perbaikan Infrastruktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho Akibat Bencana Alam di Desa Juma Gerat Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi	200.000.000,00
12	Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 di Kabupaten Dairi untuk Instansi Vertikal Kepolisian Resor Dairi	114.359.200,00
13	Kunjungan Kerja, Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan Wakil Kepala Kepolisian RI di Wilayah Hukum Polres Dairi pada Instansi Vertikal Kepolisian Resor Dairi	324.283.000,00
14	Pelaksanaan Pengamanan Polri Event Aquabike di Kabupaten Dairi Tahun 2024 untuk Kepolisian Resor Dairi	60.000.000,00
15	Pelaksanaan Pengamanan Kegiatan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Dairi Tahun 2024 untuk Instansi Vertikal Polres Dairi Kabupaten Dairi TA. 2024	119.419.200,00
16	Pelaksanaan Pengamanan Event Aquabike di Kabupaten Dairi Tahun 2024 untuk Komando Distrik Militer 0206 / Dairi	15.000.000,00
17	Pelaksanaan Pengamanan Kegiatan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Dairi Tahun 2024 untuk Instansi Vertikal Kodim 0206/Dairi TA. 2024	15.048.000,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		**3.581.937.735,00**

5.1.2.4 Belanja Transfer 204.997.221.000,00 199.480.027.400,00

Belanja transfer terdiri atas belanja transfer Bagi Hasil dan belanja transfer Bantuan Keuangan. Belanja transfer Bagi Hasil merupakan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintahan Desa. Sedangkan Belanja transfer Bantuan Keuangan terdiri atas belanja transfer Bantuan Keuangan Umum kepada Desa dan belanja transfer Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa. Realisasi belanja transfer TA 2024 adalah sebesar Rp204.997.221.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp204.997.221.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

Rincian anggaran dan realisasi belanja transfer disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.42 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2024 dan TA 2023

No.	Jenis Belanja Transfer	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
I.	**Transfer Bagi Hasil**	**2.170.000.000,00**	**2.170.000.000,00**	**100,00**	**1.961.800.000,00**	**208.200.000,00**	**10,61**
1.	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.170.000.000,00	2.170.000.000,00	100,00	1.961.800.000,00	208.200.000,00	10,61
II.	**Transfer Bantuan Keuangan**	**202.827.221.000,00**	**202.827.221.000,00**	**100,00**	**197.518.227.400,00**	**5.308.993.600,00**	**2,69**
1.	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa	66.266.145.000,00	66.266.145.000,00	100,00	62.288.047.200,00	3.978.097.800,00	6,39
2.	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	136.561.076.000,00	136.561.076.000,00	100,00	135.230.180.200,00	1.330.895.800,00	0,98
Total Transfer		**204.997.221.000,00**	**204.997.221.000,00**	**100,00**	**199.480.027.400,00**	**5.517.193.600,00**	**2,77**

a) Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintahan Desa

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintahan Desa disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.42.A Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintahan Desa TA 2024

No.	Nama Desa	Jumlah (Rp)	No.	Nama Desa	Jumlah (Rp)
	Kecamatan Sidikalang			**Kecamatan Pegagan Hilir**	
1	Belang Malum	16.627.950,00	1	Simanduma	10.557.750,00
2	Huta Rakyat	29.630.950,00	2	Bandar Huta Usang	12.725.750,00
3	Kalang	21.295.950,00	3	Onan Lama	11.310.050,00
4	Bintang	17.283.750,00	4	Linnga Raja	13.009.950,00
5	Kalang Simbara	22.928.450,00	5	Laksa	9.744.650,00
6	Bintang Mersada	13.637.050,00	6	Tanjung Saluksuk	9.669.450,00
	Sub Jumlah	**121.404.100,00**	7	Bukit Tinggi	10.096.350,00
			8	Simartugan	12.218.650,00
	Kecamatan Sumbul		9	Kuta Usang	11.704.650,00
1	Pegagan Julu X	11.663.050,00	10	Lingga Raja II	13.835.650,00
2	Pegagan Julu IX	10.727.650,00	11	Mbinanga	9.604.450,00
3	Pegagan Julu VIII	10.588.550,00	12	Bukit Baru	8.139.100,00
4	Pegagan Julu VII	18.803.150,00	13	Perrik Mbue	11.312.050,00
5	Pegagan Julu VI	14.836.550,00		**Sub Jumlah**	**143.928.500,00**
6	Pegagan Julu V	30.859.750,00			
7	Pegagan Julu IV	13.541.050,00		**Kecamatan Parbuluan**	
8	Pegagan Julu III	11.475.050,00	1	Bangun	12.914.850,00
9	Pegagan Julu II	16.069.650,00	2	Lae Hole	13.858.850,00
10	Tanjung Beringin	11.626.850,00	3	Parbuluan IV	16.963.350,00
11	Dolok Tolong	14.118.050,00	4	Parbuluan III	16.420.650,00
12	Pargambiran	9.546.550,00	5	Parbuluan II	10.666.850,00
13	Perjuangan	15.255.350,00	6	Parbuluan I	14.821.450,00
14	Kuta Gugung	12.028.750,00	7	Parbuluan V	11.775.350,00
15	Sileu-leu Parsaoran	12.765.950,00	8	Parbuluan VI	17.551.250,00
16	Barisan Nauli	10.065.950,00	9	Lae Hole I	10.974.750,00
17	Pangguruan	9.151.750,00	10	Lae Hole II	8.167.150,00
18	Tanjung Beringin I	11.943.950,00	11	Bangun I	13.196.350,00
	Sub Jumlah	**245.067.600,00**		**Sub Jumlah**	**147.310.850,00**
	Kecamatan Silima Punggapungga			**Kecamatan Siempat Nempu Hilir**	
1	Palipi	13.365.050,00	1	Lae Itam	20.633.850,00
2	Longkotan	32.322.250,00	2	Lae Luhung	11.556.650,00
3	Bongkaras	10.522.350,00	3	Pardomuan	13.815.350,00
4	Tuntung Batu	9.584.850,00	4	Lae Markelang	12.210.250,00
5	Polling Anak- Anak	13.595.150,00	5	Jambur Indonesia	12.104.050,00
6	Siratah	10.765.450,00	6	Simungun	12.312.650,00
7	Urukblin	11.491.850,00	7	Janji	10.975.950,00
8	Siboras	12.790.750,00	8	Sopobutar	10.876.050,00
9	Bonian	11.975.550,00	9	Lae Sering	14.251.650,00
10	Sumbari	13.752.550,00	10	Lae Haporas	13.220.550,00
11	Bakal Gajah	14.445.850,00		**Sub Jumlah**	**131.957.000,00**
12	Lae Panginuman	12.021.450,00			
13	Lae Ambat	12.951.250,00		**Kecamatan Siempat Nempu Hulu**	
14	Lae Rambong	11.313.950,00	1	Tambahan	12.213.350,00
15	Lae Pangaroan	12.112.550,00	2	Kuta Tengah	13.212.850,00
	Sub Jumlah	**203.010.850,00**	3	Lae Nuaha	13.270.750,00
			4	Sungai Raya	13.708.950,00
	Kecamatan Siempat Nempu		5	Gunung Meriah	12.172.650,00
1	Sinampang	12.287.650,00	6	Silumboyah	13.866.450,00

No.	Nama Desa	Jumlah (Rp)	No.	Nama Desa	Jumlah (Rp)
2	Sihorbo	11.104.150,00	7	Pandan	8.253.450,00
3	Soban	14.221.150,00	8	Tualang	8.271.850,00
4	Adian Nangka	14.536.650,00	9	Pangaribuan	10.126.450,00
5	Buntu Raja	9.575.750,00	10	Sigambir-Gambir	12.319.250,00
6	Juma Siulok	11.260.950,00	11	Bakal Julu	11.451.550,00
7	Juma Teguh	15.587.350,00	12	Sipoltong	12.969.350,00
8	Sosorlontung	17.822.150,00		**Sub Jumlah**	**141.836.900,00**
9	Hutaimbaru	15.648.150,00			
10	Jumantuang	14.808.550,00		**Kecamatan Lae Parira**	
11	Gomit	11.721.050,00	1	Sumbul	8.218.850,00
12	Adian Gupa	10.656.550,00	2	Kentara	13.052.650,00
13	Maju	11.561.650,00	3	Lae Parira	13.116.950,00
	Sub Jumlah	**170.791.750,00**	4	Bulu Duri	13.525.850,00
			5	Sempung Polling	17.184.750,00
	Kecamatan Tigalingga		6	Lumban Sihite	13.589.650,00
1	Sumbul Tengah	12.909.250,00	7	Lumban Toruan	10.547.350,00
2	Ujung Teran	14.256.750,00	8	Pandiangan	13.122.350,00
3	Juma Gerat	13.885.550,00	9	Kaban Julu	14.794.650,00
4	Sarintonu	14.824.850,00		**Sub Jumlah**	**117.153.050,00**
5	Tigalingga	16.773.250,00			
6	Palding	18.895.450,00		**Kecamatan Gunung Sitember**	
7	Lau Bangot	19.434.950,00	1	Bukit Lau Kersik	12.573.350,00
8	Bertungen Julu	18.317.850,00	2	Gunung Sitember	15.881.150,00
9	Lau Molgap	11.533.150,00	3	Batu Gungun	16.108.150,00
10	Lau Pak-pak	15.456.350,00	4	Rante Besi	12.172.950,00
11	Sukandebi	17.032.750,00	5	Gundaling	11.712.750,00
12	Lau Mil	15.100.550,00	6	Kendit Liang	10.526.550,00
13	Lau Sireme	16.355.150,00	7	Lau Lebah	10.811.850,00
14	Palding Jaya Sumbul	18.535.550,00	8	Tupak Raja	12.104.150,00
	Sub Jumlah	**223.311.400,00**		**Sub Jumlah**	**101.890.900,00**
				Kecamatan Berampu	
	Kecamatan Tanah Pinem		1	Sambaliang	10.448.650,00
1	Suka Dame	11.140.750,00	2	Pasi	10.915.250,00
2	Gunung Tua	9.948.250,00	3	Banjar Toba	9.661.850,00
3	Harapan	12.134.550,00	4	Berampu	13.060.350,00
4	Lau Perimbon	8.180.550,00	5	Karing	14.846.750,00
5	Kuta Gamber	11.121.250,00		**Sub Jumlah**	**58.932.850,00**
6	Kempawa	13.436.050,00			
7	Tanah Pinem	14.564.150,00		**Kecamatan Silahi Sabungan**	
8	Pamah	8.196.850,00	1	Silalahi II	19.504.350,00
9	Kuta Buluh	10.797.550,00	2	Silalahi I	20.004.450,00
10	Pasir Tengah	14.227.050,00	3	Paropo	9.452.350,00
11	Renun	9.510.650,00	4	Silalahi III	12.936.650,00
12	Lau Tawar	12.275.750,00	5	Paropo I	10.864.250,00
13	Balandua	11.532.750,00		**Sub Jumlah**	**72.762.050,00**
14	Mangan Molih	9.936.550,00			
15	Liang Jering	11.115.050,00		**Kecamatan Sitinjo**	
16	Alur Subur	11.608.450,00	1	Sitinjo	29.337.650,00
17	Lau Njuhar I	13.207.750,00	2	Sitinjo I	15.691.850,00
18	Pasir Mbelang	10.860.450,00	3	Sitinjo II	32.128.150,00
19	Sinar Pagi	9.690.150,00		**Sub Jumlah**	**77.157.650,00**
	Sub Jumlah	**213.484.550,00**			
				Jumlah	**2.170.000.000,00**

b) Belanja Transfer Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa dan Transfer Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa dan Belanja Transfer Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.42.B Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa TA 2024

No.	Nama Desa	Jumlah (Rp)	No.	Nama Desa	Jumlah (Rp)
I. Transfer Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa			II. Transfer Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa		
	Kecamatan Sidikalang			Kecamatan Sidikalang	
1	Belang Malum	449.925.400,00	1	Belang Malum	891.108.000,00
2	Huta Rakyat	485.608.800,00	2	Huta Rakyat	1.091.803.000,00
3	Kalang	482.177.800,00	3	Kalang	991.744.000,00
4	Bintang	408.577.600,00	4	Bintang	949.357.000,00
5	Kalang Simbara	505.439.200,00	5	Kalang Simbara	854.153.000,00
6	Bintang Mersada	458.326.400,00	6	Bintang Mersada	1.035.893.000,00
	Sub Jumlah	**2.790.055.200,00**		**Sub Jumlah**	**5.814.058.000,00**
	Kecamatan Sumbul			Kecamatan Sumbul	
1	Pegagan Julu X	404.661.600,00	1	Pegagan Julu X	982.419.000,00
2	Pegagan Julu IX	380.409.200,00	2	Pegagan Julu IX	861.945.000,00
3	Pegagan Julu VIII	373.877.200,00	3	Pegagan Julu VIII	693.445.000,00
4	Pegagan Julu VII	493.783.800,00	4	Pegagan Julu VII	1.004.892.000,00
5	Pegagan Julu VI	488.913.800,00	5	Pegagan Julu VI	848.939.000,00
6	Pegagan Julu V	410.629.600,00	6	Pegagan Julu V	883.591.000,00
7	Pegagan Julu IV	407.007.600,00	7	Pegagan Julu IV	832.219.000,00
8	Pegagan Julu III	373.036.200,00	8	Pegagan Julu III	820.232.000,00
9	Pegagan Julu II	460.283.400,00	9	Pegagan Julu II	939.741.000,00
10	Tanjung Beringin	455.542.400,00	10	Tanjung Beringin	799.321.000,00
11	Dolok Tolong	378.867.200,00	11	Dolok Tolong	813.856.000,00
12	Pargambiran	410.232.600,00	12	Pargambiran	821.896.000,00
13	Perjuangan	411.466.600,00	13	Perjuangan	828.277.000,00
14	Kuta Gugung	404.488.600,00	14	Kuta Gugung	866.897.000,00
15	Sileu-leu Parsaoran	381.612.200,00	15	Sileu-leu Parsaoran	853.294.000,00
16	Barisan Nauli	349.571.800,00	16	Barisan Nauli	712.751.000,00
17	Pangguruan	365.427.800,00	17	Pangguruan	830.631.000,00
18	Tanjung Beringin I	347.791.800,00	18	Tanjung Beringin I	981.829.000,00
	Sub Jumlah	**7.297.603.400,00**		**Sub Jumlah**	**15.376.175.000,00**
	Kecamatan Silima Punggapungga			Kecamatan Silima Punggapungga	
1	Palipi	350.203.800,00	1	Palipi	664.497.000,00
2	Longkotan	453.682.400,00	2	Longkotan	785.341.000,00
3	Bongkaras	372.426.200,00	3	Bongkaras	668.952.000,00
4	Tuntung Batu	341.709.800,00	4	Tuntung Batu	596.593.000,00
5	Polling Anak- Anak	346.340.800,00	5	Polling Anak- Anak	679.815.000,00
6	Siratah	342.480.800,00	6	Siratah	673.503.000,00
7	Urukblin	346.108.800,00	7	Urukblin	694.913.000,00
8	Siboras	346.969.800,00	8	Siboras	658.573.000,00
9	Bonian	370.250.200,00	9	Bonian	683.519.000,00
10	Sumbari	369.995.200,00	10	Sumbari	685.571.000,00

No.	Nama Desa	Jumlah (Rp)	No.	Nama Desa	Jumlah (Rp)
11	Bakal Gajah	369.582.200,00	11	Bakal Gajah	946.308.000,00
12	Lae Panginuman	394.940.600,00	12	Lae Panginuman	652.606.000,00
13	Lae Ambat	428.312.000,00	13	Lae Ambat	788.912.000,00
14	Lae Rambong	427.450.000,00	14	Lae Rambong	802.754.000,00
15	Lae Pangaroan	419.458.000,00	15	Lae Pangaroan	743.245.000,00
	Sub Jumlah	**5.679.910.600,00**		**Sub Jumlah**	**10.725.102.000,00**
	Kecamatan Siempat Nempu			**Kecamatan Siempat Nempu**	
1	Sinampang	407.071.600,00	1	Sinampang	996.004.000,00
2	Sihorbo	344.512.800,00	2	Sihorbo	693.029.000,00
3	Soban	478.646.800,00	3	Soban	1.040.922.000,00
4	Adian Nangka	397.144.600,00	4	Adian Nangka	955.785.000,00
5	Buntu Raja	390.407.600,00	5	Buntu Raja	878.067.000,00
6	Juma Siulok	403.858.600,00	6	Juma Siulok	976.679.000,00
7	Juma Teguh	400.643.600,00	7	Juma Teguh	739.629.000,00
8	Sosorlontung	589.394.400,00	8	Sosorlontung	891.919.000,00
9	Hutaimbaru	478.195.800,00	9	Hutaimbaru	1.037.307.000,00
10	Jumantuang	454.521.400,00	10	Jumantuang	749.615.000,00
11	Gomit	426.850.000,00	11	Gomit	826.055.000,00
12	Adian Gupa	367.412.200,00	12	Adian Gupa	981.368.000,00
13	Maju	347.206.800,00	13	Maju	837.502.000,00
	Sub Jumlah	**5.485.866.200,00**		**Sub Jumlah**	**11.603.881.000,00**
	Kecamatan Tigalingga			**Kecamatan Tigalingga**	
1	Sumbul Tengah	426.846.000,00	1	Sumbul Tengah	722.583.000,00
2	Ujung Teran	452.755.400,00	2	Ujung Teran	931.423.000,00
3	Juma Gerat	489.744.800,00	3	Juma Gerat	1.052.434.000,00
4	Sarintonu	401.155.600,00	4	Sarintonu	901.817.000,00
5	Tigalingga	413.961.800,00	5	Tigalingga	751.743.000,00
6	Palding	429.495.000,00	6	Palding	747.953.000,00
7	Lau Bangot	425.988.000,00	7	Lau Bangot	874.574.000,00
8	Bertungen Julu	370.333.200,00	8	Bertungen Julu	753.002.000,00
9	Lau Molgap	400.210.600,00	9	Lau Molgap	863.904.000,00
10	Lau Pak-pak	410.370.600,00	10	Lau Pak-pak	915.432.000,00
11	Sukandebi	379.746.200,00	11	Sukandebi	796.229.000,00
12	Lau Mil	425.700.000,00	12	Lau Mil	788.529.000,00
13	Lau Sireme	508.498.200,00	13	Lau Sireme	910.141.000,00
14	Palding Jaya Sumbul	419.647.000,00	14	Palding Jaya Sumbul	729.628.000,00
	Sub Jumlah	**5.954.452.400,00**		**Sub Jumlah**	**11.739.392.000,00**
	Kecamatan Tanah Pinem			**Kecamatan Tanah Pinem**	
1	Suka Dame	406.783.200,00	1	Suka Dame	895.989.000,00
2	Gunung Tua	356.861.800,00	2	Gunung Tua	1.097.118.000,00
3	Harapan	357.473.800,00	3	Harapan	918.039.000,00
4	Lau Perimbon	434.777.000,00	4	Lau Perimbon	968.111.000,00
5	Kuta Gamber	351.792.800,00	5	Kuta Gamber	695.318.000,00
6	Kempawa	352.099.800,00	6	Kempawa	763.602.000,00
7	Tanah Pinem	348.657.800,00	7	Tanah Pinem	762.483.000,00
8	Pamah	440.447.000,00	8	Pamah	848.137.000,00
9	Kuta Buluh	381.673.200,00	9	Kuta Buluh	768.871.000,00
10	Pasir Tengah	364.496.800,00	10	Pasir Tengah	950.983.000,00
11	Renun	346.443.800,00	11	Renun	701.403.000,00
12	Lau Tawar	352.439.800,00	12	Lau Tawar	674.267.000,00

No.	Nama Desa	Jumlah (Rp)	No.	Nama Desa	Jumlah (Rp)
13	Balandua	348.245.800,00	13	Balandua	1.091.382.000,00
14	Mangan Molih	343.937.800,00	14	Mangan Molih	701.251.000,00
15	Liang Jering	397.495.600,00	15	Liang Jering	918.953.000,00
16	Alur Subur	396.176.600,00	16	Alur Subur	861.122.000,00
17	Lau Njuhar I	383.289.200,00	17	Lau Njuhar I	1.006.374.000,00
18	Pasir Mbelang	373.223.200,00	18	Pasir Mbelang	754.312.000,00
19	Sinar Pagi	369.263.200,00	19	Sinar Pagi	640.949.000,00
	Sub Jumlah	**7.105.578.200,00**		**Sub Jumlah**	**16.018.664.000,00**
	Kecamatan Pegagan Hilir			**Kecamatan Pegagan Hilir**	
1	Simanduma	422.577.000,00	1	Simanduma	813.806.000,00
2	Bandar Huta Usang	509.100.200,00	2	Bandar Huta Usang	982.914.000,00
3	Onan Lama	456.040.400,00	3	Onan Lama	831.046.000,00
4	Linnga Raja	462.937.400,00	4	Linnga Raja	915.248.000,00
5	Laksa	438.259.000,00	5	Laksa	902.403.000,00
6	Tanjung Saluksuk	345.646.800,00	6	Tanjung Saluksuk	966.159.000,00
7	Bukit Tinggi	376.812.200,00	7	Bukit Tinggi	773.402.000,00
8	Simartugan	433.100.000,00	8	Simartugan	1.163.308.000,00
9	Kuta Usang	382.630.200,00	9	Kuta Usang	939.032.000,00
10	Lingga Raja II	534.249.600,00	10	Lingga Raja II	912.198.000,00
11	Mbinanga	371.255.200,00	11	Mbinanga	1.116.245.000,00
12	Bukit Baru	396.938.600,00	12	Bukit Baru	691.902.000,00
13	Perrik Mbue	377.345.200,00	13	Perrik Mbue	1.047.020.000,00
	Sub Jumlah	**5.506.891.800,00**		**Sub Jumlah**	**12.054.683.000,00**
	Kecamatan Parbuluan			**Kecamatan Parbuluan**	
1	Bangun	350.482.800,00	1	Bangun	891.791.000,00
2	Lae Hole	402.744.600,00	2	Lae Hole	824.082.000,00
3	Parbuluan IV	505.349.800,00	3	Parbuluan IV	973.463.000,00
4	Parbuluan III	413.981.600,00	4	Parbuluan III	891.453.000,00
5	Parbuluan II	359.799.800,00	5	Parbuluan II	965.125.000,00
6	Parbuluan I	388.932.200,00	6	Parbuluan I	932.329.000,00
7	Parbuluan V	380.327.200,00	7	Parbuluan V	863.882.000,00
8	Parbuluan VI	450.299.000,00	8	Parbuluan VI	1.201.370.000,00
9	Lae Hole I	345.354.800,00	9	Lae Hole I	680.933.000,00
10	Lae Hole II	345.604.800,00	10	Lae Hole II	685.056.000,00
11	Bangun I	353.439.800,00	11	Bangun I	773.085.000,00
	Sub Jumlah	**4.296.316.400,00**		**Sub Jumlah**	**9.682.569.000,00**
	Kecamatan Siempat Nempu Hilir			**Kecamatan Siempat Nempu Hilir**	
1	Lae Itam	559.991.000,00	1	Lae Itam	818.607.000,00
2	Lae Luhung	505.355.200,00	2	Lae Luhung	800.010.000,00
3	Pardomuan	480.916.800,00	3	Pardomuan	701.842.000,00
4	Lae Markelang	509.826.200,00	4	Lae Markelang	925.421.000,00
5	Jambur Indonesia	425.477.000,00	5	Jambur Indonesia	849.914.000,00
6	Simungun	451.346.400,00	6	Simungun	870.654.000,00
7	Janji	505.258.200,00	7	Janji	782.798.000,00
8	Sopobutar	421.735.000,00	8	Sopobutar	663.381.000,00
9	Lae Sering	479.121.800,00	9	Lae Sering	876.794.000,00
10	Lae Haporas	424.380.000,00	10	Lae Haporas	978.141.000,00
	Sub Jumlah	**4.763.407.600,00**		**Sub Jumlah**	**8.267.562.000,00**
	Kecamatan Siempat Nempu Hulu			**Kecamatan Siempat Nempu Hulu**	

No.	Nama Desa	Jumlah (Rp)	No.	Nama Desa	Jumlah (Rp)
1	Tambahan	430.179.000,00	1	Tambahan	877.453.000,00
2	Kuta Tengah	410.651.600,00	2	Kuta Tengah	872.765.000,00
3	Lae Nuaha	508.872.200,00	3	Lae Nuaha	780.057.000,00
4	Sungai Raya	433.622.000,00	4	Sungai Raya	889.442.000,00
5	Gunung Meriah	456.724.400,00	5	Gunung Meriah	863.739.000,00
6	Silumboyah	400.984.600,00	6	Silumboyah	774.732.000,00
7	Pandan	377.010.200,00	7	Pandan	716.619.000,00
8	Tualang	374.450.200,00	8	Tualang	703.757.000,00
9	Pangaribuan	343.318.800,00	9	Pangaribuan	652.814.000,00
10	Sigambir-Gambir	349.378.800,00	10	Sigambir-Gambir	711.614.000,00
11	Bakal Julu	374.048.200,00	11	Bakal Julu	764.450.000,00
12	Sipoltong	426.422.000,00	12	Sipoltong	678.285.000,00
	Sub Jumlah	**4.885.662.000,00**		**Sub Jumlah**	**9.285.727.000,00**
	Kecamatan Lae Parira			**Kecamatan Lae Parira**	
1	Sumbul	419.064.000,00	1	Sumbul	786.134.000,00
2	Kentara	482.596.800,00	2	Kentara	758.159.000,00
3	Lae Parira	420.886.000,00	3	Lae Parira	890.606.000,00
4	Bulu Duri	422.811.000,00	4	Bulu Duri	776.292.000,00
5	Sempung Polling	456.565.400,00	5	Sempung Polling	763.481.000,00
6	Lumban Sihite	343.484.800,00	6	Lumban Sihite	942.577.000,00
7	Lumban Toruan	346.410.800,00	7	Lumban Toruan	692.388.000,00
8	Pandiangan	531.097.600,00	8	Pandiangan	1.061.070.000,00
9	Kaban Julu	426.836.000,00	9	Kaban Julu	754.107.000,00
	Sub Jumlah	**3.849.752.400,00**		**Sub Jumlah**	**7.424.814.000,00**
	Kecamatan Gunung Sitember			**Kecamatan Gunung Sitember**	
1	Bukit Lau Kersik	458.077.400,00	1	Bukit Lau Kersik	1.147.238.000,00
2	Gunung Sitember	397.861.600,00	2	Gunung Sitember	736.368.000,00
3	Batu Gungun	449.079.400,00	3	Batu Gungun	914.738.000,00
4	Rante Besi	369.250.200,00	4	Rante Besi	683.353.000,00
5	Gundaling	487.681.800,00	5	Gundaling	862.214.000,00
6	Kendit Liang	373.391.200,00	6	Kendit Liang	962.951.000,00
7	Lau Lebah	374.161.200,00	7	Lau Lebah	706.633.000,00
8	Tupak Raja	367.116.200,00	8	Tupak Raja	883.687.000,00
	Sub Jumlah	**3.276.619.000,00**		**Sub Jumlah**	**6.897.182.000,00**
	Kecamatan Berampu			**Kecamatan Berampu**	
1	Sambaliang	378.275.200,00	1	Sambaliang	774.316.000,00
2	Pasi	403.844.600,00	2	Pasi	968.792.000,00
3	Banjar Toba	418.425.000,00	3	Banjar Toba	691.982.000,00
4	Berampu	445.896.400,00	4	Berampu	746.222.000,00
5	Karing	554.574.600,00	5	Karing	1.058.247.000,00
	Sub Jumlah	**2.201.015.800,00**		**Sub Jumlah**	**4.239.559.000,00**
	Kecamatan Silahi Sabungan			**Kecamatan Silahi Sabungan**	
1	Silalahi II	402.128.600,00	1	Silalahi II	913.210.000,00
2	Silalahi I	373.348.200,00	2	Silalahi I	899.629.000,00
3	Paropo	348.564.800,00	3	Paropo	908.504.000,00
4	Silalahi III	424.760.000,00	4	Silalahi III	650.608.000,00
5	Paropo I	346.143.800,00	5	Paropo I	963.482.000,00
	Sub Jumlah	**1.894.945.400,00**		**Sub Jumlah**	**4.335.433.000,00**
	Kecamatan Sitinjo			**Kecamatan Sitinjo**	

No.	Nama Desa	Jumlah (Rp)	No.	Nama Desa	Jumlah (Rp)
1	Sitinjo	423.840.600,00	1	Sitinjo	1.170.335.000,00
2	Sitinjo I	427.214.000,00	2	Sitinjo I	1.068.586.000,00
3	Sitinjo II	427.014.000,00	3	Sitinjo II	857.354.000,00
	Sub Jumlah	**1.278.068.600,00**		**Sub Jumlah**	**3.096.275.000,00**
	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa	**66.266.145.000,00**		**Jumlah Transfer Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa**	**136.561.076.000,00**

5.1.3 Surplus / (Defisit) (52.934.722.534,51) (44.108.298.098,27)

Surplus merupakan selisih lebih antara pendapatan dengan belanja dan transfer, sedangkan defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja dan transfer dalam tahun anggaran berkenaan. Realisasi surplus/(defisit) pada tahun 2024 senilai Rp(52.934.722.534,51) merupakan selisih lebih antara jumlah realisasi pendapatan TA 2024 senilai Rp1.195.824.688.264,57 dikurangi dengan jumlah realisasi belanja TA 2024 senilai Rp1.248.759.410.799,08.

Realisasi surplus/(defisit) pada tahun 2024 sebesar Rp(52.934.722.534,51) melebihi asumsi penganggaran TA 2024 yang memperkirakan surplus/(defisit) sebesar Rp(91.939.692.403,00). Rincian perhitungan anggaran dan realisasi surplus/(defisit) sebagai berikut.

Tabel 5.43 Anggaran dan Realisasi Surplus/(Defisit) TA 2024 dan TA 2023

Uraian	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
Pendapatan	1.260.206.860.974,00	1.195.824.688.264,57	94,89	1.192.110.715.857,23	3.713.972.407,34	0,31
Belanja	1.352.146.553.377,00	1.248.759.410.799,08	92,35	1.236.219.013.955,50	12.540.396.843,58	1,01
Surplus/ (Defisit)	**(91.939.692.403,00)**	**(52.934.722.534,51)**	**57,58**	**(44.108.298.098,27)**	**(8.826.424.436,24)**	**20,01**

5.1.4 Pembiayaan 91.939.692.402,65 139.072.990.500,92

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan netto merupakan selisih lebih/(kurang) antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan netto Pemerintah Kabupaten Dairi TA 2024 adalah sebesar Rp91.939.692.402,65 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp91.939.692.403.00. Nilai tersebut merupakan selisih antara nilai realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp94.964.692.402,65 dengan nilai realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3.025.000.000,00.
Rincian anggaran dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.44 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2024 dan TA 2023

No.	Jenis Pembiayaan Daerah	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	**Penerimaan Pembiayaan**	**94.964.692.403,00**	**94.964.692.402,65**	**100,00**	**142.072.990.500,92**
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	94.964.692.403,00	94.964.692.402,65	100,00	142.072.990.500,92
2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**3.025.000.000,00**	**3.025.000.000,00**	**100,00**	**3.000.000.000,00**
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.025.000.000,00	3.025.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
Total Pembiayaan Bersih		**91.939.692.403,00**	**91.939.692.402,65**	**100,00**	**139.072.990.500,92**

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan 94.964.692.402,65 142.072.990.500,92

Dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan daerah Kabupaten Dairi masih tetap didominasi oleh pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dimana besarnya sangat ditentukan oleh kebijakan.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Dairi TA 2024 adalah sebesar Rp94.964.692.402,65 atau 100,00% dari yang dianggarkan. Realisasi tersebut berupa penggunaan SiLPA TA 2023.

5.1.4.1.1	**Penggunaan SiLPA**	**94.964.692.402,65**	**142.072.990.500,92**

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan komponen penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2024, terealisasi senilai Rp94.964.692.402,65 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp94.964.692.403,00.

5.1.4.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**3.025.000.000,00**	**3.000.000.000,00**

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Dairi TA 2024 adalah sebesar Rp3.025.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan.

5.1.4.2.1	**Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah**	**3.025.000.000,00**	**3.000.000.000,00**

Realisasi penyertaan modal (investasi) TA 2024 adalah sebesar Rp3.025.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Rincian anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.45 Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah TA 2024 dan TA 2023

No.	Jenis Penyertaan Modal	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Perumda Air Minum Lae Nciho	3.025.000.000,00	3.025.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00	525.000.000,00	21,00
2.	PT Bank Sumut	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	(100,00)
Total Penyertaan Modal		**3.025.000.000,00**	**3.025.000.000,00**	**100,00**	**3.000.000.000,00**	**25.000.000,00**	**0,83**

Penambahan Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Lae Nciho oleh Pemerintah Kabupaten Dairi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Lae Nciho, dimana bentuk penambahan penyertaan modal adalah dalam bentuk uang dan barang dengan nilai penambahan modal sebesar Rp15.000.000.000,00.

5.1.5.	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**	**39.004.969.868,14**	**94.964.692.402,65**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih antara seluruh penerimaan baik dari pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dikurangi dengan jumlah pengeluaran baik berupa belanja, transfer maupun pengeluaran pembiayaan.

Rincian perhitungan anggaran dan realisasi SILPA disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.46 Anggaran dan Realisasi SILPA TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	APBD TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Pendapatan	1.260.206.860.974,00	1.195.824.688.264,57	94,89	1.192.110.715.857,23	3.713.972.407,34	0,31
2.	Belanja	1.352.146.553.377,00	1.248.759.410.799,08	92,35	1.236.219.013.955,50	12.540.396.843,58	1,01
3.	Surplus (Defisit)	(91.939.692.403,00)	(52.934.722.534,51)	57,58	(44.108.298.098,27)	(8.826.424.436,24)	20,01
4.	Pembiayaan						
	a. Penerimaan Pembiayaan	94.964.692.403,00	94.964.692.402,65	100,00	142.072.990.500,92	(47.108.298.098,27)	(33,16)
	b. Pengeluaran Pembiayaan	3.025.000.000,00	3.025.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00	25.000.000,00	0,83
	c. Pembiayaan Netto	91.939.692.403,00	91.939.692.402,65	100,00	139.072.990.500,92	(47.133.298.098,27)	(33,89)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		**0,00**	**39.004.969.868,14**	**∞**	**94.964.692.402,65**	**(55.959.722.534,51)**	**(58,93)**

SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp39.004.969.868,14 disebabkan beberapa hal, yaitu:

a. Pendapatan

Realisasi pendapatan TA 2024 kurang dari anggaran sebesar Rp(64.382.172.709,43) terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah.

  Aspek Pendapatan Asli Daerah yang mempengaruhi SILPA adalah sebesar Rp2.032.160.733,57 terdiri dari :

  > Pajak Daerah kurang dari anggaran sebesar Rp(8.227.968.132,20)
  > Retribusi Daerah lebih dari anggaran sebesar Rp8.122.238.744,00
  > Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lebih dari anggaran sebesar Rp686,50
  > Lain-lain PAD yang Sah lebih dari anggaran sebesar Rp2.137.889.435,27

- Pendapatan Transfer.

  Aspek Pendapatan Transfer yang mempengaruhi SILPA adalah sebesar Rp(65.197.139.358,00) terdiri dari :

  > Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Umum kurang dari anggaran sebesar Rp(461.244.030,00)
  > Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Khusus kurang dari anggaran sebesar Rp(29.607.934.173,00)
  > Transfer Pemerintah Provinsi kurang dari anggaran sebesar Rp(35.127.961.155,00)

- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

  Aspek Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang mempengaruhi SILPA adalah sebesar Rp(1.217.194.085,00) terdiri dari :

  > Pendapatan Dana Kapitasi JKN kurang dari anggaran sebesar Rp(1.217.194.085,00)

b. Belanja

Realisasi belanja TA 2024 yang tidak terealisasi sebesar Rp103.387.142.577,92, terdiri dari :

- Belanja Pegawai untuk Tunjangan Profesi Guru Tahun Anggaran 2024 tidak terealisasi sebesar Rp1.301.062.450,00
- Belanja Pegawai untuk Tunjangan Khusus Guru Tahun Anggaran 2024 tidak terealisasi sebesar Rp15.605.033,00
- Belanja Pegawai untuk Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran 2024 tidak terealisasi sebesar Rp16.374.000,00
- Belanja Pegawai dari Gaji, tambahan penghasilan PNS, insentif pemungutan pajak daerah, uang lembur, honorarium PNS dan Non PNS tidak terealisasi sebesar Rp38.704.338.116,00
- Belanja Barang dan Jasa tidak terealisasi sebesar Rp47.575.145.506,80
- Belanja Hibah tidak terealisasi sebesar Rp1.143.594.718,00
- Belanja Modal tidak terealisasi sebesar Rp14.212.960.489,12
- Belanja Tak Terduga tidak terealisasi sebesar Rp418.062.265,00

c. Pembiayaan

Realisasi pembiayaan netto kurang dari anggaran sebesar Rp0,35 yaitu selisih kurang dari realisasi pembiayaan sebesar Rp91.939.692.402,65 dari anggaran sebesar Rp91.939.692.403,00.

Tabel 5.47 Rincian SiLPA per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	6.659.430.608,00
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	5.505.071.464,00
3	Dana Insentif Fiskal	1.827.136.045,00
4	DAU/DBH	4.840.901.819,05
5	FKTP Puskesmas (JKN)	2.308.421,29
6	Dana BOK Puskesmas	1.432.811.704,00
7	BLUD RSUD Sidikalang	18.663.486.932,00
8	Dana BOS	13.699.474,80
9	Kas di Bendahara Penerimaan	60.123.400,00
	Jumlah SiLPA	**39.004.969.868,14**

5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran. Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran berjalan setelah ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

	Tahun 2024 Rp	Tahun 2023 Rp
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal (SAL Awal)	**94.964.692.402,65**	**142.072.990.500,92**

Nilai SAL Awal tahun 2024 merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2023 yang digunakan untuk menutup anggaran defisit tahun 2024. Nilai SAL Awal tahun 2024 diperoleh sebesar Rp94.964.692.402,65 atau mengalami penurunan sebesar Rp47.108.298.098,27 atau 33,16% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	**94.964.692.402,65**	**142.072.990.500,92**

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2024 merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2023 yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2024. Nilai Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan tahun 2024 diperoleh sebesar Rp94.964.692.402,65 atau mengalami penurunan sebesar Rp47.108.298.098,27 atau 33,16% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA)	**39.004.969.868,14**	**94.964.692.402,65**

SILPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi Pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SILPA pada akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp39.004.969.868,14 atau mengalami penurunan sebesar Rp55.959.722.534,51 atau 58,93% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir	**39.004.969.868,14**	**94.964.692.402,65**

SAL Akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Nilai akumulatif SAL Akhir pada tahun 2024 adalah sebesar Rp39.004.969.868,14 atau mengalami penurunan sebesar Rp55.959.722.534,51 atau 58,93% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

5.3 Penjelasan atas Pos-pos Neraca

	Tahun 2024 Rp	Tahun 2023 Rp
5.3.1 Aset	**1.740.413.199.648,87**	**2.072.920.169.765,47**

Aset atau disebut juga dengan Aktiva adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lain-lain.
Aset pada Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.740.413.199.648,87 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.48 Rincian Saldo Aset per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Jenis Aset	Per 31 Desember 2024 Rp	Per 31 Desember 2023 Rp	Perubahan	%
1.	Aset Lancar	131.881.720.529,34	162.759.600.756,94	(30.877.880.227,60)	(18,97)
2.	Investasi Jangka Panjang	107.548.239.141,00	106.939.023.640,00	609.215.482,00	0,57
3.	Aset Tetap	1.489.899.104.283,65	1.790.189.737.993,13	(300.290.633.709,48)	(16,77)
4.	Aset Lainnya	11.084.135.694,88	13.031.807.356,40	(1.947.671.661,52)	(16,78)
Total Aset		**1.740.413.199.648,87**	**2.072.920.169.765,47**	**(332.530.938.545,70)**	**(16,04)**

5.3.1.1 Aset Lancar 131.881.720.529,34 162.759.600.756,94

Aset Lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Dalam perhitungan Neraca Pemerintah Kabupaten Dairi, Aset Lancar terdiri atas: (1) Kas di Kas Daerah; (2) Kas di Bendahara Penerimaan; (3) Kas di Bendahara Pengeluaran; (4) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran; (5) Piutang Pajak; (6) Piutang Retribusi; (7) Piutang Pendapatan dari Pusat; (8) Piutang Pendapatan dari Provinsi; (9) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi; (10) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran; (11) Piutang Lainnya; dan (12) Persediaan.

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2024 sebesar Rp131.881.720.529,34 atau menurun sekitar 18,97% atau Rp30.877.880.227,60 dibandingkan per 31 Desember 2023 yang mencapai Rp162.759.600.756,94.

Selanjutnya, berdasarkan kontribusinya, sekitar 29,69% atau Rp39.154.424.478,14 Aset Lancar disumbangkan oleh Kas dan sisanya masing-masing disumbangkan Piutang sebesar 42,14%, beban dibayar dimuka sebesar 0,31% dan Persediaan sebesar 27,86%. Disisi lain, pada posisi per 31 Desember 2024 Investasi Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Dairi bersaldo nihil atau nol.

Tabel 5.49 Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Jenis Aset Lancar	Per 31 Desember 2024 Rp	Per 31 Desember 2023 Rp	Perubahan	%
1.	Kas	39.154.424.478,14	95.062.523.521,33	(55.908.099.043,19)	(58,81)
2.	Piutang	55.577.200.436,67	43.871.357.642,23	11.705.842.794,44	26,68
3.	Beban Dibayar Dimuka	407.178.271,00	0,00	407.178.271,00	∞
4.	Persediaan	36.742.917.343,53	23.825.719.593,38	12.917.197.750,15	54,22
Total Aset Lancar		**131.881.720.529,34**	**162.759.600.756,94**	**(30.877.880.227,60)**	**(18,97)**

5.3.1.1.1 Kas 39.154.424.478,14 95.062.523.521,33

Saldo Kas Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2024 merupakan uang kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLUD, Kas Dana BOS dan Kas Dana Kapitasi pada FKTP dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.50 Kas Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Per 31 Desember 2024 Rp	Per 31 Desember 2023 Rp	Perubahan	%
1	Kas di Kas Daerah	18.812.421.527,05	72.842.475.547,36	(54.030.054.020,31)	(74,17)
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	21.348.744,00	(21.348.744,00)	(100,00)
3	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	169.573.019,00	97.831.118,68	71.741.900,32	73,33
4	Kas di Bendahara Penerimaan	60.123.400,00	191.464.443,00	(131.341.043,00)	(68,60)
5	Kas di BLUD	18.663.486.932,00	18.541.500.236,00	121.986.696,00	0,66
6	Kas Dana BOS	13.699.474,80	140.622.533,00	(126.923.058,20)	(90,26)
7	Kas pada FKTP	1.435.120.125,29	3.227.280.899,29	(1.792.160.774,00)	(55,53)
Jumlah Kas		**39.154.424.478,14**	**95.062.523.521,33**	**(55.908.099.043,19)**	**(58,81)**

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah 18.812.421.527,05 72.842.475.547,36

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp18.812.421.527,05 dan Rp72.842.475.547,36 merupakan saldo bank milik Pemerintah Kabupaten Dairi yang dikelola oleh Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Dairi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.51 Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Nomor Rekening	Per 31 Desember 2024 Rp	Per 31 Desember 2023 Rp	Perubahan	%
1	PT Bank Sumut No. 280 01.02.000100-0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT Bank Sumut No. 280 01.02.000200-0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT Bank Sumut No. 280 01.02.000300-0	18.657.391.436,05	72.842.475.547,36	(54.009.935.611,31)	(74,15)
	SP2D yang tidak tersalurkan/terbayarkan	175.148.500,00	0,00	175.148.500,00	∞
	Kelebihan pembayaran Pajak yang belum dikembalikan	(20.118.409,00)	0,00	(20.118.409,00)	∞
4	PT Bank Sumut No. 280 01.02.001084-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kas di Kas Daerah		**18.812.421.527,05**	**72.842.475.547,36**	**(54.030.054.020,31)**	**(74,17)**

SP2D yang tidak tersalurkan/terbayarkan sebesar Rp175.148.500,00 merupakan pembayaran yang dikeluarkan dari Kas Daerah namun tidak tersalurkan yang disebabkan kesalahan nomor rekening Bank penerima. Namun oleh PT Bank Sumut, dana tersebut tidak dikembalikan langsung ke Kas Daerah dan ditempatkan di rekening penampung. Nomor SP2D-LS yang tidak tersalurkan/terbayarkan tersebut adalah SP2D Nomor 12.11/04.0/000067/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2024 tanggal 9 Agustus 2024 dan SP2D Nomor 12.11/04.0/000074/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2024 tanggal 12 Agustus 2024.

Di tahun 2025, dana tersebut telah dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 14 Januari 2025 sebesar Rp155.030.091,00 melalui permohonan pemindahbukuan ke rekening Kas Daerah. Sedangkan sisanya sebesar Rp20.118.409,00 yang merupakan kelebihan pembayaran pajak ke Kas Negara belum dikembalikan ke Kas Daerah.

Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan upaya melalui KPP Pratama Kabanjahe agar pajak yang lebih bayar tersebut dapat dikembalikan ke Kas Daerah. Pada Laporan Keuangan ini, kelebihan pajak tersebut dicatat pada Aset Lain-lain.

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 21.348.744,00

Jumlah saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan menurun sebesar Rp21.348.744,00 dibandingkan per 31 Desember 2023 yang bersaldo sebesar Rp21.348.744,00.

Tabel 5.52 Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	SKPD	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Perubahan	%
1.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	3.699.800,00	(3.699.800,00)	(100,00)
2.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	0,00	17.648.944,00	(17.648.944,00)	(100,00)
Total Kas di Bendahara Pengeluaran		**0,00**	**21.348.744,00**	**(21.348.744,00)**	**(100,00)**

5.3.1.1.1.3 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 169.573.019,00 97.831.118,68

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp169.573.019,00 dan Rp97.831.118,68.

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa uang dari hasil pemungutan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang belum disetor oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp140.776.648,00. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) tersebut berupa PPN dan PPh atas kegiatan pada SKPD Dinas Pendidikan dan telah disetor pada Tahun 2025. Disamping itu kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran juga merupakan kas yang masih terdapat di rekening bank SKPD atas pembayaran belanja yang belum terelisasi hingga 31 Desember 2024, namun sudah dibayarkan di awal Januari 2025.

Rincian kas lainnya di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.53 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024

No.	SKPD	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Perubahan	%
1.	Dinas Pendidikan	140.776.648,00	97.831.118,68	42.945.529,32	43,90
2.	Kecamatan Lae Parira	21.943.953,00	0,00	21.943.953,00	∞
3.	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	513.068,00	0,00	513.068,00	∞
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.339.350,00	0,00	6.339.350,00	∞
Total Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		**169.573.019,00**	**97.831.118,68**	**71.741.900,32**	**73,33**

5.3.1.1.1.4 Kas di Bendahara Penerimaan 60.123.400,00 191.464.443,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp60.123.400,00 dan Rp191.464.443,00 merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2024. Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.54. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	SKPD	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Perubahan	%
1.	Dinas Kesehatan	60.123.400,00	175.716.443,00	115.593.043,00	65,78%
2.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	0,00	15.748.000,00	15.748.000,00	100,00%
Total Saldo Kas di Bendahara Penerimaan		**60.123.400,00**	**191.464.443,00**	**131.341.043,00**	**68,60%**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan

Tabel 5.55. Perhitungan Sisa Kas Bendahara JKN Non Kapitasi Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari	**175.716.443,00**	**47.284.726,00**
Mutasi Penambahan	**859.729.108,00**	**604.269.613,00**
- Diterima dari BPJS Kesehatan	859.320.974,00	602.064.100,00
- Jasa Giro	408.129,00	2.205.513,00
Mutasi Pengurangan	**(975.322.151,00)**	**(475.837.896,00)**
- Penarikan klaim	(975.322.151,00)	(475.837.896,00)
Saldo	**60.123.400,00**	**175.716.443,00**

Penerimaan dana dari BPJS Kesehatan sebesar Rp859.320.974,00 merupakan dana persalinan (Non Kapitasi) tahun 2024. Sisa Kas sebesar Rp60.123.400,00 telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 13 Januari 2025.

Tabel 5.56. Pelayanan JKN Persalinan per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
JKN		
- Kunjungan rawat jalan	149.684 kunjungan	171.565 kunjungan
- Pasien yang dirawat inap	1.061 orang	860 orang
- Pasien rujukan	11.526 orang	11.526 orang
Persalinan		
- Kunjungan sebelum melahirkan (ANC)	963 kunjungan	4.489 kunjungan
- Kunjungan setelah melahirkan (PNC)	270 kunjungan	4.271 kunjungan
- Kelahiran normal	513 orang	2.821 orang
- Kelahiran (rujukan)	2 orang	1.459 orang
- Pelayanan KB (IUD dan Implant)	113 orang	2.786 orang
- Pelayanan KB (suntik)	24 orang	25.073 orang

5.3.1.1.1.5 Kas di BLUD 18.663.486.932,00 18.541.500.236,00

Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp18.663.486.932,00 dan Rp18.541.500.236,00 merupakan saldo kas pada Bendahara BLUD RSUD Sidikalang.

Tabel 5.57. Perhitungan Saldo Kas BLUD RSUD Sidikalang per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari	**18.541.500.236,00**	**18.677.417.427,40**
Mutasi Penambahan Tahun 2024	**68.168.252.776,00**	**61.173.062.138,38**
- Penerimaan Jasa Pelayanan Umum	4.237.578.486,00	4.534.771.530,00
- Klaim Jampersal	0,00	33.330.100,00
- Penerimaan Klaim RITL/ RJTL	47.417.106.875,00	32.021.313.375,00
- Denda keterlambatan pembayaran klaim	0,00	0,00
- Obat Kronik	2.021.687.274,00	1.661.642.221,00
- Klaim Ambulance BPJS	1.543.259.700,00	1.501.193.900,00
- Jasa Giro	400.230.810,00	328.071.944,00
- Penerimaan BLUD lainnya	8.912.521,00	0,00
- Penerimaan dari APBD	11.101.253.012,00	18.984.688.187,00
- Dana BTT Covid 19	0,00	0,00
- Pendapatan Biaya Penelitian	15.575.000,00	9.880.000,00
- Penadapatan Biaya Legis	0,00	40.000,00
- Pendapatan Sewa Gedung	0,00	0,00
- Pendapatan Sewa Cafetaria	7.800.000,00	7.200.000,00
- Pendapatan Instalasi Farmasi	776.033.357,00	0,00
- Pendapatan Hasil Kerjasama TCM	58.600.000,00	128.775.000,00
- Klaim Ketenagakerjaan/Asuransi Jiwa INHEALTH	19.548.991,00	2.908.109,00
- Klaim Jasa Raharja	411.038.750,00	984.273.200,00
- Klaim Klaim Non Register	79.309.600,00	0,00
- Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	46.537.000,00	974.974.572,38
- Pendapatan Pelayanan Kesehatan Akhir Tahun Lalu	23.781.400,00	0,00
Mutasi Pengurangan	**68.046.266.080,00**	**61.308.979.329,78**
- Belanja BLUD	68.046.266.080,00	61.308.979.329,78
Saldo per 31 Desember 2024	**18.663.486.932,00**	**18.541.500.236,00**

5.3.1.1.1.6 Kas Dana BOS 13.699.474,80 140.622.533,00

Saldo Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp13.699.478,00 dan Rp140.622.533,00 merupakan saldo kas pada Bendahara Dana BOS pada SKPD Dinas Pendidikan.

5.3.1.1.1.7 Kas pada FKTP 1.435.120.125,29 3.227.280.899,29

Saldo Kas pada FKTP per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.435.120.125,29 dan Rp3.227.280.899,29. Saldo Kas pada FKTP adalah merupakan sisa dana kapitasi pada 18 puskesmas yang berasal dari Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2024 dan juga sisa kas dari Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas yang diperoleh dari Pemerintah Pusat. Rincian mutasi nya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.58 Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kapitasi JKN 18 Puskesmas per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023	Penerimaan 2024	Pengeluaran 2024	Saldo per 31 Desember 2024
1	UPT. Puskesmas Silalahi	30.588,25	292.930.377,00	292.960.526,00	439,25
2	UPT. Puskesmas Batang Beruh	91.229,80	976.592.227,00	976.442.989,00	240.467,80
3	UPT. Puskesmas Sumbul	369,91	1.027.081.802,00	1.027.082.033,00	138,91
4	UPT. Puskesmas Tigabaru	9.429,87	717.823.212,00	717.822.566,00	10.075,87
5	UPT. Puskesmas Kentara	57.298,56	656.285.844,00	656.290.111,00	53.031,56
6	UPT. Puskesmas Sitinjo	230.294,14	451.084.477,00	451.084.794,00	229.977,14
7	UPT. Puskesmas Sigalingging	1.614.236,47	915.309.801,00	915.726.681,00	1.197.356,47

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023	Penerimaan 2024	Pengeluaran 2024	Saldo per 31 Desember 2024
8	UPT. Puskesmas Parongil	1.294.591,75	327.490.384,00	328.729.212,00	55.763,75
9	UPT. Puskesmas KM 11	10.576,30	809.094.414,00	809.103.859,00	1.131,30
10	UPT. Puskesmas Sopobutar	246.395,91	497.459.694,00	497.458.447,00	247.642,91
11	UPT. Puskesmas Berampu	4.360,85	546.262.898,00	546.266.999,00	259,85
12	UPT. Puskesmas Tigalingga	27.618,29	941.244.150,00	941.271.562,00	206,29
13	UPT. Puskesmas Pegagan Julu II	6.825.718,28	659.676.374,00	666.500.609,00	1.483,28
14	UPT. Puskesmas Hutarakyat	7.286,03	866.679.288,00	866.684.709,00	1.865,03
15	UPT. Puskesmas Bakal Gajah	33.400,77	354.542.491,00	354.575.128,00	763,77
16	UPT. Puskesmas Bunturaja	332.470,11	761.494.639,00	761.726.418,00	100.691,11
17	UPT. Puskesmas Kutabuluh	32,99	834.179.395,00	834.090.023,00	89.404,99
18	UPT. Puskesmas Gunung Sitember	71.496,01	474.211.448,00	474.205.222,00	77.722,01
	Jumlah	**10.887.394,29**	**12.109.442.915,00**	**12.118.021.888,00**	**2.308.421,29**

Tabel 5.59 Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023	Penerimaan 2024	Pengeluaran 2024	Saldo per 31 Desember 2024
1	UPT. Puskesmas Silalahi	69.258.396,00	658.665.604,00	702.745.000,00	25.179.000,00
2	UPT. Puskesmas Batang Beruh	179.014.583,00	748.266.417,00	798.357.998,00	128.923.002,00
3	UPT. Puskesmas Sumbul	60.753.181,00	861.285.819,00	888.469.516,00	33.569.484,00
4	UPT. Puskesmas Tigabaru	70.521.202,00	851.517.798,00	802.919.779,00	119.119.221,00
5	UPT. Puskesmas Kentara	141.763.295,00	683.218.705,00	771.462.366,00	53.519.634,00
6	UPT. Puskesmas Sitinjo	172.020.526,00	507.376.474,00	628.502.306,00	50.894.694,00
7	UPT. Puskesmas Sigalingging	132.943.304,00	789.095.696,00	870.897.033,00	51.141.967,00
8	UPT. Puskesmas Parongil	112.386.322,00	712.595.678,00	779.840.791,00	45.141.209,00
9	UPT. Puskesmas KM 11	278.694.344,00	497.759.656,00	774.740.321,00	1.713.679,00
10	UPT. Puskesmas Sopobutar	140.916.841,00	732.594.159,00	690.997.106,00	182.513.894,00
11	UPT. Puskesmas Berampu	87.877.337,00	688.576.663,00	730.909.810,00	45.544.190,00
12	UPT. Puskesmas Tigalingga	623.404.990,00	201.577.010,00	685.364.299,00	139.617.701,00
13	UPT. Puskesmas Pegagan Julu II	105.404.441,00	671.049.559,00	720.666.187,00	55.787.813,00
14	UPT. Puskesmas Hutarakyat	245.583.176,00	681.697.824,00	866.165.090,00	61.115.910,00
15	UPT. Puskesmas Bakal Gajah	123.412.517,00	507.489.483,00	491.145.283,00	139.756.717,00
16	UPT. Puskesmas Bunturaja	212.343.363,00	661.167.637,00	785.251.516,00	88.259.484,00
17	UPT. Puskesmas Kutabuluh	225.931.222,00	647.579.778,00	782.684.841,00	90.826.159,00
18	UPT. Puskesmas Gunung Sitember	234.164.465,00	542.289.535,00	656.266.054,00	120.187.946,00
	Jumlah	**3.216.393.505,00**	**11.643.803.495,00**	**13.427.385.296,00**	**1.432.811.704,00**

5.3.1.1.2 Piutang

55.577.200.436,67 **43.871.357.642,23**

Saldo Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp55.577.200.436,67 dan Rp43.871.357.642,23 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.60. Daftar Piutang Daerah TA 2024 dan TA 2023

No.	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2024 Rp	Per 31 Desember 2023 Rp	Perubahan	%
1	Piutang Pajak Daerah	9.819.612.013,00	10.255.277.871,00	(435.665.858,00)	(4,25)
2	Piutang Retribusi Daerah	7.429.915.959,00	187.687.333,00	7.242.228.626,00	3.858,67
3	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	101.747.061,00	8.009.477.020,00	(7.907.729.959,00)	(98,73)
4	Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat	0,00	52.012.000,00	(52.012.000,00)	(100,00)
5	Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi	42.115.752.587,00	28.521.914.600,00	13.593.837.987,00	47,66
6	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	11.125.000,00	(11.125.000,00)	(100,00)
7	Penyisihan Piutang	(3.889.827.183,32)	(3.166.136.181,77)	(723.691.001,55)	22,86
Total Piutang		**55.577.200.436,67**	**43.871.357.642,23**	**11.705.842.794,44**	**26,68**

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah 9.819.612.013,00 10.255.277.871,00

Jumlah Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.819.612.013,00 dan menurun sebesar 4,25% atau Rp435.665.858,00 dibandingkan per 31 Desember 2023 yang mencapai Rp10.255.277.871,00.

Tabel 5.61. Mutasi Piutang Pajak Daerah Tahun 2024

No.	Jenis Pajak Daerah	Saldo per 31-12-2023	Mutasi Tahun 2024			Saldo per 31-12-2024
			Penambahan	Realisasi	Penghapusan	
1	Pajak Hotel	3.361.000,00	360.652.313,00	336.726.359,00	0,00	27.286.954,00
2	Pajak Losmen	16.942.727,00	114.794.000,00	100.909.727,00	0,00	30.827.000,00
3	Pajak Restoran (Rumah Makan)	866.081.696,00	796.849.589,00	543.352.140,00	0,00	1.119.579.145,00
4	Pajak Hiburan	10.308.500,00	13.920.000,00	7.580.000,00	0,00	16.648.500,00
5	Pajak Reklame	54.210.932,00	689.329.372,00	741.912.054,00	0,00	1.628.250,00
6	Pajak MBLB	3.775.397.815,00	2.998.677.901,00	4.223.194.795,00	0,00	2.550.880.921,00
7	Pajak Air Tanah	2.484.108,00	43.499.723,00	43.670.776,00	0,00	2.313.055,00
8	Pajak Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2)	5.526.491.093,00	3.363.228.191,00	2.819.271.096,00	0,00	6.070.448.188,00
	Jumlah	**10.255.277.871,00**	**8.380.951.089,00**	**8.816.616.947,00**	**0,00**	**9.819.612.013,00**

Tabel 5.62. Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Jenis Piutang Pajak	Per 31 Desember 2024 Rp	Per 31 Desember 2023 Rp	Perubahan	%
1.	Pajak Hotel	27.286.954,00	3.361.000,00	23.925.954,00	711,87
2.	Pajak Losmen	30.827.000,00	16.942.727,00	13.884.273,00	81,95
3.	Pajak Restoran (Rumah Makan)	1.119.579.145,00	866.081.696,00	253.497.449,00	29,27
4.	Pajak Hiburan (diskotik)	16.648.500,00	10.308.500,00	6.340.000,00	61,50
5.	Pajak Reklame	1.628.250,00	54.210.932,00	(52.582.682,00)	(97,00)
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.550.880.921,00	3.775.397.815,00	(1.224.516.894,00)	(32,43)
7.	Pajak Air Tanah	2.313.055,00	2.484.108,00	(171.053,00)	(6,89)
8.	PBB Perdesaan dan Perkotaan	6.070.448.188,00	5.526.491.093,00	543.957.095,00	9,84
Total Piutang Pajak		**9.819.612.013,00**	**10.255.277.871,00**	**(435.665.858,00)**	**(4,25)**

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah 7.429.915.959,00 187.687.333,00

Jumlah Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.429.915.959,00. Selama tahun 2024, realisasi pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp49.875.000,00 sehingga saldo piutang tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp137.812.333,00. Kemudian di Tahun 2024, terdapat penambahan retribusi pelayanan kesehatan dari Dinas Kesehatan sebesar Rp47.362.100,00 dan RSUD Sidikalang sebesar Rp7.237.775.526,00. Dengan demikian, jumlah saldo piutang retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.429.915.959,00, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.63. Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Jenis Piutang Retribusi	Per 31 Desember 2024 Rp	Per 31 Desember 2023 Rp	Perubahan	%
1	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	144.778.333,00	137.812.333,00	6.966.000,00	5,05
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	47.362.100,00	49.875.000,00	(2.512.900,00)	(5,04)
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan (RSUD Sidikalang)	7.237.775.526,00	0,00	7.237.775.526,00	∞
Total Piutang Retribusi		**7.429.915.959,00**	**187.687.333,00**	**7.242.228.626,00**	**3.858,67**

Piutang dari RSUD Sidikalang merupakan piutang atas pendapatan dana Non Kapitasi JKN terhadap BPJS Tahun 2024 dan piutang atas kerja sama pelayanan medis dengan pihak ketiga pada RSUD Sidikalang, dengan uraian sebagai berikut :

1. Klaim dana Non Kapitasi JKN, sebesar Rp7.127.115.276,00, dengan uraian sebagai berikut ;

a. Klaim BPJS Reguler dan Hemodealisa peroide bulan Desember 2024 sebesar Rp3.685.906.150,00;
b. Klaim Pending BPJS Reguler dan Hemodealisa periode bulan Agustus s/d Desember 2024 sebesar Rp2.792.600.530,00;
c. Klaim Obat Penyakit Kronik periode bulan Desember 2024 sebesar Rp183.156.998,00;
d. Klaim Ambulance BPJS periode bulan Nopember s/d Desember 2024 sebesar Rp458.666.998,00;
e. Klaim Pasien Non Register periode tahun 2024 sebesar Rp4.254.100,00;
f. Klaim BPJS Ketenagakerjaan periode tahun 2024 sebesar Rp2.530.500;

2. Klaim Asuransi Jasa Raharja periode bulan September s/d Desember 2024 sebesar Rp110.660.250,00.

5.3.1.1.2.3 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah **101.747.061,00** **8.009.477.020,00**

Saldo piutang lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp101.747.061,00 merupakan piutang atas Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp12.729.595,00 dan kelebihan pembayaran atas belanja di tahun 2024 sebesar Rp89.017.466 namun telah disetorkan ke Kas daerah pada bulan Januari 2025. Pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp88.367.466,00 atas belanja modal jaringan air minum dan telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 3 januari 2025. Dinas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp650.000,00 atas belanja pengadaan mebel dan telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 19 Februari 2025.

Sedangkan penerimaan piutang RSUD Sidikalang yang tahun sebelumnya dicatat pada Lain-lain PAD Yang Sah telah diterima secara keseluruhan dan di tahun 2025 dilakukan direklasifikasi ke penerimaan Retribusi Daerah.

5.3.1.1.2.4 Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat **0,00** **52.012.000,00**

Jumlah piutang pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.2.5 Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi **42.115.752.587,00** **28.521.914.600,00**

Jumlah piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp42.115.752.587,00. Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/282/KPTS/2025 tanggal 22 April 2025 tentang Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan Tahun 2024 dan Lunas Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Dairi menerima alokasi DBH Pajak TA 2024 sebesar Rp49.614.239.991,00 dan terealisasi sebesar Rp19.908.045.253,00 sehingga terdapat kekurangan bayar sebesar Rp29.706.194.738,00. Sedangkan untuk Piutang DBH TA 2023 sebesar Rp28.521.914.600,00, terdapat koreksi tambah dari Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.458.551.441,00 sehingga nilai Piutang DBH TA 2023 menjadi sebesar Rp29.980.466.041,00. Dan di Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Dairi telah menerima sebesar Rp17.570.908.192,00 sehingga terdapat kekurangan bayar sebesar Rp12.409.557.849,00.

Tabel 5.64. Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2024

No	Jenis Bagi Hasil Pendapatan dari Provinsi	Piutang per 31 Des 2023 (Rp)	Penetapan di TA 2024			Jumlah Diterima Tahun 2024 (Rp)	Piutang per 31 Des 2024 (Rp)
			Penetapan TA. 2024 (Rp)	Koreksi Kurang Salur TA. 2023 (Rp)	Jumlah Penetapan (Rp)		
1	2	3	4	5	(6) = (3+4+5)	7	(8) = (6-7)
1.	PKB	8.418.588.864,00	9.975.397.242,00	283.564.605,00	18.677.550.711,00	3.976.860.214,00	14.700.690.497,00
2.	BBN KB	4.831.235.661,00	5.657.980.344,00	165.505.454,00	10.654.721.459,00	2.302.207.818,00	8.352.513.641,00
3.	PBB-KB	11.919.155.620,00	12.543.918.062,00	961.707.755,00	25.424.781.437,00	7.938.905.705,00	17.485.875.732,00
4.	PAP	1.260.394.202,00	1.528.899.090,00	47.773.627,00	2.837.066.919,00	1.260.394.202,00	1.576.672.717,00
5.	Pajak Rokok	2.092.540.253,00	19.908.045.253,00	0,00	22.000.585.506,00	22.000.585.506,00	-
Jumlah		28.521.914.600,00	49.614.239.991,00	1.458.551.441,00	79.594.706.032,00	37.478.953.445,00	42.115.752.587,00

5.3.1.1.2.6 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) **0,00** **11.125.000,00**

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi aset lain-lain yang berupa aset lancar disebabkan adanya Tuntutan Ganti Rugi jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Jumlah Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Dairi kepada pegawai bukan bendahara per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp11.125.000,00.

5.3.1.1.2.7 Penyisihan Piutang **(3.889.827.183,32)** **(3.166.136.181,77)**

Jumlah tersebut merupakan penyisihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2024 dan 2023.

Tabel 5.65. Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2024 Rp	Per 31 Desember 2023 Rp	Perubahan	%
1.	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(217.279,77)	(86.725,00)	(130.554,77)	(150,54)
2.	Penyisihan Piutang Pajak Losmen	(3.771.285,00)	(818.113,64)	(2.953.171,36)	(360,97)
3.	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(188.476.700,73)	(92.172.358,48)	(96.304.342,25)	(104,48)
4.	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(4.797.950,00)	(4.375.562,50)	(422.387,50)	(9,65)
5.	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(8.141,25)	(271.330,16)	263188,91	97,00
6.	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(413.152.369,53)	(337.529.834,00)	(75.622.535,53)	(22,40)
7.	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(11.565,28)	(12.420,54)	855,26	6,89
8.	Penyisihan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan	(3.098.187.870,64)	(2.654.487.554,35)	(443.700.316,29)	(16,72)
9.	Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	(144.778.333,00)	(36.085.523,00)	(108.692.810,00)	(301,21)
10	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	(236.810,50)	(249.375,00)	12.564,50	5,04
11	Penyisihan Piutang Dana Non Kapitasi JKN	(36.188.877,63)	(40.047.385,10)	3.858.507,47	9,63
Jumlah Penyisihan Piutang		**(3.889.827.183,32)**	**(3.166.136.181,77)**	**(723.691.001,55)**	**(22,86)**

5.3.1.1.3 Beban Dibayar Dimuka **407.178.271,00** **0,00**

Jumlah Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp407.178.271,00 merupakan beban atas kegiatan yang tidak terselesaikan secara fisik minimal 25,00% hingga 31 Desember 2024 padahal uang muka belanja telah dibayarkan sebesar 25,00%. Kegiatan ini berada di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, dengan uraikan sebagai berikut :

Tabel 5.66. Rekapitulasi Beban Dibayar Dimuka Tahun 2024

No.	Kegiatan	Pagu Kontrak (Rp)	Realisasi SP2D (Rp.)	%	Realisasi Fisik (KDP) (Rp.)	%	Beban Dibayar Dimuka
1	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum (Totem Geopark)	988.510.000	247.127.500	25	53.153.707	5,38	193.973.793
2	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum (Jalur Pejalan Kaki)	482.255.000	120.563.750	25	118.148.588	24,99	2.415.162
3	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum (Pekerjaan Media Tanam)	137.050.000	34.262.500	25	8.256.126	6,02	26.006.374
4	Belanja Modal Taman (Lampu Taman)	429.426.000	107.356.500	25	21.949.915	7,42	85.406.585
5	Belanja Modal Pilar/Tugu tanda lainnya (Gapura/gerbang utama geopark)	596.396.000	149.099.000	25	78.461.705	1,52	70.637.295
6	Belanja Modal Rambu Tak Bersuar (Papan Interpretasi Geopark)	124.500.000	31.125.000	25	2.385.938	1,92	28.739.062
	Jumlah Belanja Modal	**2.758.137.000**	**689.534.250**		**282.355.979**		**407.178.271**

5.3.1.1.4 Persediaan **36.742.917.343,53** **23.825.719.593,38**

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp36.742.917.343,53 atau meningkat sekitar 54,22% atau sebesar Rp12.917.197.750,15 dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 yang mencapai Rp23.825.719.593,38.

Jumlah tersebut merupakan Persediaan Barang Pakai Habis (BHP) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Dairi dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat, berupa alat tulis kantor, bahan cetakan, alat-alat kebersihan, obat-obatan, alat kontrasepsi, alat kendaraan, bahan pakan, alat-alat listrik, bahan pertanian, BBM, alat rumah

tangga, bibit tanaman, bahan cenderamata, bahan logistik, bahan material, bahan makanan, foto dan alat kesehatan yang dikelola oleh Pengurus Barang Daerah pada masing-masing SKPD.

Tabel 5.67. Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023

Jenis Persediaan	Per 31 Desember 2024 Rp	Per 31 Desember 2023 Rp	Perubahan	
			Rp	%
Alat Tulis Kantor	45.519.133,17	153.205.680,00	(107.686.546,83)	(70,29)
Bahan Cetakan	258.271.400,00	200.667.482,00	57.603.918,00	28,71
Alat Listrik dan Elektronik	88.577.471,00	25.586.413,00	62.991.058,00	246,19
Kertas dan Cover	56.790.026,64	30.025.370,00	26.764.656,64	89,14
Perangko, Materai dan Benda Pos	1.250.000,00	1.750.000,00	(500.000,00)	(28,57)
Alat / bahan kantor lainnya	61.291.710,46	169.901.363,00	(108.609.652,54)	(63,93)
Bahan-Bahan Lainnya	30.041.553,43	15.974.200,00	14.067.353,43	88,06
Bahan Komputer	17.168.000,00	11.841.500,00	5.326.500,00	44,98
Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	18.823.800,13	75.969.478,00	(57.145.677,87)	(75,22)
Obat-Obatan	13.495.133.181,72	12.580.975.022,06	914.158.159,66	7,27
Alat Kesehatan	0,00	87.708.619,38	(87.708.619,38)	(100,00)
Alat Kontrasepsi	56.909.159,00	0,00	56.909.159,00	∞
Bahan Perikanan	141.727.400,00	0,00	141.727.400,00	∞
Natura dan Pakan-Pakan	48.818.000,00	201.080.200,00	(152.262.200,00)	(75,72)
Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	22.155.886.327,98	8.060.774.908,35	14.095.111.419,63	174,86
Perlengkapan Dinas	750.000,00	0,00	750.000,00	∞
Peralatan Kantor	0,00	700.000,00	(700.000,00)	(100,00)
Bantuan Sosial Uang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	∞
Bahan Kimia dan Pupuk	26.775.000,00	199.325.000,00	(172.550.000,00)	(86,57)
Bahan Material (Bahan Baku Bangunan dan Konstruksi)	0,00	26.370.000,00	(26.370.000,00)	(100,00)
Persediaan Untuk Tujuan Strategis	2.714.000,00	2.714.000,00	0,00	0,00
Alat/Bahan Laundry Rumah Sakit	0,00	536.000,00	(536.000,00)	(100,00)
Bahan Medis Habis Pakai	0,00	1.953.998.757,59	(1.953.998.757,59)	(100,00)
Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	149.395.680,00	0,00	149.395.680,00	∞
Pipa-pipa Baja	87.075.500,00	26.615.600,00	60.459.900,00	227,16
Jumlah Persediaan	**36.742.917.343,53**	**23.825.719.593,38**	**12.917.197.750,15**	**54,22**

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang 107.548.239.141,00 106.939.023.659,00

Investasi Jangka Panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Dalam perhitungan Neraca Pemerintah Kabupaten Dairi, Investasi Jangka Panjang terdiri atas: (1) Investasi Non Permanen dan (2) Investasi Permanen.

Jumlah Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2024 sebesar Rp107.548.239.141,00 atau meningkat sekitar 0,57% atau Rp609.215.482,00 dibandingkan per 31 Desember 2023 yang mencapai Rp106.939.023.659,00.

Tabel 5.68. Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Jenis Investasi Jangka Panjang	Per 31 Desember 2024 Rp	Per 31 Desember 2023 Rp	Perubahan (Rp)	%
1.	Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Investasi Permanen	107.548.239.141,00	106.939.023.659,00	609.215.482,00	0,57
Total Investasi Jangka Panjang		107.548.239.141,00	106.939.023.659,00	1.146.331.769,00	0,57

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen 0,00 0,00

5.3.1.2.1.1 Dana Bergulir 1.006.403.120,00 1.006.403.120,00

Jumlah investasi non permanen per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.006.403.120,00. Jumlah investasi non permanen tersebut merupakan investasi Pemerintah Kabupaten Dairi (dana bergulir) kepada pihak ketiga yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan program penguatan permodalan kepada petani, dimana Pemerintah Kabupaten Dairi memberikan bantuan permodalan kepada petani komoditi tertentu (ubi jalar dan jagung). Bantuan permodalan ini sifatnya harus dikembalikan oleh petani kepada Pemerintah Kabupaten Dairi setelah selesai panen tanpa adanya kewajiban pembayaran bunga/imbal jasa dari dana bergulir yang dipinjamkan.

Pemerintah Kabupaten Dairi telah menggulirkan dana pada TA 2006 sebesar Rp643.550.000,00 untuk petani komoditi ubi jalar dan pada TA 2007 sebesar Rp921.339.680,00 untuk petani komoditi ubi jalar dan jagung. Sisa dana bergulir per 31 Desember 2024 dan 2023, seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.69. Investasi Non Permanen-Dana Bergulir per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Tahun Penyaluran	Per 31 Desember 2024 Rp	Per 31 Desember 2023 Rp	Perubahan	%
1.	TA 2006	277.358.900,00	277.358.900,00	(0,00)	0,00
2.	TA 2007	729.044.220,00	729.044.220,00	(0,00)	0,00
Total Dana Bergulir		**1.006.403.120,00**	**1.006.403.120,00**	**(0,00)**	**0,00**

5.3.1.2.1.2 Penyisihan Dana Bergulir (1.006.403.120,00) (1.006.403.120,00)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah melakukan penyisihan piutang dan penyisihan dana bergulir dalam laporan keuangan.

Jumlah penyisihan dana bergulir per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.006.403.120,00 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.70. Penyisihan Dana Bergulir per 31 Desember 2024

No	Komoditas	Tahun	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Lancar s.d 1 tahun (0.50%)	Kurang Lancar 1 - 3 tahun (10%)	Diragukan 3 - 5 tahun (50%)	Macet > 5 tahun (100%)
1	Ubi Jalar Jepang	2006	277.358.900,00	0,00	0,00	0,00	277.358.900,00
2	Ubi Jalar Jepang dan Jagung	2007	729.044.220,00	0,00	0,00	0,00	729.044.220,00
	Total		**1.006.403.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.006.403.120,00**

Berdasarkan tabel diatas, usia piutang dana bergulir telah lebih dari 5 tahun sehingga diklasifikasikan dengan kualitas macet dengan persentase penyisihan sebesar 100%. Dengan demikian jumlah penyisihan dana bergulir sebesar : 100% x Rp1.006.403.120,00 = Rp1.006.403.120,00.

5.3.1.2.2 Investasi Permanen 107.548.239.141,00 106.939.023.659,00

Jumlah Investasi Permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp107.548.239.141,00 atau meningkat sekitar 0,57% atau Rp609.215.482,00 dibandingkan keadaan per 31 Desember 2023 yang mencapai Rp106.939.023.659,00 merupakan investasi permanen yang berupa investasi dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Dairi.

Tabel 5.71. Investasi Permanen per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Jenis Investasi Permanen	Per 31 Desember 2024 Rp	Per 31 Desember 2023 Rp	Perubahan (Rp)	%
1.	PT Bank Sumut	50.492.840.000,00	50.492.840.000,00	0,00	0,00
2.	Perumda Air Minum Lae Nciho	28.854.602.527,00	26.328.753.360,00	2.525.849.167,00	9,59
3.	PD Pasar	28.200.796.614,00	30.117.430.299,00	(1.916.633.685,00)	(6,36)
Total Investasi Jangka Panjang		**107.548.239.141,00**	**106.939.023.659,00**	**609.215.482,00**	**0,57**

Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah disajikan pada Lampiran XIII.

a) Investasi Permanen pada PT Bank Sumut

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Dairi pada PT Bank Sumut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dimana posisi saldo per 31 Desember 2024 senilai

Rp50.492.840.000,00 merupakan nilai penyertaan yang dihitung menggunakan metode harga perolehan *(cost method)* dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.72. Investasi Permanen pada PT Bank Sumut per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Penyertaan modal tahun sebelumnya	50.492.840.000,00	49.992.840.000,00
Penerimaan atas kelebihan penyetoran saham tahun sebelumnya	0,00	0,00
Tambahan penyertaan modal tahun berjalan	0,00	500.000.000,00
Nilai Investasi sesuai Metode Harga Perolehan	**50.492.840.000,00**	**50.492.840.000,00**

Jumlah investasi saham/penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Dairi yang telah diterbitkan sertifikat saham nya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.73. Investasi Saham/Penyertaan Modal per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Surat sertifikat saham kolektif sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Sumut tanggal 07 Pebruari 2023 terdiri dari 199.971.360 lembar saham dengan nilai nominal @Rp250,00 yang diterbitkan melalui Sertifikat Kolektif Saham No. 010/Dir/SP-SPr/SKS/2023 dengan Saham Seri A No. 7.372.627.001 s.d. 7.572.598.360.	49.992.840.000,00
2.	Surat sertifikat kolektif saham Triwulan IV tahun 2023 yang diterima pada tahun 2024. Terdiri dari 2.000.000 lembar saham dengan nilai nominal @Rp250,00 yang diterbitkan melalui Sertifikat Kolektif Saham No. 01/Dir/SP-SPr/SKS/2024 dengan Saham Seri A No. 9.982.741.913 s.d. 9.984.741.912.	500.000.000,00
Jumlah		**50.492.840.000,00**

Untuk TA 2024, Pemerintah Kabupaten Dairi tidak melakukan penambahan penyertaan modal ke PT Bank Sumut sehingga jumlah penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp50.492.840.000,00.

b) Investasi Permanen pada Perumda Air Minum Lae Nciho

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Dairi pada Perumda Air Minum Lae Nciho sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho dimana posisi saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp28.854.602.527,00.

Pada TA 2024, Perumda Air Minum Lae Nciho memperoleh penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Dairi sebesar Rp3.025.000.000,00, koreksi laba tahun sebelumnya sebesar Rp15.882.850 dan kerugian sebesar Rp515.033.683,00 sehingga penambahan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Dairi pada Perumda Air Minum Lae Nciho per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.525.489.167,00.

Pemerintah Kabupaten Dairi memiliki penyertaan modal 100% (kepemilikan tunggal) dari modal yang disetor kepada Perumda Air Minum Lae Nciho, sehingga penilaian investasi menggunakan metode ekuitas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.74. Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Lae Nciho per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Perhitungan Penyertaan modal periode sebelumnya	55.103.049.681,00	52.603.049.681,00
Eks penyertaan pemerintah pusat melalui DIP Proyek PPSAB	1.328.094.586,00	1.328.094.586,00
Eks penyertaan pemerintah pusat melalui DIP Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih Sumut	2.016.824.360,00	2.016.824.360,00
Tambahan penyertaan modal tahun berjalan	3.025.000.000,00	2.500.000.000,00
Akumulasi kerugian tahun sebelumnya	(32.119.215.267,00)	(32.131.145.614,00)
Koreksi laba tahun sebelumnya	15.882.850,00	(12.999.900,00)
Laba (Rugi) tahun berjalan	(515.033.683,00)	24.930.247,00
Jumlah	**28.854.602.527,00**	**26.328.753.360,00**

Eks penyertaan DIP Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih Sumatera Utara sebesar Rp1.328.094.586,00 merupakan bantuan Pemerintah RI yang belum ditetapkan statusnya. Sedangkan Eks penyertaan pemerintah

pusat melalui DIP Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih Sumatera Utara berupa jaringan transmisi/distribusi sebesar Rp2.016.824.360,00 merupakan bantuan pemerintah pusat kepada Perumda Air Minum Lae Nciho.

c) Investasi Permanen pada PD Pasar

Pada awal pendirian PD Pasar telah diserahkan aset tetap dalam kategori kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp29.898.698.026,00 sesuai dengan Keputusan Bupati Dairi Nomor 028/1585/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010, yang terdiri dari tanah, kios, mushola, kantor, balairung, bangunan mess, mesin *cold storage*, mesin *air blast*, pagar, jalan, *stand* dan sumur bor di 12 kecamatan se-Kabupaten Dairi.
Selanjutnya telah dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Dairi Nomor 028/1585/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Perusahaan Daerah Pasar dengan nilai aset yang diserahkan sebesar Rp17.095.789.000,00.

Dalam rangka mendukung operasional PD Pasar ditetapkan setoran modal dasar sebesar Rp5.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi dengan kondisi realisasi penyetoran sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100,00%. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi, Pemerintah Kabupaten Dairi memberikan tambahan penyertaan modal kepada PD Pasar sebesar Rp30.079.845.237,00.

Terhadap saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Dairi pada PD Pasar per 31 Desember 2024 dengan kepemilikan 100,00%, dinilai menggunakan metode ekuitas dan berdasarkan Laporan Keuangan PD Pasar Tahun 2024 maka nilai penyertaan modal menjadi sebesar Rp28.200.796.614,00, dengan rincian berikut:

Tabel 5.75. Penyertaan Modal pada PD Pasar per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Penyertaan modal tahun sebelumnya	52.175.634.237,00	52.175.634.237,00
Akumulasi kerugian tahun sebelumnya	(22.058.203.939,00)	(19.969.430.640,00)
Koreksi Laba (Rugi) tahun sebelumnya	(0,00)	(0,00)
Laba (Rugi) tahun berjalan	(1.916.633.684,00)	(2.088.773.298,00)
Jumlah	**28.200.796.614,00**	**30.117.430.299,00**

5.3.1.3 Aset Tetap 1.489.899.104.283,65 1.790.189.737.993,13

Aset Tetap adalah aset atau aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material. Dalam perhitungan Neraca Pemerintah Kabupaten Dairi, Aset Tetap terdiri atas: (1) Tanah; (2) Peralatan dan Mesin; (3) Gedung dan Bangunan; (4) Jalan, Jaringan dan Irigasi; (5) Aset Tetap Lainnya; (6) Bangunan dalam Pengerjaan dan (7) Akumulasi Penyusutan.
Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.489.899.104.283,65 atau menurun sekitar 16,77% atau Rp300.290.633.709,48 dibandingkan per 31 Desember 2023 yang mencapai Rp1.790.189.737.993,13.

Tabel 5.76. Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Jenis Aset Tetap	Per 31 Desember 2024 Rp	Per 31 Desember 2023 Rp	Perubahan (Rp)	%
1.	Tanah	393.611.869.272,62	393.166.988.572,62	444.880.700,00	0,11
2.	Peralatan dan Mesin	510.968.369.420,35	502.302.935.061,05	8.665.434.359,30	1,73
3.	Gedung dan Bangunan	819.823.038.901,61	798.362.408.301,19	21.460.630.600,42	2,69
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.918.651.356.899,95	1.837.671.650.168,26	80.979.706.731,69	4,41
5.	Aset Tetap Lainnya	120.655.139.802,97	112.527.483.141,97	8.127.656.661,00	7,22
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.223.803.341,73	4.588.300.394,26	7.635.502.947,47	166,41
7.	Akumulasi Penyusutan	(2.286.034.473.355,58)	(1.858.430.027.646,22)	(427.604.445.709,36)	23,01
Total Aset Tetap		**1.489.899.104.283,65**	**1.790.189.737.993,13**	**(300.290.633.709,48)**	**(16,77)**

5.3.1.3.1 Tanah **393.611.869.272,62** **393.166.988.572,62**

Aset Tetap berupa Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai dan dikuasai, meliputi antara lain harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan serta biaya lainnya yang berkaitan dengan pemilikan tanah.

Aset Tetap berupa Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai dan dikuasai, meliputi antara lain harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan serta biaya lainnya yang berkaitan dengan pemilikan tanah.
Nilai aset Tanah Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp393.611.869.272,62 dan Rp393.166.988.572,62.

Untuk nilai aset tetap tanah terdapat penambahan sebesar Rp1.032.117.076,00 diuraikan sebagai berikut :

a. Penambahan nilai tanah karena hibah masyarakat sebesar Rp44.540.000,00 pada Dinas Kesehatan untuk Puskesmas Pembantu Bangun I sebesar Rp28.160.000,00, dan penambahan tanah rencana Puskesmas Pembantu Sitinjo II sebesar Rp16.380.000 dengan luas 1.244 m^2. Dan pertambahan nilai tanah akibat hibah dari masyarakat sebesar Rp3.247.500,00 pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan tanah jalan masuk BPP Gunung Sayang dengan luas 433 m^2. Dan pertambahan tanah karena hibah masyarakat sebesar Rp519.996.000,00 pada Dinas Pendidikan untuk SMP Negeri 4 Sidikalang sebesar Rp300.000.000,00 dengan luas 15.000 m^2 dan untuk SD Sitinjo sebesar Rp219.996.000,00 dengan luas 6.111 m^2;

b. Bertambah akibat mutasi lintas SKPD sebesar Rp464.333.576,00, dengan rincian sebagai berikut :

   - Bertambah pada Dinas Lingkungan Hidup dari Dinas PUTR sebesar Rp74.333.576,00;
   - Bertambah pada Inspektorat dari Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp120.000.000,00;
   - Bertambah pada Kecamatan Sidikalang dari Badan Keuangan dan Aser Daerah sebesar Rp135.000.000,00;
   - Bertambah pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dari Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp135.000.000,00.

Selain penambahan pada aset tetap tanah, terdapat juga pengurangan sebesar Rp587.236.376,00 yang terdiri dari:

a. Pengurangan aset tetap tanah akibat Hibah ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang sebelumnya tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi sebesar Rp100.200.000,00. dengan luas 20.000 m2 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor: 1060/000.2.4/VIII/2024 dan Pengurangan nilai tanah pada Kecamatan Parbuluan akibat Hibah ke Komando Distrik Militer 0206 Dairi yang sebelumnya tercatat pada Kecamatan Parbuluan sebesar Rp22.702.800,00 dengan Luas 1.600 m2 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor: 1011/000.2.3.2/VI/2024 kemudian dibagi menjadi dua persil dengan perincian sebagai berikut:
   - untuk Kantor Kecamatan Parbuluan seluas 14.680 m^2;
   - untuk tanah yang dihibahkan ke Komando Distrik Militer 0206 Dairi seluas 1.600 m^2;

b. Berkurang akibat mutasi lintas SKPD sebesar Rp464.333.576,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Berkurang pada Dinas PUTR ke Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp74.333.576,00;
   - Berkurang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah ke Inspektorat sebesar Rp120.000.000,00;
   - Berkurang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah ke Kecamatan Sidikalang sebesar Rp135.000.000,00;
   - Berkurang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah ke Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp135.000.000,00.

Tabel 5.77. Perhitungan Mutasi Aset Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari	**393,166,988,572.62**	**392.269.369.504,53**
Koreksi tambah	**0,00**	**0,00**
- Kurang catat	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
Koreksi kurang	**0,00**	**0,00**
- Reklasifikasi	0,00	0,00

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
- Lebih catat	0,00	0,00
Saldo awal 1 Januari setelah rekonsiliasi	**393.166.988.572,62**	**392.269.369.504,53**
Penambahan:	**1.032.117.076,00**	**1,710,854,043.09**
- Belanja Modal	0,00	0,00
- Kapitalisasi	0.00	884,800.00
- Hibah dari masyarakat/lembaga	567.783.500,00	0,00
- Koreksi Pencatatan	0,00	1.709.969.243,09
- Mutasi Lintas SKPD :	464.333.576,00	0,00
- Pemeliharaan	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
Pengurangan:	**(587.236.376,00)**	**(813.234.975,00)**
- Penghapusan	0,00	(813.234.975,00)
- Mutasi Lintas SKPD	(464.333.576,00)	0,00
- Reklasifikasi Antar KIB	0,00	0,00
- Hibah	(122.902.800,00)	0,00
- Lebih Catat	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan	0,00	0,00
Jumlah	**393.611.869.272,62**	**393,166,988,572.62**

Tabel 5.78. Mutasi Aset Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
Saldo Awal per 01 Januari:		
- Jumlah persil	2.219	2.209
- Luas (m^2)	15.510.855,81	15.510.855,81
- Nilai tanah (Rp)	393.166.988.572,62	392.269.369.504,53
Koreksi penyesuaian		
- Jumlah persil	0,00	0,00
- Luas (m^2)	0.00	19,325.45
- Nilai tanah (Rp)	0,00	0,00
Penambahan:		
- Tambahan dalam tahun berjalan		
- Jumlah persil	5	11
- Luas (m^2)	22.788,00	20.326,00
- Nilai tanah (Rp)	567.783.500,00	1.710.854.043,09
Pengurangan:		
- Jumlah persil	1	1
- Luas (m^2)	21.600,00	2.698,00
- Nilai tanah (Rp)	122.902.800,00	813.234.975,00
Jumlah: - Persil	**2.223**	**2.219**
- Luas (m^2)	**15.512.043,81**	**15.547.809,26**
- Nilai (Rp)	**393.611.869.272,62**	**393,166,988,572.62**

Jumlah aset tanah Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2024 yaitu 2.223 persil tanah dengan luas 15.512.043,81m^2, ada koreksi luas tanah berkurang sebesar 35.764,45 m^2 karena hasil kegiatan sertifikasi tanah dimana setelah BPN melakukan pengukuran dalam rangka penerbitan sertifikat tanah luasnya berbeda sehingga luas tanah yang dicatatkan disesuaikan dengan luas tanah pada sertifikat. Bukti kepemilikan tanah Pemerintah Kabupaten Dairi rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.79. Rincian Bukti Kepemilikan Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
Sertifikat Hak Pakai (TANAH BANGUNAN)		
- Jumlah (persil)	590	577
- Luas (m^2)	2.607.935,39	2.541.176,39
- Nilai Buku (Rp)	116.610.676.933,27	116.143.183.533,27
Sertifikat Hak Pakai (TANAH JALAN)		
- Jumlah (persil)	170	160
- Luas (m^2)	543.250,40	492.172,40
- Nilai Buku (Rp)	35.200.850.348,00	35.136.810.348,00
Proses sertifikasi di BPN		
Tanah Bangunan :		
- Jumlah (persil)	9	17
- Luas (m^2)	73.566,00	954.528,00
- Nilai Buku (Rp)	893.281.040,00	3.031.385.755,00
Tanah Jalan :		
- Jumlah (persil)	84	24
- Luas (m^2)	319.842,19	56.118,00
- Nilai Buku (Rp)	12.556.463.990,00	1.726.742.199,00
Belum memiliki sertifikat		
Tanah Bangunan :		
- Jumlah (persil)	109	121
- Luas (m^2)	889.802,00	956.164,00
- Nilai Buku (Rp)	50.106.235.816,00	50.563.004.216,00
Tanah Jalan :		
- Jumlah (persil)	1.023,00	1.034,00
- Luas (m^2)	10.547.860,96	10.599.335,96
- Nilai Buku (Rp)	186.750.339.529,83	186.825.104.529,83
Tanah Irigasi :		
- Jumlah (persil)	327	327
- Luas (m^2)	958.960,51	958.960,51
- Nilai Buku (Rp)	4.498.885.945,52	4.498.885.945,52
Pengusulan sertifikat pengganti		
- Jumlah (persil)	-	-
- Luas (m^2)	-	-
- Nilai Buku (Rp)	-	-
Penambahan		
- Jumlah (persil)	5	11
- Luas (m^2)	22.788,00	20.326,00
- Nilai Buku (Rp)	567.783.500,00	1.710.854.043,09
Pengurangan		
- Jumlah (persil)		
- Luas (m^2)		
- Nilai Buku (Rp)		
Jumlah: - Persil	2.223	2.219
- Luas (m^2)	15.512.043,81	15.547.809,26
- Nilai (Rp)	393.611.869.272,62	393.166.988.572,62

Dari 2.219 persil tanah milik Pemerintah Kabupaten Dairi, terdapat 2 persil tanah yang sedang dalam penyelesaian status kepemilikan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Tanah Rumah Dinas yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang
   Tanah yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja (sebelah Kodim Dairi) adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Dairi sejak Tahun 1980 sesuai gambar dan situasi tanah yang dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Dairi tanggal 28 Mei 1980. Berdasarkan surat ukur yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan No. 22/Sidikalang/1998 tanggal 22 Oktober 1998, luas tanah tersebut adalah 2.775 m2.

   Dari tanah seluas 2.775 m2, diantaranya seluas 940 m2 dikuasai oleh pihak lain dengan sertifikat tanah a.n. Raja Malum Ujung dengan nomor 1568 tanggal 14 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi.
   Proses penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang telah dilalui sebagai berikut:

   1. Pemerintah Kabupaten Dairi telah mengajukan gugatan tanggal 26 Januari 2016 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dengan tergugat Kepala Kantor Pertanahan Dairi dan Objek Gugatan permohonan pembatalan hak atas tanah kepada tergugat. Putusan PTUN Medan Reg. No.09/G/2016/PTUN-MDN tanggal 30 Juni 2016 mengabulkan gugatan Pemerintah Kabupaten Dairi.
   2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi mengajukan memori banding terhadap putusan PTUN Medan No.09/G/2016/PTUN-MDN pada tanggal 8 September 2016 yang disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan. Terhadap memori banding tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi menyampaikan kontra memori banding kepada PTTUN Medan pada tanggal 4 Oktober 2016. Putusan PTTUN Medan Nomor: 163/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 15 Desember 2016 menerima eksepsi pembanding (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi) untuk membatalkan putusan PTUN Medan Nomor 09/G/2016/PTUN-MDN tanggal 30 Juni 2016.
   3. Pemerintah Kabupaten Dairi telah mengajukan memori kasasi terhadap putusan PTTUN Medan Nomor:163/B/2016/PT.TUN-MDN yang disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung tanggal 18 Januari 2017, Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 144K/TUN/2017 pada tanggal 17 April 2017 dengan permohonan untuk membatalkan Putusan PTTUN Medan tersebut. Namun Mahkamah Agung menyatakan bahwa status seritifkat sah atau tidak sebelum status kepemilikan tanah diselesaikan secara perdata.
   4. Bupati Dairi atas nama dan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Dairi telah mengajukan gugatan perdata ke Paniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang sesuai surat gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Sdk tanggal 6 September 2018. Namun berdasarkan putusan PN Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Sdk tanggal 3 September 2019, Majelis memutuskan menolak gugatan tersebut karena tidak memenuhi syarat formil.
   5) Pemerintah Kabupaten Dairi telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Kepala Kejaksaan Negeri Dairi yaitu SKK Nomor: 032/3748 tanggal 14 Agustus 2020 untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan aset rumah dinas dimaksud..

2. Aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Dairi di Desa Silalahi III seluas 15 Ha.
   Tanah yang diperoleh berdasarkan pengadaan tanah dengan ganti rugi tahun 2005 dengan luas 150.000 m2 dengan rincian perolehan dari Drs. Pangihutan Silalahi Sidebang selaku kuasa dari Marga Sidebang seluas 7,5 Ha dan Drs. Martua Situngkir, Ak selaku kuasa dari Marga Situngkir seluas 7,5 Ha.

   Sebagai upaya penertiban, pengamanan dan pemulihan, Pemerintah Kabupaten Dairi telah beberapa kali melakukan pengukuran untuk proses sertifikasi tanah, namun mendapat perlawanan dari kelompok masyarakat. Telah dilakukan beberapa kali upaya dan pertemuan bersama Forkopimda dengan pihak-pihak terkait untuk langkah-langkah persuasif penyelesaian permasalahan, namun belum ada kesepakatan, khususnya dengan pihak Marga Situngkir. Atas kepentingan pelaksanaan pembangunan pengembangan kawasan pariwisata super prioritas nasional, tanah yang diperoleh dari Drs. Pangihutan Silalahi terlebih dahulu ditindaklanjuti dan sudah dilakukan pengukuran dan proses penerbitan sertifikat atas I persil seluas ± 6 Ha dan sertifikat telah terbit seluas 3,6 Ha, sisanya berada dikawasan hutan, dan pembangunan fisik yang didanai DAK Tahun Anggaran 2022 sudah terlaksana. Sedangkan tanah yang berasal dari Marga Situngkir penyelesaiannya menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sidikalang.

   Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 67/Pdt.G/2022/PN Sdk tanggal 9 Juni 2023 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 520/Pdt/2023/PT MDN tanggal 2 Oktober 2023 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3035 K/Pdt/2024 tanggal 10 September 2024 atas perkara Tanah Pemerintah Kabupaten Dairi seluas 75.000 m2 yang beralamat di Rumah Tanggal Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi telah memperoleh putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. 3 Amar putusan pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi sebagai berikut :

a. Putusan Negeri Sidikalang Nomor : 67/Pdt.G/2022/PN Sdk tanggal 9 Juni 2023, dengan amar putusan :
   Dalam Eksepsi
   1) Menyatakan eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Terggugat II tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
   2) Menyatakan eksepsi Terggugat II sampai dengan Tergugat XVI tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
   Dalam Pokok Perkara
   1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
   2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp10.825.000 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

b. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 520/Pdt/2023/PT MDN tanggal 2 Oktober 2023, dengan amar putusan :
   1) Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
   2) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Sdk tanggal 27 Juni 2023, yang dimohonkan banding;
   3) Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3035 K/Pdt/2024 tanggal 10 September 2024, dengan amar putusan :
   1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BUPATI DAIRI tersebut;
   2) Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Klasifikasi nilai aset tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp393.611.869.272,62 sebagai berikut:

Tabel 5.80. Rincian Tanah Berdasarkan Klasifikasi Aset Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Klasifikasi Aset Tanah	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Tanah Kampung	117.009.021.150,00	117.009.021.150,00
2	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	85.620.822.912,95	85.699.185.712,92
3	Tanah Kering	20.685.276.503,00	20.685.276.503,00
4	Tanah Pertanian	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00
5	Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal	9.504.737.178,83	9.504.737.178,83
6	Tanah Persil Lainnya	143.000.000,00	143.000.000,00
7	Tanah Untuk Jalan	124.737.336.850,83	124.734.089.350,83
8	Tanah Lapangan Terbang	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
9	Tanah Untuk Latihan	519.996.000,00	0,00
10	Tanah Lapangan Olah Raga	663.656.251,91	663.656.251,91
11	Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	204.931.000,00	204.931.000,00
12	Tanah Untuk Bangunan Air	4.327.094.039,04	4.327.094.039,04
13	Tanah Untuk Bangunan Jaringan	147.600.000,00	147.600.000,00
14	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	3.911.815.851,92	3.911.815.851,92
15	Tanah Untuk Taman	13.800.000.000,00	13.800.000.000,00
16	Tanah Basah	1.123.672.342,23	1.123.672.342,23
17	Tanah Untuk Bangunan Ged.Perdagangan/Perusahaan	1.291.732.740,00	1.291.732.740,00
18	Tanah Untuk Bangunan Industri	1.060.876.091,91	1.060.876.091,91
19	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	1.499.700.000,00	1.499.700.000,00
20	Lapangan Lainnya	310.600.360,00	310.600.360,00
	Jumlah	**393.611.869.272,62**	**393.166.988.572,62**

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin 510.968.369.420,35 502.302.935.061,05

Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Peralatan dan Mesin sampai terpasang dan siap pakai serta dikuasai, meliputi harga pembelian, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkannya agar dapat digunakan.

Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp510.968.369.420,35 dan Rp502.302.935.061,05 terdapat mutasi penambahan aset peralatan mesin sebesar Rp23.661.831.923,95 dan pengurangan sebesar Rp14.996.397.564,65 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.81. Perhitungan Mutasi Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari	**502.302.935.061,05**	**465.684.208.539,51**
Koreksi tambah	**0,00**	**0,00**
- Kurang catat	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
Sub Jumlah	**0,00**	**0,00**
Koreksi kurang	**0,00**	**0,00**
- Mutasi lintas SKPD	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
- Hibah	0,00	0,00
- Lebih catat	0,00	0,00
- Ekstrakompatabel	0,00	0,00
- Aset lain-lain	0,00	0,00
- Barang Persediaan	0,00	0,00
- Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
Saldo awal 1 Januari setelah rekonsiliasi	**502.302.935.061,05**	**465.684.208.539,51**
Penambahan:	**23.661.831.923,95**	**45.364.102.634,38**
- Belanja Modal	17.448.098.019,00	33.247.679.146
- BM belum dibayar (Utang Jangka Pendek)	5.459.018,00	407.330.000,00
- Kapitalisasi	4.525.000,00	6.397.400,00
- Hibah dari masyarakat/Lembaga	931.484.700,00	1.521.476.016,00
- Koreksi Pencatatan	0,00	15.875.279,00
- Mutasi Lintas SKPD	1.896.894.950,00	1.305.006.400,00
- Persediaan	665.789.379,95	1.012.086.567,88
- Reklasifikasi :	2.709.580.857,00	7.848.251.825,50
a. Antar KIB	2.096.780.347,00	5.853.328.010,50
b. Barang Jasa ke Belanja Modal	612.800.510,00	1.994.923.815,00
c. Belanja Tak Terduga	0,00	0,00
d. Aset Lain-Lain	0,00	0,00
Pengurangan:	**(14.996.397.564,65)**	**(8.745.376.112,84)**
- Penghapusan	0,00	(948.978.500,00)
- Mutasi Lintas SKPD	(1.896.894.950,00)	(1.305.006.400,00)
- Koreksi Pencatatan	0,00	0,00
- Hibah	(322.281.800,00)	(181.282.200,00)
- Lebih Catat	0,00	0,00
- Reklasifikasi :	(12.334.069.319,65)	(6.268.063.738,84)
a. Ekstrakompatabel	(282.048.452,00)	(820.206.159,,00)
b. Barang Persediaan / Barang dan Jasa	(219.672.062,00)	(145.024.529,00)
c. Aset Tak Berwujud	(0,00)	(0,00)

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
d. Antar KIB	(3.448.943.953,00)	(4.065.760.419,00)
d. Aset Lain-lain	(8.383.403.952,65)	(1.237.072.631,84)
- Utang Belanja	(413.762.433,00)	(42.045.274,00)
- TGR	(29.389.062,00)	0,00
Nilai Aset Tetap per 31 Desember	**510.968.369.420,35**	**502.302.935.061,05**

Penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp 23.661.831.923,95 diuraikan sebagai berikut :

a. Belanja modal sebesar Rp17.448.098.019,00;
b. Utang pada Pihak ketiga pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp5.459.018,00;
c. Kapitalisasi sebesar Rp4.525.000,00;
d. Hibah yang diterima sebesar Rp931.484.700,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Hibah yang diperoleh dari BPBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke BPBD Kabupaten Dairi sebesar Rp. 174.770.000,00;
   - Hibah yang diperoleh dari Kementrian Pertanian ke Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp. 455.214.700;
   - Hibah dari PT.Bank Sumut Cabang Sidikalang ke RSUD SIDIKALANG sebesar Rp. 301.500.000;
e. Mutasi lintas SKPD sebesar Rp1.896.894.950,00, dengan rincian sebagai berikut:
   - Bertambah akibat mutasi lintas SKPD dari Sekretariat Daerah ke Badan Penanggulangan Bencana sebesar Rp220.000.000;
   - Bertambah akibat mutasi lintas SKPD dari Sekretariat Daerah ke Rumah Jabatan Bupati sebesar Rp41.433.300;
   - Bertambah akibat mutasi lintas SKPD dari Sekretariat Daerah ke Rumah Jabatan Wakil Bupati sebesar Rp15.681.150;
   - Bertambah akibat mutasi lintas SKPD dari Sekretariat Daerah ke Rumah Dinas Setda sebesar Rp14.380.000;
   - Bertambah akibat mutasi lintas SKPD dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke Dinas PUTR sebesar Rp513.700.000;
   - Bertambah akibat mutasi lintas SKPD dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) sebesar Rp578.000.500;
   - Bertambah akibat mutasi lintas SKPD dari Badan Keuangan dan Aset Daerah ke Dinas PUTR sebesar Rp513.700.000;
f. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp2.096.780.347,00
g. Reklasifikasi Barang Jasa ke Belanja Modal sebesar Rp612.800.510;
h. Reklasifikasi dari persediaan ke belanja modal sebesar Rp665.789.379,95.

Pengurangan nilai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp 14.996.397.564,65, diuraikan sebagai berikut :

a. Pengurangan akibat hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi kepada SD/SMP Swasta dan masyarakat sebesar Rp322.281.800,00dengan rincian sebagai berikut:
   - Peralatan dan mesin yang diberikan melalui Dinas Pendidikan kepada SD dan SMP Swasta sebesar Rp322.281.800,00 yang terdiri dari alat kantor lainnya sebesar Rp41.821.500,00, alat rumah tangga lainnya sebesar Rp88.390.000,00, alat studio sebesar Rp26.160.000,00, alat komunikasi sebesar Rp3.500.000,00, unit alat peraga praktek sekolah sebesar Rp150.080.300,00, personal komputer sebesar Rp9.430.000,00, dan peralatan olahraga- permainan sebesar Rp2.900.000,00;
b. Mutasi lintas SKPD sebesar Rp1.896.894.950,00, dengan rincian sebagai berikut:
   - Berkurang akibat mutasi lintas SKPD pada Sekretariat Daerah ke Badan Penanggulangan Bencana sebesar Rp220.000.000;
   - Berkurang akibat mutasi lintas SKPD pada Sekretariat Daerah ke Rumah Jabatan Bupati sebesar Rp41.433.300;
   - Berkurang akibat mutasi lintas SKPD pada Sekretariat Daerah ke Rumah Jabatan Wakil Bupati sebesar Rp15.681.150;
   - Berkurang akibat mutasi lintas SKPD pada Sekretariat Daerah ke Rumah Dinas Setda sebesar Rp14.380.000;
   - Berkurang akibat mutasi lintas SKPD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke Dinas PUTR sebesar Rp513.700.000;

- Berkurang akibat mutasi lintas SKPD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) sebesar Rp578.000.500;
- Berkurang akibat mutasi lintas SKPD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah ke Dinas PUTR sebesar Rp513.700.000;

c. Pengurangan akibat reklasifikasi antar KIB sebesar Rp3.448.943.953,00;
d. Reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp8.383.403.952,65;
e. Reklasifikasi ke aset ekstrakompatabel sebesar Rp282.048.452,00;
f. Reklasifikasi dari belanja modal ke barang habis pakai sebesar Rp219.672.962,00;
g. Pengurangan akibat TGR sebesar Rp29.389.062,00 pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, dengan rincian sebagai berikut:
   - Piutang atas kegiatan di rumah tanggal belanja modal rambu tak bersuar sebesar Rp28.739.062,00;
   - Pengurangan akibat lebih bayar pada belanja modal mebel sebesar Rp650.000,00;
h. Pengurangan akibat pelunasan utang belanja sebesar Rp413.762.433,00..

Nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp510.968.369.420,35 per klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 5.82. Rincian Peralatan dan Mesin Berdasarkan Klasifikasi per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Klasifikasi Aset Peralatan dan Mesin	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Tractor	2.508.820.000,00	2.508.820.000,00
2	Grader	6.493.685.966,00	6.493.685.966,00
3	Excavator	6.183.904.007,00	6.183.904.007,00
4	Hauler	4.323.870.976,00	4.323.870.976,00
5	Compacting Equipment	5.335.524.482,00	4.996.524.482,00
6	Aggregate And Concrete Equipment	0,00	0,00
7	Loader	4.746.431.052,49	4.746.431.052,49
8	Alat Pengangkat	1.273.092.000,00	573.792.000,00
9	Mesin Proses	1.717.832.505,00	1.717.832.505,00
10	Alat Besar Darat Lainnya	788.150.000,00	788.150.000,00
11	Alat Penarik	466.600,00	466.600,00
12	Feeder	733.100.000,00	733.100.000,00
13	Compressor	40.964.500,00	40.964.500,00
14	Electric Generating Set	1.638.650.196,33	1.629.050.196,33
15	Pompa	703.116.594,00	689.718.594,00
16	Mesin Bor	476.000.000,00	476.000.000,00
17	Unit Pemeliharaan Lapangan	1.153.805.754,00	1.153.805.754,00
18	Alat Pengolahan Air Kotor	0,00	300.393.825,62
19	Perlengkapan Kebakaran Hutan	5.600.000,00	5.600.000,00
20	Alat Bantu Lainnya	638.768.742,00	638.768.742,00
21	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	17.578.813.945,00	17.578.813.945,00
22	Kendaraan Bermotor Penumpang	9.650.430.140,00	9.650.430.140,00
23	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.766.897.979,00	4.766.897.979,00
24	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.341.878.753,00	4.341.878.753,00
25	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	896.064.000,00	723.000.000,00
26	Kendaraan Bermotor Khusus	34.541.183.147,00	33.087.383.147,00
27	Alat Angkutan Kereta Rel	1.260.000,00	1.260.000,00
28	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	242.862.247,00	242.862.247,00
29	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	132.050.433,66	131.200.433,66
30	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	12.850.933,00	12.850.933,00
31	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	781.673.915,00	781.673.915,00
32	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang	118.770.000,00	0,00
33	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	56.000.000,00	0,00

No.	Klasifikasi Aset Peralatan dan Mesin	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
34	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi	215.952.407,00	222.552.407,00
35	Perkakas Konstruksi Logam Yang Transportable (Berpindah)	49.826.319,00	49.826.319,00
36	Perkakas Bengkel Listrik	770.509.002,59	770.509.002,59
37	Perkakas Bengkel Service	2.181.930.858,00	2.181.930.858,00
38	Perkakas Pengangkat Bermesin	230.972.999,95	35.280.000,00
39	Perkakas Bengkel Kayu	187.941.516,48	187.941.516,48
40	Perkakas Bengkel Khusus	79.222.463,00	79.222.463,00
41	Peralatan Las	5.000.000,00	5.000.000,00
42	Perkakas Pabrik Es	24.173.200,00	24.173.200,00
43	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	12.346.000,00	12.346.000,00
44	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	13.640.000,00	13.640.000,00
45	Peralatan Ukur, Gip Dan Feeting	28.135.186,00	28.135.186,00
46	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	134.776.500,00	108.926.500,00
47	Perkakas Bengkel Listrik	59.789.006,21	59.789.006,21
48	Perkakas Bengkel Service	60.853.916,00	60.853.916,00
49	Perkakas Standard (Standard Tools)	255.210.078,99	255.210.078,99
50	Perkakas Khusus (Special Tools)	68.660.438,00	68.660.438,00
51	Perkakas Bengkel Kerja	18.721.045,00	18.721.045,00
52	Peralatan Tukang Besi	27.314.803,00	27.314.803,00
53	Peralatan Tukang Kayu	5.000.000,00	5.000.000,00
54	Alat Ukur Universal	690.417.340,19	690.417.340,19
55	Alat Timbangan/Biara	461.583.599,55	457.883.599,55
56	Anak Timbangan/Biara	296.182.000,00	296.182.000,00
57	Takaran Lainnya	19.910.000,00	454.337.720,00
58	Alat Ukur/Test Klinis Lain	454.337.720,00	19.910.000,00
59	Alat Kalibrasi	249.192.857,00	249.192.857,00
60	Alat Ukur/Pembanding	955.886.606,00	955.886.606,00
61	Alat Ukur Lain-Lain	89.906.500,00	89.906.500,00
62	Alat Ukur Lainnya	1.700.000,00	1.700.000,00
63	Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman	548.136.250,00	91.321.550,00
64	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	406.226.200,00	411.812.200,00
65	Alat Panen	3.800.000,00	3.800.000,00
66	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	83.367.234,00	62.658.234,00
67	Alat Laboratorium Pertanian	388.138.819,00	388.138.819,00
68	Alat Prosesing	250.621.000,00	250.621.000,00
69	Alat Pasca Panen	1.200.000,00	1.200.000,00
70	Alat Produksi Perikanan	55.351.946,00	55.351.946,00
71	Alat-Alat Peternakan	32.786.000,00	32.786.000,00
72	Alat Pengolahan Lainnya	1.691.305.000,00	1.691.305.000,00
73	Mesin Ketik	412.484.365,15	425.555.365,15
74	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	113.598.176,00	113.138.631,00
75	Alat Reproduksi (Penggandaan)	66.894.500,00	66.894.500,00
76	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	16.195.844.684,20	16.345.646.914,91
77	Alat Kantor Lainnya	22.135.535.912,07	21.631.065.639,90
78	Meubelair	61.939.667.739,35	60.438.922.805,07
79	Alat Pengukur Waktu	189.920.114,00	177.440.114,00
80	Alat Pembersih	1.438.710.709,00	1.353.303.261,00
81	Alat Pendingin	1.861.935.018,71	1.733.425.439,98
82	Alat Dapur	970.244.261,52	958.461.327,52
83	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	17.963.423.541,99	17.564.450.030,01

No.	Klasifikasi Aset Peralatan dan Mesin	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
84	Alat Pemadam Kebakaran	399.262.081,08	345.013.081,08
85	Meja Kerja Pejabat	890.067.370,03	889.282.870,03
86	Meja Rapat Pejabat	64.205.000,00	64.205.000,00
87	Kursi Kerja Pejabat	560.677.118,39	557.477.118,39
88	Kursi Rapat Pejabat	77.060.000,00	77.060.000,00
89	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	12.300.000,00	12.300.000,00
90	Lemari Dan Arsip Pejabat	1.535.922.972,46	1.530.780.972,46
91	Peralatan Studio Audio	3.074.692.275,57	2.992.963.810,57
92	Peralatan Studio Video Dan Film	3.889.121.126,83	3.856.997.362,72
93	Peralatan Cetak	331.615.250,00	320.782.250,00
94	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	91.473.034,88	91.473.034,88
95	Alat Studio Lainnya	529.555.959,00	478.655.959,00
96	Alat Komunikasi Telephone	1.015.960.390,43	1.003.310.390,43
97	Alat Komunikasi Radio Ssb	32.063.500,00	32.063.500,00
98	Alat Komunikasi Radio Hf/Fm	8.450.000,00	8.450.000,00
99	Alat Komunikasi Radio Vhf	10.050.000,00	10.050.000,00
100	Alat Komunikasi Radio Uhf	3.461.500,00	3.461.500,00
101	Alat Komunikasi Sosial	328.455.349,41	328.455.349,41
102	Alat-Alat Sandi	25.700.000,00	25.700.000,00
103	Alat Komunikasi Khusus	2.450.000,00	2.450.000,00
104	Alat Komunikasi Digital Dan Konvensional	10.324.117,79	10.324.117,79
105	Alat Komunikasi Lainnya	51.299.090,00	51.299.090,00
106	Peralatan Pemancar Mf/Mw	2.121.571.273,00	2.121.571.273,00
107	Peralatan Pemancar Vhf/Fm	2.500.000,00	0.00
108	Peeralatan Antena Shf/Parabola	54.480.035,93	54.480.035,93
109	Switcher/Menara Antena	399.395.946,92	399.395.946,92
110	Feeder	1.300.000,00	1.300.000,00
111	Humidity Control	28.460.000,00	28.460.000,00
112	Program Input Equipment	34.282.417,28	34.282.417,28
113	Peralatan Pemancar Uhf	2.238.000,00	2.238.000,00
114	Sumber Tenaga	66.620.000,00	66.620.000,00
115	Peralatan Antena Mf/Mw	31.300.000,00	31.300.000,00
116	Peralatan Antena Vhf/Fm	15.590.000,00	15.590.000,00
117	Peralatan Antena Uhf	7.367.000,00	7.367.000,00
118	Peralatan Perlengkapan Radio	5.000.000,00	5.000.000,00
119	Alat Kedokteran Umum	30.311.304.294,77	32.145.920.118,04
120	Alat Kedokteran Anak	4.863.490.164,85	4.955.340.547,87
121	Alat Kedokteran Poliklinik	845.748.851,00	945.386.868,00
122	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	900.348.710,35	1.023.986.329,36
123	Alat Kedokteran Neurologi (Syaraf)	2.535.189.433,00	2.535.189.433,00
124	Alat Kedokteran Jantung	2.266.346.482,80	2.341.483.336,50
125	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	4.746.735.792,00	4.726.311.792,00
126	Alat Kedokteran Radioterapy	75.396.385,00	75.546.798,00
127	Alat Kedokteran Nuklir	425.235.508,86	447.807.043,86
128	Alat Kedokteran Gigi	2.999.369.441,21	2.952.842.738,80
129	Alat Kedokteran Kulit Dan Kelamin	4.862.700,00	168.300,00
130	Alat Kedokteran Gawat Darurat	1.978.984.778,60	2.011.492.178,60
131	Alat Kedokteran Bedah Orthopedi	27.439.595,28	27.439.595,28
132	Alat Kedokteran I C U	705.950.000,00	705.950.000,00
133	Alat Kedokteran I C C U	1.652.250.850,00	1.652.250.850,00

No.	Klasifikasi Aset Peralatan dan Mesin	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
134	Alat Kedokteran Bedah Jantung	890.280.000,00	891.400.000,00
135	Alat Kedokteran Anaesthesi	1.119.137.408,00	338.250.000,00
136	Alat Kedokteran Lainnya	5.078.716.324,18	5.077.616.324,18
137	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	362.825.396,09	481.313.763,17
138	Alat Kedokteran Bedah	8.768.026.491,17	8.610.633.634,51
139	Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan	7.942.071.144,78	7.593.709.342,82
140	Alat Kedokteran Tht	1.771.321.265,88	1.806.063.016,38
141	Alat Kedokteran Mata	167.413.553,96	231.099.023,96
142	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	15.096.531.117,76	14.196.857.424,29
143	Alat Kesehatan Matra Laut	778.500.000,00	780.950.000,00
144	Alat Kesehatan Matra Udara	0,00	3.932.000,00
145	Alat Kesehatan Kepolisian	188.250.000,00	188.756.275,00
146	Alat Kesehatan Umum Lainnya	5.043.130.508,75	5.625.998.708,75
147	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	49.389.400,00	50.054.400,00
148	Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik	9.000.000,00	9.430.300,00
149	Alat Laboratorium Umum	14.449.898.690,40	14.515.341.485,35
150	Alat Laboratorium Microbiologi	1.739.680.343,00	1.756.627.810,00
151	Alat Laboratorium Kimia	784.727.330,00	786.553.330,00
152	Alat Laboratorium Patologi	575.998.137,00	670.293.137,00
153	Alat Laboratorium Immunologi	1.490.000,00	1.658.300,00
154	Alat Laboratorium Hematologi	460.425.700,00	464.683.660,00
155	Alat Laboratorium Film	7.264.676,00	7.264.676,00
156	Alat Laboratorium Makanan	3.462.800,00	3.462.800,00
157	Alat Laboratorium Farmasi	878.730,00	1.361.190,00
158	Alat Laboratorium Micro Biologi Teknik Penyehatan	743.869.000,00	743.869.000,00
159	Alat Laboratorium Fisika	756.381.921,13	756.839.831,13
160	Alat Laboratorium Pembuatan Pola	7.200.000,00	7.200.000,00
161	Alat Laboratorium Proses Pengelasan	168.300,00	168.300,00
162	Alat Laboratorium Hidrokimia	102.262.500,00	102.262.500,00
163	Alat Laboratorium Pelapisan Logam	2.313.263,00	2.313.263,00
164	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	52.000.000,00	52.000.000,00
165	Alat Laboratorium Uji Tekstil	39.548.319,00	39.548.319,00
166	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	17.293.000,00	22.707.000,00
167	Alat Laboratorium Uji Keramik	0,00	3.119.600,00
168	Alat Laboratorium Pertanian	138.483.075,00	148.561.075,00
169	Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya	8.209.633,84	8.209.633,84
170	Alat Laboratorium Energi Surya	40.631.000,00	40.631.000,00
171	Alat Laboratorium Oceanografi	10.335.943,00	10.335.943,00
172	Alat Laboratorium Biologi Perairan	28.125.500,00	28.125.500,00
173	Alat Laboratorium Biologi	405.114.283,96	405.814.283,96
174	Alat Laboratorium Batuan/Geologi	0,00	0,00
175	Alat Laboratorium Tambang	0,00	0,00
176	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	11.350.000,00	11.350.000,00
177	Laboratorium Kearsipan	4.762.900,00	15.163.380,00
178	Laboratorium Hematologi Dan Urinalisis	1.199.873.426,00	1.230.241.782,50
179	Alat Laboratorium Lain	730.627.958,23	728.057.958,23
180	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	201.507.697,08	201.507.697,08
181	Alat Laboratorium Aspal, Cat Dan Kimia	50.268.350,00	50.268.350,00
182	Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan	3.225.000,00	3.422.000,00
183	Alat Laboratorium Cocok Tanam	1.986.620,00	1.986.620,00

No.	Klasifikasi Aset Peralatan dan Mesin	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
184	Unit Alat Laboratorium Lainnya	45.868.074,00	45.868.074,00
185	Instrument Probe/Sensor	4.672.767,00	4.672.767,00
186	General Laboratory Tool	55.774.382,00	57.739.532,00
187	Laboratory Safety Equipment	7.250.000,00	7.500.000,00
188	Glassware Plastic/Utensils	319.400,00	319.400,00
189	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia	4.207.403.029,92	4.203.412.429,92
190	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian	1.367.475.036,24	1.331.544.886,24
191	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga	2.308.666.154,66	2.278.717.254,66
192	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Pkn	119.701.860,95	119.701.860,95
193	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika	3.184.796.860,22	3.185.845.820,22
194	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Dasar	5.040.584.549,72	4.870.184.549,72
195	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Lanjutan	2.767.623.998,02	2.769.636.573,02
196	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Menengah	420.750.113,24	445.261.813,24
197	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Atas	128.823.690,69	128.923.690,69
198	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ips	2.065.799.008,69	2.065.799.008,69
199	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama	73.032.799,49	70.632.799,49
200	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Keterampilan	1.594.019.682,03	1.594.427.782,03
201	Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	6.593.168.203,00	6.587.583.003,00
202	Modular Counting And Scientific Electronic	6.884.400,00	6.884.400,00
203	Recorder Display	14.097.000,00	14.307.000,00
204	System/Power Supply	76.529.876,00	78.379.876,00
205	Measuring/Testing Device	1.405.988,44	1.405.988,44
206	Radiation Detector	197.000,00	197.000,00
207	Alat Ukur Fisika Kesehatan	2.861.420,01	2.861.420,01
208	Alat Kesehatan Kerja	148.750,00	14.338.052,00
209	Proteksi Lingkungan	10.800.108,00	10.800.108,00
210	Non Destructive Test (Ndt) Device	560.000,00	560.000,00
211	Peralatan Hidrologi	252.950.000,00	252.950.000,00
212	Alat Laboratorium Kwalitas Air Dan Tanah	60.076.600,00	63.583.304,00
213	Alat Laboratorium Kwalitas Udara	68.357.660,00	82.029.192,00
214	Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran	14.627.000,00	14.627.000,00
215	Laboratorium Lingkungan	738.665.100,00	39.015.100,00
216	Alat Laboratorium Penunjang	208.942.600,80	215.130.600,80
217	Pemesinan : Ship Model Preparation Shop	10.200.000,00	12.126.500,00
218	Mob	8.400.000,00	8.400.000,00
219	Data Accquisition And Analyzing System	38.534.688,00	38.534.688,00
220	Peralatan Umum	11.775.000,00	11.943.300,00
221	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Lain	59.713.500,00	59.713.500,00
222	Senjata Lain-Lain	24.000.000,00	24.000.000,00
223	Alat Keamanan	383.418.596,64	383.418.596,64
224	Alat Nuklir, Biologi Dan Kimia	600.000,00	600.000,00
225	Alat Dalmas/Alat Dakhura	141.500.000,00	141.500.000,00
226	Komputer Jaringan	1.028.607.242,98	982.057.242,98
227	Personal Komputer	55.563.068.780,82	53.377.718.304,70
228	Komputer Unit Lainnya	858.170.899,99	753.470.899,99
229	Peralatan Mainframe	421.419.161,74	421.419.161,74
230	Peralatan Mini Komputer	702.842.862,61	628.581.862,61
231	Peralatan Personal Komputer	10.496.427.271,18	10.252.494.955,36
232	Peralatan Jaringan	7.618.011.996,95	7.608.117.930,95
233	Peralatan Komputer Lainnya	493.859.520,00	483.420.970,00

No.	Klasifikasi Aset Peralatan dan Mesin	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
234	Sumur Pemboran	45.121.833,00	45.121.833,00
235	Masker	13.800.000,00	0,00
236	Alat Pelindung Lainnya	10.600.000,00	10.600.000,00
237	Alat Sar Lainnya	10.285.000,00	10.285.000,00
238	Alat Pendukung Pencarian	527.654.500,00	353.238.500,00
239	Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	36.025.028,00	36.025.028,00
240	Alat Peraga Pelatihan	9.350.000,00	9.350.000,00
241	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00
242	Transport And Storage Equipment For Liquid	2.840.000,00	2.840.000,00
243	Solid Material Handling Equipment	1.700.000,00	1.700.000,00
244	Rambu Bersuar	1.445.131.491,90	1.445.131.491,90
245	Rambu Tidak Bersuar	10.967.346.814,53	10.967.346.814,53
246	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	114.400.000,00	114.400.000,00
247	Peralatan Olah Raga Atletik	137.291.143,99	134.611.943,99
248	Peralatan Permainan	698.497.145,35	694.997.145,35
249	Peralatan Senam	246.374.902,61	242.874.902,61
250	Paralatan Olah Raga Air	5.557.000,00	5.557.000,00
251	Peralatan Olah Raga Udara	3.939.200,00	3.939.200,00
252	Peralatan Olah Raga Lainnya	1.204.389.522,58	1.204.389.522,58
	Jumlah	**510.968.369.420,35**	**502.302.935.061,05**

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan 819.823.038.901,61 798.362.408.301,19

Nilai aset tetap gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Gedung dan Bangunan sampai siap pakai dan dikuasai meliputi harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak, serta biaya konstruksi dalam kontrak dan biaya lain yang berkaitan dalam memperoleh aktiva tersebut serta mencakup pula biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola.

Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp819.823.038.901,61 dan Rp798.362.408.301,19. Terdapat mutasi penambahan sebesar Rp30.159.865.245,07 dan pengurangan sebesar Rp8.699.234.644,65 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.83. Perhitungan Mutasi Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari	**798.362.408.301,19**	**745.712.628.344,43**
Koreksi tambah	0,00	0,00
- Kurang catat	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
Sub Jumlah	**798.362.408.301,19**	**745.712.628.344,43**
Koreksi kurang	0,00	0,00
- Mutasi lintas SKPD	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
- Hibah	0,00	0,00
- Lebih catat	0,00	0,00
- Aset lain-lain	0,00	0,00
- Barang Persediaan	0,00	0,00
- Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
Saldo awal 1 Januari setelah rekonsiliasi	**798.362.408.301,19**	**745.712.628.344,43**
Penambahan:	**30.159.865.245,07**	**61.148.294.546,79**
- Belanja Modal	22.220.323.063,00	42.398.764.060,35

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
- BM belum dibayar (Utang Jangka Pendek)	0,00	0,00
- Kapitalisasi	689.126.164,00	0,00
- Hibah dari masyarakat/lembaga	0,00	250.000.000,00
- Koreksi Pencatatan	0,00	171.255.522,00
- Mutasi Lintas SKPD	370.696.500,00	511.246.638,00
- Persediaan	358.225.000,00	3.689.548.260,96
- Reklasifikasi :	6.521.494.518,07	14.127.480.065,48
a. Barang Jasa ke Belanja Modal	1.907.318.271,54	3.661.967.225,00
b. Antar KIB	4.614.176.246,53	10.465.512.840,48
c. Ekstrakompatabel	0,00	0,00
Pengurangan:	**(8.699.234.644,65)**	**(8.498.514.590,03)**
- Penghapusan	000	(316.575.000)
- Mutasi Lintas SKPD	(370.696.500,00)	(511.246.638,00)
- Reklasifikasi Antar KIB	(3.189.107.651,65)	(6.354.849.427,03)
- Hibah / Penyertaan Modal	(4.375.814.000,00)	(1.044.181.500,00)
- Lebih Catat	0,00	0,00
- Ekstrakompatabel	0,00	(29.140.000,00)
- Aset lain-lain	0,00	0,00
- Barang Persediaan / Barang dan Jasa	0,00	0,00
- Tuntutan ganti rugi	(378.439.209,00)	(242.522.025,00)
- Utang Belanja	(385.177.284,00)	0,00
Nilai Aset Tetap per 31 Desember	**819.823.038.901,61**	**798.362.408.301,19**

Pertambahan nilai aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp30.159.865.245,07 diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja modal sebesar Rp22.220.323.063,00;
2. Kapitalisasi sebesar Rp689.126.164,00;
3. Mutasi lintas SKPD sebesar Rp370.696.500, dengan rincian sebagai berikut:
   - BKAD akibat mutasi ke Inspektorat sebesar Rp17.010.000,00;
   - BKAD akibat mutasi ke Kecamatan Sidikalang sebesar Rp27.540.000,00;
   - BKAD akibat mutasi ke Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp56.000.000,00;
   - Sekretariat Daerah akibat mutasi ke Rujab Bupati sebesar Rp70.510.000,00;
   - Sekretariat Daerah akibat mutasi ke Rujab Wakil sebesar Rp59.950.000,00;
   - Sekretariat Daerah akibat mutasi ke Rudis Sekda sebesar Rp49.853.000,00;
4. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp4.614.176.246,53;
5. Reklasifikasi Barang Jasa ke Belanja Modal sebesar Rp1.907.318.271,54;
6. Reklasifikasi dari persediaan ke belanja modal sebesar Rp358.225.000,00.

Pengurangan nilai aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp8.699.234.644,65, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengurangan akibat Mutasi Lintas SKPD sebesar Rp370.696.500,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - BKAD akibat mutasi ke Inspektorat sebesar Rp17.010.000,00;
   - BKAD akibat mutasi ke Kecamatan Sidikalang sebesar Rp27.540.000,00;
   - BKAD akibat mutasi ke Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp56.000.000,00;
   - Sekretariat Daerah akibat mutasi ke Rujab Bupati sebesar Rp70.510.000,00;
   - Sekretariat Daerah akibat mutasi ke Rujab Wakil sebesar Rp59.950.000,00;
   - Sekretariat Daerah akibat mutasi ke Rudis Sekda sebesar Rp49.853.000,00;

b. Pengurangan akibat Hibah ke Sekolah Swasta TK sebesar Rp625.590.000,00, Hibah ke Sekolah SWASTA MIS sebesar Rp409.435.000,00 dan Hibah ke Sekolah SWASTA MTs sebesar Rp3.340.789.000,00;

c. Pengurangan akibat reklasifikasi antar KIB sebesar Rp3.189.107.651,65;

d. Pengurangan akibat adanya belanja dibayar dimuka/piutang atas kegiatan di rumah tanggal pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp378.439.209 ,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Belanja dibayar dimuka/piutang atas kegiatan di rumah tanggal Bangunan Fasilitas Umum (TOTEM GEOPARK) sebesar Rp. 193.973.793
   - Belanja dibayar dimuka/piutang atas kegiatan di rumah tanggal Bangunan Fasilitas Umum (Jalur Pejalan Kaki) sebesar RP. 2.415.162

- Belanja dibayar dimuka/piutang atas kegiatan di rumah tanggal Bangunan Fasilitas Umum sebesar (Pekerjaan Media Tanam) Rp.26.006.374
- Belanja dibayar dimuka/piutang atas kegiatan di rumah tanggal Belanja modal taman (lampu taman) sebesar Rp.4.9218.290
- Belanja dibayar dimuka/piutang atas kegiatan di rumah tanggal Belanja modal taman sebesar Rp. 36.188.295
- Belanja dibayar dimuka/piutang atas kegiatan di rumah tanggal Belanja modal pilar/ tugu tanda lainnya (gapura/ gerbang utama geopark) sebesar Rp. 70.637.295
- Berkurang akibat pembayaran utang jangka pendek toilet DAK TWI sebesar Rp385.177.284.

Nilai aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp819.823.038.901,61 dirinci per klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 5.84. Rincian Gedung dan Bangunan Berdasarkan Klasifikasi per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Klasifikasi Aset Gedung dan Bangunan	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor	203.779.899.953,37	193.966.016.645,71
2	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	279.569.576.768,96	276.935.826.589,96
3	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	7.954.947.670,00	7.954.947.670,00
4	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	7.006.270.825,00	6.835.970.825,00
5	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	7.279.300.185,19	7.080.035.185,19
6	Bangunan Gedung Garasi/Pool	861.291.098,00	861.291.098,00
7	Bangunan Gedung Pemotong Hewan	764.976.565,42	764.976.565,42
8	Bangunan Gedung Perpustakaan	35.159.791.407,24	35.159.791.407,24
9	Bangunan Gedung Musium	1.645.174.000,00	1.487.193.000,00
10	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	4.160.019.180,00	4.160.019.180,00
11	Bangunan Pengujian Kelaikan	929.922.366,00	929.922.366,00
12	Bangunan Gudang	3.468.377.617,97	3.243.397.167,97
13	Bangunan Gedung Krematorium	218.900.000,00	218.900.000,00
14	Bangunan Terbuka	99.833.500,00	0,00
15	Bangunan Industri	2.811.116.865,53	0,00
16	Bangunan Peternakan/Perikanan	4.046.969.994,82	4.046.969.994,82
17	Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	3.365.008.958,00	3.215.183.958,00
18	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	38.322.058.008,46	37.436.817.808,46
19	Bangunan Fasilitas Umum	10.323.001.457,59	10.293.978.647,00
20	Bangunan Parkir	674.177.278,13	674.177.278,14
21	Bangunan Gedung Pabrik	374.370.000,00	374.370.000,00
22	Bangunan Stasiun Bus	298.849.500,00	298.849.500,00
23	Taman	146.125.000,00	146.125.000,00
24	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	204.942.000,00	204.942.000,00
25	Bangunan Gedung Instalasi	3.049.021.935,28	3.049.021.935,28
26	Bangunan Gedung Laboratorium	11.458.130.513,72	11.458.130.513,72
27	Bangunan Kesehatan	95.562.145.308,82	92.691.345.888,55
28	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	21.197.954.794,10	21.197.954.794,10
29	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	9.426.977.842,65	9.289.061.653,24
30	Rumah Negara Golongan I	20.123.952.153,08	19.570.552.614,10
31	Rumah Negara Golongan Ii	8.089.041.602,01	7.589.064.002,01
32	Rumah Negara Golongan Iii	14.100.892.154,02	13.877.552.615,04
33	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1.781.829.011,13	1.781.829.011,13
34	Asrama	5.129.247.921,17	5.129.247.921,17

No.	Klasifikasi Aset Gedung dan Bangunan	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
35	Tugu	686.592.443,43	686.592.443,43
36	Bangunan Peninggalan	52.750.000,00	52.750.000,00
37	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	13.916.331.345,41	13.916.331.345,41
38	Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	179.888.000,00	179.888.000,00
39	Bangunan Menara Telekomunikasi	265.264.547,00	265.264.547,00
40	Tugu/Tanda Batas Administrasi	488.882.164,11	488.882.164,11
41	Pagar	566.746.683,00	566.746.683,00
42	Tugu/Tanda Batas Lainnya	282.490.283,00	282.490.283,00
	Jumlah	819.823.038.901,61	798.362.408.301,19

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi 1.918.651.356.899,95 1.837.671.650.168,26

Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Jaringan dan Irigasi sampai siap pakai, namun tidak termasuk nilai tanah dibawah jalan dan saluran irigasi.

Nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.918.651.356.899,95 dan Rp1.837.671.650.168,26. Terdapat mutasi penambahan Rp96.757.595.688,53 dan pengurangan sebesar Rp15.777.888.956,84 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.85. Perhitungan Mutasi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari	**1.837.671.650.168,26**	**1.718.972.162.408,94**
Koreksi tambah	**0,00**	**0,00**
- Kurang catat	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
Sub jumlah	**1.837.671.650.168,26**	**1.718.972.162.408,94**
Koreksi kurang	0,00	0,00
- Mutasi lintas SKPD	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
- Lebih catat	0,00	0,00
- Aset lain-lain	0,00	0,00
- Barang persediaan	0,00	0,00
- Aset tak berwujud	0,00	0,00
Saldo awal 1 Januari setelah rekonsiliasi	**1.837.671.650.168,26**	**1.718.972.162.408,94**
Penambahan :	**96.757.595.688,53**	**130.715.535.580,32**
- Belanja modal	82.813.149.768,88	104.191.838.531,42
- BM belum dibayar (Utang Jangka Pendek)	0,00	0,00
- Kapitalisasi	3.512.306.708,00	0,00
- Hibah dari masyarakat/Lembaga	0,00	0,00
- Koreksi pencatatan	0,00	337.658.689,00
- Mutasi lintas SKPD	1.526.592.370,00	10.832.904.385,00
- Reklasifikasi:	8.905.546.841,65	15.353.133.974,90
a. Barang Jasa ke Belanja Modal	3.088.475.470,00	3.857.495.322,00
b. Antar KIB	3.830.829.351,65	6.778.280.917,90
c. Aset Lain-lain	0,00	337.310.918,00
d. Persediaan	658.914.650,00	1.022.978.017,00
e. Belanja Tak Terduga	1.327.327.370,00	3.357.068.800,00
Pengurangan :	**(15.777.888.956,84)**	**(12.016.047.821,00)**
- Penghapusan	0,00	0,00
- Mutasi Lintas SKPD	(1.526.592.370,0)	(10.832.904.385,00)

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
- Hibah/Penyertaan Modal	0,00	0,00
- Reklasifikasi Antar KIB	(11.153.788.603,00)	(795.420.118,00)
- Ekstrakompatabel	0,00	0,00
- Aset Lain-lain	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan	0,00	0,00
- Barang Persediaan/Barang dan Jasa	(1.885.834.000,00)	0,00
- Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	(239.684.290,96)	(193.683.318,00)
- Utang Belanja	(971.989.692,88)	(194.040.000,00)
Nilai Aset Tetap per 31 Desember	**1.918.651.356.899,95**	**1.837.671.650.168,26**

Pertambahan nilai aset jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp96.757.595.688,53, diuraikan sebagai berikut :

a. Belanja modal sebesar Rp82.813.149.768,88;
b. Kapitalisasi sebesar Rp3.512.306.708,00;
c. Mutasi lintas SKPD sebesar Rp.1.526.592.370,00, dengan rincian sebagai berikut:
   - Bertambah akibat mutasi lintas SKPD pada Dinas PUTR dari BKAD akibat BTT ke jalan lainnya sebesar Rp198.460.000,00;
   - Bertambah akibat mutasi lintas SKPD pada Dinas PUTR dari BKAD akibat BTT ke jalan lainnya sebesar Rp231.372.000;
   - Bertambah akibat mutasi lintas SKPD pada Dinas PUTR dari BKAD akibat BTT ke jalan lainnya sebesar Rp897.495.370;
   - Bertambah akibat mutasi lintas SKPD pada Dinas PUTR dari BPBD sebesar Rp199.265.000.
d. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp3.830.829.351,65;
e. Reklasifikasi dari persediaan ke belanja modal sebesar Rp658.914.650,00;
f. Reklasifikasi dari Belanja Jasa dan Belanja Modal sebesar Rp3.088.475.470,00;

Pengurangan aset jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp15.777.888.956,84, diuraikan sebagai berikut :

1. Mutasi lintas SKPD sebesar Rp1.526.592.370,00, dengan rincian sebagai berikut :
   - Berkurang akibat mutasi lintas SKPD ke Dinas PUTR dari BKAD akibat BTT ke jalan lainnya sebesar Rp198.460.000,00;
   - Berkurang akibat mutasi lintas SKPD ke Dinas PUTR dari BKAD akibat BTT ke jalan lainnya sebesar Rp231.372.000;
   - Berkurang akibat mutasi lintas SKPD ke Dinas PUTR dari BKAD akibat BTT ke jalan lainnya sebesar Rp897.495.370;
   - Berkurang akibat mutasi lintas SKPD pada Dinas PUTR ke BPBD sebesar Rp199.265.000;
2. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp11.153.788.603,00;
3. Reklasifikasi Barang Persediaan/Barang dan Jasa sebesar Rp1.885.834.000,00;
4. Pengurangan akibat adanya pembayaran utang belanja sebesar Rp971.989.692,88, dengan rincian sebagai berikut :
   - Berkurang akibat pembayaran KDP jalan kabupaten tahun 2023 sebesar Rp98.675.000,00;
   - Berkurang akibat pembayaran KDP jalan kabupaten tahun 2023 sebesar Rp119.504.000,00;
   - Berkurang akibat pembayaran KDP jembatan tahun 2023 sebesar Rp121.269.218,00;
   - Berkurang akibat pembayaran utang irigasi tahun 2021 sebesar Rp614.152.874,88;
5. Berkurang akibat pelunasan kekurangan volume dan mutu jalan tahun 2024 sebesar Rp239.684.290,96;
6. Berkurang akibat pelunasan KDP irigasi tahun 2023 sebesar Rp18.388.600,00.

Nilai aset Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.918.651.356.899,95 dirinci per klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 5.86. Rincian Jalan, Jaringan dan Irigasi Berdasarkan Klasifikasi per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Klasifikasi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Jalan Kabupaten	1.414.839.363.032,75	1.352.219.857.685,13
2	Jalan Kota	872.543.850,00	0,00
3	Jalan Desa	54.409.139.054,99	54.373.152.857,57
4	Jalan Khusus	41.439.210.422,71	41.325.290.422,71

No.	Klasifikasi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
5	Jalan Lainnya	1.603.617.730,00	1.603.617.730,00
6	Jembatan Pada Jalan Nasional	1.241.024.882,00	1.241.024.882,00
7	Jembatan Penyeberangan	3.666.948.295,00	3.666.948.295,00
8	Jembatan Pada Jalan Kabupaten	46.448.550.104,00	45.448.724.437,00
9	Jembatan Pada Jalan Desa	504.252.000,00	504.252.000,00
10	Jembatan Pada Jalan Khusus	1.183.235.000,00	1.183.235.000,00
11	Jembatan Pengukur	606.372.418,00	606.372.418,00
12	Bangunan Waduk Irigasi	11.623.018.937,19	10.204.678.937,19
13	Bangunan Pengambilan Irigasi	638.229.506,55	638.229.506,55
14	Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.396.726.216,00	1.396.726.216,00
15	Bangunan Pembawa Irigasi	6.864.956.430,00	6.550.143.430,00
16	Bangunan Pembuang Irigasi	189.193.653.359,10	180.940.743.360,10
17	Bangunan Pengaman Irigasi	503.594.474,38	503.594.474,38
18	Saluran Pembuang Pasang Surut	62.306.605,00	62.306.605,00
19	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	39.422.689,00	39.422.689,00
20	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	502.201.790,00	502.201.790,00
21	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1.573.424.817,00	1.573.424.817,00
22	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	4.107.516.242,00	4.107.516.242,00
23	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	10.499.883.958,00	10.499.883.958,00
24	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	164.500.000,00	164.500.000,00
25	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	59.584.000,00	59.584.000,00
26	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	637.442.018,19	637.442.018,19
27	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	3.157.805.605,00	0,00
28	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	1.647.998.000,00	1.647.998.000,00
29	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	2.435.728.000,00	2.435.728.000,00
30	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	259.405.601,00	259.405.601,00
31	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	12.297.393.116,52	12.297.393.116,52
32	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	4.025.654.221,00	3.966.831.805,35
33	Bangunan Pembuang Air Kotor	3.131.204.169,00	3.131.204.169,00
34	Bangunan Pengaman Air Kotor	1.031.350.000,00	1.031.350.000,00
35	Bangunan Air Kotor Lainnya	1.888.022.692,66	1.888.022.692,66
36	Instalasi Air Permukaan	201.060.139,48	201.060.139,48
37	Instalasi Air Sumber / Mata Air	9.117.012,00	9.117.012,00
38	Instalasi Air Tanah Dalam	286.719.980,52	286.719.980,52
39	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	18.481.872.008,00	17.623.872.008,00
40	Instalasi Air Buangan Domestik	34.220.370.272,32	34.220.370.272,32
41	Instalasi Air Kotor Lainnya	1.604.835.493,59	437.335.493,59
42	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	395.750.000,00	395.750.000,00
43	Bangunan Penampung Sampah	199.800.000,00	199.800.000,00
44	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	1.691.300.000,00	1.691.300.000,00
45	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	138.315.500,00	138.315.500,00
46	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (Plta)	41.938.000,00	41.938.000,00
47	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (Pltm)	496.193.770,00	496.193.770,00
48	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Plts)	5.597.300.000,00	5.597.300.000,00
49	Instalasi Gardu Listrik Induk	364.096.376,32	364.096.376,32
50	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	237.161.718,68	237.161.718,68
51	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	628.039.348,00	628.039.348,00

No.	Klasifikasi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
52	Instalasi Gas Lainnya	264.500.000,00	0,00
53	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	210.850.150,00	210.850.150,00
54	Instalasi Pengolahan Limbah Radio Aktif	3.211.483.368,00	3.211.483.368,00
55	Jaringan Pembawa	3.873.617.009,00	3.773.717.009,00
56	Jaringan Sambungan Ke Rumah	11.836.689.238,00	11.836.689.238,00
57	Jaringan Air Minum Lainnya	192.650.517,00	192.650.517,00
58	Jaringan Transmisi	3.744.369.942,00	2.999.035.292,00
59	Jaringan Distribusi	1.808.998.063,00	1.808.998.063,00
60	Jaringan Listrik Lainnya	2.237.940.157,00	2.237.940.157,00
61	Jaringan Telepon Diatas Tanah	1.365.566.000,00	1.365.566.000,00
62	Jaringan Dengan Media Udara	587.708.800,00	587.708.800,00
63	Jaringan Telepon Lainnya	167.834.800,00	167.834.800,00
	Jumlah	**1.918.651.356.899,95**	**1.837.671.650.168,26**

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya 120.655.139.802,97 112.527.483.141,97

Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai. Aset Tetap Lainnya merupakan seluruh Aset Tetap yang tidak dapat diklasifikasi sebagai aset Tetap tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan maupun Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp120.655.139.802,97 dan Rp112.527.483.141,97. Terdapat mutasi penambahan sebesar Rp8.733.189.958,00 dan pengurangan sebesar Rp605.533.297,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.87. Perhitungan Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari	**112.527.483.141,97**	**105.209.568.590,99**
Koreksi tambah	0,00	0,00
- Kurang catat	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
Sub Jumlah	**112.527.483.141,97**	**105.209.568.590,99**
Koreksi kurang	0,00	0,00
- Mutasi lintas SKPD	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
- Hibah	0,00	0,00
- Lebih catat	0,00	0,00
- Aset Lain-lain	0,00	0,00
- Barang Persediaan	0,00	0,00
- Ekstrakompatabel	0,00	0,00
Saldo awal 1 Januari setelah rekonsiliasi	**112.527.483.141,97**	**105.209.568.590,99**
Penambahan :	**8.733.189.958,00**	**7.907.826.930,00**
- Belanja Modal	7.733.870.580,00	7.906.975.530,00
- BM belum dibayar (Utang Jangka Pendek)	0,00	0,00
- Kapitalisasi	7.025.000,00	0,00
- Hibah dari masyarakat/Lembaga	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan	0,00	0,00
- Mutasi Lintas SKPD	0,00	0,00
- Reklasifikasi:	992.294.378,00	851.400,00
- Barang Jasa ke Belanja Modal	0,00	0,00
- Persediaan	935.609.420,00	0,00
- Antar KIB	56.684.958,00	851.400,00

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
- Ekstra Kompatabel	0,00	0,00
Pengurangan :	**(605.533.297,00)**	**(589.912.379,02)**
- Penghapusan	0,00	0,00
- Mutasi Lintas SKPD	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar KIB	(11.427.000,00)	(16.400.000)
- Hibah	(266.337.800,00)	(196.207.900,00)
- Koreksi Pencatatan	(0.02)	(0.02)
- Ekstrakompatabel	(327.768.497,00)	(372.227.829,00)
- Aset Lain-lain	0,00	0,00
- Barang Persediaan	0,00	0,00
- Aset Tak Berwujud	0,00	(5.076.650,00)
Nilai Aset Tetap per 31 Desember	**120.655.139.802,97**	**112.527.483.141,97**

Pertambahan nilai aset tetap lainnya sebesar Rp8.733.189.958,00, diuraikan sebagai berikut :
1. Belanja modal sebesar Rp7.733.870.580,00;
2. Kapitalisasi sebesar Rp7.025.000,00;
3. Reklasifikasi dari persediaan ke belanja modal sebesar Rp935.609.420,00;
4. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp56.684.958,00.

Pengurangan nilai aset tetap lainnya sebesar Rp605.533.297,00, diuraikan sebagai berikut :
a. Hibah melalui Dinas Pendidikan ke SD/SMP Swasta berupa buku dan kepustakaan sebesar Rp257.737.800,00 dan barang bercorak dan kesenian sebesar Rp8.600.000,00;
b. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp11.427.000,00;
c. Reklasifikasi ke Ekstrakompatabel sebesar Rp327.768.497,00.

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp120.655.139.802,97 dirinci per klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 5.88. Rincian Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Klasifikasi per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Klasifikasi Aset Tetap Lainnya	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Buku Umum	56.750.269.184,92	51.671.932.984,92
2	Buku Filsafat	836.952.174,32	789.193.074,32
3	Buku Agama	4.888.829.797,42	4.561.790.270,42
4	Buku Ilmu Sosial	8.253.873.488,50	8.021.246.778,50
5	Buku Ilmu Bahasa	14.995.204.265,33	14.204.923.105,33
6	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	24.110.535.572,99	22.803.147.301,99
7	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	1.216.946.935,25	1.167.819.635,25
8	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	5.215.157.339,00	5.003.150.346,00
9	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	620.252.958,37	607.042.458,37
10	Serial	101.361.583,36	101.361.583,36
11	Buku Laporan	356.165.528,47	356.165.528,47
12	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	47.851.000,00	32.941.000,00
13	Audio Visual	317.785.548,69	308.203.648,69
14	Bentuk Mikro (Microform)	10.890.000,00	10.890.000,00
15	Bahan Kartografi	799.862.846,68	799.862.846,68
16	Naskah (Manuskrip)/Asli	39.748.000,00	39.748.000,00
17	Lukisan dan Ukiran	0,00	9.692.100,00
18	Karya Musik	42.764.900,00	42.764.900,00
19	Musik Lainnya	30.300.000,00	30.300.000,00
20	Karya Grafika (Graphic Material)	67.118.817,63	67.118.817,63
21	Three Dimensional Artifacts and Realita	19.025.176,00	19.025.176,00
22	Tarscalt	67.593.350,00	67.593.350,00

No.	Klasifikasi Aset Tetap Lainnya	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
23	Alat Musik	1.007.159.368,99	961.770.368,99
24	Lukisan	114.987.542,76	105.295.442,76
25	Barang Bercorak Kesenian Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00
26	Pahatan	60.752.996,63	60.752.996,63
27	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	249.705.581,00	249.705.581,00
28	Barang Kerajinan	41.831.752,85	41.831.752,85
29	Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	11.555.895,01	11.555.895,01
30	Tanaman	379.458.198,80	379.458.198,80
	Jumlah	120.655.139.802,97	112.527.483.141,97

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 12.223.803.341,73 4.588.300.394,26

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp12.223.803.341,73 dan Rp4.588.300.394,26. Pada TA 2024 terdapat penambahan sebesar Rp12.446.320.312,00 dan pengurangan sebesar Rp4.810.817.364,53 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.89. Perhitungan Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari	**4.588.300.394,26**	**16.290.489.824,11**
Penambahan:	**12.446.320.312,00**	**3.401.105.002,53**
- Kapitalisasi	0,00	0,00
- Utang	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan	0,00	0,00
- Mutasi Lintas SKPD	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar KIB	12.373.450.487,00	3.058.615.827,53
- Belanja Jasa Belanja Modal	0,00	0,00
- Pemeliharaan	72.869.825,00	342.489.175,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap (Progress Fisik Belum Selesai)	0,00	0,00
Pengurangan:	**(4.810.817.364,53)**	**(15.103.294.432,38)**
- Penghapusan	(0,00)	(0,00)
- Mutasi Lintas SKPD	(0,00)	(0,00)
- Reklasifikasi ke Aset Tetap (KDP telah selesai dikerjakan)	(0,00)	(0,00)
- Lebih Catat	(0,00)	(0,00)
- Reklas antar KIB	(4.810.817.364,53)	(15.103.294.432,38)
- Aset Lain – lain	(0,00)	(0,00)
- Tuntutan ganti rugi (TGR)	(0,00)	(0,00)
Saldo Akhir per 31 Desember	**12.223.803.341,73**	**4.588.300.394,26**

Pertambahan nilai konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp12.446.320.312,00, diuraikan sebagai berikut ;

a. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp12.373.450.487,00;
b. Reklasifikasi dari belanja pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja (Rehap Gedung LKP) pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp72.869.825,00;

Pengurangan nilai konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp4.810.817.364,53, diuraikan sebagai berikut:

a. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp4.810.817.364,53.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebagaimana telah dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan 5.3.1.3.1; 5.3.1.3.2; 5.3.1.3.3; 5.3.1.3.4; 5.3.1.3.5 dan 5.3.1.3.6; tidak termasuk Aset Ekstrakomptabel, yaitu Aset Tetap yang nilainya di bawah nilai minimum kapitalisasi (sebesar Rp300.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.90. Rekapitulasi Aset Ekstrakomptabel per 31 Desember 2024 dan 2023

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	12.830.197,31	12.830.197,31	0,00

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Manusia			
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.142.800,00	5.142.800,00	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	97.201.000,00	110.701.000,00	(13.500.000,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.414.806,90	30.339.806,90	(3.925.000,00)
Badan Pendapatan Daerah	7.352.000,00	7.352.000,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	20.390.000,00	20.390.000,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28.003.300,00	28.003.300,00	0,00
Dinas Kesehatan	325.508.629,87	529.356.570,30	(203.847.940,43)
Dinas Komunikasi dan Informatika	613.571.313,63	613.571.313,63	(16.358.000,00)
Dinas Lingkungan Hidup	126.836.875,00	126.836.875,00	0,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	708.635.678,16	708.635.678,16	(256.433.613,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	66.102.338,71	66.102.338,71	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.601.500,00	13.979.000,00	(8.377.500,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	9.587.991,00	9.587.991,00	0,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	37.624.000,00	37.624.000,00	(89.000,00)
Dinas Pendidikan	53.734.495.109,27	45.996.257.569,27	7.738.237.540,00
Dinas Perhubungan	248.939.750,00	236.416.250,00	5.566.000,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	170.413.225,72	169.203.225,72	1.210.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	41.277.687,33	41.277.687,33	0,00
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	225.374.657,00	225.374.657,00	0,00
Dinas Sosial	19.860.770,00	19.860.770,00	0,00
Inspektorat	8.623.000,00	8.623.000,00	0,00
Kecamatan Berampu	19.532.600,00	37.816.100,00	(18.283.500,00)
Kecamatan Gunung Sitember	45.533.000,00	45.533.000,00	0,00
Kecamatan Lae Parira	30.258.000,00	30.258.000,00	0,00
Kecamatan Parbuluan	41.161.500,00	41.161.500,00	0,00
Kecamatan Pegagan Hilir	39.079.600,00	39.079.600,00	0,00
Kecamatan Sidikalang	89.148.350,00	75.648.350,00	13.500.000,00
Kecamatan Siempat Nempu	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00
Kecamatan Siempat Nempu Hilir	32.940.000,00	17.940.000,00	15.000.000,00
Kecamatan Siempat Nempu Hulu	16.510.000,00	18.312.000,00	(1.802.000,00)
Kecamatan Silahisabungan	23.838.800,00	28.365.000,00	(4.526.200,00)
Kecamatan Silima Pungga-Pungga	16.099.875,00	16.099.875,00	0,00
Kecamatan Sitinjo	17.740.500,00	17.740.500,00	0,00
Kecamatan Sumbul	138.996.548,00	145.702.478,00	(6.705.930,00)
Kecamatan Tanah Pinem	35.278.750,00	35.278.750,00	0,00
Kecamatan Tigalingga	22.669.800,00	22.669.800,00	0,00
RSUD Sidikalang	176.873.872,00	176.873.872,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	27.255.000,00	27.255.000,00	0,00
Sekretariat Daerah	183.142.838,94	183.142.838,94	0,00
Sekretariat DPRD	16.940.000,00	16.940.000,00	0,00
Jumlah	**57.517.245.663,84**	**49.997.742.694,27**	**7.239.664.856,57**

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (2.286.034.473.355,58) (1.858.430.027.646,22)

Berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi, dilakukan penghitungan penyusutan aset tetap, yaitu : aset tetap peralatan dan mesin, aset tetap gedung dan bangunan dan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan. Sedangkan aset tetap tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan.

Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.286.034.473.355,58 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.91. Perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Jenis Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	Akumulasi Penyusutan per 1 Januari 2024	Mutasi Tambah/(Kurang)	Beban Penyusutan 2024	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024
1	Peralatan dan Mesin	(392.701.154.136,46)	(414.625.004.192,22)	7.892.199.774,81	(37.634.672.734,73)	(444.367.477.152,14)
2	Gedung dan Bangunan	(354.928.819.333,00)	(340.588.455.153,62)	11.605.600,00	(27.633.289.555,51)	(368.210.139.109,13)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.110.800.054.176,76)	(1.428.057.089.422,37)	5.600.314.869,60	(51.000.082.541,54)	(1.473.456.857.094,31)
	Jumlah	**(1.858.430.027.646,22)**	**(2.183.270.548.768,21)**	**13.504.120.244,41**	**(116.268.044.831,78)**	**(2.286.034.473.355,58)**

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.286.034.473.355,58. Apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.183.270.548.768,21 , nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 102.763.924.587,37.

Adapun penghitungan nilai buku aset tetap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.92. Perhitungan Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2024

No.	Jenis Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	393.611.869.272,62	0,00	393.611.869.272,62
2	Peralatan dan Mesin	510.968.369.420,35	(444.367.477.152,14)	66.600.892.268,21
3	Gedung dan Bangunan	819.823.038.901,61	(368.210.139.109,13)	451.612.899.792,48
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.918.651.356.899,95	(1.473.456.857.094,31)	445.194.499.805,64
5	Aset Tetap Lainnya	120.655.139.802,97	0,00	120.655.139.802,97
6	Kontruksi Dalam Pengerjaan	12.223.803.341,73	0,00	12.223.803.341,73
	Jumlah	**3.775.933.577.639,23**	**(2.286.034.473.355,58)**	**1.489.899.104.283,65**

5.3.1.3.7.1 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin (444.367.477.152,14) (392.701.154.136,46)

Awal tahun 2024 Akumulasi Penyusutan dilakukan koreksi/perbaikan pencatatan aset tetap pada aplikasi pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Dairi, sehingga berdampak pada perubahan nilai akumulasi penyusutan aset tetap per tanggal 1 januari 2024. Koreksi dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dalam prosedur penginputan yang dilakukan oleh pengurus barang OPD/Operator E-BMD OPD pada aplikasi pada aplikasi pengelolaan barang milik daerah yang mengakibatkan adanya nilai aset dan nilai penyusutan yang tidak masuk dalam neraca, sehingga setelah dilakukan koreksi/perbaikan data berupa ubah kondisi dan ubah riwayat, terjadi perubahan nilai aset tetap dan nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 1 Januari 2024.

Adapun nilai yang terkoreksi yaitu Nilai Akumulasi Penyusutan Aset tetap audited 2023 sebesar Rp392.701.154.136,50 bertambah dengan koreksi nilai Akumulasi Penyusutan aset tetap tahun 2023 sebesar Rp21.923.850.055,72 sehingga saldo awal Akumulasi Penyusutan aset tetap per tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp414.625.004.192,22. Rekapitulasi dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.93. Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2024	Mutasi Tambah/ Kurang Tahun 2024	Beban Penyusutan 2024	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=4+5+6)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(925.629.676,72)	(948.156.501,69)	0,00	(7.997.500,00)	(956.154.001,69)
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(401.788.452,12)	(419.453.790,00)	(578.000.500,00)	(24.223.740,00)	(1.021.678.030,00)
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(5.463.025.832,06)	(5.693.146.172,73)	0,00	(533.194.909,53)	(6.226.341.082,26)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(10.444.778.211,28)	(10.633.747.534,23)	(186.204.285,71)	(366.768.577,66)	(11.186.720.397,60)
5	Badan Pendapatan Daerah	(3.493.834.706,37)	(3.566.065.905,58)	0,00	(82.205.808,58)	(3.648.271.714,16)
6	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	(1.813.281.752,55)	(1.886.251.614,50)	0,00	(50.659.392,25)	(1.936.911.006,75)
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(5.842.899.914,64)	(6.241.957.825,58)	0,00	(433.738.140,13)	(6.675.695.965,71)
8	Dinas Kesehatan	(44.767.579.358,17)	(47.730.020.422,30)	7.475.130.144,81	(7.107.113.660,82)	(47.362.003.938,31)

No.	Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2024	Mutasi Tambah/ Kurang Tahun 2024	Beban Penyusutan 2024	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=4+5+6)
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	(11.038.242.316,91)	(11.576.619.294,11)	0,00	(600.453.487,09)	(12.177.072.781,20)
10	Dinas Lingkungan Hidup	(10.712.154.392,19)	(11.346.832.956,66)	0,00	(1.732.943.390,24)	(13.079.776.346,90)
11	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	(4.986.439.855,96)	(5.205.248.312,92)	0,00	(425.693.403,57)	(5.631.941.716,49)
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(21.480.204.158,22)	(22.438.267.069,23)	(73.385.714,29)	(1.147.925.759,09)	(23.659.578.542,61)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(1.296.670.641,11)	(1.354.307.887,60)	313.613.805,00	(76.001.673,30)	(1.116.695.755,90)
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(4.712.090.263,83)	(5.127.127.469,17)	578.000.500,00	(417.175.395,20)	(4.966.302.364,37)
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	(1.949.375.339,94)	(2.040.169.409,35)	0,00	(70.539.268,42)	(2.110.708.677,77)
16	Dinas Pendidikan	(113.698.207.190,13)	(121.353.664.430,18)	0,00	(9.978.963.692,40)	(131.332.628.122,58)
17	Dinas Perhubungan	(18.518.970.720,49)	(19.409.513.224,76)	0,00	(383.919.692,27)	(19.793.432.917,03)
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(5.793.803.439,23)	(6.136.628.854,80)	0,00	(1.175.912.884,32)	(7.312.541.739,12)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(2.579.649.136,99)	(2.682.334.772,02)	0,00	(347.010.570,71)	(3.029.345.342,73)
20	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	(8.143.832.643,24)	(8.507.853.557,17)	(113.803.675,00)	(603.967.945,59)	(9.225.625.177,76)
21	Dinas Sosial	(1.061.676.996,99)	(1.087.180.269,72)	92.717.500,00	(124.910.914,71)	(1.119.373.684,43)
22	Inspektorat Daerah	(1.897.800.495,05)	(1.979.767.161,72)	0,00	(281.440.285,71)	(2.261.207.447,43)
23	Kecamatan Berampu	(552.373.891,33)	(568.439.472,46)	0,00	(27.466.077,68)	(595.905.550,14)
24	Kecamatan Gunung Sitember	(694.708.150,00)	(738.231.040,00)	0,00	(14.423.520,00)	(752.654.560,00)
25	Kecamatan Lae Parira	(647.627.622,55)	(672.389.882,28)	0,00	(60.425.442,86)	(732.815.325,14)
26	Kecamatan Parbuluan	(678.180.279,11)	(708.885.310,86)	0,00	(52.228.285,71)	(761.113.596,57)
27	Kecamatan Pegagan Hilir	(740.092.424,67)	(763.148.939,00)	0,00	(26.610.537,00)	(789.759.476,00)
28	Kecamatan Sidikalang	(1.360.149.566,52)	(1.425.612.478,64)	0,00	(60.211.516,04)	(1.485.823.994,68)
29	Kecamatan Siempat Nempu	(568.410.373,47)	(589.883.703,00)	0,00	(37.880.530,71)	(627.764.233,71)
30	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	(728.723.384,67)	(753.594.153,71)	0,00	(51.347.718,86)	(804.941.872,57)
31	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	(657.688.878,00)	(680.519.758,00)	106.877.000,00	(54.084.785,00)	(627.727.543,00)
32	Kecamatan Silahisabungan	(762.939.600,00)	(800.564.975,00)	0,00	(17.947.462,50)	(818.512.437,50)
33	Kecamatan Silima PunggaPungga	(1.019.599.946,33)	(1.058.908.755,50)	0,00	(56.672.522,50)	(1.115.581.278,00)
34	Kecamatan Sitinjo	(658.809.966,00)	(717.943.392,64)	0,00	(71.163.563,93)	(789.106.956,57)
35	Kecamatan Sumbul	(836.617.120,00)	(890.950.627,85)	0,00	(35.510.839,29)	(926.461.467,14)
36	Kecamatan Tanah Pinem	(871.249.626,34)	(909.127.927,29)	0,00	(38.018.953,57)	(947.146.880,86)
37	Kecamatan Tigalingga	(818.628.039,97)	(839.627.753,00)	0,00	(48.271.440,00)	(887.899.193,00)
38	RSUD	(75.687.964.496,56)	(79.290.256.714,29)	0,00	(8.598.811.395,37)	(87.889.068.109,66)
39	Satuan Polisi Pamong Praja	(2.165.544.508,18)	(2.200.214.026,79)	0,00	(103.424.521,78)	(2.303.638.548,57)
40	Sekretariat Daerah	(17.676.671.499,81)	(18.655.424.546,38)	277.255.000,00	(1.390.256.628,31)	(19.768.426.174,69)
41	Sekretariat DPRD	(4.553.239.268,80)	(4.995.966.299,51)	0,00	(917.156.902,03)	(5.913.123.201,54)
	Jumlah	**(392.701.154.136,50)**	**(414.625.004.192,22)**	**7.892.199.774,81**	**(37.634.672.734,73)**	**(444.367.477.152,14)**

Terdapat mutasi tambah/kurang Tahun 2024 sebesar Rp7.892.199.774,81, diuraikan sebagai berikut :

1. Bertambah karena mutasi masuk dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp578.000.500,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

2. Bertambah karena Hibah Masuk dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp39.590.000,00 ,mutasi masuk dari Sekretariat Daerah sebesar Rp220.000.000,00 ,dan berkurang karena Mutasi Keluar ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp73.385.714,29 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Berkurang karena reklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain (rusak berat) sebesar Rp7.475.130.144,81 pada Dinas Kesehatan;
4. Bertambah karena mutasi masuk dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp73.385.714,29 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
5. Berkurang karena reklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain (rusak berat) sebesar Rp313.613.805,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. Berkurang karena mutasi keluar ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp578.000.500,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
7. Bertambah karena hibah masuk dari Kementerian Pertanian sebesar Rp113.803.675,00 pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
8. Berkurang karena reklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain (rusak berat) sebesar Rp92.717.500,00 pada Dinas Sosial;
9. Berkurang karena reklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain (rusak berat) sebesar Rp106.877.000,00 pada Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
10. Berkurang karena mutasi keluar ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp220.000.000,00 pada Sekretariat Daerah dan reklasifikasi asset tetap ke asset lain-lain (rusak berat) sebesar Rp57.255.000,00.

5.3.1.3.7.2 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan **(368.210.139.109,13)** **(354.928.819.333,00)**

Awal tahun 2024 Akumulasi Penyusutan dilakukan koreksi/perbaikan pencatatan aset tetap pada aplikasi pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Dairi, sehingga berdampak pada perubahan nilai akumulasi penyusutan aset tetap per tanggal 1 januari 2024. Koreksi dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dalam prosedur penginputan yang dilakukan oleh pengurus barang OPD/Operator E-BMD OPD pada aplikasi pada aplikasi pengelolaan barang milik daerah yang mengakibatkan adanya nilai aset dan nilai penyusutan yang tidak masuk dalam neraca, sehingga setelah dilakukan koreksi/perbaikan data berupa ubah kondisi dan ubah riwayat, terjadi perubahan nilai aset tetap dan nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 1 Januari 2024.

Adapun nilai yang terkoreksi yaitu Nilai Akumulasi Penyusutan Aset tetap audited 2023 sebesar Rp354.928.819.332,99 berkurang dengan koreksi nilai Akumulasi Penyusutan aset tetap tahun 2023 sebesar Rp14.340.364.179,37 sehingga saldo awal Akumulasi Penyusutan aset tetap per tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp340.588.455.153,62. Rekapitulasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.94. Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2024	Mutasi Tambah/ Kurang Tahun 2024	Beban Penyusutan 2024	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=4+5+6)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(778.409.909,58)	(856.364.693,65)	0,00	(78.751.335,79)	(935.116.029,44)
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(514.041.310,47)	(547.762.392,64)	0,00	(33.721.082,16)	(581.483.474,80)
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(1.335.269.524,25)	(1.319.891.120,88)	60.330.000,00	(74.036.221,53)	(1.333.597.342,41)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(904.525.936,34)	(1.024.757.862,67)	0,00	(106.739.165,09)	(1.131.497.027,76)
5	Badan Pendapatan Daerah	(778.706.835,79)	(721.690.907,20)	0,00	(43.452.794,40)	(765.143.701,60)
6	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	(375.534.739,61)	(420.470.541,67)	0,00	(43.279.587,50)	(463.750.129,17)
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(262.068.103,38)	(328.286.474,50)	0,00	(75.557.587,42)	(403.844.061,92)
8	Dinas Kesehatan	(44.551.187.920,40)	(49.392.096.043,09)	0,00	(3.749.754.216,66)	(53.141.850.259,75)
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	(632.278.323,39)	(674.470.022,71)	0,00	(51.833.926,08)	(726.303.948,79)
10	Dinas Lingkungan Hidup	(2.567.189.276,02)	(3.199.091.310,34)	0,00	(898.059.755,57)	(4.097.151.065,91)
11	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	(27.359.576.292,55)	(28.929.180.417,11)	(33.600.000,00)	(2.521.108.916,80)	(31.483.889.333,91)

No.	Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2024	Mutasi Tambah/ Kurang Tahun 2024	Beban Penyusutan 2024	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=4+5+6)
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(4.640.709.137,54)	(5.024.349.144,25)	0,00	(505.508.261,27)	(5.529.857.405,52)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(411.358.133,33)	(418.183.666,67)	0,00	(28.212.200,00)	(446.395.866,67)
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(1.540.026.367,81)	(1.869.278.494,33)	0,00	(202.368.980,36)	(2.071.647.474,69)
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	(4.049.472.336,76)	(2.954.542.664,65)	0,00	(169.775.087,26)	(3.124.317.751,91)
16	Dinas Pendidikan	(182.310.922.032,90)	(172.458.018.170,91)	0,00	(13.351.702.710,51)	(185.809.720.881,42)
17	Dinas Perhubungan	(3.679.844.422,52)	(3.968.574.306,33)	0,00	(279.007.860,64)	(4.247.582.166,97)
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(7.421.406.185,63)	(5.488.525.437,96)	0,00	(703.190.271,71)	(6.191.715.709,67)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(1.101.634.340,40)	(883.236.645,71)	0,00	(399.452.007,76)	(1.282.688.653,47)
20	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	(7.704.453.172,51)	(8.527.227.586,35)	0,00	(764.128.490,84)	(9.291.356.077,19)
21	Dinas Sosial	(1.646.208.187,22)	(1.154.099.834,92)	0,00	(83.525.880,24)	(1.237.625.715,16)
22	Inspektorat Daerah	(966.750.927,08)	(645.635.983,33)	(10.206.000,00)	(45.538.846,49)	(701.380.829,82)
23	Kecamatan Berampu	(472.536.000,00)	(457.280.666,67)	0,00	(27.178.000,00)	(484.458.666,67)
24	Kecamatan Gunung Sitember	(314.981.666,67)	(335.980.000,00)	0,00	(20.998.333,33)	(356.978.333,33)
25	Kecamatan Lae Parira	(486.130.193,07)	(543.612.883,87)	0,00	(57.482.690,80)	(601.095.574,67)
26	Kecamatan Parbuluan	(372.444.594,59)	(408.833.333,34)	0,00	(22.483.333,33)	(431.316.666,67)
27	Kecamatan Pegagan Hilir	(829.505.375,47)	(812.840.518,38)	0,00	(70.925.408,94)	(883.765.927,32)
28	Kecamatan Sidikalang	(1.326.978.212,74)	(1.225.492.350,33)	(16.524.000,00)	(88.600.715,61)	(1.330.617.065,94)
29	Kecamatan Siempat Nempu	(686.712.077,67)	(518.490.114,65)	0,00	(32.058.037,01)	(550.548.151,66)
30	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	(489.869.128,20)	(534.337.765,14)	0,00	(31.614.443,78)	(565.952.208,92)
31	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	(662.825.476,19)	(457.153.000,00)	0,00	(26.508.500,00)	(483.661.500,00)
32	Kecamatan Silahisabungan	(353.384.000,00)	(375.470.500,00)	0,00	(22.086.500,00)	(397.557.000,00)
33	Kecamatan Silima Punggapungga	(458.068.582,57)	(413.616.989,60)	0,00	(35.834.840,37)	(449.451.829,97)
34	Kecamatan Sitinjo	(357.462.021,41)	(454.267.420,80)	0,00	(28.978.192,97)	(483.245.613,77)
35	Kecamatan Sumbul	(587.923.719,29)	(643.323.179,03)	0,00	(76.504.348,62)	(719.827.527,65)
36	Kecamatan Tanah Pinem	(724.977.307,92)	(482.107.389,10)	0,00	(29.233.722,23)	(511.341.111,33)
37	Kecamatan Tigalingga	(715.893.325,20)	(509.576.063,84)	0,00	(28.040.792,83)	(537.616.856,67)
38	RSUD	(11.365.671.808,69)	(12.834.355.069,14)	11.605.600,00	(1.042.935.131,96)	(13.865.684.601,10)
39	Satuan Polisi Pamong Praja	(438.880.609,28)	(478.665.113,34)	0,00	(46.885.953,33)	(525.551.066,67)
40	Sekretariat Daerah	(34.110.386.973,63)	(24.109.887.755,04)	0,00	(1.475.394.202,45)	(25.585.281.957,49)
41	Sekretariat DPRD	(4.642.614.844,92)	(4.187.431.319,48)	0,00	(260.841.221,87)	(4.448.272.541,35)
	Jumlah	**(354.928.819.332,99)**	**(340.588.455.153,62)**	**11.605.600,00**	**(27.633.289.555,51)**	**(368.210.139.109,13)**

Terdapat mutasi tambah/kurang Tahun 2024 sebesar Rp11.605.600,00, diuraikan sebagai berikut :

1. Berkurang karena mutasi keluar ke Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp33.600.000,00, mutasi keluar ke Inspektorat sebesar Rp10.206.000,00 , dan mutasi keluar ke Kecamatan Sidikalang sebesar Rp16.524.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Bertambah karena mutasi masuk dari Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp33.600.000,00 pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
3. Bertambah karena mutasi masuk dari Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp10.206.000,00 pada Inspektorat Daerah;
4. Bertambah karena mutasi masuk dari Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp16.524.000,00 pada Kecamatan Sidikalang;

5. Berkurang karena penyesuaian setelah dilakukan penyusutan ulang pada aplikasi sebesar Rp11.605.600,00 pada RSUD.

5.3.1.3.7.3 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi **(1. 473.456.857.094,31)** **(1.110.800.054.176,76)**

Awal tahun 2024 Akumulasi Penyusutan dilakukan koreksi/perbaikan pencatatan aset tetap pada aplikasi pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Dairi, sehingga berdampak pada perubahan nilai akumulasi penyusutan aset tetap per tanggal 1 januari 2024. Koreksi dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dalam prosedur penginputan yang dilakukan oleh pengurus barang OPD/Operator E-BMD OPD pada aplikasi pada aplikasi pengelolaan barang milik daerah yang mengakibatkan adanya nilai aset dan nilai penyusutan yang tidak masuk dalam neraca, sehingga setelah dilakukan koreksi/perbaikan data berupa ubah kondisi dan ubah riwayat, terjadi perubahan nilai aset tetap dan nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 1 Januari 2024.

Adapun nilai yang terkoreksi yaitu Nilai Akumulasi Penyusutan Aset tetap audited 2023 sebesar Rp1.110.800.054.176,73 bertambah dengan koreksi nilai Akumulasi Penyusutan aset tetap tahun 2023 sebesar Rp 317.257.035.245,64 sehingga saldo awal Akumulasi Penyusutan aset tetap pertanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp1.428.057.089.422,37. Rekapitulasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.95. Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2024	Mutasi Tambah/ Kurang Tahun 2024	Beban Penyusutan 2024	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=4+5+6)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(38.646.160,00)	(43.224.817,50)	0,00	(4.578.657,50)	(47.803.475,00)
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(4.265.451,55)	(4.753.935,40)	0,00	(488.483,85)	(5.242.419,25)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(40.340.160,00)	(50.425.200,00)	0,00	(10.085.040,00)	(60.510.240,00)
5	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Kesehatan	(999.109.599,11)	(1.321.154.034,71)	0,00	(387.531.604,63)	(1.708.685.639,34)
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	(948.099.374,60)	(1.065.818.530,00)	0,00	(114.852.363,33)	(1.180.670.893,33)
10	Dinas Lingkungan Hidup	(3.001.022.871,96)	(5.537.785.174,42)	0,00	(3.640.557.335,63)	(9.178.342.510,05)
11	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	(8.707.906.259,07)	(9.033.114.264,80)	0,00	(195.254.398,60)	(9.228.368.663,40)
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(1.063.373.538.633,88)	(1.373.822.928.219,88)	5.600.314.869,60	(43.449.911.675,72)	(1.411.672.525.026,00)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(76.609.936,22)	(82.313.944,66)	0,00	(5.704.008,44)	(88.017.953,10)
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	(115.289.466,20)	(120.654.358,78)	0,00	(2.390.706,53)	(123.045.065,31)
16	Dinas Pendidikan	(300.515.660,12)	(270.553.382,87)	0,00	(79.514.837,63)	(350.068.220,50)
17	Dinas Perhubungan	(164.294.000,00)	(174.281.000,00)	0,00	(9.987.000,00)	(184.268.000,00)
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(19.918.431,86)	(34.496.281,65)	0,00	(19.918.431,86)	(54.414.713,51)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(521.400,00)	(579.333,34)	0,00	(57.933,33)	(637.266,67)

No.	Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2024	Mutasi Tambah/ Kurang Tahun 2024	Beban Penyusutan 2024	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=4+5+6)
20	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	(29.361.562.600,17)	(31.913.720.832,39)	0,00	(2.147.258.350,08)	(34.060.979.182,47)
21	Dinas Sosial	(24.452.054,79)	(35.000.000,00)	0,00	0,00	(35.000.000,00)
22	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Berampu	(2.800.000,00)	(3.733.333,34)	0,00	(933.333,33)	(4.666.666,67)
24	Kecamatan Gunung Sitember	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Lae Parira	(426.666,66)	(480.000,00)	0,00	(53.333,33)	(533.333,33)
26	Kecamatan Parbuluan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Pegagan Hilir	(586.666,66)	(660.000,00)	0,00	(73.333,33)	(733.333,33)
28	Kecamatan Sidikalang	(1.059.788.003,89)	(1.473.728.257,33)	0,00	(381.679.357,60)	(1.855.407.614,93)
29	Kecamatan Siempat Nempu	(1.097.560,98)	(2.000.000,00)	0,00	(500.000,00)	(2.500.000,00)
30	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	(451.000,00)	(563.750,00)	0,00	(112.750,00)	(676.500,00)
32	Kecamatan Silahisabungan	(2.013.157,89)	(2.125.000,00)	0,00	(212.500,00)	(2.337.500,00)
33	Kecamatan Silima PunggaPungga	(413.477.520,09)	(562.728.171,32)	0,00	(149.393.182,63)	(712.121.353,95)
34	Kecamatan Sitinjo	(288.181.495,30)	(394.327.743,74)	0,00	(106.146.248,43)	(500.473.992,17)
35	Kecamatan Sumbul	(600.728.476,80)	(756.823.015,20)	0,00	(196.094.538,40)	(952.917.553,60)
36	Kecamatan Tanah Pinem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Tigalingga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	RSUD	(1.121.558.824,75)	(1.205.047.651,83)	0,00	(85.263.648,84)	(1.290.311.300,67)
39	Satuan Polisi Pamong Praja	(3.125.000,00)	(3.750.000,00)	0,00	(625.000,00)	(4.375.000,00)
40	Sekretariat Daerah	(129.727.744,18)	(140.319.189,21)	0,00	(10.904.488,52)	(151.223.677,73)
41	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	(1.110.800.054.176,73	(1.428.057.089.422,37)	(5.600.314.869,60)	(51.000.082.541,54)	(1.473.456.857.094,31)

Terdapat mutasi tambah/kurang Tahun 2024 sebesar Rp5.600.314.869,60 diuraikan sebagai berikut :

1. Bertambah karena penyesuaian setelah dilakukan penysutan ulang sebesar Rp5.600.314.869,60 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

5.3.1.3.7.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya (0,00) (0,00)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah dinyatakan bahwa Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya tidak disusutkan sehingga nilai akumulasi penyusutan aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

5.3.1.4 Aset Lainnya 11.084.135.694,88 13.031.807.356,40

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Aset Lainnya terdiri dari Tuntutan Ganti Rugi, Aset Tak Berwujud, Aset Lain-lain dan Aset Lainnya-TDF. Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.084.135.694,88 atau menurun 14,95% atau sebesar Rp1.947.671.661,52 dibandingkan per 31 Desember 2023 yang mencapai sebesar Rp13.031.807.356,40, yang terdiri dari:

Tabel 5.96. Rincian Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Jenis Aset Lainnya	Per 31 Desember 2024		Per 31 Desember 2023		Perubahan	
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)	(Rp)	%
1	Tuntutan Ganti Rugi	1.062.304.599,16	9,58	856.706.980,20	6,57	205.597.618,96	24,00
2	Aset Tak Berwujud	2.797.982.505,30	25,24	2.797.982.505,30	21,47	146.000.000,00	5,22

No.	Jenis Aset Lainnya	Per 31 Desember 2024		Per 31 Desember 2023		Perubahan	
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)	(Rp)	%
3	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.610.526.345,30)	(23,55)	(2.453.614.749,65)	(18,83)	(155.244.929,00)	6,33
4	Aset Lain-lain	32.252.629.690,41	290,98	25.736.653.235,60	197,49	(3.433.942.846,34)	(13,34)
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(22.597.049.754,69)	(203,87)	(16.507.542.615,05)	(126,67)	4.699.713.168,55	(28,47)
6	Aset Lainnya-TDF	178.795.000,00	1,61	2.601.622.000,00	19,96	57.307.765,00	2,20
Jumlah Aset Lainnya		**11.084.135.694,88**	**100,00**	**13.031.807.356,40**	**100,00**	**1.519.430.777,17**	**11,66**

5.3.1.4.1 Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 1.062.304.599,16 856.706.980,20

Tuntutan Ganti Rugi merupakan hak tagih Pemerintah Daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung yang mengakibatkan kerugian Daerah sehingga wajib mengganti kerugian tersebut. Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp1.062.304.599,16 dan Rp856.706.980,20.

5.3.1.4.2 Aset Tak Berwujud 187.456.160,00 344.367.755,65

Aset Tak Berwujud merupakan *software*/aplikasi yang berada pada SKPD. Jumlah saldo per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp187.456.160,00. Nilai tersebut merupakan nilai buku dari aset tak berwujud yaitu nilai perolehan dikurang nilai amortisasi (Rp2.797.982.505,30 – Rp2.610.526.345,30).

Tabel 5.97. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023

SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tahun 2024		Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Dinas Pendidikan	555.163.236,00	0,00	0,00	555.163.236,00
Dinas Kesehatan	230.589.450,00	0,00	0,00	230.589.450,00
RSU Sidikalang	174.800.000,00	0,00	0,00	174.800.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	450.140.000,00	0,00	0,00	450.140.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	40.200.000,00	0,00	0,00	40.200.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	130.020.000,00	0,00	0,00	130.020.000,00
Dinas Sosial	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	93.159.632,69	0,00	0,00	93.159.632,69
Badan Pendapatan Daerah	612.421.200,00	0,00	0,00	612.421.200,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	18.065.300,00	0,00	0,00	18.065.300,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	198.038.000,00	0,00	0,00	198.038.000,00
Dinas Perhubungan	104.131.686,61	0,00	0,00	104.131.686,61
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	146.000.000,00	0,00	0,00	146.000.000,00
Jumlah	**2.797.982.505,30**	**0,00**	**0,00**	**2.797.982.505,30**

Saldo Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 atas aset tak berwujud pada tabel di atas adalah sebesar Rp2.453.614.749,65 terdiri dari:

Tabel 5.98. Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024

Uraian	Amortisasi per 31 Desember 2023	Koreksi Amortisasi 2024	Beban Amortisasi 2024	Amortisasi per 31 Desember 2024
Dinas Pendidikan	(555.163.236,00)	0,00	0,00	(555.163.236,00)
Dinas Kesehatan	(181.643.870,00)	0,00	44.718.290,00	(226.362.160,00)
Rumah Sakit Umum Sidikalang	(174.800.000,00)	0,00	0,00	(174.800.000,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(450.140.000,00)	0,00	0,00	(450.140.000,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(35.000.000,00)	0,00	0,00	(35.000.000,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	(40.200.000,00)	0,00	0,00	(40.200.000,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(130.020.000,00)	0,00	0,00	(130.020.000,00)

Uraian	Amortisasi per 31 Desember 2023	Koreksi Amortisasi 2024	Beban Amortisasi 2024	Amortisasi per 31 Desember 2024
Dinas Sosial	(254.000,00)	0,00	0,00	(254.000,00)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset	(90.591.527,69)	0,00	856.035,00	(91.447.562,69)
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(540.481.200,00)	0,00	35.970.000,00	(576.451.200,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	(18.065.300,00)	0,00	0,00	(18.065.300,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(138.683.600,00)	0,00	39.607.600,00	(178.291.200,00)
Dinas Perhubungan	(83.305.349,29)	0,00	20.826.337,32	(104.131.686,61)
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	(666.666,67)	0,00	333.333,33	(1.000.000,00)
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	(14.600.000,00)	0,00	14.600.000,00	(29.200.000,00)
Jumlah	(2.453.614.749,65)	0,00	156.911.595,65	(2.610.526.345,30)

5.3.1.4.3 Aset Lain-lain **9.655.579.935,72** **9.229.110.620,55**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.655.579.935,72, terdiri dari:

a. Aset Lancar yang dibatasi penggunaannya karena masih dalam tahap penyelesaian sebesar Rp668.163.409,00, yaitu:

1) Kas dalam bentuk panjar kerja (Tunjangan Komunikasi Intensif) kepada Anggota DPRD
Kas dalam bentuk panjar kerja kepada Anggota DPRD periode Tahun 2004 s.d. 2009 adalah sejak tahun 2006 karena adanya perubahan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tanggal 14 Nopember 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dimana dalam Pasal 14D dinyatakan bahwa Tunjangan Komunikasi Intensif dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.

Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tanggal 16 Maret 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dimana dalam Pasal 14B dinyatakan bahwa Tunjangan Komunikasi Intensif dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 dan dalam Pasal 29A dinyatakan bahwa anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah. Rincian Panjar Kerja Tunjangan Komunikasi Intensif senilai Rp648.045.000,00 terdapat pada Lampiran XVII.

2) Kelebihan atas pembayaran Pajak sebesar Rp20.118.409,00.
Merupakan pembayaran yang dikeluarkan dari Kas Daerah sebesar Rp175.148.500,00 namun tidak tersalurkan yang disebabkan kesalahan nomor rekening Bank penerima. Namun oleh PT Bank Sumut, dana tersebut tidak dikembalikan langsung ke Kas Daerah namun ditempatkan di rekening penampung. Di tahun 2025, dana tersebut telah dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 14 Januari 2025 sebesar Rp155.030.091,00 melalui permohonan pemindahbukuan ke rekening Kas Daerah. Sedangkan sisanya sebesar Rp20.118.409,00 yang merupakan kelebihan pembayaran pajak ke Kas Negara belum dikembalikan ke Kas Daerah. Pemerintah Kabupaten Dairi telah mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang kepada KPP Pratama Kabanjahe pada tanggal 2 Mei 2025.

b. Persediaan yang telah kadaluarsa per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.400.184.023,92, terdiri dari :
1. Persediaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.067.541.046,92;
2. Persediaan blanko cetakan dan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp244.557.357,00;
3. Persediaan bahan cetakan pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp28.685.620;
4. Persediaan obat-obatan pada RSUD Sidikalang sebesar Rp59.400.000,00.

Rincian persediaan yang telah kadaluarsa, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.99. Persediaan yang telah Kadaluarsa per 31 Desember 2024

No.	SKPD	Jenis Persediaan	Tahun Buku	Jumlah (Rp)
I	Dinas Kesehatan			

No.	SKPD	Jenis Persediaan	Tahun Buku	Jumlah (Rp)
1	Gudang Farmasi	Obat-obatan	2018	88.651.527,61
2	UPT. Puskesmas Silalahi	Obat-obatan	2018	3.721.037,00
3	UPT. Puskesmas Batang Beruh	Obat-obatan	2018	19.807.400,00
4	UPT. Puskesmas Tigabaru	Obat-obatan	2018	18.055.721,80
5	UPT. Puskesmas Kentara	Obat-obatan	2018	1.994.548,00
6	UPT. Puskesmas Sitinjo	Obat-obatan	2018	8.837.283,00
7	UPT. Puskesmas Sigalingging	Obat-obatan	2018	4.878.469,00
8	UPT. Puskesmas Parongil	Obat-obatan	2018	9.959.999,90
9	UPT. Puskesmas KM 11	Obat-obatan	2018	5.327.759,00
10	UPT. Puskesmas Sopobutar	Obat-obatan	2018	7.429.052,00
11	UPT. Puskesmas Berampu	Obat-obatan	2018	4.956.200,00
12	UPT. Puskesmas Tigalingga	Obat-obatan	2018	38.779.135,23
13	UPT. Puskesmas Pegagan Julu II	Obat-obatan	2018	13.658.414,00
14	UPT. Puskesmas Hutarakyat	Obat-obatan	2018	9.715.437,00
15	UPT. Puskesmas Bakal Gajah	Obat-obatan	2018	719.075,00
16	UPT. Puskesmas Bunturaja	Obat-obatan	2018	327.500,00
17	UPT. Puskesmas Kutabuluh	Obat-obatan	2018	227.826,00
18	UPT. Puskesmas Gunung Sitember	Obat-obatan	2018	16.703.769,00
	Sub Jumlah			**253.750.153,53**
1	Gudang Farmasi	Obat-obatan	2019	62.944.790,00
	Sub Jumlah			**62.944.790,00**
1	Gudang Farmasi	Obat-obatan	2020	17.208.214,00
	Sub Jumlah			**17.208.214,00**
1	Gudang Farmasi	Obat-obatan	2021	14.507.330,00
	Sub Jumlah			**14.507.330,00**
1	Gudang Farmasi	Obat-obatan	2022	129.152.268,00
	Sub Jumlah			**129.152.268,00**
1	Gudang Farmasi	Obat-obatan	2023	238.328.676,00
2	UPT. Puskesmas Silalahi	Obat-obatan	2023	1.031.384,17
3	UPT. Puskesmas Batang Beruh	Obat-obatan	2023	6.612.331,70
4	UPT. Puskesmas Sumbul	Obat-obatan	2023	43.156.123,10
5	UPT. Puskesmas Tigabaru	Obat-obatan	2023	876.973,20
6	UPT. Puskesmas Kentara	Obat-obatan	2023	95.135.173,00
7	UPT. Puskesmas Sitinjo	Obat-obatan	2023	2.387.126,00
8	UPT. Puskesmas Sigalingging	Obat-obatan	2023	1.456.837,50
9	UPT. Puskesmas Parongil	Obat-obatan	2023	43.156.123,10
10	UPT. Puskesmas KM 11	Obat-obatan	2023	35.251.601,55
11	UPT. Puskesmas Sopobutar	Obat-obatan	2023	14.452.007,29
12	UPT. Puskesmas Berampu	Obat-obatan	2023	11.146.027,00
13	UPT. Puskesmas Tigalingga	Obat-obatan	2023	57.353.323,73
14	UPT. Puskesmas Pegagan Julu II	Obat-obatan	2023	460.380,00
15	UPT. Puskesmas Hutarakyat	Obat-obatan	2023	11.118.030,17
16	UPT. Puskesmas Bakal Gajah	Obat-obatan	2023	1.007.506,00
17	UPT. Puskesmas Bunturaja	Obat-obatan	2023	3.652.255,00
18	UPT. Puskesmas Kutabuluh	Obat-obatan	2023	1.169.990,00
19	UPT. Puskesmas Gunung Sitember	Obat-obatan	2023	22.226.422,89
	Sub Jumlah			**589.978.291,39**
	Jumlah I			**1.067.541.046,92**
II	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			
1	Bahan Cetakan			168.640.000,00
2	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			75.917.357,00
	Jumlah II			**244.557.357,00**
III	**Badan Pendapatan Daerah**			
1	Bahan Cetakan			28.685.620,00
	Jumlah III			**28.685.620,00**
IV	**RSUD Sidikalang**			
1	Obat-obatan			59.400.000,00
	Jumlah IV			**59.400.000,00**
	Jumlah Keseluruhan (I + II + III + IV)			**1.400.184.023,92**

c. Aset tetap yang direklasifikasikan ke Aset Lain-lain karena tidak dapat digunakan dalam operasional kegiatan Pemerintah Kabupaten Dairi (Aset Rusak Berat) dengan nilai buku sebesar Rp7.587.232.502,80 dimana nilai perolehan sebesar Rp30.184.282.257,49 dan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp22.597.049.754,69. Nilai aset lain-lain berupa Aset Rusak Berat tersebut diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.100. Mutasi Nilai Perolehan Aset Lain-lain akibat Reklasifikasi per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2024	23.776.509.831,68	28.522.551.081,94
Penambahan tahun 2024	8.383.403.952,65	1.237.072.631,84
Pengurangan tahun 2024	(1.975.631.526,84)	(5.983.113.882,10)
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	**30.184.282.257,49**	**23.776.509.831,68**

Atas Aset Rusak Berat di atas, pada TA 2024 pada saat direklasifikasi ke aset-lain tidak disusutkan kembali, sehingga nilai buku aset lain-lain adalah sebesar Rp7.587.232.502,80. Rincian perhitungan nilai buku aset lain-lain – Aset Tetap Rusak Berat, pada tabel berikut:

Tabel 5.101. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024

No.	Jenis Aset	Nilai Perolehan 2024	Akumulasi Penyusutan 2024	Nilai Buku 31 Desember 2024
1	ALL - Peralatan dan Mesin	30.184.282.257,49	(22.597.049.754,69)	7.587.232.502,80
	Jumlah	**30.184.282.257,49**	**(22.597.049.754,69)**	**7.587.232.502,80**

5.3.1.4.4 Aset Lainnya-TDF 178.795.000,00 2.601.622.000,00

Aset Lainnya- *Treasury Deposit Facility (TDF)* adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di Bank Indonesia sebagai bentuk penyaluran transfer ke Daerah secara nontunai. *Treasury Deposit Facility (TDF)* mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility (TDF).*

Selama Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Dairi menerima penyaluran atas saldo Dana TDF TA 2023 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp2.601.622.000,00 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir TA.2024 sebesar Rp2.601.622.000,00;

Untuk TA 2024, Pemerintah Kabupaten Dairi menerima Tambahan Dana Bagi Hasil TA 2024 dan Kekurangan Bayar Dana Bagi Hasil TA 2023 yang penyalurannya dalam bentuk nontunai sebesar Rp178.795.000,00, dengan uraian sebagai berikut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024 tanggal 29 Desember 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024 dalam bentuk nontunai sebesar Rp178.795.000,00.

Atas penyaluran saldo TDF tersebut selama TA 2024, maka saldo dana TDF Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp178.795.000,00, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.102. Rincian Aset Lainnya-TDF per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023	Penyaluran Tahun 2024	Penambahan Tahun 2024	Saldo per 31 Desember 2024
1	**Bagi Hasil Pajak (Nontunai)**	**1.911.479.000,00**	**1.911.479.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	**571.553.000,00**	**571.553.000,00**	**0,00**	**0,00**
	DBH PBB Bagian Daerah :	571.553.000,00	571.553.000,00	0,00	0,00
	- DBH PBB Sektor Perkebunan	*201.806.000,00*	*201.806.000,00*	*0,00*	*0,00*
	- DBH PBB Sektor Perhutanan	*30.146.000,00*	*30.146.000,00*	*0,00*	*0,00*
	- DBH PBB sektor pertambangan minyak dan gas bumi	*130.072.000,00*	*130.072.000,00*	*0,00*	*0,00*
	- DBH PBB Sektor pertambangan pengusahaan panas bumi	*31.178.000,00*	*31.178.000,00*	*0,00*	*0,00*

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023	Penyaluran Tahun 2024	Penambahan Tahun 2024	Saldo per 31 Desember 2024
	- DBH PBB Sektor Pertambangan non migas lainnya	*165.898.000,00*	*165.898.000,00*	*0,00*	*0,00*
	- DBH PBB Sektor lainnya	*12.453.000,00*	*12.453.000,00*	*0,00*	*0,00*
	DBH Pasal 25/29	174.817.000,00	174.817.000,00	0,00	0,00
	DBH Pasal 21	1.165.109.000,00	1.165.109.000,00	0,00	0,00
2	**Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Nontunai)**	**690.143.000,00**	**690.143.000,00**	**178.795.000,00**	**178.795.000,00**
	Bagi Hasil dari SDA Kehutanan-PSDH	0,00	0,00	31.269.000,00	31.269.000,00
	Bagi Hasil dari SDA Pertambangan Minyak Bumi	8.568.000,00	8.568.000,00	0,00	0,00
	Bagi Hasil dari SDA Pertambangan Panas Bumi	37.375.000,00	37.375.000,00	6.682.000,00	6.682.000,00
	- Iuran Produksi	*27.847.000,00*	*27.847.000,00*	*6.384.000,00*	*6.384.000,00*
	- Iuran Tetap	*9.528.000,00*	*9.528.000,00*	*298.000,00*	*298.000,00*
	Bagi Hasil dari SDA Pertambangan Umum-Royalti	644.200.000,00	644.200.000,00	140.844.000,00	140.844.000,00
	- Iuran Tetap (land-rent)	*148.668.000,00*	*148.668.000,00*	*0,00*	*0,00*
	- Royalti	*495.532.000,00*	*495.532.000,00*	*140.844.000,00*	*140.844.000,00*
	Jumlah DBH Pajak dan SDA (Nontunai)	**2.601.622.000,00**	**2.601.622.000,00**	**178.795.000,00**	**178.795.000,00**

5.3.2 Kewajiban 21.747.196.962,56 12.988.877.200,64

Kewajiban atau Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Tabel 5.103. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Jenis Kewajiban	Per 31 Desember 2024 Rp	Per 31 Desember 2023 Rp	Perubahan (Rp)	%
1.	Kewajiban Jangka Pendek	21.747.196.962,56	12.988.877.200,64	8.758.319.761,92	67,43
2.	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Kewajiban	**21.747.196.962,56**	**12.988.877.200,64**	**8.758.319.761,92**	**67,43**

Jumlah Kewajiban Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.747.196.962,56 atau mengalami peningkatan sebesar 67,43% atau Rp8.758.319.761,92 dibandingkan per 31 Desember 2023 yang mencapai Rp12.988.877.200,64.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek 21.747.196.962,56 12.988.877.200,64

Kewajiban Jangka Pendek adalah Kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.747.196.962,56 atau naik sebesar 67,43% atau Rp8.758.319.761,92 dibandingkan per 31 Desember 2023 yang mencapai Rp12.988.877.200,64.

Tabel 5.104. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Per 31 Desember 2024 Rp	Per 31 Desember 2023 Rp	Perubahan Rp	%
1.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	140.776.648,00	97.831.118,68	42.945.529,32	43,90
2.	Pendapatan Diterima Dimuka	193.159.799,56	138.608.011,08	54.551.788,48	39,36
3.	Utang Belanja	21.413.260.515,00	12.752.438.070,88	8.660.822.444,12	67,92
	Kewajiban Jangka Pendek	**21.747.196.962,56**	**12.988.877.200,64**	**8.758.319.761,92**	**67,43**

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 140.776.648,00 97.831.118,68

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 sebesar Rp140.776.648,00. Utang PFK tersebut berupa PPN dan PPh atas kegiatan pada SKPD Dinas Pendidikan yang belum disetorkan hingga 31 Desember 2024 namun telah disetor pada Tahun 2025.

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka 193.159.799,56 138.608.011,08

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp193.159.799,56 merupakan pendapatan pajak reklame yang pembayarannya untuk periode tahun 2025.

5.3.2.1.3 Utang Belanja 21.413.260.515,00 12.752.438.070,88

Utang belanja merupakan utang atas belanja yang belum dibayar hingga 31 Desember 2024. Jumlah utang belanja sebesar Rp21.413.260.515,00 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.105. Saldo Perhitungan Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Bertambah/ Berkurang
1	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	12.377.028.000,00	0,00	12.377.028.000,00
2	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	42.299.936,00	408.192.192,00	(365.892.256,00)
3	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	20.810.675,00	0,00	20.810.675,00
4	Utang Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	102.000,00	(102.000,00)
5	Utang Belanja Pegawai BLUD	160.129.792,00	0,00	160.129.792,00
6	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	86.260.000,00	93.716.000,00	(7.456.000,00)
7	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	146.920.714,00	37.966.027,00	108.954.687,00
8	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	37.629.000,00	31.788.600,00	5.840.400,00
9	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	3.360.000,00	(3.360.000,00)
10	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.562.649,00	15.563.552,00	(8.000.903,00)
11	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.966.900,00	25.877.050,00	(18.910.150,00)
12	Utang Belanja Jasa Pengiriman Surat	0,00	258.000,00	(258.000,00)
13	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	21.655.000,00	(21.655.000,00)
14	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	462.275.911,00	(462.275.911,00)
15	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan	1.154.181.538,00	1.229.424.577,00	(75.243.039,00)
16	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	3.228.000,00	23.536.160,00	(20.308.160,00)
17	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	7.911.000,00	(7.911.000,00)
18	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	12.836.886,00	47.229.114,00	(34.392.228,00)
19	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	6.861.842.261,00	8.350.349.483,00	(1.488.507.222,00)
20	Utang Belanja Jasa Visitasi	0,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)
21	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
22	Utang Belanja Jasa Kantor-tagihan air	97.257.023,00	49.061.000,00	48.196.023,00
23	Utang Belanja Jasa Kantor-tagihan listrik	2.014.500,00	7.958.586,00	(5.944.086,00)
24	Utang Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	2.100.000,00	(2.100.000,00)
25	Utang Belanja Jasa Kantor-Pajak, Bea, dan Perizinan	1.796.445,00	0,00	1.796.445,00
26	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	0,00	138.851.800,00	(138.851.800,00)
27	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	400.672,00	0,00	400.672,00
28	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	112.396,00	0,00	112.396,00
29	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	99.345.000,00	99.345.000,00	0,00
30	Utang Belanja Bimbingan Teknis	13.592.400,00	0,00	13.592.400,00
31	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Khusus	16.870.000,00	20.297.500,00	(3.427.500,00)
32	Utang Belanja Pemeliharaan Televisi/ Receiver / Parabola/cctv	0,00	1.122.000,00	(1.122.000,00)
33	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Personal Computer/PC dan Laptop	950.000,00	5.747.000,00	(4.797.000,00)
34	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan Jaringan SIM-RS	4.000.000,00	180.000,00	3.820.000,00
35	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Kesehatan	528.000,00	0,00	528.000,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Bertambah/ Berkurang
36	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya-Pemeliharaan Taman	0,00	1.950.000,00	(1.950.000,00)
37	Utang Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Rumah Sakit	1.323.000,00	340.000,00	983.000,00
38	Utang Belanja Perjalanan Dinas	0,00	9.544.000,00	(9.544.000,00)
39	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	5.459.018,00	0,00	5.459.018,00
40	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	0,00	134.700.000,00	(134.700.000,00)
41	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	-	550.000,00	(550.000,00)
42	Utang Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	0,00	272.080.000,00	(272.080.000,00)
43	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0,00	385.177.284,00	(385.177.284,00)
44	Utang Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	242.576.360,00	856.729.234,88	(614.152.874,88)
45	Utang Belanja Tidak Terduga	6.339.350,00	-	6.339.350,00
	Jumlah	**21.413.260.515,00**	**12.752.438.070,88**	**8.660.822.444,12**

Sedangkan uraian utang belanja, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.106. Uraian Utang Belanja per 31 Desember 2024

No.	Uraian	SKPD	Utang per 31 Des 2024 (Rp)
1	Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Sinta Mardongan Kec. Silima Pungga-pungga	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	242.576.360,00
	Jumlah		**242.576.360,00**
2	Pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan Kawasan pada Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota TA.2023	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	99.345.000,00
	Jumlah		**99.345.000,00**
	Utang atas klaim obat, BHP dan Jasa Pelayanan		
3	Utang obat dan bahan medis habis pakai Tahun 2024	RSUD Sidikalang	1.154.181.538,00
4	utang jasa pelayanan pasien umum periode bulan desember 2024	RSUD Sidikalang	142.350.274,00
5	utang Jasa Pelayanan Hemodialisa periode bulan desember 2024	RSUD Sidikalang	184.761.540,00
6	utang jasa pelayanan BPJS Reguler periode bulan desember 2024	RSUD Sidikalang	1.712.359.459,00
7	utang Pending Pelayanan medis BPJS Regular dan Hemodealisa periode Bulan mei s/d desember 2023 dan januari s/d desember 2024	RSUD Sidikalang	1.340.448.254,00
8	utang Iuran jaminan kesehatan 4% periode bulan november s/d desember 2024	RSUD Sidikalang	42.299.936,00
9	utang Jasa Pelayanan Obat Kronis periode januari s/d desember 2024	RSUD Sidikalang	464.000.000,00
10	utang Jasa Pelayanan Obat Pasien Umum (Instalasi Farmasi) periode bulan januari s/d desember 2024	RSUD Sidikalang	155.500.000,00
11	utang Jasa Pelayanan Covid-19 Dari Kemenkes periode bulan Maret s/d desember 2022	RSUD Sidikalang	452.153.606,00
12	utang Jasa Pelayanan Pasien Non Register periode tahun 2021 s/d 2024	RSUD Sidikalang	2.017.925.728,00
13	utang Jasa pelayanan Test Cepat Molekuler (TCM) periode bulan juli s/d desember 2024	RSUD Sidikalang	29.725.000,00
14	utang Jasa Pelayanan Asuransi Jasa Raharja peroide bulan september s/d desember 2024	RSUD Sidikalang	255.000.000,00
15	utang Jasa Pelayanan Ambulance BPJS periode bulan nopember s/d desember 2024	RSUD Sidikalang	107.618.400,00
16	utang belanja bahan pakai habis	RSUD Sidikalang	329.871.594,00
17	utang pengadaan alat kedokteran umum	RSUD Sidikalang	5.459.018,00
18	utang belanja tambahan penghasilan khusus berdasarkan kelangkaan profesi periode bulan september s/d desember 2024	RSUD Sidikalang	160.129.792,00
19	utang belanja Bimbingan Teknis an. dr. Eben Manalu, Sp.B	RSUD Sidikalang	13.592.400,00
20	utang belanja Air bulan desember 2024	RSUD Sidikalang	33.572.280,00
	Jumlah		**8.600.948.819,00**
21	Utang Belanja Tidak Terduga	Badang Kesatuan Bangsa dan Politik	6.339.350,00
	Jumlah		**6.339.350,00**
22	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Kecamatan Lae Parira	20.810.675,00
23	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	Kecamatan Lae Parira	1.133.278,00
	Jumlah		**21.943.953,00**
24	Utang Belanja jaminan kesehatan dan keselamatan kerja Non PNS	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	513.068,00

No.	Uraian	SKPD	Utang per 31 Des 2024 (Rp)
	Jumlah		513.068,00
25	Dukungan Pendanaan THR dan Gaji ke-13 ASN Guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD dan Tidak Menerima Penghasilan Tahun 2024	Dinas Pendidikan	12.377.028.000,00
	Jumlah		12.377.028.000,00
26	Utang Belanja Jasa Kantor-tagihan air		63.684.743,00
27	Utang Belanja Jasa Kantor-tagihan listrik		881.222,00
	Jumlah		64.565.965,00
	Jumlah keseluruhan		21.413.260.515,00

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian:

5.3.2.2.1 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat 0,00 0,00

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Sampai dengan 31 Desember 2024, Pemerintah Kabupaten Dairi tidak memiliki utang jangka panjang.

5.3.3 Ekuitas 1.718.666.002.686,31 2.059.931.292.564,83

Ekuitas Dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah Aset dengan jumlah Kewajiban.

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.718.666.002.686,31 atau menurun sekitar 16,57% atau Rp341.265.289.878,52 dibandingkan per 31 Desember 2023 yang mencapai Rp2.059.931.292.564,83.

5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Tahun 2024 Rp	Tahun 2023 Rp

Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Dairi TA 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.107. Rekapitulasi Laporan Operasional TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Kegiatan Operasional				
	Pendapatan-LO	1.068.516.395.883,09	1.069.102.231.805,62	(585.835.922,53)	(0,05)
	Beban	1.088.348.841.472,01	1.039.090.168.165,75	49.258.673.306,26	4,74
	Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	**(19.832.445.588,92)**	**30.012.063.639,87**	**(49.844.509.228,79)**	**(166,08)**
2	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	(2.434.800,67)	1.190.736.076,39	(1.193.170.877,06)	(100,20)
3	Pos Luar Biasa	(2.254.610.365,00)	(1.343.356.000,00)	(911.254.365,00)	67,83
	Surplus/Defisit-LO	**(22.089.490.754,59)**	**29.859.443.716,26**	**(51.948.934.470,85)**	**(173,98)**

5.4.1 Pendapatan-LO 1.068.516.395.883,09 1.069.102.231.805,62

Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Dairi TA 2024 sebesar Rp1.068.516.395.883,09. Apabila dibandingkan dengan TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp585.835.922,53 atau 0,05%. Rincian Pendapatan-LO menurut kelompoknya dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.108. Rincian Pendapatan-LO TA 2024 dan 2023

No	Jenis Pendapatan-LO	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah-LO	96.661.250.999,09	86.477.051.962,62	10.184.199.036,47	11,78
2.	Pendapatan Transfer-LO	957.861.933.229,00	967.477.130.349,00	(9.615.197.120,00)	(0,99)
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	13.993.211.655,00	15.148.049.494,00	(1.154.837.839,00)	(7,62)
	Total Pendapatan-LO	**1.068.516.395.883,09**	**1.069.102.231.805,62**	**(585.835.922,53)**	**(0,05)**

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO 96.661.250.999,09 86.477.051.962,62

Hak Pemerintah Daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah TA 2024 adalah sebesar Rp96.661.250.999,09. Apabila dibandingkan dengan TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp10.184.199.036,47 atau 11,78%. Kelompok Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari 4 (empat) jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.109. Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2024 dan 2023

No.	Jenis Pendapatan Asli Daerah-LO	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1.	Pajak Daerah-LO	21.129.814.221,32	21.475.321.915,05	(345.507.693,73)	(1,61)
2.	Retribusi Daerah-LO	59.861.387.724,00	3.353.119.213,00	56.508.268.511,00	1.685,24
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	9.533.287.318,50	9.332.478.127,00	200.809.191,50	2,15
4.	Lain-Lain PAD yang Sah-LO	6.136.761.735,27	52.316.132.707,57	(46.179.370.972,30)	(88,27)
	Total Pendapatan Asli Daerah-LO	**96.661.250.999,09**	**86.477.051.962,62**	**10.184.199.036,47**	**11,78**

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO 21.129.814.221,32 21.475.321.915,05

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Dairi terdiri dari: (1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO; (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO; (3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-LO (makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir dan jasa kesenian dan hiburan); (4) Pajak Reklame-LO; (5) Pajak Air Tanah-LO; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO; (7) Pajak Sarang Burung Walet-LO; (8) Opsen PKB-LO; (9) Opsen BBNKB-LO.

Pendapatan Pajak Daerah-LO untuk TA 2024 sebesar Rp21.129.814.221,32. Apabila dibandingkan dengan TA 2023 yang mencapai Rp21.475.321.915,05, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp345.507.693,73 atau 1,61%.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO 59.861.387.724,00 3.353.119.213,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LO terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pendapatan Retribusi Daerah-LO untuk TA 2024 sebesar Rp59.861.387.724,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2023 yang mencapai sebesar Rp3.353.119.213,00, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp56.508.268.511,00 atau 1.685,24% dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.110. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2024 dan 2023

No	Jenis Retribusi Daerah	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1.	Retribusi Jasa Umum-LO	58.183.667.599,00	1.954.436.113,00	56.229.231.486,00	2.877,01
2.	Retribusi Jasa Usaha-LO	1.146.462.375,00	1.149.254.300,00	(2.791.925,00)	(0,24)
3.	Retribusi Perizinan Tetentu-LO	531.257.750,00	249.428.800,00	281.828.950,00	112,99
	Total Pendapatan Retribusi Daerah-LO	**59.861.387.724,00**	**3.353.119.213,00**	**56.508.268.511,00**	**1.685,24**

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO 9.533.287.318,50 9.332.478.127,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO pada TA 2024 sebesar Rp9.533.287.318,50 merupakan hasil dari penyertaan modal/investasi yang ditanamkan pada perusahaan milik daerah/BUMD.

Apabila dibandingkan dengan TA 2023 yang mencapai Rp9.332.478.127,00, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp345.507.693,73 atau 1,61%.

Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2024, sebagai berikut.
- Penerimaan dividen PT Bank Sumut sebesar Rp11.964.954.686,50;
- Pengurangan investasi atas kerugian PD Pasar tahun 2024 sebesar Rp1.916.633.685,00,
- Pengurangan investasi atas bagian kerugian Perumda Air Minum Lae Nciho tahun 2024 sebesar Rp515.033.683,00.

Kerugian atas kedua BUMD tersebut diakui sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan menambah/(mengurangi) nilai penyertaan modal di TA 2024 karena Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan pemilik utama dari kedua BUMD tersebut (persentase kepemilikan 100%), sehingga perhitungan nilai penyertaan modalnya menggunakan metode ekuitas.

5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO **6.136.761.735,27** **52.316.132.707,57**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO pada TA 2024 sebesar Rp6.136.761.735,27. Apabila dibandingkan dengan TA 2023 yang mencapai Rp52.316.132.707,57, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp46.179.370.972,30 atau 88,27%.

Penurunan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO pada TA 2024, diantaranya disebabkan adanya reklasifikasi pendapatan BLUD RSUD Sidikalang menjadi pendapatan retribusi.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO **957.861.933.229,00** **967.477.130.349,00**

Pendapatan Transfer-LO TA 2024 sebesar Rp957.861.933.229,00 meliputi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Umum, Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Khusus, Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan. Apabila dibandingkan dengan TA 2023 yang mencapai Rp967.477.130.349,00, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp9.615.197.120,00 atau 0,99%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.111. Rincian Pendapatan Transfer-LO TA 2024 dan 2023

No.	Jenis Pendapatan Transfer-LO	Saldo TA 2024	Saldo TA 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Umum - LO	667.911.126.970,00	617.480.811.235,00	50.430.315.735,00	8,17
2	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Khusus - LO	223.711.106.827,00	267.766.001.163,00	(44.054.894.336,00)	(16,45)
3	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LO	15.166.908.000,00	33.666.172.000,00	(18.499.264.000,00)	(54,95)
4	Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan - LO	51.072.791.432,00	48.564.145.951,00	2.508.645.481,00	5,17
Total Pendapatan Transfer-LO		957.861.933.229,00	967.477.130.349,00	(9.615.197.120,00)	(0,99)

Penjelasan lebih rinci untuk masing-masing jenis Pendapatan Transfer-LO adalah sebagai berikut:

5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Umum-LO **667.911.126.970,00** **617.480.811.235,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Transfer Umum-LO TA 2024 adalah sebesar Rp667.911.126.970,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2023 yang mencapai Rp617.480.811.235,00, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp50.430.315.735,00 atau 8,17% dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 5.112. Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Transfer Umum-LO TA 2024 dan 2023

No.	Jenis Dana Transfer Umum-LO	Saldo TA 2024	Saldo TA 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1.	Bagi Hasil Pajak-LO	8.915.987.890,00	13.816.938.510,00	(4.900.950.620,00)	(35,47)

No.	Jenis Dana Transfer Umum-LO	Saldo TA 2024	Saldo TA 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO	3.640.431.000,00	5.113.685.725,00	(1.473.254.725,00)	(28,81)
3.	Bagi Hasil Lainnya-LO	7.520.542.000,00	8.513.744.000,00	(993.202.000,00)	(11,67)
4.	Dana Alokasi Umum-LO	647.834.166.080,00	590.036.443.000,00	57.797.723.080,00	9,80
Total Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO		**667.911.126.970,00**	**617.480.811.235,00**	**50.430.315.735,00**	**8,17**

a) Dana Bagi Hasil Pajak-LO

Merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Cukai Hasil Tembakau. Pada TA 2024 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO sebesar Rp8.915.987.890,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2023 yang mencapai Rp13.816.938.510,00, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp4.900.950.620,00 atau 35,47%.

b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO

Merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, sumber daya alam perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi dan pertambangan umum. Pada TA 2024, Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO sebesar Rp3.640.431.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2023 yang mencapai Rp5.113.685.725,00, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.473.254.725,00 atau 28,81%.

c) Dana Bagi Hasil Lainnya-LO

merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu. Salah satu DBH Lainnya adalah Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang merupakan DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah dan/atau produk turunannya. Pada TA 2024, Pendapatan Dana Bagi Hasil Lainnya-LO adalah sebesar Rp7.520.542.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2023 yang mencapai Rp8.513.744.000,00, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp993.202.000,00 atau 11,67%.

d) Dana Alokasi Umum-LO

Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada TA 2024, Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO adalah sebesar Rp647.834.166.080,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2023 yang mencapai Rp590.036.443.000,00, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp57.797.723.080,00 atau 9,80%.

5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Khusus-LO **223.711.106.827,00** **267.766.001.163,00**

a) Dana Alokasi Khusus Fisik - LO

Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pada TA 2024 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik-LO adalah sebesar Rp64.141.894.493,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2023 yang mencapai Rp97.765.061.442,00, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp33.623.166.949,00 atau 34,39%.

b) Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO

Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pada TA 2024, realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO adalah sebesar Rp159.569.212.334,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2023 yang mencapai Rp170.000.939.721,00, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp10.431.727.387,00 atau 6,14%.

5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya-LO **15.166.908.000,00** **33.666.172.000,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya-LO TA 2024 sebesar Rp15.166.908.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2023 yang mencapai Rp33.666.172.000,00, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp18.499.264.000,00 atau 54,95%.

5.4.1.2.4 Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan-LO **51.072.791.432,00** **48.564.145.951,00**

Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pendapatan-LO berasal dari Bagi Hasil Pendapatan Pajak yang terdiri dari: (1) Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor; (2) Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (3) Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (4) Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan; (5) Bagi Hasil Pajak Rokok. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-Bagi Hasil Pendapatan-LO TA 2024 sebesar Rp51.072.791.432,00

Apabila dibandingkan dengan TA 2023 yang mencapai Rp448.564.145.951,00, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp2.508.645.481,00 atau 5,17%. Pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengacu kepada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/282/KPTS/2025 tanggal 22 April 2025 tentang Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan Tahun 2024 dan Lunas Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun 2022.

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO **13.993.211.655,00** **15.148.049.494,00**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO berasal dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN. Pada TA 2024, terealisasi sebesar Rp13.993.211.655,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2023 yang mencapai Rp15.148.049.494,00, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.154.837.839,00 atau 7,62%.

Pada TA 2024 nilai Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari :

- Pendapatan Hibah yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp371.770.945,00 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupa alat kontrasepsi;
- Pendapatan Hibah yang diterima oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp174.770.000,00 merupakan hibah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara berupa alat angkutan apung bermotor;
- Pendapatan Hibah yang diterima oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp455.214.700,00 dari Kementerian Pertanian berupa alat-alat pertanian dan 1 (satu) persil tanah untuk jalan dari masyarakat;
- Pendapatan Hibah yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang sebesar Rp301.500.000,00, berupa 1 (satu) unit mobil Ambulance dari PT Bank Sumut Cabang Sidikalang;
- Pendapatan Hibah yang diterima oleh Dinas Pendidikan sebesar Rp519.996.000,00, berupa 2 (dua) persil tanah untuk bangunan sekolah dari masyarakat;
- Pendapatan Hibah yang diterima oleh Dinas Kesehatan sebesar Rp44.540.000,00, berupa 1 (satu) persil tanah untuk bangunan tempat kerja dari masyarakat;
- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP yang berada pada 18 puskesmas sebesar Rp12.122.172.510,00.

5.4.2 Beban **1.088.348.841.472,01** **1.039.090.168.165,75**

Beban Operasi Pemerintah yang diakui pada TA 2024 sebesar Rp1.088.348.841.472,01. Apabila dibandingkan dengan TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp49.258.673.306,26 atau 4,74% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.113. Realisasi Beban Operasi TA 2024 dan 2023

No.	Jenis Beban Operasi	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Pegawai	538.571.788.255,00	455.652.038.035,00	82.919.750.220,00	18,20
2	Beban Persediaan	144.730.037.886,10	167.639.355.365,80	(22.909.317.479,70)	(13,67)
3	Beban Jasa	104.819.842.798,46	109.861.252.704,20	(5.041.409.905,74)	(4,59)
4	Beban Pemeliharaan	5.778.491.863,00	7.231.287.086,00	(1.452.795.223,00)	(20,09)

No.	Jenis Beban Operasi	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
5	Beban Perjalanan Dinas	52.205.766.902,00	51.450.062.765,00	755.704.137,00	1,47
6	Beban Hibah	56.386.949.582,00	32.388.249.875,00	23.998.699.707,00	74,10
7	Beban Bantuan Sosial	0,00	1.482.600.000,00	(1.482.600.000,00)	(100,00)
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	116.424.956.427,43	146.991.460.658,55	(30.566.504.231,12)	(20,79)
9	Beban Penyisihan Piutang	994.862.758,02	895.966.488,20	98.896.269,82	11,04
10	Beban Transfer	68.436.145.000,00	64.249.847.200,00	4.186.297.800,00	6,52
11	Beban Lain-lain	0,00	1.248.047.988,00	(1.248.047.988,00)	(100,00)
	Jumlah Beban Operasi	**1.088.348.841.472,01**	**1.039.090.168.165,75**	**49.258.673.306,26**	**4,74**

5.4.2.1 Beban Pegawai 538.571.788.255,00 455.652.038.035,00

Beban pegawai TA 2024 sebesar Rp538.571.788.255,00 merupakan beban pegawai selama tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp82.919.750.220,00 atau 18,20% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.114. Realisasi Beban Pegawai TA 2024 dan 2023

No.	Jenis Beban Pegawai	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	387.075.080.942,00	318.078.315.777,00	68.996.765.165,00	21,69
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	52.399.695.504,00	50.329.075.589,00	2.070.619.915,00	4,11
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	83.325.071.219,00	71.972.445.775,00	11.352.625.444,00	15,77
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	14.788.405.960,00	14.455.444.674,00	332.961.286,00	2,30
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	168.221.713,00	273.094.220,00	(104.872.507,00)	(38,40)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	401.693.333,00	510.880.000,00	(109.186.667,00)	(21,37)
7	Beban Pegawai BLUD	413.619.584,00	32.782.000,00	380.837.584,00	1.161,73
	Jumlah Beban Pegawai	**538.571.788.255,00**	**455.652.038.035,00**	**82.919.750.220,00**	**18,20**

Pada TA.2024, beban pegawai-LO sebesar Rp538.571.788.255,00 sedangkan belanja pegawai-LRA sebesar Rp526.617.182.736,00. Dari jumlah tersebut terdapat perbedaan antara beban pegawai dan belanja pegawai sebesar Rp(370.294.478,00). Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp81.741.562,00;
2. Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp(102.491.640,00);
3. Reklasifikasi ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp(101.380.000,00);
4. Bertambah/Berkurang utang belanja tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar Rp12.128.863.600,00;
5. Reklasifikasi ke Hibah sekolah swasta sebesar Rp(52.128.003,00).

5.4.2.2 Beban Persediaan 144.730.037.886,10 167.639.355.365,80

Beban persediaan TA 2024 sebesar Rp144.730.037.886,10. Apabila dibandingkan dengan TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp22.909.317.479,70 atau 13,67% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.115. Realisasi Beban Persediaan TA 2024 dan 2023

No.	Jenis Beban Persediaan	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Beban Alat Tulis Kantor	453.730.291,00	369.406.408,00	84.323.883,00	22,83
2	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.015.712.256,05	6.677.100.865,54	(1.661.388.609,49)	(24,88)
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.577.550.285,00	1.825.275.185,00	(247.724.900,00)	(13,57)
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.800.000,00	28.977.000,00	(24.177.000,00)	(83,44)
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	101.245.500,00	355.583.700,00	(254.338.200,00)	(71,53)
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	132.955.000,00	90.797.000,00	42.158.000,00	46,43
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	234.350.000,00	124.477.000,00	109.873.000,00	88,27

No.	Jenis Beban Persediaan	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	625.808.000,00	685.420.400,00	(59.612.400,00)	(8,70)
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	186.441.227,75	391.118.206,00	(204.676.978,25)	(52,33)
10	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	65.500.000,00	44.000.000,00	21.500.000,00	48,86
11	Beban Pakaian Jas/Safari	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
12	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	326.069.000,00	1.394.032.720,00	(1.067.963.720,00)	(76,61)
13	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	162.821.000,00	744.962.615,00	(582.141.615,00)	(78,14)
14	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	41.030.000,00	62.465.000,00	(21.435.000,00)	(34,32)
15	Beban Natura dan Pakan-Natura	1.926.475.700,00	1.978.179.800,00	(51.704.100,00)	(2,61)
16	Beban Natura dan Pakan-Pakan	63.400.000,00	237.582.000,00	(174.182.000,00)	(73,31)
17	Beban Obat-Obatan-Obat	2.399.223.528,10	0,00	2.399.223.528,10	∞
18	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.039.531.836,00	2.313.692.308,87	725.839.527,13	31,37
19	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	119.800.000,00	111.050.000,00	8.750.000,00	7,88
20	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	279.379.300,00	681.735.800,00	(402.356.500,00)	(59,02)
21	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	8.450.000,00	16.940.000,00	(8.490.000,00)	(50,12)
22	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	25.390.000,00	16.940.000,00	8.450.000,00	49,88
23	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	6.269.500,00	356.818.000,00	(350.548.500,00)	(98,24)
24	Beban Pipa-Pipa Baja	314.264.500,00	196.590.960,00	117.673.540,00	59,86
25	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	593.014.465,00	718.034.409,00	(125.019.944,00)	(17,41)
26	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	72.100.378,00	717.037.914,00	(644.937.536,00)	(89,94)
27	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	8.550.000,00	6.050.000,00	2.500.000,00	41,32
28	Beban Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	574.481.963,00	731.348.719,50	(156.866.756,50)	(21,45)
29	Beban Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	187.740.000,00	219.975.142,00	(32.235.142,00)	(14,65)
30	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	17.562.800,00	11.712.800,00	5.850.000,00	49,95
31	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas	3.411.504.486,00	4.258.673.802,00	(847.169.316,00)	(19,89)
32	Beban Pengisian Tabung Gas	750.000,00	0,00	750.000,00	∞
33	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	648.505.000,00	157.640.000,00	490.865.000,00	311,38
34	Beban Cetak	4.961.701.328,00	5.875.668.428,00	(913.967.100,00)	(15,56)
35	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	287.062.800,00	288.212.800,00	(1.150.000,00)	(0,40)
36	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	9.953.747.022,91	26.379.915.824,46	(16.426.168.801,55)	(62,27)
37	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	121.460.000,00	113.375.400,00	8.084.600,00	7,13
38	Beban Makanan dan Minuman Rapat	10.604.496.790,00	8.551.705.218,00	2.052.791.572,00	24,00
39	Beban Makanan dan Minuman Tamu	3.123.831.000,00	6.416.897.640,00	(3.293.066.640,00)	(51,32)
40	Beban Persediaan Bahan Kimia	258.694.450,00	147.415.350,00	111.279.100,00	75,49
41	Beban Pakaian Batik Tradisional	38.000.000,00	94.500.000,00	(56.500.000,00)	(59,79)
42	Beban Pakaian Adat Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
43	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	125.350.000,00	0,00	125.350.000,00	∞
44	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	594.000,00	0,00	594.000,00	∞
45	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	5.359.600,00	0,00	5.359.600,00	∞
46	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	400.000,00	0,00	400.000,00	∞
47	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	48.660.000,00	0,00	48.660.000,00	∞
48	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	270.745.012,00	0,00	270.745.012,00	∞
49	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	1.144.000,00	0,00	1.144.000,00	∞
50	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.545.260,00	0,00	2.545.260,00	∞
51	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat	1.043.400,00	0,00	1.043.400,00	∞

No.	Jenis Beban Persediaan	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
	Dapur				
52	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.035.000,00	0,00	13.035.000,00	∞
53	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1.744.000,00	0,00	1.744.000,00	∞
54	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	3.275.000,00	0,00	3.275.000,00	∞
55	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	2.015.440,00	0,00	2.015.440,00	∞
56	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(4.000.000,00)	0,00	(4.000.000,00)	∞
57	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	∞
58	Beban Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	5.566.000,00	0,00	5.566.000,00	∞
59	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	271.214.897,00	0,00	271.214.897,00	∞
60	Beban Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	56.553.600,00	0,00	56.553.600,00	∞
61	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	33.260.000,00	2.523.000,00	30.737.000,00	1.218,27
62	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	67.826.500,00	(67.826.500,00)	(100,00)
63	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	259.139.700,00	663.639.236,00	(404.499.536,00)	(60,95)
64	Beban Barang dan Jasa BOS	42.177.300.931,20	51.675.409.567,00	(9.498.108.635,80)	(18,38)
65	Beban Barang dan Jasa BLUD	49.445.642.639,09	41.803.648.647,43	7.641.993.991,66	18,28
	Jumlah Beban Persediaan	**144.730.037.886,10**	**167.639.355.365,80**	**(22.909.317.479,70)**	**(13,67)**

Pada TA.2024, beban persediaan-LO sebesar Rp144.730.037.886,10 sedangkan belanja persediaan-LRA sebesar Rp165.276.010.053,20. Dari jumlah tersebut terdapat perbedaan antara beban persediaan dan belanja persediaan sebesar Rp(20.545.972.167,10). Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Hibah obat-obatan dan alat kontrasepsi sebesar Rp371.770.945,00;
2. Bertambah/Berkurang persediaan tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar Rp(10.987.962.895,15);
3. Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp(375.522.380,00);
4. Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp332.306.590,00;
5. Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp(392.069.689,00);
6. Reklasifikasi ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp(1.377.916.791,95);
7. Reklasifikasi dari Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp10.122.260,00;
8. Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp(935.609.420,00);
9. Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp327.768.497,00;
10. Reklasifikasi dari Ekstrakomptabel sebesar Rp5.566.000,00;
11. Bertambah/Berkurang utang belanja tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar Rp(1.456.327.794,00);
12. Reklasifikasi ke Hibah sekolah swasta sebesar Rp(6.068.097.489,00).

5.4.2.3 Beban Jasa **104.819.842.798,46** **109.861.252.704,20**

Beban jasa TA 2024 adalah sebesar Rp104.819.842.798,46. Apabila dibandingkan dengan TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp5.041.409.905,74 atau 4,59% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.116. Realisasi Beban Jasa TA 2024 dan 2023

No.	Jenis Beban Jasa	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.589.778.600,00	384.800.000,00	1.204.978.600,00	313,14
2	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
3	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	19.691.373,00	12.236.529,00	7.454.844,00	60,92
4	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.771.765.000,00	2.732.050.000,00	(960.285.000,00)	(35,15)

No.	Jenis Beban Jasa	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
5	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	2.000.000,00	3.600.000,00	(1.600.000,00)	(44,44)
6	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	58.200.000,00	147.000.000,00	(88.800.000,00)	(60,41)
7	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	40.120.000,00	6.300.000,00	33.820.000,00	536,83
8	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.724.300.000,00	1.258.750.000,00	465.550.000,00	36,99
9	Beban Honorarium Rohaniwan	7.950.000,00	16.000.000,00	(8.050.000,00)	(50,31)
10	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	73.000.000,00	362.700.000,00	(289.700.000,00)	(79,87)
11	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.098.930.000,00	1.867.850.000,00	(768.920.000,00)	(41,17)
12	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	125.896.098,00	126.483.406,00	(587.308,00)	(0,46)
13	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	113.929,00	1.062.500,00	(948.571,00)	(89,28)
14	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.415.495.528,00	2.326.582.860,00	88.912.668,00	3,82
15	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	14.800.006.000,00	14.654.051.800,00	145.954.200,00	1,00
16	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	132.600.000,00	137.600.000,00	(5.000.000,00)	(3,63)
17	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	97.200.000,00	114.800.000,00	(17.600.000,00)	(15,33)
18	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	37.286,00	1.021.250,00	(983.964,00)	(96,35)
19	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	198.257.100,00	448.457.000,00	(250.199.900,00)	(55,79)
20	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	284.763.868,00	630.753.000,00	(345.989.132,00)	(54,85)
21	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	9.851.250,00	113.369.000,00	(103.517.750,00)	(91,31)
22	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	241.673.672,00	194.147.790,00	47.525.882,00	24,48
23	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	60.900.000,00	93.777.000,00	(32.877.000,00)	(35,06)
24	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	35.947.350,00	(35.947.350,00)	(100,00)
25	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	457.439.769,00	238.615.400,00	218.824.369,00	91,71
26	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	506.992.500,00	867.274.846,00	(360.282.346,00)	(41,54)
27	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	98.955.000,00	52.613.000,00	46.342.000,00	88,08
28	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	98.955.000,00	169.376.900,00	(70.421.900,00)	(41,58)
29	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	2.132.288,00	9.874.625,00	(7.742.337,00)	(78,41)
30	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	81.000.000,00	(81.000.000,00)	(100,00)
31	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	23.376.000,00	20.840.000,00	2.536.000,00	12,17
32	Beban Jasa Pengolahan Sampah	540.250.000,00	537.855.012,00	2.394.988,00	0,45
33	Beban Jasa Pengukuran Tanah	6.300.000,00	29.095.000,00	(22.795.000,00)	(78,35)
34	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	498.000.000,00	698.000.000,00	(200.000.000,00)	(28,65)
35	Beban Jasa Tenaga Keamanan	170.600.000,00	695.850.000,00	(525.250.000,00)	(75,48)
36	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	2.741.904.016,00	2.922.463.320,00	(180.559.304,00)	(6,18)
37	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	11.806.473.236,00	11.464.577.103,20	341.896.132,80	2,98
38	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	764.685.000,00	1.188.009.000,00	(423.324.000,00)	(35,63)
39	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	130.550.000,00	69.050.000,00	61.500.000,00	89,07
40	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	101.400.000,00	2.015.206,00	99.384.794,00	4.931,74
41	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	33.516.677.763,46	32.773.960.753,00	742.717.010,46	2,27
42	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	442.800.000,00	442.800.000,00	0,00	0,00
43	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	13.880.000,00	560.100.000,00	(546.220.000,00)	(97,52)
44	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	44.100.000,00	206.100.000,00	(162.000.000,00)	(78,60)
45	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	22.822.000,00	39.842.000,00	(17.020.000,00)	(42,72)
46	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	3.118.250,00	3.118.250,00	0,00	0,00
47	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-	0,00	15.400.000,00	(15.400.000,00)	(100,00)

No.	Jenis Beban Jasa	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
	Jasa Khusus				
48	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	321.910.000,00	799.979.608,00	(478.069.608,00)	(59,76)
49	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	188.761.084,00	200.218.523,00	(11.457.439,00)	(5,72)
50	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.600.000,00	3.079.240,00	1.520.760,00	49,39
51	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	1.553.579,00	9.187.500,00	(7.633.921,00)	(83,09)
52	Beban Sewa Asrama	0,00	49.350.000,00	(49.350.000,00)	(100,00)
53	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	190.908.000,00	281.239.000,00	(90.331.000,00)	(32,12)
54	Beban Sewa Grader	0,00	35.100.000,00	(35.100.000,00)	(100,00)
55	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	93.998.690,00	237.131.798,00	(143.133.108,00)	(60,36)
56	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural		49.200.000,00	(49.200.000,00)	(100,00)
57	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	25.600.000,00	112.400.000,00	(86.800.000,00)	(77,22)
58	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	13.200.000,00	(13.200.000,00)	(100,00)
59	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	139.400.000,00	166.300.000,00	(26.900.000,00)	(16,18)
60	Beban Sewa Jaringan dengan Media Udara	0,00	5.076.650,00	(5.076.650,00)	(100,00)
61	Beban Sewa Mebel	131.049.600,00	150.324.200,00	(19.274.600,00)	(12,82)
62	Beban Sewa Peralatan Jaringan	9.234.000,00	9.056.000,00	178.000,00	1,97
63	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	111.300.000,00	331.000.000,00	(219.700.000,00)	(66,37)
64	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	19.000.000,00	17.000.000,00	2.000.000,00	11,76
65	Beban Tagihan Air	534.083.264,00	459.847.682,00	74.235.582,00	16,14
66	Beban Tagihan Listrik	7.241.492.222,00	7.312.305.353,00	(70.813.131,00)	(0,97)
67	Beban Tagihan Telepon	757.252.429,00	689.265.627,00	67.986.802,00	9,86
68	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	31.370.810,00	(31.370.810,00)	(100,00)
69	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	277.000.000,00	30.000.000,00	247.000.000,00	823,33
70	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	0,00	108.000.000,00	(108.000.000,00)	(100,00)
71	Beban Paket/Pengiriman	30.252.715,00	14.156.019,00	16.096.696,00	113,71
72	Beban Jasa Kalibrasi	126.961.451,00	220.979.390,00	(94.017.939,00)	(42,55)
73	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	2.402.946.797,00	(2.402.946.797,00)	(100,00)
74	Beban Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	0,00	1.104.693.144,00	(1.104.693.144,00)	(100,00)
75	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	12.000.000,00	13.800.000,00	(1.800.000,00)	(13,04)
76	Beban Bimbingan Teknis	2.454.145.254,00	1.254.192.160,00	1.199.953.094,00	95,68
77	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	0,00	63.625.000,00	(63.625.000,00)	(100,00)
78	Beban Sewa Alat Musik	13.750.000,00	16.250.000,00	(2.500.000,00)	(15,38)
79	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	262.540.000,00	1.501.809.900,00	(1.239.269.900,00)	(82,52)
80	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	789.200.005,00	1.887.244.500,00	(1.098.044.495,00)	(58,18)
81	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.794.377.729,00	2.488.865.219,00	305.512.510,00	12,28
82	Beban Lembur	814.095.000,00	920.848.000,00	(106.753.000,00)	(11,59)
83	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	317.905.172,00	287.431.517,00	30.473.655,00	10,60
84	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	397.780.560,00	305.870.693,00	91.909.867,00	30,05
85	Beban Sewa Electric Generating Set	34.800.000,00	42.000.000,00	(7.200.000,00)	(17,14)
86	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	53.850.000,00	16.000.000,00	37.850.000,00	236,56
87	Beban Sewa Peralatan Umum	499.720.000,00	712.824.000,00	(213.104.000,00)	(29,90)
88	Beban Sewa Bangunan Gudang	3.500.000,00	900.000,00	2.600.000,00	288,89
89	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	236.503.649,00	218.590.000,00	17.913.649,00	8,20
90	Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	800.000,00	0,00	800.000,00	∞
91	Beban Sewa Hotel	234.870.000,00	432.015.000,00	(197.145.000,00)	(45,63)
92	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	59.423.850,00	0,00	59.423.850,00	∞
93	Beban Medical Check Up	162.918.200,00	142.000.000,00	20.918.200,00	14,73

No.	Jenis Beban Jasa	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
94	Beban Penambahan Daya	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
95	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	216.000.000,00	242.000.000,00	(26.000.000,00)	(10,74)
96	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.753.041.574,00	1.480.712.424,00	272.329.150,00	18,39
97	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	2.897.695.520,00	0,00	2.897.695.520,00	∞
98	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	910.509.215,00	1.372.897.050,00	(462.387.835,00)	(33,68)
99	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	97.150.000,00	263.300.000,00	(166.150.000,00)	(63,10)
100	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0,00	2.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(100,00)
101	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	415.800.000,00	545.500.000,00	(129.700.000,00)	(23,78)
102	Beban Jasa Tenaga Administrasi	22.800.000,00	0,00	22.800.000,00	∞
103	Beban Jasa Tenaga Ahli	2.191.112.000,00	0,00	2.191.112.000,00	∞
104	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	2.357.510,00	0,00	2.357.510,00	∞
105	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	60.900.000,00	0,00	60.900.000,00	∞
106	Beban Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	162.000.000,00	0,00	162.000.000,00	∞
	Jumlah Beban Jasa	**104.819.842.798,46**	**109.861.252.704,20**	**(5.041.409.905,74)**	**(4,59)**

Pada TA.2024, beban jasa-LO sebesar Rp104.819.842.798,46 sedangkan belanja jasa-LRA sebesar Rp109.524.229.060,00. Dari jumlah tersebut terdapat perbedaan antara beban jasa dan belanja jasa sebesar Rp(4.704.386.261.54). Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bertambah/Berkurang persediaan tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar Rp(529.431.100,00);
2. Bertambah/Berkurang utang belanja tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar Rp(126.829.556,00);
3. Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp245.913.576,00;
4. Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp(641.760.510,00);
5. Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp(336.517.066,00);
6. Reklasifikasi ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp(2.568.130.700,00);
7. Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp(557.970.940,54);
8. Reklasifikasi ke Hibah sekolah swasta sebesar Rp(189.659.965,00).

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan 5.778.491.863,00 7.231.287.086,00

Beban pemeliharaan TA 2024 adalah sebesar Rp5.778.491.863,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.452.795.223,00 atau 20,09% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.117. Realisasi Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023

No.	Jenis Beban Pemeliharaan	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	50.224.320,00	62.809.840,00	(12.585.520,00)	(20,04)
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	∞
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.589.170.045,00	1.527.104.839,00	62.065.206,00	4,06
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	944.335.995,00	1.035.408.223,00	(91.072.228,00)	(8,80)
5	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	80.312.500,00	234.170.500,00	(153.858.000,00)	(65,70)
6	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	125.330.930,00	115.044.480,00	10.286.450,00	8,94
7	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	∞
8	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	360.655.066,00	233.761.875,00	126.893.191,00	54,28
9	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	115.854.500,00	539.612.730,00	(423.758.230,00)	(78,53)
10	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	400.950.000,00	(400.950.000,00)	(100,00)
11	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	130.460.000,00	0,00	130.460.000,00	∞

No.	Jenis Beban Pemeliharaan	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
12	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	49.853.000,00	0,00	49.853.000,00	∞
13	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	31.500.000,00	135.000.364,00	(103.500.364,00)	(76,67)
14	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	171.778.000,00	(171.778.000,00)	(100,00)
15	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	123.077.770,00	136.215.000,00	(13.137.230,00)	(9,64)
16	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	19.958.464,00	0,00-	19.958.464,00	∞
17	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	191.193.800,00	0,00	0,00	0,00
18	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	0,00	14.400.000,00	(14.400.000,00)	(100,00)
19	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Lapangan Lainnya	0,00	24.868.484,00	(24.868.484,00)	(100,00)
20	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	168.480.000,00	(168.480.000,00)	(100,00)
21	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	183.161.100,00	290.056.260,00	(106.895.160,00)	(36,85)
22	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	143.834.150,00	229.803.650,00	(85.969.500,00)	(37,41)
23	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	49.943.069,00	70.682.201,00	(20.739.132,00)	(29,34)
24	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	68.856.050,00	100.974.350,00	(32.118.300,00)	∞
25	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	25.860.050,00	3.137.500,00	22.722.550,00	724,22
26	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya	65.000.000,00	40.000.000,00	25.000.000,00	62,50
27	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	198.015.795,00	220.804.580,00	(22.788.785,00)	∞
28	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	19.458.464,00	(19.458.464,00)	∞
29	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	82.091.670,00	(82.091.670,00)	(100,00)
30	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	24.980.250,00	38.901.500,00	(13.921.250,00)	(35,79)
31	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	314.386.059,00	439.900.000,00	(125.513.941,00)	(28,53)
32	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00	49.825.000,00	(49.825.000,00)	∞
33	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	68.924.000,00	55.658.500,00	13.265.500,00	∞
34	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	782.379.950,00	754.189.076,00	28.190.874,00	3,74
35	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	31.225.000,00	35.000.000,00	(3.775.000,00)	(10,79)
	Jumlah Beban Pemeliharaan	**5.778.491.863,00**	**7.231.287.086,00**	**(1.452.795.223,00)**	**(20,09)**

Pada TA.2024, beban pemeliharaan-LO sebesar Rp5.778.491.863,00 sedangkan belanja pemeliharaan-LRA sebesar Rp10.450.318.889,00. Dari jumlah tersebut terdapat perbedaan antara beban pemeliharaan dan belanja pemeliharaan sebesar Rp(4.671.827.026,00). Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp(1.583.351.556,00);
2. Reklasifikasi ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp(3.088.475.470,00);

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas 52.205.766.902,00 51.450.062.765,00

Beban perjalanan dinas TA 2024 sebesar Rp52.205.766.902,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp755.704.137,00 atau 1,47% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.118. Realisasi Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023

No.	Jenis Beban Perjalanan Dinas	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.500.213.178,00	19.133.004.277,00	(3.632.791.099,00)	(18,99)

No.	Jenis Beban Perjalanan Dinas	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
2	Beban Perjalanan Dinas Biasa	36.617.253.724,00	31.833.569.919,00	4.783.683.805,00	15,03
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	88.300.000,00	119.375.000,00	(31.075.000,00)	(26,03)
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	181.200.000,00	(181.200.000,00)	(100,00)
5	Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	0,00	182.913.569,00	(182.913.569,00)	(100,00)
	Jumlah Beban Perjalanan Dinas	**52.205.766.902,00**	**51.450.062.765,00**	**755.704.137,00**	**1,47**

Pada TA.2024, beban perjalanan dinas-LO sebesar Rp52.205.766.902,00 sedangkan belanja perjalanan dinas - LRA sebesar Rp52.838.948.103,00. Dari jumlah tersebut terdapat selisih sebesar Rp(633.181.201,00) antara beban perjalanan dinas dan belanja perjalanan dinas sebesar. Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp17.939.369,00;
2. Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp(23.539.369,00);
3. Reklasifikasi ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp(608.826.758,00);
4. Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp(3.603.000,00)
5. Reklasifikasi ke Hibah sekolah swasta sebesar Rp(15.151.443,00).

5.4.2.6 Beban Hibah 56.386.949.582,00 32.388.249.875,00

Realisasi Beban Hibah TA 2024 adalah sebesar Rp56.386.949.582,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp23.998.699.707,00 atau 74,10% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.119. Realisasi Beban Hibah TA 2024 dan 2023

No.	Jenis Beban Hibah	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
I.	**Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat**	**35.926.175.000,00**	**20.493.234.975,00**	**15.432.940.025,00**	**75,31**
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi	21.815.353.000,00	14.400.000.000,00	7.415.353.000,00	51,50
	Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Dairi	7.800.000.000,00	5.200.000.000,00	2.600.000.000,00	50,00
	KODIM 02/06 Dairi	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	∞
	POLRES Dairi	5.310.822.000,00	80.000.000,00	5.230.822.000,00	6.538,53
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi	0,00	44.958.375,00	(44.958.375,00)	(100,00)
	Kementerian Perhubungan RI	0,00	768.276.600,00	(768.276.600,00)	(100,00)
II	**Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat**	**22.702.800,00**	**0,00**	**22.702.800,00**	∞
	KODIM 02/06 Dairi	22.702.800,00	0,00	22.702.800,00	∞
III	**Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya**	**100.200.000,00**	**0,00**	**100.200.000,00**	∞
	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Dinas Pendidikan)	100.200.000,00	0,00	100.200.000,00	∞
IV.	**Beban Hibah Uang kepada BUMN**	**3.996.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**996.000.000,00**	**33,20**
	Penyelenggaraan Event Aquabike Injourney Indonesia Aviation and Tourism	3.996.000.000,00	3.000.000.000,00	996.000.000,00	33,20
V.	**Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**	**262.672.182,00**	**481.173.900,00**	**(218.501.718,00)**	**(45,41)**
	Palang Merah Indonesia (PMI)	0,00	250.000.000,00	(250.000.000,00)	(100,00)
	Lembaga Kebudayaan Pakpak	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	∞
	KORPRI	162.672.182,00	231.173.900,00	(68.501.718,00)	(29,63)
VI.	**Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**	**0,00**	**250.000.000,00**	**(250.000.000,00)**	**(100,00)**
	Kelompok Kerja Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
	Lembaga Kebudayaan Pakpak	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
	Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(100,00)
	Aliansi Perempuan Perubahan Dairi	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(100,00)
VII.	**Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	**15.133.953.600,00**	**7.340.078.500,00**	**7.793.875.100,00**	**106,18**
	Bantuan Operasional Penyelenggaran PAUD Masyarakat/Swasta kepada KB dan TK se-Kabupaten Dairi	1.916.230.300,00	2.164.011.900,00	(247.781.600,00)	(11,45)

No.	Jenis Beban Hibah	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
	Pengelolaan BOP Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	130.950.000,00	118.395.000,00	12.555.000,00	10,60
	LVRI	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	-
	Karang Taruna Kabupaten	149.700.800,00	250.000.000,00	(100.299.200,00)	(40,12)
	KONI	300.000.000,00	600.000.000,00	(300.000.000,00)	(50,00)
	Pencab NPC	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
	Kwarcab PRAMUKA	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
	Gerakan Pemuda ANSOR	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
	KNPI	300.000.000,00	600.000.000,00	(300.000.000,00)	(50,00)
	GAMKI	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
	MUI	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	PHBI	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	LPTQ	200.000.000,00	300.000.000,00	(100.000.000,00)	(33,33)
	BMAG	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	FKUB	50.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	25,00
	GEREJA	300.000.000,00	786.000.000,00	(486.000.000,00)	(61,83)
	MESJID	100.000.000,00	200.000.000,00	(100.000.000,00)	(50,00)
	Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Dairi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	Lembaga Pembinaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Kabupaten Dairi	120.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	20,00
	Hibah aset tetap kepada TK, SD dan SMP Swasta	4.964.433.600,00	1.421.671.600,00	3.542.762.000,00	249,20
	Hibah beban barang dan jasa SD dan SMP Swasta	6.042.638.900,00	0,00	6.042.638.900,00	∞
VIII.	**Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**100.000.000,00**	**0,00**	**100.000.000,00**	∞
	Pemuda Pancasila	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	∞
IX.	**Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik**	**845.246.000,00**	**823.762.500,00**	**21.483.500,00**	**2,61**
	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	845.246.000,00	823.762.500,00	21.483.500,00	2,61
	Jumlah Beban Hibah	**56.386.949.582,00**	**32.388.249.875,00**	**23.998.699.707,00**	**74,10**

Pada TA.2024, beban hibah-LO sebesar Rp56.386.949.582,00 sedangkan belanja hibah-LRA sebesar Rp45.256.974.282,00. Dari jumlah tersebut terdapat perbedaan antara beban hibah dan belanja hibah sebesar Rp4.804.938.400,00. Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hibah aset tanah ke KODIM 02/06 Dairi sebesar Rp22.702.800,00;
2. Hibah aset tanah ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp100.200.000,00;
3. Hibah aset tetap peralatan dan mesin ke TK, SD dan SMP Swasta sebesar Rp4.964.433.600,00;
4. Hibah beban barang dan jasa ke TK, SD dan SMP Swasta sebesar Rp6.042.638.900,00.

5.4.2.7 Beban Bantuan Sosial 0,00 1.482.600.000,00

Realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2024 adalah sebesar Rp0,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.482.600.000,00 atau 100,00%.
Rincian realisasi Beban Bantuan Sosial disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.120. Realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

No.	Jenis Beban Bantuan Sosial	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	0,00	300.000.000,00	(300.000.000,00)	(100,00)
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	1.182.600.000,00	(1.182.600.000,00)	(100,00)
Jumlah Beban Bantuan Sosial		**0,00**	**1.482.600.000,00**	**(1.482.600.000,00)**	**(100,00)**

5.4.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi 116.424.956.427,43 146.991.460.658,55

Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 adalah sebesar Rp116.424.956.427,43 dilakukan terhadap Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud. Apabila dibandingkan dengan TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp30.566.504.231,12 atau 20,79%, dengan rincian sebagai berikut.

a. Beban Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp116.268.044.831,78, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.121. Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap TA 2024 dan 2023

No.	Jenis Aset Tetap	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Peralatan dan Mesin	37.634.672.734,73	37.797.212.156,53	(162.539.421,80)	(0,43)
2	Gedung dan Bangunan	27.633.289.555,51	22.100.737.420,33	5.532.552.135,18	25,03
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	51.000.082.541,54	86.936.599.486,03	(35.936.516.944,49)	(41,34)
	Jumlah Beban Penyusutan	**116.268.044.831,78**	**146.834.549.062,89**	**(30.566.504.231,11)**	**(20,82)**

b. Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp156.911.595,65 merupakan beban amortisasi *software*/aplikasi yang ada di SKPD, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.122. Rincian Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud per TA 2024 dan 2023

No.	Jenis Aset Tak Berwujud	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dinas Kesehatan	44.718.290,00	44.718.290,00	0,00	0,00
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	856.035,00	856.035,00	0,00	0,00
3	Badan Pendapatan Daerah	35.970.000,00	35.970.000,00	0,00	0,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	39.607.600,00	39.607.600,00	0,00	0,00
5	Dinas Perhubungan	20.826.337,32	20.826.337,32	0,00	0,00
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	333.333,33	333.333,33	0,00	0,00
7	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Beban Amortisasi	**156.911.595,65**	**156.911.595,65**	**0,00**	**0,00**

5.4.2.9 Beban Penyisihan Piutang 994.862.758,02 895.966.488,20

Beban penyisihan piutang TA 2024 adalah sebesar Rp994.862.758,02. Apabila dibandingkan dengan TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp98.896.269,82 atau 11,04%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.123. Beban Penyisihan Piutang TA 2024 dan 2023

No.	Jenis Beban Penyisihan Piutang	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	**Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah**				
a	Beban penyisihan piutang pajak hotel	143.104,77	83.045,00	60.059,77	72,32
b	Beban penyisihan piutang pajak losmen	2.970.035,00	226.613,64	2.743.421,36	1.210,62
c	Beban penyisihan piutang pajak rumah makan	103.642.300,73	41.103.358,48	62.538.942,25	152,15
d	Beban penyisihan piutang pajak hiburan (diskotik)	429.387,50	2.335.962,50	(1.906.575,00)	(81,62)
e	Beban penyisihan piutang pajak reklame	8.141,25	271.315,66	(263.174,41)	(97,00)
f	Beban penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan	190.086.748,03	198.767.421,34	(8.680.673,31)	(4,37)
g	Beban penyisihan piutang pajak air tanah	11.565,28	12.420,54	(855,26)	(6,89)
h	Beban penyisihan piutang PBB P-2	552.452.977,33	610.101.740,94	(57.648.763,61)	(9,45)
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	**849.744.259,89**	**852.901.878,10**	**(3.157.618,21)**	**(0,37)**
2	**Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah**				
a	Beban penyisihan piutang retribusi menara telekomunikasi	108.692.810,00	2.767.850,00	105.924.960,00	3.826,98
b	Beban penyisihan piutang retribusi pelayanan kesehatan	36.425.688,13	249.375,00	36.176.313,13	14.506,79
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	**145.118.498,13**	**3.017.225,00**	**142.101.273,13**	**4.709,67**
3	**Beban Penyisihan Lain-lain PAD yang Sah**				
a	Beban penyisihan piutang Pendapatan Dana Non-Kapitasi JKN	0,00	40.047.385,10	(40.047.385,10)	(100,00)
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	**0,00**	**40.047.385,10**	**(40.047.385,10)**	**(100,00)**
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang	**994.862.758,02**	**895.966.488,20**	**98.896.269,82**	**11,04**

5.4.2.10 Beban Transfer 68.436.145.000,00 64.249.847.200,00

Beban Transfer selama TA 2024 merupakan transfer beban bantuan yang terdiri atas beban bagi hasil pendapatan kepada pemerintahan desa, beban transfer bantuan keuangan kepada Desa dan beban transfer

bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa. Realisasi beban transfer TA 2024 sebesar Rp68.436.145.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp4.186.297.800,00 atau 6,52%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.124. Realisasi Beban Transfer TA 2024 dan 2023

No.	Jenis Beban Transfer	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
I.	**Transfer Bagi Hasil**	**2.170.000.000,00**	**1.961.800.000,00**	**208.200.000,00**	**10,61**
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintahan Desa	2.170.000.000,00	1.961.800.000,00	208.200.000,00	10,61
II.	**Transfer Bantuan Keuangan**	**66.266.145.000,00**	**62.288.047.200,00**	**3.978.097.800,00**	**6,39**
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa	66.266.145.000,00	62.288.047.200,00	3.978.097.800,00	6,39
	Jumlah Beban Transfer	**68.436.145.000,00**	**64.249.847.200,00**	**4.186.297.800,00**	**6,52**

5.4.2.11 Beban Lain-lain 0,00 1.248.047.988,00

Beban Lain-lain selama TA 2024 sebesar Rp0,00 merupakan beban penghapusbukuan (dari pencatatan di Neraca) atas aset tetap yang berdasarkan kebijakan akuntansi merupakan aset ekstrakomptabel (aset dengan nilai di bawah nilai kapitalisasi) dan tidak perlu disajikan dalam Neraca.

Pada TA 2024, beban ini direklasifikasi menjadi beban barang dan jasa pada rekening Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi. Adapun rincian beban lain-lain adalah sebagai berikut.

Tabel 5.125. Realisasi Beban Lain-lain TA 2024 dan 2023

No.	Nama SKPD	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	0,00	1.176.195.036,00	(1.176.195.036,00)	(100,00)
2	Dinas Kesehatan	0,00	18.974.000,00	(18.974.000,00)	(100,00)
3	RSUD Sidikalang	0,00	881.452,00	(881.452,00)	(100,00)
4	Dinas Perhubungan	0,00	6.957.500,00	(6.957.500,00)	(100,00)
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(100,00)
6	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	0,00	35.040.000,00	(35.040.000,00)	(100,00)
7	Kecamatan Berampu	0,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(100,00)
	Jumlah Beban Lain-lain	**0,00**	**1.248.047.988,00**	**(1.248.047.988,00)**	**(100,00)**

5.4.3 Surplus/Defisit Kegiatan Operasional-LO (19.832.445.588,92) 30.012.063.639,87

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional-LO merupakan selisih Pendapatan-LO dikurangi Beban Operasional. Perhitungan Surplus/Defisit Kegiatan Operasional-LO Tahun 2023 sebagai berikut.

Pendapatan - LO	Rp	1.068.516.395.883,09
Beban Operasional - LO	Rp	(1.088.348.841.472,01)
Surplus/Defisit-Kegiatan Operasional - LO	**Rp**	**(19.832.445.588,92)**

5.4.4 Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional-LO (2.434.800,67) 1.190.736.076,39

5.4.4.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO 9.032.733,33 1.255.639.648,00

Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO merupakan surplus dari penjualan aset daerah yang dipisahkan. Pada TA 2024, realisasi Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp9.032.733,33.

5.4.4.2 Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO 0,00 64.903.571,61

Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO merupakan defisit dari penjualan aset daerah yang dipisahkan. Pada TA 2024, realisasi Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp0,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023, realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp64.903.571,61.

Penjualan aset daerah yang dipisahkan dilaksanakan sesuai dengan SK Bupati Dairi tentang penghapusan aset daerah, diuraikan sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati Dairi Nomor 1207/000.2.3.2/XII/2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang Tahun Anggaran 2024;
2. Keputusan Bupati Dairi Nomor 1060/000.2.4/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang Tahun Anggaran 2024;
3. Keputusan Bupati Dairi Nomor 1141/000.2.3.2/XI/2024 tanggal 15 November 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Bupati Dairi Nomor 1207/000.2.3.2/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang Tahun Anggaran 2024.

Tabel 5.126. Realisasi Defisit Penjualan Aset Non Lancar - Penghapusan Aset TA 2024

No.	Nama SKPD	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - Penghapusan Aset TA 2024		
		Aset Tetap	Aset Lain-lain	Jumlah
1	Dinas Lingkungan Hidup	8.746.666,67	0,00	8.746.666,67
2	Kecamatan Sidikalang	0,00	852.100,00	852.100,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(8.746.666,67)	(852.100,00)	(9.598.766,67)
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

5.4.4.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO — 11.467.534,00 — 0,00

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya–LO pada tahun 2024 sebesar Rp11.467.534,00 merupakan beban atas keterlanjuran penyetoran pajak ke Negara akibat tidak terlaksananya kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Kegiatan tersebut dibayar kepada CV. Nur Cahaya dengan uang muka 50,00% sebesar Rp99.835.000,00 dan dikenakan PPN dan PPh sebesar Rp11.467.534,00. Namun pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan dananya dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 3 Januari 2025 sebesar Rp88.367.466,00.

5.4.5 Pos Luar Biasa-LO — (2.254.610.365,00) — (1.343.356.000,00)

Pos Luar Biasa adalah pendapatan atau pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

5.4.5.1 Pendapatan Luar Biasa-LO — 0,00 — 0,00

Pendapatan Luar Biasa-LO pada tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00.

5.4.5.2 Beban Luar Biasa — 2.254.610.365,00 — 1.343.356.000,00

Realisasi Beban Luar Biasa TA 2024 sebesar Rp2.254.610.365,00 merupakan realisasi dari belanja tak terduga yang terdapat pada LRA sebesar Rp3.581.937.735,00 dan dilakukan reklasifikasi ke aset tetap sebesar Rp1.327.327.370,00.

Tabel 5.127. Realisasi Beban Luar Biasa TA 2024

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran Sebelumnya dari Penerimaan Dana Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2022	44.024.965,00
2	Perbaikan Badan Jalan Dusun IV Batu Dongkol Desa Sinampang Kecamatan Siempat Nempu	149.800.000,00
3	Penanggulangan Bencana di Desa Sukadame Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi Tahun 2024 dan Bantuan Stimulan Seng	238.206.000,00
4	Penanganan Jalur Alternatif Lae Hole-Huta Login-Siarung Arung-Tinombak Simbolon-Sigalingging dan Simpang Siarung Arung-Tinombak Simbolon-Sigalingging Kecamatan Parbuluan Kabupataen Dairi Tahun 2024	107.160.000,00
5	Penanganan Pasca Bencana Alam di Kecamatan Tanah Pinem Tahun 2024	76.598.000,00
6	Penambahan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024	27.712.000,00
7	Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran Sebelumnya dari Setoran Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi dan Setoran Langsung Pedagang TA. 2024	763.000.000,00
8	Perbaikan Infrastruktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho Akibat Bencana Alam di Desa Juma Gerat Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi	200.000.000,00

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
9	Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 di Kabupaten Dairi untuk Instansi Vertikal Kepolisian Resor Dairi	114.359.200,00
10	Kunjungan Kerja, Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan Wakil Kepala Kepolisian RI di Wilayah Hukum Polres Dairi pada Instansi Vertikal Kepolisian Resor Dairi	324.283.000,00
11	Pelaksanaan Pengamanan Polri Event Aquabike di Kabupaten Dairi Tahun 2024 untuk Kepolisian Resor Dairi	60.000.000,00
12	Pelaksanaan Pengamanan Kegiatan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Dairi Tahun 2024 untuk Instansi Vertikal Polres Dairi Kabupaten Dairi TA. 2024	119.419.200,00
13	Pelaksanaan Pengamanan Event Aquabike di Kabupaten Dairi Tahun 2024 untuk Komando Distrik Militer 0206 / Dairi	15.000.000,00
14	Pelaksanaan Pengamanan Kegiatan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Dairi Tahun 2024 untuk Instansi Vertikal Kodim 0206/Dairi TA. 2024	15.048.000,00
Jumlah Beban Tak Terduga		**2.254.610.365,00**

5.4.6 Surplus/Defisit-LO (22.089.490.754,59) 29.859.443.716,26

Surplus/Defisit-LO TA 2024 sebesar Rp(22.089.490.754,59) diuraian sebagai berikut:

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	Rp	(19.832.445.588,92)	
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	Rp	(2.434.800,67)	
Pos Luar Biasa	Rp	(2.254.610.365,00)	+
Surplus/Defisit-LO	**Rp**	**(22.089.490.754,59)**	

5.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Tujuan pelaporan arus kas adalah untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi arus kas bermanfaat diantaranya sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang.

Laporan Arus Kas terdiri dari:
1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi;
2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi;
3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan;
4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris; dan
5. Saldo Akhir Kas.

	Tahun 2024 Rp	Tahun 2023 Rp
5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	**77.232.261.906,37**	**142.209.287.321,50**

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan Indikator yang menunjukan kemampuan Operasi Pemerintah Kabupaten Dairi dalam menghasilkan Kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas dari Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Kas Masuk 1.195.775.083.764,57 1.190.683.044.009,23

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.195.775.083.764,57. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp5.092.039.755,34 atau 0,43% apabila dibandingkan tahun 2023.

Rincian arus kas masuk sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.128. Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 dan 2023

Jenis Penerimaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	21.620.031.867,80	20.491.410.869,13
Penerimaan Retribusi Daerah	60.628.636.118,00	3.320.064.213,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.964.954.686,50	11.409.321.078,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	6.148.007.935,27	48.436.295.836,10

Jenis Penerimaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Penerimaan Bagian Daerah dari Bagi Hasil Pajak	10.879.478.890,00	11.853.447.510,00
Penerimaan Bagian Daerah dari Bagi Hasil Bukan Pajak	4.151.779.000,00	4.423.542.725,00
Penerimaan Bagian Daerah dari Bagi Hasil Lainnya	7.520.542.000,00	8.513.744.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	647.834.166.080,00	590.036.443.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik	64.141.894.493,00	97.765.061.442,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	159.569.212.334,00	170.000.939.721,00
Penerimaan Insentif Fiskal	15.166.908.000,00	33.666.172.000,00
Penerimaan Dana Desa	136.561.076.000,00	135.230.180.200,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	37.478.953.445,00	42.102.238.300,00
Bantuan Keuangan	0,00	965.798.547,00
Penerimaan Hibah	0,00	0,00
Penerimaan Dana Kapitasi JKN	12.109.442.915,00	12.468.384.568,00
Jumlah	1.195.775.083.764,57	1.190.683.044.009,23

5.5.1.2 Arus Kas Keluar 1.118.542.821.858,20 1.048.473.756.687,73

Jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.118.542.821.858,20. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp70.069.065.170,47 atau 6,68% apabila dibandingkan tahun 2023. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan realisasi belanja.
Rincian arus kas keluar sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.129. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 dan 2023

Jenis Pengeluaran	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pembayaran Pegawai	526.617.182.736,00	455.914.059.535,00
Pembayaran Barang dan Jasa	338.089.506.105,20	356.743.301.652,73
Pembayaran Belanja Hibah	45.256.974.282,00	30.153.343.300,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	0,00	1.482.600.000,00
Pembayaran Tak Terduga	3.581.937.735,00	4.700.424.800,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	2.170.000.000,00	1.961.800.000,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	202.827.221.000,00	197.518.227.400,00
Jumlah	1.118.542.821.858,20	1.048.473.756.687,73

5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi (133.191.984.440,88) (189.317.585.419,77)

Arus kas dari aktivitas investasi merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Dairi di masa yang akan datang.

Nilai arus kas bersih dari aktivitas investasi sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(133.191.984.440,88). Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp56.125.600.978,89 atau 29,65% apabila dibandingkan dengan tahun 2023. Nilai arus kas bersih negatif tersebut mengindikasikan Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan kegiatan penambahan aset tetap dan penyertaan modal (investasi) yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan kas yang diperoleh dari kegiatan penghentian atau penjualan aset tetap sampai dengan 31 Desember 2024.

5.5.2.1 Arus Kas Masuk 49.604.500,00 1.427.671.848,00

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp49.604.500,00. Nilai tersebut merupakan dana hasil penjualan aset rusak berat yang tidak dapat mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Dairi.

5.5.2.2 Arus Kas Keluar

133.241.588.940,88 **190.745.257.267,77**

Jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi aset nonkeuangan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp133.241.588.940,88. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp57.503.668.326,89 atau 30,15% apabila dibandingkan tahun 2023.
Rincian arus kas keluar sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.130. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023

Jenis Pengeluaran	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Perolehan Tanah	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	17.448.098.019,00	33.247.679.146,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	22.220.323.063,00	42.398.764.060,35
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	82.813.149.768,88	104.191.838.531,42
Perolehan Aset Tetap Lainnya	7.733.870.580,00	7.906.975.530,00
Perolehan Aset Lainnya	1.147.510,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.025.000.000,00	3.000.000.000,00
Jumlah	**133.241.588.940,88**	**190.745.257.267,77**

5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

(0,00) **(0,00)**

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.
Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Nilai arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00.

5.5.3.1 Arus Kas Masuk

0,00 **0,00**

Jumlah penerimaan dari aktivitas pendanaan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00.

5.5.3.2 Arus Kas Keluar

0,00 **0,00**

Jumlah arus kas keluar dari aktivitas pendanaan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00.

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

1.230.335,00 **(21.340.044,00)**

Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pembiayaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Dairi. Arus kas dari aktivitas transitoris berasal dari transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), kelebihan pembayaran pajak dan sisa kas pada bendahara pengeluaran.
Nilai arus kas bersih dari aktivitas transitoris sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.230.335,00.

5.5.4.1 Arus Kas Masuk

58.071.788.753,57 **56.557.617.440,00**

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas non anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp58.071.788.753,57. Nilai arus kas masuk tersebut berupa penerimaan dari potongan/pungutan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp58.050.440.009,57 dan sisa kas Bendahara Pengeluaran TA 2023 sebesar Rp21.348.744,00.

5.5.4.2 Arus Kas Keluar

58.070.558.418,57 **56.578.957.484,00**

Jumlah arus kas keluar dari aktivitas non anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp58.070.558.418,57. Nilai arus kas keluar tersebut berupa penyetoran PFK yang telah dipotong/dipungut selama TA 2024 sebesar Rp58.050.440.009,57 dan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp20.118.409,00.

5.5.5 Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih (55.958.492.199,51) (47.129.638.142,27)

Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp(55.958.492.199,51) dan Rp(47.129.638.142,27). Perhitungan kenaikan kas bersih Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	77.232.261.906,37
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(133.191.984.440,88)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	1.230.335,00
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih	**Rp**	**(55.958.492.199,51)**

5.5.6 Saldo Akhir Kas di BUD 38.984.851.459,14 94.943.343.658,65

Saldo Akhir Kas di BUD Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp38.984.851.459,14 dan Rp94.943.343.658,65. Nilai saldo akhir Kas di BUD Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Saldo Awal Kas di BUD	Rp	94.943.343.658,65
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih	Rp	(55.958.492.199,51)
Saldo Akhir Kas di BUD	**Rp**	**38.984.851.459,14**

5.5.7 Saldo Akhir Kas 39.154.424.478,14 94.964.692.402,65

Saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp39.154.424.478,14 dan Rp94.964.692.402,65, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.131. Rincian Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Akhir Kas di BUD	38.984.851.459,14	94.943.343.658,65
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	21.348.744,00
Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	169.573.019,00	0,00
Saldo Akhir Kas	**39.154.424.478,14**	**94.964.692.402,65**

5.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi LPE adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Rincian pos pada LPE dapat dijelaskan sebagai berikut:

	Tahun 2024 Rp	Tahun 2023 Rp
5.6.1 Ekuitas Awal	**2.059.931.292.564,83**	**2.038.844.439.824,68**

Saldo ekuitas awal per 1 Januari 2024 sebesar Rp2.059.931.292.564,83 merupakan saldo akhir ekuitas dana tahun 2023 sesuai dengan neraca Tahun 2023 *(audited)*. Apabila dibandingkan dengan TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp21.086.852.740,15 atau 1,03%.

5.6.2 Surplus / Defisit-LO (22.089.490.754,59) 29.859.443.716,26

Surplus/defisit-LO TA 2024 terealisasi sebesar Rp(22.089.490.754,59) merupakan surplus atas kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Dairi tahun 2024 yang menambah nilai ekuitas pada Neraca tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp51.948.934.470,85 atau 173,98%.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

5.6.3.1 Koreksi Ekuitas Lainnya **(319.175.799.123,93)** **(8.772.590.976,11)**

Koreksi ekuitas lainnya merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas sebagai dampak adanya kesalahan mendasar penyajian saldo akun yang terjadi pada periode sebelumnya maupun dampak dari adanya perubahan kebijakan yang terjadi di Tahun 2024. Saldo koreksi ekuitas lainnya Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(319.175.799.123,93), dengan rincian sebagai berikut:

- **Badan Penanggulangan Bencana Daerah:**		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor)	(Rp	39.590.000,00)
- **Badan Pendapatan Daerah :**		
Bertambah akibat :		
(Penyisihan Piutang PBBP2)	Rp	108.752.661,04
(Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah)	Rp	12.420,54
(Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya)	Rp	114.464.212,50
(Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron)	Rp	271.330,16
(Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya)	Rp	7.000,00
(Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Restoran dan Sejenisnya)	Rp	7.337.958,48
(Penyisihan Piutang Pajak Hotel-Losmen)	Rp	16.863,64
(Penyisihan Piutang Pajak Hotel-Hotel)	Rp	12.550,00
- **Dinas Kesehatan:**		
Bertambah akibat :		
(Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas)	Rp	249.375,00
- **Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga:**		
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan bangunan)	Rp	3.500.000,00
- **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang:**		
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan)	Rp	0,12
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan)	(Rp	0,11)
- **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:**		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan)	(Rp	13.651.883,34)
- **Dinas Pendidikan**		
Berkurang akibat :		
(Koreksi TGR atas salah catat tahun sebelumnya)	(Rp	2.992.472,00)
(Koreksi Kas Dana BOS PAUD)	(Rp.	67.920.481,00)
- **Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan:**		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan)	(Rp	113.803.675,00)
- **Sekretariat Daerah :**		
Bertambah akibat :		

(Penyesuaian akumulasi penyusutan)	Rp	2.200.000,03
Berkurang akibat :		
(Penghapusan Aset Rusak Berat)	(Rp	9.946.450,00)
- **Uptd Rumah Sakit Umum Sidikalang:**		
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan)	Rp	45.012.460,00
(Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD)	Rp	40.047.385,10
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan)	(Rp	1.935.525.304,76)
- **Badan Keuangan dan Aset Daerah :**		
Bertambah akibat :		
(Koreksi Laba tahun sebelumnya Perumda Air Minum Lae Nciho)	Rp	15.882.850,00
- **Penyesuaian akumulasi penyusutan pada aplikasi e-BMD :**		
Bertambah akibat :		
Koreksi penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	Rp	7.552.250,00
Koreksi penyesuaian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	242.750.266,55
Koreksi penyesuaian Akumulasi Penyusutan Bangunan dan Gedung	Rp	16.407.082.624,10
Koreksi penyesuaian Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	5.797.314.869,60
Berkurang akibat :		
Koreksi penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(Rp	236.650.633,22)
Koreksi penyesuaian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(Rp	21.923.850.055,72)
Koreksi penyesuaian Akumulasi Penyusutan Bangunan dan Gedung	(Rp	170.300.000,00)
Koreksi penyesuaian Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		(Rp317.454.035.245,64)
Jumlah		**Rp 319.175.799.123,93**

Tabel 5.132. Daftar Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Koreksi Ekuitas (Rp)
1	Penyesuaian akumulasi penyusutan	(319.381.994.327,39)
2	Penghapusan Aset Rusak Berat	(9.946.450,00)
3	Penyisihan Piutang	271.171.756,46
4	Koreksi Kas Dana BOS PAUD	(67.920.481,00)
5	Koreksi TGR atas salah catat tahun sebelumnya	(2.992.472,00)
6	Koreksi Laba tahun sebelumnya Perumda Air Minum Lae Nciho	15.882.850,00
	Jumlah	**(319.175.799.123,93)**

5.6.4 Ekuitas Akhir 1.718.666.002.686,31 2.059.931.292.564,83

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.718.666.002.686,31. Apabila dibandingkan dengan TA 2023, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp341.265.289.878,52 atau 16,57% dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.133. Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Ekuitas Awal per 1 Januari	2.059.931.292.564,83	2.038.844.439.824,68	21.086.852.740,15	1,03
2	Surplus/Defisit-LO	(22.089.490.754,59)	29.859.443.716,26	(51.948.934.470,85)	(173,98)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:				
	Koreksi Ekuitas Lainnya	(319.175.799.123,93)	(8.772.590.976,11)	(310.403.208.147,82)	3.538,33
4	**Ekuitas Akhir per 31 Desember**	**1.718.666.002.686,31**	**2.059.931.292.564,83**	**(341.265.289.878,52)**	**(16,57)**

Bab VI

Penjelasan atas informasi-informasi Nonkeuangan

6.1 Gambaran umum wilayah

Pemerintah Kabupaten Dairi dibentuk dan ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Dairi dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9), menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689). Kabupaten Dairi berkedudukan di Sidikalang dan pada saat pembentukannya terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Sidikalang, ibukotanya Sidikalang;
2. Kecamatan Sumbul, ibukotanya Sumbul;
3. Kecamatan Tigalingga, ibukotanya Tigalingga;
4. Kecamatan Tanah Pinem, ibukotanya Kutabuluh;
5. Kecamatan Salak,ibukotanya Salak;
6. Kecamatan Kerajaan, ibukotanya Sukarame;
7. Kecamatan Silima Pungga-pungga, ibukotanya Parongil;
8. Kecamatan Siempat Nempu, ibukotanya Bunturaja.

Kabupaten Dairi mempunyai batas-batas wilayah :

- ✓ Sebelah utara dengan Kabupaten Aceh Tenggara (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) dan Kabupaten Karo;
- ✓ Sebelah timur dengan Kabupaten Samosir;
- ✓ Sebelah barat dengan Kabupaten Aceh Selatan (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) dan;
- ✓ Sebelah selatan dengan Kabupaten Pakpak Bharat.

Secara geografis, letak Kabupaten Dairi berada antara 98`00'-98`30' BT dan 2`15'-3`00' LU dengan luas wilayah 192.780 hektar terletak sebelah barat laut Provinsi Sumatera Utara, yang sebagian besar terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit dengan kemiringan bervariasi dengan kecenderunga iklim hujan tropis. Pada umumnya wilayah di Kabupaten Dairi berada pada ketinggian rata-rata 700 - 1.250 meter di atas permukaan laut.

Pada Tahun 2003, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 29, tambahan Lembaran Negara 4272), maka telah ditetapkan Wilayah Kabupaten Pakpak Barat yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe;
2. Kecamatan Kerajaan;
3. Kecamatan Salak.

Yang sebelumnya ketiga Kecamatan di atas merupakan wilayah Kabupaten Dairi.

Wilayah Kabupaten Dairi terbagi atas 15 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 161 Desa yaitu :

1. Kecamatan Sidikalang, ibukotanya Sidikalang;
2. Kecamatan Sumbul, ibukotanya Sumbul;
3. Kecamatan Silima Pungga-pungga, ibukotanya Parongil;
4. Kecamatan Siempat Nempu, ibukotanya Bunturaja;
5. Kecamatan Tigalingga, ibukotanya Tigalingga;
6. Kecamatan Tanah Pinem, ibukotanya Kuta Buluh;7.Kecamatan Parbuluan, ibukotanya Sigalingging;
8. Kecamatan Pegagan Hilir, ibukotanya Tigabaru;
9. Kecamatan Siempat Nempu Hulu, ibukotanya Silumboyah;
10. Kecamatan Siempat Nempu Hilir, ibukotanya Sopo Butar;
11. Kecamatan Lae Parira, ibukotanya Lae Parira;
12. Kecamatan Gunung Sitember, ibukotanya Gunung Sitember;
13. Kecamatan Berampu, ibukotanya Berampu;
14. Kecamatan Silahi Sabungan, ibukotanya Silalahi;

15. Kecamatan Sitinjo, ibukotanya Sitinjo.

6.2 Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Dairi per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 333.335 jiwa (laki-laki 166.297 jiwa dan perempuan 167.038 jiwa), jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 7.180 jiwa dari tahun 2023, dimana pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Dairi adalah sebanyak 326.155 jiwa (laki-laki 162.247 jiwa dan perempuan 163.908 jiwa). Jumlah kepala keluarga tahun 2024 sebanyak 96.168 KK, mengalami peningkatan sebanyak 2.538 KK dari tahun 2023 sebanyak 93.630 KK.

Tabel 6.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Dairi Tahun 2015 – 2024

Tahun	Penduduk (jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2015	161.221	158.631	319.852
2016	161.661	160.121	321.782
2017	157.373	156.415	313.788
2018	155.272	154.267	309.539
2019	156.490	155.185	311.675
2020	158.105	157.259	315.364
2021	159.155	159.625	318.780
2022	160.171	161.375	321.546
2023	162.247	163.908	326.155
2024	166.297	167.038	333.335

6.3 Aparatur

Jumlah ASN dan PPPK Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2024 masing-masing sebanyak 3.904 orang dan 1.781 orang. Distribusi kepegawaian daerah menurut golongan ruang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2024 dan 2023

No	Golongan Ruang	Tahun 2024	Tahun 2023
1	IV/d	1	1
2	IV/c	75	40
3	IV/b	289	315
4	IV/a	333	447
5	III/d	1.153	1.045
6	III/c	538	709
7	III/b	589	442
8	III/a	468	664
9	II/d	263	218
10	II/c	133	180
11	II/b	31	41
12	II/a	18	22
13	I/d	3	4
14	I/c	10	11
15	I/b	0	0
Jumlah		3.904	4.139

Tabel 6.3 Jumlah PPPK Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2024 dan 2023

No	Golongan	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Golongan XI	2	-
2	Golongan IX	1.568	932
3	Golongan VII	193	1

No	Golongan	Tahun 2024	Tahun 2023
4	Golongan V	18	18
Jumlah		1.781	951

6.4 Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Dairi secara umum telah dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Dairi.

6.5 Pergantian Kepala Daerah

Sesuai dengan masa periode Bupati Dr. Eddy Keleng Ate Berutu mulai Tahun 2019 – 2024 yang berakhir pada tanggal 21 April 2024. Maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-982 tanggal 22 April 2024 ditetapkan Surung Charles Lamhot Bantjin selaku Penjabat Bupati Dairi pada tanggal 26 April 2024 oleh Penjabat Gubernur Sumatera Utara di Medan. Kepemimpinan Penjabat Bupati Dairi ini berakhir pada tanggal 3 Maret 2025.

Bab VII

Penutup

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2024 ini telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti.

Catatan atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Dairi dalam penyampaian Laporan Keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan berikutnya. Dengan segala kekurangannya, kami menyakini bahwa pengelolaan keuangan tahun 2024 secara umum telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan.

Dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2024, pengungkapan yang kami sajikan dalam laporan keuangan ini dapat lebih berguna bagi stakeholders dan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Dairi di masa yang akan datang.

Kami berharap dengan tersusunnya Laporan Keuangan ini dapat mendorong terciptanya keterbukaan sebagai salah satu pilar pencapaian ***Good Governance.***

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Lampiran VIII : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

DAFTAR MUTASI PIUTANG DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tahun 2024		Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
				Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan (Hotel)	2022 s/d 2024	3.361.000,00	360.652.313,00	336.726.359,00	27.286.954,00
2	Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan (Losmen)	2022 s/d 2024	16.942.727,00	114.794.000,00	100.909.727,00	30.827.000,00
3	Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman (Restoran/Rumah Makan)	2018 s/d 2024	866.081.696,00	796.849.589,00	543.352.140,00	1.119.579.145,00
4	Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan	2018 s/d 2024	10.308.500,00	13.920.000,00	7.580.000,00	16.648.500,00
5	Pajak Reklame	2022 s/d 2024	54.210.932,00	689.329.372,00	741.912.054,00	1.628.250,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2018 s/d 2024	3.775.397.815,00	2.998.677.901,00	4.223.194.795,00	2.550.880.921,00
7	Pajak Air Tanah	2022 s/d 2024	2.484.108,00	43.499.723,00	43.670.776,00	2.313.055,00
8	PBB Perdesaan dan Perkotaan	≤ 2015 s/d 2024	5.526.491.093,00	3.363.228.191,00	2.819.271.096,00	6.070.448.188,00
9	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2015 s/d 2024	137.812.333,00	6.966.000,00	-	144.778.333,00
10	Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	2022 s/d 2023	49.875.000,00	47.362.100,00	49.875.000,00	47.362.100,00
11	Retribusi Pelayanan Kesehatan (RSUD Sidikalang)	2024	8.009.477.020,00	7.237.775.526,00	8.009.477.020,00	7.237.775.526,00
12	Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	2024	-	650.000,00	-	650.000,00
13	Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	2024	-	88.367.466,00	-	88.367.466,00
14	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Dana Kapitasi JKN pada FKTP (Dinas Kesehatan)	2024	-	12.729.595,00	-	12.729.595,00
15	Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat	2023	52.012.000,00	-	52.012.000,00	-
16	Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi Sumatera Utara	2024	28.521.914.600,00	51.072.791.432,00	37.478.953.445,00	42.115.752.587,00
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	2013 s/d 2023	11.125.000,00	-	11.125.000,00	0,00
		Jumlah	**47.037.493.824,00**	**66.847.593.208,00**	**54.418.059.412,00**	**59.467.027.620,00**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran IX : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
PER 31 DESEMBER 2024

NO	JENIS PAJAK	TAHUN PENGAKUAN	SALDO AKHIR	KUALITAS PIUTANG 2024				JUMLAH PENYISIHAN
				0-12 BULAN	13-36 BULAN	37-60 BULAN	> 60 BULAN	
				LANCAR	KURANG LANCAR	RAGU-RAGU	MACET	
				0,5%	10%	50%	100%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS JASA PERHOTELAN (HOTEL)	2022	736.000,00		73.600,00			73.600,00
		2023	115.000,00		11.500,00			11.500,00
		2024	26.435.954,00	132.179,77				132.179,77
	JUMLAH		**27.286.954,00**	**132.179,77**	**85.100,00**	-	-	**217.279,77**
2	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS JASA PERHOTELAN (LOSMEN)	2021	5.820.000,00			2.910.000,00		2.910.000,00
		2022	1.900.000,00		190.000,00			190.000,00
		2023	5.850.000,00		585.000,00			585.000,00
		2024	17.257.000,00	86.285,00				86.285,00
	JUMLAH		**30.827.000,00**	**86.285,00**	**775.000,00**	**2.910.000,00**	-	**3.771.285,00**
3	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS MAKANAN/MINUMAN (RESTORAN/RUMAH MAKAN)	2018	24.350.000,00				24.350.000,00	24.350.000,00
		2019	43.520.000,00				43.520.000,00	43.520.000,00
		2020	8.350.000,00			4.175.000,00		4.175.000,00
		2021	132.469.000,00			66.234.500,00		66.234.500,00
		2022	198.950.000,00		19.895.000,00			19.895.000,00
		2023	281.500.000,00		28.150.000,00			28.150.000,00
		2024	430.440.145,00	2.152.200,73				2.152.200,73
	JUMLAH		**1.119.579.145,00**	**2.152.200,73**	**48.045.000,00**	**70.409.500,00**	**67.870.000,00**	**188.476.700,73**
4	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN	2018	3.900.000,00				3.900.000,00	3.900.000,00
		2020	896.000,00			448.000,00		448.000,00
		2023	4.112.500,00		411.250,00			411.250,00
		2024	7.740.000,00	38.700,00				38.700,00
	JUMLAH		**16.648.500,00**	**38.700,00**	**411.250,00**	**448.000,00**	**3.900.000,00**	**4.797.950,00**
5	PAJAK AIR TANAH	2024	2.313.055,00	11.565,28				11.565,28
	JUMLAH		**2.313.055,00**	**11.565,28**	-	-	-	**11.565,28**
6	PAJAK REKLAME	2024	1.628.250,00	8.141,25				8.141,25
	JUMLAH		**1.628.250,00**	**8.141,25**	-	-	-	**8.141,25**
7	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	2018	111.731.250,00				111.731.250,00	111.731.250,00
		2020	37.031.850,00			18.515.925,00		18.515.925,00
		2021	316.606.250,00			158.303.125,00		158.303.125,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2022	580.511.965,00		58.051.196,50			58.051.196,50
		2023	621.325.000,00		62.132.500,00			62.132.500,00
		2024	883.674.606,00	4.418.373,03				4.418.373,03
	JUMLAH		**2.550.880.921,00**	**4.418.373,03**	**120.183.696,50**	**176.819.050,00**	**111.731.250,00**	**413.152.369,53**
8	PBB P-2	≤ 2015	1.155.474.328,00				1.155.474.328,00	1.155.474.328,00
		2016	201.867.465,00				201.867.465,00	201.867.465,00
		2017	237.369.226,00				237.369.226,00	237.369.226,00
		2018	354.482.672,00				354.482.672,00	354.482.672,00
		2019	346.150.514,00				346.150.514,00	346.150.514,00
		2020	549.645.077,00			274.822.538,50		274.822.538,50
		2021	724.067.023,00			362.033.511,50		362.033.511,50
		2022	717.460.792,00		71.746.079,20			71.746.079,20
		2023	898.125.063,00		89.812.506,30			89.812.506,30
		2024	885.806.028,00	4.429.030,14				4.429.030,14
	JUMLAH		**6.070.448.188,00**	**4.429.030,14**	**161.558.585,50**	**636.856.050,00**	**2.295.344.205,00**	**3.098.187.870,64**
	JUMLAH PIUTANG PAJAK DAERAH		**9.819.612.013,00**	**11.276.475,19**	**331.058.632,00**	**887.442.600,00**	**2.478.845.455,00**	**3.708.623.162,20**

NO	JENIS RETRIBUSI	TAHUN PENGAKUAN	SALDO AKHIR	KUALITAS PIUTANG 2024				JUMLAH PENYISIHAN
				0-1 BULAN	1-3 BULAN	3-12 BULAN	> 12 BULAN	
				LANCAR 0,5%	KURANG LANCAR 10%	RAGU-RAGU 50%	MACET 100%	
9	RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI	2015	33.306.333,00				33.306.333,00	33.306.333,00
		2022	2.268.000,00		-	-	2.268.000,00	2.268.000,00
		2023	109.204.000,00		-		109.204.000,00	109.204.000,00
	JUMLAH		**144.778.333,00**	**-**	**-**	**-**	**144.778.333,00**	**144.778.333,00**
10	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN (DINAS	2024	47.362.100,00	236.810,50			-	236.810,50
	JUMLAH		**47.362.100,00**	**236.810,50**	**-**	**-**	**-**	**236.810,50**
11	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN (RSUD	2024	7.237.775.526,00	36.188.877,63	-	-	-	36.188.877,63
	JUMLAH		**7.237.775.526,00**	**36.188.877,63**	**-**	**-**	**-**	**36.188.877,63**
	JUMLAH PIUTANG RETRIBUSI DAERAH		**7.429.915.959,00**	**36.425.688,13**	**-**	**-**	**144.778.333,00**	**181.204.021,13**
	JUMLAH PIUTANG PAJAK DAERAH + RETRIBUSI DAERAH		**17.249.527.972,00**	**47.702.163,32**	**331.058.632,00**	**887.442.600,00**	**2.623.623.788,00**	**3.889.827.183,33**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran X : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
PER 31 DESEMBER 2024

No	Komoditas	Tahun	Nilai Dana Bergulir Tahun 2024	Penyisihan Dana Bergulir					Nilai Buku per 31 Desember 2024
				Lancar s.d 1 tahun (0.50%)	Kurang Lancar 1 - 3 tahun (10%)	Diragukan 3 - 5 tahun (50%)	Macet > 5 tahun (100%)	Jumlah	
1	Ubi Jalar Jepang	2006	277.358.900,00	-	-	-	(277.358.900,00)	(277.358.900,00)	-
2	Ubi Jalar Jepang dan Jagung	2007	729.044.220,00	-	-	-	(729.044.220,00)	(729.044.220,00)	-
	Jumlah		**1.006.403.120,00**	**-**	**-**	**-**	**(1.006.403.120,00)**	**(1.006.403.120,00)**	**-**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran XI: Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang: Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

PER 31 DESEMBER 2024

(dalam rupiah)

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan awal tahun	Penyertaan Modal tahun ini	Koreksi	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun ini	Jumlah Modal (Investasi) yang diterima kembali Tahun ini	Dikurangi Akumulasi Kerugian sampai dengan akhir tahun ini	Jumlah Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7+8+9	11	12	13	14	15 = 10-13-14
1		PT. BANK SUMUT	Perda No. 02 Tahun 1999 dan Perda No 6 Tahun 2021	Saham	50.492.840.000,00	50.492.840.000,00	-	-	50.492.840.000,00	-	11.964.954.686,50	-	-	50.492.840.000,00
2	1998	PERUMDA AIR MINUM LAE NCIHO	Perda No. 5 Tahun 2021	Non Saham	58.447.968.627,00	58.447.968.627,00	3.025.000.000,00		61.472.968.627,00	-	-		(32.618.366.100)	28.854.602.527,00
3	2010	PD. PASAR	Perda No. 03 Tahun 2009	Non Saham	52.175.634.237,00	52.175.634.237,00	-		52.175.634.237,00	-	-	-	(23.974.837.623)	28.200.796.614,00
		Jumlah			**161.116.442.864,00**	**161.116.442.864,00**	**3.025.000.000,00**	**-**	**164.141.442.864,00**	**-**	**11.964.954.686,50**	**-**	**(56.593.203.723,00)**	**107.548.239.141,00**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran XII : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi Tahun 2024		Saldo Per 31 Desember 2024
			Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	393.166.988.572,62	1.032.117.076,00	587.236.376,00	393.611.869.272,62
2	Alat -alat Besar	38.000.879.200,44	1.082.363.000,00	321.458.825,62	38.761.783.374,82
3	Alat -alat Angkutan	71.319.101.492,66	3.627.034.500,00	1.825.400.500,00	73.120.735.492,66
4	Alat -alat Bengkel Dan Alat Ukur	7.430.449.362,01	225.242.999,95	6.600.000,00	7.649.092.361,96
5	Alat -alat Pertanian	2.988.994.749,00	481.723.700,00	9.786.000,00	3.460.932.449,00
6	Alat -alat Kantor dan Rumah Tangga	124.293.783.070,50	5.285.814.427,00	2.751.843.933,55	126.827.753.563,95
7	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	11.998.958.537,93	304.301.265,00	128.483.535,89	12.174.776.267,04
8	Alat -alat Kedokteran dan Kesehatan	102.373.695.442,37	7.236.574.005,00	8.065.413.249,08	101.544.856.198,29
9	Alat -alat Laboratorium	53.575.992.399,21	1.115.168.990,00	481.951.591,45	54.209.209.797,76
10	Alat Persenjataan	549.518.596,64	-	-	549.518.596,64
11	Komputer	74.482.153.828,33	4.015.879.837,00	1.315.625.929,06	77.182.407.736,27
12	Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	45.121.833,00	0,00	0,00	45.121.833,00
15	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00
16	Alat Keselamatan Kerja'	410.148.528,00	189.266.000,00	1.050.000,00	598.364.528,00
17	Alat Peraga	16.350.000,00	0,00	0,00	16.350.000,00
18	Peralatan Proses/Produksi	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00
19	Rambu-Rambu	12.526.878.306,43	36.691.000,00	36.691.000,00	12.526.878.306,43
20	Peralatan Olah Raga	2.286.369.714,53	55.572.200,00	45.893.000,00	2.296.048.914,53
21	Bangunan Gedung	781.923.462.835,24	29.512.752.245,07	8.052.121.644,65	803.384.093.435,66
22	Monumen	14.655.673.788,84	0,00	0,00	14.655.673.788,84
23	Bangunan Menara	445.152.547,00	0,00	0,00	445.152.547,00

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi Tahun 2024		Saldo Per 31 Desember 2024
			Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6
24	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.338.119.130,11	647.113.000,00	647.113.000,00	1.338.119.130,11
25	Jalan dan Jembatan	1.502.172.475.727,41	77.402.864.544,00	12.761.083.481,96	1.566.814.256.789,45
26	Bangunan air	244.538.331.427,94	14.333.662.494,53	1.130.971.474,88	257.741.022.447,59
27	Instalasi	65.990.703.136,91	2.290.000.000,00	-	68.280.703.136,91
28	Jaringan	24.970.139.876,00	2.731.068.650,00	1.885.834.000,00	25.815.374.526,00
29	Buku dan Kepustakaan	110.701.420.805,93	8.611.220.358,00	528.952.697,00	118.783.688.466,93
30	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.446.604.137,24	121.969.600,00	76.580.600,00	1.491.993.137,24
31	Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Tanaman	379.458.198,80	-	0,00	379.458.198,80
34	Konstruksi dalam Pengerjaan	4.588.300.394,26	12.446.320.312,00	4.810.817.364,53	12.223.803.341,73
	Jumlah	**3.648.619.765.639,35**	**172.790.920.203,55**	**45.477.108.203,67**	**3.775.933.577.639,23**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran XIII : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
PER 31 DESEMBER 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan Per 31 Desember 2024	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024	Nilai Buku Per 31 Desember 2024
1	2	3	4	5
1	Tanah	393.611.869.272,62	-	393.611.869.272,62
2	Peralatan dan Mesin	510.968.369.420,35	(444.367.477.152,14)	66.600.892.268,21
3	Gedung dan Bangunan	819.823.038.901,61	(368.210.139.109,13)	451.612.899.792,48
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.918.651.356.899,95	(1.473.456.857.094,31)	445.194.499.805,64
5	Aset Tetap Lainnya	120.655.139.802,97	-	120.655.139.802,97
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	12.223.803.341,73	-	12.223.803.341,73
	Jumlah	**3.775.933.577.639,23**	**(2.286.034.473.355,58)**	**1.489.899.104.283,65**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran XIV : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DAFTAR KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP)
PER 31 DESEMBER 2024

NO	NAMA PEKERJAAN	REKANAN	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	REALISASI PEMBAYARAN S/D 31 DESEMBER 2024				PROGRES PEKERJAAN S/D 31 DESEMBER 2024				KETERANGAN
					KAPITALISASI KONSULTAN	NILAI PEMBAYARAN	NILAI + KAPITALISASI KONSULTAN	%	KAPITALISASI KONSULTAN	NILAI PEKERJAAN	NILAI + KAPITALISASI KONSULTAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9	10	11	12 (10+11)	13	14
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG													
1	Perkerasan Jalan Jurusan Liang Jering-Siudangudang Kec. Tanah Pinem	CV. Bita Prima Breal Sach/ Sahat Hot Maringan Banurea	44/PPK-PJJP-DAU/2012	248.200.000,00	-	153.213.860,00	153.213.860,00	61,73	-	153.213.860,00	153.213.860,00	61,73	Terjadi bencana longsor sepanjang jalan menuju lokasi pekerjaan dalam masa kontrak sehingga mobilisasi untuk pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dilakukan.
2	Perkerasan Jalan Jurusan Batu Marsaong-Lubuk Raya Kec. Gunung Sitember	UD. Pagaran/ Budi Ginting	55/PPK-PJJP-DAU/2013	268.180.000,00	-	198.163.566,00	198.163.566,00	73,89	-	198.163.566,00	198.163.566,00	73,89	Pihak rekanan tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaan karena kondisi curah hujan yang tinggi yang menyebabkan jalan masuk menuju lokasi pekerjaan sulit dilalui dan tidak memungkinkan lagi dilakukan mobilisasi peralatan dan material.
3	Perkerasan Jalan Jurusan Pispi Lahan Pertanian Kec. Pegagan Hilir	CV. TIOP/ Stefanus Leonardo Sihombing	68/PPK-PJJP-DAU-P.APBD/2015	392.000.000,00	7.247.501,00	170.500.400,00	177.747.901,00	43,50	7.247.501,00	170.500.400,00	177.747.901,00	43,50	Pihak rekanan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak sampai dengan berakhirnya masa waktu kontrak
4	Pengaspalan Jalan Jurusan Tombak Simbolon - Aek Sitambok Kec. Parbuluan	CV. Kasea/ Anna Eriwaty Gurning	47/PPK-PJJP-DAU-P.APBD/2015	596.860.000,00	7.908.168,00	179.058.000,00	186.966.168,00	30,00	7.908.168,00	179.058.000,00	186.966.168,00	30,00	Pihak rekanan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak sampai dengan berakhirnya masa waktu kontrak
5	Revisi DED Gedung DPRD Kabupaten Dairi	CV. Uliutama/Ir. Andar Sitohang	03.11/PPK/RPBPBS-DAU/2020	99.748.000,00	3.769.833,73	99.748.000,00	103.517.833,73	100,00	3.769.833,73	99.748.000,00	103.517.833,73	100,00	Dokumen perencanaan bangunan gedung.
6	Peningkatan Jalan Jrs. Sp. Jalan PLTA Renun - Lae Mbontar, Link. 288, Kec. Parbuluan	PT. KARYA MURNI PERKASA	600.1.9/07.01/PPK/RJ DAK/2024	11.956.078.015,00	291.428.675,00	10.563.194.928,00	10.854.623.603,00	88,35	291.428.675,00	10.563.194.928,00	10.854.623.603,00	88,35	Pelaksanaan pekerjaan melampaui tahun anggaran berjalan
	Sub Jumlah			13.561.066.015,00	310.354.177,73	11.363.878.754,00	11.674.232.931,73		310.354.177,73	11.363.878.754,00	11.674.232.931,73		
DINAS PENDIDIKAN													
1	Pembangunan Toilet (Jamban) beserta Sanitasi SD Negeri 030403	CV.JUARA TOBA M.	07/PPK-DISDIK-SD.02.15/XI/2023/PP SD-RRK/DISDIK/2023	152.958.000,00	-	76.479.000,00	76.479.000,00	50,00	-	76.479.000,00	76.479.000,00	50,00	
	Sub Jumlah			152.958.000,00	-	76.479.000,00	76.479.000,00		-	76.479.000,00	76.479.000,00		

NO	NAMA PEKERJAAN	REKANAN	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	REALISASI PEMBAYARAN S/D 31 DESEMBER 2024				PROGRES PEKERJAAN S/D 31 DESEMBER 2024				KETERANGAN
					KAPITALISASI KONSULTAN	NILAI PEMBAYARAN	NILAI + KAPITALISASI KONSULTAN	%	KAPITALISASI KONSULTAN	NILAI PEKERJAAN	NILAI + KAPITALISASI KONSULTAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9	10	11	12 (10+11)	13	14
DINAS KESEHATAN													
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan (REHAB PUSTU KEMPAWA)	CV. BIO BIO PUTRA JANGGA	: 01/SPK/ PUSTU-KEMPAWA/PPK-DINKES/2024	223.736.575,00	-	190.735.431,00	190.735.431,00	85,00	-	190.735.431,00	190.735.431,00	85,00	Pelaksanaan pekerjaan melampaui tahun anggaran berjalan
	Sub Jumlah			**223.736.575,00**	**-**	**190.735.431,00**	**190.735.431,00**		**-**	**190.735.431,00**	**190.735.431,00**		
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA													
1	Pengadaan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum /Totem Geopark)	CV. DANPRULI ARTHA UTAMA	03/SP-PDPK/BMBFU-TG/DAK/VII/2024 Tgl 20 JULI 2024	988.510.000,00	-	247.127.500,00	247.127.500,00	25,00		53.153.707,00	53.153.707,00	5,38	Pekerjaan Tidak Selesai 100% karena adanya gangguan masyarakat setempat yang tidak mendukung adanya pembangunan
2	Pengadaan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum /Jalur Pejalan Kaki)	CV. WIRASENA MANDIRI	06/SP-PDPK/BMBFU-JPKP/VII/2024 Tgl 20 JULI 2024	482.255.000,00		120.563.750,00	120.563.750,00	25,00		118.148.588,00	118.148.588,00	24,99	Pekerjaan Tidak Selesai 100% karena adanya gangguan masyarakat setempat yang tidak mendukung adanya pembangunan
3	Pengadaan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum /Pekerjaan Media Tanam)	CV. EUREKA LASADA	07/SP-PDPK/BMBFU-PMT/VII/2024 Tgl 20 JULI 2024	137.050.000,00		34.262.500,00	34.262.500,00	25,00		8.256.126,00	8.256.126,00	6,02	Pekerjaan Tidak Selesai 100% karena adanya gangguan masyarakat setempat yang tidak mendukung adanya pembangunan
4	Pengadaan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/KotaBelanja Modal Taman (Lampu	CV. HELN	04/SP-PDPK/BMT-LT/VII/2024 Tgl 19 JULI 2024	280.626.000,00		70.156.500,00	70.156.500,00	25,00		20.938.210,00	20.938.210,00	7,42	Pekerjaan Tidak Selesai 100% karena adanya gangguan masyarakat setempat yang tidak mendukung adanya pembangunan
5	Pengadaan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Belanja Modal Pilar/Tugu Tanda Lainnya /Gapura/Gerbang Utama Geopark)	CV. GRAHA PERSADA ABADI	01/SP-PDPK/BMP-GGUG/DAK/VII/2024 Tgl 20 JULI 2024	596.396.000,00		149.099.000,00	149.099.000,00	25,00		78.461.705,00	78.461.705,00	1,52	Pekerjaan Tidak Selesai 100% karena adanya gangguan masyarakat setempat yang tidak mendukung adanya pembangunan
6	Pengadaan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Belanja Modal Rambu Tak Bersuar /Papan Interpretasi Geopark)	CV. SARI KASIH	08/SP-PDPK/BMRTB-PIG/DAK/VII/2024 Tgl 20 JULI 2024	124.500.000,00		31.125.000,00	31.125.000,00	25,00		2.385.938,00	2.385.938,00	1,92	Pekerjaan Tidak Selesai 100% karena adanya gangguan masyarakat setempat yang tidak mendukung adanya pembangunan

NO	NAMA PEKERJAAN	REKANAN	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	REALISASI PEMBAYARAN S/D 31 DESEMBER 2024				PROGRES PEKERJAAN S/D 31 DESEMBER 2024				KETERANGAN
					KAPITALISASI KONSULTAN	NILAI PEMBAYARAN	NILAI + KAPITALISASI KONSULTAN	%	KAPITALISASI KONSULTAN	NILAI PEKERJAAN	NILAI + KAPITALISASI KONSULTAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9	10	11	12 (10+11)	13	14
7	Pengadaan Pemeliharan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Belanja Modal Tanaman /Penanaman Pohon Tinggi 2-2,5m)	CV. EUREKA LASADA	09/SP-PDPK/BMT-PPT/DAK/VII/2024 Tgl 20 JULI 2024										
	Pengadaan Pemeliharan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Belanja Modal Tanaman /Penanaman Semak Penutup Tanah)			148.800.000,00		37.200.000,00	37.200.000,00	25,00		1.011.705,00	1.011.705,00	0,68	Pekerjaan Tidak Selesai 100% karena adanya gangguan masyarakat setempat yang tidak mendukung adanya pembangunan
	Pengadaan Pemeliharan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Belanja Modal Tanaman /Penanaman Rumput)												
	Sub Jumlah			2.758.137.000,00	-	689.534.250,00	689.534.250,00		-	282.355.979,00	282.355.979,00		
	Jumlah			16.695.897.590,00	310.354.177,73	12.320.627.435,00	12.630.981.612,73		310.354.177,73	11.913.449.164,00	12.223.803.341,73		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran XV : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024

No.	Jenis Aset Lainnya	Per 31 Desember 2023 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Per 31 Desember 2024 Rp
1.	Tuntutan Ganti Rugi	856.706.980,20	239.684.290,96	34.086.672,00	1.062.304.599,16
2.	Aset Tak Berwujud	2.797.982.505,30	-	-	2.797.982.505,30
3.	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.453.614.749,65)	(156.911.595,65)	-	(2.610.526.345,30)
4.	Aset Lain-lain	25.736.653.235,60	8.491.607.981,65	1.975.631.526,84	32.252.629.690,41
5.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(16.507.542.615,05)	(8.053.145.699,81)	(1.963.638.560,17)	(22.597.049.754,69)
6.	Aset Lainnya-TDF	2.601.622.000,00	178.795.000,00	2.601.622.000,00	178.795.000,00
Jumlah Aset Lainnya		**13.031.807.356,40**	**700.029.977,15**	**2.647.701.638,67**	**11.084.135.694,88**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran XVI : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024

(dalam rupiah)

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa dana yang belum dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran XVII : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2024

No.	Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Per 31 Desember 2023 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Per 31 Desember 2024 Rp
1.	Bagian Lancar Utang Bunga Pinjaman	-	-	-	-
2.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	97.831.118,68	140.776.648,00	97.831.118,68	140.776.648,00
3.	Utang Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
4.	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri	-	-	-	-
5.	Pendapatan Diterima Dimuka	138.608.011,08	193.159.799,56	138.608.011,08	193.159.799,56
6.	Utang Belanja	12.752.438.070,88	21.413.260.515,00	12.752.438.070,88	21.413.260.515,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**12.988.877.200,64**	**21.747.196.962,56**	**12.988.877.200,64**	**21.747.196.962,56**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran XVIII : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2024

No.	Jenis Kewajiban Jangka Panjang	Per 31 Desember 2023 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Per 31 Desember 2024 Rp
		-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran XIX : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Jumlah Realisasi Tahun n-2, Tahun n-1, Tahun n			Jumlah Akumulasi Realisasi s/d Akhir Tahun n (Rp)	Jumlah yang Dianggarkan dalam APBD Tahun Berikutnya (Rp)
			Realisasi Tahun n-2 (Rp)	Realisasi Tahun n-1 (Rp)	Realisasi Tahun n (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8
					-	-	-
JUMLAH ...			-	-	-	-	-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran XX.1 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) PERUSAHAAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024

(dalam rupiah)

NO	PERUSAHAAN DAERAH	SUMBER	STATUS	AKTIVA LANCAR	AKTIVA TIDAK LANCAR	AKTIVA LAINNYA	TOTAL AKTIVA	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	KEWAJIBAN LAIN-LAIN	TOTAL KEWAJIBAN	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYDS	EKUITAS LAINNYA	LABA DITAHAN	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	% SAHAM DAERAH	KEPEMILIKAN DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12=9+10+11	13	14	15	16	17	18=12+13+14+15+16+17	19	20
1	**Bidang Air Bersih**																		
	1. Perumda Air Minum Lae Neiho	Laporan Keuangan (Audited)		13.177.919.673	15.333.535.395	1.104.990.643	29.616.445.711	761.843.184	-	-	761.843.184	55.103.049.681	3.025.000.000	1.328.094.586	2.016.824.360	(32.618.366.100)	29.616.445.711	100,00%	61.472.968.627
2	**Bidang Perdagangan**																		
	1. PD Pasar Kabupaten Dairi	Laporan Keuangan (Audited)		3.685.184.084	24.628.434.346	-	28.313.618.430	112.821.816	-	-	112.821.816	52.175.634.237	-	-	-	(23.974.837.623)	28.313.618.430	100,00%	52.175.634.237
			Jumlah	16.863.103.757	39.961.969.741	1.104.990.643	57.930.064.141	874.665.000	-	-	874.665.000	107.278.683.918	3.025.000.000	1.328.094.586	2.016.824.360	(56.593.203.723,00)	57.930.064.141	100,00%	113.648.602.864

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN SAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga

Lampiran XX.2 : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) PERUSAHAAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024

(dalam rupiah)

NO	PERUSAHAAN DAERAH	SUMBER	STATUS	PENDAPATAN	BELANJA	LABA / RUGI
1	2	3	4	5	6	7=5-6
1	**Bidang Air Bersih** 1. Perumda Air Minum Lae Nciho	Laporan Keuangan (Audited)		16.832.766.161,00	17.347.799.844,00	(515.033.683,00)
2	**Bidang Perdagangan** 1. PD. Pasar Dairi	Laporan Keuangan (Audited)		3.815.671.449,00	5.732.305.133,00	(1.916.633.684,00)
			Jumlah	**20.648.437.610,00**	**23.080.104.977,00**	**(2.431.667.367,00)**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd.

Vickner Sinaga